RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

TAHUN 2025-2029

TANAH LAUT

TUNTUNG PANDANG

KABUPATEN TANAH LAUT

SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2034 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor19),
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunanPerangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DAN

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
14. Visi Pembangunan adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
18. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
19. Target adalah batas atau besaran atau status atau ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Dalam hal ini target adalah berdasarkan indikator yang ditetapkan.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
22. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
23. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai:
   a. pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD dan Renja PD;
   b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
   c. pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
   d. pedoman dalam penyusunan RPJM Desa.

(3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan Dokumen RPJMD yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 3

(1) Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut adalah Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan.

(2) Untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kabupaten Tanah Laut

mengusung 3 tiga) Misi Pembangunan Jangka Menengah, meliputi:

a. membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan nilai-nilai agama;
b. membangun ekonomi inklusif untuk penurunan kemiskinan dengan infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup berkualitas; dan
c. memantapkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis.

BAB IV
PENETAPAN RPJMD

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2025 – 2029.
(2) Penetapan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
   a. RPJPN Tahun 2025 - 2045;
   b. RPJMN Tahun 2025 - 2029;
   c. RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2045;
   d. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029; dan
   e. RPJPD Kabupaten Tahun 2025 - 2045.

Pasal 5

(1) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran umum kondisi Daerah;
   c. Visi, Misi, dan Program prioritas Pembangunan Daerah;
   d. Program PD dan Kinerja penyelengaaran Pemerintah Daerah; dan
   e. Penutup.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah.
(4) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap indikator kinerja dalam RPJMD disampaikan kepada DPRD.

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati melalui PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan Daerah menyempurnakan RPJMD.
(2) Tata cara penyempurnaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan jika:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, bencana non alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian Pembangunan Daerah.
(3) Bentuk peran serta Masyarakat/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. konsultasi publik;
   b. musyawarah;
   c. kemitraan;
   d. penyampaian aspirasi;
   e. pengawasan; dan/atau
   f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

g. perundang-undangan.

(4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 10

Pelaksanaan RPJMD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat:

a. penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. kebijakan umum APBD; atau
c. prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 12

RPJMD dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Kebijakan Daerah terkait dengan perencanaan Pembangunan Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sepanjang sesuai dan belum ditetapkan dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

(2) Dalam hal dilakukan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah mengenai Perangkat Daerah, penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam dokumen RPJMD ini, dibaca dan dimaknai sebagai Perangkat Daerah yang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TANAH LAUT,

ttd.

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

ISMAIL FAHMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR: (6-63/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program SKPD dan lintas SKPD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 80

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **II**

DAFTAR TABEL ..... **III**

DAFTAR GAMBAR ..... **XI**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum I-2

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-8

1.4 Maksud dan Tujuan I-10

1.4.1 Maksud I-10

1.4.2 Tujuan I-11

1.5 Sistematikan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 ..... I-11

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **II-1**

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-81

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-131

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-159

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal II-193

2.1.6 Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan BUMD II-215

2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah II-220

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu II-221

2.2.2Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah II-263

2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan II-282

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II-291

2.3.1 Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut II-291

2.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tanah Laut II-294

2.3.3 Isu Strategis Daerah II-346

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH.....III-1

3.1 Visi.....III-1

3.2 Misi.....III-4

3.3 Tujuan dan Sasaran III-7

3.3.1 Tujuan I : Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul

dan Berdaya Saing III-7

3.3.2 Tujuan II : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.....III-9

3.3.3 Tujuan III : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan.....III-10

3.3.4 Tujuan IV : Meningkatnya Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani III-11

3.4 Strategi Pembangunan Daerah.....III-18

3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah III-19

3.6 Program Prioritas Pembangunan Daerah.....III-25

3.7 Implementasi Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati.....III-59

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-1

4.1 Program Perangkat Daerah.....IV-1

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....IV-74

4.2.1 Indikator Kinerja Utama IV-74

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah.....IV-77

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci.....IV-79

BAB V PENUTUP V-1

5.1 Kesimpulan Penting Substansial.....V-1

5.2 Kaidah Pelaksanaan.....V-2

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah.....V-4

5.4 Penutup.....V-5

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ..... II-2

Tabel 2. 2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut II-4

Tabel 2. 3 Luas Wilayah Kabupaten Tanah Laut Menurut Kelas Ketinggian II-5

Tabel 2. 4 Luas Wilayah Kabupaten Tanah Laut Menurut Kondisi Kelerengan II-6

Tabel 2. 5 Suhu Udara Minimum, Rata-Rata, dan Maksimum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ..... II-10

Tabel 2. 6 Tingkat Kelembaban Minimum, Rata-Rata, dan Maksimum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ..... II-10

Tabel 2. 7 Kecepatan Angin Minimum, Rata-Rata, dan Maksimum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ..... II-12

Tabel 2. 8 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ..... II-13

Tabel 2. 9 Pembagian satuan wilayah sungai di Kabupaten Tanah Laut. II-18

Tabel 2. 10 Penggunaan Lahan Kabupaten Tanah Laut II-24

Tabel 2. 11 Daftar Pariwisata di Kabupaten Tanah Laut II-27

Tabel 2. 12 Jumlah Wisatawan Domestik dan Wisatawan Asing Menurut Bulan di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-29

Tabel 2. 13 Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-31

Tabel 2. 14 Luas Panen dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-32

Tabel 2. 15 Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-32

Tabel 2. 16 Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-33

Tabel 2. 17 Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah, Kacang Hijau dan Ubi Jalar di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-34

Tabel 2. 18 Luas Panen Tanaman Sayuran (Ha) Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-35

Tabel 2. 19 Jumlah Produksi Tanaman Sayuran (Kuintal) Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-36

Tabel 2. 20 Jumlah Produksi Buah-Buahan (Kuintal) Menurut Kecamatan dan Jenis Buah-Buahan di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-39

Tabel 2. 21 Jumlah Produksi Buah-Buahan (Pohon) Menurut Kecamatan dan Jenis Buah-Buahan di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-40

Tabel 2. 22 Luas Panen Tanaman Biofarmaka (kg) Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-41

Tabel 2. 23 Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka (m2) Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-42

Tabel 2. 24 Perkembangan Luas Areal Perkebunan Rakyat (Ha) Berdasarkan Jenis Komoditi di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-43

Tabel 2. 25 Perkembangan Jumlah Produksi (ton) Berdasarkan Jenis Komoditi di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-43

Tabel 2. 26 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Tanah Laut (ekor), 2024 ..... II-44

Tabel 2. 27 Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Tanah Laut (ekor), 2024 ..... II-46

Tabel 2. 28 Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Kecamatan dan Jenis Hewan di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-47

Tabel 2. 29 Produksi Perikanan di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 (ton) II-47

Tabel 2. 30 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 ..... II-51

Tabel 2. 31 Indeks Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 ..... II-52

Tabel 2. 32 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Pelanggan di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-53

Tabel 2. 33 Jumlah Pelanggan, Produksi, dan Penggunaan Air Minum yang Terjual Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-55

Tabel 2. 34 Data Rumah Tangga Terhadap Air Minum Kalimantan Selatan 2020-2024 ..... II-56

Tabel 2. 35 Daya terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT PLN di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-57

Tabel 2. 36 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Tipe KWH Meter di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-57

Tabel 2. 37 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah, 2020-2024 ..... II-60

Tabel 2. 38 Status Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar (%), 2020-2024 ..... II-61

Tabel 2. 39 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Kalimantan Selatan (%) 2020-2024 ..... II-61

Tabel 2. 40 Jumlah Timbulan Sampah di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2024 ..... II-62

Tabel 2. 41 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan Tahun 2024 ..... II-65

Tabel 2. 42 Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan Tahun 2024 ..... II-67

Tabel 2. 43 Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Banjir dan Angin Puting Beliung Menurut Kecamatan Tahun 2024 ..... II-67

Tabel 2. 44 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Laut II-69

Tabel 2. 45 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-69

Tabel 2. 46 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan II-70

Tabel 2. 47 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut 2020-2024 ..... II-77

Tabel 2. 48 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk per/KM2 Kabupaten Tanah Laut Menurut Kecamatan II-78

Tabel 2. 49 Jumlah Penduduk MenurutJenis Kelamin Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-79

Tabel 2. 50 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ..... II-79

Tabel 2. 51 Proyeksi Jumlah Penduduk Kab Tanah Laut Tahun 2025-2029 ..... II-80

Tabel 2. 52 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-82

Tabel 2. 53 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha II-83

Tabel 2. 54 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanah Laut (%), 2020-2024 ..... II-85

Tabel 2. 55 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-91

Tabel 2. 56 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-91

Tabel 2. 57 Persentase Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020-2024 ..... II-93

Tabel 2. 58 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 (%) II-94

Tabel 2. 59 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-95

Tabel 2. 60 Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-95

Tabel 2. 61 Perkembangan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2020- 2024 ..... II-97

Tabel 2. 62 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ..... II-99

Tabel 2. 63 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ..... II-101

Tabel 2. 64 Prevalensi Stunting Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-103

Tabel 2. 65 Hasil Pencapaian Program Imunisasi Pada Balita Menurut Jenis Vaksinasi di Kabupaten Tanah Laut 2024 ..... II-105

Tabel 2. 66 Pasangan Usia Subur (PUS) dan Keluarga Berencana (KB), 2024 ..... II-105

Tabel 2. 67 Angka Melek Huruf Usia 15+ di Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-106

Tabel 2. 68 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-108

Tabel 2. 69 AngkaHarapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut II-108

Tabel 2. 70 Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Tanah Laut2020-2024 ..... II-110

Tabel 2. 71 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tanah Laut II-113

Tabel 2. 72 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tanah Laut II-113

Tabel 2. 73 Status Pendidikan Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas di Kabupaten Tanah Laut II-114

Tabel 2. 74 Indikator Kualifikasi Guru dan Sekolah II-117

Tabel 2. 75 Jumlah Atlet dan Jumlah Medali yang diraih oleh atlet Kabupaten Tanah Laut, 2020-2023 ..... II-123

Tabel 2. 76 Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-124

Tabel 2. 77 Kesenian yang diadakan di Kabupaten Tanah Laut menurut Kecamatan, 2024 ..... II-124

Tabel 2. 78 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten Tanah Laut 2021-2023 ..... II-125

Tabel 2. 79 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2023 ..... II-126

Tabel 2. 80 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-127

Tabel 2. 81 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-128

Tabel 2. 82 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-130

Tabel 2. 83 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dependency Ratio Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-133

Tabel 2. 84 Angka Beban Tanggungan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2024 ..... II-134

Tabel 2. 85 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tanah Laut (%), 2020-2024 ..... II-137

Tabel 2. 86 Jumlah Hotel dan Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-140

Tabel 2. 87 Jumlah Kantor Pos, Rumah Pos, dan Agen Pos, 2024 ..... II-141

Tabel 2. 88 Persentase Penduduk yang Mengakses Internet dalam 3 bulan Terakhir, 2020-2024 ..... II-142

Tabel 2. 89 PDRB Kab Tanah Laut Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar) II-143

Tabel 2. 90 Investasi di Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-144

Tabel 2. 91 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan, 2020-2024 ..... II-145

Tabel 2. 92 Perkembangan Status Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 ..... II-150

Tabel 2. 93 Tren Pertumbuhan Desa Mandiri di Kabupaten Tanah Laut II-151

Tabel 2. 94 Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran (%)

Kabupaten Tanah Laut, 2024 ..... II-153

Tabel 2. 95 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2024 ..... II-160

Tabel 2. 96 Jumlah Tindak Pidana Kejahatan yang Masuk di

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-161

Tabel 2. 97 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 ..... II-162

Tabel 2. 98 Pencapaian Kinerja Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 ..... II-191

Tabel 2. 99 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 ..... II-193

Tabel 2. 100 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Tahun 2024 ..... II-194

Tabel 2. 101 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 2024 ..... II-197

Tabel 2. 102 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat 2024 ..... II-199

Tabel 2. 103 Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2024 ..... II-200

Tabel 2. 104 Pencapaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran 2024 ..... II-201

Tabel 2. 105 Pencapaian SPM Bidang Sosial Kab. Tanah Laut 2024 ..... II-202

Tabel 2. 106 Kinerja PT BPR Tanah Laut II-218

Tabel 2. 107 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 ..... II-222

Tabel 2. 108 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanah Laut dari Tahun 2020-2024 ... II-227

Tabel 2. 109 Proporsi Realisasi PAD Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-228

Tabel 2. 110 Proporsi Pendapatan Lainnya Kabupaten Tanah Laut

2020-2024 ..... II-236

Tabel 2. 111 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut

2020-2024 ..... II-239

Tabel 2. 112 Perkembangan Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah (Rp Juta), 2020-2024 ..... II-247

Tabel 2. 113 Realiasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-249

Tabel 2. 114 Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Rp), 2021-2024 ..... II-252

Tabel 2. 115 Pertumbuhan pada Setiap Komponen Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut II-254

Tabel 2. 116 Analisis Rasio Neraca Daerah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 .... II-256

Tabel 2. 117 Proporsi Realisasi Belanja Daerah (%), 2020-2023 ..... II-265

Tabel 2. 118 Penutup Defisit Riil Anggaran (Rp), 2020-2024 ..... II-268

Tabel 2. 119 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahunan Berkenaan (Rp) II-270

Tabel 2. 120 Proyeksi Pendapatan Daerah (Rp), 2025-2029 ..... II-283

Tabel 2. 121 Kebijakan dan Proyeksi Daerah II-285

Tabel 2. 122 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah II-287

Tabel 2. 123 Perhitungan Kerangka Pendanaan II-289

Tabel 2. 124 Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terhadap RPJMD II-294

Tabel 2. 125 Keselarasan antara RPJMN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045 ..... II-355

Tabel 2. 126 Keselarasan Indikator Makro Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabuoaten Tanah Laut 2022-2025 ..... II-359

Tabel 2. 127 Target Indikator Makro Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2030 ..... II-362

Tabel 2. 128 Isu Strategis Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ..... II-363

Tabel 2. 129 Isu Strategis terhadap Misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 ..... II-387

Tabel 3. 1 Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 ..... III-14

Tabel 3. 2 . Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut III-19

Tabel 3. 3 Pemetaan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut III-20

Tabel 3. 4 Program Prioritas dalam Rangka Mendukung Visi Misi, Tujuan dan Sasaran III-26

Tabel 3. 5 Integrasi Janji Politis dengan Program Nomenklatur III-60

Tabel 3. 6 Implementasi Janji Politik III-63

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah IV-2

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama IV-74

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah IV-77

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci IV-80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan I-10

Gambar 2. 1 Wilayah administratif Kabupaten Tanah laut II-3

Gambar 2. 2 Peta Garis Pantai dan Hidrologi Kab Tanah Laut II-8

Gambar 2. 3 Peta Formasi Geologi di Kabupaten Tanah Laut II-15

Gambar 2. 4 Peta Hidrologi Kabupaten Tanah Laut II-17

Gambar 2. 5 Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah II-22

Gambar 2.6 Populasi Sapi Potong dan Kambing di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ... II-45

Gambar 2. 7 Presentase Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap II-48

Gambar 2. 8 Presentase Volume dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya II-49

Gambar 2.9 Sembilan Indikator II-51

Gambar 2. 10 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-59

Gambar 2. 11 Peta Risiko Bencana Banjir Kab Tanah Laut II-66

Gambar 2. 12 Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Tanah Laut (Jiwa), 2020-2024 ..... II-77

Gambar 2. 13 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, 2020-2024 ..... II-84

Gambar 2. 14 PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Laut Atas Harga Belaku, Tahun 2020-2024 ..... II-87

Gambar 2. 15 Angka Gini Rasio Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-88

Gambar 2. 16 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-89

Gambar 2. 17 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Tanah Laut 2020-2023 ..... II-102

Gambar 2. 18 Grafik Data Kependudukan Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 ..... II-114

Gambar 2. 19 Penduduk 15 Tahun ke Atas dan Kepemilikan Ijazah Tertinggi di Kabupaten Tanah Laut 2024 ..... II-117

Gambar 2. 20 Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ..... II-119

Gambar 2. 21 Kepemilikan Asuransi Kesehatan Penduduk Tahun 2024 ..... II-120

Gambar 2. 22 Presentase Rumah Tangga yang Memiliki ata Menerima Jaminan Sosial Tahun 2024 ..... II-121

Gambar 2. 23 Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-132

Gambar 2. 24 PDRB Kabupaten Tanah Laut ADHK dan ADHB Tahun 2020-2024 ..... II-136

Gambar 2. 25 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-139

Gambar 2. 26 Perkembangan Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Tanah Laut (Ribu Rp/Tahun) 2020-2024 ..... II-155

Gambar 2. 27 Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 ..... II-156

Gambar 2. 28 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-157

Gambar 2. 29 Capaian Misi 1 ..... II-163

Gambar 2.30 Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah II-164

Gambar 2. 31 Capaian Angka Harapan Hidup II-166

Gambar 2.32 Capaiaan Pelayanan Publik II-167

Gambar 2.33 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi II-173

Gambar 2.34 Capaian Angka Kemiskinan II-179

Gambar 2.35 Capaian Pertumbuhan Ekonomi II-180

Gambar 2.36 Capaian Aspek Sosial dan Ekonomi Daerah II-185

Gambar 2. 37 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp Milyar), 2020-2024 ..... II-224

Gambar 2. 38 Grafik Rata-Rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-226

Gambar 2.39 Grafik Realisasi dan Pertumbuhan PAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 ..... II-229

Gambar 2. 40 Grafik Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-230

Gambar 2. 41 Grafik Realisasi dan Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-231

Gambar 2. 42 Grafik Realisasi dan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-233

Gambar 2. 43 Grafik Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Lain-lain Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-234

Gambar 2. 44 Grafik Realisasi dan Pertumbuhan TKDD Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-235

Gambar 2. 45 Grafik Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Lainnya Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-238

Gambar 2. 46 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-240

Gambar 2. 47 Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 . II-242

Gambar 2. 48 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-243

Gambar 2. 49 Proporsi Belanja Modal terhadap Laju Pertumbuhan Kabupaten Tanah Laut 2020-2024 ..... II-245

Gambar 2. 50 Ratio Rasio Lancar pada Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 ..... II-259

Gambar 2. 51 Rasio Quick pada Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 ..... II-260

Gambar 2. 52 Rasio Total Hutang pada Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 ..... II-261

Gambar 2. 53 Total Hutang dengan Modal pada Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 ..... II-262

Gambar 2. 54 Perbandingan Rata-Rata Umur Persediaan dengan Rata-Rata Umur Piutang II-263

Gambar 2. 55 Perbedaan Skema Konvensional dan KPBU II-273

Gambar 2. 56 Skema KPBU Kementrian Keuangan II-275

Gambar 2. 57 Tata Cara KPBU atas Prakarsa Pemerintah II-277

Gambar 2. 58 Tata Cara KPBU atas Prakarsa Badan Usaha II-278

Gambar 2. 59 Alur Penyelenggaraan Ekonomi Karbon II-281

Gambar 3. 1 Value Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut III-2

Gambar 3. 2 Konstruksi Visi-Misi Kepala Daerah III-5

Gambar 3. 3 Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan Daerah III-6

Gambar 3. 4 Cascading Pencapaian Tujuan 1 ..... III-8

Gambar 3. 5 Cascading Pencapaian Tujuan 2 ..... III-10

Gambar 3. 6 Cascading Pencapaian Tujuan 3 ..... III-11

Gambar 3. 7 Cascading Pencapaian Tujuan 4 ..... III-12

Gambar 3. 8 Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026-2030 ..... III-24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting & strategis, karena menentukan arah pembangunan daerah ke depan, dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Salah satu kebijakan perencanaan daerah adalah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Rancangan Akhir RPJMD.

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun oleh pemerintah daerah yang merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut mengacu pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029 ini merupakan penjabaran Tahap I (5 Tahun pertama) dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025-2045. Tahapan ini merupakan tahapan **Penguatan Fondasi Transformasi** yang meluputi transformasi ekonomi, transformasi SDM, transformasi tata pemerintahan, keamanan daerah yang tangguh, demokrasi yang substansial, dan ekonomi daerah yang stabil, pemantapan ketahanan sosial masyarakat dan budaya, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

Proses penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada tahun 2025 dengan harapan dapat menjadi rujukan bagi para Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Rancangan Akhir RPJMD ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami arah kebijakan pembangunan daerah, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan program-program pemerintah guna mewujudkan pembangunan yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan. Sesuai ketentuan pasal 48 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, penyusunan Rancangan Akhir RPJMD ini dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik yang melibatkan Bappeda Kab/Kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan Pemangku Kepentingan masukan penyempurnaan rancangan akhir RPJMD terkait analisis kondisi daerah, kondisi keuangan daerah, identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan, visi, misi, dan sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini adalah sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2034 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

l. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

m. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

s. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

y. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

z. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 nomor 4);

aa. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 142 Tahun 2025 Nomor);

bb. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunanPerangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

cc. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 5);

dd. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tanah Laut harus diselaraskan dengan RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan, RPJMN,

RPJMD, Rencana Teknokratik Kabupaten Tanah Laut, RKPD Kabupaten Tanah Laut, RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, serta RTRW Kabupaten Tanah Laut.

Sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinergi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota atau sebaliknya. Masing-masing tingkatan perencanaan bukan hanya memiliki sasaran yang spesifik, tetapi juga agregatif dari sistem perencanaan yang ada di bawahnya (Gambar 1.1). Begitu juga halnya dengan dokumen perencanaan jangka menengah harus menjadi penjabaran dari sasaran dan target dokumen perencanaan jangka panjang. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan penting dalam pembangunan daerah di Indonesia. RPJPD mencakup periode 20 tahun, memberikan visi, misi, dan arah kebijakan strategis jangka panjang. Rancangan Akhir RPJMD, yang disusun setiap 5 tahun oleh setiap daerah, adalah penjabaran operasional dari RPJPD, berisi program-program pembangunan yang lebih rinci dan terukur, serta disusun berdasarkan tinjauan teknokratis. Rancangan akhir RPJMD harus selaras dengan RPJPD dan memastikan kesinambungan pembangunan. Keduanya memastikan pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan dan konsisten sesuai visi jangka panjang.

Di sisi lain, rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini juga harus selaras dengan kebijakan RTRW Kabupaten Tanah Laut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan daerah untuk periode lima tahun, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah instrumen yang menentukan penggunaan lahan dan tata ruang wilayah dalam jangka panjang. Rancangan Teknokratik RPJMD harus mengacu pada RTRW agar pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Ini memastikan bahwa setiap proyek pembangunan tidak hanya selaras dengan visi dan misi daerah tetapi juga mematuhi ketentuan penggunaan lahan yang telah

dirancang untuk keberlanjutan lingkungan dan efisiensi penggunaan ruang. Dengan demikian, sinergi antara RPJMD dan RTRW penting untuk mencapai pembangunan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.

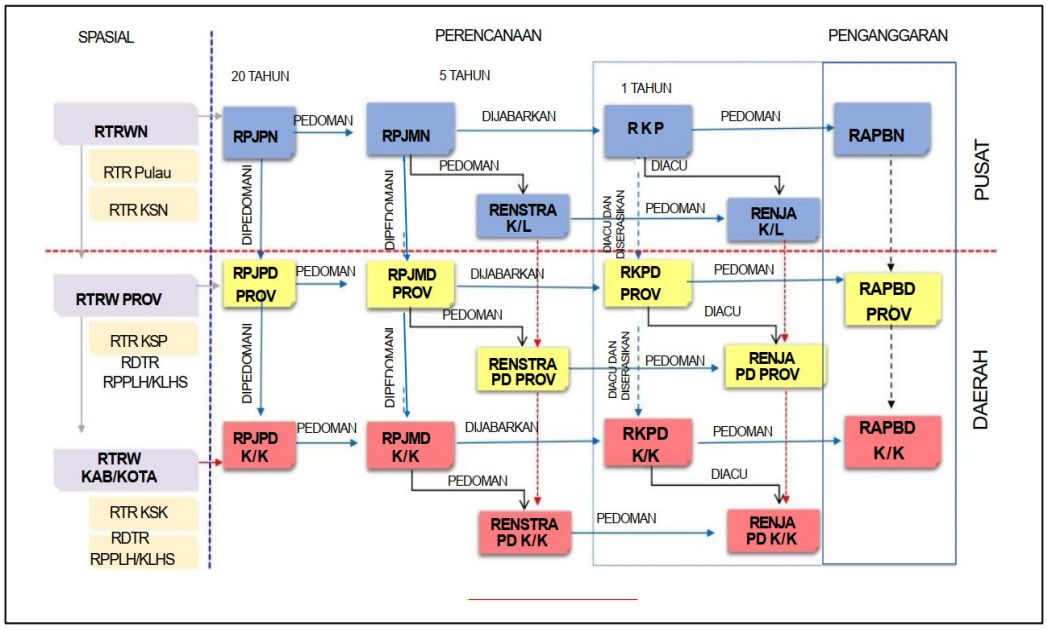

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyajikan penyempurnaan informasi dari Rancangan Teknokratik mengenai data dan informasi pembangunan daerah, antara lain kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah, serta permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Dengan demikia, terdapat pembahasan lanjutan berupa visi, misi, dan tujuan sasaran; strategi, arah, dan program pembangunan; kinerja penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, rancangan ini dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2021-2026. Rancangan Akhir RPJMD disusun sepenuhnya agar memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat

daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan RJPP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Awal RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029;
3. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029;
4. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat Tanah Laut yang semakin maju, sejahtera, dan berkah.

1.5 Sistematika Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu

kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang terdiri atas 9 (sembilan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

2.2.3 Proyeksi Keuangan

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

2.3.2 Isu Strategis

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi

3.2 Misi

3.3 Tujuan dan Sasaran

3.4 Strategi Pembangunan Daerah

3.5 Arah Kebijakan

3.6 Program Pembangunan Daerah

BAB VII PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Kinerja Perangkat Daerah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Daerah

BAB V PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

5.2 Pedoman Pelaksanaan

5.3 Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di titik koordinat 114°30’54,663”-115°22’38,535” Bujur Timur dan 3°30’37,586”-4°10’41,134” Lintang Selatan. Luas daratan Kabupaten Tanah Laut adalah 3.841,78 km2 dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Pelaihari. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Tanah Laut berada di ujung selatan Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Laut Jawa. Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 kecamatan dan 130 desa dan 5 kelurahan. Adapun batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

2.1.1.1.2 Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Secara rata-rata, masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanah Laut memiliki luas 330 km2 atau masing-masing memiliki 9% dari luas daratan Kabupaten Tanah Laut. Kecamatan Jorong tercatat merupakan wilayah kecamatan terluas di Kabupaten Tanah Laut dengan luasan mencapai 18,16%. Disusul dengan Kecamatan Batu Ampar yang luasnya mencapai 10,91% dan Kecamatan Kintap memiliki luas 22,31% dari seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut. Sementara itu, wilayah ibukota Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Pelaihari memiliki luas 9,48% atau sekitar 364,03 km2. Kecamatan Kurau yang terletak di sebelah barat memiliki luas 68,86 km2 atau hanya sekitar 1,79% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Laut dan kecamatan ini tercatat sebagai kecamatan dengan luas wilayah terkecil di kabupaten tersebut. Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Luas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase (%)
1.	Jorong	697,56	18,16
2.	Batu Ampar	419,06	10,91
3.	Kintap	857,22	22,31
4.	Pelaihari	364,03	9,48
5.	Takisung	224,01	5,83
6.	Panyipatan	389,02	10,13
7.	Bati-bati	235,06	6,12
8.	Bajuin	283,788	7,39
9.	Tambang Ulang	198,35	5,16
10.	Bumi Makmur	104,73	2,73
11.	Kurau	68,86	1,79
Kabupaten Tanah Laut		**3.841,78**	**100,0%**

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Tanah Laut 2024-2043

Gambar 2.1 menyajikan informasi wilayah administratif Kabupaten Tanah laut. Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Bumi

Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan Kintap dengan luasan mencapai 857,22 km2 yaitu sebesar 22,31 % dari total luas Kabupaten Tanah Laut. Kecamatan Jorong berada pada posisi kedua dengan luas wilayah mencapai 697,56 km2 (18,16%). Pada posisi ketiga dan keempat ditempati oleh Batu Ampar dan Panyipatan dengan wilayah masing- masing seluas 419,06 km2 (10,91%) dan 389,02 km2 (10,13%). Sementara itu, Kecamatan Kurau merupakan wilayah dengan luasan terkecil di Kabupaten Tanah Laut yaitu seluas 68,86 km2 (1,79%).

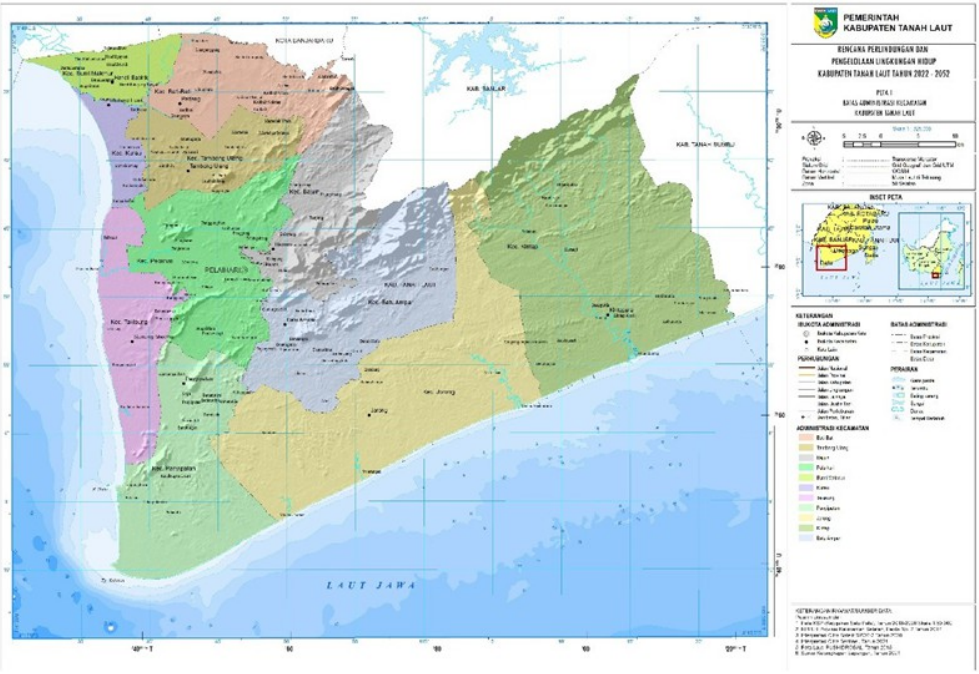

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022

Gambar 2. 1 Wilayah Administratif Kabupaten Tanah laut

Dari 11 kecamatan yang ada, secara keseluruhan Kabupaten Tanah Laut memiliki 135 desa dan kelurahan. Wilayah yang memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari (15 desa dan 5 kelurahan), sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa sedikit adalah

Kecamatan Bajuin dengan 9 desa. Rincian jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut

No	Kecamatan	Ibukota	Desa/Keluarahan	
			Desa	Kelurahan
1.	Jorong	Jorong	11	-
2.	Batu Ampar	Batu Ampar	14	-
3.	Kintap	Kintapura	14	-
4.	Pelaihari	Pelaihari	15	5
5.	Takisung	Gunung Makmur	12	-
6.	Panyipatan	Panyipatan	10	-
7.	Bati-bati	Padang	14	-
8.	Bajuin	Bajuin	9	-
9.	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	-
10.	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	-
11.	Kurau	Padang Luas	11	-
Kabupaten Tanah Laut			**130**	**5**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Berdasarkan karakteristik geografis, kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Kecamatan yang berada di tepi laut yakni Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap.
2. Kecamatan yang tidak memiliki wilayah laut yakni Kecamatan Bati-bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Batu Ampar.

2.1.1.1.3 Kondisi Topografi

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung di daerah pedalaman yang berbatasan

dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi atas 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1. Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berkontur. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara sungai dan Pantai Laut Jawa.
2. Bagian utara, merupakan daerah yang berkontur, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu: Puncak Gunung Kemuning (750 mdpl), Puncak Gunung Batu Karo (621 mdpl), Puncak Gunung Batu Balerang (921 mdpl), Puncak Gunung Kematian (951 mdpl), Puncak Gunung Batu Mandi (901 mdpl), Puncak Gunung Sekupang (1.051mdpl), Puncak Gunung Haur Bonak (744 mdpl), Puncak Gunung Aur Bunek (1.150mdpl), dan Puncak Gunung Condong (553 mdpl).

Tabel 2. 3 Luas Wilayah Kabupaten Tanah Laut Menurut Kelas Ketinggian

Kelas Ketinggian (m)	Luas (ha)
0-7	58.231
> 7-25	142.133
> 25-100	125.386
>100-500	17.750
> 500-1000	13.661
> 1000	15.769
Total	372.930

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2025

Ditinjau dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi, yaitu kelas 0-7 meter, 7-25 meter, 25-100 meter, 100-500 meter, 500-1.000 meter dan di atas 1.000 meter. Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas di Kabupaten Tanah Laut adalah kelas elevasi 0-7 mdpl, yaitu mencapai 58.231,00 Ha. Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 mdpl, yaitu 15.769,00 Ha. Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan

Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati. Jika dirinci menurut kecamatan, terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Laut yang tidak memiliki wilayah pantai yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin, dan Kecamatan Batu Ampar. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa wilayah tertinggi di Kabupaten Tanah Laut berada di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari, dan Bati-bati. Wilayah dengan dataran rendah cukup luas tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang. Sementara itu daerah dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Tabel 2. 4 Luas Wilayah Kabupaten Tanah Laut Menurut Kondisi Kelerengan

Kelas Lereng (%)	Deskripsi	Luas (Ha)
0 - 2	Datar	290.147,00
2 - 8	Bergelombang/agak landai	22.590,00
8 - 15	Bergelombang/landau	20.470,00
15 - 25	Berbukit	19.150,00
25 - 40	Bergunung	7.638,00
> 40	Bergunung curam	12.890,00
Total		**372.930,00**

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Dalam Angka 2025

Kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya maka tanah semakin peka terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Kelas lereng 0–2%, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 290.147,00 Ha.

2. Kelas lereng 2–8%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 22.590,00 Ha.
3. Kelas lereng 8–15%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 20.470,00 Ha.
4. Kelas lereng 15–25%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 19.150,00 Ha.
5. Kelas lereng 25–40%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 7.638,00 Ha.
6. Kelas lereng diatas 40%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur dengan luas 12.890,00 Ha.

Berdasarkan paparan diatas, terlihat bahwa wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0–3% yaitu sebesar 290.147 hektar. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

2.1.1.1.4 Garis Pantai Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut memiliki garis pantai yang membentang sepanjang 200 km, terdiri dari dua sisi pesisir yang berbeda, yaitu pesisir barat dan pesisir selatan. Wilayah pesisir ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa, menjadikannya kawasan yang kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Panjangnya garis pantai ini memberikan peluang besar dalam berbagai sektor, seperti perikanan, wisata bahari, transportasi laut, serta konservasi lingkungan pesisir. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih belum optimal, sehingga diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kondisi perairan di

sepanjang garis pantai Kabupaten Tanah Laut juga dipengaruhi oleh perubahan musim, yang menyebabkan variasi pada suhu, salinitas, gelombang, dan faktor lingkungan lainnya.

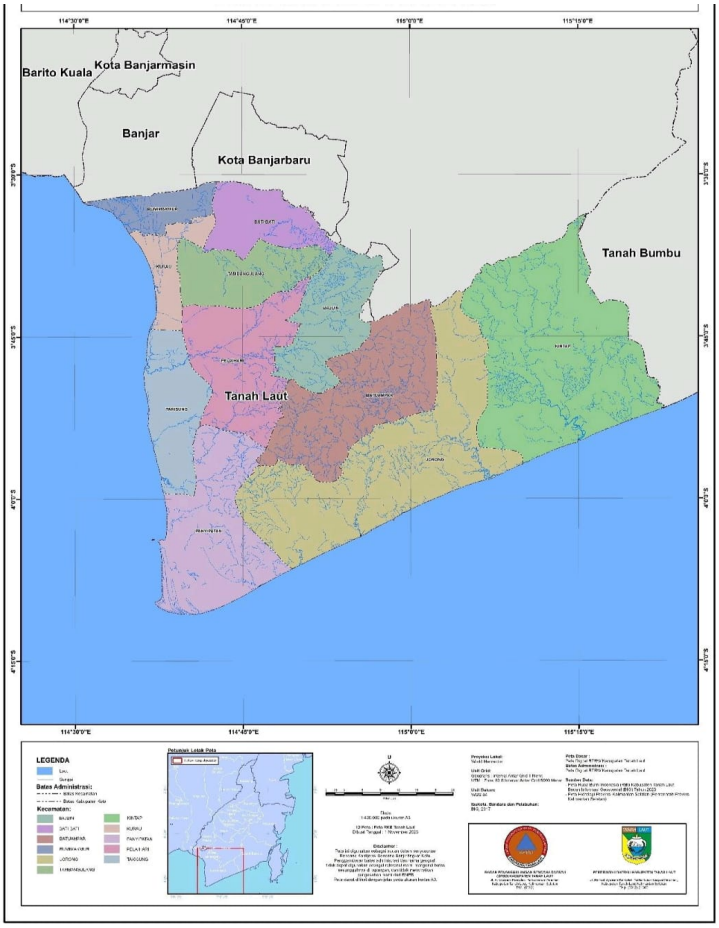

Sumber : Dokumen Rencana Kontitenjensi Bencana Banjir Kab Tanah Laut

Gambar 2. 2 Peta Garis Pantai dan Hidrologi Kab Tanah Laut

Dengan panjang garis pantai **200 km**, Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi besar dalam sektor **perikanan tangkap dan budi daya**. Pengembangan **kawasan strategis minapolitan di Kecamatan Pelaihari** diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut melalui **pusat informasi minapolitan**, yang berfungsi sebagai sarana edukasi, pemasaran, dan pengembangan usaha perikanan. Selain itu terdapat 6 (enam) kecamatan yang berbatasan langsung dengan garis pantai Kabupaten Tanah Laut, yaitu Kecamatan Kurau (68,70 km^2), Kecamatan Bumi Makmur (104,66 km^2), Kecamatan Takisung (233,67 km^2), Kecamatan Panyipatan (388,91

km^2), Kecamatan Jorong (697,84 km^2), dan Kecamatan Kintap (857,21 km^2). Dengan demikian, kecamatan yang berbatasan langsung dengan garis pantai Kabupaten Tanah Laut sebesar 2.350,99 km^2.

Dengan demikian, keenam kecamatan tersebut menjadi Kawasan tangkap terbesar di Kabupaten Tanah Laut, baik itu darat dan laut. Keenam kecamatan tersebut diperuntukkan untuk Kawasan ikan tangkap darat, sedangkan perikanan tangkap laut terdapat pada hampir semua kawasan perairan sampai 4 mil laut di luar peruntukan alur dengan pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan berupa pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan, dan tempat pelelangan ikan. Komoditas unggulan berupa ikan gabus, betok, nila, patin, udang, serta pengembangan rumput laut.

Integrasi dengan sektor **pariwisata** memungkinkan pemasaran langsung produk hasil perikanan dan olahannya kepada wisatawan, sementara dukungan pemerintah dalam distribusi dan pengolahan meningkatkan daya saing produk di pasar luar daerah. Namun, letak Kabupaten Tanah Laut yang berbatasan langsung dengan pantai berpotensi menjadikan kab Tanah Laut rawan bencana, salah satunya banjir. Hal tersebut karena Kab Tanah Laut dilintasi beberapa **sungai besar** seperti Sungai Maluka, Tabanio, Sabulur, dan Sawarangan yang bermuara ke Laut Jawa. Kondisi ini menjadikan wilayah ini **rawan bencana banjir**, terutama di daerah pesisir dan sekitar aliran sungai.

2.1.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspilasi bulanan, maka Kabupaten Tanah Laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang water balance-nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air. Pada musim kemarau angin bertiup dari benua Australia, keadaan angin saat itu bisa juga kencang. Pada tahun 2024, suhu udara maksimum di Kabupaten

Tanah Laut selama periode tersebut terjadi pada bulan September yang mencapai 36,4°C, sementara itu, untuk suhu udara minimum terendah tercatat sebesar 20,80°C pada bulan September 2024.

Tabel 2. 5 Suhu Udara Minimum, Rata-Rata, dan Maksimum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Bulan	Suhu Udara (ºC)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	22,40	27,4	33,60
Februari	22,20	27,6	34,60
Maret	22,60	28,0	35,10
April	23,40	28,7	34,90
Mei	23,40	29,7	34,80
Juni	22,10	29,2	34,30
Juli	21,60	29,1	33.90
Agustus	22,60	30,5	34,90
September	20,80	31,1	36,40
Oktober	23,00	31,3	35,80
November	22,80	29,6	34,50
Desember	22,20	28,8	33,70

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Kelembaban udara di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan tidak menentu. Pada tahun 2024, kelembaban udara tertinggi terjadi selama bulan Januari, Februari, November, dan Desember yang mencapai 100%, sedangkan kelembaban terendah terjadi pada bulan September yaitu sebesar 34,0%. Kecepatan angin rerata di Kabupaten Tanah Laut dalam periode tahun 2024 cukup bervariasi yaitu diantara 1,2 hingga 3,6 knot. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2024, kecepatan angin rerata tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 3,6 knot dan kecepatan angin rerata terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 1,2 knot.

Tabel 2. 6 Tingkat Kelembaban Minimum, Rata-Rata, dan Maksimum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Bulan	Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	59,0	83,0	100,0

Bulan	Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Februari	52,0	82,3	100,0
Maret	56,0	80,9	99,0
April	58,0	79,4	100,0
Mei	53,0	76,1	98,0
Juni	56,0	75,6	100,0
Juli	61,0	73,0	100,0
Agustus	40,0	62,0	97,0
September	34,0	59,1	93,0
Oktober	37,0	64,0	98,0
November	41,0	75,5	100,0
Desember	48,0	80,4	100,0

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Kondisi Kabupaten Tanah Laut yang memiliki kontur berbukit di sebelah utara dan relatif landai di sebelah selatan mempengaruhi arah dan kecepatan angin. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi pertanian yang sangat tinggi sehingga kondisi arah dan kecepatan angin perlu dipertimbangkan. Tabel 2.7 berikut menyajikan informasi terkait dengan kecepatan angin dalam satu tahun. Pada 2024 lalu kecepatan angin maksimum mencapai 10,30 meter/detik yang terjadi pada bulan Januari. Sedangkan pada bulan Februari kecepatan angin tercatat paling rendah yaitu sekitar 4,10 meter/detik. Namun demikian apabila dilihat dari kecepatan rata-rata angin per bulan, maka bulan Agustus tercatat sebagai bulan yang memiliki rata-rata kecepatan angin tertinggi hingga mencapai 2,29 meter/detik.

Tabel 2. 7 Kecepatan Angin Minimum, Rata-Rata, dan Maksimum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	0,0	1,81	10,30
Februari	0,0	1,73	4,10
Maret	0,0	1,85	5,70
April	0,0	1,76	5,70
Mei	0,0	1,89	4,60
Juni	0,0	1,81	4,60
Juli	0,0	1,70	5,14
Agustus	0,0	2,29	8,23
September	0,0	2,18	5,14
Oktober	0,0	2,02	5,14
November	0,0	1,74	4,63
Desember	0,0	1,89	5,66

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Berdasarkan penyinaran matahari, durasi penyinaran matahari dengan jam terendah berada di bulan Desember, yaitu hanya sekitar 2,3 jam. Sementara itu durasi penyinaran matahari yang paling tinggi terjadi pada bulan September yaitu 6,7 jam. Dalam periode tahun 2024, curah hujan setiap bulan di Kabupaten Tanah Laut cukup bervariasi. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2024, curah hujan bulanan tertinggi di Kabupaten Tanah Laut terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 510 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yang hanya sebesar 19,80 mm. Sementara itu, jumlah hari hujan tertinggi di tahun 2024 terjadi pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember yakni mencapai 31 hari hujan.

Tabel 2. 8 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (hari)
Januari	510	22	3,6
Februari	283,70	23	4,9
Maret	328,80	22	4,9
April	328,30	22	5,4
Mei	102,90	17	5,9
Juni	225,20	21	3,4
Juli	113,20	29	4,1
Agustus	19,80	31	5,8
September	78,90	30	6,7
Oktober	106,00	31	5,5
November	423,40	30	4,6
Desember	410,60	31	2,3

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

2.1.1.1.6 Kondisi Geologi

Pada dasarnya Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar yang menjadi bagian dari Lempeng mikro Sunda. Menurut Tapponnir (1982) Lempeng Asia Tenggara ditafsirkan sebagai fragmen dari lempeng Eurasia yang melejit ke Tenggara sebagai akibat dari tumbukan kerak Benua India dengan kerak Benua Asia, yang terjadi kira-kira 40 – 50 juta tahun yang lalu. Fragmen dari lempeng Eurasia ini kemudian dikenal sebagai lempeng mikro Sunda yang meliputi Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Adapun batas-batas tektonik yang paling penting di sebelah timur adalah:

1. Komplek subduksi Kapur Tersier Awal yang berarah Timur laut, dimulai dari Pulau Jawa dan membentuk pegunungan Meratus sekarang,

2. Sesar mendatar utama di Kalimantan Timur dan Utara, dan
3. Jalur subduksi di Kalimantan Utara, Serawak, dan Laut Natuna, Jalur ini dikenal dengan jalur Lupar.

Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan di bagian Selatan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pra tersier, sedangkan Cekungan Barito da Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sedimen tersier. Morfologi wilayah di Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu:

1. **Satuan Morfologi Dataran** menempati bagian ujung Selatan dan ujung Barat. Ketinggian berkisar antara 0–10 mdpl. Satuan ini berupa endapan alluvium rawa dan pantai yang tersusun dari batuan sedimen kuarter.
2. **Satuan Morfologi Dataran Bergelombang** menempati bagian Barat dan Selatan, yaitu sekitar jalur jalan raya Bati-bati – Pelaihari – Asam-asam; Pelaihari – Batakan dan Pelaihari – Takisung. Ketinggian berkisar antara 10 – 50 mdpl. Satuan ini tersusun oleh batuan sedimen kuarter dan tersier.
3. **Satuan Morfologi Perbukitan** menempati bagian tengah merupakan kaki dari Pegunungan Meratus. Ketinggian berkisar antara 50 – 250 mdpl. Satuan ini tersusun oleh batuan metamorf dan sedimen serta sebagian kecil batuan beku.
4. **Satuan Morfologi Pegunungan** menempati bagian Utara, dicirikan oleh lereng yang terjal dengan ketinggian puncak lebih dari 250 mdpl. Beberapa puncaknya seperti Gunung Kematian (951 mdpl), Gunung Batu Belerang (921 mdpl), Gunung Batu Karo (621 mdpl).

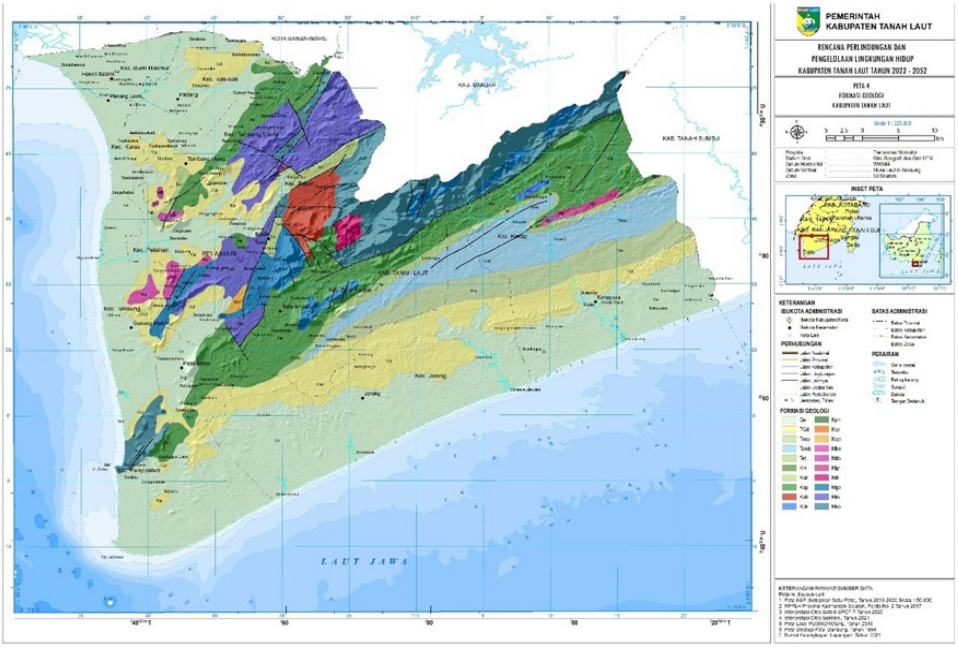

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022

Gambar 2. 3 Peta Formasi Geologi di Kabupaten Tanah Laut

2.1.1.1.7 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Tanah Laut memiliki banyak sungai yang terdiri dari sungai- sungai kecil dan besar. Sungai-sungai besar tersebut merupakan induk dari beberapa sungai kecil. Kapasitas air di sungai-sungai besar di Kabupaten Tanah Laut relatif terjaga sehingga tidak mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Secara umum, apabila ditinjau dari kondisi fisik, sungai yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut masih menunjukkan kondisi fisik air sungai yang alami. Kondisi ini sangat ditunjang dengan adanya vegetasi yang tumbuh di sepanjang aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan. Tinjauan terhadap sumberdaya air sangat urgen sifatnya dilakukan guna memahami potensi, bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya air. Keberadaan sungai yang wilayah alirannya (DAS) di lebih dari satu wilayah administratif menjadikan sungai harus diatur dengan sistem yang spesifik. Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau

Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km2), Sungai Tabanio (770 Km2), Sungai Sabulur (190 Km2), Sungai Sawarangan (580 Km2). Fungsi-fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara daerah/daerah timur dengan daerah-daerah Barat di Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periodik. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.

2. Air Tanah

Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak pada ketinggian 0 – 1000 mdpl. Oleh sebab itu, kedalaman air tanahnya bervariasi dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

3. Curah Hujan

Curah hujan sebagai faktor fisik bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimasukkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh kedua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi tindakan budidaya baik terhadap teknik pengolahan tanah maupun pemilihan jenis komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

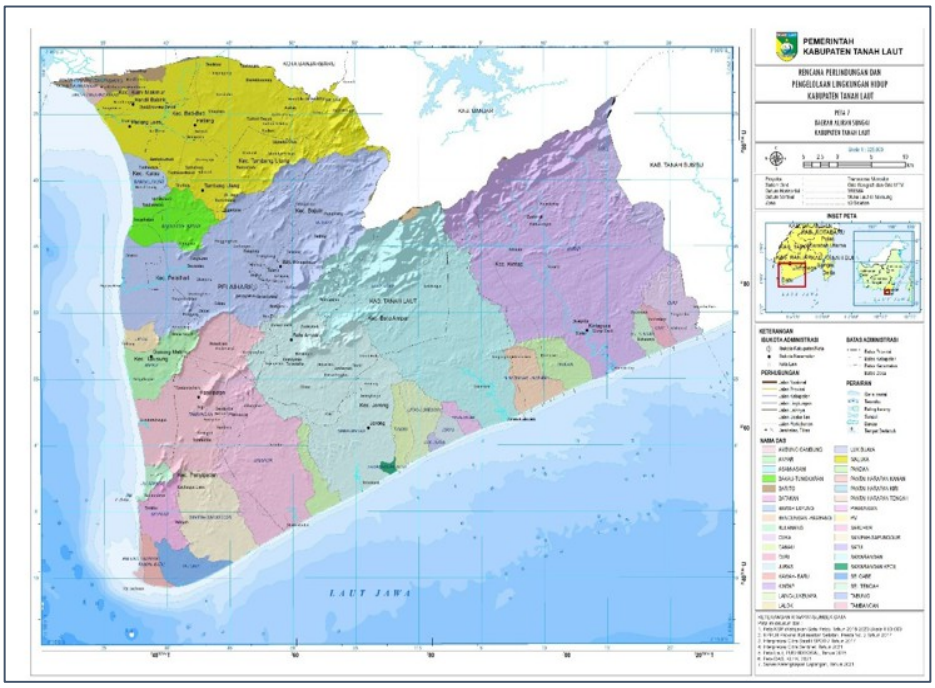

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022

Gambar 2. 4 Peta Hidrologi Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa sungai yang membentuk beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Tabel 2.9 berikut ini menunjukkan pembagian satuan wilayah sungai di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2. 9 Pembagian satuan wilayah sungai di Kabupaten Tanah Laut.

No.	Nama DAS	Kecamatan											Total	%
		Bajuin	Bati-Bati	Batu Ampar	Bumi Makmur	Jorong	Kintap	Kurau	Panyipatan	Pelaihari	Takisung	Tambang Ulang		
1	Ambung Gambung								570,23				570,23	0,15
2	Anyar								167,24	558,07	5333,64		6058,94	1,57
3	Asam-Asam	2334,69		27281,04		23177,74							52793,48	13,72
4	Bakau-Tungkaran							1228,34		4073,08	1049,66	1107,46	7458,53	1,94
5	Barito	83,61		373,68	2546,90	18,67	115,72						3138,59	0,82
6	Batakan								4824,26				4824,26	1,25
7	Bawah Layung							3116,35					3116,35	0,81
8	Bendungan-Pampang					3777,71	772,60						4550,31	1,18
9	Bulanang								828,12		449,38		1277,5	0,33
10	Cuka						5365,24						5365,24	1,39
11	Danau					2376,61							2376,61	0,62
12	Duri						1375,29						1375,29	0,36
13	Juras					1270,39							1270,39	0,33
14	Kawah-Baru								1712,47				1712,47	0,45
15	Kintap			5,62		7945,54	57773,86						65725,02	17,08
16	Laing-Lukbuaya					4115,80							4115,80	1,07

No.	Nama DAS	Kecamatan											Total	%
		Bajuin	Bati-Bati	Batu Ampar	Bumi Makmur	Jorong	Kintap	Kurau	Panyipatan	Pelaihari	Takisung	Tambang Ulang		
17	Lalok										1566,73		1566,73	0,41
18	Luk Buaya					428,21							428,21	0,11
19	Maluka	2503,29	20020,58		5931,07			8898,46		187,45		13909,63	51450,49	13,37
20	Pandan					3424,92	3671,17						7096,09	1,84
21	Pantai Harapan Kanan				627,66								627,66	0,16
22	Pantai Harapan Kiri				264,12								264,12	0,07
23	Pantai Harapan Tengah				136,50								136,50	0,04
24	Pihaungan					1238,15							1238,15	0,32
25	PM								5,54		0,07		5,61	0
26	Sabuhur			553,86		15631,19			5634,64	247,44			22067,13	5,73
27	Sanipah-Sapunggur								10534,40				10534,40	2,74
28	Satui						5609,48						5609,48	1,46
29	Sawarangan			17217,90		18081,72			23,10	1432,23			36754,94	9,55
30	Sawarangan Kecil					345,03							345,03	0,09

No.	Nama DAS	Kecamatan											Total	%
		Bajuin	Bati-Bati	Batu Ampar	Bumi Makmur	Jorong	Kintap	Kurau	Panyipatan	Pelaihari	Takisung	Tambang Ulang		
31	Sei Cabe								3754,07				3754,07	0,98
32	Sei Tengah						1579,96						1579,96	0,41
33	Tabunio	21607,42		476,04						20079,73	9864,21	2447,10	54474,50	14,16
34	Tambangan					3,55			10567,85	5292,95	5294,56		21158,91	5,50
Total		**26529,01**	**20020,58**	**45908,15**	**9506,25**	**81835,21**	**76263,33**	**13243,15**	**38621,90**	**31870,94**	**23558,25**	**17464,19**	**384820,97**	**100**

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022

2.1.1.1.8 Karakteristik Tanah

Jenis Tanah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleison. Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Latosol. Sedangkan jenis tanah Gleisol hanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).

Jenis tanah aluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah aluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).

Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangan masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregratnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98 % dari luas total daratan).

Tekstur tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang digunakan secara praktis untuk memprediksi potensi penggunaan tanah. Tanah bertekstur halus (dominan liat) memiliki permukaan yang lebih halus dibanding dengan tanah bertekstur kasar (dominan pasir) sehingga tanah yang bertekstur halus memiliki kapasitas adsorpsi unsur–unsur hara yang lebih besar dan umumnya lebih subur dibandingkan dengan tanah bertekstur kasar. Tanah bertekstur kasar lebih porus dan laju infiltrasinya lebih cepat. Walaupun demikian tanah bertekstur halus memiliki kapasitas memegang air lebih besar dari pada tanah pasir karna memiliki permukaan yang lebih luas. Sementara itu tekstur tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.

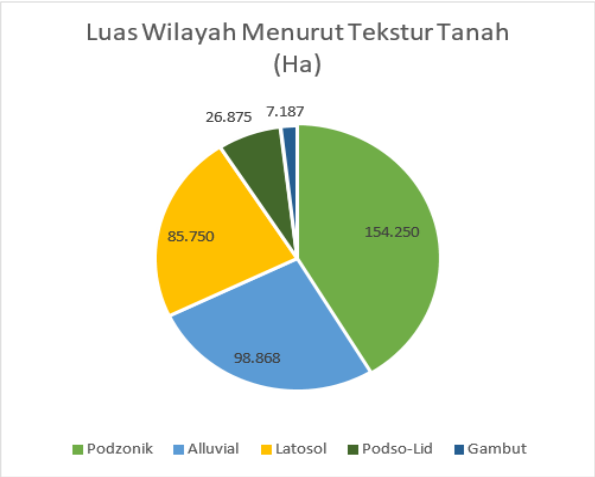

Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024

Gambar 2. 5 Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah

Sifat tanah yang bertekstur halus baik untuk budidaya maupun non budidaya. Pada tanah yang bertekstur halus semua tanaman dapat tumbuh dengan baik dan tahan terhadap erosi. Sedangkan pada tanah yang bertekstur sedang tanaman masih dapat tumbuh dengan baik, tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena bertekstur sedang lebih peka

terhadap erosi. Tanah dengan tekstur kasar memerlukan air sangat tinggi, sehingga daya simpan airnya sangat rendah, akibatnya kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Pada umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut ini memiliki jenis tanah meliputi Podzonik seluas 154.250 Ha, Alluvial seluas 98.868 Ha, Latosol seluas 85.750 Ha, Podso-Lid seluas 26.875 Ha, dan Gambut seluas 7.187 Ha.

2.1.1.1.9 Penggunaan Lahan

Ketersediaan tanah (lahan) memberikan gambaran potensi lahan dan arahan bagi kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau karena limitasinya tidak dapat dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar. Penggunaan lahan sekarang memberi gambaran sejauh mana jenis dan tingkat pemanfaatan lahan yang telah dilakukan baik yang bersifat budidaya maupun bukan budidaya. Ketersediaan tanah pada dasarnya tidak dilepaskan dengan status atau penguasaannya sekarang. Status tanah sekarang pada dasarnya sangat menentukan mudah dan dapat tidaknya suatu bidang tanah dikuasai atau dialihkan penguasaannya oleh pihak ketiga untuk kegiatan tertentu. Melihat dari luas wilayah yang ada, dari 3.841,78 km2 secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Laut adalah seluas 92.814 ha (24.16%) merupakan kawasan hutan, 71.288 ha (18,56%) merupakan lahan perkebunan, 51.122 ha (13,31%) merupakan lahan sawah dan tegalan serta sisanya 4.157 ha (1,08%) untuk kawasan pemukiman dan lain-lain, maka Kabupaten Tanah Laut telah menyiapkan beragam potensi yang masih dan dapat dikelola untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kabupaten Tanah Laut melalui kebijakan penataan ruang wilayahnya telah memprioritaskan 4 (empat) kawasan dengan masing-masing fungsi strategisnya yaitu: (1) Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, (2) Kepentingan Sosial Budaya, (3) Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam/Teknologi, (4) Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Kebijakan penataan ruang wilayah ini dimaksudkan tidak lain untuk mengantisipasi adanya pengembangan perlintasan 2 kawasan di Kabupaten

Tanah Laut, yaitu sebelah utara pengembangan dengan Banjarmasin-Banjar/Banjarmasin dan sebelah timur dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Kebijakan yang tertuang dalam program pengembangan wilayah diharapkan dapat mendukung pengembangan 2 wilayah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, terkendali yang pada akhirnya dapat tercapai hasil pembagunan yang maksimal. Penataan ruang wilayah yang tersebar dimaksudkan juga untuk membuka peluang bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya, mengenai kawasan permukiman, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut 2024-2043 Pasal 36, kawasan permukiman terdiri atas: (a) kawasan permukiman perkotaan; dan (b) Kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud yaitu bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan. Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 24.830 hektar yang terdapat di seluruh Kecamatan. Kawasan permukiman perdesaan yaitu bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan. Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas sebesar kurang lebih 13.973 hektar dan terdapat di seluruh Kecamatan. Rincian penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 Penggunaan Lahan Kabupaten Tanah Laut

No	Keterangan	Tutupan/Penggunaan Lahan	Total	Persentase	
				Kawasan	Total
A			**159.789,06**	**100,00**	**41,56**
1	Alami	Hutan	63.923,46	40,00	16,63
2		Hutan Rawa	5.619,11	3,52	1,46
3		Mangrove	2.968,07	1,86	0,77

No	Keterangan	Tutupan/Penggunaan Lahan	Total	Persentase	
				Kawasan	Total
4		Hutan Tanaman	13.105,25	8,20	3,41
5		Hutan/ Taman Kota	11,90	0,01	0,00
6		Semak Belukar	47.299,45	29,60	12,30
7		Rawa	23.377,05	14,63	6,08
8		Hamparan batuan/pasir lain	197,17	0,12	0,05
9		Danau/Waduk/Situ	1.730,43	1,08	0,45
10		Sungai	1.557,17	0,97	0,41
B	Lahan Terbangun		**11.831,43**	**100,00**	**3,08**
11		Permukiman dan Tempat Kegiatan	11.805,48	99,78	3,07
12		Pelabuhan	25,95	0,22	0,01
C	Lahan Termanfaatkan		**198.185,67**	**100,00**	**51,55**
13		Sawah	27.297,77	13,77	7,10
14		Perkebunan Campuran	14.441,75	7,29	3,76
15		Perkebunan Monokultur	128.843,75	65,01	33,51
16		Tegalan/Ladang	23.597,83	11,91	6,14
17		Kolam	650,38	0,33	0,17
18		Tambak	3.354,19	1,69	0,87
D	Lahan Bekas Termanfaatkan		**14.630,76**	**100,00**	**3,81**
19		Lahan Terbuka	4.135,00	28,26	1,08
20		Pertambangan	10.495,76	71,74	2,73
Total			**384.436,92**		**100**

Sumber: Hasil Interpretasi Citra Spot 7 (2021), Citra Sentinel 2 (2022) dan Peta KSP RBI (2023)

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.1.2.1 Pariwisata

Secara makro optimalisasi sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu industri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, yang pada akhirnya secara simultan dapat menggerakkan sektor-sektor produksi

lain. Sementara itu menurut Bappenas (2015), arah kebijakan pengembangan sektor pariwisata nasional meliputi pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan agar mampu bersaing di dalam maupun luar negeri, pembangunan industri pariwisata nasional dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk maupun jasa pariwisata nasional di setiap lokasi pariwisata yang ingin dipasarkan, dan pembangunan kelembagaan pariwisata yaitu melalui pembangunan sumberdaya manusia dan organisasi kepariwisataan nasional.

Keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut merupakan potensi yang cukup besar untuk dijadikan tujuan wisata, terlebih terdapat berbagai jenis objek wisata yang dapat dikunjungi seperti wisata pantai. Potensi objek wisata pantai yang dimiliki Tanah Laut menjadi tujuan wisata oleh masyarakat khususnya daerah-daerah dari Kabupaten/Kota yang tidak memiliki wisata pantai di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, Kabupaten Tanah Laut juga memiliki wisata sejarah dan budaya, wisata alam, dan wisata taman. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Laut (2024), hingga saat ini terdapat 25 obyek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Walaupun demikian masih ada beberapa obyek wisata yang belum dikunjungi para wisatawan yang mungkin disebabkan oleh oleh kurangnya promosi dan juga kurang memadainya sarana dan prasarana yang mendukung.

Hampir di setiap kecamatan memiliki tempat wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, alangkah lebih baik bila destinasi pariwisata tersebut dipasarkan secara bersama-sama terutama destinasi-destinasi wisata unggulan seperti Pantai Takisung dan Pantai Batakan. Selain pemasaran juga perlu dilakukan beberapa upaya seperti membangun akses menuju kawasan wisata, sarana pendukung wisata misalnya hotel dan restoran, serta mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas. Sehingga harapannya dengan pengembangan ekonomi kreatif di bidang

pariwisata akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut. Berikut adalah daftar obyek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2. 11 Daftar Pariwisata di Kabupaten Tanah Laut

A	**Kecamatan Bajuin**
1	Air Terjun Bajuin
2	Air Terjun Balang Daras
3	Air Terjun Habulu
4	Air Terjun Hamindrai
5	Bunker Jepang
6	Goa Marmer
B	**Kecamatan Bati-Bati**
1	Danau Sari Ambun, Desa Imban
2	Wisata Kerbau Rawa Benua Raya, Desa Benua Raya
3	Wisata Mahoni
C	**Kecamatan Batu Ampar**
1	Air Terjun Damit Hulu
2	Gua semprong
D	**Kecamatan Jorong**
1	Pantai Asmara
2	Pantai Joras
3	Pantai Rindang Piungan
4	Pantai Swarangan
5	Pantai Turki/Pantai Tungkaran Kiri
E	**Kecamatan Kintap**
1	Bukit Liang
2	Goa Riam Adungan
3	Pantai Cemara 1
4	Pantai Cemara 2
5	Pantai Marina/Pantai Mekar Sari
6	Pantai Muara Kintap/Pantai Muara Cinta
7	Pantai Pandansari
F	**Kecamatan Panyipatan**
1	Air Terjun Panyipatan
2	Bottom of Borneo (BOB)
3	Bukit Birah, Desa Kandangan Lama
4	Bukit Lebak Naga, Desa Kandangan Lama
5	Bukit Sapu Angin, Desa Panyipatan
6	Bukit Timah/Bukit Bulanang, Desa Tanjung Dewa
7	Gunung Birah
8	Makam Habib Muhammad
9	Makam Keramat Datu Hacil
10	Pantai Batakan dan Batakan Baru, Desa Batakan
11	Pantai Sanipah, Desa Batakan
12	Pantai Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa
13	Pulau Datu/Makam Datu Pamulutan, Desa Tanjung Dewa
14	Susur Sungai (Rencana)
15	Taman Bakuang

G	Kecamatan Pelaihari
1	Argowisata
2	Bukit Katunung
3	Bukit Priangan
4	Bukit Rimpi
5	Bukit Teletubbies
6	Danau Bom
7	Gunung Karamaian
8	Gunung Matah
9	Hutan Kota
10	Kebun Bunga Brajamukti
11	Makam Datu Akhmad
12	Makam Datu Nafis
13	Makam Datu Panjang
14	Susur Sungai
15	Taman Anggrek
16	Taman Hasan Basri
17	Taman Kijang Mas
18	Taman Mina Tirta
19	Taman Payung
20	Taman Permana
21	Taman Kayangan
H	**Kecamatan Takisung**
1	Air Terjun Batilai, Desa Batilai
2	Bukit Katunun, Desa Batilai
3	Bukit Shangyang, Desa Banua Tengah
4	Ekowisata Hutan Mangrove Pagatan Besar, Desa Pagatan Besar
5	Pantai Batu Lima, Desa Kuala Tambangan
6	Pantai Karindangan, Desa Pagatan Besar
7	Pantai Muara Pagatan Besar, Desa Pagatan Besar
8	Pantai Nyiur Ampat, Desa Pagatan Besar
9	Pantai Puting Belayung, Desa Telaga Langsat
10	Pantai Tabanio, Desa Tabanio
11	Pantai Takisung
12	Pantai Taman Hijau Rindang Takisung
I	**Kecamatan Tambang Ulang**
1	Bukit Lintang, Desa Martadah
2	Bukit Telang, Desa Martadah
3	Goa Belanda, Desa Martadah

Sumber: Perda RTRW Kab. Tanah Laut Tahun 2024-2043

Pada tahun 2024, obyek wisata yang diminati di Kabupaten Tanah Laut adalah pantai. Jumlah kunjungan tertinggi wisatawan di Kabupaten Tanah Laut adalah di Pantai Batakan yang dikunjungi 175.400 kunjungan. Obyek wisata selanjutnya yang menjadi favorit adalah Bukit Timah yaitu sebanyak 94.298 kunjungan. Obyek wisata lain yang juga cukup diminati wisatawan adalah Taman Permana dikunjungi sebanyak 50.669 wisatawan.

Data wisatawan asing dan domestik di tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya ada 6 orang wisatawan asing berkunjung di Kabupaten Tanah Laut yakni 4 orang di bulan Juli, dan 2 orang di bulan Agustus. Sedangkan wisatawan domestik sepanjang tahun cukup berfluktuatif. Pengunjung domestik tertinggi di tahun 2024 pada bulan Desember yaitu sebanyak 88.143 wisatawan, disusul pada bulan Januari sebanyak 63.846 wisatawan. Jumlah wisatawan cenderung mengalami peningkatan, dari 330.240 pengunjung domestik pada tahun 2020, meningkat menjadi 608.779 pengunjung pada tahun 2024. Wisatawan asing juga mengalami peningkatan pada tahun 2024 mencapai 6 orang. Meningkatnya jumlah wisatawan membuka peluang bagi kabupaten Tanah Laut untuk mengembangkan sektor pariwisata. Dari segi fasilitas pendukung pariwisata, berdasarkan data Statistik Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 dipaparkan bahwa terdapat 16 hotel dengan 231 kamar yang tersebar di Kecamatan Pelaihari dan Jorong.

Tabel 2. 12 Jumlah Wisatawan Domestik dan Wisatawan Asing di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Tahun	Wisatawan Domestik	Wisatawan Asing
2020	330.240	2
2021	247.613	-
2022	579.878	8
2023	608.611	13
2024	608.779	6

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

2.1.1.2.2 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor penting karena memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan pokok atau primer bagi kehidupan manusia di dunia, termasuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Dalam arti luas sektor pertanian tidak hanya mencakup kegiatan dalam hal tanaman pangan seperti jagung dan padi, tetapi juga hortikultura (sayur dan buah), perkebunan, dan peternakan. Pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan tanaman pangan memiliki peranan penting dalam

perekonomian Kabupaten Tanah Laut. Lebih lagi, dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan juga akan terus meningkat.

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut seluas 3.841,78 km2. Rencana Kawasan Budi Daya yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2043 terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Tanaman Pangan

Untuk kawasan pertanian di Kabupaten Tanah Laut meliputi kawasan tanaman pangan seluas 29.610 ha yang terbagi di seluruh Kecamatan, dalam kawasan tanaman pangan ini terdapat KP2B seluas 25.579 ha di seluruh Kecamatan. (sesuai Perda RTRW Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024).

Menurut jenis tanaman pangan yang dihasilkan, tanaman pangan yang dibudidayakan penduduk Kabupaten Tanah Laut diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Padi merupakan salah satu bahan makanan terpenting yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Padi, terutama padi yang merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Tanah Laut. Luas panen padi pada tahun 2022 adalah seluas 19.972,63 ha, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi seluas 15.062 ha. Penurunan luas panen berpengaruh pada jumlah produksi padi. Produksi padi pada tahun 2022 sebanyak 73.487,24 ton mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 53.839 ton.

Menurut jenis tanaman pangan yang dihasilkan, tanaman pangan yang dibudidayakan penduduk Kabupaten Tanah Laut diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Padi merupakan salah satu bahan makanan terpenting yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Padi, terutama padi yang merupakan

salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Tanah Laut. Luas panen padi pada tahun 2023 adalah seluas 15.062 ha, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi seluas 25.092 ha. Peningkatan luas panen berpengaruh pada jumlah produksi padi. Produksi padi pada tahun 2023 sebanyak 53.839 ton mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 107.221 ton. Jadi, produksi padi meningkat sekitar **99,15%** dari tahun 2023 ke 2024.

Tabel 2. 13 Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Tahun	Padi	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
2020	24.755	98.592
2021	21.015,00	79.662,00
2022	19.972,63	73.487,24
2023	15.062	53.839
2024	25.092	107.221

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Salah satu tanaman pangan lain yang dibudidayakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut adalah jagung. Sama seperti padi, jagung juga menjadi salah satu komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut setelah padi. Luas panen jagung pada tahun 2024 mencapai 16.069 ha dengan produksi jagung sebanyak 123.741 ton. Kecamatan yang menjadi penghasil produksi jagung terbanyak di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 adalah Panyipatan, diikuti oleh Batu Ampar dan pada posisi ketiga yaitu Pelaihari. Jumlah produksi tiap kecamatan tersebut secara berturut-turut adalah 26.513 ton, 24.475 ton dan 14.731 ton. Dengan luas panen untuk kecamatan Panyipatan sebesar 3.505 ha, kecamatan Pelaihari seluas 3.273 ha, dan Batu Ampar seluas 1.775 ha. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut menjadi penghasil produksi jagung kecuali kecamatan Bumi Makmur.

Tabel 2. 14 Luas Panen dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Panyipatan	3.505	24.475
Takisung	1.672	10.533
Kurau	78	470
Bumi Makmur	-	-
Bati-Bati	1.535	12.477
Tambang Ulang	1.599	13.802
Pelaihari	3.273	26.513
Bajuin	1.164	9.116
Batu Ampar	1.775	14.731
Jorong	967	8.125
Kintap	500	3.499
Tanah Laut	**16.069**	**123.741**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Jenis tanaman bahan makanan potensial lainnya adalah ubi kayu. Total luas panen ubi kayu di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 seluas 118 ha dengan total produksi seberat 2.505 ton. Jika dilihat berdasarkan luas lahan dan produksi tiap kecamatan di Tanah Laut, yang menjadi penyumbang tertinggi produksi ubi kayu adalah kecamatan Takisung. Pada tahun 2024, Takisung memproduksi ubi kayu sebanyak 602 ton dengan luas panen sebesar 30 ha. Selanjutnya disusul oleh Jorong dan Bati-Bati. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Tanah Laut memproduksi ubi kayu kecuali Panyipatan, Bumi Makmur, dan Bajuin.

Tabel 2. 15 Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Panyipatan	-	-
Takisung	30	603
Kurau	8	162,4

Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Bumi Makmur	-	-
Bati-Bati	18	365,4
Tambang Ulang	4	83,2
Pelaihari	13	312
Bajuin	-	-
Batu Ampar	13	273
Jorong	17	391
Kintap	15	315
Tanah Laut	**118**	**2.505**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Tanaman pangan lain yang cukup banyak diproduksi di Kabupaten Tanah Laut adalah Ubi Jalar. Pada tahun 2024, total produksi ubi jalar di Tanah Laut mencapai 941,84 ton dengan luas panen selebar 75 ha. Kecamatan yang menjadi penghasil produksi ubi jalar terbesar adalah Takisung dengan total produksi seberat 504,64 ton dan luas panen sebesar 38 ha. Terdapat tiga kecamatan yang tidak memproduksi ubi jalar, diantaranya Panyipatan, Kurau dan Bumi Makmur.

Tabel 2. 16 Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Panyipatan	-	-
Takisung	38	504,64
Kurau	-	-
Bumi Makmur	-	-
Bati-Bati	1	12,8
Tambang Ulang	2	25,6
Pelaihari	3	39,6
Bajuin	8	105,6

Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Batu Ampar	18	101,6
Jorong	7	50,4
Kintap	8	101,6
Tanah Laut	**75**	**941,84**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Terdapat beberapa tanaman pangan lain yang diproduksi di Kabupaten Tanah Laut walaupun hasilnya tidak sebanyak padi, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu. Tanaman ini antara lain, kacang tanah dan kacang hijau. Pada tahun 2024, Kabupaten Tanah Laut menghasilkan 91 ton kacang tanah. Kecamatan yang menjadi penyumbang terbanyak adalah Takisung dengan luas panen 25 ha. Selain itu, Kabupaten Tanah Laut juga memproduksi kacang hijau. Tahun 2024 total produksi untuk kacang hijau seberat 75,85 ton dengan luas panen selebar 16 ha. Kecamatan yang menjadi penghasil produksi terbesar kacang hijau adalah Takisung dengan luas panen sebesar 7 ha. Kecamatan lain yang juga menjadi penghasil kacang hijau adalah Bajuin, Pelaihari, dan Jorong.

Tabel 2. 17 Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah, Kacang Hijau dan Ubi Jalar di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Kacang Tanah	91	139,6
Kacang Hijau	16	75,85

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Tanaman Hortikultura

Kawasan hortikultura di Kabupaten Tanah Laut tersebar di Kecamatan Bati-Bati, Pelaihari, Takisung dan Tambang Ulang dengan luasan keseluruhan sebesar 113 ha (sesuai Perda RTRW Kabupaten Tanah Laut No 5 Tahun 2024).

Berdasarkan data luas panen tanaman sayuran di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024, cabai rawit menjadi komoditas dengan luas panen terbesar, mencapai 204,50 hektar, diikuti oleh cabai besar seluas 66 hektar dan bawang merah seluas 23,65 hektar. Sementara itu, bawang putih tidak tercatat di seluruh kecamatan, menunjukkan kemungkinan tidak dibudidayakan secara

luas atau data tidak tersedia. Kecamatan dengan luas panen terbesar untuk masing-masing komoditas adalah Bajuin untuk terung (35 Ha) dan cabai rawit (97 Ha), Tanah Laut untuk cabai keriting (21,25 Ha), Panyipatan untuk cabai besar (27 Ha), serta Pelaihari untuk bawang merah (17 Ha). Kecamatan Bajuin sendiri menjadi sentra utama produksi cabai rawit dan terung, menunjukkan peran strategisnya dalam produksi sayuran di daerah ini.

Sebaran luas panen juga menunjukkan ketimpangan, di mana beberapa kecamatan seperti Bumi Makmur memiliki luas panen sangat kecil, sementara kecamatan seperti Pelaihari dan Batu Ampar menanam lebih dari tiga jenis sayuran berbeda, mencerminkan keanekaragaman produksi. Dengan pola ini, dapat disimpulkan bahwa cabai rawit adalah komoditas unggulan di Kabupaten Tanah Laut, sementara beberapa kecamatan cenderung memiliki spesialisasi pada jenis tanaman tertentu.

Tabel 2. 18 Luas Panen Tanaman Sayuran (Ha) Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Kecamatan	Terung	Bawang Putih	Cabai Rawit	Cabai Keriting	Cabai Besar	Bawang Merah
Panyipatan	15	-	18	12	27	3,5
Takisung	12	-	8	-	5	0,50
Kurau	4,50	-	11,75	0,50	-	1,40
Bumi Makmur	-	-	3	-	-	-
Bati-Bati	21,75	-	15,75	-	8	1,25
Tambang Ulang	3	-	1	3,75	5	-
Pelaihari	8	-	13	1	4	17,00
Bajuin	35	-	97	-	10	-
Batu Ampar	12	-	11	4	6	-
Jorong	5	-	16	-	1	-
Kintap	13	-	10	-	-	-
Tanah Laut	**129,25**	**-**	**204,50**	**21,25**	**66**	**23,65**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data luas panen tanaman sayuran dalam kuintal di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024, cabai rawit menjadi komoditas dengan hasil panen tertinggi, mencapai 17.396,5 kuintal, diikuti oleh cabai besar

sebesar 5.608 kuintal dan tomat sebesar 8.468 kuintal. Kecamatan dengan hasil panen terbesar untuk masing-masing komoditas adalah Bati-Bati untuk terung (9.602 kuintal), Bajuin untuk cabai rawit (4.610 kuintal) dan cabai besar (2.170 kuintal), serta Pelaihari untuk bawang merah (651 kuintal). Beberapa kecamatan seperti Bumi Makmur memiliki hasil panen yang sangat kecil dan terbatas pada cabai rawit saja (116,5 kuintal), menunjukkan spesialisasi tanaman atau keterbatasan lahan pertanian.

Sebaran hasil panen juga menunjukkan bahwa beberapa kecamatan memiliki produksi yang sangat tinggi untuk komoditas tertentu, seperti Bati-Bati dengan cabai rawit (3.857,5 kuintal), sedangkan kecamatan lain seperti Kurau dan Tambang Ulang memiliki hasil panen yang lebih merata meskipun jumlahnya lebih kecil. Dari pola ini, dapat disimpulkan bahwa cabai rawit merupakan komoditas utama di Kabupaten Tanah Laut dengan produksi tersebar di berbagai kecamatan, sementara komoditas lain seperti tomat dan cabai besar juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan.

Tabel 2. 19 Jumlah Produksi Tanaman Sayuran (Kuintal) Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Kecamatan	Terung	Tomat	Cabai Rawit	Cabai Keriting	Cabai Besar	Bawang Merah
Panyipatan	425	580	1.515	805	920	21
Takisung	435	369	825	-	985	15
Kurau	252	685	1.795,5	10	80	65,5
Bumi Makmur	-	-	116,5	-	-	-
Bati-Bati	9.602	455	3.857,5	-	265	-
Tambang Ulang	295	35	110	137	205	-
Pelaihari	530	294	1.296	185	-	651
Bajuin	640	1.095	4.610	-	2.170	-

Kecamatan	Terung	Tomat	Cabai Rawit	Cabai Keriting	Cabai Besar	Bawang Merah
Batu Ampar	405	479	948	158	829	-
Jorong	488	297	1.368	-	154	-
Kintap	380	150	955	-	-	261
Tanah Laut	**13.452**	**8.468**	**17.396,50**	**1.295**	**5.608**	**913,5**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data jumlah produksi buah-buahan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024, pisang menjadi komoditas dengan produksi tertinggi, mencapai 26.066 kuintal, diikuti oleh semangka sebesar 13.870 kuintal dan durian sebesar 12.448 kuintal. Kecamatan dengan produksi tertinggi untuk masing-masing komoditas adalah Kintap untuk mangga (1.925 kuintal) dan durian (2.600 kuintal), Tambang Ulang untuk pisang (11.395 kuintal) dan pepaya (3.447 kuintal), serta Jorong untuk jeruk siam (1.915 kuintal) dan salak (190 kuintal). Kecamatan Bati-Bati menonjol dalam produksi pepaya dengan hasil tertinggi mencapai 10.598 kuintal, sementara Batu Ampar menjadi salah satu penghasil utama buah naga dengan produksi 2.150 kuintal.

Sebaran produksi buah-buahan menunjukkan bahwa beberapa kecamatan memiliki spesialisasi dalam jenis buah tertentu, seperti Kintap yang unggul dalam produksi mangga, durian, dan salak, serta Tambang Ulang yang menjadi sentra pisang. Sebaliknya, kecamatan Bumi Makmur tidak memiliki data produksi buah, yang dapat mengindikasikan minimnya budidaya buah-buahan di wilayah tersebut. Selain itu, komoditas seperti rambutan dan buah naga memiliki produksi yang cukup signifikan, dengan total masing-masing 10.172 kuintal dan 8.495 kuintal, menunjukkan potensi pengembangan lebih lanjut di sektor hortikultura. Dari pola ini, dapat disimpulkan bahwa pisang, semangka, dan durian merupakan komoditas utama di Kabupaten Tanah Laut dengan produksi yang tersebar di berbagai kecamatan.

Jenis tanaman buah yang dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut adalah mangga, durian, jeruk, pisang, papaya, nanas, alpukat, semangka, rambutan, duku, sawi, salak, buah naga, nangka dan jambu. Jumlah pohon buah di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 80.573 pohon. Pohon buah yang banyak ditanam masyarakat adalah rambutan (49.774 pohon), durian (18.358), nangka (17.287 pohon), dan semangka (15.866 pohon).

Tabel 2. 20 Jumlah Produksi Buah-Buahan (Kuintal) Menurut Kecamatan dan Jenis Buah-Buahan di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Kecamatan	Semangka	Mangga	Durian	Jeruk Siam	Pisang	Pepaya	Salak	Buah Naga	Rambutan
Panyipatan	1.645	400	400	30	1.220	972	-	-	2.900
Takisung	310	90	2.167	350	885	82	16	-	1.448
Kurau	680	335	213	16	2.050	46	47	-	864
Bumi Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bati-Bati	-	435	1.080	686	2.040	10.598	-	2.870	1.020
Tambang Ulang	50	785	150	2.211	11.395	3.447	7	1.430	2.272
Pelaihari	700	270	2.502	460	1.325	1.025	45	425	1.028
Bajuin	-	825	375	-	480	240	-	-	-
Batu Ampar	1.120	60	735	610	2.720	360	5	2.150	99
Jorong	3.710	261	2.226	1.915	2,151	362	190	1.620	963
Kintap	5.655	1.925	2.600	240	1.800	235	1.450	-	578
Tanah Laut	**13.870**	**5.386**	**12.448**	**6.518**	**26.066**	**17.367**	**2.443**	**8.495**	**10.172**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Tabel 2. 21 Jumlah Produksi Buah-Buahan (Pohon) Menurut Kecamatan dan Jenis Buah-Buahan di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Kecamatan	Nanas	Alpukat	Semangka	Rambutan	Duku	Sawo	Nangka	Jambu	Jambu Air	Buah Naga	Durian
Panyipatan	-	-	15	33.412	-	345	144	60	120	-	424
Takisung	2.000	-	3	3.439	-	772	2.000	246	132	-	1.642
Kurau	145	4	17	400	-	160	170	97	25	-	184
Bumi Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bati-Bati	615	185	-	720	105	128	2.989	550	235	14.950	1.800
Tambang Ulang	202	75	2	725	-	563	2.750	329	30	985	130
Pelaihari	2.426	80	5	6.375	519	625	2.765	4.550	185	1.190	13.000
Bajuin	50	-	-	-	491	-	500	300	20	-	3.000
Batu Ampar	730	-	13	415	30	100	900	200	12	1.000	1.500
Jorong	9.325	14	23	4.003	345	851	4.864	307	1.050	3.785	6.613
Kintap	373	42	37	285	2	858	205	1.198	92	-	3.362
Tanah Laut	**15.866**	**464**	**115**	**49.774**	**1.492**	**4.402**	**17.287**	**7.837**	**1.906**	**21.910**	**18.358**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Selain tanaman sayuran dan buah-buahan, Kabupaten Tanah Laut juga memproduksi tanaman biofarmaka. Tanaman biofarmaka merupakan anaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (Rimpang) atau pun akar. Tanaman biofarmaka yang ditanam di daerah Tanah Laut sendiri yaitu jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit. Pada tahun 2024, total produksi tanaman biofarmaka yang dihasilkan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 52.879 kg dengan luas panen sebesar 198.385 m^2.

Tabel 2. 22 Luas Panen Tanaman Biofarmaka (kg) Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Kecamatan	Jahe	Laos/ Lengkuas	Kencur	Kunyit
Panyipatan	19	16	12	16
Takisung	-	-	-	-
Kurau	362	161	362	233
Bumi Makmur	-	-	-	-
Bati-Bati	-	-	2.550	-
Tambang Ulang	-	-	13	2.150
Pelaihari	30	16	10	11
Bajuin	30.005	-	-	-
Batu Ampar	19.200	-	-	-
Jorong	-	-	-	-
Kintap	24	38	18	2.430
Tanah Laut	**49.640**	**231**	**2.965**	**43**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Tanaman terbanyak yang dihasilkan adalah jahe (49.640 kg). Kecamatan yang menjadi penghasil terbanyak tanaman biofarmaka di Kabupaten Tanah Laut adalah Bajuin.

Tabel 2. 23 Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka (m^2) Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Kecamatan	Jahe	Laos/ Lengkuas	Kencur	Kunyit
Panyipatan	5	5	3	75
Takisung	-	-	-	-
Kurau	36	25	45	507
Bumi Makmur	-	-	-	-
Bati-Bati	-	-	-	-
Tambang Ulang	-	-	7.500	21
Pelaihari	13	7	6	-
Bajuin	110.010	-	7	40
Batu Ampar	80.000	-	-	-
Jorong	-	-	-	-
Kintap	9	21	10	40
Tanah Laut	**190.073**	**58**	**7.571**	**683**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Tanaman Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan di Kabupaten Tanah Laut diantaranya adala karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, jambu mete, lada, dan cengkeh. Jenis tanaman perkebunan yang potensial menjadi tanaman andalan adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman karet, termasuk luas area yang belum menghasilkan dan rusak, mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2020-2024. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 169.688 ha yang tersebar di seluruh Kecamatan (sesuai Perda RTRW Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024).

Tabel 2. 24 Perkembangan Luas Areal Perkebunan Rakyat (Ha) Berdasarkan Jenis Komoditi di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Karet	14.824,0	14.888,0	14.894,0	14.852	14.798
Kelapa	898,0	858,5	840,0	784	749,5
Kelapa Sawit	12.055,0	12.453,0	12.622,0	12.692	13.050
Kopi	137,0	232,0	147,0	145	138

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2020 produksi karet sebesar 12.712,83 ton dan meningkat hingga tahun 2024 (21.572,23 ton). Produksi maupun luas areal yang dijelaskan tersebut merupakan produksi dan luas dari perkebunan rakyat. Produksi dan luas areal yang ditunjukkan pada tabel-tabel perkembangan luas areal dan produksi tanaman perkebunan di bawah tidak termasuk luas dan produksi perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta.

Tabel 2. 25 Perkembangan Jumlah Produksi (ton) Berdasarkan Jenis Komoditi di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Karet	12.712,83	13.152,10	13.806,88	19.700,14	21.572,23
Kelapa	1.523,30	1.611,20	1.602,69	2.277,88	2.211,67
Kelapa Sawit	n.a	n.a	n.a	73.919,51	86.614,04
Kopi	98,71	121,10	120,21	19.700,14	172,31

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Peternakan

Kabupaten Tanah Laut dikenal sebagai salah satu pusat peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis ternak yang dibudidayakan penduduk di Kabupaten Tanah Laut meliputi jenis ternak besar (sapi dan kerbau), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), dan ternak unggas (ayam buras, ayam ras, dan itik). Pada tahun 2024, populasi hewan ternak besar terbanyak adalah sapi potong (92.712 ekor), sedangkan untuk hewan ternak kecil populasi

terbanyak adalah sapi perah (26 ekor). Kecamatan yang memiliki ternak sapi potong terbanyak pada tahun 2024 adalah kecamatan Takisungi (20.008 ekor).

Tabel 2. 26 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Tanah Laut (ekor), 2024

Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
Panyipatan	-	17.961	60	56	1.404	3	-
Takisung	-	20.008	56	-	2.781	7	-
Kurau	-	889	-	-	64	-	-
Bumi Makmur	-	7	-	-	-	-	-
Bati-Bati	-	2.423	345	-	796	6	-
Tambang Ulang	-	3.143	16	-	4.753	17	-
Pelaihari	26	18.792	-	-	3.221	-	-
Bajuin	-	9.955	62	-	1.095	2	-
Batu Ampar	-	11.022	221	-	767	2	288
Jorong	-	4.678	635	-	1.575	9	-
Kintap	-	3.834	184	-	1.050	-	-
Tanah Laut	**26**	**92.712**	**1.579**	**56**	**17.506**	**46**	**288**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2024, jumlah hewan unggas di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 49.661.323 ekor. Hewan unggas ini terdiri dari ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik manila, dan burung puyuh. Populasi unggas terbanyak di Tanah Laut pada tahun 2024 adalah ayam pedaging. Selain itu, unggas yang populasinya cukup banyak adalah ayam kampung dan ayam petelur. Kecamatan dengan populasi ayam pedaging paling banyak terdapat di Bati-bati (8.828.964 ekor). Lalu populasi ayam kampung terbanyak juga berada di kecamatan Pelaihari (335.177 ekor)

disusul oleh kecamatan Takisung (285.257 ekor). Sedangkan untuk populasi ayam petelur, paling banyak diternakan di kecamatan Bati-Bati, sejumlah 2.246.257 ekor.

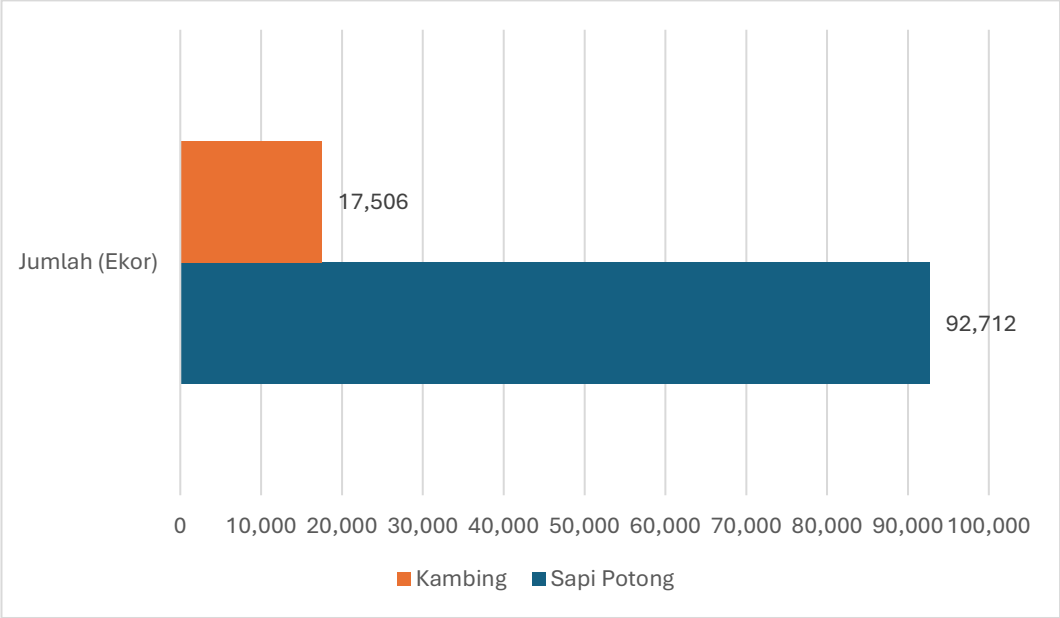

Sumber : Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2025

Gambar 2. 6 Populasi Sapi Potong dan Kambing di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan, jumlah **sapi potong** jauh lebih besar dibandingkan dengan **kambing**. Tercatat terdapat **92.712 ekor sapi potong**, sedangkan jumlah kambing hanya **17.506 ekor**. Perbandingan ini menunjukkan bahwa populasi sapi potong sekitar **5,3 kali lebih banyak** dibanding kambing.

Dominasi sapi potong ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti **permintaan pasar yang lebih tinggi, dukungan terhadap industri peternakan sapi**, serta **potensi keuntungan ekonomi yang lebih besar** dibanding kambing. Sapi potong lebih sering digunakan dalam skala industri dan perdagangan daging, sedangkan kambing biasanya dikembangkan dalam skala yang lebih kecil atau untuk kebutuhan konsumsi domestik.

Tabel 2. 27 Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Tanah Laut (ekor), 2024

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik Manila	Burung Puyuh
Panyipatan	256.731	-	4.795.313	11.739	-
Takisung	285.257	-	6.124.840	3.903	16.221
Kurau	21.394	-	-	18.827	-
Bumi Makmur	14.263	-	-	24.749	-
Bati-Bati	39.936	2.246.257	8.828.964	4.098	3.379
Tambang Ulang	45.641	87.809	7.616.615	40.971	-
Pelaihari	335.177	57.254	8.342.222	8.460	47.986
Bajuin	142.628	123.408	3.506.347	264	-
Batu Ampar	156.891	28.775	3.461.278	7.006	-
Jorong	71.314	423.027	1.302.486	1.322	-
Kintap	57.051	-	1.090.663	10.852	-
Tanah Laut	**1.426.284**	**2.966.531**	**45.068.729**	**132.192**	**67.587**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Tabel 2. 28 Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Kecamatan dan Jenis Hewan di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Sapi Perah
Panyipatan	1.526.382	-	-
Takisung	1.695.981	-	-
Kurau	127.199	-	-
Bumi Makmur	84.799	-	-
Bati-Bati	237.438	28.590.914	-
Tambang Ulang	271.356	1.117.659	-
Pelaihari	1.992.778	728.744	57.600
Bajuin	847.991	1.570.763	-
Batu Ampar	932.790	366.260	-
Jorong	423.995	5.384.396	-
Kintap	339.196	-	-
Tanah Laut	**8.479.905**	**37.758.735**	**57.600**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

2.1.1.2.3 Perikanan

Selain sektor pertanian dan sektor perkebunan, dimana sektor perikanan Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu unggulan daerah untuk memenuhi permintaan ikan dalam lokal maupun di luar daerah. Perikanan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 2 (dua) macam yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap (ikan laut).

Tabel 2. 29 Produksi Perikanan di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 (ton)

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan Budidaya	1.352,15	1.386,78	1.423,02	2.930,4	2.587,37
Perikanan Tangkap	61.225,1	64.545,1	65.031,00	66.151	67.026

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data produksi perikanan Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat tren yang berbeda antara perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2022, dengan produksi meningkat dari 1.352,15 ton menjadi 1.423,02 ton. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan menjadi 2.930,4 ton, yang kemungkinan disebabkan oleh kebijakan pemerintah, peningkatan teknologi, atau perluasan lahan budidaya. Akan tetapi, pada tahun 2024 produksi menurun menjadi 2.587,37 ton, yang dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam keberlanjutan produksi, seperti perubahan lingkungan, cuaca, atau masalah teknis. Sementara itu, perikanan tangkap mengalami peningkatan produksi setiap tahun, dari 61.225,1 ton pada 2020 menjadi 67.026 ton pada 2024. Kenaikan ini relatif stabil, mengindikasikan sektor ini tetap produktif dan memiliki potensi yang baik dalam mendukung perekonomian daerah. Secara keseluruhan, meskipun sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan positif, fluktuasi pada perikanan budidaya perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar keberlanjutannya tetap terjaga.

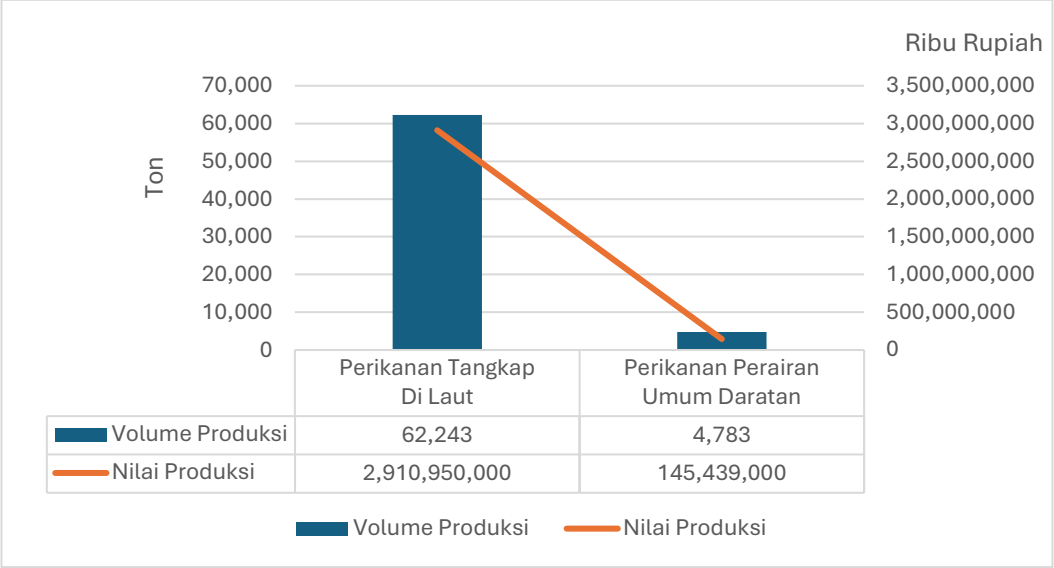

Sumber : Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2025

Gambar 2. 7 Presentase Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024 **perikanan tangkap di laut** mendominasi produksi dengan **62.243 ton** dan nilai **Rp2,91 triliun**, sementara **perikanan perairan umum daratan** jauh lebih kecil, hanya **4.783 ton** dengan nilai **Rp145,4 miliar**. Perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa sektor **perikanan laut menjadi penyumbang utama ekonomi perikanan**, sementara **perikanan perairan darat masih perlu dikembangkan** untuk meningkatkan produktivitas dan nilai ekonominya di Kabupaten Tanah Laut.

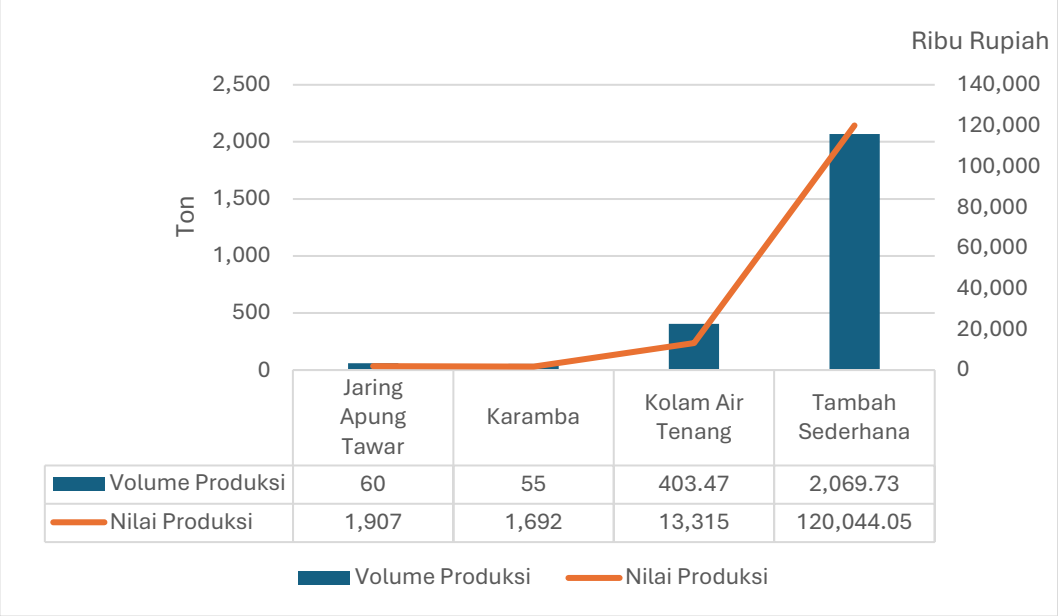

	Jaring Apung Tawar	Karamba	Kolam Air Tenang	Tambah Sederhana
Volume Produksi	60	55	403.47	2,069.73
Nilai Produksi	1,907	1,692	13,315	120,044.05

Sumber : Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2025

Gambar 2. 8 Presentase Volume dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya

Grafik menunjukkan bahwa **tambah sederhana** memiliki produksi tertinggi, mencapai **2.069,73 ton** dengan nilai **Rp120 juta**, jauh lebih besar dibandingkan **kolam air tenang (6403,47 ton, Rp13 juta)** dan **karamba (55 ton, Rp1.692 juta).** Hal ini mengindikasikan bahwa **tambak sederhana menjadi metode paling produktif dan bernilai ekonomi tinggi** dalam perikanan budidaya di Kabupaten Tanah Laut.

2.1.1.3 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

2.1.1.3.1 Ketahanan Energi

Ketahanan energi adalah kemampuan suatu negara atau wilayah untuk memastikan pasokan energi yang terjamin, terjangkau, dapat diakses, berkelanjutan, dan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dalam jangka panjang. Kabupaten Tanah Laut terus mendorong peningkatan ketahanan energi melalui pemanfaatan sumber daya energi terbarukan secara berkelanjutan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi sumber daya energi berupa Biodisesel di Kecamatan Batu Ampar dan tenaga angin/bayu di Kecamatan Panyipatan, namun belum dikembangkan secara optimal. Sementara itu, Kabupaten Tanah Laut memiliki sumber pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berada di Kecamatan Jorong. Pembangkit ini memiliki peran vital sebagai pemasok listrik utama wilayah Kalselteng.

2.1.1.3.2 Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem

penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

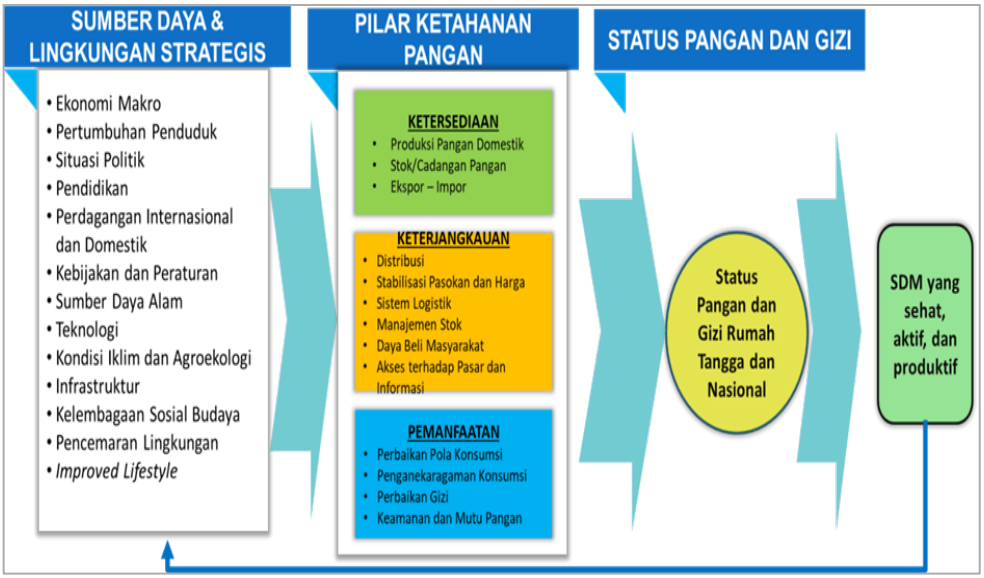

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan 2022, Badan Pangan Nasional

Gambar 2. 9 Sembilan Indikator

Dengan demikian keempat hal tersebut perlu mendapatkan prioritas dalam hal aspek ketahanan pangan. Pada aspek "ketersediaan" dan aspek "keterjangkauan" nilai indeksnya sudah tinggi. Secara keseluruhan dalam hal ketahanan pangan Kabupaten Tanah Laut masuk dalam kelompok "Sangat Tahan".

Tabel 2. 30 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

Tahun	IKP	Prioritas	Keterangan
2020	81,85	6	Sangat Tahan
2021	81,61	6	Sangat Tahan
2022	82,06	6	Sangat Tahan
2023	83,45	6	Sangat Tahan
2024	80,59	6	Sangat Tahan

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

Kabupaten Tanah Laut telah menunjukkan stabilitas dalam ketahanan pangan selama periode 2020 hingga 2024, dengan indeks ketahanan pangan yang relatif tinggi setiap tahunnya. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut tahun 2020-2023 mengalmi tren peningkatan yang positif, yaitu dari 81,85 pada tahun 2020 menjadi 83,45 pada tahun 2023. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, daerah ini tetap berada dalam kategori "Sangat Tahan," menunjukkan bahwa kebijakan dan sistem pangan yang diterapkan telah mampu menjaga ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi masyarakat. Namun, di tahun 2024, terjadi sedikit penurunan dalam indeks ketahanan pangan dibandingkan tahun sebelumnya, yang bisa menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ketahanan pangan daerah.

Di sisi lain, meskipun secara keseluruhan ketahanan pangan Kabupaten Tanah Laut tergolong baik, data mengenai ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Sejak tahun 2020, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat secara bertahap, dari 2,5% hingga mencapai 4,14% di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pangan tersedia, masih ada segmen masyarakat yang kesulitan untuk memperoleh konsumsi yang mencukupi, baik karena faktor ekonomi, distribusi, maupun aksesibilitas.

Tabel 2. 31 Indeks Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

Tahun	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
2020	2,5
2021	2,71
2022	3,61
2023	4,06
2024	4,14

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2025

Perkembangan ini menuntut perhatian lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat menikmati akses pangan yang layak dan mencukupi. Upaya seperti optimalisasi distribusi pangan, peningkatan produksi pangan lokal, serta program intervensi untuk membantu kelompok yang mengalami kesulitan akses pangan perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesenjangan lebih lanjut. Dengan langkah-langkah yang tepat, Kabupaten Tanah Laut dapat mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan ketahanan pangan yang kuat, sekaligus mengatasi tantangan dalam pemenuhan konsumsi pangan bagi masyarakat yang masih mengalami keterbatasan.

2.1.1.3.2 Rumah Tangga Pelanggan Air Minum

Pada tahun 2020-2024, jumlah pelanggan terus mengalami peningkatan dari 6.247 pelanggan menjadi 115.955 pelanggan pada tahun 2023. Persentase yang menggunakan air tidak bersih masih tergolong cukup tinggi yaitu mencapai 30,86% rumah tangga. Penggunaan air minum tidak bersih banyak digunakan oleh rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga yang rendah ditunjukkan dari pembagian akses air minum berdasarkan kuintil. Hal tersebut tentu seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena air minum bersih berkaitan erat dengan kualitas kehidupan rumah tangga terkait.

Tabel 2. 32 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Pelanggan di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Tahun	Jumlah Pelanggan	Air yang disalurkan (m^3)	Nilai (Rupiah)
2020	6.247	1.362.853	7.191.494.536
2021	11.125	1.521.580	8.128.383.314
2022	101.218	1.790.018	9.707.720.542
2023	115.955	2.153.799	14.738.719.850

Tahun	Jumlah Pelanggan	Air yang disalurkan (m^3)	Nilai (Rupiah)
2024	14.761	2.259.756	19.610.863.050

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Jenis pelanggan air di Kabupaten Tanah Laut dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok yaitu sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, industri, dan khusus. Jumlah pelanggan air secara keseluruhan pada tahun 2024 adalah sebanyak 14.761 pelanggan dengan pelanggan terbesar adalah kelompok rumah tangga yang mencapai 13.284 pelanggan. Volume air yang disalurkan PDAM Kabupaten Tanah Laut pada 6 kelompok tersebut adalah sebesar 2.1259.756 m^3. Penjualan tertinggi air pada tahun 2023 adalah pada kelompok rumah tangga yang mencapai 1.691.340 m^3, disusul kelompok instansi pemerintahan sebesar 214.085 m^3, dan kelompok niaga sebesar 151.799 m^3.

Nilai keseluruhan penjualan air tersebut adalah sebesar Rp19,6 miliar dimana kelompok rumah tangga menyumbang penjualan air sebesar Rp14,4 miliar, disusul kelompok instansi pemerintahan sebesar Rp1,9 miliar, dan kelompok niaga sebesar Rp1,5 miliar. Melihat data yang ada, terlihat bahwa cakupan penyediaan air bagi rumah tangga telah memadai di Kabupaten Tanah Laut. Cakupan penyediaan air minum oleh PDAM Kabupaten Tanah Laut, terlihat bahwa pelayanan PDAM masih terbatas pada beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Panyipatan dan Tambang Ulang yang belum memiliki pelanggan. Penjualan air tertinggi di Kabupaten Tanah Laut berada di Kecamatan Pelaihari yang mencapai 733.929 m^3, disusul Kecamatan Bajuin sebesar 409.695 m^3, dan Kecamatan Jorong sebesar 407.146 m^3.

Tabel 2. 33 Jumlah Pelanggan, Produksi, dan Penggunaan Air Minum yang Terjual Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Kecamatan	Jumlah Produksi (m^3)	Penggunaan (m^3)	Terjual (m^3)
Panyipatan	-	-	-
Takisung	43.199	15.311	21.791
Kurau	62.162	57.375	62.162
Bumi Makmur	283.978	279.704	283.998
Bati-Bati	413.230	252.368	249.669
Tambang Ulang	-	-	-
Pelaihari	1.025.908	745.681	733.929
Bajuin	700.773	414.052	408.695
Batu Ampar	9.803	7.126	9.754
Jorong	533.165	406.557	407.146
Kintap	110.641	83.294	82.612
Tanah Laut	**3.182859**	**2.261.468**	**2.259.756**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Sedangkan, jika dilihat dari Akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, persentasenya tercatat sebesar 55,7%, kemudian meningkat menjadi 63,52% pada 2021, 66,57% pada 2022, dan mencapai 69,03% pada 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyediaan infrastruktur dan layanan air bersih di wilayah tersebut. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 76,29% pada 2023, sehingga upaya peningkatan akses air minum layak perlu terus diperkuat agar seluruh rumah tangga di Tanah Laut dapat menikmati layanan air bersih yang aman dan berkelanjutan.

Tabel 2. 344 Data Rumah Tangga Terhadap Air Minum Kalimantan Selatan 2020-2023

Data Rumah Tangga Terhadap Air Minum Kalimantan Selatan 2020-2023				
	2020	2021	2022	2023
Kabupaten/Kota	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak
Tanah Laut	55,7	63,52	66,57	69,03
Kota Baru	58,54	64,08	65,99	68,11
Banjar	59,86	65,72	72,85	71,8
Barito Kuala	48,84	65,15	61,08	58,17
Tapin	74,51	78,59	76,7	81,38
Hulu Sungai Selatan	72,19	72,32	68,67	69,16
Hulu Sungai Tengah	86,45	90,76	88,21	86,94
Hulu Sungai Utara	85,07	88,01	83,44	82,42
Tabalong	70,73	72,5	73,46	74,97
Tanah Bumbu	58,25	62,41	64,04	62,04
Balangan	72,11	76,08	86,16	89,2
Kota Banjarmasin	93,72	99,67	98,13	98,82
Kota Banjar Baru	69,22	84,78	68,21	72,43
Kalimantan Selatan	**70,36**	**76,4**	**76,18**	**76,29**
Catatan:				
Akses Air Minum Layak Berkelanjutan:				
a. Sumber Air Minum Utama: Leding, Air hujan, Sumur bor/pompa, Sumur terlindung, Mata air terlindung.				
b. Sumber Air Minum Utama: (Air kemasan bermerk atau Air isi ulang) dan (Sumber air utama untuk Mandi/Cuci/Dll adalah Leding, Air hujan, Sumur bor/pompa, Sumur terlindung, Mata air terlindung)				

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

2.1.1.3.3 Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut termasuk fasilitas kelistrikan untuk menyediakan kebutuhan listrik baik itu untuk pembangunan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap rumah tangga. Produksi listrik dapat ditingkatkan melalui pembangunan pembangkit yang harapannya mampu meningkatkan rasio elektrinikasi dan juga mendorong tumbuhnya industri. Selama periode 2020-2024, daya terpasang listrik di Kabupaten Tanah Laut terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, daya terpasang

listrik adalah sebesar 116.522.400 KW dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 131.984.400 KW. Dengan adanya peningkatan daya terpasang, maka produksi listrik juga mengalami lonjakan dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2020, produksi listrik di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 231.523.584 KWh dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 253.772.710 KWh. Pada tahun 2024, produksi listrik di Kabupaten Tanah Laut meningkat menjadi 273.219.513 KWh.

Tabel 2. 35 Daya terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT PLN di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)
2020	116.522.400	231.523.584	217.032.606
2021	124.043.450	242.366.298	225.857.473
2022	131.984.400	253.772.710	240.415.701
2023	-	-	336.513.443
2024	148.651,50	273.219.513	257.623.896

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Pelanggan listrik juga turut melonjak dari sebanyak 80.788 pelanggan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 95.812 pelanggan pada tahun 2024. Pelanggan prabayar pada tahun 2024 adalah sebanyak 58.260 pelanggan dan pelanggan pasca bayar sebanyak 37.522 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan tersebut menunjukkan bahwa tingkat elektrinikasi di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan.

Tabel 2. 36 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Tipe KWH Meter di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Tahun	Tipe KWH Meter		
	Prabayar	Pascabayar	Total
2020	39.653	41.135	80.788

Tahun	Tipe KWH Meter		
	Prabayar	Pascabayar	Total
2021	45.081	39.935	83.738
2022	50.070	39.935	90.005
2023	54.321	37.955	91.873
2024	58.260	37.522	95.812

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

2.1.1.4 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan Daerah harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, indikator-indikator terkait lingkungan hidup juga penting untuk diperhatikan guna memastikan terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH merupakan indikasi awal yang dapat menggambarkan suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup periode tertentu.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO3, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Pada tahun 2021, perhitungan IKLH mulai diterapkan hingga level kabupaten/kota. Indikator untuk menghitung IKLH kabupaten/kota sedikit berbeda dengan indikator untuk menghitung nilai IKLH provinsi dan nasional. Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep Environmental Quality Index (EQI) dan konsep

Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada Tahun 2024 Indeks Kuaitas Lingkungan Hidup mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai 68,57. Pada tahun 2023 nilai IKLH yaitu 68,65 yang mana mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2022. Pada tahun 2022 nilai IKLH menunjukkan penurunan menjadi 67,78 yang mana pada tahun 2021 IKLH Kabupaten Tanah Laut sebesar 68,7. Pada tahun 2020, metode perhitungan IKLH menggunakan metode baru, yaitu terdapat perbedaan pembobotan, dimana bobot terbesar ada pada Indeks Kualitas Air. Dimana sebelumnya bobot terbesar ada pada Indeks Kualitas lahan.

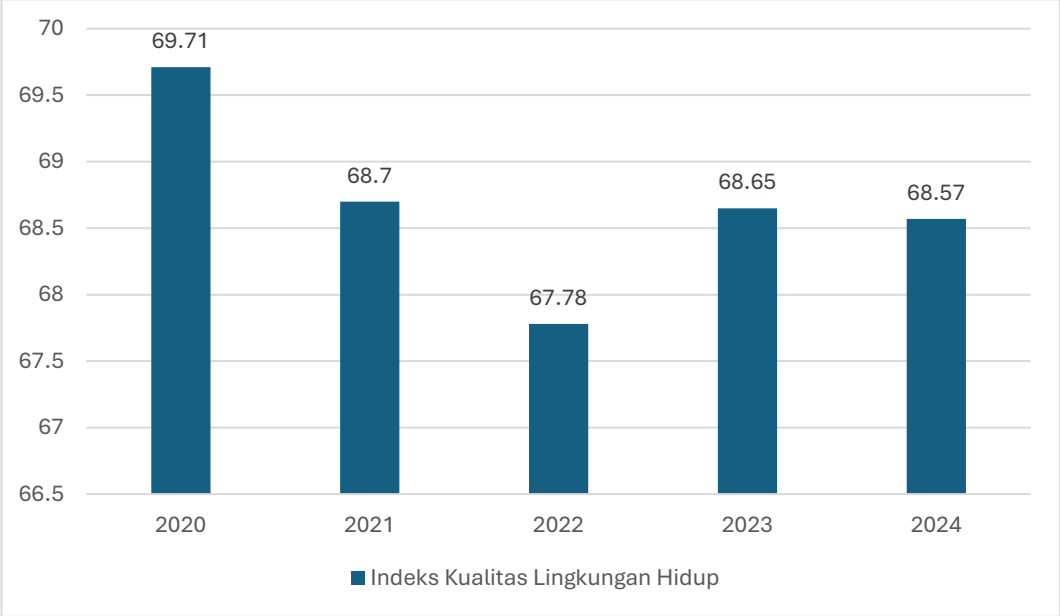

Sumber: Dinas PRKPLH Kab Tanah Laut 2024

Gambar 2. 10 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

2.1.1.4.3 Akses Sanitasi Rumah Tangga

Luas lantai rumah penduduk di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebagian besar adalah 50-99 m² yaitu 55,99% dan angka ini adalah yang

tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Selatan. Luas lantai ini cukup untuk keluarga dengan jumlah anggota 2-3 orang. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah terjadinya peningkatan rumah tangga yang memiliki luas lantai kurang dari 50 m^2 yaitu pada tahun 2020 sebesar 23,42% turun menjadi 22,48% pada tahun 2024. Rumah tangga yang memiliki luas lantai diatas 150 m^2 mengalami peningkatan dari 7,91% pada tahun 2020 menjadi 8,13% pada tahun 2024.

Tabel 2. 37 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah, 2020-2024

Tahun	Luas (m^2)				
	<50	50-99	100-149	150+	Total
2020	23,42	51,60	17,07	7,91	100,00
2021	28,43	53,94	14,25	3,38	100,00
2022	25,39	55,74	12,20	6,67	100,00
2023	25,94	52,92	16,97	4,17	100,00
2024	22,48	55,99	13,40	8,13	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Dalam hal kepemilikan fasilitas buang air besar di rumah tangga, kondisi Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar yaitu 1,72% sedangkan fasilitas buang air besar umum adalah 1,45%. Angka tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2024 fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri di Kabupaten Tanah Laut mencapai 92,07%, lebih tinggi bila dibandingkan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 90,63%. Dengan demikian secara relatif kondisi Kabupaten Tanah Laut memerlukan perhatian.

Tabel 2. 358 Status Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar (%), 2020-2024

Tahun	Sendiri	Bersama	Komunal, Umum	Tidak Digunakan	Tidak Ada	Total
2020	88,13	8,45	2,88	-	0,54	100
2021	90,27	3,56	2,16	-	4,01	100
2022	85,05	6,46	3,19	-	5,30	100
2023	88,95	7,00	2,17	-	1,88	100
2024	92,07	4,76	1,45	-	1,72	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Meskipun sebagian besar rumah tangga telah memiliki fasilitas buang air besar, keberadaan fasilitas tersebut belum tentu memenuhi kriteria sanitasi layak. Hal ini disebabkan oleh masih adanya perbedaan dalam jenis, kualitas, serta cara pengelolaan limbah dari fasilitas tersebut sehingga penting untuk melihat sejauh mana rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang memenuhi standar layak, baik dari segi teknis maupun lingkungan.

Tabel 2. 369 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Kalimantan Selatan (%), 2020-2023

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
	(%)	(%)	(%)	(%)
Tanah Laut	78,82	66,42	77,00	74,290
Kotabaru	75,75	70,96	71,57	70,13
Banjar	79,43	77,19	81,37	82,57
Barito Kuala	46,72	55,29	52,75	56,66
Tapin	79,78	79,28	79,81	80,67
Hulu Sungai Selatan	82,79	83,69	80,92	82,86
Hulu Sungai Tengah	80,68	87,62	79,85	83,86
Hulu Sungai Utara	88,96	88,09	90,55	92,37
Tabalong	95,00	96,54	95,11	95,03
Tanah Bumbu	83,89	86,70	90,88	92,81
Balangan	87,62	89,42	91,80	95,66
Banjarmasin	88,07	91,48	89,96	88,66
Banjarbaru	92,27	89,11	92,39	89,77
Kalimantan Selatan	**81,17**	**81,43**	**82,55**	**82,89**

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu 2020

hingga 2023. Pada tahun 2020, angkanya cukup tinggi yaitu 78,82%, namun turun drastis menjadi 66,42% pada 2021. Setelah itu, terjadi peningkatan kembali menjadi 77,00% pada 2022, dan sedikit menurun menjadi 74,29% pada 2023. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung stabil dan meningkat dari 81,17% pada 2020 menjadi 82,89% pada 2023, maka capaian Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawah rata-rata provinsi.

2.1.1.4.4 Persampahan

Pada Tahun 2024, Kabupaten Tanah Laut memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang terdiri dari 29 Bank Sampah, 2 TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*), 4 Rumah Kompos, dan 147 SDM yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Jumlah infrastruktur ini menunjukkan adanya sistem pengelolaan sampah yang telah berjalan, meskipun kapasitasnya masih perlu ditingkatkan untuk mengimbangi timbulan sampah yang terus meningkat setiap tahun.

Data timbulan sampah di Kalimantan Selatan menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2023, timbulan sampah tercatat sebesar 791.543,64 ton, sedangkan pada tahun 2024 diprediksi menurun menjadi 698.398,17 ton, atau turun sebesar 11,75%. Penurunan ini menunjukkan upaya pengurangan sampah yang berhasil di tingkat provinsi. Jika Kabupaten Tanah Laut mampu mengadopsi strategi serupa, maka jumlah timbulan sampah di tahun 2024 bisa dikurangi melalui program pengelolaan yang lebih efektif.

Tabel 2. 40 Jumlah Timbulan Sampah di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2024

Tahun	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2020	-	-
2021	141.74	51,733.64
2022	141,94	51.807,37
2023	-	52.712.42
2024	145,65	53.161,08

Sumber : sipsn.menlhk.go.id

Berdasarkan data timbulan sampah di Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat bahwa volume sampah yang dihasilkan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, timbulan sampah harian tercatat sebesar 141,74 ton, kemudian meningkat sedikit pada tahun 2022 menjadi 141,94 ton. Lonjakan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan timbulan harian mencapai 145,65 ton, dan akhirnya mencapai 147,36 ton pada tahun 2024.

Kenaikan ini juga terlihat dalam jumlah timbulan sampah tahunan. Pada tahun 2021, total sampah tahunan mencapai 51.733,64 ton, kemudian meningkat menjadi 51.807,37 ton di tahun 2022. Kenaikan lebih tinggi terjadi pada tahun 2023 dengan 52.712,42 ton, dan akhirnya mencapai 53.161,08 ton pada tahun 2024. Tren peningkatan ini menandakan bahwa jumlah sampah di Kabupaten Tanah Laut terus bertambah dari tahun ke tahun.

2.1.1.5 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.5.1 Gas Emisi Rumah Kaca

Kabupaten Tanah Laut memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakunci di Kecamatan Pelaihari yang berpotensi menjadi sumber emisi gas rumah kaca. Pengelolaan sampah di wilayah ini dapat menghasilkan berbagai jenis gas rumah kaca, seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan dinitrogen oksida (N_2O), yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik semakin meningkatkan risiko pelepasan emisi tersebut ke atmosfer. Untuk mengurangi dampak negatifnya, diperlukan berbagai langkah mitigasi, seperti efisiensi energi, pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, pengelolaan sampah organik yang lebih baik, serta peningkatan penggunaan transportasi umum.

Contoh emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim termasuk karbon dioksida dan metana. Ini berasal dari penggunaan bensin untuk mengendarai mobil atau batu bara untuk memanaskan gedung, misalnya. Pembukaan lahan dan hutan juga dapat melepaskan karbon dioksida. Tempat pembuangan sampah merupakan sumber utama emisi

metana. Energi, industri, transportasi, bangunan, pertanian dan tata guna lahan termasuk di antara penghasil emisi utama. Program Kampung Iklim (ProKlim) dapat menjadi solusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui aksi mitigasi dan adaptasi, seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penghijauan, serta efisiensi energi di tingkat lokal. Kabupaten Tanah Laut telah mencanangkan Program Kampung Iklim guna mendorong kelompok masyarakat melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Proklim yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah laut ini berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat kampung terlibat secara aktif dalam pengelolaannya.

2.1.1.5.2 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Tanah Laut memiliki skor Indeks Risiko Bencana yaitu 145,09 dengan kategori kelas risiko Tinggi. Data yang digunakan merupakan data hasil kajian risiko yang terdiri dari data: (1) bahaya per jenis bencana, (2) jiwa terpapar per jenis bencana, (3) kerugian rupiah per jenis bencana, (4) kerusakan lingkungan (ha) per jenis bencana dan (5) kapasitas pemerintah daerah per kabupaten/kota.

Berdasarkan kondisi wilayahnya dilihat dari karakteristik ekoregionnya, Kabupaten Tanah Laut memiliki kerawanan terhadap kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan pendangkalan sungai, erosi permukaan dan degradasi lahan karena penambangan batubara, tanah longsor. Berdasarkan Data Jumlah Kejadian Bencana Alam menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 Tabel 2.41, bencana banjir masih menjadi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Tanah Laut dengan total 12 kejadian. Disusul dengan bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 49 kejadian, angin puting beliung sebanyak 23 kejadian.

Tabel 2. 371 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Banjir	Tanah Longsor	Kebakaran Hutan dan Lahan	Angin Puting Beliung	Gelombang Pasang
Panyipatan	0	0	2	3	0
Takisung	0	0	1	3	2
Kurau	1	0	1	3	0
Bumi Makmur	0	0	0	2	0
Bati-Bati	0	0	13	1	0
Tambang Ulang	0	0	8	3	0
Pelaihari	6	0	20	6	0
Bajuin	0	0	1	0	0
Batu Ampar	0	0	0	2	0
Jorong	3	0	1	0	0
Kintap	2	0	2	0	1
Tanah Laut	**12**	**0**	**49**	**23**	**3**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Banjir menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Kabupaten Tanah Laut yang berbagai macam kerugian. Kabupaten Tanah Laut rawan bencana banjir karena beberapa faktor utama. Secara topografi dan hidrologi, wilayah ini dilintasi beberapa sungai besar seperti Sungai Maluka, Tabanio, Sabulur, dan Sawarangan yang bermuara ke Laut Jawa. Saat curah hujan tinggi, sungai-sungai ini sering mengalami peningkatan debit air yang berujung pada luapan ke permukiman dan lahan pertanian. Selain itu, lokasi pesisir yang membentang sepanjang 200 km membuat wilayah ini rentan terhadap banjir rob akibat pasang air laut. Angin kencang dan gelombang tinggi di Laut Jawa semakin memperparah potensi banjir di daerah pesisir.

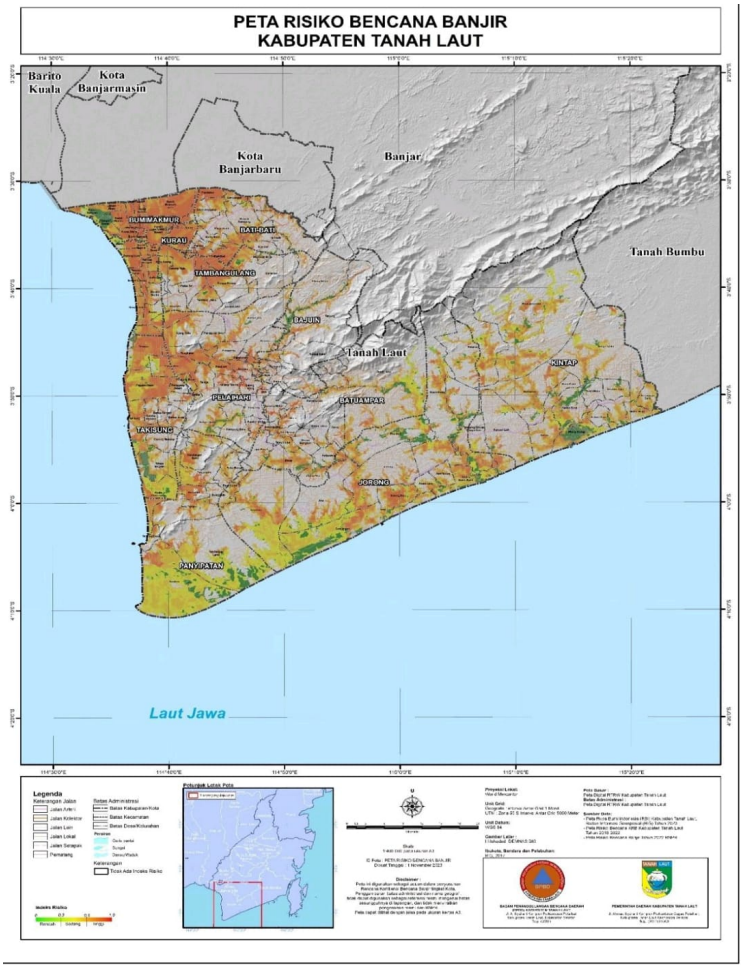

Sumber : Kajian Risiko Bencana KRB Kabupaten Tanah Laut, 2023

Gambar 2. 11 Peta Risiko Bencana Banjir Kab tanah Laut

Dari peta di atas dapat dilihat bahwa beberapa kecamatan dengan tingkat kerawanan banjir tinggi meliputi **Pelaihari, Kurau, Bati-Bati, Takisung, Jorong, Panyipatan, Kintap, Tambang Ulang, Batu Ampar, Bajuin, dan Bumi Makmur**. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi, seperti **pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, dan adaptasi masyarakat pesisir**, untuk mengurangi dampak bencana dan mendukung keberlanjutan lingkungan serta ekonomi daerah. Bencana yang terjadi di Kab Tanah tersebut dapat mengakibatkan berbagai kerusakan, terutama secara material.

Selama tahun 2024, terjadi beberapa bencana alam di Kabupaten Tanah Laut yang berdampak pada kerusakan rumah warga di setiap

Kecamatan. Rumah rusak ringan terbanyak berada pada Kecamatan Panyipatan yaitu 22 unit, rusak sedang terbanyak berada pada Kecamatan Takisung masing- masing 3 unit rumah, rusak berat terbanyak ada pada Kecamatan Kintap yaitu 26 unit rumah dan terendam terbanyak berada pada Kecamatan Kintap sebanyak 687 unit rumah.

Tabel 2. 382 Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Terendam
Panyipatan	22	0	1	0
Takisung	15	3	5	0
Kurau	6	2	1	0
Bumi Makmur	1	1	0	0
Bati-Bati	1	2	0	0
Tambang Ulang	0	1	1	0
Pelaihari	0	0	1	0
Bajuin	0	0	0	0
Batu Ampar	0	0	1	0
Jorong	0	0	0	301
Kintap	0	0	26	687
Tanah Laut	**45**	**9**	**36**	**988**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Sebanyak 3.623 korban mengungsi akibat bencana banjir dan 230 korban mengungsi akibat bencana angin puting beliung di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024. Pengungsi terbanyak yang diakibatkan bencana banjir berada pada Kecamatan Kintap sebanyak 2.638 pengungsi dan pengungsi terbanyak akibat angin puting beliung berada pada Kecamatan Panyipatan yaitu sebanyak 122 pengungsi.

Tabel 2. 393 Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Banjir dan Angin Puting Beliung Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Meninggal dan Hilang		Luka- luka	Mengungsi		
	Banjir	Angin Puting Beliung	Banjir	Angin Puting Beliung	Banjir	Angin Puting Beliung
Panyipatan	-	-	-	-	0	122
Takisung	-	-	-	-	0	59
Kurau	-	-	-	-	0	26

Kecamatan	Meninggal dan Hilang		Luka- luka	Mengungsi		
	Banjir	Angin Puting Beliung	Banjir	Angin Puting Beliung	Banjir	Angin Puting Beliung
Bumi Makmur	-	-	-	-	0	9
Bati-Bati	-	-	-	-	0	13
Tambang Ulang	-	-	-	-	0	0
Pelaihari	-	-	-	-	0	1
Bajuin	-	-	-	-	0	0
Batu Ampar	-	-	-	-	0	0
Jorong	-	-	-	-	985	0
Kintap	-	-	-	-	2.638	0
Kab. Tanah Laut	-	-	-	-	**3.623**	**230**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Bencana akan terjadi dan menimbulkan dampak kerugian bila skala dari ancaman terlalu tinggi, kerentanan terlalu besar, dan kapasitas serta kesiapan yang dimiliki masyarakat atau pemerintah tidak cukup memadai untuk mengatasinya. Ancaman atau bahaya tidak akan menjadi bencana apabila kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian baik fisik maupun korban jiwa. Secara teknis, bencana terjadi karena adanya ancaman dan kerentanan yang bekerjasama secara sistematis serta dipicu oleh faktor-faktor luar sehingga menjadikan potensi ancaman yang tersembunyi muncul ke permukaan sebagai ancaman nyata. Risiko bencana daerah dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan menganalisis nilai nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan nilai kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung.

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel. Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Tanah Laut. Tingkat risiko untuk 7 (tujuh) jenis bencana

di Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2. 404 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Laut

Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
Banjir	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan data dari BNPB, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 415 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana Kab. Tanah Laut	178,00	178,00	156,33	170,82	145,09

Sumber: BNPB, 2024

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas dan ketangguhan suatu daerah dalam menghadapi berbagai risiko dan tantangan, baik yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kelembagaan. Semakin tinggi nilai IKD, semakin besar kemampuan suatu daerah dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan pembangunan. Berikut adalah perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2020–2024:

Tabel 2. 46 Indeks Ketahanan Daearah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daearah Kalimantan Selatan	0,39	0,43	0,43	0,53	0,55
Indeks Ketahanan Daearah Kabupaten Tanah Laut	-	0,24	-	0,51	0,65

Sumber: BNPB, 2024

Perkembangan IKD Kalimantan Selatan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten. Pada tahun 2020, IKD Kalimantan Selatan berada di angka 0,39, mencerminkan kapasitas ketahanan daerah yang masih cukup terbatas. Tahun 2021, IKD mengalami peningkatan menjadi 0,43, yang kemudian tetap stabil di angka yang sama pada tahun 2022. Tahun 2023, IKD mengalami lonjakan signifikan menjadi 0,53, yang menunjukkan adanya perbaikan substansial dalam berbagai aspek ketahanan daerah. Tren positif berlanjut pada tahun 2024, di mana IKD meningkat lagi menjadi 0,55, yang mencerminkan semakin kuatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi risiko di Kalimantan Selatan. Sedangkan, di Kabupaten Tanah Laut memiliki IKD yang mengalamii tren peningkatan juga dengan tahun 2024 menjadi nilai IKD tertinggi, yaitu 0,65 yang menunjukkan bahwa ketahanan Kab Tanah Laut sudah cukup baik.

Peningkatan IKD ini menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan telah berhasil memperkuat berbagai faktor penopang ketahanan daerah, seperti: Peningkatan tata kelola pemerintahan, Penguatan ekonomi lokal, Pengurangan kerentanan sosial, Perbaikan infrastruktur dasar, serta Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana. Dengan tren yang terus meningkat, IKD Kalimantan Selatan diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan risiko sosial.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2043 Pasal 42, telah dipaparkan kawasan rawan bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut adalah kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di seluruh kecamatan. Berikut luasan kawasan rawan bencana alam khususnya kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi menurut kecamatan:

- Kecamatan Bajuin seluas 90,95 Ha
- Kecamatan Bati-Bati seluas 6351,8 Ha
- Kecamatan Batu Ampar seluas 209,54 Ha
- Kecamatan Bumi Makmur seluas 8396,77 Ha
- Kecamatan Jorong seluas 7022,91 Ha
- Kecamatan Kintap seluas 1617,65 Ha
- Kecamatan Kurau seluas 4862,43 Ha
- Kecamatan Panyipatan seluas 8468,86 Ha
- Kecamatan Pelaihari seluas 4779,84 Ha
- Kecamatan Takisung seluas 13.011,85 Ha
- Kecamatan Tambang Ulang seluas 5275,67 Ha

Selain hal-hal tersebut, diatur juga mengenai jalur evakuasi bencana di Kabupaten Tanah Laut. Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut ayat (1), (2), (3) meliputi:

1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perda RTRW huruf e, terdiri atas:
    a. Jalur Evakuasi Bencana, dan
    b. Tempat Evakuasi Bencana
2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
    a. Jalan Arteri Primer, melintas di:
        1. Jln. Gunung Kayangan (Pelaihari);
        2. Jln. Muslimin (Pelaihari);

3. ruas Bati Bati - Bts. Kota Pelaihari;
4. ruas Bts. Kota Pelaihari - Kp. Asam-Asam;
5. ruas Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala) - Bati Bati; dan
6. ruas Kp. Asam Asam – Kintab.

b. Jalan Kolektor Primer, melintas di:
1. Jln. Pancasila (Pelaihari);
2. ruas Padang Luas - Gunung Raja;
3. ruas Pelaihari – Batakan; dan
4. ruas Pelaihari – Takisung.

c. Jalan lokal sekunder, melintas di Kecamatan Pelaihari; dan

d. Jalan lingkungan primer, melintas di Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Jorong, Kecamatan Pelaihari, dan Kecamatan Takisung.

3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
1. Tempat Evakuasi Akhir di Kecamatan Pelaihari;
2. Tempat Evakuasi Sementara di Kecamatan Bati-Bati (tiga lokasi);
3. Tempat Evakuasi Sementara di Kecamatan Jorong.
4. Tempat Evakuasi Sementara di Kecamatan Kintap,
5. Tempat Evakuasi Sementara di Kecamatan Kurau,
6. Tempat Evakuasi Sementara di Kecamatan Pelaihari (4 lokasi)
7. Tempat Evakuasi Sementara di Kecamatan Takisung (tiga lokasi).

Sementara itu, mengenai pengembangan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut 2024-2043 ditetapkan sebagai berikut:

1. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
a. Penyediaan sistem peringatan dini;

b. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
c. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
d. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

2. Kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
   a. Penyediaan sistem peringatan dini;
   b. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
   c. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
   d. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
   a. Penyediaan sistem peringatan dini;
   b. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
   c. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
   d. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
4. Kawasan Peternakan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
   a. Penyediaan sistem peringatan dini;
   b. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
   c. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
   d. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
5. Kawasan Perikanan Budidaya yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
   a. Penyediaan sistem peringatan dini;
   b. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;

c. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
d. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

6. Kawasan Pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
   a. Penyediaan sistem peringatan dini;
   b. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
   c. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
   d. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
7. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
   a. Penyediaan sistem peringatan dini;
   b. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
   c. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
   d. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
8. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
   a. Penyediaan sistem peringatan dini;
   b. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
   c. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
   d. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
9. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
   a. Penyediaan sistem peringatan dini;
   b. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
   c. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan

d. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

10. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
    a. Penyediaan sistem peringatan dini;
    b. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
    c. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
    d. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
11. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
    a. Penyediaan sistem peringatan dini;
    b. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
    c. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
    d. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
12. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
    a. Penyediaan sistem peringatan dini;
    b. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
    c. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
    d. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi

2.1.1.5.3 Luas Wilayah Kebanjiran dan Kekeringan

Menurut Perda RTRW 2024-2043 Nomor 5 Tahun 2024, kawasan potensi rawan banjir tingkat tinggi meliputi Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Batu Ampar. Dalam kurun waktu 2000-2017, jumlah bencana banjir di Kabupaten

Tanah Laut tercatat sebanyak 137 kejadian dengan korban meninggal dan hilang sebanyak 9 orang dan rumah yang terendam mencapai 3.697 rumah. Ancaman bahaya banjir di Kabupaten Tanah Laut termasuk pada kelas tinggi dengan areal yang terdampak bisa mencapai 182.755 ha.

Untuk bencana kekeringan, potensi bahayanya termasuk dalam kategori sedang dengan luasan terdampak dapat mencapai 363.136 ha. Potensi penduduk yang terpapar kekeringan adalah sebanyak 348.226 jiwa Potensi kerugian akibat kekeringan di Kabupaten Tanah Laut dapat mencapai Rp 1328,3 miliar dengan potensi kerusakan lingkungan 32.603 ha. Di satu sisi, kelas ketahanan daerah dalam menghadapi kekeringan masih dalam kategori rendah dengan kelas kesiapsiagaan yang rendah sehingga kelas kapasitas daerah masih dalam kategori rendah.

2.1.1.6 Aspek Demografi

2.1.1.6.1 Kependudukan

Penduduk sebagai faktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk dibagi atas kelompok– kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 adalah sebanyak 369.818 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Laut selama periode 2020- 2024 adalah sebesar 1.27%.

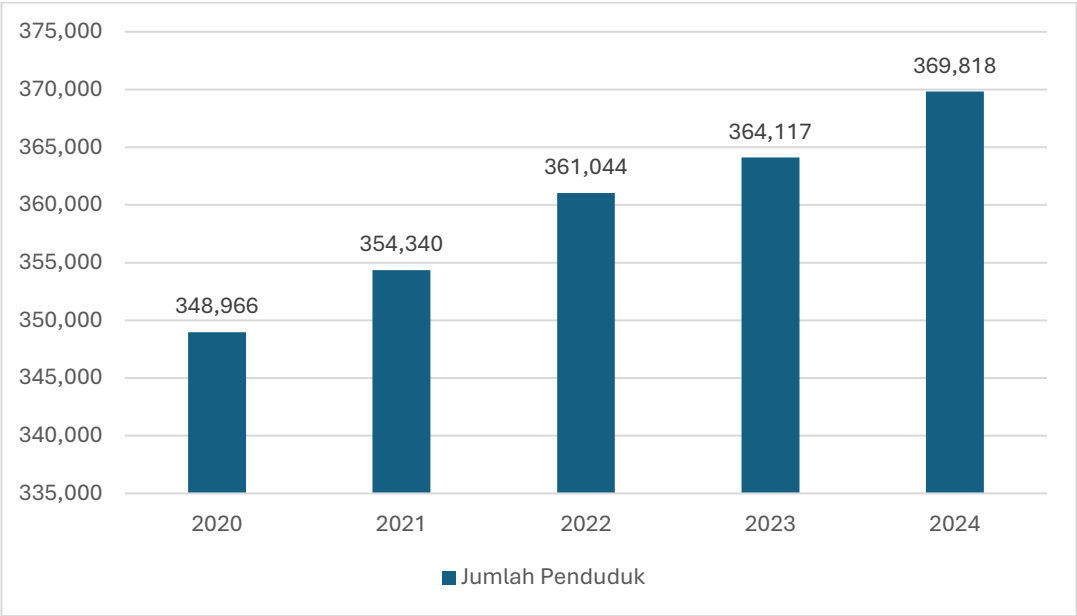

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Gambar 2. 12 Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Tanah Laut (Jiwa), 2020-2024

Jika dilihat dari penyebarannya, Kecamatan Pelaihari memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk di kecamatan yang lain. Hal ini dapat dipahami mengingat Kecamatan Pelaihari merupakan ibukota Kabupaten Tanah Laut dimana pusat pemerintahan dan bisnis berada. Tidak hanya porsi jumlah penduduknya yang lebih tinggi, namun pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Pelaihari juga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk di kecamatan lainnya di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2. 47 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut (Jiwa) 2020- 2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Panyipatan	25.135	25.544	26.049	26.063	26.439
Takisung	32.378	32.818	33.379	33.735	34.310
Kurau	13.580	13.783	14.038	14.523	14.765
Bumi Makmur	13.765	13.960	14.207	14.347	14.572
Bati-Bati	44.737	45.350	46.130	46.195	46.889
Tambang Ulang	17.797	18.092	18.457	19.064	19.318
Pelaihari	77.246	78.634	80.323	81.234	82.576
Bajuin	19.150	19.480	19.884	19.985	20.386

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Batu Ampar	27.557	28.000	28.549	28.677	29.050
Jorong	34.553	35.124	35.827	35.731	36.457
Kintap	43.068	43.555	44.201	44.563	45.052
Tanah Laut	**348.966**	**354.340**	**361.044**	**364.117**	**369.818**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 82.576 jiwa. Kecamatan Tambang Ulang menjadi kecamatan yang laju pertumbuhan penduduk tertinggi per tahun 2020-2024 yaitu sebesar 1,64%. Wilayah yang memiliki penduduk tertinggi kedua adalah Kecamatan Bati-Bati yaitu sebanyak 46.889 jiwa, disusul Kecamatan Kintap sebanyak 45.052 jiwa, dan Kecamatan Jorong sebanyak 36.457 jiwa. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Bumi Makmur yaitu 14.572 jiwa. Jika dilihat dari kepadatan penduduk, wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebesar 227 jiwa per km2, disusul oleh Kecamatan Kurau sebesar 215 jiwa per km2, dan Kecamatan Bati-Bati sebesar 200 jiwa per km2. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah diurutkan dari yang paling kecil adalah Kecamatan Jorong yaitu sebesar 52 jiwa per km2, Kecamatan Kintap sebesar 53 jiwa per km2, dan Kecamatan Panyipatan sebesar 68 jiwa per km2.

Tabel 2. 48 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Km2 Kabupaten Tanah Laut menurut Kecamatan

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk PerTahun 2020-2024 (%)	Kepadatan Penduduk Km^2 2024
Panyipatan	1,04	68
Takisung	1,06	153
Kurau	1,31	215
Bumi Makmur	1,27	139
Bati-Bati	1,26	200
Tambang Ulang	1,64	97
Pelaihari	1,28	227
Bajuin	1,21	72
Batu Ampar	1,32	69
Jorong	1,77	52

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk PerTahun 2020-2024 (%)	Kepadatan Penduduk Km^2 2024
Kintap	1,02	53
Tanah Laut	**1,27**	**96**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 adalah sebanyak 187.908 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 181.910 jiwa.

Tabel 2. 49 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	179.012	181.706	185.076	185.026	187.908
Perempuan	169.954	172.634	175.968	179.091	181.910
Sex Ratio	105,33	105,26	105,18	103,31	103,30

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 adalah sebesar 103,30 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tanah Laut terdapat 103 penduduk laki-laki. Selanjutnya, berdasarkan kelompok umur pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut paling banyak berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebanyak 33.613 jiwa, diikuti kelompok umur 5-6 tahun sebanyak 32.187 jiwa, dan kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 31.523 jiwa.

Tabel 2. 50 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	13.876	12.659	26.535
5-9	16.536	15.651	32.187
10-14	17.281	16.332	33.613
15-19	14.705	14.022	28.727
20-24	16.282	15.241	31.523

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
25-29	13.971	13.313	27.284
30-34	14.228	14.211	28.439
35-39	14.012	14.326	28.338
40-44	14.952	15.122	30.074
45-49	13.927	13.572	27.499
50-54	11.939	11.090	23.029
55-59	9.312	9.325	18.637
60-64	6.694	6.665	13.359
65-69	4.690	4.432	9.122
70-74	2.837	2.597	5.434
75+	2.666	3.352	6.018
Jumlah	**187.908**	**181.910**	**369.818**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

2.1.1.6.2 Proyeksi Penduduk

Kabupaten Tanah Laut mengalami pertumbuhan penduduk yang stabil dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,27% per tahun dalam periode 2020-2024. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2024 yang mencapai 369.818 jiwa, proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2029 dihitung menggunakan metode eksponensial. Metode ini mempertimbangkan pertumbuhan yang bersifat kontinu dan menghasilkan estimasi jumlah penduduk di masa depan dengan lebih akurat. Berikut adalah hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut untuk lima tahun mendatang.

Tabel 2. 51 Proyeksi Jumlah Penduduk Kab Tanah Laut Tahun 2025-2029

Tahun	Jumlah Penduduk
2025	374.544
2026	379.331
2027	384.179
2028	389.090
2029	394.063

Sumber : BPS Kab Tanah Laut, Diolah (2025)

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, jumlah

penduduk diprediksi mencapai 374.544 jiwa, dan pada tahun 2029 akan bertambah menjadi 394.063 jiwa. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup konsisten, dengan kenaikan rata-rata sekitar 4.500–5.000 jiwa per tahun.

Peningkatan jumlah penduduk ini dapat berdampak pada berbagai sektor, seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan akan sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengantisipasi pertumbuhan ini dengan perencanaan yang matang, terutama dalam penyediaan fasilitas publik dan strategi pembangunan berkelanjutan. Jika tren pertumbuhan tetap stabil, kebijakan kependudukan yang efektif harus diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan serta ekonomi daerah.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni menggunakan perhitungan tahun dasar 2010. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan

ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Selama periode 2020-2022, tren PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan dari tahun 2020-2021 dari Rp. 13.786,685,56 juta menjadi 15.326.244,74 juta, dan naik kembali pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 19.019.178,93 juta. Tren serupa juga ditunjukkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2020 pada posisi Rp 10.164,061, 96 juta, kembali meningkat menjadi Rp. 10.515.159,53 juta dan pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 11.053.374,62 juta pada tahun 2022. Pada tahun 2024 PDRB atas harga berlaku menurut pengeluaran meningkat kembali dari tahun sebelumnya menjadi Rp21.254,10.

Tabel 2. 52 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Tahun	PDRB (miliar Rupiah)
2020	13.786,69
2021	15.332,87
2022	19.022,37
2023	20.165.71
2024	21.254,10

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Tabel 2. 53 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,30	1,73	2,63	2,06	7,94
Pertambangan dan Penggalian	-4,96	4,45	6,22	3,73	3,12
Industri Pengolahan	-4,27	5,01	3,86	5,33	5,29
Pengadaan Listrik dan Gas	5,02	4,78	7,79	8,14	7,94
Pengadaan Air	3,45	3,91	4,96	4,46	3,18
Konstruksi	-0,98	3,84	4,11	7,36	5,61
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,89	2,48	7,10	6,37	4,39
Transportasi dan Pergudangan	-1,87	1,59	13,64	9,86	3,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,23	2,29	6,54	8,85	7,55
Informasi dan Komunikasi	6,34	6,57	6,63	5,73	4,67
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,29	-1,44	0,54	6,25	6,75
Real Estate	1,90	5,10	4,59	7,40	4,45
Jasa Perusahaan	-1,74	3,49	6,89	7,24	5,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,14	4,71	-0,54	3,51	6,96
Jasa Pendidikan	2,64	0,83	3,32	2,15	4,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,52	8,20	4,59	6,36	4,84
Jasa lainnya	-0,86	0,84	6,29	7,71	8,68
PDRB	**-1,95**	**3,45**	**5,12**	**4,78**	**5,01**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Dilihat dari tabel di atas, secara agregat perekonomian Tanah Laut mengalami pertumbuhan sebesar 5,12% di tahun 2022 setelah pada tahun 2020 mencapai angka negatif. Pertumbuhan positif ini artinya pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya, tetapi mengalami penurunan kembali di Tahun 2023 sebesar 6,6%. Sektor lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan paling rendah di Tahun 2023 adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu 2,06% tetapi jika dibandingkan dengan di Tahun 2021, kondisi tersebut sudah melonjak tinggi, walaupun di Tahun 2023

di sektor tersebut mengalami penurunan. Sedangkan, pada tahun 2024 memiliki laju pertumbuhan mencapai 5,01% meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu Jasa Lainnya (8,68%), diikuti Pengadaan Listrik dan Gas (7,94%) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (7,94%). Sektor yang memiliki pertumbuhan terendah pada tahun 2024, yaitu sektor Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan hanya 4,01%.

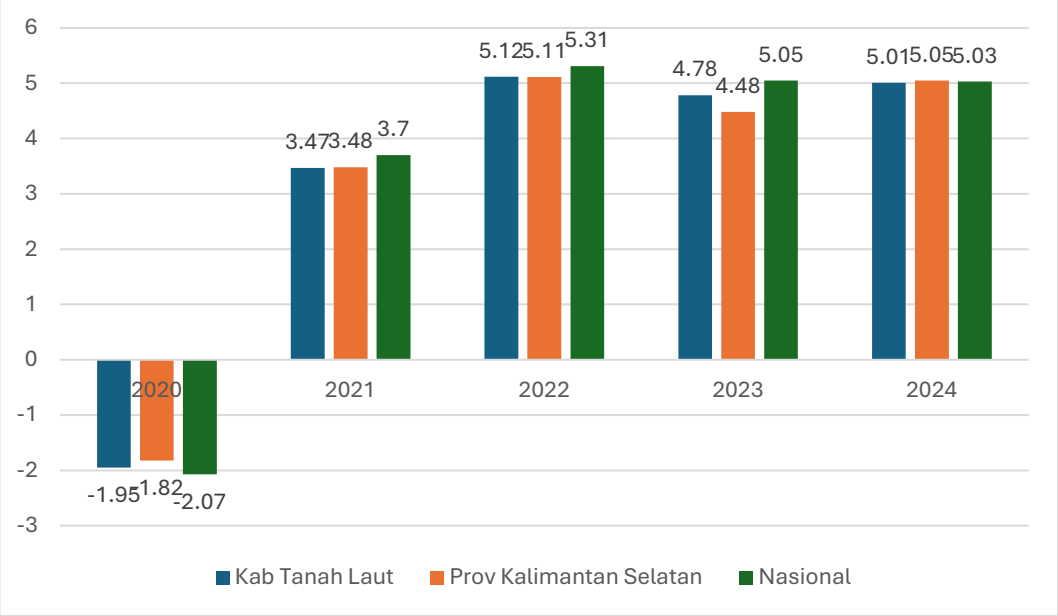

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Gambar 2. 13 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, 2020-2024

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi, namun dinyatakan dalam istilah nominal, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diamati dalam rentang waktu yang lebih besar, seperti tahun ke tahun (YoY), atau dekade ke dekade. Gambar 2.8 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut terkontraksi cukup dalam di angka -1,95 yang merupakan salah satu dampak dari pandemi covid-19. Namun pada tahun

2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut mampu bangkit ke angka 3,45 dan pada tahun 2022 menjadi 5,12 % dan di Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dari 5,12% di Tahun 2022 menjadi 5,05%. Pada tahun 2024, ekonomi di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan kembali menjadi 5,01%.

a. Struktur Ekonomi

Beragamnya potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di suatu wilayah memberikan warna pada struktur ekonomi pada wilayah tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sectoral menunjukkan menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusinya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Tabel 2. 54 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanah Laut (%), 2020-2024

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) atas Dasar Harga Berlaku (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,28	18,02	15,56	15,37	16,45
Pertambangan dan Penggalian	21,66	25,16	34,37	33,09	30,31
Industri Pengolahan	12,30	12,22	10,70	10,59	10,95
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
Pengadaan Air	0,20	0,19	0,16	0,16	0,16
Konstruksi	7,52	7,28	6,37	6,68	6,93

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) atas Dasar Harga Berlaku (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,49	11,29	10,20	10,54	10,72
Transportasi dan Pergudangan	6,25	5,78	5,55	6,19	5,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,61	1,52	1,34	1,41	1,49
Informasi dan Komunikasi	3,23	3,11	2,70	2,72	2,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,56	1,45	1,24	1,26	1,28
Real Estate	2,09	2,02	1,72	1,78	1,84
Jasa Perusahaan	0,37	0,35	0,31	0,33	0,34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95	5,68	4,64	4,71	4,97
Jasa Pendidikan	4,37	4,01	3,38	3,33	3,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,19	1,18	1,01	1,05	1,06
Jasa lainnya	0,82	0,75	0,67	0,71	0,77
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Dilihat dari gambar di atas, perekonomian Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sebesar 33,09% pada tahun 2023. Kemudian sektor andalan kedua di Kabupaten Tanah Laut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, distribusi sektor ini mengalami fluktuasi. Sedangkan, pada tahun 2024 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan sektor pertambangan dan penggalian kembali menjadi sektor unggulan yang berkontribusi pada PDRB Kab Tanah dengan presentase secara berurutan, yaitu 16,45% dan 30,31%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan, sedangkan Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan. Industri lainnya yang perlu diperhitungkan karena distribusinya terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan dan Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Distribusi sektor ini juga mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir.

b. Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau per capita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah. maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan Tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

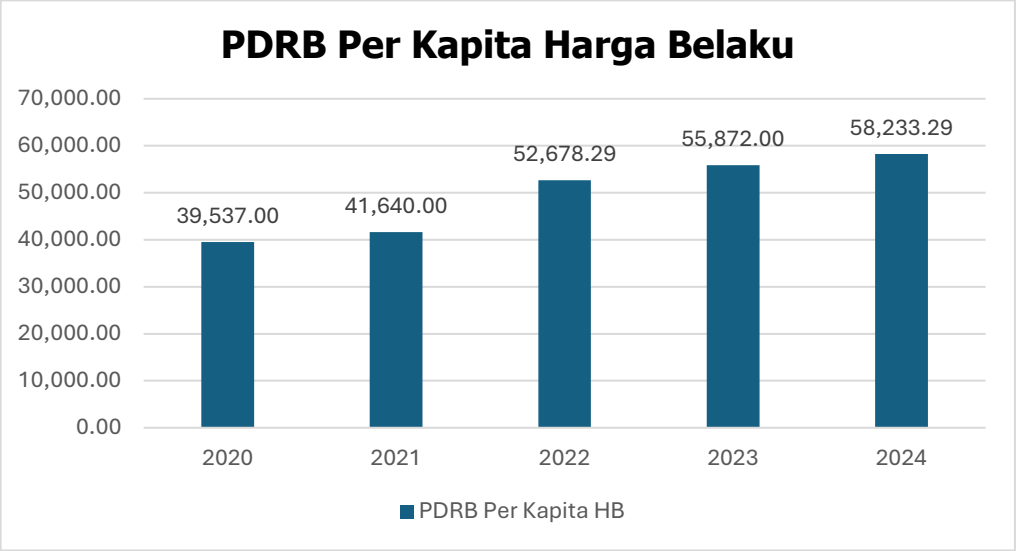

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2025

Gambar 2. 14 PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Laut Atas Harga Belaku, Tahun 2020-2024

PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut cenderung meningkat setiap tahunnya, baik untuk PDRB ADHB. Pada tahun 2020 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 39,537 juta dan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar Rp 55,872 juta. Pada tahun 2024, meningkat

kembali sebanyak 58,233 juta. Peningkatan dari PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut pada setiap tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Namun PDRB Per Kapita Kab. Tanah Laut masih berada di bawah PDRB Per Kapita Harga Belaku Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Rp. 60,21 juta pada tahun 2024.

2.1.2.1.2 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Pengukuran tingkat pemerataan dapat dilakukan dengan pendekatan koefisien gini. Koefisien gini atau rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran akumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk. Nilai rasio gini antara 0 hingga 1. Apabila nilai rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) Gini Ratio>0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) Gini Ratio 0,3–0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidak merataan sedang, dan (c) Gini Ratio<0,3 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan Tingkat ketidak merataan rendah.

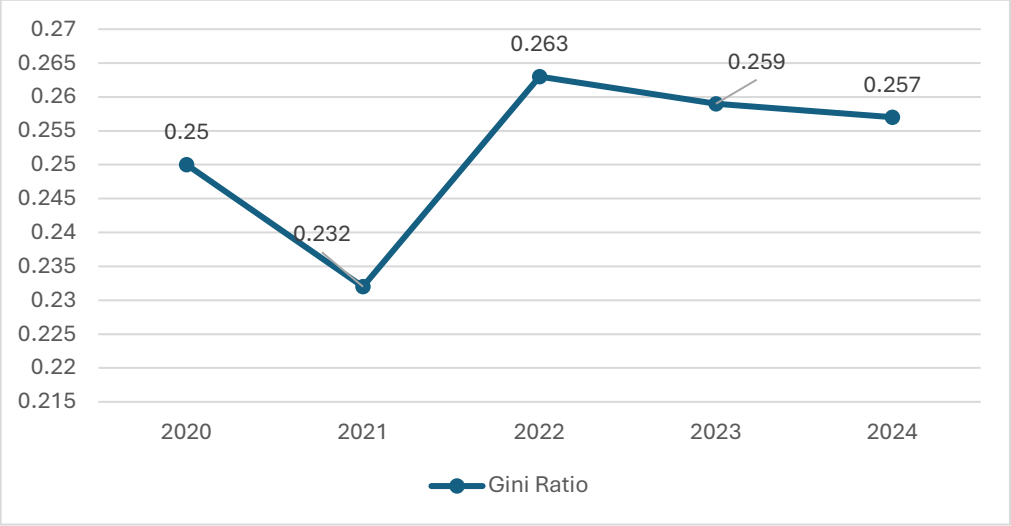

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Gambar 2. 15 Angka Gini Rasio Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.15, terlihat bahwa sepanjang periode 2020-2024, nilai gini rasio Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai gini rasio adalah sebesar 0,25, kemudian nilai gini rasio mengalami penurunan menjadi 0,232 dan naik menjadi 0,263 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan menjadi 0,259 dan 0,257. Selama periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa nilai rasio gini di Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori rendah yang menggambarkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Tanah Laut Tingkat ketidak merataannya rendah.

2.1.2.1.3 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur Tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut, namun telah menjadi permasalahan dunia. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin jika rata-rata pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Pada periode 2020-2023, perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut cukup fluktuatif.

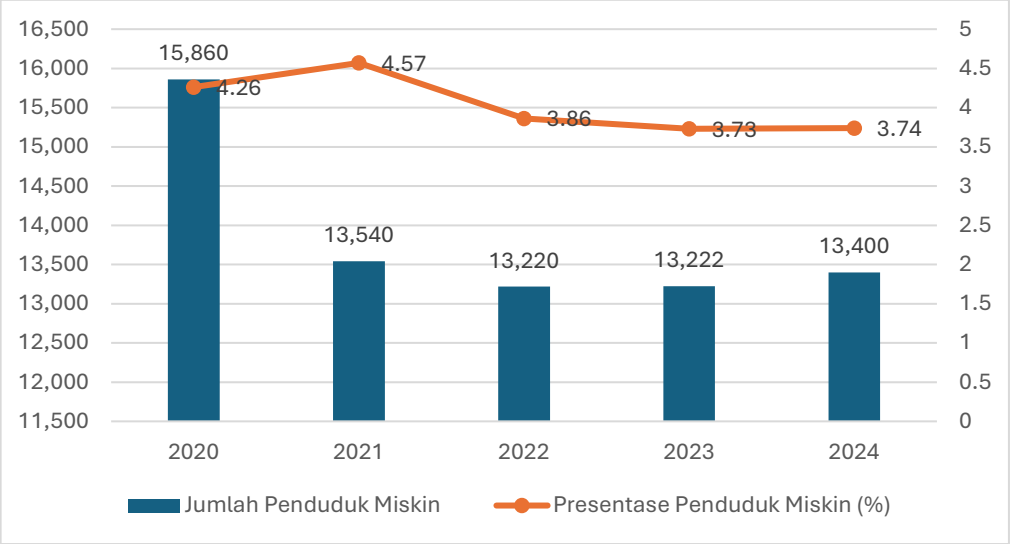

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Gambar 2. 16 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Pada tahun 2020 ke tahun 2021, terjadi kenaikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut dari 4,26% menjadi 4,57%. Umumnya, dinamika jumlah penduduk miskin sejalan dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah yang dicerminkan dari persentase penduduk miskin. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Akan tetapi, pada tahun 2022 dan 2023 kondisi tersebut dapat teratasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan yang cukup signifikan pada persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dan 2023. Penanganan kemiskinan pada tahun 2021 memang menjadi perhatian besar bagi pemerintah mengingat kondisi pandemi yang tengah berlangsung. Seiring dengan meredanya pandemi Covid-19, aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 di posisi paling rendah selama kurun waktu empat tahun terakhir sebesar 3,73%. Namun, pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin kembali meningkat mencapai 3,74 % atau sebanyak 13.400 jiwa.

Pada tahun 2020-2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan nilai indeks kedalaman kemiskinan dari 0,58 menjadi 0,68 kemudian di Tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan yang signifikan dari 0,679 menjadi 0,30. Hal ini menandakan bahwa rata- rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh pada garis kemiskinan. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020-2023 terjadi kenaikan indeks dari 0,12 menjadi 0,142, tetapi hal berbeda terjadi pada tahun 2022 dan 2023 indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan yang menandakan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan untuk menurun dalam empat tahun terakhir. Namun, indeks kedalaman kemiskinan

kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2024 dengan indeks kedalaman kemiskin 0,76 dan indeks keparahan kemiskin 0,21.

Tabel 2. 55 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,58	0,679	0,374	0,30	0,76
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,12	0,142	0,061	0,07	0,21

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

2.1.2.1.4 Angkatan Kerja

Pembangunan SDM di sisi lain juga tercermin melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel 2. 56 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK	72,03	72,27	67,55	69,76	70,22

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Selama periode 2020-2024, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, TPAK adalah sebesar 72,03%, kemudian naik menjadi sebesar 72,27% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai TPAK mengalami penurunan menjadi 67,55% dan terus

mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 70,22%. Persentase angkatan kerja di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 adalah sebesar 70,22%, sedangkan 29,78% dari penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang kegiatan utamanya selama referensi pencacahan adalah bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Persentase yang cukup tinggi tersebut dari sisi produktivitas tenaga kerja cukup bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja tentunya produktivitas juga tinggi. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan skill atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

Dalam aspek sumber daya manusia di daerah, masalah angka ketergantungan juga penting untuk diperhatikan. Rasio ketergantungan merupakan angka yang menunjukan beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif. Penduduk produktif yakni penduduk dengan usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk tidak produktif yakni penduduk dengan usia 0-14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif. Begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif.

2.1.2.1.5 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pendukung dalam kerangka pembangunan daerah. Kualitas SDM dapat dicerminkan melalui kualitas dari tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin baik kualitas tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Laut (2024), pada tahun 2024

sebagian besar penduduk di Kabupaten Tanah Laut yang bekerja masih memiliki pendidikan yang rendah. Sebanyak 44,07% penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi SD. Sedangkan 18,89% merupakan lulusan sekolah menengah pertama dan 18,01% merupakan lulusan sekolah menengah atas. Persentase penduduk bekerja yang telah menamatkan perguruan tinggi hanya sebesar 9,03%.

Tabel 2. 57 Persentase Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020-2024

Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
≤ Sekolah Dasar (SD	46,71	45,21	43,53	46,92	44,07
Sekolah Menengah Pertama	21,99	20,97	19,5	18,26	18,89
Sekolah Menengah Atas	23,28	24,43	30,19	25,74	28,01
Perguruan Tinggi	8,02	9,39	6,78	9,08	9,03

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

2.1.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan di daerah ini. TPT mencerminkan jumlah angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan meskipun aktif mencari, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, tingkat pendidikan, dan keterampilan tenaga kerja. Analisis terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanah Laut menjadi penting untuk memahami dinamika ketenagakerjaan serta merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 58 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 (%)

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tanah Laut	3,57	3,52	4,17	3,58	3,43

Sumber : Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanah Laut mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perbaikan dengan turunnya TPT menjadi 3,58% dan 3,43, mengindikasikan stabilisasi ekonomi dan efektivitas program ketenagakerjaan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menekan angka pengangguran, tantangan dalam penciptaan lapangan kerja dan kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan industri masih perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi, seperti peningkatan investasi, pelatihan tenaga kerja, serta penciptaan peluang kerja baru guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.1.2.2.1 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semaikin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Tanah Laut juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 73,81 tahun dan terus kembali naik menjadi 73,95 tahun pada tahun 2021, hingga pada tahun 2022 naik menjadi 74,21 tahun dan pada tahun 2023 naik menjadi 74,46. AHH sebesar 74,46 tahun. Sedangkan, pada tahun 2024 AHH kembalu meningkat menjadi 74,64 berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tanah Laut dapat menjalani hidup selama 70 tahun, lebih lebih tinggi dari AHH Provinsi sebesar

73,97 tahun. Dengan kisaran idealnya usia 25-85 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa umur panjang dan sehat penduduk Kabupaten Tanah Laut masih belum mencapai umur maksimal 85 tahun.

Tabel 2. 59 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,81	73,95	74,21	74,46	74,64

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2025

2.1.2.2.2 Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Kesehatan menjadi aspek penting dalam mendukung kualitas sumber daya manusia. Setiap kegiatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dilaksanakan secara berkesinambungan serta dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk menjamin terselenggaranya upaya tersebut, dibutuhkan sumber daya di bidang kesehatan yang salah satunya adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan diantaranya dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan umum seperti puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan ketersediaan, kemudahan dan keterjangkauan dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, diharapkan masalah kesehatan yang dihadapi oleh penduduk akan dapat segera diatasi. Namun, hal tersebut juga harus didukung oleh kondisi sosial dan ekonomi penduduk yang cukup baik, kemudahan akses serta tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Tabel 2. 60 Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
Apotek	13	15	15	39	18
Puskesmas Pembantu	55	55	55	62	56
Puskesmas	21	19	19	22	22
Poliklinik	10	9	9	10	12

Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0	0
Rumah Sakit	4	4	4	4	3

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penduduk dapat menjadi tolok ukur bahwa infrastruktur di bidang kesehatan telah tercukupi atau tidak. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk, pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Sampai dengan tahun 2024, terdapat 3 rumah sakit di Kabupaten Tanah Laut. Terjadi pengurangan Rumah Sakit Bersalin dan tidak ada sejak tahun 2020. Untuk puskesmas induk terdapat penurunan dari total 21 pada tahun 2020, menjadi 19-unit pada tahun 2021, dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 22 unit.

Adapun untuk lingkup di bawah kecamatan, terdapat Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berjumlah sebanyak 55 unit pada tahun 2020 lalu terjadi penambahan sebanyak 7 unit pada tahun 2023 dan terjadi pengurangan pada tahun2024 menjadi 56 pustu. Pustu sendiri adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) pustu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan. Penanggung jawab pustu adalah seorang perawat atau bidan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Termasuk dalam Upaya Kesehatan yang Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) adalah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Tabel 2. 61 Perkembangan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2020- 2024

Tenaga Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
Tenaga Medis (Dokter)	83	133	181	174	66
Perawat	50	600	664	532	230
Bidan	396	449	484	395	283
Farmasi	104	124	140	108	23
Ahli Gizi	68	66	79	71	45
Psikologi	-	-	3	3	-
Tenaga Kesehatan Masyarakat	11	17	43	40	30
Tenaga Kesehatan Lingkungan	43	47	53	50	41
Tenaga Keterapian	-	-	6	3	-
Tenaga Keteknisan Medis	-	-	68	5	22
Tenaga Teknik Biomedika	-	-	18	17	-
Total	1.279	1.512	2.001	1.475	740

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Pembangunan kesehatan harus terlaksana secara maksimal apabila kebutuhan sumber daya kesehatan berupa sarana, tenaga dan pembiayaan dapat terpenuhi. Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa total tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut mengalami fluktuatif dari 1.279 orang pada tahun 2020 menjadi 740 orang pada tahun 2024. Semua jenis tenaga kesehatan mengalami penurunan. Secara nominal, penambahan tenaga kesehatan terbanyak adalah perawat pada tahun 2021 bertambah dari 50 menjadi 600 dan bertambah lagi sebanyak 64 orang pada tahun 2022.

Indikator berikutnya untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah melalui angka kesakitan (morbiditas). Setiap individu memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Ketika mengalami keluhan kesehatan, terdapat penduduk yang merasa tetap dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Tetapi terdapat pula penduduk yang merasa jika keluhan kesehatan

yang dialami mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya. Adapun keluhan kesehatan yang dimaksud adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut; penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak memiliki keluhan); kecelakaan; kriminalitas atau keluhan lainnya. Dalam konsep BPS, kondisi ketika keluhan kesehatan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari disebut morbidity rate atau angka kesakitan. Kabupaten Tanah Laut memiliki tingkat angka kesakitan termasuk cukup baik di Tahun 2024 dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 9,83%.

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinterrelasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai. Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik. Kesehatan merupakan bentuk investasi pada kualitas sumberdaya manusia. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik maka diharapkan kualitas manusia juga semakin baik, yakni masyarakat dapat semakin produktif. Berikut merupakan beberapa indikator yang menunjukan kondisi kesehatan di Kabupaten Tanah Laut.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah terutama lapisan masyarakat yang paling bawah dan terpencil. Bimbingan dan

penyuluhan kesehatan kepada masyarakat pun tidak henti-hentinya dilaksanakan. Salah satu cara adalah dengan mengaktifkan kembali fungsi posyandu. Tidak ketinggalan juga dengan menambah tenaga medis dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Sebagai contoh langkah yang ditempuh adalah memperbanyak penerimaan pegawai khususnya tenaga kesehatan. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai, derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel 2. 62 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Kecamatan	Apotik	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Pustu
Panyipatan	-	-	-	2	3
Takisung	2	-	1	1	10
Kurau	1	-	-	2	3
Bumi Makmur	-	-	-	1	3
Bati-Bati	2	-	4	3	4
Tambang Ulang	1	2	-	1	2
Pelaihari	6	-	3	4	11
Bajuin	-	-	1	2	4
Batu Ampar	1	-	-	2	6
Jorong	1	-	1	2	6
Kintap	4	1	2	2	4
Tanah Laut	18	3	12	22	56

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Data fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan distribusi yang cukup baik untuk layanan kesehatan dasar, tetapi masih terbatas dalam hal fasilitas medis tingkat lanjut. Terdapat 22 puskesmas dan 56 puskesmas pembantu (pustu) yang tersebar di seluruh kecamatan, memastikan akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Namun, keberadaan rumah sakit masih sangat terbatas dengan hanya tiga unit yang berlokasi di Tambang Ulang dan Kintap, sehingga masyarakat di kecamatan lain harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan layanan medis lanjutan. Apotek yang berjumlah 18 unit tersebar di beberapa kecamatan, dengan Pelaihari memiliki jumlah terbanyak (6 apotek), sementara Panyipatan dan Bumi Makmur tidak memiliki apotek sama sekali, yang dapat membatasi akses terhadap obat-obatan. Poliklinik juga masih minim dengan hanya 12 unit di seluruh kabupaten, dengan distribusi yang tidak merata.

Secara keseluruhan, Pelaihari dan Kintap memiliki fasilitas kesehatan paling lengkap dibandingkan kecamatan lain. Pelaihari memiliki jumlah fasilitas kesehatan paling banyak, termasuk 6 apotek, 3 poliklinik, 4 puskesmas, dan 11 pustu. Sebagai ibu kota Kabupaten Tanah Laut, wajar jika Pelaihari memiliki infrastruktur kesehatan yang lebih baik dibanding kecamatan lain. sementara Panyipatan dan Bumi Makmur memiliki akses yang lebih terbatas karena tidak memiliki apotek, rumah sakit, maupun poliklinik. Layanan kesehatan hanya tersedia dalam bentuk puskesmas dan pustu, yang dapat membatasi akses layanan medis lebih lanjut.

Selain fasilitas kesehatan, tersedianya tenaga kesehatan juga berperan dalam peningkatan kualitas kesehatan di suatu wilayah. Tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 terbagi ke dalam 5 kelompok yaitu tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan lainnya. Secara rinci, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 63 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Kecamatan	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Lainnya
Panyipatan	5	24	25	2	13
Takisung	3	18	19	1	8
Kurau	5	21	19	2	8
Bumi Makmur	3	7	15	1	8
Bati-Bati	8	30	32	3	19
Tambang Ulang	3	13	13	1	5
Pelaihari	17	35	53	5	21
Bajuin	5	20	26	2	12
Batu Ampar	6	23	26	2	13
Jorong	7	21	27	2	12
Kintap	4	18	28	2	11
Tanah Laut	**66**	**230**	**283**	**23**	**138**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut 2024

Dari sisi pelayanan kesehatan lainnya yaitu asuransi kesehatan, pada tahun 2024 jumlah penduduk yang memiliki asuransi kesehatan BPJS 76,43% dan Perusahaan Kantor hanya 6,16%. Penduduk yang tidak memiliki asuransi kesehatan dalam bentuk apapun pada tahun 2024 mencapai 17,66%. Layanan BPJS juga dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas kesehatan sehingga sebagian penduduk belum merasakan manfaat BPJS mengingat keterbatasan fasilitas kesehatan, khususnya penduduk di daerah pedesaan.

2.1.2.2.3 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan keluarga berdasarkan pemenuhan 12 indikator kesehatan utama, seperti imunisasi, gizi, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Indeks Keluarga Sehat (IKS) penting karena memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan keluarga, yang menjadi dasar dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Dengan IKS, pembangunan kesehatan bisa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

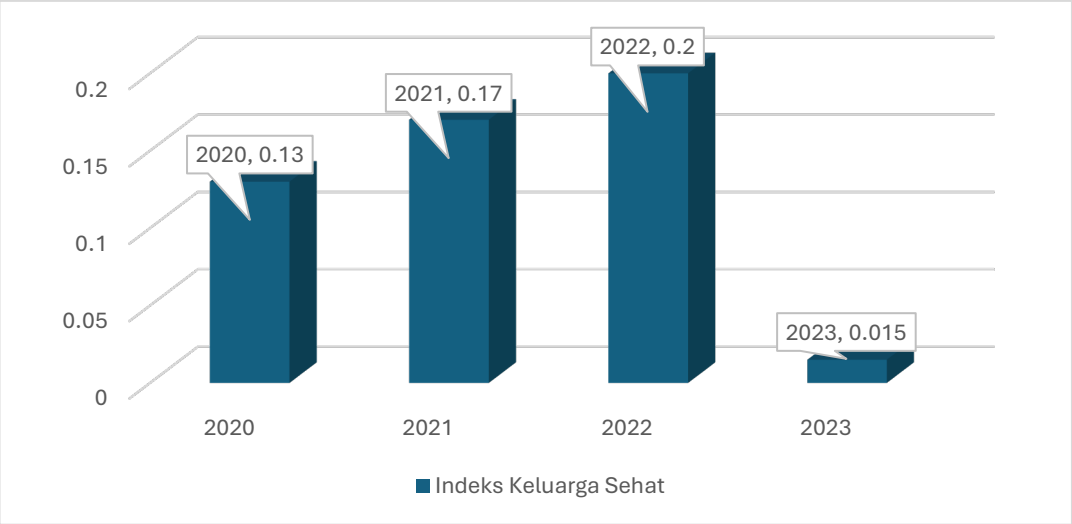

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, 2025

Gambar 2. 17 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Tanah Laut 2020-2023

Indeks Keluarga Sehat (IKS) menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, yakni dari 0,13 menjadi 0,20, yang mencerminkan perbaikan kondisi kesehatan keluarga secara bertahap. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis menjadi 0,015. Penurunan ini mengindikasikan adanya kemunduran signifikan dalam status kesehatan keluarga yang perlu segera ditindaklanjuti.

2.2.2.2.4 Prevalensi Stunting

Stunting merupakan salah satu indikator kunci yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Prevalensi stunting mencerminkan persentase balita (anak usia di bawah lima tahun) yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, infeksi

berulang, dan praktik pengasuhan yang kurang optimal. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting sebagai prioritas nasional, sejalan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-2: Tanpa Kelaparan dan tujuan ke-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Di Kabupaten Tanah Laut, pemantauan prevalensi stunting dilakukan melalui dua sumber data utama:

1. Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), yang bersifat routine-based system.
2. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), yang merupakan population-based survey.

Tabel 2. 64 Prevalensi Stunting Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Tahun	Prevalensi Stunting e-PPGBM (%)	Prevalensi Stunting SSGI (%)
2020	10,67	-
2021	6,41	31,00
2022	5,35	26,60
2023	4,55	41,70
2024	5,86	-

Sumber: Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.

*) Catatan: Data SSGI 2024 untuk Kabupaten Tanah Laut belum dapat dipublikasikan secara resmi karena masih dalam proses verifikasi lebih lanjut. Menurut keterangan SSGI 2024, Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat respon (RR) <70%, RSE >25%, atau perubahan ekstrem >10% dibanding tahun sebelumnya, termasuk Kabupaten Tanah Laut, sedang dalam proses analisis lanjutan.

Secara umum, data e-PPGBM menunjukkan tren penurunan konsisten prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Laut selama periode 2020–2023, dari 10,67% (2020) menjadi 4,55% (2023). Pada tahun 2024, terdapat sedikit peningkatan menjadi 5,86%, yang memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyebabnya. Sementara itu, data SSGI memperlihatkan fluktuasi, dengan penurunan dari 31% (2021) menjadi 26,6% (2022), namun naik signifikan menjadi 41,7% pada 2023. Fluktuasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor metodologis, cakupan sampling, atau perubahan kondisi lapangan, sehingga data 2023 dari SSGI masih perlu dikaji

lebih dalam. Perbedaan antara angka e-PPGBM dan SSGI adalah hal yang umum terjadi, mengingat:

a) e-PPGBM menggunakan data administratif berbasis pelayanan di posyandu/puskesmas.
b) SSGI menggunakan sampling survei yang mewakili populasi secara nasional.

Kedua data tetap saling melengkapi dan memberikan gambaran yang berharga untuk perencanaan program intervensi stunting. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu terus memperkuat:

1. pelayanan gizi masyarakat,
2. cakupan dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak,
3. cakupan imunisasi, serta
4. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap praktik pengasuhan anak yang optimal.

Sampai dengan tahun 2023, tren penurunan stunting di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan e-PPGBM menunjukkan hasil yang cukup baik. Sementara itu, data SSGI yang masih memerlukan verifikasi pada 2023 menjadi perhatian agar dapat dilakukan penguatan validasi data ke depan. Untuk tahun 2024, upaya penguatan intervensi multisektoral perlu terus ditingkatkan, mengingat pentingnya menjaga keberlanjutan tren positif dalam penurunan angka stunting.

Angka stunting ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk akses terhadap gizi yang cukup, pola asuh anak, serta cakupan imunisasi dan layanan kesehatan. Imunisasi balita memiliki peran krusial dalam mencegah infeksi yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan pertumbuhan anak. Data imunisasi yang rendah dapat berkontribusi terhadap peningkatan kasus stunting karena anak lebih rentan terhadap penyakit yang menghambat pertumbuhan.

Untuk kesehatan dalam aspek balita, pencapaian program imunisasi pada balita pada tahun 2024 paling tinggi pada imunisasi Hepatitis B sebanyak

83,23%. Pencapaian program imunisasi paling rendah pada imunisasi DPT-HB3 sebanyak 61,26%. Pencapaian imunisasi sangat penting dalam rangka menekan tingkat angka kematian bayi (AKB) dan mendukung komponen umur harapan hidup (UHH).

Tabel 2. 65 Hasil Pencapaian Program Imunisasi pada Balita menurut jenis Vaksinasi di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Jenis Imunisasi	Persentase hasil capaian (%)
BCG	74,56
DPT-HB1	76,23
DPT-HB2	69,13
DPT-HB3	61,26
Polio 1	64,37
Polio 2	72,91
Polio 3	68,73
Polio 4	64,40
Hepatitis B	83,23
Campak	81,79
IPV 1	70,77

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Selain faktor imunisasi dan asupan gizi, pengendalian penduduk melalui program **Keluarga Berencana (KB)** dan peningkatan kesadaran pada **Pasangan Usia Subur (PUS)** juga berperan penting dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tanah Laut. Jumlah anak dalam sebuah keluarga sangat mempengaruhi tingkat pemenuhan gizi dan kesehatan, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dengan adanya perencanaan keluarga yang baik, orang tua dapat lebih optimal dalam memberikan perhatian, nutrisi, serta akses kesehatan yang layak bagi anak-anaknya.

Tabel 2. 66 Pasangan Usia Subur (PUS) dan Keluarga Berencana (KB), 2024

Tahun	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif	Persentase
2020	63.254	52.981	83,76
2021	63.968	53.277	83,28
2022	56.727	42.653	75,19
2023	61.166	49.864	81,52
2024	61.375	47.072	76,70

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Berkaitan dengan pengendalian penduduk, jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 mencapai 61.375. Dari jumlah

pasangan usia subur tersebut, yang menjadi peserta KB aktif cukup tinggi, yaitu 76,70% atau 47.072. Sebagian besar peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi berupa suntikan.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Indikator Pendidikan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan SDM adalah indikator Pendidikan. Indikator Pendidikan cukup banyak, salah satu diantaranya adalah Angka Melek Huruf. Angka melek huruf (literacy rate) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Penduduk yang buta huruf diduga didominasi oleh kelompok tersulit dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan.

Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun keatas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

Tabel 2. 67 Angka Melek Huruf Usia 15+ di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Melek Huruf Usia 15+	98,74%	98,29%	97,87%	97,33%	96,80

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2024, angka melek huruf di Kabupaten Tanah Laut untuk penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 96,80%, menurun dari tahun 2023 yaitu sebesar 97,33% dan 2022 sebesar 97,33%. Penurunan yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dalam kemampuan literasi aksara atau membaca dan menulis yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Namun demikian pemerintah tetap akan terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah sesuai dengan target SDGs yaitu mencapai pemerataan kualitas pendidikan.

Indikator lain adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Pada penghitungan metode baru menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2020-2023, RLS Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahun walaupun tidak signifikan. RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 adalah sebesar 7,88 tahun, meningkat menjadi 7,89 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, RLS Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 7,90 tahun, naik menjadi 7,92 tahun pada tahun 2023. Sedangkan RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 meningkat menjadi 7,94. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Tanah Laut baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Angka RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional masing-masing sebesar 8,62 tahun dan 8,85 tahun. Angka RLS Kabupaten Tanah Laut lebih rendah jika dibandingkan angka RLS Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dalam rangka peningkatan rata-rata lama sekolah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya

dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan formal.

Tabel 2. 68 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
RLS (tahun)	7,88	7,89	7,90	7 ,92	7,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Kemampuan bertahan seorang anak dalam dunia pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Semakin lama seorang anak mampu bertahan untuk terus bersekolah, maka sistem pendidikan yang terbangun di daerah tersebut akan semakin baik. Angka harapan lama sekolah diharapkan mampu memotret fenomena tersebut pada tiap wilayah. Sesuai dengan publikasi terbaru BPS, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2. 69 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
HLS (Tahun)	12,01	12,31	12,32	12,41	12,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Angka HLS Kabupaten Tanah Laut selama periode 2020-2024 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 Angka HLS sebesar 12,01 tahun. Angka HLS tersebut mengalami peningkatan sepanjang 5 tahun sehingga menjadi 12,43 tahun pada tahun 2024. HLS sebesar 12,43 pada tahun 2023 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 12,43 tahun atau telah mencapai pendidikan di kelas 3 SMA. Angka HLS Kabupaten Tanah Laut lebih rendah jika dibandingkan HLS Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yang mencapai 12,87 tahun.

Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, angka HLS tertinggi ditempati Kota Banjar Baru yaitu sebesar 14,86 tahun. HLS di Kabupaten Tanah Laut masih berada jauh dibawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.

2.1.2.3.2 Layanan Urusan Pendidikan

Hasil capaian suatu pembangunan akan sangat tergantung pada sumber daya manusia. Pendidikan dikatakan menjadi salah satu hal yang penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia karena melalui pendidikan manusia mampu memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mampu berkembang menjadi apa yang diinginkan. Dalam suatu proses pendidikan, tidak dapat dipungkiri bahwa terbentuknya pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah. Sarana dan prasarana tersebut sangat penting dalam menunjang kualitas belajar murid. Dalam hal ini, terdapat tiga komponen yang memiliki keterkaitan secara langsung yaitu sekolah, guru dan murid.

Jumlah murid pada tahun 2024 pada semua jenjang pendidikan menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2024. Kenaikan jumlah murid tersebut diikuti dengan pengurangan jumlah guru sehingga rasio murid-guru selama 2023-2024 relatif mengalami kesenjangan. Rasio murid-guru untuk jenjang SD/sederajat misalnya, rata-rata adalah sekitar 1:13 yang artinya satu orang guru menangani 13 murid. Untuk rasio murid-sekolah pada jenjang SD/sederajat menunjukkan angka 1:140 yang berarti rata-rata setiap sekolah di SD/sederajat memiliki murid sebanyak 140. Bila setiap sekolah memiliki 6 kelas atau rombongan belajar, berarti setiap kelas memiliki 23 murid.

Untuk jenjang SMP/sederajat serta SMA/sederajat pada tahun 2024 rasio murid-guru adalah 1:17. Rasio murid-sekolah untuk SMP/sederajat adalah 1:174 yang artinya rata-rata satu sekolah memiliki 174 murid dan untuk SMA/sederajat rasio murid-sekolah adalah 1:355. Untuk SMP/sederajat dan SMA/sederajat hal yang penting untuk diperhatikan adalah kompetensi guru dalam mengajar mata pelajaran sesuai dengan bidang keahlian karena pelajaran SMP dan SMA yang spesifik. Hal ini berbeda dengan SD/sederajat karena mata Pelajaran SD yang masih bersifat umum sehingga tidak memerlukan persyaratan atau kompetensi khusus. Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas diperlukan guru yang berkualitas serta sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Kualitas guru dapat tercermin melalui kesesuaian jenjang pendidikan, pangkat/golongan, serta sertifikasi profesi dan kompetensi. Untuk sarana dan prasarana sekolah tercermin dari kuantitas dan kualitas penunjang yang memadai.

Tabel 2. 70 Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sekolah Dasar (SD)/Sederajat					
Sekolah	264	267	270	270	275
Guru	2.992	2.843	2.935	3.506	2.929
Murid	40.419	38.414	38.153	38.080	38.513
Rasio Murid- Sekolah	153,10	143,87	141,31	141,04	140

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Murid-Guru	13,51	13,51	13,00	10,86	13,15
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sederajat					
Sekolah	80	80	81	81	83
Guru	1.286	1.251	1.273	1.579	850
Murid	14.262	13.490	14.007	14.331	14.460
Rasio Murid- Sekolah	178,28	168,63	172,93	176,93	174,22
Rasio Murid- Guru	11,09	10,78	11,00	9,08	17
Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat					
Sekolah	27	27	28	39	30
Guru	687	626	694	897	717
Murid	7.917	7.449	7.593	11.959	10.661
Rasio Murid- Sekolah	293,22	275,89	271,18	306,64	355,37
Rasio Murid- Guru	11,52	11,90	10,94	13,33	14,87

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Salah satu indikator untuk melihat bagaimana kondisi keterjangkauan pendidikan bagi penduduk usia sekolah dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS yang tinggi menunjukkan bahwa terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum, namun meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka APS yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah dan sekaligus menunjukkan bahwa kemampuan lembaga pendidikan dalam menyerap warga belajar semakin meningkat. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

APS terdiri dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM menunjukkan persentase penduduk kelompok usia sekolah

tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM ini dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

APM Kabupaten Tanah Laut yang menunjukkan kenaikan selama 2020-2024 adalah untuk jenjang SMA/sederajat dari 55,44 di tahun 2020 menjadi 64,61 di tahun 2024. Untuk SD/sederajat terjadi penurunan APM di tahun 2020, dari 99,41 di tahun 2024 menjadi 98,48. Sedangkan untuk SMP/sederajat pada tahun 2020 sebesar 73,76, pada tahun 2023 turun sampai 70,23 dan nilai terakhir pada tahun 2024 naik menjadi 73,10. Nilai APM untuk SD/sederajat menunjukkan angka hampir 100%, hal ini mengindikasikan bahwa hampir semua anak usia 7-12 bersekolah di jenjang SD/sederajat. Nilai APM untuk SMA/sederajat adalah yang terkecil dibandingkan dengan SD/sederajat dan SMP/sederajat. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua anak usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/sederajat dengan berbagai latar belakang penyebab.

Untuk nilai APK terlihat jenjang SD/sederajat memiliki nilai yang tertinggi yaitu di atas 100% selama 2020-2024, dibandingkan SMP/sederajat dan SMA/sederajat. Nilai yang lebih besar dari 100 tersebut mengindikasikan bahwa terdapat anak yang bersekolah SD/sederajat di luar usia 7-12 tahun.

Tabel 2. 71 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	99,41	99,54	98,71	98,51	98,48
SMP/MTs	73,76	74,02	74,35	70,23	73,10
SMA/SMK/MA	55,44	55,71	56,15	63,10	64,61

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Dari jumlah penduduk yang berusia 5 tahun ke atas, pada tahun 2024 sebanyak 3,40% merupakan penduduk yang tidak/belum pernah sekolah. Penduduk yang tidak/belum pernah sekolah merupakan anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar. Kabupaten Tanah Laut berada di posisi 8 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun usia sekolah dasar adalah usia 7-12 tahun namun usia 5-6 tahun merupakan usia PAUD atau TK sehingga jumlah penduduk yang belum/tidak mengikuti PAUD atau TK cukup besar. Pada Tahun 2024, APK Kab Tanah Laut, baik itu SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA secara berurutan, yaitu 106,04, 87,53, dan 82,71.

Tabel 2. 72 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	106,86	106,04	105,49	104,78	106,04
SMP/MTs	84,57	85,73	85,34	78,32	87,52
SMA/SMK/MA	85,18	87,56	84,89	86,93	82,71

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Untuk penduduk yang masuk kategori tidak bersekolah lagi mencapai 73,71; lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan. Penduduk yang tidak bersekolah lagi merupakan anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke

atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.

Jumlah penduduk usia 4-18 tahun yang merupakan penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebanyak 91 orang. Penyandang disabilitas tersebut merupakan warga negara yang menjadi sasaran dari berbagai program layanan dasar, termasuk layanan dasar bidang pendidikan, terutama pendidikan khusus.

Tabel 2. 73 Status Pendidikan Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Jumlah yang Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi
Tanah Laut	3,40	23,30	73,71

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2025

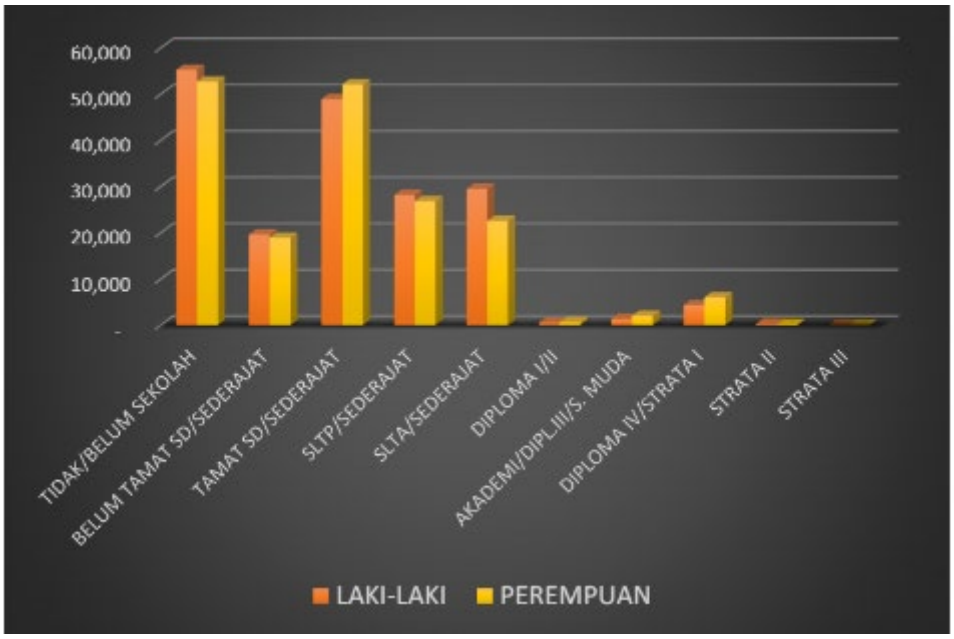

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Gambar 2. 18 Grafik Data Kependudukan Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang belum tamat SD atau sederajat berjumlah 38.507 jiwa, terdiri dari 19.618 laki-laki dan 18.889

perempuan. Untuk kategori belum tamat SD, jumlah terbesar juga terdapat di Kecamatan Pelaihari sebanyak 7.817 jiwa, sementara yang terkecil terdapat di Kecamatan Kurau dengan 1.396 jiwa. Jumlah penduduk yang telah tamat SD atau sederajat tercatat sebanyak 101.019 jiwa, terdiri dari 48.921 laki-laki dan 52.098 perempuan. Sementara itu, jumlah penduduk yang berpendidikan hingga SLTP atau sederajat mencapai 54.948 jiwa, dengan 28.139 laki-laki dan 26.809 perempuan. Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan hingga SLTA atau sederajat mencapai 51.979 jiwa, terdiri dari 29.450 laki-laki dan 22.529 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa pendidikan di tingkat menengah atas (SLTA) sudah cukup banyak ditempuh oleh penduduk Kabupaten Tanah Laut, meskipun masih jauh lebih rendah dibanding lulusan SD maupun SLTP.

Sementara itu, untuk jumlah penduduk lulusan Diploma I/II di Kabupaten Tanah Laut mencapai 1.155 jiwa, terdiri dari 530 laki-laki dan 625 perempuan. Kecamatan dengan lulusan terbanyak adalah Pelaihari (430 jiwa), sementara yang paling sedikit ada di Tambang Ulang (44 jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Diploma I/II belum banyak ditempuh, dan konsentrasinya masih terpusat di ibu kota kabupaten. Penduduk yang menyelesaikan pendidikan pada jenjang Diploma III tercatat sebanyak 3.351 jiwa, dengan 1.336 laki-laki dan 2.015 perempuan. Jumlah terbesar berasal dari Pelaihari sebanyak 1.787 jiwa, sedangkan jumlah terkecil ada di Tambang Ulang dengan 106 jiwa. Dari sisi gender, lulusan perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

Lulusan pendidikan Diploma IV/S1 berjumlah 10.392 jiwa, terdiri dari 4.346 laki-laki dan 6.046 perempuan. Kecamatan Pelaihari menempati posisi tertinggi dengan 5.034 jiwa, jauh melampaui kecamatan lain. Sedangkan yang paling sedikit adalah Bumi Makmur dengan 238 jiwa. Data ini menegaskan bahwa S1 merupakan jenjang pendidikan tinggi yang paling banyak ditempuh masyarakat, dengan dominasi perempuan. Jumlah penduduk lulusan S2 di Kabupaten Tanah Laut masih sangat terbatas, yakni 485 jiwa, dengan 299 laki-

laki dan 186 perempuan. Kecamatan Pelaihari memiliki jumlah lulusan terbanyak (362 jiwa), sementara kecamatan lain hanya memiliki belasan hingga satuan lulusan saja. Lulusan pendidikan tertinggi, yaitu S3, hanya berjumlah 13 jiwa di seluruh Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari 9 laki-laki dan 4 perempuan. Pelaihari masih mendominasi dengan 5 lulusan, sedangkan kecamatan lainnya hanya memiliki 1–2 orang lulusan S3, bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali.

Dari aspek ijazah tertinggi yang dimiliki penduduk usia 15 tahun ke atas, di tahun 2023 terdapat 14,74% penduduk yang tidak memiliki ijazah. Kabupaten Tanah Laut menempati posisi ke 7 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Barito Kuala, yang kedua adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan posisi ketiga ditempati oleh Kabupaten Banjar. Angka ini menunjukan cukup banyak penduduk yang tidak tamat Pendidikan atau bahkan belum mengenyam pendidikan. Penduduk dengan kondisi seperti ini perlu dibekali dengan berbagai keterampilan hidup (life skill) sehingga tetap mampu produktif. Penduduk dengan ijazah tertinggi SD/sederajat memiliki proporsi tertinggi yaitu 31,36% dan penduduk dengan ijazah tertinggi perguruan tertinggi menunjukkan proporsi terendah yaitu sebesar 6,91%.

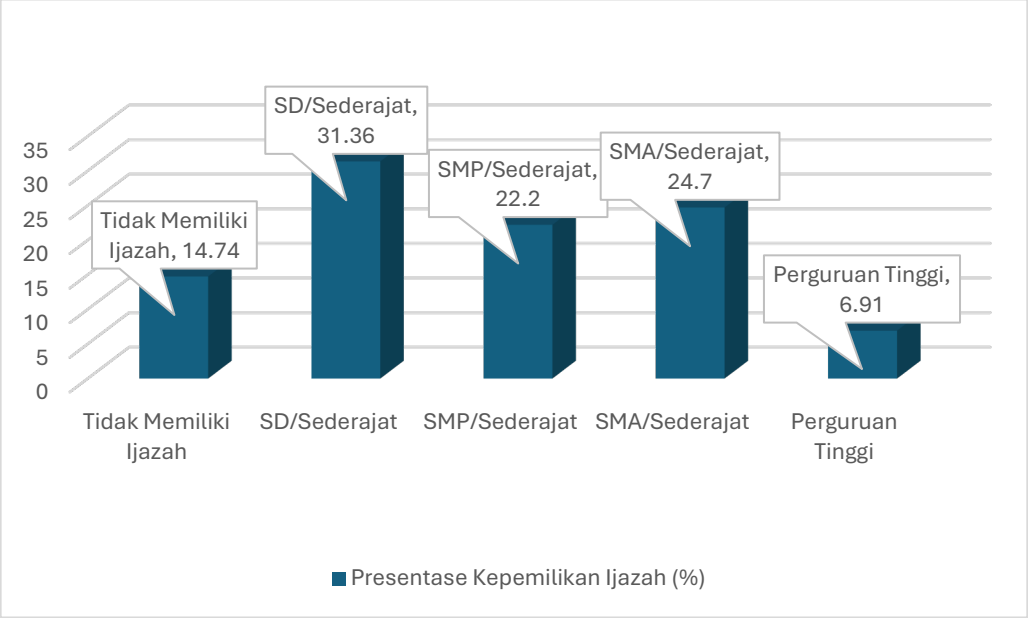

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Gambar 2. 19 Penduduk 15 Tahun ke Atas dan Kepemilikan Ijazah Tertinggi di Kabupaten Tanah Laut 2024

Dari sisi kualifikasi guru dan sekolah, guru dengan Pendidikan sarjana memiliki presentasi yang tinggi yaitu, hampir 100% baik untuk jenjang SD, SMP, maupun SMA dan SMK. Guru yang bersertifikat profesi sayangnya masih rendah, persentase tertinggi adalah guru SMK yang mencapai 52,40% dan yang terendah adalah jenjang SMA yang hanya 44,10%. Untuk kualifikasi sekolah, persentase sekolah dengan akreditasi A relatif masih sedikit. Jenjang SD misalnya, hanya 5,74% dan SMA hanya 16,67%. Untuk jenjang SMA semua sekolah sudah terakreditasi dan untuk jenjang SMK masih tersisa paling banyak sebesar 10% sekolah yang belum terakreditasi.

Tabel 2. 74 Indikator Kualifikasi Guru dan Sekolah

Indikator	SD	SMP	SMA	SMK
Guru Pendidikan D-IV/S1 (%)	97,00	98,00	99,00	95,90
Guru Bersertifikasi (%)	47,20	52,00	44,10	52,40
Terakreditasi A (%)	5,74	22,41	16,67	20,00
Terakreditasi B (%)	69,67	62,07	44,44	50,00

Indikator	SD	SMP	SMA	SMK
Terakreditasi C (%)	22,13	12,07	38,89	20,00
Belum Terakreditasi (%)	2,46	3,45	-	10,00

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2025

2.1.2.3.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tanah Laut mencapai 70,38 pada kategori **sedang**, mencerminkan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan budaya literasi di masyarakat. Skor ini diperoleh dari berbagai indikator yang dikaji, termasuk pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, tenaga kerja perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, jumlah perpustakaan yang dibina, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan, serta jumlah anggota perpustakaan. Meskipun berada pada kategori sedang, hasil ini menunjukkan masih adanya ruang untuk peningkatan guna memperkuat budaya literasi dan akses informasi bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Gambar 2.19, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dalam beberapa aspek pembangunan literasi masyarakat, khususnya dalam pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, dan ketercukupan tenaga perpustakaan. Beberapa indikator seperti tingkat kunjungan masyarakat, jumlah perpustakaan yang dibina oleh SNP, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan, dan jumlah anggota perpustakaan sudah mencapai kondisi ideal (**nilai 1**), yang menandakan kesadaran masyarakat terhadap literasi cukup baik.

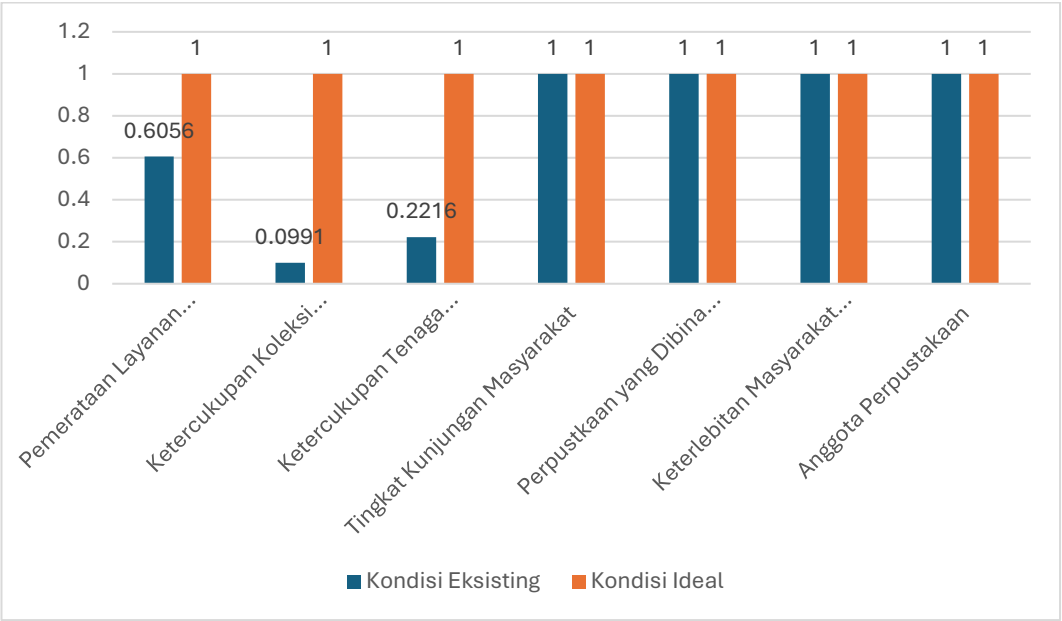

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Tanah Laut, 2025

Gambar 2. 20 Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Sementara itu, pemerataan layanan perpustakaan masih berada di angka **0,6056**, jauh di bawah kondisi ideal (1), menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan masih terbatas. Ketercukupan koleksi perpustakaan hanya **0,0991**, yang sangat jauh dari kondisi ideal, menandakan jumlah koleksi masih belum memadai. Ketercukupan tenaga perpustakaan juga masih rendah, hanya **0,2216**, yang menunjukkan masih kurangnya tenaga perpustakaan yang memadai. Sementara itu, Meskipun partisipasi masyarakat dan pembinaan perpustakaan sudah optimal, perlu ada peningkatan signifikan dalam **pemerataan layanan, jumlah koleksi buku, serta tenaga perpustakaan** agar literasi masyarakat dapat berkembang lebih optimal.

Selain itu, berdasarkan capaian Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 bahwa nilai kemampuan literasi SD dan SMP Kabupaten Tanah Laut memiliki presentase secara berurutan, yaitu 82,7% dan 83,56%. Sedangkan untuk kemampuan numerasi SD dan SMP Kabupaten Tanah Laut secara berurutan memiliki presentase 54,71% dan 78,06 %.

Yang dimana hal tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, yaitu nilai kemampuan literasi SD dan SMP dengan nilai secara berurutan 61,98% dan 79,32%. Sedangkan kemampuan numerasi memiliki presentase secara berurutan, yaitu 41,79% dan 52,73%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemampuan literasi siswa di jenjang SD dan SMP tergolong tinggi dan cukup merata, kemampuan numerasi khususnya di jenjang SD masih perlu mendapatkan perhatian serius. Rendahnya capaian numerasi di tingkat SD dapat menjadi indikator kurangnya pemahaman dasar matematika sejak dini.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Dari sisi pelayanan kesehatan lainnya yaitu asuransi kesehatan, pada tahun 2024 jumlah penduduk yang memiliki asuransi kesehatan BPJS 76,43% dan Perusahaan Kantor hanya 6,16%. Penduduk yang tidak memiliki asuransi kesehatan dalam bentuk apapun pada tahun 2024 mencapai 17,66%. Layanan BPJS juga dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas kesehatan sehingga sebagian penduduk belum merasakan manfaat BPJS mengingat keterbatasan fasilitas kesehatan, khususnya penduduk di daerah pedesaan.

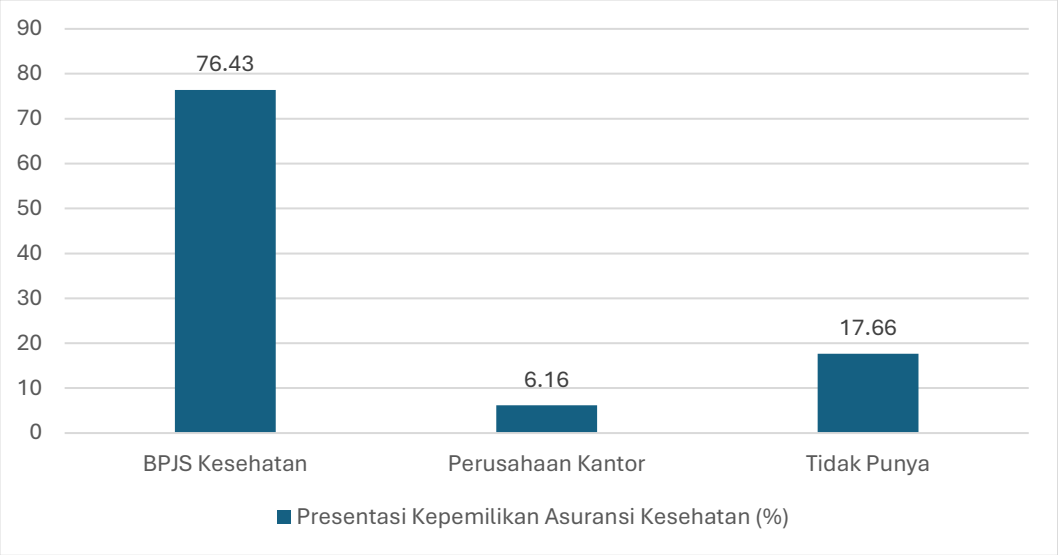

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Gambar 2. 21 Kepemilikan Asuransi Kesehatan Penduduk Tahun 2024

Sedangkan dari sisi jaminan sosial, data presentase kepemilikan jaminan sosial, terlihat bahwa **Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja** memiliki tingkat kepemilikan tertinggi sebesar **15,81%**, diikuti oleh **Jaminan/Asuransi Kematian** sebesar **9,76%.** Sementara itu, **Jaminan Pensiun (5,94%)** dan **Jaminan Hari Tua (6,32%)** menunjukkan angka yang relatif rendah, mengindikasikan bahwa masih banyak pekerja yang belum memiliki perlindungan jangka panjang setelah masa kerja berakhir. Kepemilikan **Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** juga masih rendah, hanya **4,47%**, dan yang paling sedikit dimiliki adalah **Jaminan Kehilangan Pekerjaan** dengan angka **0,55%**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja belum memiliki perlindungan jika kehilangan pekerjaan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran dan akses terhadap program jaminan sosial guna memberikan perlindungan ekonomi yang lebih baik bagi tenaga kerja.

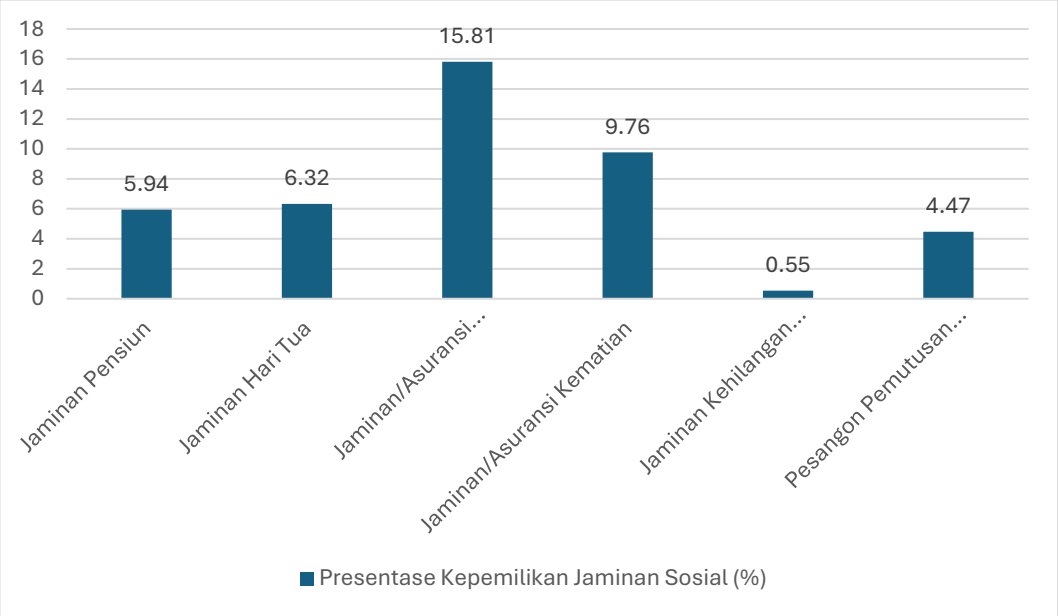

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Gambar 2. 22 Presentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial Tahun 2024

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kabupaten Tanah Laut memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang cukup besar dengan potensi budaya dan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Kebijakan pembangunan seni dan kebudayaan diarahkan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat daerah, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya lokal. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala pengembangan seni budaya. Peran pemerintah di bidang kebudayaan adalah sebagai pelaksana pembangunan yang nantinya diharapkan menciptakan iklim yang nyaman agar pelaku usaha di bidang kebudayaan dapat berkembang secara efektif dan efisien. Terkait dengan sektor pariwisata secara khusus, sektor tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena memiliki multiplier effect yang tinggi. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk menarik minat pengunjung. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Di bidang kepemudaaan dan olah raga, pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas dan pembinaan terhadap pemuda dan cabang olah raga, mulai dari pembinaan pelatih dan fasilitasi kegiatan olah raga hingga pengembangan kapasitas SDM pemuda. Keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala bagi pengembangan seni budaya dan olah raga, misalnya belum ada gedung gedung kesenian dan olah raga yang representatif. Jadi, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, fasilitas

serta sarana prasarana di bidang kepemudaan dan olah raga menjadi sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan di masa mendatang.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Kabupaten Tanah Laut berhasil mencetak atlet-atlet berpestrasi yang tergambar dengan medali-medali yang diraih diberbagai macam cabang olahraga dan kejuaraan olahraga yang diikuti baik tingkat Provinsi maupun Nasional. Hal ini merupakan hasil positif dari keseriusan dalam mebentuk atlet-atlet di Kabupaten Tanah Laut agar berprestasi di cabangcabang olahraga yang ada. Pada tahun 2020, dimana terjadi pandemi Covid-19 berimbas pada pegelaran kejuaraan olahraga, sehingga tidak banyak kejuaraan yang dapat diikuti oleh atlet Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2. 75 Jumlah Atlet dan Jumlah Medali yang diraih oleh atlet Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

No	Nama Kejuruan Olahraga	Jumlah Atlet				Jumlah Medali			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Pekan Olahraga Pelajar (POPDA)	122	114	115	150	61	86	21	77
2	Pekan Paralimpik Provinsi (PEPARPROV)	-	-	52	-	-	-	71	-
3	Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)	-	-	415	-	-	-	193	-
4	Porda Soina Kalimantan Selantan	-	53	-	-	-	52	-	-
5	Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA)	-	-	2	23	-	-	2	3
6	Pra Pekan Olahraga Nasional (Pra PON)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	2	-	-	-	2	-	-
8	Pekan SpecialOlympic Nasional (PESONAS)	-	-	30	-	-	-	12	-
9	Kejuaran Provinsi (KEJURPROV) NPC	-	-	-	4	-	-	-	11
10	Pekan Olahraga Tradisional Daerah (PORTRADA)	-	-	-	83	-	-	-	45
11	Pesoda Soina	-	-	-	39	-	-	-	11
12	Pekan Paralimpik Nasional (PAPERNAS) NPC	-	3	-	3	-	3	-	2

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanah Laut, 2024

Tabel 2. 76 Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut, 2024

No	Cagar Budaya
1	Makam Keramat Habib Alwi Bin Idrus Bahasyim
2	Makam Keramat Ahmad Syamhudi
3	Makam Keramat Data Bungur
4	Makam Keramat Data Timang
5	Makam Keramat Data Insad
6	Makam Keramat Kai Tuan Datu Ismail
7	Makam Keramat Syech Abdul Gani Bin Abdurahman
8	Makam Keramat Datu Pamulutan
9	Mercusuar Peninggalan Kolonial Belanda
10	Benteng Tabanio
11	Makam Keramat KH Abdussamad Khairi
12	Makam Keramat Datu Panjang
13	Makam Keramat Lok Batu Datu Ahmad
14	Makam Keramat Datu Nafis
15	Bunker Peninggalan Kolonial Jepang
16	Makam Keramat Istana Pangeran Datu Ahmad

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2025

Tabel 2. 77 Kesenian yang diadakan di Kabupaten Tanah Laut menurut Kecamatan, 2024

Kecamatan	Jumlah Kecamatan
Bajuin	21
Kurau	11
Bumi Makmur	13
Jorong	29
Batu Ampar	79
Bati-Bati	62
Takisung	134
Panyipatan	57
Kintap	51
Tambang Ulang	51
TOTAL	**508**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender dan Masyarakat

2.1.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja perlindungan anak, khususnya bagi kelompok anak yang berada dalam kondisi rentan. Indeks ini menggambarkan

sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan berbagai upaya perlindungan, termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah terhadap anak. Semakin tinggi skor IPKA (skala 0–100), menunjukkan semakin baik capaian daerah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak. Berikut perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten Tanah Laut dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 2. 78 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten Tanah Laut, 2021-2023

Tahun	IPKA
2021	84,78
2022	75,83
2023	87,56

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa capaian IPKA Kabupaten Tanah Laut secara umum berada pada tingkat tinggi, dengan indeks selalu di atas angka 75. Pada tahun 2021, IPKA mencapai 84,78, mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam perlindungan khusus anak. Di tahun 2022, terjadi penurunan menjadi 75,83. Penurunan ini perlu dicermati, karena dapat mencerminkan adanya tantangan baru atau kendala dalam pelaksanaan program perlindungan anak, baik dari sisi anggaran, pelibatan stakeholder, maupun akibat faktor eksternal seperti dampak pandemi. Pada tahun 2023, IPKA kembali meningkat menjadi 83,05, menunjukkan adanya perbaikan dan pemulihan kinerja setelah penurunan di tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, fluktuasi IPKA di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa perlindungan anak menjadi perhatian yang terus diupayakan oleh pemerintah daerah, meskipun tantangan tetap ada. Konsistensi program, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kualitas layanan perlindungan anak menjadi kunci untuk menjaga tren positif di masa depan.

2.1.2.6.2 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas kehidupan keluarga berdasarkan berbagai dimensi, seperti ketahanan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial budaya keluarga. IKK disusun untuk menggambarkan kapasitas keluarga dalam mendukung tumbuh kembang seluruh anggota keluarga, termasuk anak, perempuan, lansia, dan kelompok rentan lainnya. IKK dinyatakan dalam skor 0–100, di mana semakin tinggi skor IKK menunjukkan kualitas keluarga yang semakin baik. Berikut perkembangan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di Provinsi Kalimantan Selatan selama empat tahun terakhir:

Tabel 2. 79 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2023

Tahun	IKK
2020	72,30
2021	74,53
2022	77,31
2023	78,58

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2023

Perkembangan IKK Kalimantan Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, IKK Kalimantan Selatan berada pada angka 72,30, yang mengindikasikan kualitas keluarga dalam kategori cukup baik. Pada tahun 2021, IKK meningkat menjadi 74,53, mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai dimensi ketahanan keluarga, kemungkinan dipengaruhi oleh penguatan program pemberdayaan keluarga dan pemulihan sosial pasca pandemi. Di tahun 2022, IKK kembali mengalami kenaikan signifikan menjadi 77,31. Peningkatan berlanjut di tahun 2023, di mana IKK mencapai 78,58, mendekati ambang kategori sangat baik.

Peningkatan ini mencerminkan bahwa berbagai program intervensi keluarga yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan, termasuk upaya peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan keluarga, penguatan ekonomi keluarga, serta upaya penguatan ketahanan sosial-budaya keluarga, mulai menunjukkan dampak positif. Konsistensi kenaikan IKK ini merupakan sinyal positif bagi penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari provinsi tersebut.

2.1.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan (representasi perempuan di parlemen, pendidikan menengah ke atas), serta partisipasi di pasar tenaga kerja. IKG dinyatakan dalam skala 0–1, di mana semakin rendah nilainya, menunjukkan ketimpangan gender yang semakin kecil dan tingkat keadilan gender yang semakin baik. Berikut perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tanah Laut selama lima tahun terakhir:

Tabel 2. 80 Indeks ketimpangan gender Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Tahun	IPKA
2020	0,517
2021	0,483
2022	0,481
2023	0,421
2024	0,473

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Perkembangan IKG Kabupaten Tanah Laut menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IKG Kabupaten Tanah Laut

berada di angka 0,517, menunjukkan tingkat ketimpangan gender yang masih relatif tinggi. Tahun 2021 dan 2022 mencatat penurunan berturut-turut menjadi 0,483 dan 0,481, mencerminkan adanya perbaikan kesetaraan gender, terutama dalam dimensi pemberdayaan dan partisipasi perempuan. Tren perbaikan semakin kuat pada tahun 2023, ketika IKG mencapai level terendah dalam lima tahun terakhir yaitu 0,421, yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam upaya pengurangan ketimpangan gender. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit kenaikan kembali menjadi 0,473. Kenaikan ini kemungkinan terkait dengan perubahan dinamika partisipasi tenaga kerja perempuan atau tantangan baru dalam dimensi pemberdayaan yang perlu dicermati lebih lanjut.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi sedikit fluktuasi, tren jangka panjang IKG di Kabupaten Tanah Laut cenderung menurun, menandakan upaya pengarusutamaan gender di berbagai sektor mulai menunjukkan dampak positif. Ke depan, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat program-program kesetaraan gender, terutama dalam akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan keterwakilan di bidang politik dan pengambilan keputusan.

2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana pembangunan manusia yang dicapai oleh perempuan sebanding dengan laki-laki. IPG mengukur kesenjangan capaian pembangunan berdasarkan jenis kelamin dalam dimensi umur panjang dan sehat, pendidikan, dan standar hidup yang layak. IPG dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi persentasenya, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Nilai 100% berarti tidak ada kesenjangan gender. Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanah Laut selama lima tahun terakhir:

Tabel 2. 81 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Tahun	IPG
2020	87,19
2021	86,86
2022	87,28
2023	87,53
2024	87,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Perkembangan IPG Kabupaten Tanah Laut selama periode 2020–2024 menunjukkan tren positif yang konsisten, meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 87,19%, menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan di Kabupaten Tanah Laut mencapai sekitar 87% dari capaian laki-laki. Tahun 2021 terjadi sedikit penurunan menjadi 86,86%, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap akses pendidikan dan kesehatan perempuan. Namun, sejak tahun 2022, IPG kembali menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan: sebesar 87,28% di tahun 2022, naik menjadi 87,53% pada tahun 2023, dan mencapai 87,78% pada tahun 2024, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Tren ini mencerminkan adanya kemajuan pembangunan yang semakin setara antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tanah Laut. Upaya peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi tampaknya mulai memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Ke depan, untuk mendorong peningkatan IPG menuju kesetaraan penuh (100%), pemerintah daerah perlu terus memperkuat kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, mengurangi diskriminasi berbasis gender, dan memastikan kesetaraan peluang di seluruh aspek kehidupan.

2.1.2.6.5 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan pemuda di suatu

wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan pemuda, seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, partisipasi politik, dan gender & inklusi sosial. Nilai IPP berkisar antara 0 hingga 100, semakin tinggi nilainya, semakin baik capaian pembangunan pemuda di daerah tersebut. Berikut adalah perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2020–2023:

Tabel 2. 82 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2020–2023

Tahun	IPP
2020	50,67
2021	50,00
2022	49,00
2023	54,67

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2023

Perkembangan IPP Kalimantan Selatan selama periode 2020–2023 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, IPP Kalimantan Selatan tercatat sebesar 50,67. Tahun 2021, IPP mengalami sedikit penurunan menjadi 50,00. Tahun 2022, penurunan berlanjut dengan IPP mencapai 49,00, yang mencerminkan tantangan dalam pembangunan pemuda, kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi sektor pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja bagi pemuda. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan dalam capaian pembangunan pemuda, dengan IPP meningkat menjadi 54,67. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan dan pemulihan kondisi pembangunan pemuda di berbagai aspek.

Tren ini menggambarkan bahwa upaya perbaikan layanan bagi pemuda yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk peningkatan akses pendidikan, peluang kewirausahaan, dan kesehatan remaja, mulai menunjukkan hasil positif. Penting untuk terus memperkuat kebijakan pembangunan pemuda yang inklusif dan berkelanjutan, mengingat kelompok pemuda merupakan motor penggerak pembangunan daerah.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (people- centered development). Di sini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimated end), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Secara praktikal, pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perhitungan IPM terdiri atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek perekonomian yang digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Sebagai Indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai

dampak dari kegiatanpembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangunan kualitas hidup manusia. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatanatau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatudaerah pada kurun waktu tertentu. IPM suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori menurut UNDP, yaitu (1) IPM ≥ 80 termasuk kategori sangat tinggi; (2) 70 ≤ IPM < 80 termasuk kategori tinggi; (3) 60 ≤ IPM < 70 termasuk kategori sedang; dan (4) IPM < 60 termasuk kategori rendah.

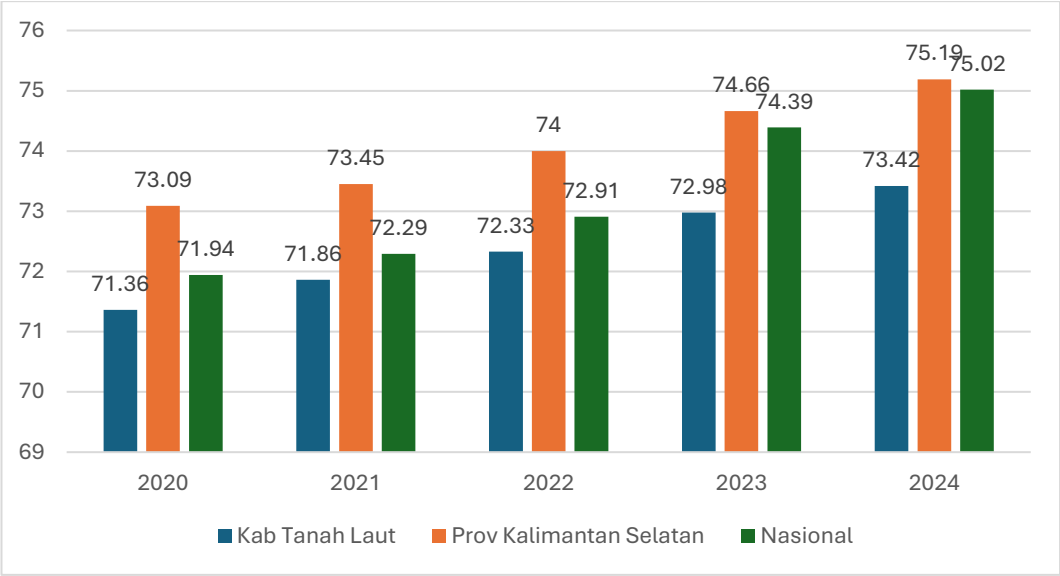

Sumber : Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2025

Gambar 2. 23 Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Selama periode 2020-2024, perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2020 sebesar 71,38 dan tahun 2021 meningkat kembali menjadi 71,86 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 72,33 terus meningkat hingga 72,98 pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 73,42.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, IPM Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 berada pada posisi 8 dari 13 kabupaten/kota yang ada. Dengan posisi yang berada di kategori tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus bekerja keras untuk meningkatkan nilai IPM tersebut

melalui berbagai kebijakan pembangunan baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun sektor ekonomi lainnya agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal dalam pembangunan tersebut.

2.1.3.1.2 Angka Ketergantungan

Berdasarkan Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dapat diperoleh informasi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban tanggungan. Indikator ini untuk melihat sejauh mana penduduk usia produktif harus menanggung penduduk yang bukan usia produktif. Angka beban tanggungan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 mencapai 46,73%. Artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 46 sampai 47 penduduk tidak produktif baik berusia dibawah 14 tahun maupun berusia 65 tahun keatas.

Tabel 2. 83 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Dependency Ratio Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
0-14	Laki-laki	48.526	48.840	47.330	47.985	47.693
	Perempuan	46.303	46.719	49.342	45.056	44.642
	Total	**94.829**	**95.559**	**96.672**	**93.014**	**92.335**
15-64	Laki-laki	122.241	123.972	126.124	127.638	130.022
	Perempuan	115.587	117.276	119.370	124.462	126.887
	Total	**237.828**	**241.248**	**245.494**	**252.100**	**256.909**
65+	Laki-laki	8.245	8.894	9.610	9.430	10.193
	Perempuan	8.064	8.639	9.268	9.573	10.381
	Total	**16.309**	**17.533**	**18.878**	**19.003**	**20.574**
Dependency Ratio	Laki-laki	46.44	46.57	45.15	44.96	44.52
	Perempuan	47.04	47.20	49.10	43.89	43.36
	Total	**46.73**	**46.88**	**47.07**	**44.43**	**43.95**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025, diolah

Jika melihat berdasarkan jenis kelamin, angka beban tanggungan penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada tahun 2020, angka beban tanggungan penduduk laki-laki sebesar

46,44% sedangkan angka beban tanggungan penduduk perempuan sebesar 47,04%. Tahun 2024 angka rasio ketergantungan menunjukkan penurunan menjadi 43,95%, terdiri dari angka ketergantungan laki-laki 44,52% dan perempuan 43,36%. Selama 2020-2023 angka ketergantungan laki-laki selalu lebih kecil dibandingkan dengan perempuan, kecuali pada tahun 2023-2024.

Tabel 2. 84 Angka Beban Tanggungan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	46,73	46,82	47,07	44,43	43,95
Kalimantan Selatan	46,25	46,47	46,71	46,94	47,10

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Angka beban tanggungan Kabupaten Tanah Laut tergolong tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Selama tahun 2020 sampai dengan 2022, Kabupaten Tanah Laut posisi lebih tinggi dibandingkan dengan angka beban tanggungan di provinsi Kalimantan Selatan, namun di Tahun 2023 dan 2024, posisi Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan dibandingkan dengan di Tahun 2020-2022, dan di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan.

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Kondisi ini juga sering disebut sebagai population boom. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang akan memiliki dua implikasi, jika dapat penduduk dikelola dengan baik sehingga menjadi SDM produktif akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah. Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan

aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. PDRB juga dapat diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni menggunakan perhitungan tahun dasar 2010. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan

datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

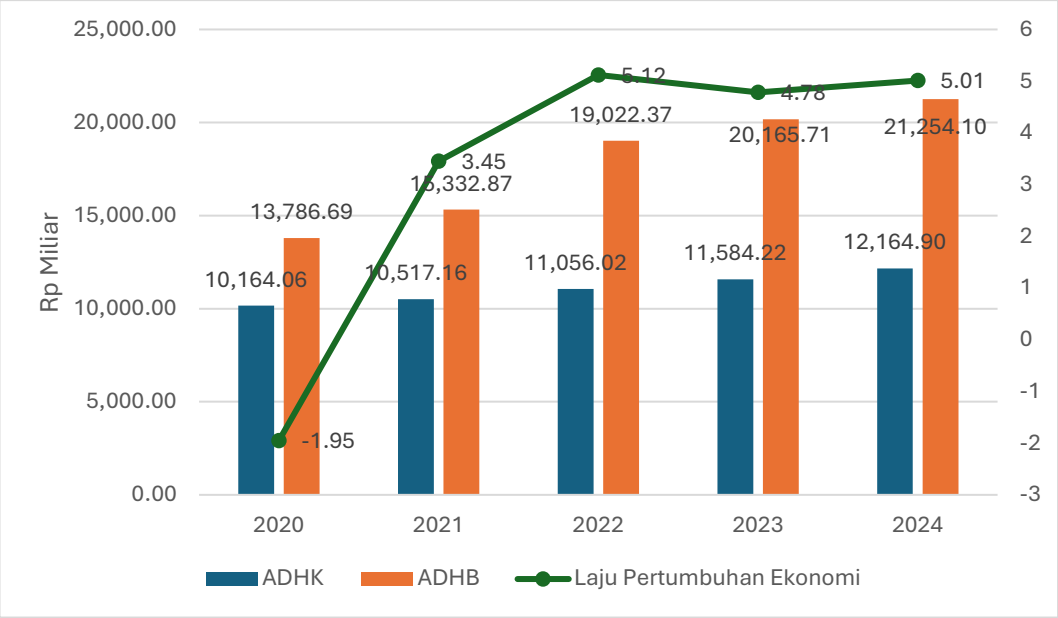

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Gambar 2. 24 PDRB Kabupaten Tanah Laut ADHK dan ADHB Tahun 2020-2024

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan

datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Beragamnya potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di suatu wilayah memberikan warna pada struktur ekonomi pada wilayah tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusinya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Tabel 2. 85 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tanah Laut (%), 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,28%	18,03%	15,58%	15,37%	16,45%	16,94%
B. Pertambangan dan Penggalian	21,66%	25,18%	34,30%	33,09%	30,31%	28,91%
C. Industri Pengolahan	12,30%	12,10%	10,50%	10,59%	10,95%	11,29%
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,20%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,17%
F. Konstruksi	7,52%	7,28%	6,37%	6,68%	6,93%	6,96%
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,49%	11,29%	10,45%	10,54%	10,72%	10,90%
H. Transportasi dan Pergudangan	6,25%	5,78%	5,55%	6,19%	6,46%	6,05%
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,61%	1,52%	1,34%	1,41%	1,49%	1,47%
J. Informasi dan Komunikasi	3,23%	3,11%	2,70%	2,72%	2,81%	2,91%
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,56%	1,45%	1,24%	1,26%	1,28%	1,36%
L. Real Estat	2,09%	2,02%	1,72%	1,78%	1,84%	1,89%
M. N. Jasa Perusahaan	0,37%	0,35%	0,31%	0,33%	0,34%	0,34%

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95%	5,68%	4,64%	4,71%	4,97%	5,19%
P. Jasa Pendidikan	4,37%	4,01%	3,38%	3,33%	3,38%	3,69%
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,19%	1,18%	1,01%	1,05%	1,06%	1,10%
R.S.T.U. Jasa lainnya	0,82%	0,75%	0,67%	0,71%	0,77%	0,74%
Produk Domestik Regional Bruto	100%	100%	100 %	100%	100%	100%

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka2025, diolah

Selama periode 2020-2024, perekonomian Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata kontribusi yang mencapai 28,91% per tahun. Pada sektor ini kontribusi terbesar diberikan oleh produksi batu bara, kemudian produksi bijih besi, mangan, bijih nikel, dan batu kromit. Kontribusi sektor ini mengalami peningkatan selama periode 2020- 2022, sektor ini menjadi sektor andalan di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian sektor andalan kedua di Kabupaten Tanah Laut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2020-2024, tren sektor pertanian kehutanan, dan perikanan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, tahun 2021 sektor ini sebesar 18,03% dan pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 15,58% kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 15,37% dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 16,45%.

Industri lainnya yang perlu diperhitungkan karena kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) industri ini memiliki angka yang cukup stabil di kisaran 10%-12% namun terjadi penurunan mulai tahun 2022 menjadi 10,50% dan pada tahun 2023 menjadi 10,59% dan tahun 2024 memiliki kontribusi sebesari 10,95% dengan rata-rata kontribusi sebesar 11,29%. Kekayaan sumber daya alam pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang mendorong tumbuhnya sektor industri, baik formal maupun non formal.

Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam kurun waktu 2020–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 1,61%, kemudian menurun pada tahun 2021

menjadi 1,52% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 1,34%. Namun, pada tahun 2023, kontribusi sektor ini mulai meningkat menjadi 1,41%, yang kemudian dilanjutkan dengan peningkatan pada tahun 2024 menjadi 1,49%. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mulai pulih pasca-pandemi dan terus menunjukkan tren positif. Pengembangan sektor pariwisata perlu terus didukung dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, seperti hotel, penginapan, serta layanan makan dan minum yang berkualitas, guna mendorong pertumbuhan kontribusi sektor ini secara berkelanjutan.

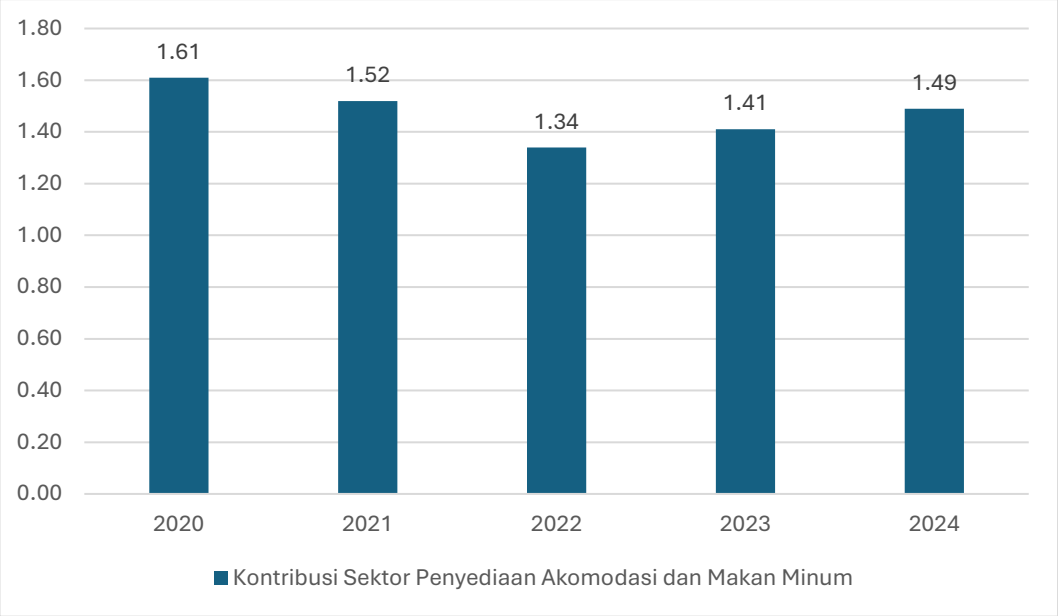

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Gambar 2. 25 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Perkembangan jumlah penginapan sendiri dapat menunjukkan perkembangan perekonomian suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Jumlah hotel di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 adalah sebanyak 15 hotel yang berada di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Pelaihari sebanyak 11 unit, Kecamatan Jorong sebanyak 3 unit, dan Kecamatan Panyipatan 1 unit. Ketersediaan kamar pada hotel-hotel tersebut adalah sebanyak 177 kamar dengan tempat tidur sebanyak 187 unit. Sedangkan

jumlah rumah makan/restoran pada tahun 2023 sebanyak 42 unit, dengan lokasi restoran terbanyak berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sejumlah 29 unit.

Tabel 2. 86 Jumlah Hotel dan Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Kecamatan	Hotel			Rumah Makan
	Hotel	Kamar	Tempat Tidur	
Panyipatan	1	10	10	1
Takisung	-	-	-	-
Kurau	-	-	-	-
Bumi Makmur	-	-	-	-
Bati-Bati	-	-	-	5
Tambang Ulang	-	-	-	7
Pelaihari	11	177	187	29
Bajuin	-	-	-	-
Batu Ampar	-	-	-	-
Jorong	3	44	44	-
Kintap	-	-	-	-
Tanah Laut	15	231	241	42

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

2.1.3.3 Transformasi Digital

Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi terbantu oleh banyaknya alat teknologi informasi dan teknologi yang berkembangan saat ini seperti komputer, internet, dan telepon seluler. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut perkembangan teknologi informasi menunjukkan peningkatan yang dilihat dari jumlah kepemilikan internet indihome. Pada tahun 2024, desa di Kabupaten Tanah Laut yang

sudah mendapatkan penerimaan sinyal internet telepon seluler berjumlah 135 desa dengan tiga kecamatan yang desanya sudah menerima sinyal internet, yaitu Kecamatan Pelaihari (20 Desa); Kecamatan Bati-Bati (14 Desa); dan Kecamatan Batu Ampar (14 Desa).

Dengan demikian, Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah secara bertahap perlu melakukan transformasi pelayanan birokrasi ke arah digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terlebih untuk wilayah yang luas seperti Kabupaten Tanah Laut.

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Salah satu layanan komunikasi dan informatika yaitu menggunakan layanan komunikasi melalui kantor pos maupun agen pos di Kabupaten Tanah Laut. Jumlah kantor pos sampai tahun 2024 pada tiap kecamatan pada umumnya adalah 1 unit, kecuali kecamatan Bumi Makmur, Tambang Ulang, dan Bajuin yang belum memiliki kantor pos maupun agen pos.

Tabel 2. 87 Jumlah Kantor Pos, Rumah Pos, dan Agen Pos, 2024

Kecamatan	Kantor Pos	Rumah Pos	Agen Pos
Panyipatan	1	0	0
Takisung	1	0	0
Kurau	1	0	0
Bumi Makmur	0	0	0
Bati-Bati	1	0	0
Tambang Ulang	0	0	0
Pelaihari	1	0	1
Bajuin	0	0	0
Batu Ampar	1	0	0
Jorong	1	0	0
Kintap	1	0	0

Kecamatan	Kantor Pos	Rumah Pos	Agen Pos
Tanah Laut	**8**	**0**	**1**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Telepon genggam merupakan salah satu media paling praktis untuk mengakses internet karena sifatnya yang mobile dan mudah digunakan. Hingga tahun 2024 penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki HP di Kabupaten Tanah Laut mencapai 70,28%, dan dari jumlah tersebut 99,74% diantaranya menggunakan HP untuk mengakses internet. Total penduduk yang mengakses internet di Kabupaten Tanah Laut mencapai 76,71%, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 74,82%. Untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan pembangunan jaringan internet yang lebih merata dan ke depan beberapa layanan secara bertahap diharapkan dapat dilakukan berbasis internet.

Tabel 2. 88 Persentase Penduduk yang Mengakses Internet Tahun 2020-2024

Tahun	Mengakses Internet	Menggunakan HP untuk Internet
2020	52,98	99,47
2021	65,76	99,78
2022	74,67	99,9
2023	74,01	99,74
2024	76,71	98,96

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Dalam hal pelayanan sistem pemerintahan, penggunaan teknologi dapat diukur dengan Indeks SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 mencapai 3,12 dan masuk dalam kategori Baik (Keputusan Menteri PANRB No. 13 Tahun 2024). Nilai indeks tersebut merupakan peringkat ke-5 setelah Kota Banjarmasin

(4,00), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (3,51), Kabupaten Tabalong (3,21), dan Kabupaten Tanah Bumbu (3,17).

2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik Global

Berdasarkan data Tahun 2024, **Net Ekspor Barang dan Jasa** mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu **Rp6.363,22 miliar**, menunjukkan bahwa ekspor daerah lebih besar dibanding impor. Meskipun demikian, Kabupaten Tanah Laut masih perlu meningkatkan interaksinya dengan perekonomian domestik maupun global agar nilai net ekspor dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan, melalui perluasan pasar, peningkatan daya saing produk unggulan, serta penguatan konektivitas perdagangan. Hal ini mengindikasikan daya saing yang kuat dalam perdagangan serta peran ekspor sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan antara PMTB dan Net Ekspor sangat penting, karena investasi dalam aset tetap yang lebih besar dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekspor di masa depan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Tabel 2. 89 PDRB Kab Tanah Laut Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar)

Pengeluaran	Tahun 2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.726,74
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	241,88
Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan	1.862,92
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.083,81
Perubahan Inventori	-24,45
Net Ekspor Barang dan Jasa	6.363,22
PDRB	**21.254,10**

Sumber : Kabupaten Tanah Laut dalam Angka 2025

Sementara itu, **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** mencapai **Rp4.083,81 miliar**, menunjukkan investasi yang cukup signifikan dalam aset tetap seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan produksi. Tingginya PMTB mencerminkan adanya pertumbuhan investasi yang dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi jangka panjang dan memperkuat fondasi ekonomi daerah.

Tambahan investasi di Kabupaten Tanah Laut fluktuatif, untuk PMDN paling tinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah proyek paling sedikit

yaitu 143 tetapi nilai investasi mencapai Rp 1.421.944,30 juta. Pada tahun 2024, tambahan investasi di Kabupaten Tanah Laut untuk PMDN dan PMA masing-masing mencapai Rp 2.298.526,21 juta dan Rp 28.040,29 juta. Nilai investasi tersebut merupakan nilai untuk proyek PMDN sebanyak 640 dan PMA sebanyak 162.

Tabel 2. 90 Investasi di Kabupaten Tanah Laut, 2024

Kabupaten/Kota	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Tambahan Investasi (Juta Rp)	Jumlah Proyek	Tambahan Investasi (Juta Rp)
2020	143	1.421.944,30	48	192.818,88
2021	200	276.696,70	47	496.924,26
2022	153	149.686,70	57	551.446,16
2023	321	987.210,5	179	504.977,29
2024	640	2.298.526,1	162	28.040,29

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2025

Tambahan investasi PMDN Kabupaten Tanah Laut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024. Kabupaten Tanah Laut menempati posisi ketiga setelah Tanah Bumbu dan Banjarmasin. Untuk PMA, Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah realisasi investasi yang cukup rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tanah Laut menempati posisi ke 3 dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 28.040,29 juta dengan total proyek terbanyak sejumlah 162 proyek. Dengan demikian, jumlah proyek PMDN dan tambahan investasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan PMA.

2.1.3.5 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan

Infrastruktur adalah salah satu faktor penting yang diperlukan untuk menjadi pusat pertumbuhan karena dengan infrastruktur yang baik akan mempermudah kehidupan suatu wilayah. Lebih dari itu, pembangunan

infrastruktur jua pada akhirnya akan mendorong ekonomi daerah karena adanya kemudahan aksesibilitas.

2.1.3.5.1 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan

Ketersediaan fasilitas transportasi seperti jalan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan, baik di perkotaan maupun pedesaan dari segi infrastruktur. Dengan tersedianya akses melalui ketersediaan jalan maka konektivitas antarwilayah akan semakin mudah sehingga dapat berdampak pada kondisi ekonomi maupun sosial.

Tabel 2. 91 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan, 2020-2024

Tahun	Panjang jalan (km)	Jumlah kendaraan (unit)	Rasio	Kemampuan Jalan
2020	1.826,63	77.320	1 : 42	Menampung
2021	1.826,63	81.423	1 : 45	Menampung
2022	1.826,63	138.605	1 : 76	Menampung
2023	1.058,91	143.319	1 : 135	Menampung
2024	1.826,63	143.319	1;78	Menampung

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel di atas, panjang jalan di Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan sepanjang 1.826,63 km dan semuanya merupakan jalan kewenangan kabupaten. Tercatat bahwa pada tahun 2020 di Kabupaten tanah Laut terdapat 77.320 unit kendaraan dengan rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan adalah 1:42. Jumlah kendaraan terus meningkat sampai tahun 2024 menjadi 143.319 unit dengan rasio mencapai 1:78. Ini berarti bahwa setiap jalan sepanjang 1 km dapat diakses oleh 78 unit kendaraan. Peningkatan rasio menunjukkan bahwa lalu lintas semakin ramai dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan.

2.1.3.5.2 Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut seluas 3.841,78 km2. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut 2024-2043, Kawasan Budi Daya terdiri atas:

a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
b. kawasan pertanian dengan kode P;
c. kawasan perikanan dengan kode IK;
d. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
e. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
g. kawasan permukiman dengan kode PM;
h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 75.435 ha, terdapat di Kecamatan Bajuin, Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, dan Kecamatan Panyipatan. Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas kurang lebih 8.772 ha terdapat di Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap. Kawasan pertanian terdiri dari Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peternakan Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 29.610 terdapat di seluruh Kecamatan. Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 29.610 ha terdapat di seluruh Kecamatan. Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 113 ha, terdapat di Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Tambang Ulang. Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 169.688 ha terdapat di seluruh Kecamatan. Kawasan Peternakan seluas kurang lebih 1.430 ha terdapat di Kecamatan Bajuin, Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Kurau, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, dan f. Kecamatan Tambang Ulang. Kawasan tanaman pangan seluas 25.579 ha terdapat di seluruh Kecamatan. Kawasan perikanan berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dan

Kawasan Perikanan Budi Daya seluas kurang lebih 4.743 ha terdapat di Kecamatan Bajuin, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Kurau dan Kecamatan Takisung.

Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik seluas kurang lebih 177 ha, terdapat di Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Pelaihari. Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 7.544 ha. Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas Kawasan Industri Jorong yang berada didalam Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Jorong, Kawasan Peruntukan Industri Bati Bati di Kecamatan Bati Bati, Kawasan Peruntukan Industri Pelaihari di Kecamatan Pelaihari, dan Kawasan Peruntukan Industri lainnya di Kecamatan Bajuin. Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 680 ha, terdapat di Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, dan Kecamatan Tambang Ulang. Potensi pariwisata berupa objek daya tarik dan potensi pariwisata. Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 24.830 ha terdapat di seluruh Kecamatan. Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 13.973 ha terdapat di seluruh Kecamatan. Kawasan Transportasi seluas kurang lebih 717 ha, terdapat di Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, dan Kecamatan Pelaihari. Kawasan Pertahanan dan Keamanan seluas kurang lebih 1.006 ha, terdapat di Kecamatan Kurau, Kecamatan Pelaihari, dan Kecamatan Tambang Ulang.

Kawasan Industri

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut 2024-2043 kawasan strategis industri di Kabupaten Tanah Laut terdapat di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Bati- Bati. Selain berfungsi sebagai kawasan industri, Kecamatan Jorong juga berfungsi sebagai pusat kawasan industri berat dan pusat kawasan pertambangan. Kawasan ini termasuk untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut. Keberadaan Kawasan Industri Jorong di Kecamatan Jorong, dapat menarik pertumbuhan Kabupaten Tanah

Laut untuk menjadi pusat pertumbuhan baru. Rencana pembangunan pelabuhan di Kecamatan Jorong ini juga dapat mendorong percepatan pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Tanah Laut. Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 7.544 ha. Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas Kawasan Industri Jorong yang berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Jorong, Kawasan Peruntukan Industri Bati Bati di Kecamatan Bati Bati, Kawasan Peruntukan Industri Pelaihari di Kecamatan Pelaihari, dan Kawasan Peruntukan Industri lainnya di Kecamatan Bajuin.

Peningkatan pembangunan fasilitas pelayanan ini akan mengiringi interaksi ke Perkotaan Jorong, karena semakin lengkap atau semakin tinggi nilai indeks sentralitas atas fasilitas yang dimiliki maka wilayah tersebut memiliki fungsi yang lebih besar dibandingkan wilayah lain dan semakin menarik masyarakat di perkotaan lainnya untuk melakukan aktivitas di Perkotaan Jorong yang akan diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Perkotaan Jorong menjadi kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Laut khususnya di bidang industri. Dengan pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah dapat terwujud peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat baik di lingkungan perkotaan dan pedesaan. Struktur perekonomian dapat diperkuat dengan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh perkembangan pertanian, perikanan, dan pariwisata.

2.1.3.5.4 Luas Wilayah Perkotaan

Pemerintah Kabupaten telah menyusun Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut 2024-2043. Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kawasan perkotaan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sistem pusat permukiman terdiri atas Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan

Lingkungan. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pusat Pelayanan Kawasan terdiri atas Perkotaan Bajuin di Kecamatan Bajuin, Perkotaan Bati-Bati di Kecamatan Bati Bati, Perkotaan Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Perkotaan Bumi Makmur di Kecamatan Bumi Makmur, . Perkotaan Jorong di Kecamatan Jorong, Perkotaan Kintap di Kecamatan Kintap, Perkotaan Kurau di Kecamatan Kurau, Perkotaan Panyipatan di Kecamatan Panyipatan, Perkotaan Pelaihari di Kecamatan Pelaihari, Perkotaan Takisung di Kecamatan Takisung, dan Perkotaan Tambang Ulang di Kecamatan Tambang Ulang. Pusat Pelayanan Lingkungan terdiri atas Kecamatan Bajuin, Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Kurau, dan Kecamatan Panyipatan.

2.1.3.5.4 Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan instrumen pengukuran yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengklasifikasikan tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia. IDM mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi ekologi/lingkungan, yang diukur melalui sejumlah indikator yang komprehensif. Berdasarkan capaian skor IDM, desa-desa di Indonesia dikategorikan ke dalam lima tipe: Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri.

Perkembangan status desa menurut IDM menunjukkan tren yang positif dalam satu dekade terakhir. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa proses pembangunan desa di Indonesia secara umum mengalami peningkatan. Jika ditinjau dari data terbaru tahun 2024, terlihat bahwa proporsi desa dengan status Mandiri terus mengalami peningkatan yang signifikan, sementara jumlah desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal cenderung menurun. Gambaran ini mencerminkan bahwa berbagai program intervensi

pembangunan desa, baik melalui Dana Desa, pendampingan pembangunan desa, maupun penguatan kapasitas aparatur desa, telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong transformasi desa-desa di Indonesia. Penyajian data IDM secara berkala juga berperan penting sebagai alat perencanaan dan evaluasi pembangunan, membantu pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi desa-desa yang masih memerlukan perhatian lebih besar guna mempercepat proses pembangunan yang inklusif.

Tabel 2. 92 Perkembangan Status Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

Tahun	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
2020	9	121	791	169	7
2021	5	75	776	238	18
2022	3	43	652	387	8
2023	1	1	326	638	127
2024	0	0	263	664	166

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Perkembangan status desa di Kabupaten/Kota selama periode 2020–2024 menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dalam pembangunan desa. Berdasarkan data rekapitulasi IDM, terjadi penurunan yang konsisten pada jumlah desa kategori Tertinggal dan Sangat Tertinggal, disertai dengan peningkatan jumlah desa kategori Maju dan Mandiri. Pada tahun 2020, masih terdapat 121 desa Tertinggal dan 9 desa Sangat Tertinggal. Namun, pada tahun 2024, kedua kategori ini sudah mencapai 0 desa, menandakan bahwa seluruh desa telah berhasil keluar dari kondisi pembangunan paling rendah.

Sebaliknya, desa dalam kategori Maju dan Mandiri terus mengalami peningkatan. Desa kategori Maju meningkat dari 169 desa (15.46%) pada tahun 2020 menjadi 664 desa (60.75%) pada tahun 2024. Sedangkan desa kategori Mandiri tumbuh pesat dari hanya 7 desa (0.64%) di tahun 2020 menjadi 166 desa (15.19%) pada tahun 2024. Adapun desa kategori

Berkembang mengalami penurunan seiring dengan perbaikan status desa ke kategori yang lebih tinggi, yakni dari 791 desa (72.37%) di tahun 2020 menjadi 263 desa (24.06%) di tahun 2024.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan desa yang dijalankan secara terintegrasi dan berkelanjutan telah memberikan dampak yang positif bagi percepatan pembangunan desa dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

2.1.3.5.5 Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah kategori tertinggi dalam Indeks Desa Membangun, yang mencerminkan desa dengan kapasitas sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat baik serta pelayanan dasar yang optimal. Desa Mandiri diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan wilayah sekaligus contoh praktik baik pembangunan desa. Tren pertumbuhan jumlah Desa Mandiri dalam lima tahun terakhir menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan:

Tabel 2. 93 Tren Pertumbuhan Desa Mandiri di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah	Persentase %
2020	7	0.64%
2021	18	1.65%
2022	8	0.73%
2023	127	11.62%
2024	166	15.19%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Pada tahun 2020, jumlah Desa Mandiri baru mencapai 7 desa atau hanya 0.64% dari total desa. Setelah mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 18 desa (1.65%), jumlah ini sempat menurun di tahun 2022 menjadi 8 desa (0.73%), yang kemungkinan mencerminkan penyesuaian terhadap metodologi penilaian atau dampak pandemi. Namun, sejak tahun 2023, terjadi

lonjakan yang sangat signifikan, dengan 127 desa (11.62%) meraih status Mandiri. Tren positif ini berlanjut di tahun 2024, di mana jumlah Desa Mandiri mencapai 166 desa (15.19%), atau hampir seperenam dari total desa.

Peningkatan pesat Desa Mandiri ini menunjukkan bahwa upaya penguatan kapasitas pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan pelayanan dasar telah memberikan hasil nyata. Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing desa, memperkuat perekonomian wilayah, dan mewujudkan desa sebagai pusat pertumbuhan baru di tingkat lokal.

2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.6.1 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (aggregate demand) lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi supply-demand

tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

Inflasi dapat diukur dengan menggunakan Indeks harga Konsumen. Dalam hal data Indeks Harga Konsumen tidak tersedia inflasi diukur menggunakan indeks implisit, yang menggambarkan perbandingan PDRB ADHB dengan PDRB ADHK. Indeks implisit PDRB ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penghitungan indeks harga yang pada akhirnya dijadikan untuk menghitung inflasi yang terjadi. Penghitungan inflasi ini disebut juga penghitungan inflasi dengan PDRB deflator. Bila inflasi dilihat secara sektoral, maka inflasi dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan PDRB deflator, yaitu perbandingan PDRB harga berlaku dengan harga konstan. PDRB deflator memiliki perbedaan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). PDRB deflator mengukur semua harga barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi sementara IHK hanya mengukur harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Selain itu, PDRB deflator hanya mengukur barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. PDRB deflator mengukur perubahan harga secara umum sementara IHK mengukur perubahan harga untuk kelompok barang tertentu.

Tabel 2. 94 Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran (%) Kabupaten Tanah Laut, 2024

Kelompok Pengeluaran	2024
Umum	1,01
Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,58
Pakaian dan Alas Kaki	-0,11
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	~0
Perlengkapan, Peralatan,dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,15
Kesehatan	~0
Transportasi	0,01
Informasi,Komunikasi, dan Jasa Keuangan	~0
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	~0
Pendidikan	~0

Kelompok Pengeluaran	2024
Makanan dan Minuman	~ 0
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	~ 0

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

Dengan menggunakan pendekatan PDRB Deflator, inflasi selama pada periode 2024 secara umum memiliki nilai 1,01. Nilai inflasi umum tersebut dipengaruhi oleh sektor-sektor yang mengalami kenaikan harga signifikan. Dari data yang diberikan, sektor **Makanan, Minuman, dan Tembakau** mengalami kenaikan tertinggi sebesar **2,58%** yang kemungkinan menjadi penyebab utama inflasi umum. Sedangkan, untuk kelompok pemgeluaran yang memiliki nilai~ 0 artinya **tidak ada kenaikan harga yang signifikan** di sektor tersebut dalam periode yang diukur (tahun 2024).

2.1.3.6.2 Pengeluaran Riil Per Kapita

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur melalui beberapa aspek yakni pendapatan, tingkat konsumsi, dan pola konsumsi. Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, kecenderungan akan meningkatkan pengeluaran konsumsinya. Selain itu, pola pengeluaran konsumsi seseorang juga akan berubah dari pengeluaran untuk makanan ke non makanan. Hal tersebut dikarenakan jika kebutuhan seseorang terhadap makanan sudah terpenuhi dan mencapai kepuasan maksimum maka seseorang akan mulai mengkonsumsi non makanan.

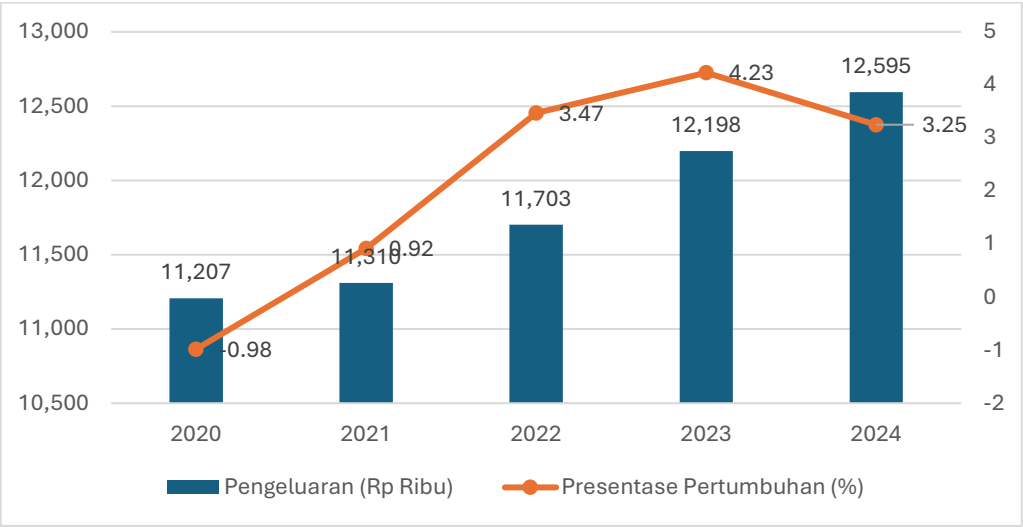

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Gambar 2. 26 Perkembangan Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Tanah Laut (Ribu Rp/Tahun), 2020-2024

Selama tahun 2020-2024, tingkat kesejahteraan penduduk yang dapat dilihat melalui pengeluaran perkapita di Kabupaten Tanah Laut cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020, pengeluaran perkapita adalah sebesar 11,2 juta atau turun sebesar -0,98% dan pada tahun 2021 pengeluaran perkapita naik 0,92% menjadi Rp 11,3 juta. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita naik sebesar 3,47% menjadi Rp 11,7 juta. Kemudian pada 2023, pengeluaran perkapita naik menjadi 4,23% yaitu menjadi Rp 12,19 juta. Kenaikan pengeluaran perkapita tertinggi selama periode tersebut yakni pada tahun 2023 dengan kenaikan nominal sebesar 4,23% dari tahun sebelumnya. Selain itu, tahun 2024 juga mengalami peningkat dengan pertumbuhan 3,25% dengan pendapatan per kapita, yaitu Rp12,5 juta dan kenaikan terendah yakni pada tahun 2020 yaitu sebesar -0,98% dari tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya pengeluaran perkapita ini, maka terdapat indikasi bahwa kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi dua yakni pengeluaran konsumsi untuk makanan dan pengeluaran konsumsi untuk non makanan. Seperti dijelaskan sebelumnya, apabila rumah tangga

memiliki pengeluaran konsumsi non makanan yang lebih tinggi daripada pengeluaran konsumsi makanan maka tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut lebih baik. Selama 5 tahun terakhir yakni selama periode 2020 hingga 2024, pola konsumsi rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan masih pada konsumsi makanan. Pada tahun 2020, persentase pengeluaran konsumsi makanan yakni sebesar 54,83% dan konsumsi non makanan sebesar 45,17%.

Pada tahun 2020-2024, pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan berfluktuatif. Pada tahun 2024, pengeluaran untuk makanan sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 54,17%. Jika dilihat struktur pengeluaran non makanan pada tahun 2024, persentase pengeluaran terbesar digunakan untuk Perumahan dan fasilitas rumah tangga dengan persentase sebesar 25,32%. Porsi pengeluaran konsumsi non makanan terbesar kedua digunakan untuk aneka komoditas dan jasa dengan persentase sebesar 8,54%. Dengan melihat pola konsumsi makanan dan non makanan maka dapat dikatakan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut sudah mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan non makanan dan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk semakin meningkat.

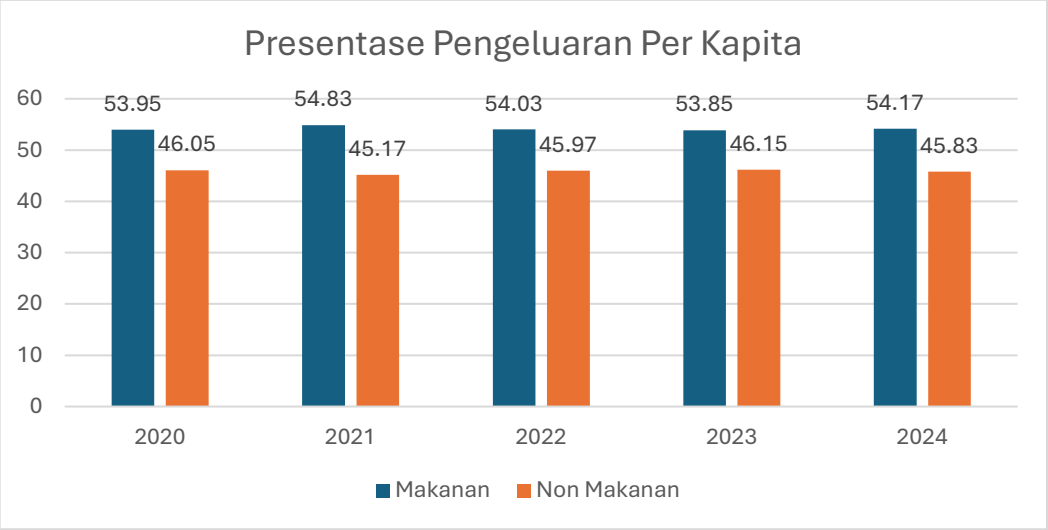

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut 2025

Gambar 2. 27 Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

2.1.3.6.3 Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran yang menggambarkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total output perekonomian suatu wilayah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total penerimaan pajak daerah dengan total PDRB pada tahun yang sama, dinyatakan dalam persentase.

Rasio ini digunakan untuk mengukur kapasitas fiskal daerah dan sejauh mana potensi ekonomi daerah telah dimanfaatkan untuk menghasilkan penerimaan pajak. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar proporsi aktivitas ekonomi daerah yang berhasil dikonversi menjadi penerimaan pajak oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, rasio yang rendah dapat menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak daerah belum sepenuhnya tergali, atau bahwa struktur ekonomi daerah memang tidak banyak memberikan kontribusi pajak langsung. Beberapa faktor yang memengaruhi rasio pajak daerah terhadap PDRB antara lain:

1. Struktur ekonomi daerah, misalnya dominasi sektor-sektor yang kurang atau tidak menjadi objek pajak daerah.
2. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.
3. Kapasitas administrasi perpajakan di daerah, mencakup aspek penagihan, pengawasan, dan penggalian potensi pajak baru.
4. Kebijakan insentif atau pembebasan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Tabel berikut menyajikan perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut selama periode 2020–2024.

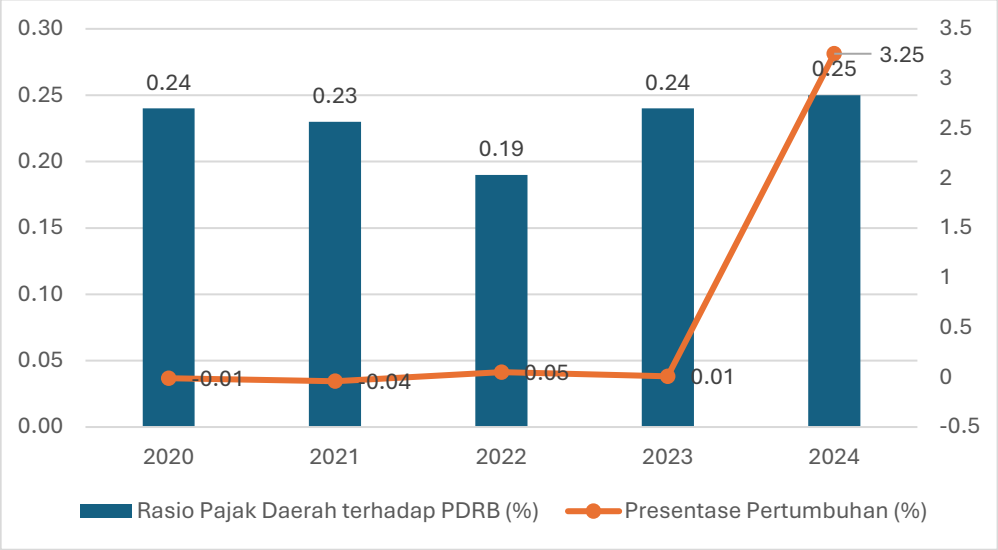

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Gambar 2. 28 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut, 2020–2024

Selama periode 2020–2024, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut cenderung stabil di tingkat yang rendah, yaitu berkisar antara 0,19% hingga 0,25%. Rasio ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap total perekonomian masih terbatas. Pada tahun 2022, rasio mengalami penurunan hingga 0,19%, yang kemungkinan disebabkan oleh pertumbuhan PDRB yang relatif tinggi sementara peningkatan pajak daerah belum seimbang. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 rasio ini kembali naik menjadi 0,24% dan 0,25%, seiring dengan peningkatan penerimaan pajak daerah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun PDRB Kabupaten Tanah Laut terus meningkat, optimalisasi penerimaan pajak daerah masih menjadi tantangan. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah perlu terus ditingkatkan agar kapasitas fiskal daerah dapat lebih sejalan dengan pertumbuhan ekonominya. Selain itu, perlu dipertimbangkan strategi peningkatan kepatuhan pajak, penguatan sistem administrasi perpajakan daerah, serta peninjauan kebijakan insentif pajak untuk mendorong peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PDRB di masa mendatang.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

Tata kelola yang baik (good corporate governance) merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Dinamika masyarakat seiring dengan kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk menjadi pelayanan publik yang handal. Layanan publik yang prima akan berdampak besar dalam upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat secara proaktif akan terlibat secara langsung dalam pembangunan daerah.

Pengukuran tata kelola pemerintah yang baik telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai alat ukur yang kredibel. Hasil pengukuran tersebut diwujudkan dalam bentuk berbagai jenis indeks tata kelola, seperti: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pelayanan Publik (IPP), Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), dan bentuk indeks lain yang terus dikembangkan.

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks SAKIP adalah indeks untuk mengukur atau menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia

berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan.

Selanjutnya indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatan. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah.

Dalam hal kinerja tata kelola pemerintahan, kondisi Kabupaten Tanah Laut cukup baik, seperti SAKIP dengan nilai B, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Indeks SPBE kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebesar 3,12 memiliki predikat baik. ini menunjukkan bahwa arah reformasi birokrasi dan tata kelola telah berhasil dilaksanakan meski masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing secara nasional. Tingginya nilai indeks menggambarkan besarnya komitmen pemerintah daerah dalam pelayanan publik.

Tabel 2. 95 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2024

Parameter	IRB	INDEKS SAKIP	INDEKS SPBE	IPP	IID	IPKD
Nilai/Predikat	80,45	70,16	3,12	4,23	55,71	79,64

Sumber: LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2024 dan RKPD Pemkab Tanah Laut 2025

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa **pengelolaan keuangan daerah** memiliki kinerja terbaik dengan nilai **79,64**, diikuti oleh **Indeks Reformasi Birokrasi** yang juga cukup tinggi di angka **80,45**. Sementara itu, **Indeks Inovasi Daerah** masih relatif rendah dengan nilai **55,71**, yang mengindikasikan perlunya peningkatan dalam aspek inovasi untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya penguatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan menjadi penting agar dapat mendukung reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang telah berjalan dengan baik.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tanggung dan Demokrasi Substansi

2.1.4.2.1 Angka Kriminalitas

Iklim investasi di suatu wilayah dapat dipengaruhi salah satunya oleh angka kriminalitas. Angka ini menunjukan jumlah tindak kriminalitas yang terjadi di suatu wilayah pada waktu tertentu Semakin rendah angka kriminalitas maka dapat menciptakan kondisi yang aman dan terjamin sehingga investor lebih percaya dalam menanamkan modalnya. Sebaliknya, jika angka kriminalitas tinggi menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya karena alasan keamanan yang dapat berakibat pada ketidakpastian usaha.

Tabel 2. 96 Jumlah Tindak Pidana Kejahatan yang Masuk di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024

Jenis Tindak Pidana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Umum	102	88	75	120	72
Ekonomi	5	0	0	0	0
Subversi	0	0	0	0	0
Korupsi	3	6	4	3	3
Narkotika	117	112	124	116	125
Imigrasi	0	0	0	0	0
Senjata api atau tajam	13	12	21	11	12
Lain-lain	35	36	39	31	52

Jenis Tindak Pidana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total	**275**	**254**	**263**	**281**	**264**

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2025

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomaasi dan Pertahanan Berdaya Gentar

2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Secara keseluruhan daya saing suatu daerah tercermin melalui IDSD yang menggambarkan derajat daya saing suatu daerah melalui 4 pilar utama yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi dengan total 12 pilar pendukung.

Komponen **Lingkungan Pendukung** terdiri dari empat pilar: **institusi, infrastruktur, adopsi TIK**, dan, yang berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah. **Sumber Daya Manusia** mencakup **kesehatan** dan **keterampilan**, yang berkontribusi pada kualitas hidup dan tenaga kerja produktif. **Komponen Pasar** meliputi **pasar produk, pasar tenaga kerja**, **sistem keuangan**, dan **ukuran pasar**, yang mendorong efisiensi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan industri. **Ekosistem Inovasi** terdiri dari **dinamisme bisnis** dan **kapabilitas inovasi**, yang mendukung kemudahan usaha serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam ekonomi.

Tabel 2. 97 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024

Pilar	Keterangan	Skor
1	Institusi	4,76
2	Infrastruktur	3,36
3	Adopsi TIK	4,58
4	Stabilitas Ekonomi Makro	3,90
5	Kesehatan	3,76
6	Keterampilan	3,94
7	Pasar Produk	3,07
8	Pasar Tenaga Kerja	3,30
9	Sistem Keuangan	2,87
10	Ukuran Pasar	4,17

Pilar	Keterangan	Skor
11	Dinamisme Bisnis	4,80
12	Kapabilitas Inovasi	2,21
SKOR IDSD		**3,73**

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Nilai IDSD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 mencapai 3,73 dan angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan Selatan yaitu menduduki peringkat 4, sudah di ata skor IDSD Kalimantan Selatan 3,56. Nilai tertinggi dari pilar pendukung IDSD Tanah Laut adalah Pilar 11 yaitu pilar Dinamisme Bisnis sedangkan pendukung IDSD dengan skor 4,80 sedangkan yang terendah adalah Pilar 12 yaitu Kapabilitas Inovasi dengan skor 2,21. Dengan demikian arah pembangunan daya saing di Tanah Laut perlu difokuskan pada pengembangan sistem keuangan yang mendorong peningkatan kapabilitas inovasi serta pengembangan sistem keuangan.

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintah Daerah (IKK)

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut selama periode 2019-2023 dapat dievaluasi melalui capaian indikator-indikator kunci yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara umum, analisis difokuskan pada perbandingan kondisi awal (tahun 2019) dengan kondisi akhir (tahun 2023) untuk menilai sejauh mana target telah tercapai.

Capaian Misi 1: Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Selama periode 2019-2023, berbagai indikator kinerja menunjukkan tren positif dengan beberapa pencapaian signifikan, namun terdapat pula tantangan yang menghambat target yang telah ditetapkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan pesat dari 69,04 pada tahun 2019 menjadi 72,98 pada 2023, jauh melampaui target yang ditetapkan

sebesar 70,1. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

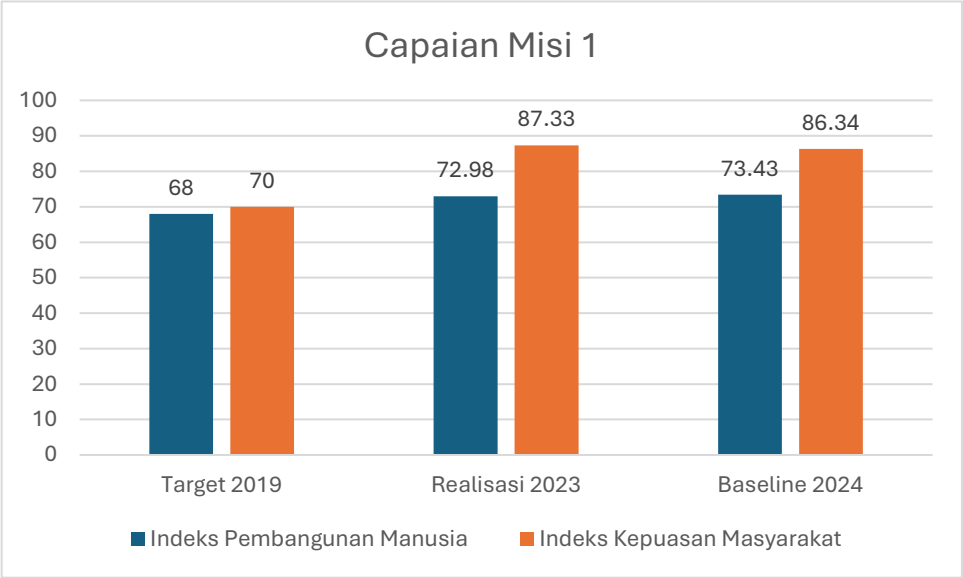

Gambar 2. 29 Capaian Misi 1

Di sisi lain, terdapat indikator yang menunjukkan progres lambat atau tidak mencapai target yang diharapkan. Rata-rata lama sekolah hanya meningkat dari 7,64 tahun pada 2019 menjadi 7,92 tahun pada 2023, masih jauh dari target ambisius 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan, terutama dalam hal putus sekolah dan akses pendidikan lanjutan, masih menjadi tantangan besar.

Indeks Kepuasan Masyarakat yang menggambarkan persepsi warga terhadap pelayanan publik menunjukkan tren positif dengan kenaikan dari 82,73 pada 2019 menjadi 87,33 pada 2023, melebihi target 80. Hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin puas dengan layanan yang diberikan pemerintah daerah.

Sementara itu, Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) berhasil diturunkan dari 2,99 menjadi 2,04 anak per wanita dalam kurun waktu lima tahun. Namun, meskipun mengalami penurunan signifikan, target 1,1 anak per wanita masih jauh dari realisasi. Target yang terlalu optimistis ini

menunjukkan bahwa program pengendalian kelahiran belum dapat mencapai angka yang direncanakan.

Kinerja Sektor Pendidikan dan Pelatihan

Misi 1 berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang lebih merata dan terjangkau. Dalam sektor ini, capaian IPM yang tinggi menunjukkan bahwa secara agregat kualitas sumber daya manusia meningkat. Namun, indikator yang lebih spesifik menunjukkan tantangan yang signifikan.

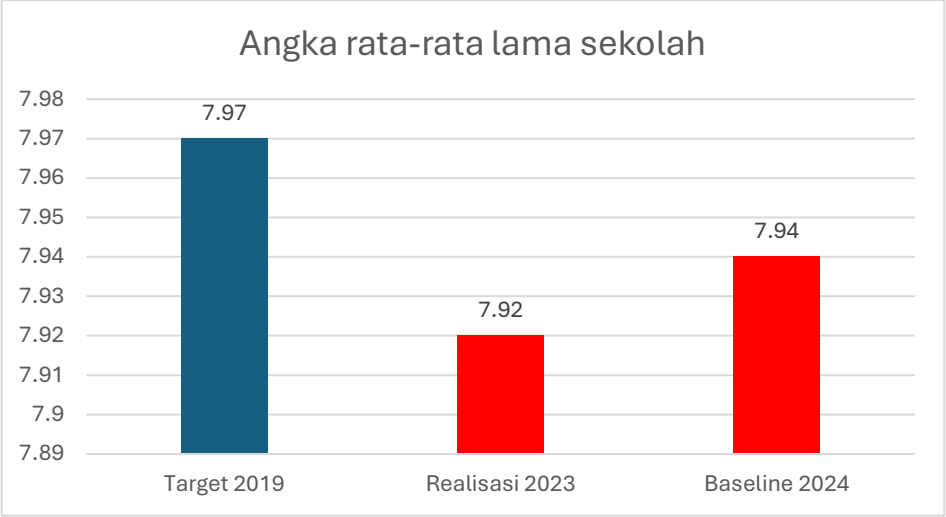

Gambar 2. 30 Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah yang hanya naik tipis dari 7,64 tahun menjadi 7,92 tahun selama empat tahun menunjukkan bahwa program peningkatan pendidikan belum berdampak signifikan. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya, termasuk tingginya angka putus sekolah dan terbatasnya akses pendidikan di daerah tertentu. Target 12 tahun tampaknya kurang realistis dalam kurun waktu yang singkat, sehingga diperlukan strategi yang lebih inovatif untuk meningkatkan angka pendidikan penduduk.

Harapan lama sekolah yang meningkat dari 11,96 tahun menjadi 12,41 tahun juga masih di bawah target 14 tahun. Meski ada tren peningkatan, kesenjangan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi masih menjadi

tantangan. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan insentif atau beasiswa untuk mendorong partisipasi pendidikan tinggi.

Di sisi lain, program pelatihan kerja menunjukkan keberhasilan luar biasa. Jumlah tenaga kerja siap kerja yang ditargetkan sebanyak 500 orang per tahun berhasil dilampaui, bahkan mencapai angka lebih dari tiga kali lipat target di beberapa tahun. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelatihan berbasis kompetensi dan tingginya minat masyarakat dalam mengikuti program pelatihan kerja. Ke depan, tantangannya adalah memastikan bahwa tenaga kerja yang telah dilatih dapat terserap dengan baik di pasar kerja.

Kinerja Sektor Kesehatan

Indikator kesehatan menunjukkan tren yang sangat baik dengan peningkatan usia harapan hidup dari 69,31 tahun pada 2019 menjadi 74,46 tahun pada 2023. Lonjakan lebih dari 4 tahun dalam satu periode RPJMD menimbulkan pertanyaan apakah terjadi perubahan metode penghitungan atau perbaikan pencatatan data penduduk lansia. Jika data ini valid, maka berarti terjadi peningkatan besar dalam pelayanan kesehatan.

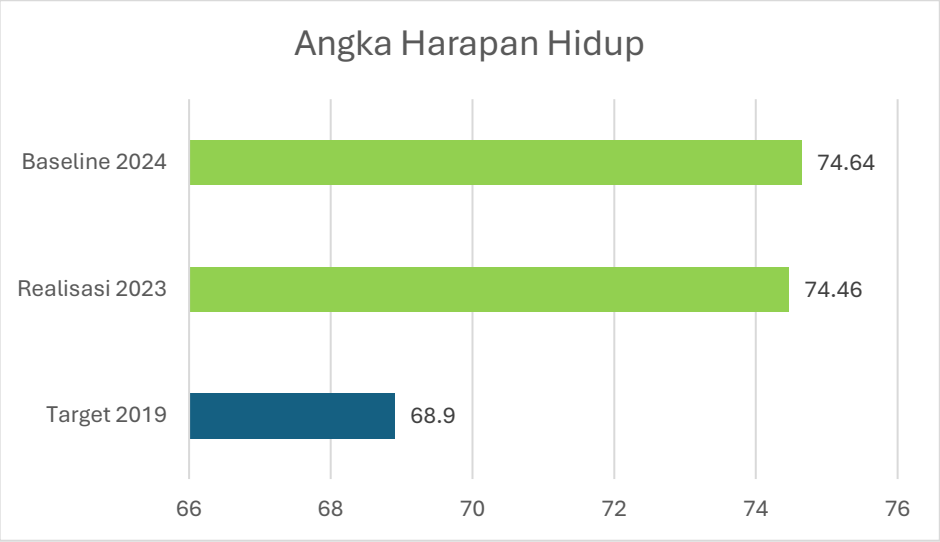

Gambar 2. 31 Capaian Angka Harapan Hidup

Cakupan pelayanan kesehatan on-call tercatat 100% setiap tahun, menunjukkan bahwa layanan kesehatan darurat dapat diakses oleh seluruh

masyarakat tanpa kendala. Hal ini merupakan indikator keberhasilan sistem layanan kesehatan yang responsif dan merata di berbagai wilayah.

Terkait dengan angka kelahiran, TFR mengalami penurunan signifikan dari 2,99 menjadi 2,04. Meskipun target 1,1 belum tercapai, penurunan hampir 1 anak per wanita dalam empat tahun merupakan indikasi keberhasilan program Keluarga Berencana dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pengendalian kelahiran. Namun, target yang ditetapkan tampaknya terlalu ambisius, mengingat perubahan perilaku masyarakat terkait fertilitas membutuhkan waktu lebih panjang.

Kinerja Pelayanan Publik dan Administrasi

Indeks Kepuasan Masyarakat yang meningkat dari 82,73 menjadi 87,33 menandakan bahwa reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kepuasan yang tinggi ini juga didukung oleh implementasi layanan administrasi yang hampir mencapai 100% cakupan, termasuk dalam penerbitan KTP dan layanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

Gambar 2. 32 Capaiaan Pelayanan Publik

Namun, cakupan administrasi kependudukan sempat mengalami sedikit penurunan dari 100% menjadi 98,78% pada 2022, sebelum naik kembali ke 99,5% pada 2023. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh faktor teknis seperti penduduk yang baru pindah atau keterbatasan sumber daya di

beberapa wilayah. Ke depan, perlu ada strategi agar cakupan ini kembali mencapai 100% tanpa hambatan.

Pelayanan berbasis teknologi informasi juga menunjukkan capaian maksimal, dengan 100% permohonan layanan digital yang diajukan oleh masyarakat berhasil ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam layanan publik berjalan efektif, namun perlu dievaluasi lebih lanjut apakah tingkat pemanfaatannya sudah optimal atau masih terbatas pada kelompok tertentu.

Kinerja Pembangunan Pemuda dan Budaya

Sektor pemuda dan budaya menunjukkan capaian yang bervariasi. Pelestarian budaya daerah mencapai 100% sesuai target, menunjukkan bahwa program-program kebudayaan telah terlaksana dengan baik.

Sementara itu, jumlah atlet berprestasi mengalami fluktuasi. Pada 2019, capaian mencapai 138 atlet, namun turun drastis pada 2020 menjadi 61 atlet, diduga akibat pandemi COVID-19 yang membatasi kompetisi olahraga. Pada 2022 terjadi lonjakan hingga 534 atlet sebelum kembali stabil di angka 136 pada 2023. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa pencapaian atlet sangat bergantung pada kalender kompetisi dan kebijakan pembinaan atlet. Ke depan, perlu ada strategi untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan pencapaian prestasi yang lebih stabil.

Capaian Misi 2: Menciptakan Inovasi di Segala Sendi Kehidupan Masyarakat dan Pengembangan Industri

Misi 2 menekankan penciptaan inovasi dalam berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat. Selama periode 2019-2023, kinerja dalam hal inovasi menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun terdapat beberapa tantangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu indikator utama, yaitu jumlah penghargaan inovasi publik, ditargetkan memperoleh minimal satu penghargaan setiap tahun. Sedangkan di sektor ekonomi kreatif, indikator jumlah industri kreatif yang memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Target

awal pada 2019 adalah menciptakan lima unit usaha industri kreatif, tetapi realisasi menunjukkan hasil jauh di atas ekspektasi dengan 10 unit usaha terbentuk. Pada tahun 2020, target dinaikkan menjadi 25 unit usaha, dan target ini berhasil tercapai. Pada tahun 2021, target 15 unit usaha juga terlampaui secara signifikan dengan capaian 103 unit usaha. Tren ini terus meningkat hingga tahun 2023, di mana target 25 unit usaha industri kreatif akhirnya menghasilkan 188 unit usaha baru, jauh melampaui ekspektasi awal.

Kinerja Inovasi dalam Pelayanan Publik

Inovasi dalam pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama dari Misi 2. Indikator utama dalam sasaran ini adalah jumlah penghargaan inovasi publik yang berhasil diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pada tahun 2019, target yang ditetapkan adalah memperoleh satu penghargaan, tetapi tidak ada penghargaan yang berhasil diraih. Hal yang sama terjadi pada tahun 2020, meskipun upaya inovasi dalam layanan publik sudah mulai diterapkan. Baru pada tahun 2021, pemerintah berhasil memperoleh satu penghargaan inovasi publik, yang terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan pencapaian yang sama.

Capaian ini menunjukkan bahwa inovasi dalam pelayanan publik sudah mulai mendapatkan pengakuan, tetapi laju pertumbuhannya masih lambat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya publikasi atas inovasi yang telah diterapkan, kurangnya partisipasi dalam kompetisi inovasi, atau inovasi yang dilakukan masih belum memiliki daya saing yang cukup tinggi di tingkat nasional maupun regional.

Untuk meningkatkan pengakuan terhadap inovasi pelayanan publik, pemerintah perlu lebih aktif dalam mengembangkan dan mempromosikan inovasi yang telah dilakukan. Selain itu, memperkuat sinergi antara perangkat daerah dan mendorong partisipasi dalam berbagai ajang penghargaan inovasi dapat menjadi langkah strategis untuk memperbaiki capaian ini.

Kinerja Inovasi dalam Industri Kreatif

Sektor industri kreatif mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi salah satu aspek paling berhasil dalam pencapaian Misi 2. Pada tahun 2019, target awal adalah menciptakan lima unit usaha industri kreatif yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Namun, realisasi menunjukkan hasil lebih tinggi dengan 10 unit usaha baru terbentuk.

Pada tahun 2020, target meningkat menjadi 25 unit usaha, yang juga berhasil dicapai. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2021, ketika target hanya 15 unit usaha, tetapi realisasinya mencapai 103 unit usaha. Tren ini terus berlanjut dengan capaian 134 unit usaha pada tahun 2022 dan puncaknya terjadi pada tahun 2023, dengan 188 unit usaha industri kreatif baru terbentuk, melampaui target yang hanya 25 unit usaha.

Capaian ini mencerminkan bahwa program pengembangan industri kreatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat efektif. Beberapa faktor yang mungkin mendukung keberhasilan ini meliputi:

- Dukungan regulasi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, termasuk kemudahan perizinan dan bantuan modal usaha.
- Peningkatan akses terhadap teknologi dan pelatihan bagi pelaku industri kreatif, yang memungkinkan mereka untuk berkembang lebih cepat.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap potensi ekonomi kreatif, sehingga semakin banyak individu dan kelompok yang berani membuka usaha di sektor ini.

Namun, keberhasilan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti bagaimana memastikan keberlanjutan usaha-usaha yang telah terbentuk dan meningkatkan daya saing industri kreatif lokal agar dapat berkembang lebih luas di tingkat nasional maupun internasional.

Tantangan Ke Depan

Berdasarkan analisis capaian Misi 2, beberapa masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah:

- Kurangnya Pengakuan terhadap Inovasi Publik – Meskipun inovasi sudah mulai berkembang, jumlah penghargaan yang diperoleh masih minim. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih dalam meningkatkan daya saing inovasi yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- Kesenjangan antara Inovasi dan Penghargaan – Banyak inovasi mungkin telah diterapkan, tetapi tidak seluruhnya mendapatkan pengakuan formal dalam bentuk penghargaan. Perlu ada strategi untuk memperkenalkan inovasi daerah ke tingkat yang lebih luas agar dapat memperoleh apresiasi yang lebih besar.
- Keberlanjutan Industri Kreatif – Pertumbuhan pesat industri kreatif harus diimbangi dengan strategi keberlanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa usaha-usaha yang terbentuk tidak hanya berkembang di awal, tetapi juga dapat bertahan dalam jangka panjang.
- Penggalian Kembali Data Terkait Dampak Inovasi – Sementara jumlah inovasi meningkat, data mengenai dampak konkret dari inovasi tersebut terhadap masyarakat masih kurang tersedia. Hal ini penting untuk menilai efektivitas program dan menyusun strategi pengembangan yang lebih baik.

Capaian Misi 3: Membangun Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Misi 3 berfokus pada upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang lebih efisien dan akuntabel. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam sasaran ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi, yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah mengimplementasikan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2019, target Indeks Reformasi Birokrasi ditetapkan di angka 60, tetapi realisasi hanya mencapai 53, menandakan adanya hambatan dalam implementasi reformasi di awal periode. Tahun 2020, target dinaikkan menjadi 64, namun realisasi kembali lebih rendah di angka 56,21. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, kecepatan reformasi birokrasi masih lebih lambat dari yang direncanakan.

Pada tahun 2021, pemerintah daerah menargetkan peningkatan indeks ke level 62, dengan kategori "Baik". Namun, realisasi hanya mencapai 60,06, masih di bawah target meskipun sedikit lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2022 menunjukkan pola yang serupa, di mana target 63 (Baik) tidak tercapai dan hanya mampu mencapai 60,19.

Namun, pada tahun 2023 terjadi lompatan besar dalam pencapaian, di mana target 64 (Baik) akhirnya terlampaui dengan realisasi 72,87, menandakan keberhasilan signifikan dalam reformasi birokrasi di tahun terakhir periode RPJMD. Peningkatan besar ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan perbaikan sistem pemerintahan akhirnya mulai memberikan dampak nyata.

Kinerja Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi, serta memperbaiki efektivitas tata kelola pemerintahan. Selama periode 2019-2022, reformasi birokrasi menghadapi tantangan berat dengan realisasi indeks yang selalu di bawah target.

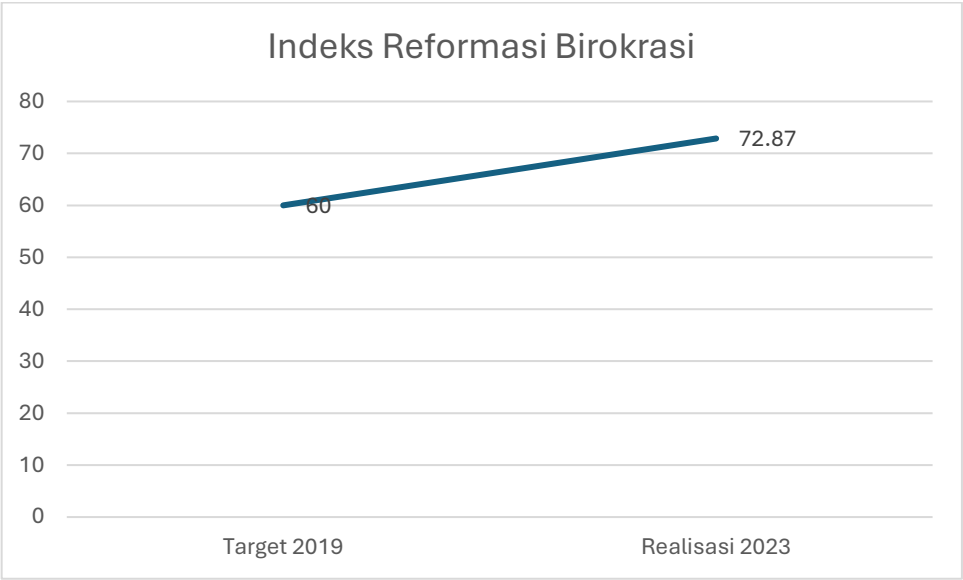

Gambar 2. 33 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2019, indeks reformasi birokrasi hanya mencapai 53 dari target 60. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam aspek transparansi, efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan efisiensi pelayanan publik.

Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya peningkatan bertahap, tetapi tetap di bawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, meskipun target 63 (Baik) sudah lebih realistis, pencapaian masih stagnan di angka 60,19. Hal ini menandakan bahwa upaya reformasi birokrasi mengalami kendala, mungkin terkait dengan resistensi perubahan, kurangnya kapasitas SDM, atau keterbatasan infrastruktur digital untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.

Namun, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana indeks reformasi birokrasi mencapai 72,87, jauh melebihi target 64 (Baik). Peningkatan tajam ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakhir, berbagai kebijakan perbaikan sistem pemerintahan mulai berjalan lebih efektif. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan ini meliputi:

- Penerapan sistem digitalisasi dalam administrasi pemerintahan, yang mempercepat layanan dan meningkatkan transparansi.

- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, baik melalui pelatihan maupun rekrutmen tenaga ahli yang lebih kompeten.
- Reformasi dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas, yang memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih ketat dan responsif.

Keberhasilan pada tahun 2023 ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, reformasi birokrasi dapat dipercepat. Tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan pencapaian ini dan memastikan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis capaian Misi 3, beberapa tantangan utama yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah:

1. Perlambatan Reformasi di Awal Periode – Dari 2019 hingga 2022, indeks reformasi birokrasi hanya meningkat sedikit dan selalu di bawah target. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan reformasi masih menghadapi hambatan besar, baik dari sisi SDM, sistem, maupun budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan.
2. Tantangan dalam Digitalisasi Pemerintahan – Salah satu faktor utama dalam reformasi birokrasi modern adalah penerapan sistem digital yang efisien untuk meningkatkan layanan publik. Meskipun ada peningkatan indeks, masih perlu dievaluasi sejauh mana digitalisasi benar-benar diterapkan dan diakses oleh masyarakat secara luas.
3. Sustainability dari Reformasi yang Telah Dilakukan – Meskipun ada lonjakan indeks di tahun 2023, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa reformasi tidak kembali melemah pada periode berikutnya. Perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar standar yang telah dicapai tetap dipertahankan.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah yang bisa diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ke depan adalah:

- Meningkatkan konsistensi dalam implementasi reformasi birokrasi, sehingga perbaikan tidak hanya terjadi di tahun terakhir tetapi merata sepanjang periode pemerintahan.
- Mengembangkan kebijakan berbasis digital secara menyeluruh, termasuk penerapan e-government yang lebih komprehensif agar pelayanan publik semakin efisien dan transparan.
- Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah, baik melalui pelatihan maupun sistem evaluasi kinerja yang lebih ketat dan berbasis capaian nyata.
- Membangun sistem pengawasan dan akuntabilitas yang lebih kuat, sehingga capaian reformasi birokrasi dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Capaian Misi 4: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas dan Religiusitas dalam Penyelenggaan Pemerintahan Daerah dan Kehidupan Masyarakat

Misi 4 bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan membangun masyarakat yang berakhlak mulia melalui penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan. Salah satu indikator utama dalam sasaran ini adalah Persentase Tingkat Kerukunan Antar Umat Beragama, yang digunakan untuk menilai stabilitas hubungan antar kelompok masyarakat dalam kehidupan beragama.

Selama periode 2019-2023, tingkat kerukunan antar umat beragama berhasil dipertahankan di angka 100% setiap tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa Tanah Laut memiliki kondisi sosial yang harmonis dan tidak mengalami gangguan serius dalam aspek hubungan antarumat beragama. Keberhasilan ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dalam membangun toleransi, meningkatkan dialog antaragama, serta memperkuat peran lembaga keagamaan dalam menjaga harmoni sosial.

Meskipun capaian indikator ini menunjukkan stabilitas, penting untuk dicermati bahwa angka 100% bisa jadi lebih bersifat administratif daripada mencerminkan kondisi real di lapangan. Oleh karena itu, perlu ada strategi

untuk menjaga agar kondisi ini tetap terjaga di masa depan dan tidak hanya dipandang sebagai angka statistik.

Kinerja Pembangunan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Sasaran utama dari Misi 4 adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dengan menjaga keharmonisan sosial dan kehidupan beragama yang kondusif. Indikator utama yang digunakan adalah Persentase Tingkat Kerukunan Antar Umat Beragama, yang menunjukkan seberapa baik hubungan antara kelompok-kelompok keagamaan di Tanah Laut.

Dari tahun 2019 hingga 2023, target yang ditetapkan adalah 100% tingkat kerukunan, dan capaian yang dilaporkan selalu berada di angka yang sama, yaitu 100% setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada insiden besar yang mempengaruhi hubungan antaragama di wilayah ini selama periode tersebut. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan ini meliputi:

- Peran aktif tokoh agama dan masyarakat dalam membangun dialog lintas agama untuk mengatasi potensi konflik.
- Program pemerintah daerah yang fokus pada penguatan nilai-nilai toleransi dan harmoni sosial, seperti kegiatan keagamaan yang inklusif dan forum komunikasi antaragama.
- Stabilitas sosial dan keamanan yang terjaga, yang memungkinkan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan damai tanpa adanya gesekan yang signifikan.

Namun, meskipun capaian indikator menunjukkan stabilitas yang baik, tetap ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa angka 100% ini mencerminkan realitas di masyarakat, bukan hanya laporan administratif. Pengukuran yang lebih berbasis persepsi masyarakat secara langsung bisa memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait kondisi sebenarnya. Beberapa tantangan utama yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah:

1. Pencegahan Potensi Konflik Sosial di Masa Depan – Walaupun tidak ada konflik besar yang tercatat dalam lima tahun terakhir, stabilitas sosial harus tetap dijaga. Perubahan sosial seperti urbanisasi, perbedaan pendapat dalam kelompok keagamaan, dan perkembangan teknologi informasi dapat menjadi tantangan baru dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih aktif dalam membangun forum komunikasi dan mencegah munculnya isu-isu sensitif yang dapat mengganggu stabilitas sosial.
2. Meningkatkan Kualitas Dialog Antaragama – Selama ini, keberhasilan dalam menjaga kerukunan beragama mungkin lebih banyak didukung oleh faktor stabilitas dan kontrol sosial. Namun, perlu ada pendekatan yang lebih berbasis edukasi dan dialog, di mana masyarakat dapat saling memahami dan membangun hubungan yang lebih erat antaragama.
3. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Keagamaan dalam Pembangunan Daerah – Selain menjaga harmoni sosial, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan program yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek pembangunan. Misalnya, melalui program pendidikan berbasis karakter, pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai etika, dan penguatan peran komunitas keagamaan dalam mendukung kesejahteraan sosial.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ke depan adalah:

- Meningkatkan program pendidikan toleransi dan keberagaman, baik di sekolah maupun dalam komunitas masyarakat.
- Mengembangkan sistem peringatan dini untuk konflik sosial dengan melibatkan aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar potensi konflik dapat dicegah sejak dini.

- Memperkuat peran lembaga keagamaan dalam pembangunan sosial, tidak hanya dalam aspek keagamaan tetapi juga dalam isu-isu sosial lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian Misi 5: Membangun Sinergitas yang Baik Antartingkat Pemerintahan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi 5 berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui berbagai kebijakan dan program strategis, dengan Angka Kemiskinan sebagai indikator utama. Seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah berupaya menurunkan angka kemiskinan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Pada tahun 2019, target penurunan kemiskinan ditetapkan pada 4,39%, tetapi realisasi justru sedikit lebih tinggi, yakni 4,51%, menandakan masih adanya tantangan dalam mengatasi kemiskinan di awal periode. Tahun 2020, target diturunkan menjadi 4,35%, dan berhasil dicapai dengan realisasi 4,26%, menunjukkan adanya perbaikan.

Namun, pada tahun 2021, angka kemiskinan justru meningkat menjadi 4,57%, lebih tinggi dibandingkan target 4,37%. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan lebih banyak masyarakat jatuh dalam kategori miskin.

Tahun 2022 menunjukkan tren positif kembali, dengan angka kemiskinan turun drastis menjadi 3,86%, jauh di bawah target 4,36%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi mulai memberikan dampak yang signifikan. Pada tahun 2023, angka kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 3,73%, lebih baik dari target 4,35%.

Tren penurunan kemiskinan dari 2019 ke 2023 menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah berhasil mendorong kesejahteraan sosial meskipun menghadapi berbagai tantangan. Namun, masih perlu strategi lebih lanjut untuk memastikan penurunan ini berkelanjutan dan tidak mengalami stagnasi.

Penurunan Angka Kemiskinan

Sebagai indikator utama dalam misi ini, Angka Kemiskinan mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

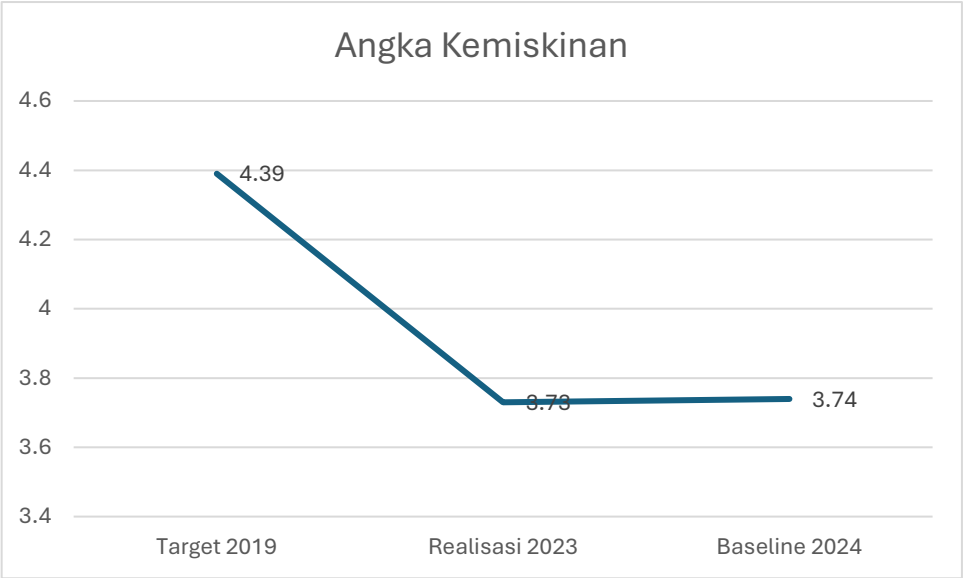

Gambar 2. 34 Capaian Angka Kemiskinan

Pada tahun 2019 dan 2020, angka kemiskinan menunjukkan tren positif dengan penurunan yang stabil. Namun, pada tahun 2021 terjadi lonjakan kemiskinan yang signifikan, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak warga kehilangan pekerjaan dan akses ekonomi menjadi terbatas.

Pada tahun 2022 dan 2023, angka kemiskinan kembali menurun drastis hingga mencapai 3,73% pada akhir periode RPJMD. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Beberapa faktor yang kemungkinan berkontribusi terhadap keberhasilan ini meliputi:

- Program bantuan sosial yang efektif, seperti subsidi pangan, bantuan tunai, dan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin.

- Pemulihan sektor ekonomi setelah pandemi, termasuk pembukaan kembali lapangan pekerjaan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- Investasi di sektor pendidikan dan pelatihan kerja, yang membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperbesar peluang kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Meskipun capaian ini positif, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan penurunan angka kemiskinan tetap berkelanjutan. Jika tidak ada program yang dirancang untuk mencegah kemiskinan baru, bisa jadi angka ini kembali naik di masa mendatang.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Indikator kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam Misi 5 juga mencakup berbagai aspek seperti:

- Peningkatan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan
- Penyediaan lapangan kerja yang lebih luas
- Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas

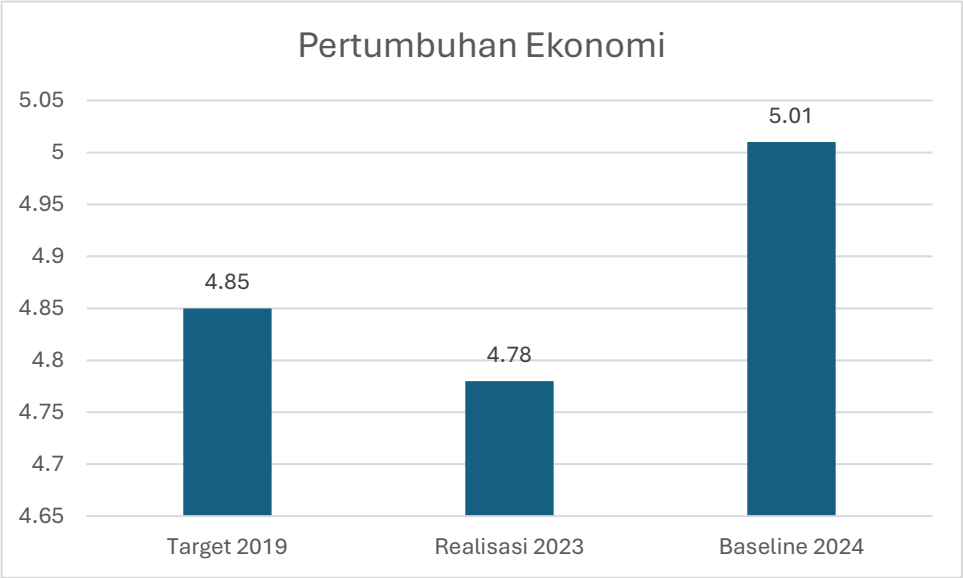

Gambar 2. 35 Capaian Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lima tahun terakhir, terdapat beberapa kebijakan yang telah membantu meningkatkan kesejahteraan sosial di Tanah Laut, termasuk:

- Penguatan jaringan jaminan sosial, yang mencakup program bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan.
- Peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan medis yang dibutuhkan.
- Dukungan terhadap UMKM dan industri kreatif, yang memungkinkan masyarakat memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil.

Kebijakan-kebijakan ini berkontribusi pada penurunan kemiskinan, namun tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya meningkat dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu faktor utama dalam keberhasilan Misi 5 adalah bagaimana pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran. Sejumlah langkah strategis yang telah diambil pemerintah daerah meliputi:

- Mendorong investasi dan lapangan kerja melalui insentif bagi sektor swasta yang membuka peluang kerja di Tanah Laut.
- Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
- Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Meskipun langkah-langkah ini telah memberikan dampak positif, masih ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti:

- Ketergantungan terhadap program bantuan sosial, yang perlu dikurangi agar masyarakat lebih mandiri dalam jangka panjang.

- Kesenjangan pembangunan antar-wilayah, di mana beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam mengakses program kesejahteraan yang tersedia.

Ke depan, perlu ada strategi yang lebih spesifik dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, terutama dengan memperluas akses pendidikan dan kesempatan kerja.

Meskipun Misi 5 menunjukkan pencapaian yang positif dalam penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, masih ada beberapa tantangan utama yang harus diatasi dalam beberapa tahun ke depan:

1. Menjaga Tren Penurunan Kemiskinan
    - Meskipun angka kemiskinan turun signifikan dalam dua tahun terakhir, masih ada kemungkinan angka ini kembali naik jika kondisi ekonomi tidak stabil. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa strategi yang diterapkan dapat menjaga tren penurunan kemiskinan dalam jangka panjang.
2. Memastikan Keberlanjutan Program Sosial
    - Banyak program kesejahteraan sosial yang saat ini bergantung pada bantuan pemerintah. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa program-program ini dapat berjalan lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada anggaran daerah.
3. Mengurangi Ketimpangan Wilayah dalam Pembangunan
    - Beberapa wilayah di Tanah Laut mungkin masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan berjalan merata dan tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan.

4. Memperkuat Sinergi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
    - Keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah saja. Diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan program yang lebih efektif dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan Tenaga Kerja
    - Salah satu cara terbaik untuk menurunkan kemiskinan adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke program-program pelatihan yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

Pendapatan Daerah: Peningkatan Signifikan dari Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp2,25 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp2,58 triliun. Peningkatan terbesar terjadi pada komponen pendapatan transfer, yang naik dari Rp2,04 triliun menjadi Rp2,35 triliun.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami kenaikan signifikan, dari Rp1,84 triliun menjadi Rp2,15 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya Dana Perimbangan, khususnya pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang melonjak dari Rp996 miliar menjadi Rp1,25 triliun. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami kenaikan dari Rp511 miliar menjadi Rp549 miliar. Namun, terdapat penurunan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dari Rp66 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp53 miliar pada tahun 2024.

Kenaikan transfer dari pemerintah pusat ini menunjukkan ketergantungan daerah terhadap dana pusat yang masih sangat tinggi. Pendapatan dari Dana Insentif Daerah (DID), yang baru masuk pada tahun

2024 sebesar Rp26 miliar, menjadi indikasi adanya upaya untuk memperoleh insentif dari kinerja daerah yang lebih baik.

Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah daerah lain justru mengalami sedikit penurunan, dari Rp200 miliar menjadi Rp193 miliar. Hal ini bisa mengindikasikan adanya kebijakan penyesuaian alokasi dana di tingkat provinsi yang berpengaruh pada pendapatan Kabupaten Tanah Laut.

Pendapatan Asli Daerah: Pertumbuhan Namun dengan Anomali

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp211 miliar menjadi Rp238 miliar pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan sekitar 12,9%. Sumber utama PAD tetap berasal dari pajak daerah, yang naik dari Rp52,6 miliar menjadi Rp54,3 miliar. Retribusi daerah mengalami lonjakan yang sangat besar, dari Rp7,6 miliar menjadi Rp89,6 miliar, yang menandakan adanya kebijakan baru dalam tarif retribusi atau peningkatan efektivitas pemungutan retribusi.

Namun, yang menarik adalah pendapatan dari perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang naik dari Rp12 miliar menjadi Rp14,7 miliar. Peningkatan ini bisa jadi mencerminkan meningkatnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Statistik Kunci, 2022–2024
Key Statistics, 2022–2024

Rincian/*Description*	Satuan/*Unit*	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/*SOCIAL*				
Penduduk[1]/*Population[1]*	jiwa/*inhibitant*	358.090	364.117	369.818
Laju Pertumbuhan Penduduk[1 2]/*Population Growth[1 2]*	%	1,42[2]	1,18[1]	1,27[1]
Umur Harapan Hidup[3]-e_0/*Life Expectancy Rate[3]*	tahun/*years*	74,21	74,46	74,64
Angka Melek Aksara Usia 15+/*Literacy Rate Aged 15+*	%	97,87	97,33	96,80
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK[4] *Labour Force Participation Rate-LFPR[4]*	%	70,92	69,61	73,03
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT[4] *Unemployment Rate-UR[4]*	%	4,17	3,58	3,43
Penduduk Miskin[5]/*Poor People[5]*	ribu jiwa/ *thousand inhabitant*	13,54	13,22	13,40
Persentase Penduduk Miskin[5] *Percentage of Poor People[5]*	%	3,86	3,73	3,74
Indeks Pembangunan Manusia-IPM[6] *Human Development Index[6]*	–	72,33	72,98	73,43
EKONOMI/*ECONOMIC*				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku[7] *Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price[7]*	miliar rupiah *billion rupiahs*	19.022,37	20.165,71*	21.254,10**
Laju Pertumbuhan Ekonomi[8]/*Economic Growth[8]*	%	5,12	4,78*	5,01**
PDRB Per Kapita Harga Berlaku *Per Capita of GRDP at Current Price*	ribu rupiah *thousand rupiahs*	53.319,34	55.872,29*	58.233,29**
Inflasi/*Inflation (y-o-y)*	%	-	-	2,90[9]

https://tanahlautkab.bps.go.id

Gambar 2. 36 Capaian Aspek Sosial dan Ekonomi Daerah

Sebaliknya, terjadi penurunan drastis pada kategori lain-lain PAD yang sah, dari Rp138,9 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp79,7 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini menimbulkan pertanyaan apakah terdapat kebijakan yang mengurangi sumber pendapatan tertentu atau adanya kendala dalam realisasi pendapatan yang sebelumnya lebih besar.

Belanja Daerah: Fokus pada Peningkatan Belanja Modal dan Operasi

Belanja pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 mencapai Rp2,64 triliun, meningkat cukup signifikan dari Rp2,24 triliun pada tahun 2023.

Belanja terbesar masih dialokasikan untuk belanja operasi, yang mencapai Rp1,64 triliun pada tahun 2024, naik dari Rp1,40 triliun tahun sebelumnya. Belanja pegawai mengalami peningkatan dari Rp680 miliar menjadi Rp758 miliar, mengindikasikan peningkatan kesejahteraan pegawai atau kenaikan jumlah pegawai di lingkungan pemerintahan daerah.

Belanja yang paling menonjol adalah belanja barang dan jasa, yang meningkat dari Rp612 miliar menjadi Rp784 miliar. Kenaikan ini dapat

mencerminkan peningkatan belanja untuk kebutuhan administrasi pemerintahan, pengadaan barang, dan jasa layanan publik.

Di sisi lain, belanja hibah mengalami penurunan dari Rp99,9 miliar menjadi Rp77,8 miliar, yang mungkin menandakan adanya rasionalisasi anggaran pada sektor-sektor tertentu. Belanja bantuan sosial, sebaliknya, mengalami kenaikan dari Rp10 miliar menjadi Rp22,9 miliar, menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok rentan atau kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi pada belanja modal, yang naik dari Rp593 miliar pada 2023 menjadi Rp734 miliar pada 2024. Ini menunjukkan adanya fokus lebih besar pada pembangunan infrastruktur atau investasi aset daerah.

Namun, belanja tidak terduga masih relatif kecil, hanya sebesar Rp887 juta pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Laut tidak banyak menghadapi pengeluaran darurat atau tidak terduga dalam jumlah besar.

Belanja Transfer: Peningkatan untuk Dukungan Keuangan Daerah

Belanja transfer, yang mencakup belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, juga mengalami peningkatan dari Rp244 miliar pada 2023 menjadi Rp270 miliar pada 2024. Belanja bantuan keuangan, yang menjadi bagian terbesar dari belanja transfer, naik dari Rp238 miliar menjadi Rp264 miliar. Ini menunjukkan adanya peningkatan alokasi keuangan untuk mendukung program-program daerah yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.

Pendapatan Pajak Daerah: Dominasi Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan bahwa wilayah dengan kontribusi terbesar berasal dari Bati-Bati (Rp1,9 miliar), Jorong (Rp1,3 miliar), dan Pelaihari (Rp1,4 miliar). Hanya Kecamatan Pelaihari yang memiliki pendapatan pajak dari sektor perkotaan sebesar

Rp988 juta, sementara kecamatan lainnya didominasi oleh pajak dari kawasan perdesaan.

Total penerimaan PBB pada tahun 2024 mencapai Rp7,12 miliar, yang jika dibandingkan dengan PAD secara keseluruhan, masih tergolong kecil. Ini menunjukkan bahwa potensi PBB di daerah masih bisa dioptimalkan lebih lanjut.

Pelayanan Pertanahan: Tingginya Jumlah Pengolahan Sertifikat Tanah

Dalam aspek pelayanan publik, khususnya pertanahan, Kabupaten Tanah Laut telah memproses sebanyak 5.340 sertifikat tanah, dengan redistribusi tanah mencapai 1.000 sertifikat. Ini menunjukkan adanya upaya aktif dalam penataan kepemilikan tanah untuk masyarakat, yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Sebanyak 867 permohonan pendaftaran tanah pertama kali telah selesai diproses, menunjukkan tingginya permintaan terhadap legalisasi kepemilikan tanah. Di sisi lain, pemecahan sertifikat tanah masih menyisakan backlog sebanyak 59 kasus, yang bisa menjadi tantangan dalam administrasi pertanahan.

Dari data yang disajikan, terlihat bahwa Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan dalam pendapatan daerah, terutama dari transfer pemerintah pusat. Di sisi belanja, terdapat peningkatan yang signifikan dalam belanja modal dan operasi, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Namun, ketergantungan pada transfer pusat yang masih tinggi serta penurunan tajam pada beberapa komponen PAD mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian fiskal. Selain itu, optimalisasi pajak daerah dan efisiensi belanja menjadi tantangan yang perlu terus diperhatikan.

Manajemen SDM di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan dinamika yang kompleks dalam aspek sumber daya manusia,

struktur organisasi, serta pelayanan publik. Dalam kerangka Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), evaluasi terhadap kinerja pemerintahan menjadi penting untuk memastikan efektivitas tata kelola daerah.

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Salah satu aspek krusial dalam kinerja pemerintahan adalah jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam birokrasi daerah. Kabupaten Tanah Laut memiliki total 4.273 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan. Komposisi pegawai menunjukkan dominasi perempuan dengan 2.567 pegawai (60,1%) dibandingkan laki-laki yang berjumlah 1.706 pegawai (39,9%).

Dari aspek kualifikasi pendidikan, mayoritas pegawai memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1) dengan 3.846 pegawai, diikuti oleh lulusan Diploma III (768 pegawai) dan S2 (412 pegawai). Namun, masih terdapat 18 pegawai dengan pendidikan hanya setingkat Sekolah Dasar (SD), yang menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme birokrasika.

Selain itu, distribusi pegawai berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa 3.180 pegawai (74,4%) berada dalam jabatan fungsional sebagai guru, sementara tenaga medis berjumlah 905 pegawai (21,2%). Ini mencerminkan prioritas daerah dalam sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menyoroti perlunya peningkatan pegawai di sektor administratif dan teknis.

Kinerja Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja pemerintahan juga tercermin dari realisasi pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Dari 291 target pemeriksaan, realisasi mencapai 297 pemeriksaan (102,06%), menunjukkan tingkat kepatuhan dan pengawasan yang cukup baik. Namun, dalam aspek penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dari 287 target hanya 274 laporan yang diterbitkan (95,47%), menunjukkan adanya tantangan dalam efisiensi pelaporan.

Pengelolaan keuangan daerah juga mencerminkan efektivitas pemerintahan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki 41 pegawai, jumlah yang relatif kecil dibandingkan instansi lain seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki 2.193 pegawai. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Penyebaran Pegawai dan Efektivitas Layanan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki 11 kecamatan yang didukung oleh total 200 pegawai ASN yang tersebar di tingkat kecamatan. Kecamatan Pelaihari, sebagai pusat pemerintahan, memiliki jumlah pegawai terbanyak yaitu 66 orang, sedangkan kecamatan lainnya seperti Kurau dan Batu Ampar hanya memiliki sekitar 10-11 pegawai. Ketimpangan ini berpotensi memengaruhi efektivitas layanan publik, terutama di daerah yang lebih terpencil.

Dinas yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki 21 pegawai, sementara Dinas Kesehatan memiliki 658 pegawai, yang mengindikasikan prioritas utama daerah dalam sektor kesehatan. Namun, jumlah pegawai yang rendah di sektor lain seperti Dinas Pariwisata (20 pegawai) menunjukkan bahwa sektor ini masih belum menjadi fokus utama dalam strategi pembangunan daerah.

Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan

Dari berbagai indikator yang telah dianalisis, beberapa tantangan utama dalam kinerja pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Ketimpangan distribusi pegawai antara sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan, yang mempengaruhi efektivitas birokrasi secara keseluruhan.
2. Kesenjangan jumlah pegawai antar kecamatan, yang berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah terpencil.

3. Tingkat pendidikan pegawai yang belum merata, dengan masih adanya ASN berpendidikan rendah yang memerlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan.
4. Efisiensi pengelolaan laporan pemeriksaan, di mana masih terdapat ketidakseimbangan antara target dan realisasi penerbitan laporan hasil pemeriksaan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan adalah:

- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan, terutama bagi pegawai dengan tingkat pendidikan rendah.
- Redistribusi pegawai yang lebih merata untuk memastikan setiap kecamatan memiliki jumlah pegawai yang cukup untuk menunjang pelayanan publik.
- Penguatan kapasitas instansi yang menangani keuangan dan aset daerah agar pengelolaan keuangan daerah lebih optimal.
- Peningkatan transparansi dan efisiensi dalam penerbitan laporan pemeriksaan, dengan mengadopsi sistem pelaporan digital untuk mempercepat proses.

Secara keseluruhan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut menunjukkan kemajuan dalam berbagai aspek, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan-tantangan ini akan menjadi kunci dalam pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2. 98 Pencapaian Kinerja Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator	Target					Realisasi					Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
MISI 1: Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Masyarakat Yang Berbasis Teknologi Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial Dan Budaya																
Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Berkualitas, Merata Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	68,30	68,50	68,70	68,90	70,10	69,04	71,36	71,86	72,33	72,98	101,08 %	104,17 %	104,59 %	104,97 %	104,11 %
Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat Lainnya Secara Merata Dan Terjangkau Untuk Mendukung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	75	76,5	77,5	80	82,73				87,33	118,18 %				109,16 %
MISI 2 : Menciptakan Inovasi Di Segala Sendi Kehidupan Masyarakat Dan Pengembangan Industri Kreatif																
Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Publik (Penghargaan)	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0%	0%	100%	100%	100%
Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	5	10	15	20	25	10	25	103	134	188	200%	250%	687%	670%	752%
MISI 3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)																
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	60	60,1	60,2	60,3	60,4	53	56,21	60,06	60,19	72,87	88,33 %	93,52 %	99,76 %	99,82 %	120,65 %
MISI 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Religiusitas dalam Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah dan Kehidupan Masyarakat																

Tujuan	Indikator	Target					Realisasi					Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
MISI 5 : Membangun Sinergitas Yang Baik Antartingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat																
Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan (%)	4,39	4,38	4,37	4,36	4,35	4,51	4,26	4,57	3,86	3,73	97,34 %	102,82 %	95,62 %	112,95 %	116,60 %
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,50	70,75	71,00	72,00	73,00										
Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan sector unggulan daerah	5,02	5,03	5,04	5,05	5,06										
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	60,208	60,584	60,960	61,336	61,712		69,71	68,7	67,78	68,65		115,06 %	112,69 %	110,50 %	111,24 %
Peningkatan Upaya Membina Desa dan Menata Kota	Indeks Desa Membangun (skor)	0,715	0,730	0,750	0,800	0,815				0,7272					90,9%	

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal yang disingkat SPM adalah merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Jenis SPM terdiri atas SPM : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Pencapaian SPM semua bidang dapat dilihat dalam tabel berikut. Realisasi atau pencapaian pelayanan dasar SPM pada bidang pendidikan yang telah dilaksanakan pad atahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.99 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, Mi, SMP/Mts)	58.994 (100 %)	88,31%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	1.509 (100 %)	100 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	10.585 (100 %)	83,11%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2025

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal antara lain:

1. Sulitnya melacak peserta didik yang menempuh pendidikan di pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan program wajib belajar, sehingga peserta didik tersebut tidak terdata di dalam dapodik.

2. Sebagian besar orang tua cenderung memilih untuk menyekolahkan anak mereka ke pondok pesantren karna mereka ingin agar anak mereka memiliki pengetahuan agama yang lebih baik.
3. Masih belum sempurnanya aplikasi Standar Pelayanan Minimal yang dibuat oleh kementerian pendidikan terkait verifikasi data ATS, yang ketika kita verifikasi jumlah dari Anak Tidak Sekolah (ATS) mulai berkurang secara signifikan.
4. Masih ada peserta didik yang hidup di bawah garis kemiskinan.
5. Masalah yang dihadapi adalah memerlukan waktu yang lama dalam melakukan verifikasi apakah siswa tersebut ATS atau Tidak karena sebagian ATS tersebut kita hanya mengetahui kecamatan tempat tinggal tanpa tahu alam pasti ATS tersebut atau sudah pindah domisili tapi tidak update data kependudukan ATS tersebut.

Realisasi atau pencapaian pelayanan dasar SPM pada bidang kesehatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.100 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Target	Sasaran	Capaian	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	6.257	4.371	70,3%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	6.215	5.053	81,3%
3	Pelayahan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	5.916	4.990	84,3%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	30.045	25.424	84,6%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	58.357	58.681	100,6%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	234.462	132.958	56,7%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	35.178	29.742	84,5%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	27.962	25.204	89,5%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	4.287	5.208	121,4%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	100%	510	540	105,9%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	4.679	3.693	78,9%

No	Jenis Layanan	Target	Sasaran	Capaian	Persentase
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	8.721	8.257	94,6%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2025

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini ditemui beberapa permasalahan/kendala sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
   a. Standar Pelayanan K6 baru mulai di tahun 2024 di Triwulan 2 sehingga DO dari K6 tidak terpenuhi.
   b. Ibu hamil masih ada yang malu periksa di trimester satu dengan alasan, hamil diluar nikah, hamil dengan ibu banyak anak atau usia ibu tua.
   c. Masih ada ibu hamil yang hanya periksa ke PMB atau ke Spesialis sehingga tidak tercatat di pelaporan bidan.
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
   a. Masih ada persalinan di Non Faskes dan Non Fasyankes.
   b. Adanya kasus Abortus.
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
   a. Tingginya kasus kematian pada masa neonatal (bayi baru lahir) dengan penyebab terbanyak adalah kelahiran BBLR/ Prematur.
   b. Belum seluruh Tenaga Kesehatan (Bidan dan Perawat) terlatih dalam tatalaksana Gawat Darurat Neonatal.
   c. Masih adanya Fasilitas Kesehatan yang tidak memiliki alkes dalam tatalaksana Gadar Neonatal.
4. Pelayanan Kesehatan Balita
   a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemantauan secara berkala pada anak tidak hanya pertumbuhan namun juga perkembangan anak di fasilitas kesehatan.
5. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
   a. Capaian melebihi target yang ditentukan disebabkan karen data jumlah buku raport kesehatan masih belum sesuai dengan jumlah

seluruh sasaran usia pendidikan dasar sehingga terjadi kesalahan dalam proses awal pentargetan.

6. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
   a. Media KIE tidak mencukupi karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan.
   b. Target Sasaran yang terlalu tinggi dari data pusdatin.
   c. Skrining yang di lakukan di sekolah belum dilaksanakan secara maksimal.
   d. Terbatasnya tenaga pelaksana skrining di sekolah.
7. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
   a. Lansia tidak ada yang mengantar ke fasyankes maupun posyandu; Ketersediaan transportasi ke fasyankes maupun posyandu sering menjadi kendala.
   b. Kurangnya kesadaran lansia untuk memeriksakan diri maupun untuk cek kesehatan apabila tidak merasa sakit. Masyarakat, termasuk keluarga lansia, sering kurang sadar akan pentingnya pelayanan dasar untuk lansia.
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
   a. Media KIE tidak mencukupi karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan.
   b. Sebagian masyarakat masih mengagap sepele dengan kondisi kesehatannya jika tidak ada keluhan tidak mendatangi fasilitas kesehatan.
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
   a. Capaian melebihi target yang ditentukan yang disebabkan belum optimalnya pencatatan dan Pelaporan Penyakit Tidak Menular belum optimal melalui Aplikasi ASIK dan SIPTM.
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa
    a. Kurangnya perhatian masyarakat untuk mengajak keluargnya yang mengalami ganngguan jiwa ke Faskes.

b. Kurangnya Sumber Dana Dan SDM.

b. Capaian melebihi target yang ditentukan disebabkan karena sistem Pencatatan dan Pelaporan Penyakit Tidak Menular belum optimal melalui Aplikasi simkeswa, sehingga terjadi kesalahan dalam proses awal pentargetan.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

a. Banyak terduga yang tidak kembali untuk menyerahkan sputumnya karena rasa takut terdiagnosa TB akibat masih tingginya stigma masyarakat kepada pasien TB.

b. Sempat terjadinya kekosongan pot sputum selama hampir 1 bulan di kabupaten sehingga menghambat penemuan kasus engan Terafi Pencegahan Tuberkulosa (TPT).

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

a. Capaian target orang dengan resiko terinfkesi HIV masih dibawah target.

Realisasi atau pencapaian pelayanan dasar SPM pada bidang Pekerjaan Umum yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.101 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum, 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Rumah Tangga)	Realisasi (Rumah Tangga)			Capaian
				Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	86.988	27.703	40.734	18.551	78,67%
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Rumah Tangga)	Realisasi (Rumah Tangga)			Capaian

				Akses Layak	Akses Aman SPALD-S	Akses Aman SPALD-T	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90.004	68215	3519	0	78,0%

Sumber: DPUPRP Kab. Tanah Laut, 2025

Realisasi atau pencapaian pelayanan dasar SPM pada bidang Perumahan Rakyat yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.102 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat, 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Total Rumah Target Pelayanan SPM Perumahan	Realisasi		
		Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%)
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	12	12	12	100
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	6	0	6	0

Sumber: Dinas PRKPLH Kab. Tanah Laut, 2025

Beberapa kendala dan permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman terhadap SPM yang belum komprehensif dan merata.
2. Belum ada nya penyusunan rencana aksi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
3. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) khusus nya pada bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Perumukiman untuk mendukung pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.

Realisasi atau pencapaian pelayanan dasar SPM pada bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.103 Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 2024

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
NO	**INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM**	**INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT**			**TOTAL PENCAPAIAN**
1	**2**	**3**			**4**
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		BELUM TUNTAS			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	100	100	0	100%
	Persentase Pencaoaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum terlayani /Terpenuhi	
	1. Standar sarana prasarana Satpol pp dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	1181	1181	0	100%
	2. Standar operasional prosedur (SOP) Satpol pp dalam rangka penegakan perda dan perkada	16	16	0	100%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/ PNS yang telah lulus diklat dasar satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SOM	496	496	0	100%

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset,pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	125	125	0	100%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	1	1	0	100%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	1	1	0	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, 2025

Tabel 2.104 Pencapaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran, 2024

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		BELUM TUNTAS			
1	Pelayanan Evakuasi (DAMKAR) Penyelamatan dan Korban Kabakaran				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	100	100	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Lavanan Dasar (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak di terimanya informasi / laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	102	102	0	100%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	3	3	0	100%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran	234	234	0	100%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / sumber daya manusia	44	44	0	100%
	5. Pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	102	102	0	100%
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	1	1	0	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, 2025

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah :

1. Penegakan Perda/Perkada sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran. Tanpa dukungan anggaran yang cukup maka akan kesulitan dalam melaksanakan tugas baik dari segi jumlah personil, fasilitas operasional maupun sarana dan prasarana pendukung.
2. Penegakan Perda/Perkada sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara berbagai Lembaga atau lnstansi Pemerintah. Misalnya Peraturan yang melibatkan lebih dari satu sector, sering kali tidak optimal dalam tindak lanjut dengan baik karena kurangnya informasi terkait data dukung Pelanggaran Perda/Perkada tersebut.

Adapun pencapaian SPM di Bidang Sosial pada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.105 Pencapaian SPM Bidang Sosial Kab. Tanah Laut, 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	644	644	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	6	6	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	600	600	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	3	3	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	5	5	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	5	5	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	10	0	100.00 %	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	182	182	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	60	60	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial						
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	25	25	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	20	20	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	20	20	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)						
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	20	20	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	25	25	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2964	2964	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	10	10	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	2879	2879	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	10	10	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	4	4	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	4	4	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)						
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	4	4	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	4	4	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	10	0	100.00 %	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	38	38	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	38	38	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial						
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	38	38	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	38	38	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	38	38	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	38	38	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	38	38	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)						
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	38	38	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	38	38	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	38	38	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	38	38	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	38	38	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	38	38	0	100.00 %	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10000	10000	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	10000	10000	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	230	230	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	11	11	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)						
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	2500	2500	0	100.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	2500	2500	0	100.00 %	

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tanah Laut, 2025

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 antara lain :

a. Permasalahan Internal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari dalam Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

1. Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
2. Sarana dan Prasarana Kantor yang belum lengkap/ belum memadai sebagai contoh di Rumah Singgah Ayangjuki belum tersedia sarana seperti kamar yang memadai;
3. Kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum terisi, contoh: Jabatan Fungsional pekerja sosial belum terisi;

4. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial.

b. Permasalahan Eksternal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari luar Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

1. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Pembangunan Industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Belum Optimalnya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan Dunia Usaha/CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah rawan bencana sehingga diperlukan banyak persediaan logistik dalam Penanganan Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2.1.6 Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Melalui perannya, BUMD dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, optimalisasi peran BUMD masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius.

2.1.6.1 Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Kerja sama daerah merupakan langkah strategis dalam **mendorong pembangunan yang berkelanjutan,** meningkatkan **pelayanan publik**, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama daerah guna **memaksimalkan pemanfaatan**

sumber daya alam dan sumber daya manusia. Mengingat masih banyak potensi daerah yang belum dikembangkan secara optimal, pemerintah telah melakukan **Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan daerah lain**. Penyusunan laporan kerja sama daerah ini mengikuti **Permendagri Nomor 22 Tahun 2020**, yang mengatur tata cara kerja sama daerah dan ketentuan minimal dalam laporan kerja sama antar-daerah.

Terdapat beberapa kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yaitu :

1. **Kerja Sama Dengan Daerah Lain**

Kesepakatan Bersama yang dilakukan Kab Tanah Laut, yaitu Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kab Tanah Laut dan Pemerintah Kab Probolinggo; Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dan Pemerintah Kab Tanah Laut Tentang Pengelolaan Pelayanan Bidang Kesehatan. Perjanjian kerja sama meliputi Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dan Pemerintah Kab Tanah Laut.

2. **Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)**

Terdapat beberapa kerja sama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. KSDPK Pertama, yaitu kesepakatan Bersama terkait Pemanfaatan Jasa Perbankan dan perjanjian kerja sama berupa Asuransi Pelayanan Umum Terhadap Pengunjung Kolam Renang Tirta Kenanga Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan memberikan kemudahan dalam layanan jasa perbankan dan perlindungan asuransi terhadap pengunjung kolam renang Tirta Kenanga.

KASDPK Kedua, kesapakatan bersama terkait Aplikasi Radio Fantastic, sedangkan perjanjian kerja sama nya berupa Pengelolaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kab Tanah Laut dengan tujuan siergi tugas untuk efektifitas dan efisiensi layanan informasi keterbukaan publik dan pelaksanaan ketahanan pangan masyarakat di Kab Tanah Laut.

3. **Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergi**

Terdapat dua dukungan program dan kegiatan dengan berkerjasama dengan daerah lain, yaitu pertama Pemernuhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Bidang Keuangan Negara dengan tujuan memenuhi kebutuhan SDM ASN bidang Keuangan Negara. Kedua, Sisten Integrasi Layanan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan tujuan meningkatkan kolaborasi pelayanan publik bagi warga masyarakat Kab Tanah Laut.

Terdapat capaian kerja sama Daerah Kab Tanah Laut, yaitu Kerja sama bidang ekonomi dan pangan, Kerja sama Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Kerja sama sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Kerja sama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Tanah laut dan Pemerintah daerah sekitar , dan Kerja sama Pemerintah daerah dan Pihak ketiga. Selain itu, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten tanah Laut, yaitu Belum optimalnya sosialisasi terkait kerja sama daerah yang sudah ada kepada perangkat daerah yang belum mengetahui potensikerja sama; dan Belum dilaksanakan inventarisasi potensi kerja sama daerah oleh perangkat daerah di masing-masing organisasi perangkat daerah.

2.1.6.2 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam penyediaan layanan publik serta penguatan ekonomi daerah. Melalui pengelolaan yang profesional dan berbasis tata kelola yang baik, BUMD dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas bagi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara BUMD dan Pemda, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdaya saing. Berikut merupakan BUMD yang berada di Kab Tanah Laut

1. **PT BPR Tanah Laut**

PT. Bank Perekonomian Rakyat Tanah Laut (sebelumnya PD. BPR Pelaihari) didirikan berdasarkan Perda Provinsi Kalsel No. 12

Tahun 2008 dan memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia pada 20 Mei 2013. Pada tahun 2017, statusnya berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sesuai Perda Provinsi Kalsel No. 14 Tahun 2017, dengan pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham pada tahun 2018 serta persetujuan dari OJK. Selanjutnya, berdasarkan keputusan RUPS pada 29 April 2024 dan sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, namanya resmi diubah menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Tanah Laut pada 8 Mei 2024.

Pada tahun 2024, kepemilikan modal PT. Bank Perekonomian Rakyat Tanah Laut didominasi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan porsi terbesar sebesar 75,41%. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki saham sebesar 22,13%, dan PT. Bank Kalsel turut berpartisipasi dengan kepemilikan sebesar 7,4%. Struktur kepemilikan ini mencerminkan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan dan penguatan sektor keuangan lokal melalui BPR Tanah Laut.

Tabel 2. 106 Kinerja PT BPR Tanah Laut

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	**NERACA**					
1	Total Aset	28.644.094	30.123.805	34.843.757	46.307.682	48.261.134
2	Kredit Diberikan	15.271.914	17.273.586	18.609.688	18.430.221	16.434.871
3	Total Simpanan Pihak Ke-III	2.764.303	4.241.561	3.799.165	5.302.500	7.094.473
4	Penempatan Pada Bank Lain	13.757.882	13.343.596	16.670.276	28.256.670	32.099.888
5	Simpanan Dari Bank Lain	-	-	-	-	-
6	Modal Disetor	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100	6.100.,000
7	Modal Inti	5.664.641	6.418.666	6.709.199	7,711.832	8.076.004
8	Laba Bersih	(374.748)	255.585	1.116.165	1.191.057	1.274.461
9	Investasi Pemda Tala	20.000.000	19.251.815	23.248.360	33..000.000	32.437.000
B	**Laba/Rugi**					
1	Pendapatan Operasioal	3.132.400	3.696.796	4.380.855	4.977.218	5.519.061
2	Beban Operasional+PPH 25	2.391.293	3.066.796	3.268.612	3.786.160	4.244.600
3	Laba/Rugi	741,107	630,33	1.112.243	1.191.058	1.274.461

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Pendapatan/Beban Non Operasional	-	-	-	-	-
5	Laba/Rugi (Netto)	741.107	630,33	1.112.243	1.191.058	1.274.461
C	**Ratio-Ratio**					
1	BOPO	76,34%	82,95%	74,52%	73,11%	73,52%
2	CAR	42,07%	41,39%	39,57%	42,25%	50,09%
3	LDR	68,20%	73,52%	68,80%	48,12%	41,57%
4	RAO	2,59%	2,09%	3,20%	2,89%	3,03%
5	ROE	13,08%	9,82%	16,64%	17,35%	18,18%
6	KAP	1,85%	3,67%	2,73%	2,41%	1,94%
7	NPL-Net	1,01%	0,83%	0,67%	0,99%	0,82%
8	NPL-Gross	4,31%	7,33%	5,84%	7,34%	6,47%

Sumber : PT BPR Tanah Laut

2. PT Air Minum Berkah Banua

PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) berawal dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang dibentuk pada 18 Januari 1983 melalui kerja sama Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dengan memanfaatkan air Sungai Tabanio sebagai sumber air baku. Pada 20 Maret 1993, BPAM berubah status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 1993. Kemudian, pada 8 Februari 2023, PDAM Tanah Laut bertransformasi menjadi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda), yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI pada 13 Februari 2023.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan penyertaan modal yang signifikan terhadap PDAM sejak tahun 2006 hingga 2019. Penyertaan ini dilakukan dalam bentuk uang dan aset dengan tujuan mendukung pengembangan layanan air minum bagi masyarakat. Pada tahap awal, modal diberikan dalam bentuk uang, dimulai dari Rp500 juta pada tahun 2006, kemudian meningkat menjadi Rp2 miliar pada tahun 2008, Rp4 miliar pada tahun 2010, dan Rp3 miliar pada tahun 2012. Pada tahun 2012, selain penyertaan uang, pemerintah juga mulai memberikan aset senilai Rp7,62 miliar. Tren ini berlanjut dengan

penyertaan modal sebesar Rp5,45 miliar pada tahun 2015. Puncaknya, pada tahun 2019, pemerintah menyuntikkan modal dalam bentuk aset senilai Rp42 miliar, yang menjadi penyertaan terbesar dalam periode tersebut. Secara keseluruhan, total penyertaan modal mencapai Rp64,57 miliar, menunjukkan komitmen besar pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur dan layanan PDAM di Kabupaten Tanah Laut.

2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah meliputi semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah terkait dengan hak dan kewajiban tersebut.

Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga
3. Penerimaan Daerah
4. Pengeluaran Daerah
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh P emerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum

Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan ini

harus dilakukan dengan cara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dianggap baik jika berhasil merealisasikan program-program yang telah direncanakan.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan berbagai pedoman yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya. Struktur APBD Kabupaten Tanah Laut mencakup: (1) Penerimaan Daerah, yang terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan (2) Pengeluaran Daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Seperti yang kita tahu, APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan, mengalokasikan belanja secara efisien, serta mengelola pembiayaan guna mencapai target pembangunan dan pelayanan publik. Fluktuasi dalam komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah menunjukkan dinamika fiskal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi, kondisi makroekonomi, serta efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Berikut adalah tabel pertumbuhan APBD Kabupaten Tanah Laut 2020-2024.

Tabel 2. 107 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

Uraian	Pertumbuhan (%)					Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pendapatan Daerah	**-13,77%**	**-5,67%**	**41,85%**	**4,64%**	**17,16%**	**14,50%**
PAD	**11,67%**	**8,72%**	**-5,94%**	**9,20%**	**12,64%**	**6,15%**
Pajak Daerah	-4,52%	-2,11%	3,94%	16,12%	3,27%	5,30%
Restribusi Daerah	-18,95%	-23,77%	21,43%	10,19%	16,65%	6,12%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	52,46%	32,26%	11,89%	9,08%	22,65%	18,97%
Lain-Lain PAD yang Sah	19,40%	12,96%	-11,15%	6,76%	-42,76%	-8,55%
TKDD	**-16,81%**	**-7,84%**	**51,69%**	**3,66%**	**19,96%**	**16,87%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-16,81%	-7,84%	51,69%	3,66%	19,96%	16,87%
Pendapatan Lainnya	**-11,71%**	**-5,44%**	**29,77%**	**9,38%**	**-3,74%**	**7,49%**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	4,72%	-45,34%	4,72%	9,51%	-3,65%	-8,69%
Pendapatan Hibah	5,27%	-93,01%	-33,13%	-87,38%	-70,37%	-70,97%
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81,86%	78,97%	77,16%	82,51%	81,73%	83,68%
Belanja Daerah	**0,38%**	**23,34%**	**-1,59%**	**20,37%**	**17,55%**	**14,92%**
Belanja Pegawai	**-3,56%**	**10,61%**	**2,21%**	**4,12%**	**11,45%**	**7,10%**
Belanja Barang dan Jasa	**2,45%**	**28,81%**	**2,95%**	**17,54%**	**26,97%**	**19,07%**
Belanja Modal	**-21,48%**	**112,26%**	**-10,35%**	**48,96%**	**23,85%**	**43,68%**
Belanja Lainnya	**26,66%**	**-14,20%**	**-4,40%**	**22,89%**	**2,64%**	**1,73%**
Belanja Hibah	-26,16%	114,25%	-17,45%	132,99%	-28,25%	50,38%
Belanja Bantuan Sosial	39,21%	37,67%	33,78%	35,09%	30,35%	34,22%
Belanja Tidak Terduga	25,06%	25,58%	26,71%	27,95%	27,29%	26,88%
Belanja Bagi Hasil	-4,16%	13,59%	23,39%	21,31%	26,38%	21,17%
Belanja Bantuan Keuangan	0,14%	-4,73%	-2,32%	8,76%	10,67%	3,09%
Pembiayaan Daerah	**57,09%**	**9,20%**	**-46,16%**	**58,23%**	**1,88%**	**5,79%**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**55,83%**	**8,02%**	**-38,63%**	**48,36%**	**-4,67%**	**3,27%**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55,85%	7,39%	-38,91%	37,47%	3,96%	2,48%
Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	-25,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	10,26%	-96,06%	-100,00%	-46,45%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-58,33%	120,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	5,00%

Uraian	Pertumbuhan (%)					Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**-9,91%**	**-100%**	**0,00%**	**-22,24%**	**-100%**	**-55,56%**
Penyertaan Modal Daerah	-100,00%	0,00%	0,00%	13,28%	-100,00%	-21,68%
Pembentukan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	-50,00%	-100,00%	-37,50%
Pemberian Pinjaman Daerah	0%	-100%	0%	0%	-100%	-50%

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Pendapatan Daerah menunjukkan tren yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,50%. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 (41,85%), yang kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2023 dan 2024. Sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami variasi pertumbuhan, di mana Pajak Daerah tumbuh stabil dengan rata-rata 5,30%, sedangkan Retribusi Daerah cenderung tidak stabil dengan pertumbuhan rata-rata hanya 6,12%. Salah satu komponen yang menunjukkan ketidakstabilan adalah Lain-Lain PAD yang Sah, yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 (-42,76%), berkontribusi pada rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -8,55%.

Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami pertumbuhan positif rata-rata 16,87%, dengan lonjakan tertinggi pada 2022 (51,69%). Pendapatan hibah mengalami tren penurunan drastis dengan rata-rata -70,97%, menunjukkan berkurangnya penerimaan hibah dari tahun ke tahun. Sementara itu, Belanja Daerah mencatat pertumbuhan rata-rata 14,92%, dengan peningkatan tajam pada 2021 (23,34%) dan 2023 (20,37%). Belanja Modal menjadi kategori dengan volatilitas tinggi, mencatat lonjakan hingga 112,26% pada 2021, tetapi mengalami kontraksi pada 2022 (-10,35%).

Dari sisi pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami tren yang menurun dengan rata-rata pertumbuhan hanya 3,27%, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah cenderung mengalami kontraksi tajam (-55,56%). Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah juga mengalami ketidakpastian, dengan tren negatif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengendalian fiskal, terutama

dalam hal investasi pemerintah daerah dan pengelolaan dana cadangan. Secara keseluruhan, meskipun Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan positif, fluktuasi yang signifikan pada beberapa komponen pendapatan dan belanja mengindikasikan perlunya strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan.

2.2.1.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih. Kriteria pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus didasarkan pada perkiraan yang terukur dan rasional serta dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah diperoleh dengan mengacu pada kebijakan keuangan negara dan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang dicerminkan melalui asumsi indikator makro ekonomi. Selain itu, pendapatan daerah juga tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.

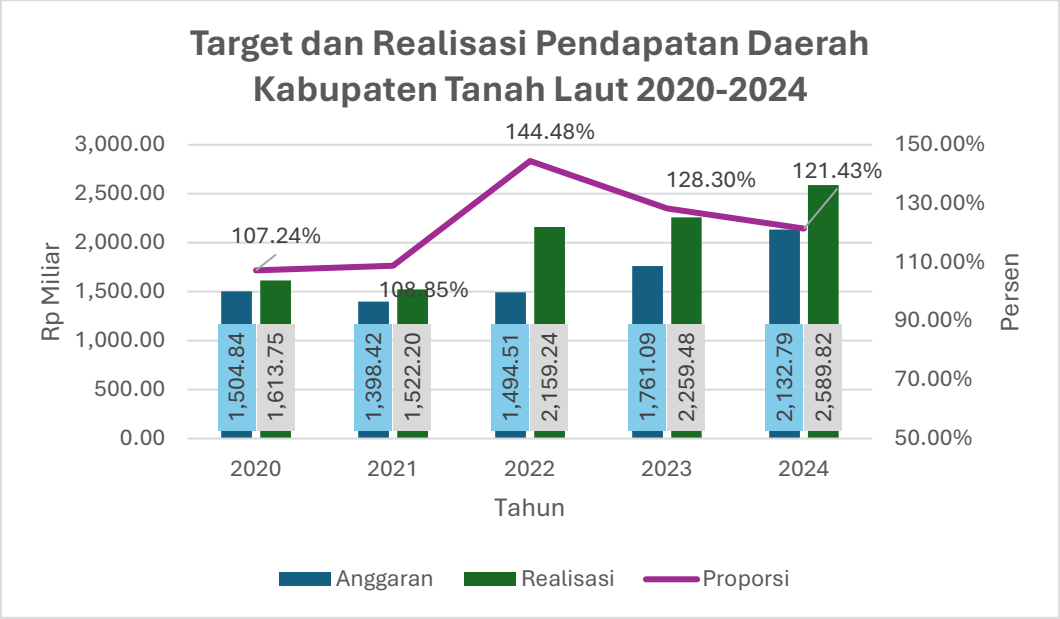

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Gambar 2. 37 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp Milyar), 2020-2024

Berdasarkan pada grafik sebelumnya, terlihat adanya tren peningkatan dalam realisasi pendapatan daerah dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan mencapai Rp1,61 triliun atau 107,24% dari target sebesar Rp1,50 triliun. Tren positif ini berlanjut pada 2021 dengan realisasi Rp1,52 triliun (108,85%) dan mengalami lonjakan signifikan pada 2022, di mana realisasi pendapatan mencapai Rp2,16 triliun atau 144,48% dari target Rp1,49 triliun. Meskipun proporsi realisasi terhadap anggaran mengalami sedikit penurunan pada 2023 dan 2024, masing-masing sebesar 128,30% dan 121,43%, namun secara nominal realisasi pendapatan terus meningkat hingga mencapai Rp2,58 triliun pada 2024.

Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa efektivitas pendapatan daerah dalam mencapai target mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2024. Meskipun terdapat penurunan capaian pada tahun 2020 dan 2021 hal ini disebabkan oleh pandemi Covid yang sedang mewabah, pendapatan daerah mampu pulih dan melampaui target dengan margin yang lebih besar pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam strategi pengelolaan pendapatan daerah serta kemampuan untuk menyesuaikan target yang lebih realistis dan dapat dicapai. Stabilitas realisasi pendapatan juga mencerminkan dasar yang kuat bagi perencanaan keuangan di masa mendatang, memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan target pendapatan yang lebih ambisius dan realistis.

Jika dilihat pada rata-rata proporsi sumber pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut 2020-2024," terlihat bahwa pendapatan transfer mendominasi struktur penerimaan daerah dengan kontribusi sebesar 81%. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sekitar 10%, dan pendapatan lainnya menyumbang 9% dari total pendapatan daerah. Proporsi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Laut masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi dalam membiayai operasional dan pembangunan daerahnya.

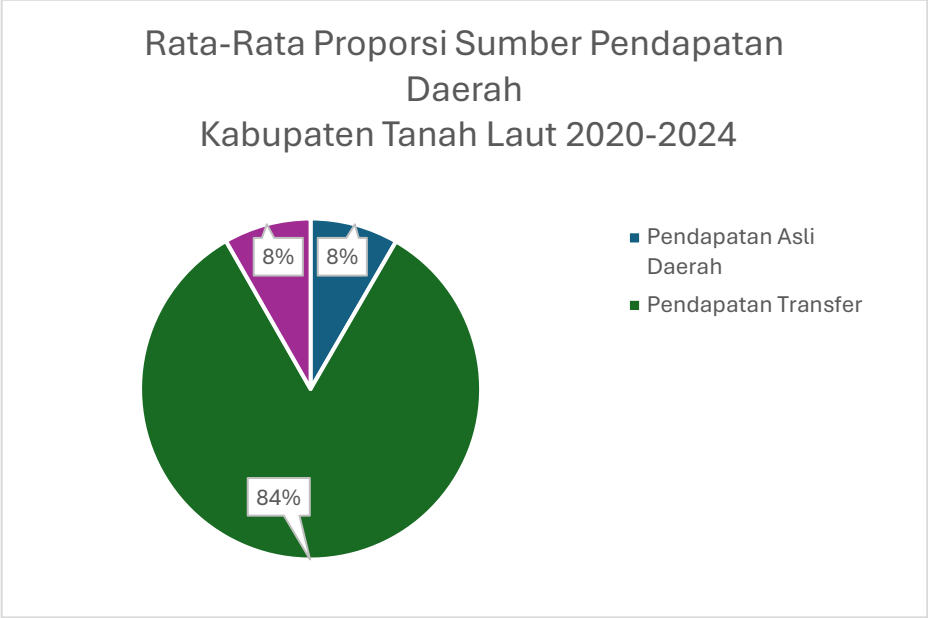

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Gambar 2. 38 Grafik Rata-Rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Adapun untuk rincian target dan realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 secara rinci dapat disajikan pada Tabel 2.86

Tabel 2. 108 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanah Laut dari Tahun 2020 s.d 2024

Uraian	2020 (dalam miliar rupiah)			2021 (dalam miliar rupiah)			2022 (dalam miliar rupiah)			2023 (dalam miliar rupiah)			2024 (dalam miliar rupiah)		
	Anggaran	Realisasi	Proporsi	Anggaran	Realisasi	Proporsi	Anggaran	Realisasi	Proporsi	Anggaran	Realisasi	Proporsi	Anggaran	Realisasi	Proporsi
Pendapatan Daerah	**1.504,84**	**1.613,75**	**107,24%**	**1.398,42**	**1.522,20**	**108,85%**	**1.494,51**	**2.159,24**	**144,48%**	**1.761,09**	**2.259,48**	**128,30%**	**2.132,79**	**2.589,82**	**121,43%**
PAD	**150,06**	**189,6**	**126,35%**	**159,25**	**206,14**	**129,44%**	**168,28**	**193,89**	**115,22%**	**223,17**	**211,72**	**94,87%**	**214,6**	**238,48**	**111,18%**
Pajak Daerah	32,44	44,58	137,41%	35,23	43,64	123,87%	36,58	45,36	124,03%	49,17	52,67	107,11%	53,01	54,39	102,61%
Retribusi Daerah	9,17	7,53	82,06%	10,22	5,74	56,19%	7,94	6,97	87,84%	11,95	7,68	64,31%	85,55	89,62	104,76%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,5	7,44	64,71%	8,5	9,84	115,73%	14,63	11,01	75,28%	13,33	12,01	90,06%	14,73	14,73	100,00%
Lain-Lain PAD yang Sah	96,95	130,06	134,15%	105,3	146,92	139,52%	109,14	130,54	119,61%	148,72	139,37	93,71%	61,30	79,73	130,06%
TKDD	**1.218,33**	**1.274,40**	**104,60%**	**1.112,96**	**1.174,47**	**105,53%**	**1.215,98**	**1.781,59**	**146,51%**	**1.414,90**	**1.846,77**	**130,52%**	**1.757,80**	**2.157,83**	**122,79%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.218,33	1.274,40	104,60%	1.112,96	1.174,47	105,53%	1.215,98	1.781,59	146,51%	1.414,90	1.846,77	130,52%	1.757,80	2.157,83	122,79%
Pendapatan Lainnya	**136,45**	**149,75**	**109,74%**	**126,2**	**141,6**	**112,20%**	**110,25**	**183,76**	**166,68%**	**123,02**	**200,99**	**163,38%**	**160,39**	**193,50**	**120,66%**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	100	103,97	103,97%	86,16	99,28	115,23%	110,25	181,62	164,73%	121,86	200,71	164,71%	160,37	193,38	120,58%
Pendapatan Hibah	36,45	45,78	125,58%	0	3,2	0%	0	2,14	0%	1,16	0,27	23,46%	0	0,08	0%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0%	40,04	39,11	97,68%	0	0	0%	0	0	0%	0,02	0,12	498,14%

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan & Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

1. **Pajak Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah. Dengan menganalisis komponen penyusun PAD, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, kita dapat menilai efektivitas kebijakan dan strategi peningkatan penerimaan daerah. Tabel berikut memberikan gambaran proporsi masing-masing komponen PAD Kabupaten Tanah Laut selama periode 2020–2024.

Tabel 2. 109 Proporsi Realisasi PAD Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Pajak Daerah	23,51%	21,17%	23,39%	24,88%	22,81%
Retribusi Daerah	3,97%	2,78%	3,59%	3,63%	37,59%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,92%	4,77%	5,68%	5,67%	6,18%
Lain-Lain PAD yang Sah	68,60%	71,27%	67,33%	65,83%	33,42%

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa proporsi Pajak Daerah selama lima tahun terakhir relatif stabil pada kisaran 21%–25%, menandakan kontribusi yang konsisten terhadap PAD. Retribusi Daerah menunjukkan lonjakan signifikan pada 2024, meningkat dari sekitar 3,6% menjadi 37,59%, yang dapat disebabkan oleh peningkatan kinerja pemungutan retribusi, penerapan kebijakan baru, atau perluasan objek retribusi. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terus bertumbuh dari 3,92% pada 2020 menjadi 6,18% pada 2024, menandakan pengelolaan aset daerah yang semakin efektif. Di sisi lain, Lain-Lain PAD yang Sah, yang semula mendominasi di atas 65%, turun drastis menjadi 33,42% pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran komposisi pendapatan, di mana ketergantungan pada pos lain-lain

semakin berkurang, sedangkan pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah berperan lebih besar. Dengan demikian, upaya diversifikasi dan optimalisasi sumber pendapatan asli tampak berhasil dilakukan, meski masih perlu penguatan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan pada setiap komponen PAD.

Setelah meninjau komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut, penting untuk melihat bagaimana tren realisasi dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Realisasi dan laju pertumbuhan PAD dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan, pengelolaan sumber daya, serta kemandirian fiskal daerah. Berikut adalah realisasi dan pertumbuhan PAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020-2024.

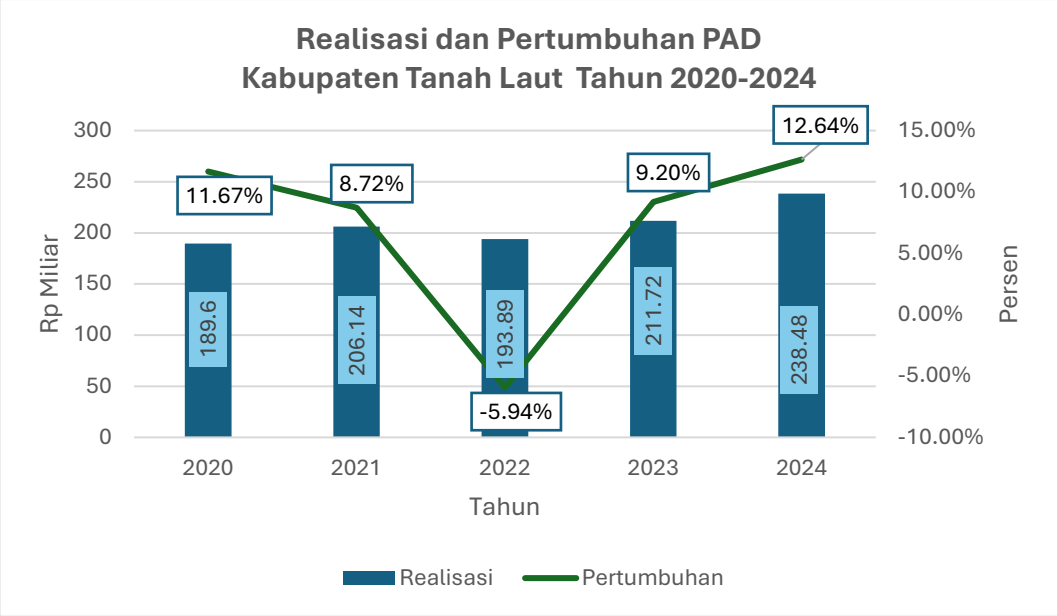

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Gambar 2. 39 Grafik Realisasi dan Pertumbuhan PAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa realisasi PAD terus menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Pada 2020, realisasi PAD tercatat sebesar Rp 189,6 miliar dengan pertumbuhan 11,67%. Angka ini

meningkat menjadi Rp 206,14 miliar pada 2021 (8,72%). Namun, pada 2022 terjadi penurunan realisasi menjadi Rp 193,38 miliar dan laju pertumbuhannya turun hingga -5,94%. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun perubahan kebijakan yang berdampak pada penerimaan daerah. Meski demikian, realisasi PAD kembali meningkat pada 2023 menjadi Rp 211,72 miliar dengan pertumbuhan 9,20%, dan berlanjut naik pada 2024 hingga Rp 238,48 miliar (12,64%).

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi sebagai indikator kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dengan memantau tren realisasi dan pertumbuhan Pajak Daerah, pemangku kepentingan dapat menilai efektivitas kebijakan pemungutan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta stabilitas pendapatan yang menjadi penopang pembangunan di daerah.

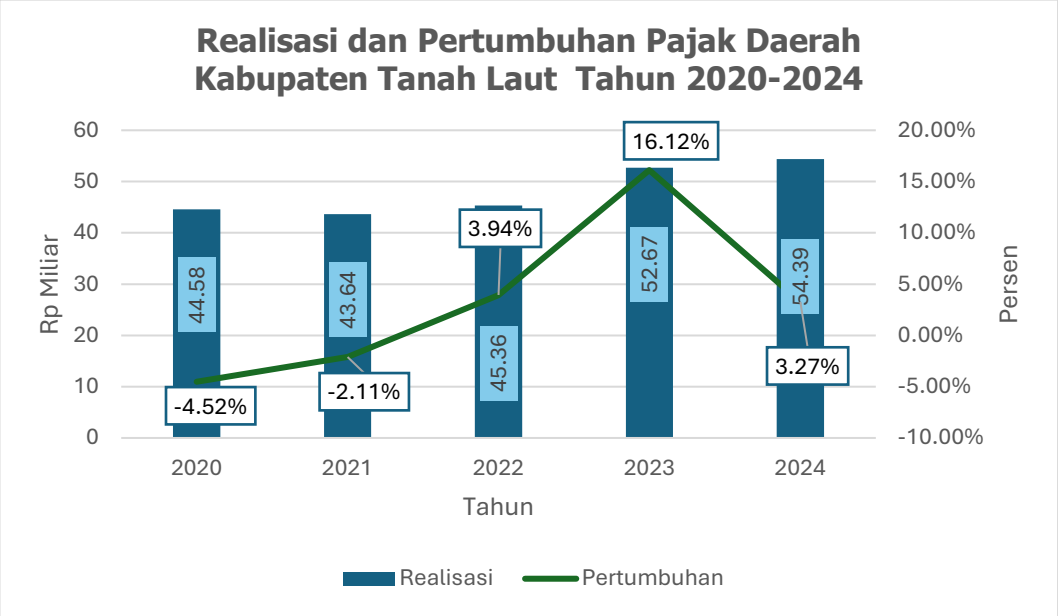

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Gambar 2. 40 Grafik Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Berdasarkan grafik tersebut terlihat adanya fluktuasi pada realisasi pajak daerah. Pada 2020 dan 2021, realisasi pajak masing-masing sebesar

Rp44,58 miliar dan Rp43,64 miliar, disertai pertumbuhan negatif sebesar -4,52% dan -2,11%. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang belum stabil atau perubahan kebijakan yang memengaruhi penerimaan pajak. Namun, pada 2022, realisasi pajak meningkat menjadi Rp45,36 miliar (3,94%), menandakan perbaikan di sektor pajak daerah. Pertumbuhan semakin signifikan pada 2023, mencapai 16,12% dengan realisasi Rp52,67 miliar, yang kemungkinan besar mencerminkan pemulihan ekonomi yang lebih kuat atau peningkatan kepatuhan pajak. Meskipun laju pertumbuhan kembali melandai menjadi 3,27% pada 2024 dengan realisasi Rp54,39 miliar, tren keseluruhan menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan mengelola layanan publik tertentu. Melalui analisis realisasi dan pertumbuhan retribusi, pemangku kepentingan dapat menilai efektivitas kebijakan pemungutan, potensi perluasan objek retribusi, serta kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

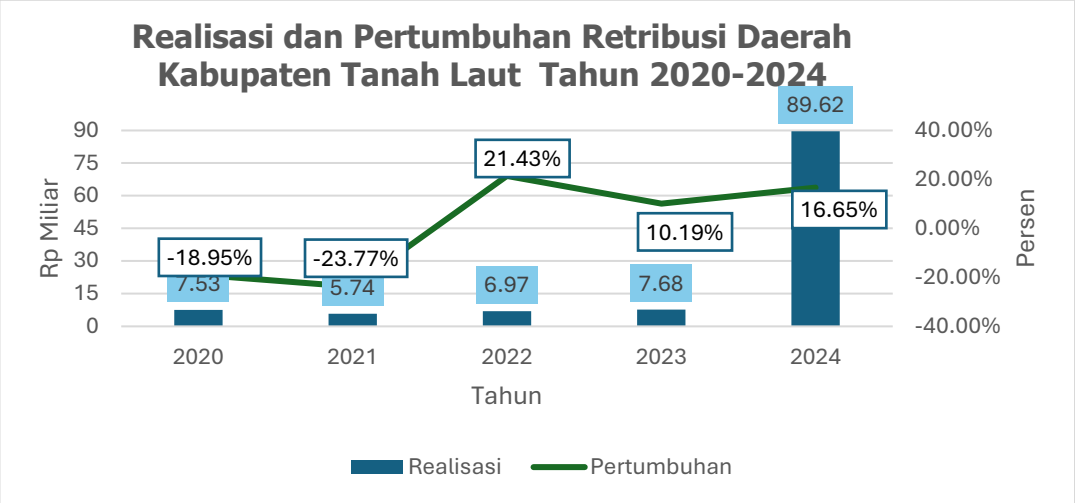

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Gambar 2. 41 Grafik Realisasi dan Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Pada 2020, realisasi retribusi mencapai Rp7,53 miliar dengan pertumbuhan -18,95%. Penurunan berlanjut pada 2021, ketika realisasi menurun menjadi Rp5,72 miliar (-23,77%). Kondisi ini dapat mencerminkan dampak perlambatan ekonomi atau kebijakan tertentu yang menyebabkan penerimaan retribusi berkurang. Situasi mulai membaik pada 2022, di mana realisasi meningkat menjadi Rp6,07 miliar (21,43%), dan tren positif berlanjut pada 2023 dengan realisasi Rp7,68 miliar (26,71%). Peningkatan ini mengindikasikan pemulihan ekonomi atau optimalisasi pemungutan retribusi yang lebih efektif. Menariknya, pada 2024 terjadi lonjakan realisasi retribusi menjadi Rp89,59 miliar dengan pertumbuhan 16,65%. Lompatan yang sangat signifikan tersebut dapat disebabkan oleh penerapan kebijakan baru, perluasan cakupan objek retribusi, peningkatan tarif, atau peningkatan kepatuhan pengguna layanan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber pendapatan penting yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola aset atau penyertaan modalnya secara produktif. Dengan memantau tren realisasi dan pertumbuhannya, pemerintah daerah dapat menilai efektivitas strategi investasi, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta potensi optimalisasi aset lain yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.

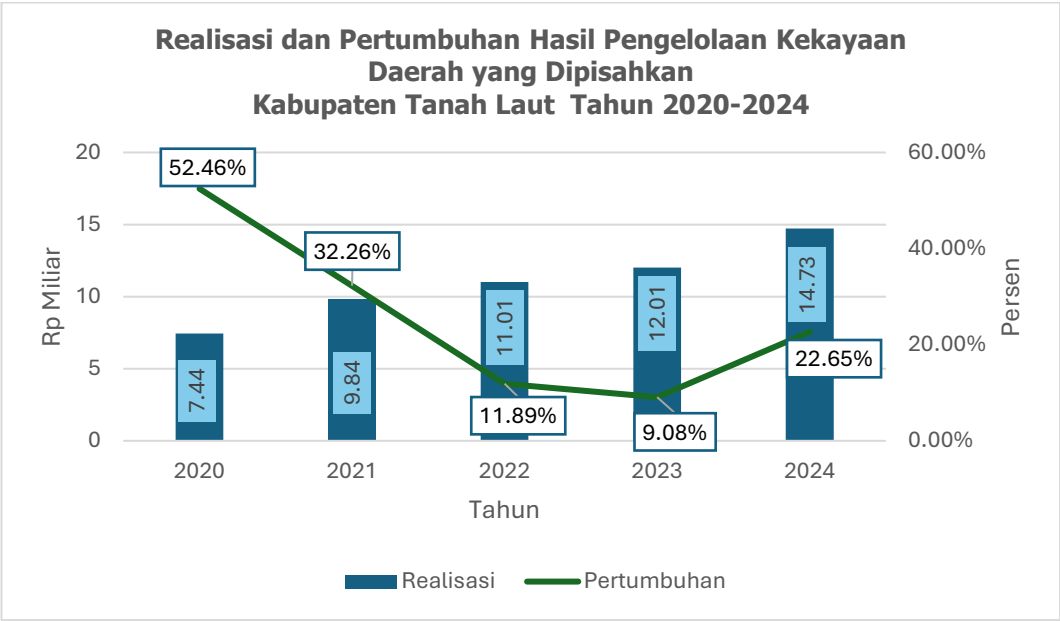

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Gambar 2. 42 Grafik Realisasi dan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Pada grafik dapat terlihat tren peningkatan realisasi dari Rp7,44 miliar pada 2020 menjadi Rp14,73 miliar pada 2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2020, mencapai 52,46%, yang kemungkinan didorong oleh basis penerimaan tahun sebelumnya yang lebih rendah atau adanya inisiatif baru dalam pengelolaan aset. Pada 2021 dan 2022, laju pertumbuhan relatif stabil di kisaran 12,62% dan 11,89%, sebelum kembali melonjak pada 2023 (sekitar 28,29%). Meskipun pertumbuhan sedikit melandai menjadi 22,65% pada 2024, nominal realisasi terus meningkat, mengindikasikan keberlanjutan kinerja positif di sektor ini.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Pendapatan Lain-lain yang Sah merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena mencakup berbagai pos penerimaan yang tidak terakomodasi dalam pajak daerah, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Meski kerap bersifat variatif dan bergantung pada faktor eksternal, pemantauan terhadap realisasi

dan pertumbuhan komponen ini menjadi krusial untuk memahami potensi optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang dapat mendukung kemandirian fiskal daerah.

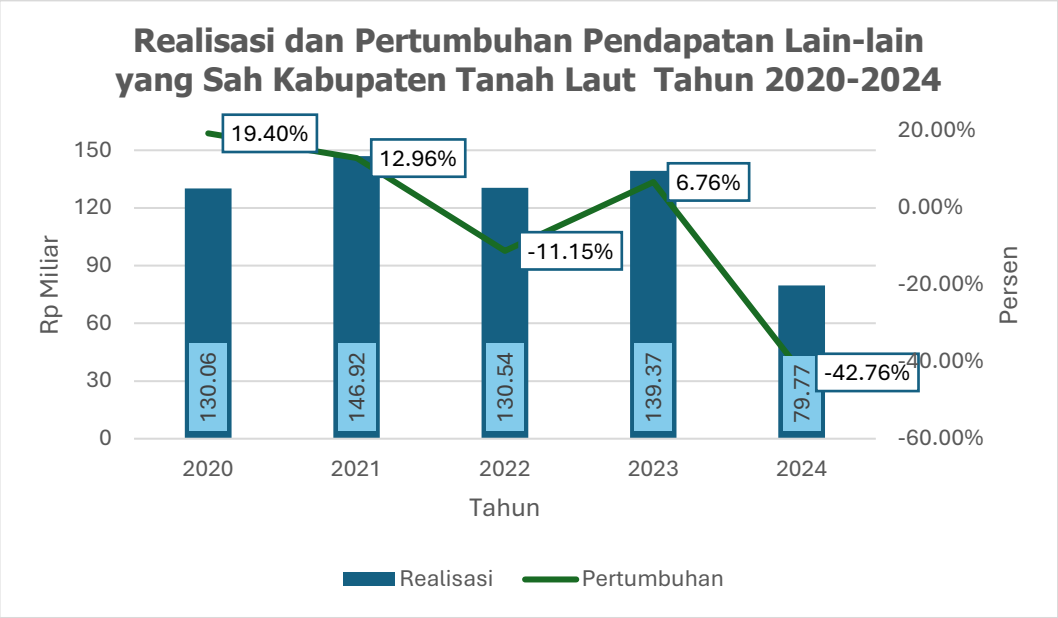

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Gambar 2. 43 Grafik Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Lain-lain Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Dari grafik tersebut terlihat tren yang cukup fluktuatif. Pada 2020, realisasi mencapai Rp130,06 miliar dengan pertumbuhan 19,40%, diikuti peningkatan pada 2021 menjadi Rp146,92 miliar (12,96%). Namun, pada 2022 realisasi turun kembali menjadi Rp130,12 miliar dengan pertumbuhan -11,15%, yang mengindikasikan penurunan penerimaan di beberapa sumber pendapatan. Meskipun sempat membaik pada 2023 dengan realisasi Rp139,37 miliar (6,76%), laju pertumbuhan kembali anjlok pada 2024, mencapai -42,76% dengan realisasi hanya Rp79,70 miliar.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TKDD merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN untuk mendanai urusan pemerintahan di daerah dan desa. Alokasi ini

bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat pemerataan fiskal antarwilayah.

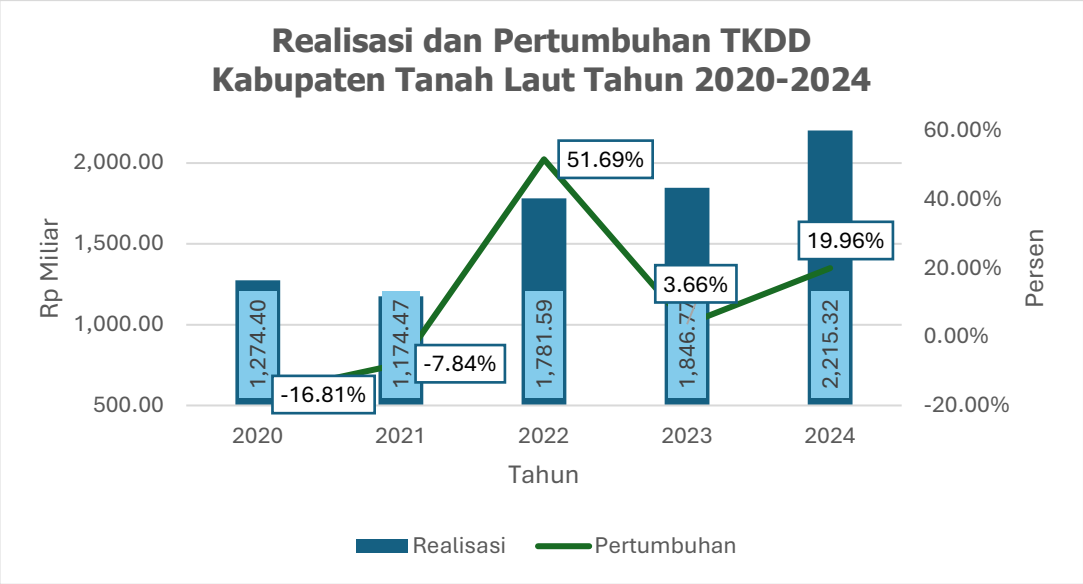

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Gambar 2. 44 Grafik Realisasi dan Pertumbuhan TKDD Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Dari tahun 2020 hingga 2024, realisasi TKDD Kabupaten Tanah Laut mengalami fluktuasi yang mencerminkan perubahan dalam kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi. Pada tahun 2020, realisasi TKDD tercatat sebesar Rp1,27 triliun dengan pertumbuhan negatif -16,81%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan penyesuaian alokasi anggaran. Penurunan berlanjut pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp1,17 triliun dan tingkat pertumbuhan -7,84%, menunjukkan adanya konsolidasi fiskal di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlangsung.

Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dalam realisasi TKDD menjadi Rp1,78 triliun dengan pertumbuhan mencapai 51,69%. Lonjakan ini dapat dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui stimulus fiskal dan peningkatan belanja daerah. Pada tahun 2023, realisasi TKDD mengalami kenaikan moderat menjadi

Rp1,85 triliun dengan tingkat pertumbuhan yang lebih stabil sebesar 3,66%. Tren positif berlanjut pada tahun 2024, di mana realisasi TKDD mencapai Rp2,22 triliun dengan pertumbuhan 19,96%, menunjukkan peningkatan dukungan fiskal bagi daerah.

3. Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya dalam struktur keuangan daerah merupakan komponen yang mencerminkan sumber penerimaan di luar pendapatan asli daerah dan dana transfer utama. Di Kabupaten Tanah Laut, pendapatan lainnya terdiri dari Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Hibah, serta Lain-lain Pendapatan yang Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berikut adalah rincian mengenai proporsi pendapatan lainnya pada periode 2020-2024 di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2. 110 Proporsi Pendapatan Lainnya Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Lainnya	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**69,43%**	**70,11%**	**98,84%**	**99,86%**	**99,95%**
Pendapatan Hibah	**30,57%**	**2,26%**	**1,16%**	**0,13%**	**0,04%**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**0,00%**	**27,62%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,01%**

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Dari sisi proyeksi pendapatan, struktur Pendapatan Lainnya di Kabupaten Tanah Laut selama periode 2020–2024 menunjukkan dominasi yang semakin kuat oleh Pendapatan Transfer Antar Daerah, sedangkan Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengalami penurunan signifikan atau

bersifat fluktuatif. Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat dari 69,43% pada tahun 2020 menjadi 99,95% pada tahun 2024, mencerminkan ketergantungan yang semakin besar terhadap transfer keuangan antar daerah, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Sebaliknya, Pendapatan Hibah, yang sebelumnya berkontribusi sebesar 30,57% pada tahun 2020, terus menurun hingga hanya 0,04% pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa hibah tidak lagi menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah. Adapun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan hanya tercatat dalam jumlah signifikan pada tahun 2021 sebesar 27,62%, namun tidak lagi memiliki kontribusi berarti pada tahun-tahun berikutnya, yang menunjukkan sifatnya yang insidentil atau kebijakan sementara yang hanya berlaku pada tahun tertentu.

Kondisi ini mencerminkan tingkat ketergantungan fiskal daerah yang semakin tinggi terhadap dana transfer. Oleh karena itu, kebijakan alokasi belanja daerah harus dirancang dengan tepat sasaran yang difokuskan pada program-program yang sangat prioritas sehingga akan menjaga fleksibilitas pengelolaan keuangan dan mendukung strategi pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.

Selain komposisi sumber Pendapatan Lainnya, dinamika realisasi dan pertumbuhannya di Kabupaten Tanah Laut selama periode 2020-2024 juga menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pendapatan ini mencakup berbagai sumber di luar pendapatan utama daerah dan memainkan peran penting dalam mendukung keuangan daerah.

Secara keseluruhan, Realisasi Pendapatan Lainnya di Kabupaten Tanah Laut mengalami tren yang bervariasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi tercatat sebesar Rp149,75 miliar, tetapi mengalami kontraksi sebesar -11,71% dibanding tahun sebelumnya. Tren penurunan ini berlanjut pada 2021, di mana realisasi turun menjadi Rp141,6 miliar dengan laju pertumbuhan -5,44%. Namun, pada 2022, terjadi lonjakan signifikan dengan pertumbuhan 29,77%, sehingga realisasi meningkat menjadi Rp183,76 miliar,

menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penerimaan daerah. Pertumbuhan positif masih terjadi pada 2023, meskipun dengan laju yang lebih moderat, yakni 9,38%, sehingga realisasi mencapai Rp200,99 miliar. Namun, pada 2024, pendapatan ini kembali mengalami kontraksi sebesar -3,74%, dengan realisasi turun menjadi Rp193,48 miliar.

Fluktuasi ini mencerminkan adanya faktor eksternal maupun kebijakan fiskal yang memengaruhi pendapatan daerah, termasuk perubahan dalam mekanisme transfer, hibah, serta penerimaan lainnya. Pertumbuhan yang signifikan pada 2022 dan 2023 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah, namun penurunan pada 2024 mengindikasikan potensi ketidakstabilan dalam sumber pendapatan lainnya.

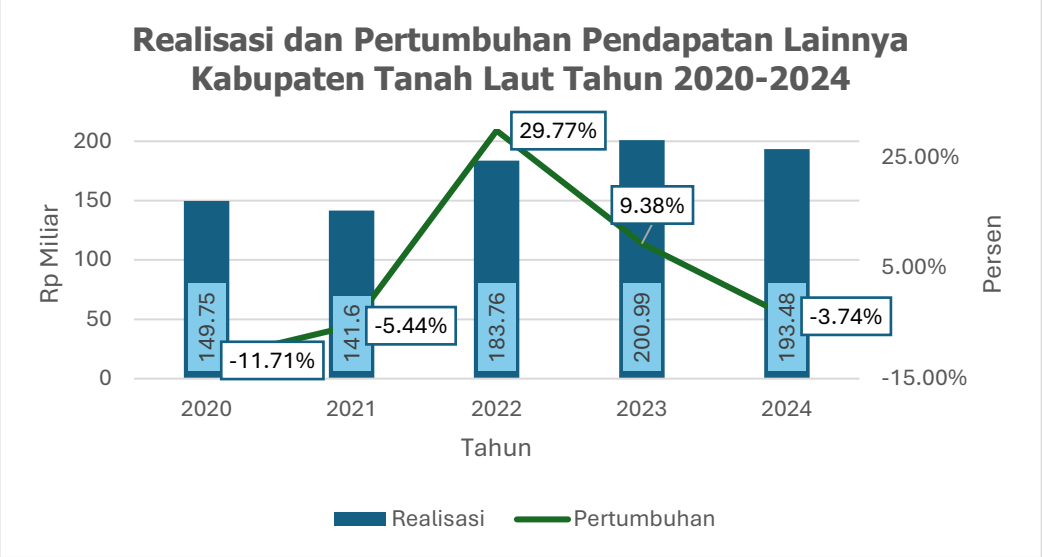

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah

Gambar 2. 45 Grafik Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Lainnya Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

2.2.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya perubahan dalam struktur pengalokasian anggaran. Meskipun total belanja daerah tetap 100% setiap tahunnya, terdapat pergeseran proporsi dalam komponen utama belanja. Belanja pegawai mengalami tren penurunan dari 37,67% pada tahun 2020 menjadi 28,78%

pada tahun 2024. Sebaliknya, belanja barang dan jasa serta belanja modal mengalami peningkatan, dengan belanja barang dan jasa naik dari 25,58% menjadi 29,48%, dan belanja modal tumbuh dari 13,59% menjadi 27,79% dalam kurun waktu lima tahun. Sementara itu, belanja lainnya mengalami tren penurunan dari 23,16% pada tahun 2020 menjadi 13,95% pada tahun 2024. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 111 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Daerah	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Belanja Pegawai	37,67%	33,78%	35,09%	30,35%	28,78%
Belanja Barang dan Jasa	25,58%	26,71%	27,95%	27,29%	29,48%
Belanja Modal	13,59%	23,39%	21,31%	26,38%	27,79%
Belanja Lainnya	23,16%	16,11%	15,65%	15,98%	13,95%

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Penurunan belanja pegawai dari 37,67% pada tahun 2020 menjadi 28,78% pada tahun 2024 mencerminkan upaya efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya dalam menekan beban operasional pemerintahan. Hal ini memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk dialokasikan pada sektor-sektor yang lebih produktif. Sementara itu, peningkatan belanja barang dan jasa dari 25,58% menjadi 29,48% menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan operasional pemerintah dalam penyediaan layanan publik, yang dapat berdampak positif terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, belanja modal yang mengalami kenaikan signifikan dari 13,59% pada tahun 2020 menjadi 27,79% pada tahun 2024 mengindikasikan pergeseran kebijakan ke arah investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset strategis, yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebaliknya, penurunan belanja lainnya dari 23,16% menjadi 13,95% menunjukkan adanya optimalisasi alokasi anggaran agar lebih fokus pada sektor prioritas, dengan penghapusan atau pengurangan program-program yang kurang strategis. Secara keseluruhan, perubahan struktur belanja daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan pergeseran kebijakan fiskal yang lebih efisien, dengan penekanan pada peningkatan investasi dan layanan publik yang berkelanjutan.

Perubahan struktur belanja daerah yang lebih efisien dan berorientasi pada investasi juga tercermin dalam pencapaian realisasi anggaran di Kabupaten Tanah Laut selama periode 2020-2024. Meskipun terjadi fluktuasi dalam persentase realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan, tren keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Variasi dalam pencapaian realisasi ini mencerminkan berbagai faktor, seperti optimalisasi belanja, dinamika perekonomian daerah, serta kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah setempat.

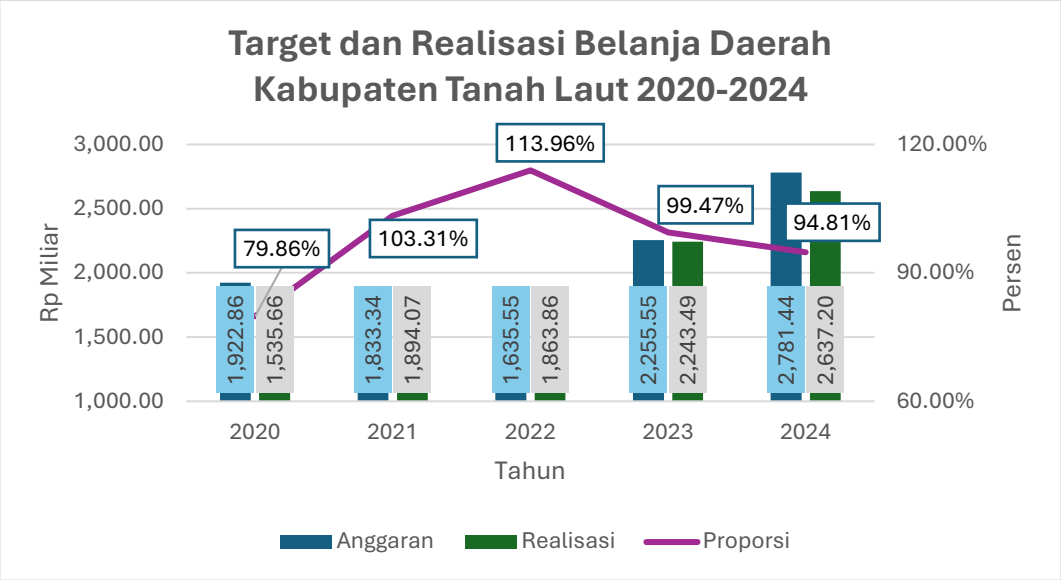

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Gambar 2. 46 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

Berdasarkan data realisasi belanja daerah Kabupaten Tanah Laut, persentase realisasi terhadap anggaran mengalami perubahan signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi belanja hanya mencapai 79,86%

dari anggaran yang dialokasikan, menunjukkan adanya potensi keterlambatan dalam pelaksanaan program atau efisiensi dalam penggunaan anggaran. Tren ini membaik pada tahun 2021, dengan realisasi mencapai 103,31%, yang menunjukkan peningkatan efektivitas dalam penyerapan anggaran. Puncak realisasi terjadi pada tahun 2022, dengan pencapaian sebesar 113,96%, menandakan bahwa belanja daerah melebihi target yang direncanakan, kemungkinan akibat adanya tambahan kebutuhan mendesak atau optimalisasi dalam eksekusi program. Namun, pada tahun 2023, realisasi belanja sedikit menurun menjadi 99,47%, yang masih dalam kategori efisien. Pada tahun 2024, realisasi kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 94,81%, yang masih mencerminkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif. Secara keseluruhan, tren realisasi anggaran Kabupaten Tanah Laut dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain efektivitas dalam realisasi anggaran, rasio belanja daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanah Laut menjadi indikator penting dalam menilai kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian daerah. Rasio ini mencerminkan sejauh mana belanja daerah berkontribusi terhadap total output ekonomi yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Perubahan dalam rasio ini dapat mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah serta efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan.

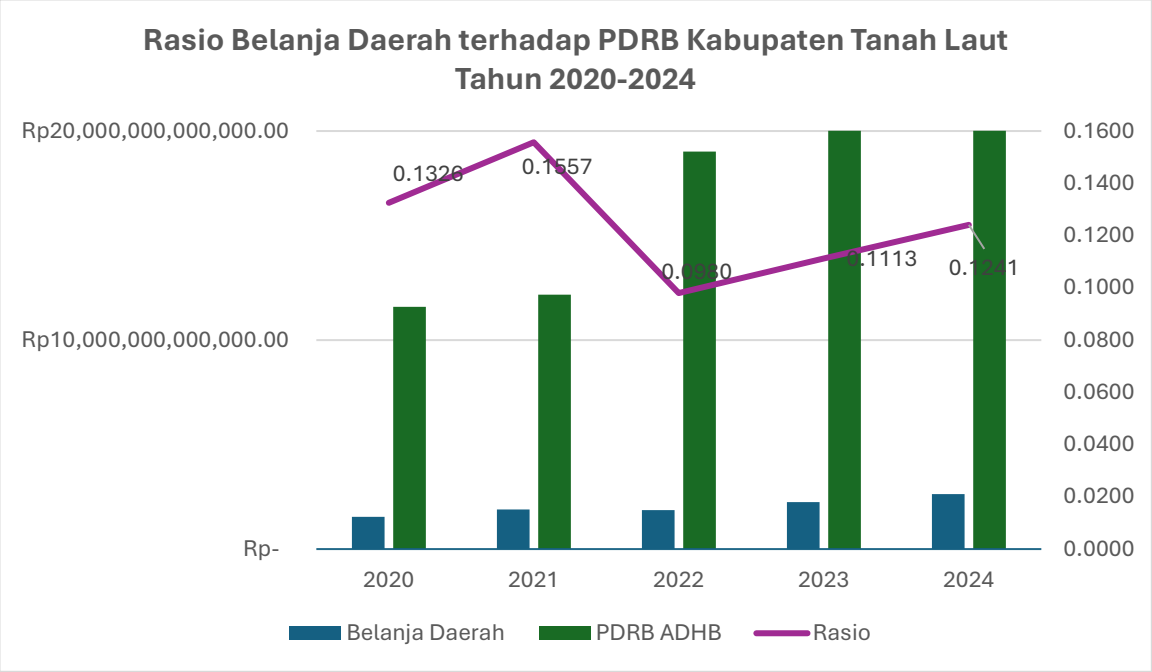

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik 2025, diolah 2025

Gambar 2. 47 Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Proporsi Belanja Pegawai terhadap PDRB pada tahun 2020 rasio berada di angka 0,1326, kemudian meningkat menjadi 0,1557 pada tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan bahwa belanja daerah mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDRB. Namun, pada tahun 2022, rasio mengalami penurunan signifikan menjadi 0,0980, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan PDRB lebih tinggi dibandingkan peningkatan belanja daerah atau adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Pada tahun 2023, rasio kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,1113, dan pada tahun 2024 terus meningkat hingga mencapai 0,1241.

Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, belanja daerah tetap memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam periode 2023-2024 yang menunjukkan adanya pemulihan setelah penurunan di tahun 2022. Rasio yang lebih stabil dalam dua tahun terakhir mencerminkan adanya keseimbangan antara belanja pemerintah dan

pertumbuhan ekonomi, yang dapat mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah merupakan indikator yang mencerminkan alokasi anggaran pemerintah dalam membiayai kebutuhan sumber daya manusia dibandingkan dengan keseluruhan belanja daerah. Proporsi yang tinggi dapat menunjukkan dominasi belanja operasional terhadap belanja pembangunan, sementara proporsi yang lebih kecil dapat mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

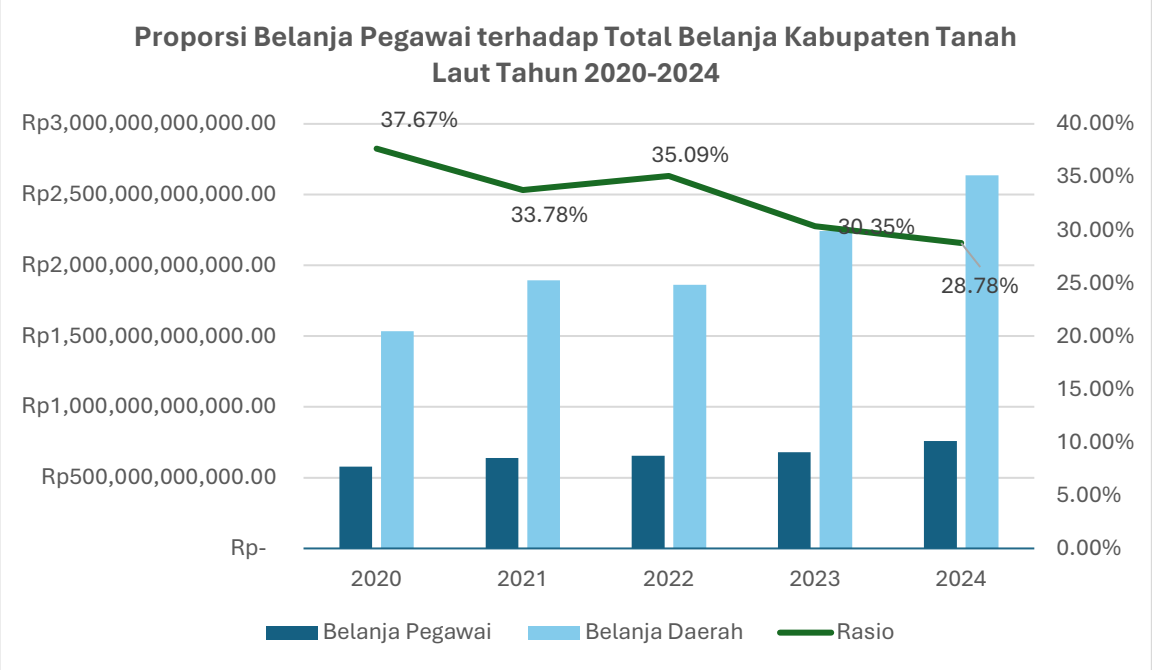

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Gambar 2. 48 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah mencapai 37,67%, kemudian turun menjadi 33,78% pada tahun 2021. Selanjutnya, terjadi sedikit kenaikan menjadi 35,09% pada tahun 2022, sebelum kembali mengalami penurunan berturut-turut menjadi 30,35% pada tahun 2023 dan 28,78% pada tahun 2024.

Tren penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran dalam struktur anggaran daerah, di mana porsi belanja pegawai semakin berkurang dibandingkan dengan belanja daerah secara keseluruhan. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan belanja modal atau belanja program pembangunan yang lebih besar, yang menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta mengarahkan dana lebih banyak untuk belanja yang bersifat produktif. Penurunan rasio ini juga dapat menjadi indikasi adanya optimalisasi jumlah pegawai atau kebijakan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.

Sejalan dengan tren tersebut, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proporsi belanja pegawai dapat memenuhi ketentuan *mandatory spending* sebagaimana diatur dalam Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yakni paling lambat tahun 2027 harus mencapai sebesar 30% dari total belanja daerah. Kabupaten Tanah Laut sendiri pada tahun 2024 telah berhasil memenuhi ketentuan tersebut dengan proporsi belanja pegawai sebesar 28,78%, lebih rendah dari batas maksimal yang dipersyaratkan. Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal serta meningkatkan ruang fiskal untuk belanja pembangunan yang lebih produktif.

Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah merupakan indikator penting dalam mengukur komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang. Belanja modal yang lebih tinggi biasanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, karena dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan aset tetap, pembangunan fasilitas umum, dan infrastruktur yang dapat mendorong aktivitas ekonomi.

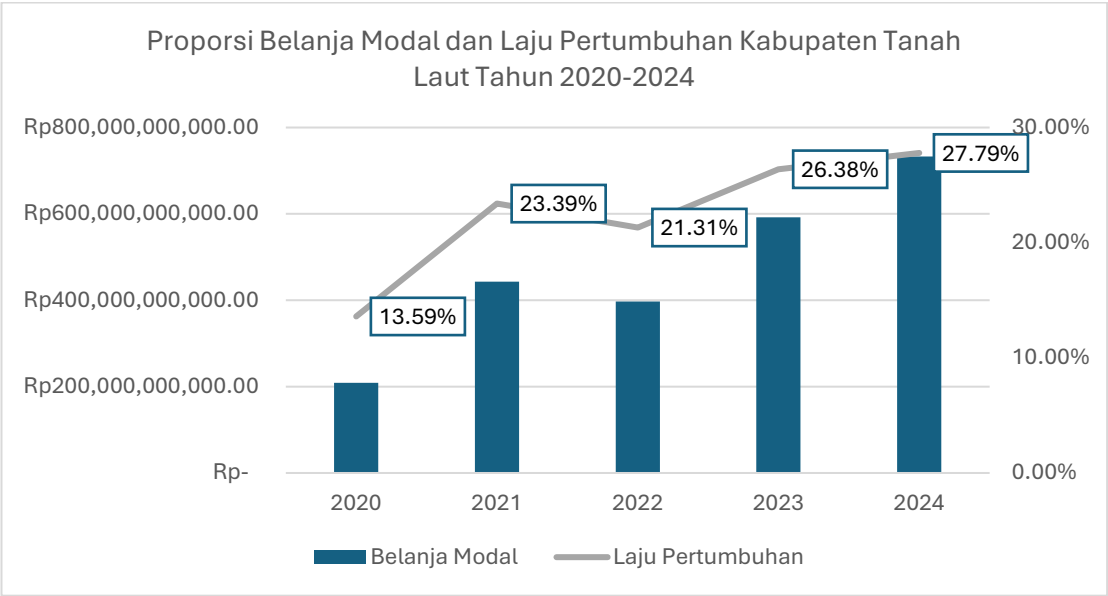

Sumber: Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, diolah 2025

Gambar 2. 49 Proporsi Belanja Modal terhadap Laju Pertumbuhan Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Berdasarkan data Kabupaten Tanah Laut untuk periode 2020–2024, terlihat adanya peningkatan belanja modal yang sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020, belanja modal masih relatif rendah dengan laju pertumbuhan sebesar 13,59%. Namun, pada tahun 2021, belanja modal meningkat tajam, disertai dengan lonjakan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 23,39%. Meskipun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan laju pertumbuhan menjadi 21,31%, tren kenaikan kembali berlanjut pada tahun 2023 sebesar 26,38% dan mencapai 27,79% pada tahun 2024. Peningkatan ini sudah sejalan dengan peran proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah, yang merupakan indikator penting dalam mengukur komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang guna mendorong aktivitas ekonomi. Korelasi positif antara peningkatan belanja modal dan laju pertumbuhan menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur dan aset tetap memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Peningkatan ini juga mencerminkan kebijakan fiskal yang lebih

progresif dalam mengarahkan anggaran daerah untuk kegiatan produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan tren ini, Kabupaten Tanah Laut berpotensi untuk terus meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan investasi yang strategis.

2.2.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan berbagai pedoman yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya., pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, dana tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel 2. 112 Perkembangan Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah (Rp Juta), 2020-2024

Uraian	2020 (dalam miliar rupiah)			2021 (dalam miliar rupiah)			2022 (dalam miliar rupiah)			2023 (dalam miliar rupiah)			2024 (dalam miliar rupiah)		
	Anggaran	Realisasi	Proporsi	Anggaran	Realisasi	Proporsi	Anggaran	Realisasi	Proporsi	Anggaran	Realisasi	Proporsi	Anggaran	Realisasi	Proporsi
Pembiayaan Daerah	**418,02**	**912,21**	**218,22%**	**670,87**	**996,16**	**148,49%**	**389,67**	**536,33**	**137,64%**	**494,46**	**848,64**	**171,63%**	**674,87**	**864,62**	**128.12**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**428,02**	**922,21**	**215,46%**	**675,87**	**996,16**	**147,39%**	**439,67**	**611,33**	**139,04%**	**552,78**	**906,95**	**164,07%**	**674,87**	**864,62**	**128.12**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	428,02	922,16	215,45%	675,87	990,3	146,52%	433,67	604,99	139,51%	548,78	831,7	151,56%	674,87	864,62	128.12
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	75	0%	0	0	0%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0%	0	5,75	0%	6	6,34	105,59%	4	0,25	6,26%	0	0	0%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,05	0%	0	0,11	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**10**	**10**	**100%**	**5**	**0**	**0%**	**50**	**75**	**150%**	**58,32**	**58,32**	**100%**	**0**	**0**	**0%**
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0%	0	0	0%	40	40	100%	20	20	100%	0	0	0%
Penyertaan Modal Daerah	0	0	0%	0	0	0%	0	25	0%	28,32	28,32	100%	0	0	0%
Pemberian Pinjaman Daerah	10	10	100%	5	0	0%	10	10	100%	10	10	100%	0	0	0%

Tren penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 realisasi penerimaan jauh melebihi anggaran, dengan proporsi mencapai lebih dari 200% dan 147,39%, yang menandakan adanya peningkatan sumber pembiayaan yang signifikan, terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, proporsi penerimaan pembiayaan mengalami penurunan, meskipun tetap di atas 100%, mengindikasikan adanya optimalisasi dalam perencanaan anggaran dan pengurangan ketergantungan terhadap surplus tahun sebelumnya.

Pengeluaran pembiayaan daerah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, realisasi pengeluaran mencapai 150% dari anggaran yang ditetapkan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah sebesar Rp25 miliar. Sementara itu, pencairan dana cadangan baru dilakukan pada tahun 2023 sebesar Rp75 miliar, yang dapat mengindikasikan kebutuhan pendanaan tambahan untuk proyek strategis atau penyesuaian terhadap kondisi ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Laut selama lima tahun terakhir mencerminkan pola pengelolaan fiskal yang dinamis. Penurunan proporsi SiLPA menunjukkan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, sementara strategi investasi melalui penyertaan modal dan pencairan dana cadangan mengindikasikan adanya perencanaan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2.1.4 Indikator Kesehatan Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan daerah merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Dalam konteks ini, berbagai indikator keuangan seperti Rasio Pajak Daerah per Kapita, GPAD (Growth of Local Own-Source Revenue), Indeks Kemampuan Rutin, Kemandirian Keuangan Daerah, serta proporsi belanja pegawai, barang dan jasa, modal, serta penyertaan modal digunakan untuk mengevaluasi

stabilitas fiskal dan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan. Berdasarkan data tahun 2020–2024, tren keuangan daerah menunjukkan dinamika yang beragam, mencerminkan tantangan dan peluang dalam pengelolaan fiskal yang efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 113 Realiasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata	Keterangan
Rasio Pajak Daerah per Kapita	127.749	123.159	125.636	144.651	148.299	133.899	Sehat
Rasio Pajak Daerah per PDRB	0,38%	0,36%	0,24%	0,26%	0,26%	0,30%	Kurang sehat
GPAD	11,67%	8,72%	-5,94%	9,20%	12,64%	7,26%	Sangat Kurang
Indeks kemampuan Rutin	10,02%	9,37%	8,99%	8,14%	7,94%	8,89%	Kurang sehat
Kemandirian Keuangan Daerah	10,52%	12,46%	9,55%	8,58%	8,00%	9,82%	Sangat Kurang
Ruang Fiskal	62,83%	58,99%	70,22%	70,96%	74,27%	67,45%	Sangat Baik
Rasio Belanja Pegawai	37,67%	33,78%	35,09%	30,35%	28,78%	33,13%	Cukup
Rasio Belanja Barang dan Jasa	25,58%	26,71%	27,95%	27,29%	29,48%	27,40%	Sedang
Rasio Belanja Modal	13,59%	23,39%	21,31%	26,38%	27,79%	22,49%	Kurang
Rasio Penyertaan Modal	0,00%	0,00%	33,33%	48,56%	0,00%	16,38%	Baik

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh, GPAD rata-rata sebesar 7,26% berada dalam kategori sangat kurang, menunjukkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal dan memerlukan strategi peningkatan yang lebih agresif. Indeks Kemampuan Rutin dan Kemandirian Keuangan Daerah yang masing-masing mencatat rata-rata 8,89% dan 9,82% juga masuk dalam kategori sangat kurang, mengindikasikan ketergantungan daerah yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, ruang fiskal mencatat angka rata-rata 67,45%, yang dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki kapasitas belanja yang cukup luas setelah memenuhi kebutuhan belanja wajib, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur dan

program prioritas lainnya. Rasio Belanja Pegawai yang mencapai 33,13% berada dalam kategori cukup, mencerminkan alokasi belanja pegawai yang masih dalam batas wajar, meskipun perlu dioptimalkan agar lebih proporsional dengan belanja produktif.

Sementara itu, Rasio Belanja Modal rata-rata sebesar 22,49% masuk dalam kategori kurang, menunjukkan bahwa investasi dalam aset tetap dan infrastruktur masih relatif terbatas. Sebaliknya, Rasio Penyertaan Modal yang mencatat rata-rata 16,38% berada dalam kategori baik, mengindikasikan adanya upaya daerah dalam mendukung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau investasi strategis lainnya.

2.2.1.5 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan ini memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi daerah. Neraca Daerah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah daerah, termasuk aset, kewajiban (utang), dan ekuitas, yang mencerminkan kondisi keuangan serta kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan data laporan keuangan Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi tren pertumbuhan aset yang positif. Total aset daerah mengalami peningkatan dari Rp 4.434,35 miliar pada 2020 menjadi Rp 6.188,58 miliar pada 2024. Peningkatan terbesar berasal dari aset tetap yang naik dari Rp 3.179,97 miliar pada 2020 menjadi Rp 4.597,33 miliar pada 2024, menunjukkan adanya investasi signifikan dalam infrastruktur dan aset produktif lainnya yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset lancar mengalami

fluktuasi dalam periode tersebut, dengan penurunan pada 2021 sebelum kembali meningkat hingga mencapai Rp 1.398,02 miliar pada 2024. Investasi jangka panjang juga mengalami kenaikan dari Rp 123,82 miliar pada 2020 menjadi Rp 169,76 miliar pada 2024, mencerminkan upaya pemerintah dalam menanamkan modal yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.

Di sisi kewajiban, jumlah utang daerah relatif kecil dibandingkan dengan total aset dan ekuitas. Kewajiban jangka pendek mengalami peningkatan signifikan pada 2023, dari Rp 45,00 miliar pada 2022 menjadi Rp 236,50 miliar, sebelum kembali turun menjadi Rp 120,57 miliar pada 2024. Tidak adanya kewajiban jangka panjang menunjukkan bahwa struktur pembiayaan daerah lebih banyak bergantung pada ekuitas dibandingkan dengan utang jangka panjang, yang mengindikasikan tingkat risiko keuangan yang lebih rendah.

Ekuitas daerah mengalami pertumbuhan dari Rp 4.356,30 miliar pada 2020 menjadi Rp 6.068,01 miliar pada 2024. Ekuitas dana mencerminkan selisih antara total aset dengan total kewajiban daerah, yang menunjukkan kestabilan dan kesehatan keuangan pemerintah daerah dalam jangka panjang. Peningkatan ekuitas ini menandakan bahwa Kabupaten Tanah Laut memiliki kapasitas yang lebih besar dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang besar terhadap pinjaman atau utang jangka panjang.

Secara keseluruhan, laporan keuangan Kabupaten Tanah Laut mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat dan pertumbuhan aset yang berkelanjutan. Peningkatan nilai aset, khususnya aset tetap dan investasi jangka panjang, menunjukkan adanya perencanaan strategis dalam pengelolaan sumber daya daerah. Struktur keuangan yang lebih mengandalkan ekuitas daripada utang juga mencerminkan pendekatan yang lebih konservatif dan berorientasi pada stabilitas fiskal jangka panjang.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 114 Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Rp), 2021-2024

Uraian	CaLK	Tahun (dalam miliar rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Aset	5.3.1					
Aset Lancar	5.3.1.1	Rp 1.105,52	Rp 759,68	Rp 929,04	Rp 1.205,35	Rp 1.398,02
Investasi Jangka Panjang	5.3.1.2	Rp 123,82	Rp 120,11	Rp 146,26	Rp 170,38	Rp 169,76
Aset Tetap	5.3.1.3	Rp 3.179,97	Rp 3.398,22	Rp 3.562,87	Rp 3.903,54	Rp 4.597,33
Dana Cadangan	5.3.1.4	Rp -	Rp 15,00	Rp 56,16	Rp -	Rp -
Aset Lainnya	5.3.1.5	Rp 25,04	Rp 15,82	Rp 341,84	Rp 22,69	Rp 23,46
Jumlah Aset		Rp 4.434,35	Rp 4.308,83	Rp 5.036,14	Rp 5.301,95	Rp 6.188,58
Kewajiban	5.3.2					Rp -
Kewajiban Jangka Pendek	5.3.2.1	Rp 78,05	Rp 77,66	Rp 45,00	Rp 236,50	Rp 120,57
Kewajiban Jangka Panjang	5.3.2.2	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Kewajiban		Rp 78,05	Rp 77,66	Rp 45,00	Rp 236,50	Rp 120,57
Ekuitas	5.3.3	Rp 4.356,30	Rp 4.230,97	Rp 4.991,13	Rp 5.065,45	Rp 6.068,01
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		Rp 4.434,35	Rp 4.308,83	Rp 5.036,14	Rp 5.301,95	Rp 6.168,57

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024, diolah 2025

Jika ditinjau dari sisi pertumbuhan pada masing-masing komponen neraca keuangan Kabupaten Tanah Laut selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang beragam. Hal ini sejalan dengan peningkatan total aset dan ekuitas yang telah diuraikan sebelumnya, serta mencerminkan strategi keuangan yang lebih mengandalkan pendanaan internal dibandingkan utang jangka panjang. Aset lancar menunjukkan fluktuasi yang tajam, dengan pertumbuhan 10,06% di 2020, penurunan signifikan sebesar -31,28% di 2021, kemudian pulih dengan kenaikan 22,29% dan 29,74% di 2022 dan 2023, serta mencapai 15,98% di 2024 (rata-rata 9,36%). Sementara itu, investasi jangka panjang mengalami penurunan pada dua tahun awal (-11,69% dan -3,00%), namun menunjukkan pemulihan dengan kenaikan 21,77% di 2022 dan 16,49% di 2023, sebelum sedikit menyusut di 2024 (-0,36%), menghasilkan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,64%.

Aset tetap mencatat tren pertumbuhan yang stabil dan semakin meningkat, terutama dengan lonjakan sebesar 17,77% di 2024 (rata-rata 8,52%). Di sisi lain, dana cadangan dan aset lainnya mengalami volatilitas ekstrem; dana cadangan melonjak 274,40% di 2022 namun turun drastis -100,00% di 2023, sedangkan aset lainnya mencapai lonjakan luar biasa sebesar 2060,81% di 2022, diikuti oleh penurunan tajam -93,36% di 2023 (rata-rata pertumbuhan masing-masing 34,88% dan 381,42%). Secara keseluruhan, jumlah aset mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata 8,08%, mengindikasikan perbaikan kondisi keuangan daerah yang didukung oleh strategi investasi dan pengelolaan aset yang efektif.

Di sisi kewajiban, kewajiban jangka pendek juga menunjukkan fluktuasi tajam, dengan penurunan di 2020, 2021, dan 2022, namun mengalami lonjakan 425,56% di 2023 sebelum kembali menurun di 2024, menghasilkan rata-rata pertumbuhan 60,36%. Ekuitas menunjukkan tren pertumbuhan positif, meskipun sempat mengalami penurunan -2,88% di 2021, namun tumbuh signifikan di tahun-tahun lainnya dengan rata-rata 8,35%. Secara keseluruhan, pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas (rata-

rata 8,00%) mendukung peningkatan total aset, yang mencerminkan upaya pengelolaan keuangan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi di Kabupaten Tanah Laut, serta mendukung stabilitas fiskal jangka panjang. Untuk rincian pertumbuhan pada setiap komponen, dapat dilihat apda tabel berikut.

Tabel 2.115 Pertumbuhan pada Setiap Komponen Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

Uraian	CaLK	Tahun (% Pertumbuhan)					Rata-rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
Aset	5.3.1						
Aset Lancar	5.3.1.1	10,06%	-31,28%	22,29%	29,74%	15,98%	9,36%
Investasi Jangka Panjang	5.3.1.2	-11,69%	-3,00%	21,77%	16,49%	-0,36%	4,64%
Aset Tetap	5.3.1.3	3,56%	6,86%	4,85%	9,56%	17,77%	8,52%
Dana Cadangan	5.3.1.4	0,00%	0,00%	274,40%	-100,00%	0,00%	34,88%
Aset Lainnya	5.3.1.5	-26,93%	-36,82%	2060,81%	-93,36%	3,40%	381,42%
Jumlah Aset		4,34%	-2,83%	16,88%	5,28%	16,72%	8,08%
Kewajiban	5.3.2						
Kewajiban Jangka Pendek	5.3.2.1	-32,17%	-0,50%	-42,06%	425,56%	-49,02%	60,36%
Kewajiban Jangka Panjang	5.3.2.2						
Jumlah Kewajiban		-32,17%	-0,50%	-42,06%	425,56%	-49,02%	60,36%
Ekuitas	5.3.3	5,36%	-2,88%	17,97%	1,49%	19,79%	8,35%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		4,34%	-2,83%	16,88%	5,28%	16,35%	8,00%

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024, diolah 2025

Berdasarkan penyajian perkembangan neraca keuangan daerah sebagaimana tabel di atas, kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dianalisis melalui perhitungan rasio keuangan, khususnya rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, yang dalam konteks Kabupaten Tanah Laut dianalisis menggunakan rasio kewajiban terhadap aset (Debt Ratio) dan rasio kewajiban terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio). Debt Ratio mengukur proporsi total aset yang dibiayai oleh utang, memberikan gambaran mengenai sejauh mana Pemerintah Daerah mengandalkan pembiayaan eksternal dalam pengelolaan asetnya. Sementara itu, Debt to Equity Ratio mengukur perbandingan antara kewajiban dan

ekuitas, yang mencerminkan sejauh mana Pemerintah Daerah memanfaatkan utang dibandingkan dengan modal sendiri dalam mendanai operasional dan pengembangan daerah.

Di sisi lain, rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Perhitungan rasio likuiditas Kabupaten Tanah Laut mencakup rasio lancar (Current Ratio) dan rasio cepat (Quick Ratio). Current Ratio mengindikasikan sejauh mana Pemerintah Daerah dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar secara keseluruhan, di mana semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan likuiditas daerah. Quick Ratio, sebagai indikator yang lebih konservatif, mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan, yang umumnya memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas.

Selain itu, rasio aktivitas juga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pelayanan publik. Salah satu komponen rasio aktivitas yang dianalisis adalah rata-rata umur piutang, yang menunjukkan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengubah piutang menjadi kas, sehingga mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan penerimaan daerah. Selain itu, rata-rata umur persediaan mengukur durasi dana yang tertanam dalam bentuk persediaan sebelum digunakan dalam penyediaan layanan publik. Semakin pendek periode ini, semakin tinggi efisiensi pengelolaan aset daerah.

Tabel 2. 116 Analisis Rasio Neraca Daerah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2020-2024

Rasio	Rumus	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	1.105.524.693.274,91	759.680.679.519,43	929.001.492.664,02	1.205.347.772.253,08	1.398.023.701.045,10
	Kewajiban Jangka Pendek	78.048.688.836,40	77.655.730.591,51	45.004.188.394,46	236.503.253.918,34	120.570.138.813,48
	Rasio Lancar / Current Ratio (%)	1416,46	978,27	2064,26	509,65	1159,51
	Aset Lancar - Persediaan	24.154.425.103,16	27.714.368.100,41	22.842.008.750,19	18.622.756.917,29	24.369.195.012,31
	Kewajiban Jangka Pendek	78.048.688.836,40	77.655.730.591,51	45.004.188.394,46	236.503.253.918,34	120.570.138.813,48
	Rasio Quick / Quick Ratio (%)	30,95	35,69	50,76	7,87	20,21
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	78.048.688.836,40	77.655.730.591,51	45.004.188.394,46	236.503.253.918,34	120.570.138.813,48
	Total Aset	4.249.756.200.583,40	4.308.622.732.865,88	5.036.136.501.789,41	5.301.949.613.413,75	6.188.575.657.249,43
	Rasio Total Hutang / Debt Ratio (%)	1,76	1,80	0,89	4,46	1,95
	Total Hutang	78.048.688.836,40	77.655.730.591,51	45.004.188.394,46	236.503.253.918,34	120.570.138.813,48
	Total Ekuitas	4.356.301.170.846,20	4.230.967.002.274,38	4.991.132.313.394,95	5.065.446.359.495,41	6.068.005.518.435,95
	Rasio Hutang dengan Modal / Debt to Equity Ratio (%)	1,79	1,84	0,90	4,67	1,99
Rasio Aktivitas	Aset Lancar - Persediaan	24.154.425.103,16	27.714.368.100,41	22.842.008.750,19	18.622.756.917,29	24.369.195.012,31
	Rata-Rata Persediaan	20.842.400.959,24	25.934.396.601,79	25.278.188.425,30	20.732.382.833,74	21.495.975.964,80

Rasio	Rumus	2020	2021	2022	2023	2024
	Rata-Rata Umur Persediaan (hari)	315	342	404	406	322
	Piutang daerah	111.019.242.882,63	149.271.857.135,65	100.521.540.171,31	354.766.282.686,25	612.654.523.388,38
	Rata-Rata Piutang	96.133.244.916,99	130.145.550.009,14	124.896.698.653,48	227.643.911.428,78	483.710.403.037,32
	Rata-Rata Umur Piutang (hari)	22	31	21	37	68

Sumber : Neraca Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024, diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas, Dari sisi likuiditas, *Current Ratio* mengalami peningkatan dari 509,65% pada 2023 menjadi 1.159,51% pada 2024, yang mencerminkan penguatan posisi keuangan dengan kenaikan aset lancar menjadi Rp1,39 triliun dan penurunan kewajiban jangka pendek menjadi Rp120,57 miliar. Sementara itu, *Quick Ratio* juga mengalami perbaikan dari 7,87% menjadi 20,21%, yang mengindikasikan ketersediaan aset likuid tanpa persediaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dari aspek solvabilitas, *Debt Ratio* mengalami penurunan dari 4,46% pada 2023 menjadi 1,95% pada 2024, yang menunjukkan proporsi utang terhadap total aset semakin kecil. Selain itu, *Debt to Equity Ratio* juga mengalami perbaikan, turun dari 4,67% menjadi 1,99%, mencerminkan semakin kecilnya ketergantungan terhadap utang dibandingkan dengan ekuitas yang meningkat menjadi Rp6,07 triliun.

Meskipun likuiditas dan solvabilitas menunjukkan tren positif, rasio aktivitas menghadapi tantangan, terutama dalam pengelolaan piutang. Rata-rata umur persediaan menurun dari 406 hari di 2023 menjadi 322 hari di 2024, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam perputaran persediaan. Namun, rata-rata umur piutang mengalami peningkatan signifikan dari 37 hari di 2023 menjadi 68 hari di 2024, yang mengindikasikan perlambatan dalam proses penagihan piutang daerah. Peningkatan piutang daerah dari Rp354,77 miliar menjadi Rp612,65 miliar dalam satu tahun menunjukkan bahwa terdapat tagihan yang belum tertagih dalam jumlah yang cukup besar, yang berpotensi menghambat arus kas pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada 2024 menunjukkan perbaikan dari sisi likuiditas dan solvabilitas, namun memerlukan strategi lebih lanjut dalam optimalisasi pengelolaan piutang daerah. Upaya peningkatan efisiensi penagihan piutang dapat dilakukan melalui mekanisme insentif bagi entitas yang membayar tepat waktu serta penerapan sistem pengelolaan piutang yang lebih efektif. Selain itu, perlu dipertahankan kebijakan pengelolaan utang yang konservatif guna

menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Berikut penyajian data rasio keuangan dalam bentuk grafik:

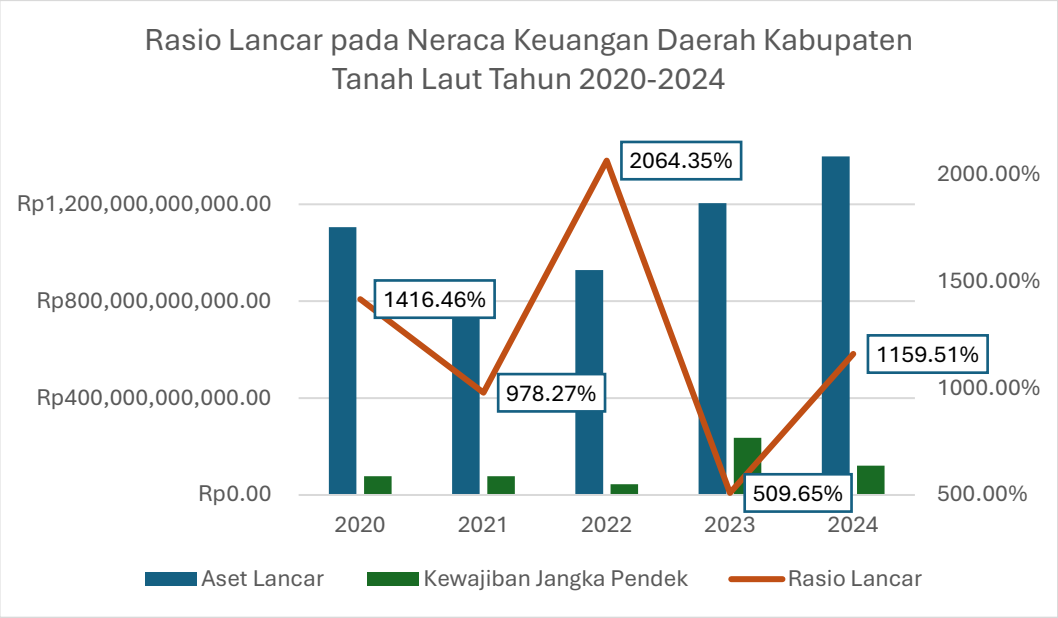

Gambar 2. 50 Rasio Lancar pada Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

Berdasarkan *output current ratio* dalam bentuk grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, rasio lancar berada pada tingkat yang tinggi, mencerminkan kapasitas keuangan yang kuat dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, pada 2021 terjadi penurunan yang mencerminkan peningkatan kewajiban jangka pendek atau penurunan aset lancar. Pada 2022, rasio lancar kembali meningkat secara signifikan, menunjukkan perbaikan kondisi likuiditas daerah. Namun, pada 2023 terjadi penurunan tajam yang mengindikasikan tekanan keuangan akibat lonjakan kewajiban jangka pendek yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan aset lancar. Pada 2024, rasio kembali meningkat, menandakan adanya pemulihan dalam manajemen keuangan daerah.

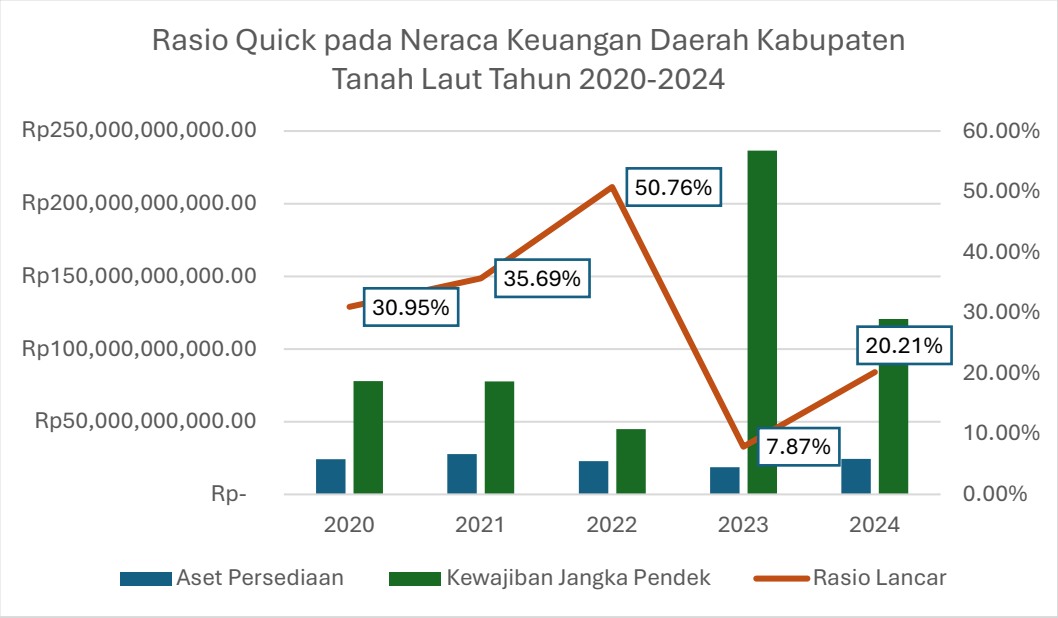

Gambar 2. 51 Rasio Quick pada Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

Berdasarkan *output quick ratio* dalam bentuk grafik di atas menunjukkan bahwa Pada 2020 dan 2021, rasio quick mengalami kenaikan, menunjukkan peningkatan aset likuid yang tersedia dibandingkan kewajiban jangka pendek. Puncaknya terjadi pada 2022, yang mengindikasikan posisi likuiditas yang sangat kuat. Namun, pada 2023 terjadi penurunan tajam, yang mencerminkan peningkatan kewajiban jangka pendek secara signifikan atau penurunan aset likuid. Pada 2024, rasio mulai mengalami pemulihan, meskipun belum kembali ke tingkat optimal seperti pada 2022. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya pengelolaan likuiditas yang lebih stabil agar dapat mengantisipasi lonjakan kewajiban jangka pendek dan menjaga kesehatan keuangan daerah.

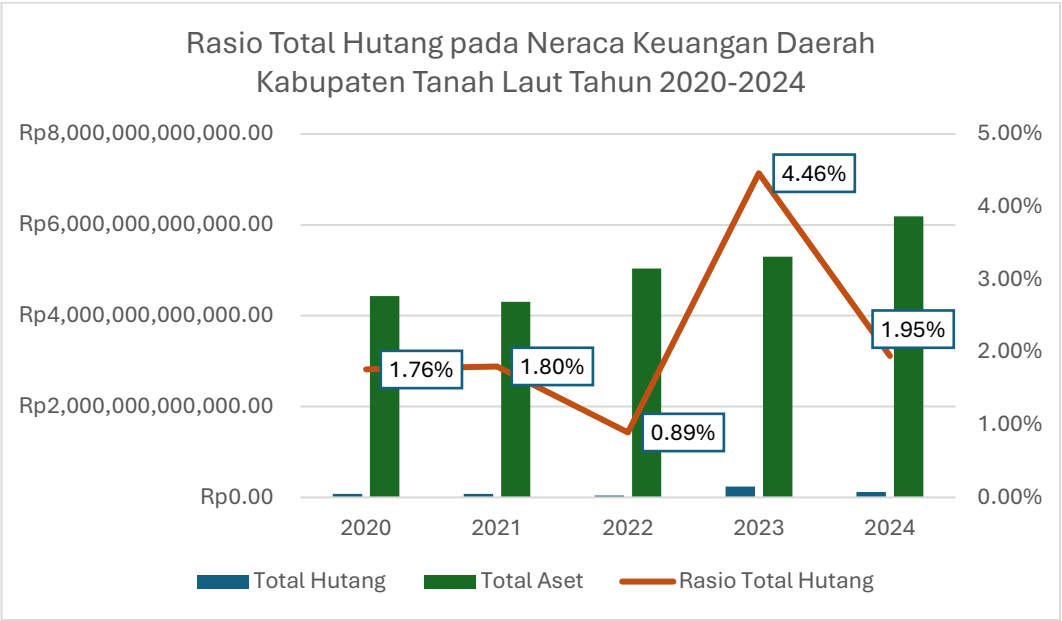

Gambar 2. 52 Rasio Total Hutang pada Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

Berdasarkan *output debt ratio* dalam bentuk grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, rasio hutang berada pada tingkat yang relatif stabil, mencerminkan pengelolaan kewajiban yang terkendali. Namun, pada 2022, rasio mengalami penurunan signifikan, yang dapat mengindikasikan peningkatan aset atau penurunan kewajiban. Pada 2023, terjadi lonjakan rasio hutang yang cukup tajam, menunjukkan adanya peningkatan kewajiban yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan aset. Sementara itu, pada 2024, rasio kembali menurun, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan periode awal. Perubahan yang cukup fluktuatif ini menandakan pentingnya strategi pengelolaan hutang yang lebih stabil agar tidak mengganggu kesehatan keuangan daerah dalam jangka panjang.

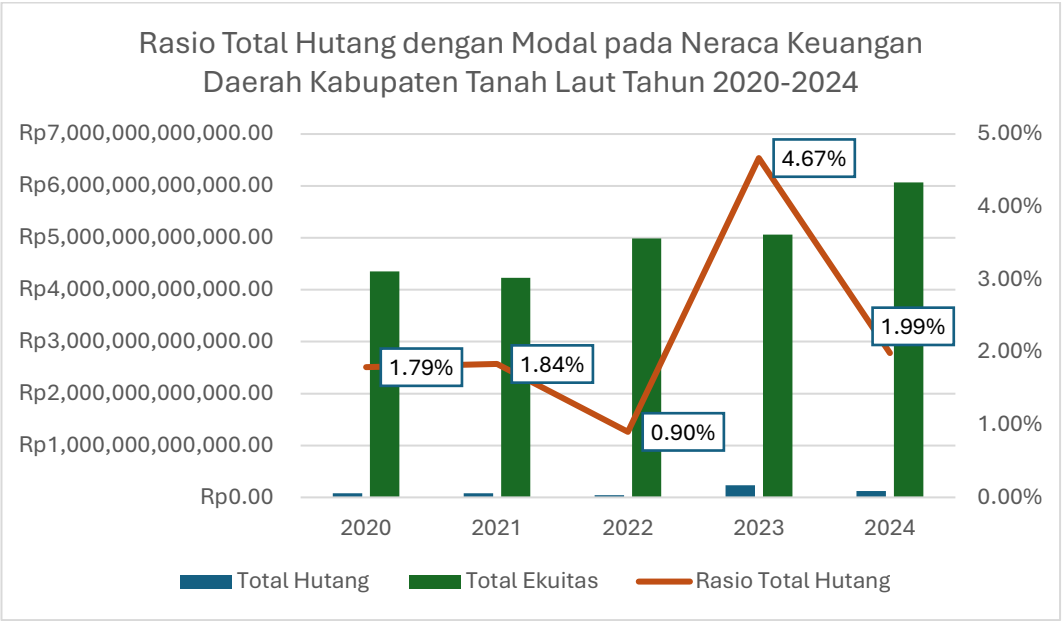

Gambar 2. 53 Total Hutang dengan Modal pada Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

Berdasarkan *output debt to equity* ratio berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, rasio berada pada tingkat yang relatif stabil, menunjukkan bahwa struktur pendanaan masih terjaga dengan baik. Pada 2022, rasio mengalami penurunan yang signifikan, mengindikasikan penguatan ekuitas atau penurunan hutang. Namun, pada 2023, rasio meningkat tajam, menandakan kenaikan kewajiban yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekuitas. Meskipun pada 2024 terjadi sedikit penurunan rasio, nilainya masih lebih tinggi dibandingkan awal periode. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan perlunya kebijakan pengelolaan hutang dan ekuitas yang lebih seimbang untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang

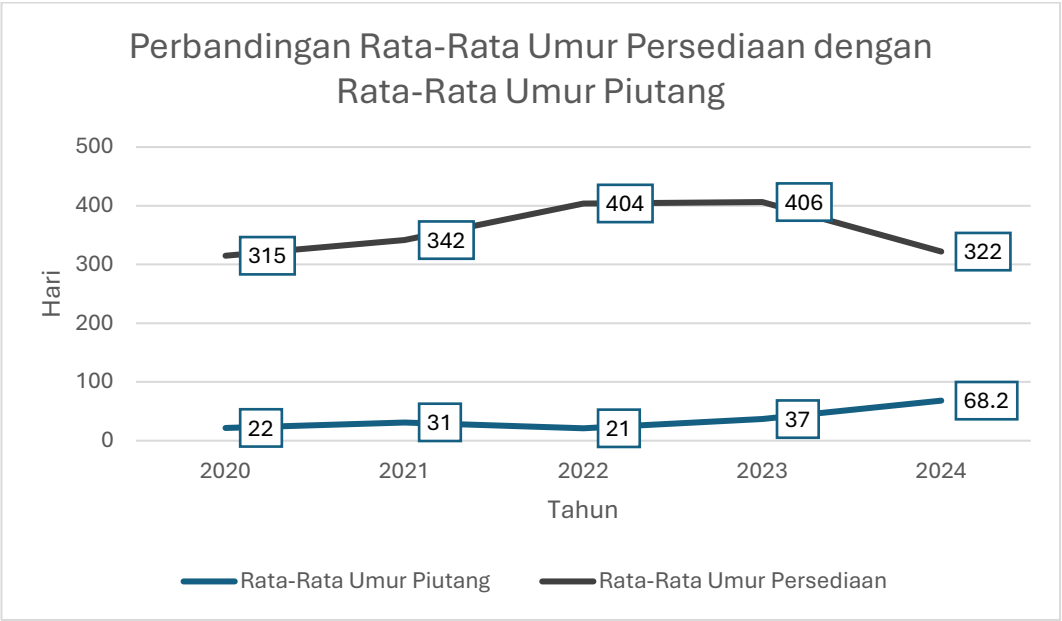

Gambar 2. 54 Perbandingan Rata-Rata Umur Persediaan dengan Rata-Rata Umur Piutang

Pada grafik diatas menggambarkan perbandingan antara rata-rata umur persediaan dengan rata-rata umur piutang dalam periode 2020-2024. Rata-rata umur persediaan menunjukkan jumlah hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan persediaan, sedangkan rata-rata umur piutang mencerminkan waktu yang diperlukan untuk menagih piutang.

Secara umum, rata-rata umur persediaan cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata umur piutang, yang mengindikasikan bahwa barang atau aset yang disimpan dalam persediaan membutuhkan waktu lebih lama untuk digunakan atau dijual dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang. Pada 2022 dan 2023, rata-rata umur persediaan mencapai puncaknya, sedangkan rata-rata umur piutang tetap relatif rendah. Namun, pada 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam rata-rata umur piutang, yang dapat mengindikasikan perlambatan dalam proses penagihan atau kebijakan kredit yang lebih longgar.

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi

keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini :

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.2.2.1 Proporsi Realisasi Belanja Daerah

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Tabel 2. 117 Proporsi Realisasi Belanja Daerah (%), 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
A	Belanja Operasi	79,61	80,80	58,51	89,33	91,56	79,96
1	Belanja Pegawai	79,02	81,10	85,89	87,83	94,10	85,59
2	Belanja Barang Dan Jasa	80,34	79,31	86,20	89,75	88,98	84,92
3	Belanja Hibah	88,52	92,87	94,14	97,40	94,61	93,51
4	Belanja Bantuan Sosial	61,44	81,84	85,49	90,70	94,31	82,76
B	Belanja Modal	187,35	95,00	91,06	89,78	91,49	110,94
1	Belanja Modal Tanah	23,16	7,30	60,99	6,13	53,14	30,14
2	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	116,64	89,19	83,32	90,78	91,82	94,35
3	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	273,45	81,04	93,09	93,69	93,32	126,92
4	Belanja Modal Jalan,Irigasi Dan Jaringan	225,28	87,06	94,12	94,19	90,86	118,30

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
5	Belanja Modala Aset Tetap Lainnya	175,98	1,46	68,13	87,34	86,07	83,80
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	60,44	87,44	84,27	77,38
C	**Belanja Tak Terduga**	**27,63**	**31,46**	**3,33**	**2,44**	**3,04**	**13,58**
1	Belanja Tak Terduga	27,63	31,46	3,33	2,44	3,04	13,58
D	**Belanja Transfer**	**-**	**99,75**	**99,89**	**99,31**	**99,86**	**99,70**
1	Belanja Bagi Hasil	-	100	100	99,79	100	99,95
2	Belanja Bantuan Keuangan	-	99,74	99,89	99,30	99,86	99,70

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan tabel 2.117 di atas, Belanja daerah Kabupaten Tanah Laut dalam periode 2020-2024 menunjukkan pola pengeluaran yang beragam di berbagai kategori belanja. Secara umum, belanja operasi memiliki rata-rata realisasi sebesar 79,96%, dengan komponen terbesar pada belanja pegawai (85,59%) dan belanja barang dan jasa (84,92%). Kategori belanja hibah (93,51%) dan belanja bantuan sosial (82,76%) menunjukkan tingkat realisasi yang relatif tinggi, menandakan prioritas pemerintah dalam mendukung sektor sosial dan hibah kepada masyarakat.

Belanja modal, yang mencerminkan investasi dalam aset daerah, memiliki rata-rata realisasi 110,94%, dengan tren fluktuatif dari 187,35% pada 2020 menjadi 91,49% pada 2024. Subkategori belanja modal gedung dan bangunan (126,92%) serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (118,30%) menunjukkan realisasi tertinggi, mencerminkan prioritas pembangunan infrastruktur. Namun, belanja modal tanah memiliki rata-rata realisasi lebih rendah (30,14%), dengan angka tertinggi pada 2022 (60,99%), yang mungkin mencerminkan perbedaan kebutuhan atau hambatan dalam pengadaan lahan.

Belanja tak terduga mengalami penurunan signifikan, dari 27,63% pada 2020 menjadi hanya 3,04% pada 2024, dengan rata-rata 13,58%. Hal ini

menunjukkan adanya stabilitas yang lebih baik dalam perencanaan anggaran, sehingga kebutuhan akan belanja darurat semakin berkurang.

Sementara itu, belanja transfer, yang mencakup belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, memiliki tingkat realisasi yang sangat tinggi, rata-rata 99,70%. Subkategori belanja bagi hasil hampir selalu mencapai 100%, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyalurkan dana ke pemerintah desa atau pihak terkait secara tepat waktu.

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinsikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Analisis pembiayaan bertujuan untuk

memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Di bawah ini disajikan data tentang analisis pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 2. 118 Penutup Defisit Riil Anggaran (Rp), 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	1.613.752.681.343,77	1.522.901.390.516,55	2.159.239.661.099,87	2.259.475.998.716,28	2.589.821.436.118,39
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	1.535.660.520.668,00	1.894.067.926.592,83	1.863.861.922.192,92	2.243.487.402	2.649.288.130.602,14
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	75.000.000.000,00	58.318.896.928,00	
A.	**Defisit Riil**	**78.092.160.675,77**	**-371.166.536.076,28**	**295.377.738.906,95**	**15.988.595.724,28**	**-59.466.694.483,75**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	922.160.938.434,34	990.302.466.610,11	604.990.188.933,83	831.703.550.940,78	864.623.223.749,06
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	563.000.000,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B.	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**922.160.938.434,34**	**990.302.466.610,11**	**604.990.188.933,83**	**831.703.550.940,78**	**865.186.223.749,06**
A- B	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan	1.010.253.099.110,11	639.135.930.533,83	975.367.927.840,78	3.147.254.959.183,06	805.719.529.265,31

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Laut, 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan data realisasi keuangan Kabupaten Tanah Laut dalam periode tahun 2020 hingga tahun 2024, surplus atau defisit riil dihitung sebagai selisih antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah, ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Selama periode

tersebut, angka sisa lebih atau kurang pembiayaan tahun berkenaan mengalami fluktuasi, dengan pola yang menunjukkan perubahan signifikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2021, terjadi defisit riil sebesar Rp 371.166.536.076,28, yang disebabkan oleh peningkatan belanja daerah yang mencapai Rp 1.894.067.926.592,83, sedangkan pendapatan daerah pada tahun tersebut hanya sebesar Rp 1.522.901.390.516,55. Sementara itu, tahun 2020, 2022, dan 2023 mencatatkan surplus riil, dengan tahun 2022 menunjukkan surplus tertinggi sebesar Rp 295.377.738.906,95. Tahun **2023 mencatatkan surplus lebih kecil, yakni sebesar Rp 15.988.595.724,28, sebelum kembali mengalami defisit sebesar Rp 59.466.694.483,75 pada tahun 2024.

Dari sisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan kapasitas keuangan yang cukup kuat dalam membiayai belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. SiLPA pada tahun 2020 dan 2021 cukup tinggi, yakni masing-masing sebesar Rp 922.160.938.434,34 dan Rp 990.302.466.610,11. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi Rp 604.990.188.933,83, yang mencerminkan adanya peningkatan pengeluaran atau optimalisasi belanja daerah. Pada tahun 2023, SiLPA kembali meningkat menjadi Rp 831.703.550.940,78, menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tren ini berlanjut di tahun 2024, di mana SiLPA mencapai Rp 864.623.223.749,06, didukung oleh realisasi penerimaan pembiayaan daerah yang mencapai Rp 865.186.223.749,06.

Sementara itu, jika melihat total Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan, tren fluktuasi juga terlihat jelas. Pada tahun 2020, jumlahnya mencapai Rp 1.010.253.099.110,11, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp 639.135.930.533,83. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan kembali menjadi Rp 975.367.927.840,78, yang menunjukkan pemulihan kondisi fiskal daerah. Tahun 2023 mencatatkan angka tertinggi,

yakni sebesar Rp 3.147.254.959.183,06, sebelum kembali mengalami penurunan menjadi Rp 805.719.529.265,31 pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, fluktuasi dalam defisit dan surplus riil, serta perubahan pada besaran SiLPA dan sisa pembiayaan tahun berjalan, mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh kebijakan belanja dan optimalisasi pendapatan.

Tabel 2. 119 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahunan Berkenaan (Rp)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Saldo Kas Daerah	962.569.200.331,74	604.990.188.933,83	831.703.550.940,78	864.623.610.237,06	805.719.529.265,31
	Dikurangi					
2.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Akhir Tahun Belum Terselesaikan	-	-	-	-	-
3.	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran		**962.569.200.331,74**	**604.990.188.933,83**	**831.703.550.940,78**	**864.623.610.237,06**	**805.719.529.265,31**

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2021-2024 (diolah)

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain :

1. Penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan harus dijadikan dasar Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA tahun anggaran berkenaan. Pinjaman daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Jika SiLPA tahun berjalan menunjukkan hasil positif dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas

yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya, jika SiLPA tahun berjalan menunjukkan hasil negatif, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2.2.2.2.1 Pembiayaan dan Pendanaan Kreatif Inovatif

Dalam menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks, pemerintah terus mengembangkan pembiayaan kreatif sebagai solusi inovatif untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran negara. Terdapat pembiayaan dan pendanaan kreatif inovatif yang dilakukan Pemerintah Kab Tanah Laut, yaitu :

1. Skema Pendanaan KPBU

Penyediaan infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional.

KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Pengadaan infrastruktur melalui KPBU mengumpulkan semua komponen suatu layanan infrastruktur pada satu kontrak kerjasama, termasuk didalamnya disain, pembangunan, pembiayaan, pemeliharaan, dan operasionalnya. Berikut ini

beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan untuk memanfaatkan skema KPBU:

- Fokus pengadaan pada penyediaan layanan infrastruktur
- Pihak badan usaha/swasta membiayai penyediaan infrastruktur terlebih dahulu, sehingga dapat mengatasi keterbatasan anggaran negara/daerah
- Terdapat ruang bagi badan usaha untuk melakukan inovasi baik pada saat pembangunan infrastruktur maupun inovasi untuk mendorong efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan
- Terdapat pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha
- Kontrak tunggal dengan badan usaha untuk seluruh kegiatan penyediaan infrastruktur
- Tersedia dukungan pemerintah pada tahap persiapan proyek

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, KPBU dilakukan berdasarkan prinsip antara lain:

a. Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
b. Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
c. Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
d. Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
e. Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan

f. Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta.

1. Perbedaan Konvensional dan KPBU

Pada skema pendanaan secara konvensional maka alokasi resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintahan, sedangkan pada pendanaan KPBU terdapat pembagian alokasi tanggung jawab antara pihak pemerintah dan swasta.

Gambar 2. 55 Perbedaan Skema Konvensional dan KPBU

2. Skema KPBU berdasarkan Kementrian Keuangan

Berdasarkan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, terdapat beberapa skema KPBU yang dapat dilakukan antara lain:

a) Kontrak Operasi & Pemeliharaan (Operation & Maintenance (O&M)): Operator swasta/badan usaha, berdasarkan kontrak, mengoperasikan aset milik Pemerintah (mis. Pabrik pengolahan air/air limbah) untuk jangka waktu tertentu. Kepemilikan aset tetap pada pihak Pemerintah.

b) Bangun-Keuangan (Build – Finance (BF)): Swasta/badan usaha membangun aset dan membiayai biaya modal hanya selama periode konstruksi.

c) Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara (Design-Build-Finance-Maintenance (DBFM)): Badan usaha merancang, membangun, membiayai aset dan menyediakan layanan pemeliharaan (hard facilities management) berdasarkan perjanjian jangka panjang.

d) Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara-Operasi (Design-Build-

Finance-Maintain-Operate (DBFMO)): Pihak badan usaha merancang, membangun, membiayai, menyediakan layanan pemeliharaan dan operasi di bawah perjanjian jangka panjang. Pengoperasian aset juga termasuk dalam proyek-proyek seperti ini misalnya pengoperasian jembatan, jalan dan instalasi pengolahan air.

e) Konsesi: Seorang pemegang konsesi pihak swasta/badan usaha melakukan investasi dan mengoperasikan fasilitas untuk jangka waktu tertentu, setelah jangka waktu tersebut kepemilikan kembali ke pihak pemerintah.

Pada gambar sebelumnya dijelaskan gambaran sebuah skema proyek KPBU dengan struktur *Design, Build, Finance, Operate, Maintenance (DBFOM)*. Skema ini memadukan berbagai elemen proyek ke dalam satu kontrak berbasis kinerja. Sebagai contoh model *Design-Build-Finance- Operate-Maintain (DBFOM)* mengintegrasikan pekerjaan lima atau lebih perusahaan ke dalam satu kontrak. Perusahaan-perusahaan ini membentuk *entity* dengan tujuan khusus yang disebut *Special Project Vehicle (SPV)* atau disebut juga Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk menyelesaikan proyek. Model DBFOM adalah model KPBU yang paling komprehensif dan mentransfer risiko terbesar dari sektor publik ke sektor swasta.

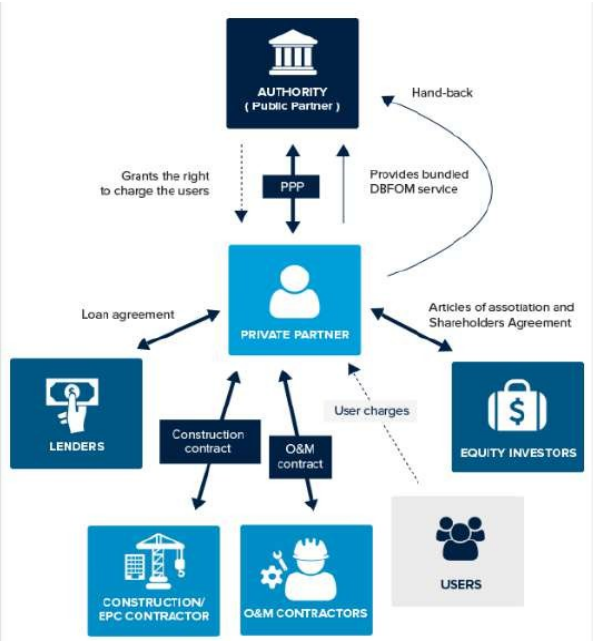

Sumber: https://kpbu.kemenkeu.go.id/

Gambar 2. 56 Skema KPBU Kementrian Keuangan

3. Tahapan KPBU sesuai Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tata cara pelaksanaan KPBU atas prakarsa pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Tim KPBU adalah tim yang dibentuk oleh PJPK yang membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan transaksi hingga tercapai pemenuhan pembiayaan, termasuk membantu Panitia Pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana. KPBU atas Prakarsa Pemerintah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan
   a) Penyusunan rencana anggaran dana KPBU;
   b) Identifikasi dan usulan penetapan KPBU;
   c) Pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU;

d) Penyusunan daftar rencana KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

e) Pengkategorian KPBU

2. Tahap Penyiapan;

a) Penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;

b) Penjajakan Minat Pasar;

c) Pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah;

d) Pengajuan penetapan lokasi KPBU

3. Tahap Transaksi;

a) Konsultasi Pasar;

b) Penetapan lokasi KPBU;

c) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;

d) Penandatanganan Perjanjian KPBU; dan

e) Pemenuhan pembiayaan oleh Badan Usaha Pelaksana

4. Tahap Pelaksanaan Perjanjian KPBU

Tahap pelaksanaan Perjanjian KPBU dilaksanakan dengan tujuan memastikan penyediaan jasa atau layanan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban PJPK dan Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan sesuai Perjanjian KPBU. Tahap pelaksanaan Perjanjian KPBU terdiri atas:

a) Persiapan pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBU;

b) Pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBU

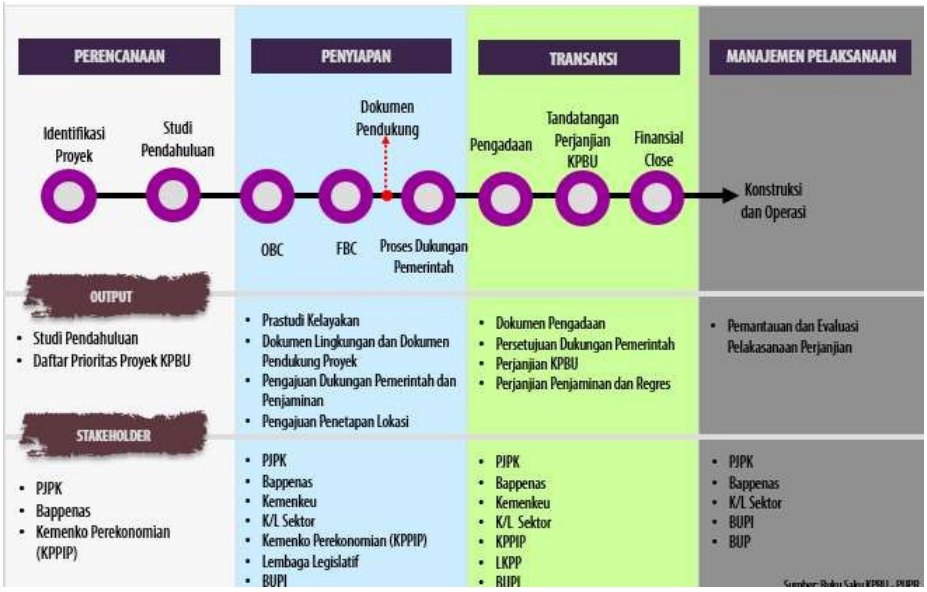

Sumber: Buku Saku KPBU-PUPR

Gambar 2. 57 Tata Cara KPBU atas Prakarsa Pemerintah

Tata cara pelaksanaan KPBU atas prakarsa badan usaha yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, antara lain:

1. Badan Usaha dapat memprakarsai KPBU Penyediaan Infrastruktur.
2. Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a) Usulan KPBU terintegrasi secara teknis dengan rencana teknis sektor yang bersangkutan;
   b) Layak secara ekonomi dan finansial; dan
   c) Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.
3. Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a) Tahap inisiasi;
   b) Tahap penyiapan;

c) Tahap transaksi; dan

d) Tahap pelaksanaan perjanjian KPBU

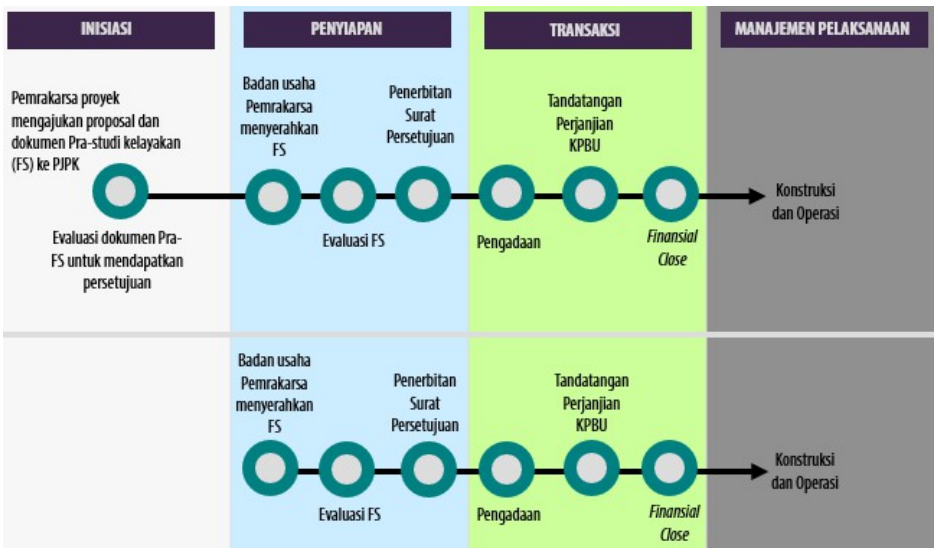

Sumber: Buku Saku KPBU-PUPR

Gambar 2. 58 Tata Cara KPBU atas Prakarsa Badan Usaha

2. Skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

Perdagangan karbon merupakan instrumen ekonomi yang memungkinkan entitas—baik negara maupun perusahaan—untuk membeli dan menjual hak emisi gas rumah kaca (GRK) guna mencapai target pengurangan emisi secara lebih efisien. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission (NZE) 2060, Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) pada 20 Januari 2025. Inisiatif ini mencakup berbagai proyek energi berkelanjutan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro dan pembangkit berbahan bakar gas bumi, yang bertujuan mempercepat dekarbonisasi sektor energi serta mendorong investasi dalam proyek ramah lingkungan.

Dalam implementasinya, perdagangan karbon di Indonesia berlandaskan pada skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022. Skema ini dirancang untuk

memberikan harga atas emisi GRK sehingga dapat mendorong penurunan emisi secara efektif melalui mekanisme pasar yang transparan. NEK mencakup berbagai mekanisme perdagangan karbon, yaitu:

1) **Skema Mekanisme Perdagangan Karbon dalam NEK**

   Cap-and-Trade: Pemerintah menetapkan batas emisi (cap) bagi sektor tertentu. Entitas yang menghasilkan emisi di bawah batas dapat menjual kelebihan izin emisinya kepada pihak lain yang membutuhkan.

   Offset Karbon: Entitas yang melebihi batas emisi dapat membeli kredit karbon dari proyek mitigasi emisi, seperti reforestasi, energi terbarukan, atau efisiensi energi. Kredit karbon yang diperdagangkan harus berasal dari proyek yang telah diverifikasi secara nasional maupun internasional.

   Perdagangan Karbon Luar Negeri: Memungkinkan transaksi unit karbon dengan entitas internasional sesuai regulasi yang berlaku.

   Pajak Karbon: Pengenaan tarif atas emisi yang melebihi batas yang ditentukan, sebagai insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi.

   Sertifikasi Pengurangan Emisi (SPE): Standarisasi bagi proyek yang berhasil mengurangi emisi dan berhak atas kredit karbon.

   Dana Lingkungan dan Pembagian Manfaat: Dana dari perdagangan karbon digunakan untuk mendukung proyek lingkungan dan dekarbonisasi.

2) **Prosedur Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)**

   Penyelenggaraan NEK dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

   1) **Pendaftaran dan Verifikasi**

      Pelaku usaha atau entitas yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan karbon harus melakukan pendaftaran di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Pendaftaran mencakup **inventarisasi emisi GRK**, dokumen proyek mitigasi, serta metodologi penghitungan emisi yang digunakan. Proyek mitigasi dan skema perdagangan karbon yang diajukan akan

diverifikasi oleh lembaga verifikasi independen yang diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

2) **Penerbitan Sertifikasi dan Unit Karbon**

Setelah diverifikasi, proyek yang memenuhi syarat akan mendapatkan Sertifikasi Pengurangan Emisi (SPE). SPE ini akan dikonversi menjadi unit karbon yang dapat diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia atau melalui mekanisme perdagangan langsung (bilateral).

3) **Perdagangan Karbon**

Unit karbon yang telah terdaftar dapat diperdagangkan melalui Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) atau mekanisme perdagangan lainnya. Perdagangan dilakukan sesuai dengan regulasi dan batasan emisi yang telah ditetapkan.

3) **Pemantauan dan Pelaporan**

Setiap entitas yang terlibat dalam perdagangan karbon diwajibkan melakukan **pemantauan dan pelaporan emisi GRK secara berkala**. Laporan tersebut disampaikan ke KLHK melalui Sistem Registri Nasional dan digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas kebijakan perdagangan karbon.

4) **Kepatuhan dan Sanksi**

Entitas yang tidak mematuhi batas emisi yang ditetapkan atau melakukan pelanggaran dalam perdagangan karbon dapat dikenakan **denda atau sanksi administratif** sesuai dengan regulasi yang berlaku.

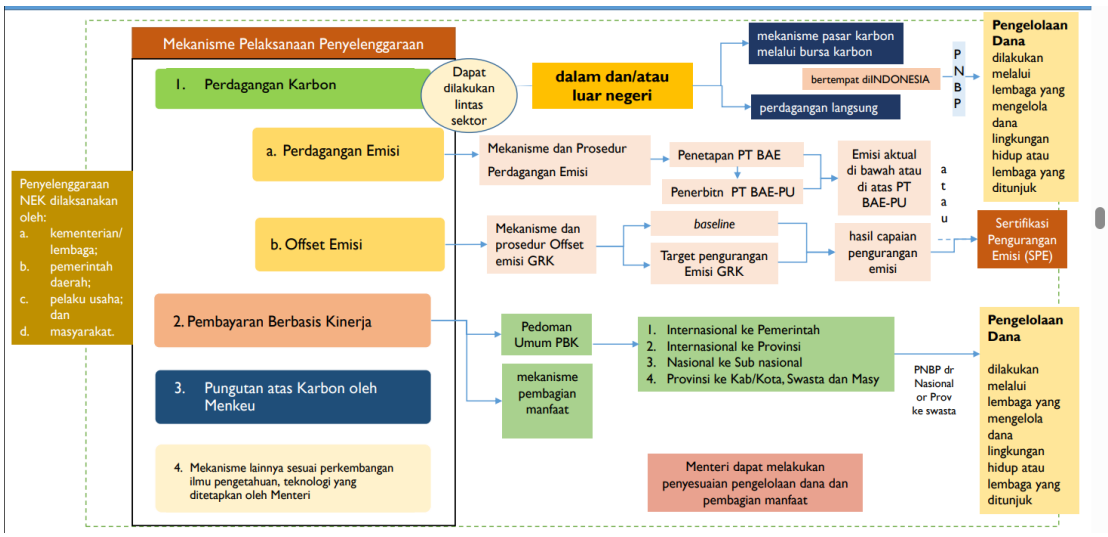

Gambar 2. 59 Alur Penyelenggaraan Ekonomi Karbon

3. Peran Kebijakan Fiskal dalam NEK

Dari sisi regulasi fiskal, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memainkan peran kunci dalam merancang kebijakan perdagangan karbon agar menciptakan ekosistem pasar yang berkelanjutan. Beberapa aspek yang menjadi fokus BKF dalam mendukung implementasi perdagangan karbon meliputi: Pertama, Penyusunan Kebijakan Pajak Karbon: Penetapan tarif pajak untuk sektor tertentu guna memberikan dorongan bagi industri agar mengadopsi teknologi rendah karbon. Kedua, Pengembangan Instrumen Pasar Karbon: Integrasi skema cap-and-trade dan kredit karbon dalam kebijakan fiskal nasional agar perdagangan karbon berjalan lebih efektif.

Ketiga, Pemberian Insentif Fiskal: Dukungan bagi pelaku industri yang berinvestasi dalam proyek mitigasi emisi, guna meningkatkan daya tarik perdagangan karbon bagi sektor swasta. Keempat, Kolaborasi Antar-Kementerian: BKF bekerja sama dengan Kementerian ESDM, KLHK, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan regulasi perdagangan karbon yang terkoordinasi dengan baik.

2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

2.2.3.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan Kabupaten Tanah Laut didasarkan pada analisis pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2018 hingga 2023 serta estimasi pertumbuhan ekonomi untuk lima tahun ke depan. Berdasarkan perhitungan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut diperkirakan mencapai Rp 1,86 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp 1,87 triliun pada tahun 2026. Pada tahun 2027, pendapatan diproyeksikan terus bertambah seiring dengan peningkatan pendapatan dari dana perimbangan dan sumber pendapatan daerah sah lainnya.

Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan terbesar setiap tahun, khususnya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pertumbuhan yang konsisten setiap tahun, dengan kontribusi terbesar dari retribusi daerah dan pajak daerah. Pendapatan transfer antar daerah meningkat setiap tahun, mencerminkan kerjasama antar daerah yang kuat dalam hal pendapatan bagi hasil.

Tabel 2. 120 Proyeksi Pendapatan Daerah (Rp), 2025-2029

Kode Rekening	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
4	**Pendapatan Daerah**	**1.882.355.568.613,00**	**2.159.509.213.402,16**	**2.204.345.753.962,03**	**2.262.666.417.393,30**	**2.310.777.546.916,75**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**250.893.287.513,00**	**262.509.213.402,16**	**272.345.753.962,03**	**295.666.417.393,30**	**308.777.546.916,76**
4.1.01	Pajak Daerah	95.288.064.046,00	98.253.013.227,34	101.226.343.135,68	114.724.716.937,20	124.421.823.636,50
4.1.02	Retribusi Daerah	21.769.854.531,00	22.532.349.154,93	25.231.715.928,96	28.006.504.014,30	28.867.194.075,50
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	118.835.368.936,00	126.723.851.019,89	130.887.694.897,39	137.935.196.441,80	140.488.529.204,76
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.631.462.281.100,00**	**1.887.000.000.000,00**	**1.922.000.000.000,00**	**1.957.000.000.000,00**	**1.992.000.000.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.496.064.281.100,00	1.737.000.000.000,00	1.762.000.000.000,00	1.787.000.000.000,00	1.812.000.000.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.496.064.281.100,00	1.737.000.000.000,00	1.762.000.000.000,00	1.787.000.000.000,00	1.812.000.000.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	813.242.635.100,00	1.047.000.000.000,00	1.057.000.000.000,00	1.067.000.000.000,00	1.077.000.000.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	569.284.360.000,00	575.000.000.000,00	585.000.000.000,00	595.000.000.000,00	605.000.000.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	0	0	0	0
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0	0	0	0	0
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0	0	0
4.2.01.05	Dana Desa	113.537.286.000,00	115.000.000.000,00	120.000.000.000,00	125.000.000.000,00	130.000.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	135.398.000.000,00	150.000.000.000,00	160.000.000.000,00	170.000.000.000,00	180.000.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	135.398.000.000,00	150.000.000.000,00	160.000.000.000,00	170.000.000.000,00	180.000.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0
4.3	**Lain-lain Pendaparan Yang Sah**	**0**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah yang telah disampaikan pada tabel di atas dan berdasarkan target kinerja pembangunan Pemerintah Daerah akan memaksimalkan pendapatan daerah yang sudah diproyeksikan untuk mendanai target pembangunan 5 tahun kedepan.

2.2.3.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi belanja daerah Kabupaten Tanah Laut, dapat dilihat belanja operasi adalah komponen terbesar dalam anggaran, menunjukkan konsistensi dan peningkatan tahunan dalam pengeluaran operasional. Ini mencakup gaji pegawai, pemeliharaan aset, dan operasional lainnya yang rutin. Proyeksi belanja daerah 2026–2030 menunjukkan tren peningkatan dari Rp2,49 triliun menjadi Rp2,54 triliun. Struktur belanja masih didominasi oleh belanja operasi (63% dari total belanja), mencerminkan prioritas pada kebutuhan rutin pemerintahan. Sementara itu, belanja modal mengalami kenaikan bertahap namun tetap terbatas di sekitar 25% dari total anggaran, menandakan perlunya peningkatan investasi infrastruktur.

Belanja tidak terduga tetap dianggarkan Rp25 miliar per tahun sebagai cadangan risiko, sementara belanja transfer untuk desa dan bantuan keuangan daerah stabil di kisaran Rp275 miliar. Namun, defisit anggaran yang terus meningkat hingga Rp621,31 miliar pada 2030 menunjukkan tekanan fiskal yang signifikan. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memperkuat investasi strategis guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Tabel 2. 121 Kebijakan dan Proyeksi Daerah

Kode Rekening	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
5	Belanja Daerah	2.507.408.142.797,00	2.726.765.102.146,16	2.774.638.280.884,03	2.837.108.322.786,30	2.882.097.242.780,75
5.01	Belanja Operasi	1.685.875.940.761,99	1.786.425.271.240,73	1.823.733.040.706,76	1.873.414.489.460,28	1.911.457.283.253,35
5.02	Belanja Modal	489.473.854.392,13	627.427.682.850,00	630.627.564.100,00	634.978.894.200,00	636.759.446.585,00
5.03	Belanja Tidak Terduga	42.707.762.295,88	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	42.707.762.295,88	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
5.04	Belanja Transfer	289.350.585.347,00	287.912.148.055,43	295.277.676.077,27	303.714.939.126,02	308.880.512.942,40
	Belanja Bagi Hasil	10.325.727.575,00	10.712.148.055,43	11.077.676.077,27	12.514.939.126,02	10.680.512.942,40
	Belanja Bantuan Keuangan	279.024.857.772,00	277.200.000.000,00	284.200.000.000,00	291.200.000.000,00	298.200.000.000,00
	Alokasi Dana Desa	165.487.571.772,00	162.200.000.000,00	164.200.000.000,00	166.200.000.000,00	168.200.000.000,00
	Dana Desa	113.537.286.000,00	115.000.000.000,00	120.000.000.000,00	125.000.000.000,00	130.000.000.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-625.052.574.184,00	-567.255.888.744,00	-570.292.526.922,00	-574.441.905.393,00	-571.319.695.864,00

2.2.3.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Dalam konteks penganggaran daerah, pembiayaan daerah mencakup segala penerimaan yang harus dikembalikan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang sedang berjalan maupun dalam proyeksi tahun-tahun berikutnya. Di Kabupaten Tanah Laut, kebijakan pembiayaan daerah untuk periode 2026-2030 terdiri dari dua unsur utama, yaitu penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya serta pengeluaran pembiayaan yang mencakup penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan fluktuasi, dengan angka tertinggi pada 2026 sebesar Rp679,50 miliar sebelum mengalami penurunan hingga Rp621,31 miliar pada 2030. Sebagian besar penerimaan bersumber dari SiLPA, yang mencerminkan ketergantungan daerah pada saldo anggaran yang belum teralokasi, sementara penerimaan dari pengembalian pinjaman daerah menunjukkan tren menurun hingga nihil pada 2029 dan 2030.

SiLPA memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Fungsi utamanya adalah menutupi defisit anggaran ketika realisasi pendapatan lebih kecil dari belanja serta mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan yang menjadi beban belanja langsung. Di sisi pengeluaran, penyertaan modal daerah hanya dilakukan pada 2026 sebesar Rp66 miliar, yang dialokasikan kepada PT. BPD Kalsel, PT. Air Minum Berkah Banua, dan PD. Baratala sebagai bagian dari upaya penguatan BUMD dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan pembiayaan netto yang selalu sama dengan defisit anggaran, daerah mampu menutup kekurangan anggaran tanpa menyisakan pembiayaan yang tidak terserap.

Tabel 2. 122 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
6	Pembiayaan					
6.01	Penerimaan Pembiayaan	691.052.574.184,00	617.255.888.744,00	620.292.526.922,00	624.441.905.393,00	621.319.695.864,00
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	678.615.574.184,00	613.255.888.744,00	614.292.526.922,00	624.441.905.393,00	621.319.695.864,00
6.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.437.000.000,00	4.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	691.052.574.184,00	617.255.888.744,00	620.292.526.922,00	624.441.905.393,00	621.319.695.864,00
6.02	Pengeluaran Pembiayaan	66.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
6.02.02	Penyertaan Modal Daerah	66.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	66.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	625.052.574.184,00	567.255.888.744,00	570.292.526.922,00	574.441.905.393,00	571.319.695.864,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0
	Total APBD	**2.573.408.142.797,00**	**2.776.765.102.146,16**	**2.824.638.280.884,03**	**2.887.108.322.786,30**	**2.932.097.242.780,75**

2.2.3.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menilai kapasitas keuangan aktual daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai program pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Tahap awal adalah mengidentifikasi semua pendapatan daerah yang telah dihitung dan menentukan alokasi sumber pendapatan tersebut. Kapasitas keuangan aktual daerah adalah total pendapatan setelah dikurangi dengan berbagai belanja, pengeluaran pembiayaan yang mengikat, dan prioritas utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Proyeksi APBD tahun 2024-2029 sebenarnya didasarkan pada asumsi penerimaan pendapatan dan pembiayaan aktual yang diharapkan selama lima tahun mendatang, setelah melalui upaya perbaikan yang direncanakan. Begitu juga untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan, proyeksi mempertimbangkan semua pengeluaran termasuk yang diperlukan untuk mendanai program-program strategis dalam lima tahun mendatang. Khusus untuk tahun 2024, proyeksi didasarkan pada APBD tahun tersebut, sementara asumsi untuk tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja, pengeluaran pembiayaan, dan prioritas utama, dapat diproyeksikan kapasitas keuangan aktual Kabupaten Tanah Laut yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama periode 2024-2029. Sisa lebih hasil perhitungan anggaran adalah sisa dari pembiayaan tahun sebelumnya yang dimasukkan dalam pendapatan tahun berikutnya. Nilai kapasitas keuangan aktual yang positif menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendanai pembangunan daerah secara optimal, dengan potensi surplus yang berdampak positif pada pembiayaan pembangunan. Selain itu, Proyeksi keuangan daerah bersifat indikatif dan dapat disesuaikan tahunan.

Tabel 2. 123 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kode Rekening	Uraian	Baseline 2024	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
4	**Pendapatan Daerah**	**2.589.821.436.118,39**	**1.882.355.568.613,00**	**2.159.509.213.402,16**	**2.204.345.753.962,03**	**2.262.666.417.393,30**	**2.310.777.546.916,75**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**238.486.855.600,02**	**250.893.287.513,00**	**262.509.213.402,16**	**272.345.753.962,03**	**295.666.417.393,30**	**308.777.546.916,76**
4.1.01	Pajak Daerah	54.394.829.265,28	95.288.064.046,00	98.253.013.227,34	101.226.343.135,68	114.724.716.937,20	124.421.823.636,50
4.1.02	Retribusi Daerah	89.628.762.442,78	21.769.854.531,00	22.532.349.154,93	25.231.715.928,96	28.006.504.014,30	28.867.194.075,50
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.726.892.282,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	79.736.371.609,96	118.835.368.936,00	126.723.851.019,89	130.887.694.897,39	137.935.196.441,80	140.488.529.204,76
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.351.213.924.517,37**	**1.631.462.281.100,00**	**1.887.000.000.000,00**	**1.922.000.000.000,00**	**1.957.000.000.000,00**	**1.992.000.000.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.157.832.682.073,91	1.496.064.281.100,00	1.737.000.000.000,00	1.762.000.000.000,00	1.787.000.000.000,00	1.812.000.000.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.017.489.066.873,91	1.496.064.281.100,00	1.737.000.000.000,00	1.762.000.000.000,00	1.787.000.000.000,00	1.812.000.000.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.251.555.469.000,00	813.242.635.100,00	1.047.000.000.000,00	1.057.000.000.000,00	1.067.000.000.000,00	1.077.000.000.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	549.460.195.059,00	569.284.360.000,00	575.000.000.000,00	585.000.000.000,00	595.000.000.000,00	605.000.000.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.032.996.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	163.440.405.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	113.968.710.200,00	113.537.286.000,00	115.000.000.000,00	120.000.000.000,00	125.000.000.000,00	130.000.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	193.381.242.443,46	135.398.000.000,00	150.000.000.000,00	160.000.000.000,00	170.000.000.000,00	180.000.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	193.381.242.443,46	135.398.000.000,00	150.000.000.000,00	160.000.000.000,00	170.000.000.000,00	180.000.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**Lain-lain Pendaparan Yang Sah**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Baseline 2024	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
5	**Belanja Daerah**	**2.649.288.130.602,14**	**2.507.408.142.797,00**	**2.726.765.102.146,16**	**2.774.638.280.884,03**	**2.837.108.322.786,30**	**2.882.097.242.780,75**
5.01	**Belanja Operasi**	**1.643.684.005.552,37**	**1.685.875.940.761,99**	**1.786.425.271.240,73**	**1.823.733.040.706,76**	**1.873.414.489.460,28**	**1.911.457.283.253,35**
5.02	**Belanja Modal**	**734.643.176.037,77**	**489.473.854.392,13**	**627.427.682.850,00**	**630.627.564.100,00**	**634.978.894.200,00**	**636.759.446.585,00**
5.03	**Belanja Tidak Terduga**	**887.762.000,00**	**42.707.762.295,88**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**
	Belanja Tidak Terduga	887.762.000,00	42.707.762.295,88	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
5.04	**Belanja Transfer**	**270.073.187.012,00**	**289.350.585.347,00**	**287.912.148.055,43**	**295.277.676.077,27**	**303.714.939.126,02**	**308.880.512.942,40**
	Belanja Bagi Hasil	6.071.025.100,00	10.325.727.575,00	10.712.148.055,43	11.077.676.077,27	12.514.939.126,02	10.680.512.942,40
	Belanja Bantuan Keuangan	264.002.161.912,00	279.024.857.772,00	277.200.000.000,00	284.200.000.000,00	291.200.000.000,00	298.200.000.000,00
	Alokasi Dana Desa	138.336.232.612,00	165.487.571.772,00	162.200.000.000,00	164.200.000.000,00	166.200.000.000,00	168.200.000.000,00
	Dana Desa	113.968.710.200,00	113.537.286.000,00	115.000.000.000,00	120.000.000.000,00	125.000.000.000,00	130.000.000.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	(59.466.694.483,75)	(625.052.574.184,00)	(567.255.888.744,00)	(570.292.526.922,00)	(574.441.905.393,00)	(571.319.695.864,00)
6	**Pembiayaan**						
6.01	**Penerimaan Pembiayaan**	**865.186.223.749,06**	**691.052.574.184,00**	**617.255.888.744,00**	**620.292.526.922,00**	**624.441.905.393,00**	**621.319.695.864,00**
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	864.623.223.749,06	678.615.574.184,00	613.255.888.744,00	614.292.526.922,00	624.441.905.393,00	621.319.695.864,00
6.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	563.000.000,00	12.437.000.000,00	4.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	865.186.223.749,06	691.052.574.184,00	617.255.888.744,00	620.292.526.922,00	624.441.905.393,00	621.319.695.864,00
6.02	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0**	**66.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**
6.02.02	Penyertaan Modal Daerah	0	66.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	66.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	865.186.223.749,06	625.052.574.184,00	567.255.888.744,00	570.292.526.922,00	574.441.905.393,00	571.319.695.864,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	805.719.529.265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total APBD	**2.649.288.130.602,14**	**2.573.408.142.797,00**	**2.776.765.102.146,16**	**2.824.638.280.884,03**	**2.887.108.322.786,30**	**2.932.097.242.780,75**

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan analisis RPJMD teknokratis, Kabupaten Tanah Laut masih menghadapi beberapa tantangan dalam pembangunan daerah, baik dari aspek geografis, kesejahteraan masyarakat, daya saing ekonomi, maupun pelayanan publik. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi adalah:

1. **Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**
   - Indeks Lingkungan Hidup mengalami penurunan berdasarkan data yang di keluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu dari 68,65 pada tahun 2023 menjadi 68,57 pada tahun 2024 dan masih di bawah nilai provinsi yang mengalami peningkatan dengan nilai 75,50 pada tahun 2023 dan 75,73 tahun 2024, menandakan masih banyak permasalahan degradasi lingkungan.
   - Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Tanah Laut masih tergolong risiko sedang yang mendekati ambang tinggi dengan nilai 145,09 pada tahun 2024 berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menunjukkan semakin rentannya wilayah terhadap bencana.
2. **Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**
   - Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan persentase 5,01%, masih di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (5,05%) dan Nasional (5,03%) menurut data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
   - Padsa Tahun 2024, Struktur ekonomi masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian (30,31%), yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.
   - Pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami laju pertumbuhan yang signifikan pada PDRB yang awalnya 2,06 di

tahun 2023 menjadi 7,94 di tahun 2024. Hal ini menandakan adanya potensi yang luar biasa di lapangan usaha tersebut. Walaupun begitu, distribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menempati 16,45% atau peringkat kedua pada pada distribusi PDRB.

- Menurut data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia:
  - Tingkat kemiskinan mengalami peningkatan dari 3,73% (2023) menjadi 3,74% (2024) diikuti bertambahnya penduduk miskin,yaitu dari 13.222 pada tahun 2023 menjadi 13.400 pada tahun 2024 sehingga memerlukan perhatian khusus.
  - Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 3,58% (2023) menjadi 3,43% (2024) harus dilanjutkan agar lebih banyak serapan tenaga kerja yang terserap.
  - Angka Rasio Gini turun sedikit dari 0,259% pada tahun 2023 menjadi 0,257% pada tahun 2024 (-0,002%) sehingga masih membutuhkan dorongan untuk mengurangi kesenjangan.

3. **Sumber Daya Manusia (SDM) dan Daya Saing Daerah**
   - Kualitas pendidikan masih menjadi tantangan, dengan banyaknya sarana pendidikan yang belum sesuai standar dan minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kualitas Sumber daya manusia dan Daya Saing Daerah di Kabupaten Tanah Laut menurut data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tergambar sesuai data di bawah ini:
     - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami tren positif dari 72,98 (2023) menjadi 73,42 (2024), tetapi masih di bawah rata-rata provinsi (75,19) dan nasional (75,02).

- Angka rata-rata lama sekolah tidak mengalami progress yang cukup signifikan dari 2020-2024 (7,88 menuju 7,94). Pun begitu juga angka harapan sekolah yang hanya naik 0,42 poin sepanjang 5 tahun terakhir (2020-2024) secara berurutan, yaitu 12,01 menjadi 12,43.
- Daya saing tenaga kerja rendah, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja hanya 70,22% di 2024, menandakan masih banyaknya kebutuhan untuk menyerap tenaga kerja.

4. **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
    - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 memberikan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 80,45. Berdasarkan hasil penilaian tersebut Pemerintah Daerah perlu lebih mengoptimalkan digitalisasi layanan publik. Selain itu Nilai SPBE masih berada di level menengah, yaitu 3,12 pada tahun 2024, menunjukkan masih perlu digenjotnya transformasi digital.
    - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sudah baik dengan nilai 79,64 pada tahun 2024, namun perlu ditingkatkan lagi agar lebih efektif dalam pemanfaatan anggaran.
    - Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik cukup tinggi (88,41 pada tahun 2024), tetapi perlu upaya peningkatan lagi agar cangkupan pelayanan lebih merata.
    - Indeks inovasi daerah juga kurang ideal dengan nilai 55,71 pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional, pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menciptakan dan mendorong inovasi yang mampu meningkatkan layanan publik.

2.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tanah Laut

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memerhatikan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS RPJMD disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah telah disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis isu strategis dalam KLHS, terdapat 6 isu yang menjadi isu paling strategis, yaitu 1. Pengendalian dan penanganan bencana, 2. Pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, 3. Peningkatan Kualitas lingkungan, 4. Kehidupan sehat dan sejahtera. 5. Peningkatan Sumber daya manusia dan ekonomi hijau, dan 6. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur ramah lingkungan. Rekomendasi KLHS terhadap tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program untuk perumusan RPJMD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 124 Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terhadap RPJMD

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
Menurunnya tingkat kemiskinan	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan layanan dasar.	**Kebijakan Utama: "Pengurangan Kemiskinan Terpadu melalui Peningkatan Kapasitas Ekonomi, Akses Layanan Dasar, dan Pemberdayaan Sosial"** **Program Utama 1: Peningkatan Kapasitas Ekonomi** 1. **Pelatihan dan Pemberdayaan Keterampilan Kerja, yaitu :** Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi untuk kelompok rentan (perempuan, remaja, dan lansia). 2. **Pengembangan Ekonomi Lokal, yaitu :** Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis komunitas. 3. **Dukungan Infrastruktur Ekonomi, yaitu :** Pembangunan fasilitas produksi dan distribusi di kelurahan/desa/RW/RT miskin. **Program Utama 2: Peningkatan Akses Layanan Dasar** 1. **Pendidikan Berkualitas untuk Semua, yaitu :** Penyediaan beasiswa pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin. 2. **Akses Layanan Kesehatan Terjangkau, yaitu :** Penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional untuk keluarga miskin. 3. **Perbaikan Infrastruktur Layanan Dasar, yaitu :** Penyediaan air bersih dan sanitasi untuk rumah tangga miskin.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		Program Utama 3: Pemberdayaan Sosial dan Komunitas **1. Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yaitu :** Program pelatihan keahlian berbasis gender untuk perempuan. **2. Penguatan Komunitas Lokal, yaitu :** Pembentukan kelompok usaha bersama untuk pemberdayaan komunitas. **Program Bantuan Sosial Terintegrasi, yaitu :** Penyaluran bantuan sosial berbasis data terpadu yang responsif gender.
Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Mewujudkan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal guna menciptakan ketenangan kerja dan keberlanjutan kesejahteraan ekonomi.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Mewujudkan inklusi sosial dan perlindungan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas miskin dan rentan, dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak.	• Peningkatan akses dan kualitas pendidikan; • penguatan ekonomi lokal dan inklusif; • pembangunan infrastruktur dan teknologi; • peningkatan layanan Kesehatan dan kesejahteraan sosial; • peningkatan tata Kelola pemerintahan
Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	Mendorong transformasi sosial ekonomi keluarga sangat miskin menuju kemandirian dan pengurangan ketergantungan bantuan sosial secara berkelanjutan.	• Peningkatan akses dan kualitas pendidikan; • penguatan ekonomi lokal dan inklusif; • pembangunan infrastruktur dan teknologi; • peningkatan layanan Kesehatan dan kesejahteraan sosial; peningkatan tata Kelola pemerintahan
Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah	Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak dengan memperluas akses layanan persalinan yang aman dan berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.	• Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan faskes; • penguatan sistem rujukan; • peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; • kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata Kelola pemerintahan
Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah	Mewujudkan perlindungan kesehatan anak melalui peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap sebagai upaya pencegahan penyakit menular pada kelompok masyarakat rentan.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk	Mewujudkan pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
berpendapatan terbawah		
Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah	Menjamin akses air minum layak dan aman bagi seluruh penduduk, terutama kelompok rentan.	**Arah Kebijakan Utama:** **"Peningkatan Akses dan Ketersediaan Air Minum Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Penguatan Infrastruktur, Sistem Distribusi, dan Skema Pembiayaan yang Berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut."** Program dan Kegiatan **1. Program Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Distribusi Air Minum** **Kegiatan:** • **Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Air Bersih di Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah** • **Peningkatan Kapasitas dan Efisiensi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)** • **Pengembangan Teknologi Alternatif Penyediaan Air Minum** **2. Program Subsidi dan Skema Pembiayaan Terjangkau untuk Air Minum Layak** **Kegiatan:** • **Pemberian Subsidi Sambungan Rumah bagi Keluarga Berpenghasilan Rendah** • **Pengembangan Skema Tarif Sosial untuk Rumah Tangga Miskin** • **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa** **3. Program Edukasi dan Kampanye Kesadaran tentang Air Bersih dan Sanitasi** **Kegiatan:** • **Sosialisasi dan Pelatihan tentang Pengelolaan Air Minum Sehat** • **Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)** • **Pemberdayaan Komunitas dalam Pemeliharaan Sarana Air Minum**
Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses sanitasi layak bagi seluruh penduduk.	
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat	Mewujudkan pendidikan dasar yang inklusif dan merata bagi seluruh anak usia sekolah.	**Kebijakan Utama: "Meningkatkan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Dasar untuk Semua Anak Usia Sekolah"** **Program Utama 1: Peningkatan Akses Pendidikan Dasar** **1. Pembangunan dan Renovasi Fasilitas Pendidikan, yaitu :** Membangun sekolah baru di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. **2. Program Bantuan Pendidikan Gratis, yaitu :** Menghapus biaya sekolah untuk keluarga kurang mampu. **3. Pendekatan Komunitas untuk Peningkatan Akses Sekolah, yaitu :** Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendukung pendidikan dasar. **Program Utama 2: Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar** **1. Penguatan Kompetensi Guru, yaitu :** Pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi guru SD/MI/sederajat.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		2. Penyediaan Sumber Belajar Berkualitas, yaitu : Pengadaan buku ajar dan bahan ajar digital berbasis kurikulum. **3. Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pembelajaran, yaitu :** Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap hasil belajar siswa. **Program Utama 3: Penguatan Relevansi Pendidikan Dasar** **1. Integrasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum, yaitu :** Menerapkan program pendidikan karakter melalui kegiatan sehari-hari. **2. Kemitraan dengan Orang Tua dan Masyarakat, yaitu :** Program parenting untuk meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. **Pengembangan Pendidikan Inklusif, yaitu :** Meningkatkan kapasitas sekolah untuk menerima anak berkebutuhan khusus.
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat	Meningkatkan keterjangkauan pendidikan menengah pertama bagi semua kelompok masyarakat.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah	Mewujudkan perlindungan hukum dan identitas hukum bagi seluruh anak.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah	Memastikan akses energi listrik yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.	**Arah Kebijakan Utama:** **"Peningkatan Akses Listrik dan Penerangan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Penguatan Infrastruktur Kelistrikan dan Energi Terbarukan di Kabupaten Tanah Laut."** **1. Program Perluasan Jaringan Listrik dan Infrastruktur Penerangan** **Kegiatan:** • Pembangunan dan Perluasan Jaringan Listrik ke Daerah Terpencil • Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Pemukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah **2. Program Energi Terjangkau dan Berkelanjutan bagi Masyarakat Miskin** **Kegiatan:** • Subsidi Sambungan Listrik bagi Keluarga Berpenghasilan Rendah • Pengembangan dan Distribusi Lampu Tenaga Surya untuk Rumah Tangga Tidak Terjangkau Listrik PLN
Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Menguatkan ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana berbasis lokasi prioritas.	**Arah Kebijakan Utama:** **"Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana melalui Pembangunan Infrastruktur Mitigasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.** 1. Program Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana **Kegiatan:** • Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Mitigasi Bencana • Penyediaan dan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System/EWS)

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Risiko Bencana **Kegiatan:** • Pembentukan dan Penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) • Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas
Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial	Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial secara cepat dan merata.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial	Memberikan perlindungan dan pemulihan kondisi psikososial korban bencana sosial.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	Mewujudkan perlindungan hak pendidikan bagi anak-anak di daerah bencana.	**Kebijakan Utama: "Peningkatan Ketahanan dan Akses Pendidikan Aman bagi Daerah Terdampak Bencana melalui Program Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)"** **Program Utama 1: Penguatan Kapasitas Sekolah/Madrasah dalam Penanggulangan Bencana** 1. **Pelatihan Mitigasi dan Tanggap Darurat Bencana, yaitu :** Pelatihan untuk guru dan tenaga pendidikan tentang tanggap darurat bencana. 2. **Penyediaan Infrastruktur Aman Bencana, yaitu :** Renovasi bangunan sekolah/madrasah agar tahan terhadap risiko bencana. 3. **Integrasi Penanggulangan Bencana dalam Pembelajaran, yaitu :** Pembuatan modul pembelajaran berbasis bencana untuk siswa. **Program Utama 2: Peningkatan Akses Pendidikan bagi Daerah Terdampak Bencana** 1. **Penyediaan Layanan Pendidikan Darurat, yaitu :** Pengoperasian kelas darurat untuk daerah terdampak bencana. 2. **Fasilitasi Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi, yaitu :** Penerapan pembelajaran jarak jauh (online) untuk siswa terdampak. 3. **Transportasi dan Dukungan Logistik Pendidikan, yaitu :** Penyediaan transportasi aman bagi siswa dan guru di daerah bencana. **Program Utama 3: Pemberdayaan Komunitas Sekolah/Madrasah Aman Bencana** 1. **Pembentukan Tim Sekolah/Madrasah Tanggap Bencana (SMTB) , yaitu :** Rekrutmen dan pelatihan tim relawan di setiap sekolah/madrasah. 2. **Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan, yaitu :** Kerjasama dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk program SMAB. 3. **Program Edukasi dan Kesadaran Bencana di Komunitas** Kampanye publik "Sekolah Aman Bencana" untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Mengurangi risiko bencana di kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi.	**Kebijakan Utama: "Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Ketangguhan Pusat Pertumbuhan melalui Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Pemulihan yang Inklusif dan Berkelanjutan"** **Program Utama 1: Penguatan Sistem Mitigasi Risiko Bencana** 1. **Identifikasi dan Pemetaan Risiko Bencana, yaitu :** Penyusunan peta risiko bencana untuk pusat-pusat pertumbuhan. 2. **Penguatan Infrastruktur Mitigasi Bencana, yaitu :** Pembangunan infrastruktur penahan bencana (seperti tanggul banjir dan dinding penahan tanah). 3. **Pengintegrasian Mitigasi Bencana dalam Kebijakan Publik, yaitu :** Revisi rencana tata ruang wilayah dengan fokus pada mitigasi risiko bencana. **Program Utama 2: Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kapasitas Respon Masyarakat** 1. **Edukasi dan Pelatihan Masyarakat, yaitu :** Pelatihan tanggap darurat bencana untuk masyarakat di kawasan pusat pertumbuhan. 2. **Pengembangan Sistem Peringatan Dini, yaitu :** Pemasangan alat peringatan dini bencana (seperti sirene dan sensor gempa). 3. **Penyediaan Logistik dan Fasilitas Darurat, yaitu :** Penyediaan gudang logistik darurat di lokasi strategis. **Program Utama 3: Pemulihan dan Rehabilitasi Berbasis Ketahanan** 1. **Perencanaan Rehabilitasi Berbasis Komunitas, yaitu :** Penyusunan rencana pemulihan pasca-bencana yang melibatkan masyarakat lokal. 2. **Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Pasca-Bencana, yaitu :** Pemberian bantuan ekonomi bagi korban bencana untuk memulai kembali usaha. **Peningkatan Ketahanan Ekonomi Pasca-Bencana, yaitu :** Pemulihan infrastruktur ekonomi strategis di pusat pertumbuhan.
Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Meningkatkan status gizi balita menuju generasi sehat dan produktif.	**Arah Kebijakan Utama:** **"Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi untuk Menurunkan Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Balita di Kabupaten Tanah Laut."** 1. Program Peningkatan Akses dan Ketersediaan Pangan Bergizi **Kegiatan:** • **Penyediaan Makanan Tambahan Bergizi untuk Balita Berisiko Gizi Kurang** • **Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga melalui Program Pemberdayaan Rumah Tangga** 2. Program Edukasi dan Intervensi Gizi Spesifik bagi Ibu dan Anak Balita **Kegiatan:** • **Sosialisasi Pola Makan Sehat dan Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil dan Balita** • **Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu dalam Deteksi dan Penanganan Gizi Kurang**

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan berbasis gizi seimbang.	**Arah Kebijakan Utama:** **"Peningkatan Akses dan Ketersediaan Pangan Bergizi untuk Memenuhi Kebutuhan Kalori Masyarakat Berisiko di Kabupaten Tanah Laut."** 1. Program Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan bagi Masyarakat Rentan **Kegiatan:** • **Distribusi Bantuan Pangan Bergizi bagi Rumah Tangga dengan Asupan Kalori Rendah** • **Pengembangan Program Pangan Mandiri Berbasis Komunitas** 2. Program Edukasi dan Diversifikasi Konsumsi Pangan **Kegiatan:** • Sosialisasi Pola Makan Sehat dan Pemanfaatan Pangan Lokal • Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan Penyuluh Pertanian dalam Gizi dan Ketahanan Pangan
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Mewujudkan generasi sehat dan bebas stunting melalui perbaikan gizi anak.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil	Meningkatkan kesehatan ibu menuju persalinan yang aman dan sehat.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	Mendorong pola pengasuhan bayi sehat melalui pemberian ASI eksklusif.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Mendorong pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang.	**Arah Kebijakan:** Meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan dan ketahanan pangan masyarakat **Program:** 1. **Program Diversifikasi Pangan Lokal** • Kampanye dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) • Pengembangan kebun pangan lestari di lingkungan rumah tangga dan sekolah 2. **Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Bergizi** • Penguatan UMKM pangan berbasis lokal Peningkatan akses pangan sehat melalui penguatan lumbung pangan desa
Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	Mewujudkan layanan kesehatan ibu yang berkualitas untuk menurunkan risiko kematian saat persalinan.	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan faskes; penguatan sistem rujukan; peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; penggunaan teknologi informasi; kolaborasi dengan stakeholder; peningkatan tata Kelola pemerintahan

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil	Menjamin persalinan aman melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terampil.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan akses layanan persalinan yang aman dan bermutu di fasilitas kesehatan.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Menurunkan angka kematian bayi melalui penguatan layanan kesehatan dasar dan gizi anak.	• Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan faskes; • Penguatan sistem rujukan; • Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • Penggunaan teknologi informasi; • Kolaborasi dengan stakeholder; Peningkatan tata Kelola pemerintahan
Meningkatnya persentase kabupaten/ kota	Mendorong pemerataan layanan kesehatan dan perlindungan sosial di seluruh wilayah.	• Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan faskes; • Penguatan sistem rujukan; • Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat; • Penggunaan teknologi informasi; • Kolaborasi dengan stakeholder; • Peningkatan tata Kelola pemerintahan
Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa	Mengendalikan dan menurunkan penyebaran HIV/AIDS melalui pencegahan dan pengobatan.	**Arah Kebijakan:** Peningkatan pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan HIV/AIDS secara terintegrasi. **Program:** • **Penguatan Promosi dan Edukasi HIV/AIDS** **Kegiatan:** 1. Kampanye edukasi dan sosialisasi HIV/AIDS berbasis komunitas dan sekolah. 2. Peningkatan akses dan distribusi alat kontrasepsi (kondom) serta layanan tes HIV gratis. • **Peningkatan Layanan Kesehatan bagi ODHA** **Kegiatan:** 1. Penyediaan layanan tes dan pengobatan HIV (ART) di seluruh puskesmas. 2. Pemberdayaan kader kesehatan dalam mendampingi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB)	Menurunkan kasus TB melalui deteksi dini, pengobatan tuntas, dan pengendalian lingkungan.	**Arah Kebijakan:** Peningkatan penemuan kasus aktif, pengobatan, dan pencegahan penularan TB. **Program:** • **Peningkatan Deteksi dan Pengobatan TB** **Kegiatan:** 1. Penguatan layanan skrining TB di fasilitas kesehatan dan masyarakat berisiko tinggi. 2. Pemberian pengobatan TB yang tepat dan tuntas dengan sistem pemantauan digital. • **Pencegahan dan Pengendalian Faktor Risiko TB** **Kegiatan:** 1. Kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk mencegah penularan TB.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		2. Peningkatan kualitas ventilasi dan sanitasi lingkungan di daerah padat penduduk.
Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	Menghilangkan kasus malaria melalui pencegahan, pengendalian, dan peningkatan layanan kesehatan.	**Arah Kebijakan:** Penguatan pencegahan, pengendalian, dan eliminasi malaria berbasis wilayah endemis. **Program:** • **Eliminasi Malaria melalui Penguatan Surveilans** **Kegiatan:** 1. Pemetaan daerah endemis dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam diagnosis malaria. 2. Peningkatan cakupan deteksi dini dan pengobatan kasus malaria secara cepat dan tepat. • **Pemberantasan Vektor dan Pencegahan Malaria** **Kegiatan:** 1. Penyemprotan insektisida dan distribusi kelambu berinsektisida di daerah rawan malaria. 2. Kampanye masyarakat tentang pencegahan gigitan nyamuk dan peningkatan akses ke fasilitas kesehatan.
Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta	Menghapuskan kasus kusta melalui penguatan sistem layanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis	Menghapuskan filariasis melalui pencegahan dan pengobatan berbasis masyarakat.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun	Mewujudkan generasi muda sehat bebas rokok melalui edukasi dan regulasi ketat.	**Arah Kebijakan:** Penguatan regulasi dan edukasi bahaya merokok bagi anak dan remaja **Program:** 1. **Program Sekolah dan Lingkungan Bebas Rokok** • Implementasi kawasan tanpa rokok (KTR) di sekolah dan tempat umum • Kampanye dan sosialisasi bahaya rokok di lingkungan pendidikan 2. **Program Rehabilitasi dan Intervensi Perokok Anak** • Konseling dan pendampingan bagi anak yang terpapar rokok • Pemberdayaan keluarga dalam pencegahan perokok pemula
Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi	Mendorong pola hidup sehat untuk menurunkan kasus hipertensi pada masyarakat.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Tidak meningkatnya prevalensi obesitas	Mengendalikan peningkatan obesitas melalui promosi pola makan sehat dan aktivitas fisik.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada;

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Meningkatkan akses layanan kesehatan jiwa dalam sistem layanan kesehatan dasar.	**Arah Kebijakan:** Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan jiwa di tingkat puskesmas. **Program:** • **Penguatan Layanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas** **Kegiatan:** 1. Penyediaan tenaga kesehatan jiwa (dokter, perawat, dan psikolog) di puskesmas. 2. Pengadaan ruang layanan kesehatan jiwa serta obat-obatan psikotropika di puskesmas. • **Peningkatan Edukasi dan Pencegahan Gangguan Jiwa** **Kegiatan:** 1. Kampanye kesadaran kesehatan jiwa melalui komunitas dan media sosial. 2. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dan kader masyarakat tentang deteksi dini gangguan jiwa. **2. Meningkatkan Jumlah Kecamatan dengan Eliminasi Malaria** **Arah Kebijakan:** Penguatan pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian malaria secara terpadu. **Program:** • **Eliminasi Malaria melalui Surveilans dan Penanganan Kasus** **Kegiatan:** 1. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan menangani kasus malaria. 2. Peningkatan cakupan deteksi dini dan pengobatan malaria berbasis wilayah rawan. • **Pencegahan Malaria Berbasis Lingkungan dan Masyarakat** **Kegiatan:** 1. Penyemprotan insektisida dan distribusi kelambu berinsektisida di daerah endemis. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian vektor malaria melalui gerakan bersih lingkungan.
Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba	Mewujudkan masyarakat sehat dan produktif melalui pengendalian penyalahgunaan narkoba.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara	Mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program KB modern.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada	Mengoptimalkan penggunaan alat kontrasepsi bagi perempuan rentan untuk perencanaan keluarga sehat.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah		• Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Meningkatkan efektivitas pengendalian kelahiran dengan metode kontrasepsi modern jangka panjang.	• Peningkatan akses dan kualitas • pendidikan; penguatan ekonomi lokal dan inklusif; • pembangunan infrastruktur dan teknologi; • peningkatan layanan Kesehatan dan kesejahteraan sosial; • peningkatan tata Kelola pemerintahan
Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR)	• Mendorong pendewasaan usia perkawinan dan perlindungan kesehatan reproduksi remaja.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Mengendalikan angka kelahiran untuk mendukung perencanaan keluarga sejahtera.	**Kebijakan Utama: "Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui Pendidikan Kesehatan, Akses Layanan Kesehatan Reproduksi, dan Pemberdayaan Perempuan"** **Program Utama 1: Edukasi dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi** 1. **Kampanye Kesadaran Kesehatan Reproduksi, yaitu :** Pelaksanaan kampanye pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah dan komunitas. 2. **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kesehatan, yaitu :** Pelatihan bagi tenaga kesehatan dan penyuluh untuk memberikan edukasi berkualitas. 3. **Peningkatan Kesadaran melalui Pendidikan Berbasis Gender, yaitu :** Peningkatan pengetahuan remaja perempuan tentang hak kesehatan reproduksi. **Program Utama 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Reproduksi** 1. **Penguatan Layanan Keluarga Berencana (KB) , yaitu :** Penyediaan alat kontrasepsi gratis di fasilitas kesehatan pemerintah. 2. **Peningkatan Infrastruktur Layanan Kesehatan Reproduksi, yaitu :** Pembangunan klinik kesehatan reproduksi di wilayah terpencil. 3. **Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, yaitu :** Pelatihan tenaga kesehatan untuk memberikan layanan ramah remaja. **Program Utama 3: Pemberdayaan Perempuan dalam Perencanaan Keluarga** 1. **Program Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, yaitu :** Pelatihan keterampilan kepemimpinan untuk perempuan. 2. **Program Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Anak, yaitu :** Subsidi untuk ibu bekerja agar dapat mengakses layanan penitipan anak. **Fasilitasi Penguatan Ekonomi Perempuan, yaitu :** Program pelatihan keterampilan wirausaha bagi perempuan di usia reproduksi.
Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan	Memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.	**Kebijakan Utama: "Optimalisasi Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan untuk Memenuhi Kebutuhan yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)"**

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		Program Utama 1: Penguatan Infrastruktur dan Akses Layanan Kesehatan **1. Peningkatan Jangkauan Fasilitas Kesehatan, yaitu :** Pembangunan dan revitalisasi pusat kesehatan di wilayah terpencil. **2. Digitalisasi Layanan Kesehatan, yaitu :** Pengembangan platform telemedicine untuk konsultasi jarak jauh. **3. Subsidi dan Insentif untuk Akses Kesehatan, yaitu :** Pemberian kartu jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin. **Program Utama 2: Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Layanan Kesehatan** **1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, yaitu :** Pelatihan khusus untuk dokter, perawat, dan bidan dalam menangani kebutuhan khusus (ibu hamil, anak, lansia). **2. Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan yang Memadai, yaitu :** Pengadaan obat esensial secara merata di seluruh fasilitas kesehatan. **3. Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan, yaitu :** Penyusunan panduan layanan kesehatan berbasis kebutuhan lokal. **Program Utama 3: Edukasi dan Promosi Kesehatan Masyarakat** **1. Kampanye Kesadaran Kesehatan, yaitu :** Program edukasi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. **2. Pembentukan Kelompok Pendukung Kesehatan Masyarakat, yaitu :** Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk mendeteksi kebutuhan kesehatan di komunitas. **Peningkatan Literasi Kesehatan, yaitu :** Penyediaan materi informasi kesehatan yang mudah dipahami dalam berbagai bahasa lokal.
Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Mewujudkan perlindungan kesehatan universal melalui perluasan kepesertaan JKN.	**Arah Kebijakan:** Perluasan kepesertaan JKN bagi seluruh lapisan masyarakat. **Program:** • **Perluasan Akses dan Pendaftaran JKN** **Kegiatan:** 1. Kampanye sosialisasi manfaat dan cara pendaftaran JKN bagi masyarakat kurang mampu. 2. Kolaborasi dengan desa dan kelurahan untuk mendorong pendaftaran JKN bagi warga yang belum terdaftar. • **Optimalisasi Pembiayaan dan Pelayanan JKN** **Kegiatan:** 1. Penyediaan subsidi JKN bagi masyarakat miskin melalui APBD. 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN melalui peningkatan fasilitas dan tenaga medis.
Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui peningkatan akreditasi sekolah.	**Arah Kebijakan:** Peningkatan mutu pendidikan dasar melalui perbaikan sarana, prasarana, dan kualitas tenaga pendidik. **Program:**

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• **Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah** **Kegiatan:** 1. Rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan untuk mendukung standar akreditasi. 2. Penyediaan fasilitas belajar yang sesuai standar akreditasi, termasuk alat peraga dan teknologi pendidikan. • **Penguatan Kompetensi Guru dan Manajemen Sekolah** **Kegiatan:** 1. Pelatihan bagi guru dan kepala sekolah terkait standar pendidikan dan strategi peningkatan mutu pembelajaran. 2. Pendampingan sekolah dalam persiapan akreditasi melalui pelatihan penyusunan dokumen akreditasi dan evaluasi internal.
Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Meningkatkan kualitas pendidikan menengah pertama dengan akreditasi yang lebih baik.	**Kebijakan Utama: "Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Pertama melalui Penguatan Akreditasi, Peningkatan Kualitas Guru, dan Pemenuhan Sarana Prasarana"** **Program Utama 1: Penguatan Akreditasi Sekolah** 1. **Pelatihan dan Pendampingan Akreditasi, yaitu :** Pelaksanaan workshop akreditasi untuk kepala sekolah dan tenaga kependidikan. 2. **Peningkatan Pemahaman Standar Nasional Pendidikan (SNP) , yaitu :** Sosialisasi dan pelatihan SNP bagi seluruh SMP/MTs. 3. **Fasilitasi Proses Akreditasi, yaitu :** Penyediaan dana bantuan operasional khusus untuk proses akreditasi. **Program Utama 2: Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidik** 1. **Pelatihan Profesional Guru, yaitu :** Program pelatihan berbasis kompetensi pedagogik dan profesional. 2. **Penguatan Manajemen Sekolah, yaitu :** Pelatihan manajemen berbasis sekolah untuk kepala sekolah dan staf. 3. **Rekrutmen dan Distribusi Guru Berkualitas, yaitu :** Perekrutan guru dengan kualifikasi minimal S1 pendidikan sesuai bidang studi. **Program Utama 3: Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah** 1. **Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Sekolah, yaitu :** Renovasi ruang kelas yang tidak layak. 2. **Pengadaan Media dan Alat Pembelajaran, yaitu :** Penyediaan buku pelajaran sesuai kurikulum nasional. **Program Pemeliharaan Sarana Prasarana, yaitu :** Inspeksi rutin sarana sekolah untuk memastikan kelayakan fasilitas.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan dasar bagi seluruh anak usia sekolah.	**Kebijakan Utama: "Peningkatan Akses, Kualitas, dan Kesetaraan Pendidikan Dasar untuk Semua Anak"** **Program Utama 1: Peningkatan Akses Pendidikan Dasar** **1. Pembangunan dan Perluasan Infrastruktur Sekolah, yaitu :** Membangun sekolah di daerah terpencil dan sulit dijangkau. **2. Program Beasiswa dan Dukungan Finansial, yaitu :** Penyediaan beasiswa penuh untuk siswa dari keluarga miskin. **3. Peningkatan Ketersediaan Tenaga Pendidik, yaitu :** Penempatan guru-guru berkualitas di daerah terpencil melalui insentif khusus. **Program Utama 2: Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar** **1. Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, yaitu :** Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal. **2. Pengembangan Kapasitas Guru, yaitu :** Pelatihan metode pengajaran kreatif dan berbasis anak. **3. Penguatan Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan, yaitu :** Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap proses pembelajaran. **Program Utama 3: Promosi Kesetaraan dan Inklusivitas dalam Pendidikan** **1. Program Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) , yaitu :** Penyediaan guru pendamping untuk ABK di sekolah reguler. **2. Kampanye Pentingnya Pendidikan Dasar, yaitu :** Kampanye kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui media lokal. **Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan, yaitu :** Program dukungan khusus untuk anak perempuan agar tidak putus sekolah.
Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat	Meningkatkan keterjangkauan dan partisipasi pendidikan menengah pertama.	**Kebijakan Utama: "Peningkatan Akses, Kualitas, dan Kesetaraan Pendidikan Menengah untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat"** **Program Utama 1: Peningkatan Akses Pendidikan Menengah** **1. Penyediaan Infrastruktur Pendidikan, yaitu :** Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di daerah terpencil dan tertinggal. **2. Bantuan Pendidikan untuk Keluarga Kurang Mampu, yaitu :** Pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga tidak mampu. **3. Program Kejar Paket B untuk Anak Putus Sekolah, yaitu :** Pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di setiap kecamatan. **Program Utama 2: Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah** **1. Penguatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu :** Pelatihan intensif berbasis kurikulum untuk guru SMP/MTs. **2. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi, yaitu :** Penyusunan kurikulum adaptif sesuai kebutuhan lokal dan pasar kerja. **3. Penyediaan Fasilitas Pembelajaran Modern, yaitu :** Pengadaan laboratorium sains dan komputer di sekolah.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		Program Utama 3: Kesetaraan Akses untuk Kelompok Rentan 1. **Peningkatan Partisipasi Perempuan di Pendidikan Menengah, yaitu :** Kampanye kesetaraan pendidikan untuk anak perempuan di daerah rawan putus sekolah. 2. **Dukungan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) , yaitu :** Pendirian sekolah inklusi dengan tenaga pendidik khusus. 3. **Pemberdayaan Komunitas untuk Mendukung Pendidikan, yaitu :** Pembentukan kelompok orang tua siswa untuk mendukung pendidikan anak.
Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia.	**Arah Kebijakan:** Peningkatan akses dan kesempatan pendidikan bagi penduduk usia sekolah dan non-formal. **Program:** • Perluasan **Akses Pendidikan Kesetaraan dan Kejar Paket** **Kegiatan:** 1. Peningkatan jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan penyediaan layanan Kejar Paket A, B, dan C. 2. Pemberian beasiswa bagi warga usia sekolah yang putus sekolah untuk kembali belajar. • **Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Pendidikan** **Kegiatan:** 1. Sosialisasi pentingnya pendidikan menengah kepada orang tua dan masyarakat melalui media dan komunitas lokal. 2. Kemitraan dengan dunia usaha untuk mendorong pekerja muda melanjutkan pendidikan formal atau non-formal.
Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatkan akses dan partisipasi anak usia dini dalam pendidikan pra-sekolah.	**Arah Kebijakan:** Perluasan akses dan kualitas layanan PAUD bagi seluruh anak usia dini. **Program:** • **Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas PAUD** **Kegiatan:** 1. Pembangunan dan rehabilitasi gedung PAUD di daerah yang belum memiliki akses pendidikan usia dini. 2. Penyediaan alat permainan edukatif dan bahan ajar yang sesuai standar PAUD. • **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan PAUD** **Kegiatan:** 1. Sosialisasi pentingnya PAUD kepada orang tua melalui kegiatan posyandu dan PKK. 2. Pemberian insentif bagi guru PAUD dan bantuan operasional bagi lembaga PAUD di daerah terpencil.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	Mewujudkan kesetaraan gender dalam partisipasi pendidikan dasar.	**Arah Kebijakan:** Penguatan kebijakan pendidikan yang inklusif dan ramah gender. **Program:** • **Peningkatan Kesetaraan Akses Pendidikan bagi Anak Laki-laki dan Perempuan** **Kegiatan:** 1. Sosialisasi pendidikan setara gender kepada orang tua dan masyarakat untuk mendorong anak perempuan dan laki-laki bersekolah. 2. Penyediaan beasiswa bagi anak perempuan dan anak dari keluarga kurang mampu untuk mengurangi angka putus sekolah. • **Peningkatan Lingkungan Sekolah yang Inklusif dan Ramah Gender** **Kegiatan:** 1. Penguatan program sekolah ramah anak dan penyediaan fasilitas sanitasi yang mendukung kebutuhan siswa perempuan. 2. Pelatihan bagi tenaga pendidik tentang pendidikan inklusif dan kesetaraan gender di sekolah.
Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat dewasa untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.	**Arah Kebijakan:** Perluasan akses program pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk usia dewasa. **Program:** • **Penguatan Program Keaksaraan Dasar dan Fungsional** **Kegiatan:** 1. Peningkatan jumlah dan kualitas program Keaksaraan Fungsional berbasis kebutuhan lokal. 2. Pengintegrasian program melek aksara dengan keterampilan kerja berbasis komunitas. • **Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Literasi** **Kegiatan:** 1. Pemberian insentif bagi tutor keaksaraan dan kader masyarakat yang aktif dalam program literasi. 2. Kampanye literasi berbasis komunitas melalui taman baca masyarakat dan perpustakaan keliling.
Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	Meningkatkan literasi fungsional penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas hidup.	**Arah Kebijakan:** Peningkatan program literasi dan pendidikan berbasis masyarakat untuk usia produktif. **Program:** • **Peningkatan Akses Pendidikan Keaksaraan bagi Penduduk Dewasa** **Kegiatan:** 1. Pelaksanaan kelas literasi dan numerasi bagi pekerja sektor informal di desa-desa. 2. Penyediaan bahan ajar dan metode pembelajaran berbasis teknologi dan budaya lokal. • **Kolaborasi dengan Dunia Usaha dalam Peningkatan Literasi Dewasa** **Kegiatan:**

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		1. Penyediaan kelas melek aksara di tempat kerja bagi buruh dan pekerja sektor informal. 2. Kemitraan dengan perusahaan untuk mendorong program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung peningkatan literasi pekerja.
Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	• Mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Melindungi anak perempuan dari kekerasan dan eksploitasi.	**Arah Kebijakan:** Peningkatan perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan **Program:** 1. **Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak** • Kampanye edukasi dan sosialisasi hak anak di sekolah dan komunitas • Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan aparat desa dalam perlindungan anak 2. **Program Penanganan dan Rehabilitasi Korban Kekerasan** • Peningkatan akses layanan psikososial bagi korban kekerasan • Penyediaan rumah aman (shelter) bagi anak korban kekerasan
Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Meningkatkan akses layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan terhadap perempuan.	Peningkatan layanan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan **Program:** 1. **Program Penguatan Layanan Perlindungan Perempuan** • Peningkatan kapasitas Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) • Penyediaan layanan hotline dan pusat aduan kekerasan 2. **Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan** • Penyediaan layanan psikologis, medis, dan hukum bagi korban • Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan
Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama)	Mendorong pendewasaan usia perkawinan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan perempuan.	**Arah Kebijakan:** Peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak pernikahan dini **Program:** 1. **Program Sosialisasi dan Kampanye Pencegahan Pernikahan Dini** • Kampanye edukasi tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan dan ekonomi • Peningkatan peran tokoh agama dan masyarakat dalam pencegahan pernikahan anak 2. **Program Penguatan Akses Pendidikan dan Pemberdayaan Remaja**

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• Beasiswa dan dukungan pendidikan bagi remaja perempuan • Pemberdayaan remaja melalui program keterampilan dan kewirausahaan
Menurunnya ASFR 15-19 tahun	Mengurangi angka kelahiran remaja melalui pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi.	**Arah Kebijakan:** Peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi remaja **Program:** 1. **Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Remaja** • Edukasi kesehatan reproduksi di sekolah dan komunitas remaja • Penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) 2. **Program Akses Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja** • Peningkatan layanan kesehatan remaja di puskesmas dan posyandu • Penyediaan layanan konseling dan bimbingan bagi remaja dalam perencanaan masa depan
Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.	**Arah Kebijakan:** Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan **Program:** 1. **Program Penguatan Kapasitas Perempuan dalam Politik** • Pelatihan kepemimpinan dan politik bagi perempuan calon legislatif • Kampanye kesetaraan gender dalam politik 2. **Program Fasilitasi dan Pendampingan Perempuan dalam Pemilu** • Peningkatan dukungan bagi perempuan dalam pencalonan legislatif • Pemberdayaan jaringan perempuan untuk advokasi keterwakilan politik
Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di pemerintahan.	**Arah Kebijakan:** Meningkatkan akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan di pemerintahan **Program:** 1. **Program Pengembangan Kepemimpinan Perempuan di Birokrasi** • Pelatihan kepemimpinan dan manajemen bagi pegawai perempuan • Mentoring dan coaching bagi calon pemimpin perempuan 2. **Program Kebijakan Afirmasi bagi Perempuan di Jabatan Struktural** • Penyusunan kebijakan afirmatif untuk peningkatan keterwakilan perempuan • Monitoring dan evaluasi keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis
Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB	Memastikan akses dan pemenuhan kebutuhan keluarga berencana bagi seluruh pasangan usia subur.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis	Meningkatkan literasi kesehatan reproduksi dan pilihan kontrasepsi di kalangan pasangan usia subur.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak	Menjamin ketersediaan dan akses air minum yang aman dan layak bagi seluruh masyarakat.	**Kebijakan Utama: "Peningkatan Akses Air Minum Layak Melalui Pengembangan Infrastruktur, Pemberdayaan Komunitas, dan Kolaborasi Lintas Sektor"** **Program Utama 1: Pengembangan Infrastruktur Air Minum** 1. **Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Air Minum, yaitu :** Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di wilayah dengan akses rendah. 2. **Ekspansi Jaringan Distribusi Air Minum, yaitu :** Perluasan jaringan pipa air bersih ke wilayah RT dan terpencil. 3. **Peningkatan Infrastruktur Air Minum Perumahan dan RT, yaitu :** Modernisasi fasilitas air minum perkotaan dengan teknologi hemat energi. **Program Utama 2: Edukasi dan Pemberdayaan Komunitas** 1. **Kampanye Kesadaran Akan Pentingnya Air Minum Layak, yaitu :** Pelaksanaan program edukasi masyarakat tentang pentingnya air bersih untuk kesehatan. 2. **Pelatihan Pengelolaan Sumber Air Bersih, yaitu :** Pelatihan kepada masyarakat tentang cara memelihara dan mengelola fasilitas air bersih. 3. **Pemberdayaan Perempuan dalam Pengelolaan Air Minum, yaitu :** Melibatkan perempuan dalam komite pengelolaan sumber air di tingkat kelurahan. **Program Utama 3: Kolaborasi Lintas Sektor untuk Keberlanjutan Air Minum Layak** 1. **Kemitraan dengan Lembaga Swasta dan Internasional, yaitu :** Kolaborasi dengan perusahaan swasta untuk pengadaan dan pengelolaan air minum. 2. **Penguatan Regulasi dan Kebijakan Terkait Air Minum, yaitu :** Penyusunan kebijakan yang mendukung penyediaan air bersih berkelanjutan. **Pengembangan Sistem Informasi dan Data Terpadu, yaitu :** Penyusunan peta digital rumah tangga dengan akses air layak.
Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri	• Meningkatkan kapasitas infrastruktur air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak	Menjamin ketersediaan dan akses air minum yang aman dan layak bagi seluruh masyarakat.	Arah Kebijakan: **Peningkatan Infrastruktur dan Tata Kelola Air Minum untuk Memperluas Akses Masyarakat terhadap Layanan Air Minum Layak** **Program 1:** Pengembangan Infrastruktur dan Jaringan Distribusi Air Minum • **Kegiatan 1:** Pembangunan dan rehabilitasi jaringan perpipaan serta sarana penyediaan air bersih di kawasan perdesaan dan permukiman padat. • **Kegiatan 2:** Optimalisasi sumber air baku melalui pembangunan sumur bor, instalasi pengolahan air, dan pemanfaatan air permukaan secara berkelanjutan. **Program 2:** Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum • Kegiatan 1: Pelatihan dan pendampingan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sistem air minum berbasis komunitas. • Kegiatan 2: Kampanye kesadaran tentang pentingnya konservasi air dan penggunaan air minum yang higienis melalui edukasi di sekolah dan komunitas.
Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak	Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang aman dan higienis.	**Kebijakan Utama: "Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Sanitasi Layak melalui Pendekatan Infrastruktur, Pendidikan, dan Pemberdayaan Komunitas"** **Program Utama 1: Pembangunan Infrastruktur Sanitasi** 1. **Pembangunan Fasilitas Sanitasi Dasar, yaitu :** Pembangunan toilet umum yang layak di wilayah padat penduduk dan miskin. 2. **Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, yaitu :** Instalasi septic tank komunal untuk masyarakat miskin di tingkat RT. 3. **Fasilitasi Infrastruktur Sanitasi Mandiri, yaitu :** Subsidi material dan alat untuk pembangunan toilet rumah tangga. **Program Utama 2: Pendidikan dan Sosialisasi Sanitasi Layak** 1. **Kampanye Kesadaran Sanitasi, yaitu :** Kampanye "Hidup Sehat dengan Sanitasi Layak" di tingkat komunitas. 2. **Edukasi Sanitasi di Sekolah, yaitu :** Pelatihan sanitasi sehat bagi guru dan siswa di sekolah dasar. 3. **Pelibatan Pemangku Kepentingan, yaitu :** Pelatihan sanitasi untuk tenaga penyuluh lapangan. **Program Utama 3: Pemberdayaan Komunitas untuk Sanitasi Layak** 1. **Pembentukan Kelompok Pengelola Sanitasi Komunitas, yaitu :** Pembentukan dan pelatihan kelompok warga untuk pengelolaan fasilitas sanitasi. 2. **Pengembangan Program Sanitasi Berbasis Gender, yaitu :** Pelatihan sanitasi layak untuk perempuan sebagai agen perubahan komunitas.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		Insentif bagi Komunitas Sanitasi Layak, yaitu : Pemberian penghargaan untuk komunitas yang mencapai 100% akses sanitasi layak.
Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	• Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya sanitasi total untuk meningkatkan kesehatan lingkungan.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal	Membangun sistem pengelolaan air limbah terpusat untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.	Arah Kebijakan Utama: **"Penguatan Infrastruktur dan Pengelolaan Air Limbah Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kualitas Air dan Lingkungan di Kabupaten Tanah Laut."** 1. Program Pengembangan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Terpusat dan Setempat **Kegiatan:** 1. **Pembangunan dan Optimalisasi Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat dan Komunal** • Membangun infrastruktur air limbah skala kota, kawasan, dan komunal untuk meningkatkan akses sanitasi dan mengurangi pencemaran lingkungan. 2. **Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Penguatan Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja** • Membangun dan meningkatkan kapasitas IPLT serta sistem pengangkutan lumpur tinja di wilayah perkotaan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan air limbah domestik.
Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Meningkatkan pengelolaan air limbah domestik melalui pembangunan dan pengoperasian IPLT.	
Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air	Meningkatkan pengelolaan dan pemantauan kualitas air untuk menjaga ekosistem perairan.	Program Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air dan Monitoring Hidrologis **Kegiatan:** 1. **Pemulihan dan Restorasi Ekosistem Perairan untuk Meningkatkan Kualitas Air** • Melakukan rehabilitasi sungai, waduk, danau, dan kawasan pesisir melalui penghijauan, pembersihan sampah, dan pengurangan sumber pencemaran. 2. **Penguatan Sistem Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Secara Berkelanjutan** • Mengembangkan sistem monitoring kualitas air dengan sensor otomatis dan laboratorium lingkungan untuk memastikan air mencapai baku mutu yang aman.
Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	Meningkatkan kualitas air sungai untuk memenuhi standar baku mutu sebagai sumber air baku.	Arah Kebijakan Utama: **"Pengelolaan dan Restorasi Sungai Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kualitas Air Sungai sebagai Sumber Air Baku di Kabupaten Tanah Laut."** 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Restorasi Sungai **Kegiatan:** 1. **Pengurangan Sumber Pencemaran Sungai melalui Pengelolaan Limbah Domestik dan Industri**

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan limbah rumah tangga dan industri serta mendorong penerapan sistem pengolahan limbah yang sesuai standar lingkungan. 2. **Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Penghijauan Bantaran Sungai** • Melakukan penanaman pohon di daerah tangkapan air, membangun buffer zone, serta mencegah erosi dan sedimentasi untuk meningkatkan daya dukung ekosistem sungai. 2. Program Monitoring dan Penguatan Tata Kelola Kualitas Air Sungai **Kegiatan:** 1. **Peningkatan Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai secara Berkala** • Mengembangkan sistem monitoring berbasis sensor otomatis dan laboratorium lapangan untuk mengevaluasi kualitas air sungai secara real-time. 2. **Pemberdayaan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sungai** • Mengadakan kampanye edukasi, pelibatan komunitas lokal, serta kerja sama dengan dunia usaha dalam program adopsi sungai dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).	Mendorong efisiensi penggunaan air dan pemanfaatan air limbah yang aman dalam sektor pertanian dan industri.	Program Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Air **Kegiatan:** 1. **Penguatan Sistem Monitoring Kualitas Air dan Restorasi Ekosistem Perairan** • Meningkatkan pemantauan kualitas air di sungai, waduk, dan muara sungai serta melakukan rehabilitasi ekosistem untuk mencapai baku mutu air sungai kelas II. 2. **Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Pemanfaatan Air Limbah yang Aman untuk Pertanian** • Memberikan insentif bagi sektor pertanian, perkebunan, dan industri dalam menerapkan penghematan air serta mendorong pemanfaatan air limbah yang telah diolah untuk pertanian yang aman.
Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Mengintegrasikan pengelolaan daerah aliran sungai ke dalam perencanaan tata ruang wilayah.	Program Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan Tata Ruang Wilayah **Kegiatan:** 1. **Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) ke dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut** • Memastikan integrasi 108 RPDAST ke dalam kebijakan RTRW untuk mendukung pengelolaan DAS yang berkelanjutan dan mengurangi risiko degradasi lingkungan. 2. **Penguatan Konservasi Sumber Daya Air melalui Rehabilitasi dan Perlindungan Daerah Resapan Air**

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• Melakukan penghijauan dan perlindungan daerah tangkapan air untuk meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah serta menjaga keseimbangan ekosistem air.
Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	Membangun sistem informasi sumber daya air untuk mendukung pengelolaan terpadu di wilayah sungai.	**Arah Kebijakan:** **Penguatan Sistem Informasi dan Monitoring Sumber Daya Air untuk Pengelolaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan** **Program 1:** Pengembangan Sistem Informasi Hidrologi dan Sumber Daya Air Terpadu • **Kegiatan 1:** Pembangunan dan pemasangan stasiun pemantauan debit dan kualitas air di 8 Wilayah Sungai. • **Kegiatan 2:** Pengembangan sistem berbasis digital untuk pengolahan dan penyajian data sumber daya air secara real-time. **Program 2:** Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pengelolaan Data Sumber Daya Air • **Kegiatan 1:** Pelatihan bagi pemangku kepentingan (pemerintah, komunitas, dan swasta) dalam pemanfaatan sistem informasi sumber daya air. • **Kegiatan 2:** Pembentukan forum koordinasi antar sektor untuk berbagi data dan informasi sumber daya air.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam konservasi dan pengelolaan daerah tangkapan air.	**Kebijakan Utama: "Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daerah Tangkapan Sungai dan Danau untuk Mendukung Keberlanjutan Ekosistem"** **Program Utama 1: Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Lingkungan** 1. **Kampanye Kesadaran Lingkungan Berbasis Komunitas, yaitu :** Sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan daerah tangkapan air kepada masyarakat lokal. 2. **Pelatihan Masyarakat tentang Konservasi dan Pengelolaan Air, yaitu :** Pelatihan pengelolaan daerah tangkapan air bagi kelompok masyarakat lokal. 3. **Integrasi Pendidikan Lingkungan di Sekolah, yaitu :** Penerapan kurikulum lokal berbasis konservasi sungai dan danau. **Program Utama 2: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS dan Danau** 1. **Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli DAS (MPDAS), yaitu :** Identifikasi dan pembentukan kelompok masyarakat peduli sungai di setiap wilayah DAS. 2. **Pengembangan Program Ekowisata Berbasis Masyarakat, yaitu :** Pelatihan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata di sekitar sungai dan danau. 3. **Kemitraan dengan Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah, yaitu :** Kerjasama program penghijauan dengan perusahaan melalui CSR (Corporate Social Responsibility). **Program Utama 3: Rehabilitasi dan Monitoring Daerah Tangkapan Air**

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		1. Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air, yaitu : Penanaman vegetasi di lahan kritis di sekitar sungai dan danau. **2. Penguatan Sistem Monitoring Partisipatif, yaitu :** Pelibatan masyarakat dalam pemantauan kualitas air sungai dan danau secara berkala. **Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan, yaitu :** Instalasi biofilter untuk mengurangi polusi air dari limbah domestik.
Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang-ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan ke-mampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	Menguatkan kelembagaan pengelolaan sumber daya air di semua tingkat pemerintahan.	**Kebijakan Utama: "Optimalisasi Penataan Kelembagaan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dan Terintegrasi"** **Program Utama 1: Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air** **1. Restrukturisasi Kelembagaan Pengelola Air, yaitu :** Penyusunan regulasi yang memperjelas tugas dan fungsi lembaga pengelola sumber daya air di tingkat nasional dan daerah. **2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) , yaitu :** Pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli di bidang sumber daya air. **3. Kolaborasi Antar Kelembagaan, yaitu :** Pembentukan forum komunikasi dan koordinasi lintas sektor pengelolaan sumber daya air. **Program Utama 2: Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air** **1. Pengembangan Data dan Informasi Terintegrasi, yaitu :** Penyusunan basis data sumber daya air berbasis GIS (Geographic Information System). **2. Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Air, yaitu :** Instalasi sistem monitoring otomatis untuk pengelolaan kualitas dan kuantitas air. **3. Penguatan Sistem Peringatan Dini, yaitu :** Penerapan teknologi untuk peringatan dini banjir dan kekeringan. **Program Utama 3: Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air Berbasis Wilayah** **1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Air Terpadu, yaitu :** Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air berbasis DAS (Daerah Aliran Sungai). **2. Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Air, yaitu :** Pelaksanaan program reboisasi di daerah tangkapan air. **Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya Air, yaitu :** Penerapan teknologi hemat air di sektor pertanian dan industri.
Bauran energi terbarukan mencapai 10-16%	Mendorong penggunaan energi terbarukan dalam bauran energi nasional.	**Arah Kebijakan:** **Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagai Sumber Energi Alternatif yang Berkelanjutan** **Program 1:** Pembangunan Infrastruktur dan Pemanfaatan Energi Terbarukan • **Kegiatan 1:** Pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di fasilitas publik dan perdesaan. • **Kegiatan 2:** Pengembangan biogas dari limbah pertanian dan peternakan untuk energi rumah tangga dan industri kecil. **Program 2:** Peningkatan Insentif dan Kemitraan dalam Pengembangan Energi Terbarukan

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• **Kegiatan 1:** Penyediaan insentif bagi industri dan rumah tangga yang beralih ke energi terbarukan. • **Kegiatan 2:** Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta dalam riset dan inovasi teknologi energi terbarukan.
Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun)	Mendorong efisiensi energi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	**Arah Kebijakan:** **Peningkatan Efisiensi dan Penghematan Energi di Berbagai Sektor** **Program 1:** Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Hemat Energi di Sektor Publik dan Industri • **Kegiatan 1:** Audit energi di sektor industri dan perkantoran untuk mengidentifikasi peluang efisiensi energi. • **Kegiatan 2:** Penggantian lampu penerangan jalan umum dan fasilitas publik dengan lampu LED hemat energi. **Program 2:** Kampanye Kesadaran dan Penerapan Konservasi Energi di Masyarakat • **Kegiatan 1:** Sosialisasi dan edukasi tentang hemat energi melalui media sosial, seminar, dan pelatihan komunitas. • **Kegiatan 2:** Penyediaan program insentif bagi rumah tangga yang mengadopsi peralatan listrik berstandar efisiensi energi tinggi.
Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta	• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis peningkatan PDB per kapita.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat	Mendorong produktivitas tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.	**Arah Kebijakan:** **Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui Penguatan Keterampilan dan Sektor Ekonomi Unggulan** **Program 1:** Pengembangan SDM dan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja • **Kegiatan 1:** Pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri lokal melalui Balai Latihan Kerja (BLK). • **Kegiatan 2:** Penyediaan program magang dan sertifikasi bagi tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja. **Program 2:** Penguatan Sektor Ekonomi Produktif dan UMKM • **Kegiatan 1:** Pemberian insentif dan pendampingan usaha bagi sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif berbasis teknologi. • **Kegiatan 2:** Fasilitasi akses pasar dan digitalisasi usaha kecil untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekerja.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
Persentase tenaga kerja formal mencapai 51%	Mendorong peningkatan proporsi tenaga kerja formal untuk perlindungan sosial.	**Arah Kebijakan:** **Mendorong Pertumbuhan Lapangan Kerja Formal melalui Regulasi dan Insentif bagi Dunia Usaha** **Program 1:** Peningkatan Kesempatan Kerja di Sektor Formal • **Kegiatan 1:** Pemberian insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja formal. • **Kegiatan 2:** Pengembangan kawasan industri dan ekonomi kreatif untuk memperluas lapangan kerja formal. **Program 2:** Perlindungan Tenaga Kerja dan Kepastian Status Kerja • **Kegiatan 1:** Sosialisasi dan penegakan regulasi ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja formal. • **Kegiatan 2:** Fasilitasi program alih status dari tenaga kerja informal menjadi formal melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25%	Meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM.	**Arah Kebijakan:** **Peningkatan Akses dan Literasi Keuangan bagi UMKM melalui Inklusi Keuangan dan Digitalisasi** **Program 1:** Fasilitasi Akses Kredit dan Pendanaan bagi UMKM • **Kegiatan 1:** Pengembangan skema kredit mikro dengan bunga rendah bagi pelaku UMKM melalui bank daerah dan koperasi. • **Kegiatan 2:** Penyederhanaan prosedur perizinan usaha untuk mempermudah akses kredit dan modal usaha. **Program 2:** Peningkatan Literasi Keuangan dan Digitalisasi UMKM • **Kegiatan 1:** Pelatihan literasi keuangan dan manajemen usaha bagi pelaku UMKM. • **Kegiatan 2:** Pendampingan digitalisasi usaha melalui pemanfaatan e-commerce dan sistem pembayaran digital.
Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	Meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja rentan untuk akses pasar kerja.	**Kebijakan Utama** **"Optimalisasi Pemberdayaan Generasi Muda untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Peningkatan Keterampilan di Kabupaten Tanah Laut"** **Program 1: Akses Pendidikan dan Pelatihan yang Inklusif** **Kegiatan:** • **Program Beasiswa Pendidikan dan Pelatihan, yaitu :** Memberikan beasiswa khusus untuk melanjutkan pendidikan atau pelatihan vokasi kepada pemuda dari keluarga tidak mampu. • **Pendirian Pusat Pelatihan Keterampilan Lokal (Vocational Training Center) , yaitu :** Membuka pusat pelatihan yang menyediakan kursus teknis seperti pengelasan, tata boga, desain grafis, dan keterampilan lain yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. • **Kolaborasi dengan Dunia Usaha untuk Pelatihan Kerja, yaitu :** Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan program magang

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		dan pelatihan kerja bagi pemuda di Kabupaten Tanah Laut. **Program 2: Peningkatan Kesempatan Kerja dan Wirausaha Pemuda** **Kegiatan:** • **Program Insentif Usaha Mikro untuk Pemuda, yaitu :** Memberikan modal usaha awal, bimbingan usaha, dan pendampingan kepada pemuda untuk memulai usaha mikro atau kecil. • **Pusat Karir dan Bursa Kerja Pemuda, yaitu :** Membuka layanan pusat karir di setiap kecamatan untuk membantu pemuda menemukan pekerjaan, mendapatkan informasi pasar kerja, dan membuat CV. • **Pelatihan Wirausaha Berbasis Komunitas, yaitu :** Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan di tingkat desa/kelurahan untuk membantu pemuda memanfaatkan potensi lokal dalam menciptakan lapangan kerja. **Program 3: Kampanye Kesadaran dan Pemberdayaan Sosial** **Kegiatan:** • **Kampanye "Generasi Mandiri Tanah Laut", yaitu :** Melakukan kampanye terpadu melalui media sosial, televisi lokal, dan komunitas untuk menyadarkan pemuda tentang peluang pendidikan, pelatihan, dan kerja. • **Pembangunan Komunitas Pemuda Kreatif, yaitu :** Membentuk forum atau komunitas pemuda untuk berbagi pengalaman, ide, dan inspirasi terkait pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. • **Penyuluhan dan Bimbingan Karir di Sekolah dan Komunitas, yaitu :** Memberikan penyuluhan tentang pilihan karir, pentingnya keterampilan, dan peluang pelatihan kepada siswa sekolah menengah atas dan pemuda yang putus sekolah.
Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah.	**Kebijakan Utama** **"Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut"** **Program 1: Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan** **Kegiatan:** • **Revitalisasi dan Peningkatan Infrastruktur Destinasi Wisata, yaitu :** Peningkatan fasilitas di destinasi wisata utama, seperti akses jalan, tempat parkir, toilet, pusat informasi, dan fasilitas keamanan. • **Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal, yaitu :** Promosi dan pengembangan produk wisata budaya, kuliner, dan kerajinan khas Tanah Laut yang melibatkan masyarakat setempat. • **Pengelolaan Ekowisata Berbasis Komunitas, yaitu :** Pengembangan ekowisata di kawasan hutan, pantai, dan sungai dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pelaku utama.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		Program 2: Promosi dan Pemasaran Wisata Terintegrasi **Kegiatan:** • **Pembuatan Platform Digital Pariwisata, yaitu :** Pengembangan aplikasi atau website resmi yang menampilkan informasi lengkap tentang destinasi, acara, dan paket wisata di Tanah Laut. • **Promosi Melalui Media dan Event Wisata, yaitu :** Kampanye promosi melalui media sosial, influencer, dan partisipasi dalam pameran pariwisata nasional maupun internasional. • **Penyelenggaraan Festival Budaya dan Pariwisata, yaitu :** Mengadakan acara tahunan seperti festival budaya, festival kuliner, atau lomba olahraga air untuk menarik wisatawan. **Program 3: Penguatan SDM dan Kemitraan Pariwisata** **Kegiatan:** • **Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata, yaitu :** Pelatihan untuk pemandu wisata, pengelola hotel, dan pelaku UMKM terkait standar layanan pariwisata. • **Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Investor, yaitu :** Mendorong kolaborasi dengan perusahaan swasta, hotel, restoran, dan investor untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan atraksi wisata. • **Pendampingan UMKM Pariwisata, yaitu :** Program pendampingan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, kemasan, dan pemasaran yang mendukung sektor pariwisata.
Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta	Mengembangkan potensi pariwisata daerah untuk menarik wisatawan mancanegara.	Arah Kebijakan Utama: "Pengembangan Pariwisata Berdaya Saing Internasional dengan Peningkatan Aksesibilitas, Daya Tarik, dan Promosi Destinasi di Kabupaten Tanah Laut." **Program dan Kegiatan** **1. Program Pengembangan Destinasi Wisata Bertaraf Internasional** **Kegiatan:** • Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas di Destinasi Wisata • Pengembangan Wisata Berbasis Alam dan Budaya • Sertifikasi **dan Standarisasi Layanan Pariwisata** **2. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kemudahan Bagi Wisatawan Mancanegara** **Kegiatan:** • Pengembangan Infrastruktur Transportasi dan Akses Wisata • Penyediaan Informasi Wisata Berbasis Digital dan Multibahasa • Fasilitasi Visa dan Layanan Imigrasi bagi Wisatawan Internasional **3. Program Promosi dan Pemasaran Wisata Kabupaten Tanah Laut di Pasar Global** **Kegiatan:**

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• Penyelenggaraan Event dan Festival Bertaraf Internasional • Kemitraan dengan Agen Perjalanan dan Platform Digital Internasional • Strategi **Branding dan Kampanye Digital Pariwisata**
Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan	Memperluas akses permodalan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.	**Kebijakan Utama** **"Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusi Layanan Keuangan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Laut"** **Program 1: Pengembangan Infrastruktur dan Jaringan Lembaga Keuangan** **Kegiatan:** • **Fasilitasi Pendirian Cabang Baru Bank Umum di Wilayah Strategis, yaitu :** Memberikan kemudahan regulasi dan insentif untuk pembukaan kantor cabang baru di kecamatan yang memiliki akses terbatas. • **Pembangunan Unit Pelayanan Perbankan Keliling, yaitu :** Penyediaan unit mobil bank atau layanan perbankan keliling untuk menjangkau masyarakat di daerah pedalaman dan terpencil. • **Penyediaan Layanan Keuangan di Pusat Pelayanan Publik, yaitu :** Kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan mini-branch atau layanan ATM di kantor kecamatan, pasar, dan terminal. **Program 2: Digitalisasi dan Optimalisasi Layanan Keuangan Berbasis Teknologi** **Kegiatan:** • **Pengembangan Layanan Perbankan Digital di Seluruh Kecamatan, yaitu :** Mendorong adopsi layanan mobile banking, internet banking, dan QRIS dengan pelatihan dan kampanye kepada masyarakat. • **Pemasangan ATM Multifungsi di Lokasi Strategis, yaitu :** Memastikan setiap kecamatan memiliki ATM multifungsi yang mendukung transaksi tarik tunai, setoran, dan pembayaran. • **Kerja Sama dengan Fintech dan Agen Laku Pandai, yaitu :** Memperluas jaringan agen bank melalui kerja sama dengan fintech untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki rekening bank. **Program 3: Edukasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat** **Kegiatan:** • **Program Literasi Keuangan untuk Komunitas Lokal, yaitu :** Menyelenggarakan pelatihan keuangan di desa-desa, fokus pada pengelolaan uang, tabungan, dan investasi. • **Pendampingan Pembukaan Rekening Bank untuk Masyarakat, yaitu :** Menyediakan layanan pembukaan rekening langsung di desa dengan dokumentasi sederhana dan persyaratan mudah. • **Kampanye "Satu Rekening, Satu Warga", yaitu :** Program promosi masif untuk meningkatkan

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		jumlah masyarakat yang memiliki akses ke rekening bank, dengan dukungan insentif awal.
Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan	Meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.	**Kebijakan Utama** **"Penguatan Akses Pembiayaan UMKM untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Tanah Laut"** **Program 1: Peningkatan Aksesibilitas Kredit UMKM** **Kegiatan:** • **Penyediaan Skema Kredit Khusus UMKM, yaitu :** Kerja sama dengan perbankan untuk menciptakan skema kredit dengan bunga rendah dan persyaratan yang disederhanakan untuk UMKM. • **Digitalisasi Sistem Pengajuan Kredit, yaitu :** Penerapan platform digital untuk mempermudah UMKM dalam mengajukan kredit secara online, dengan proses yang transparan dan cepat. • **Pembentukan Pusat Layanan Kredit UMKM, yaitu :** Membuka pusat layanan konsultasi dan pendampingan kredit UMKM di berbagai kecamatan untuk memberikan informasi dan membantu proses pengajuan kredit. **Program 2: Penguatan Kapasitas dan Keberlanjutan UMKM** **Kegiatan:** • **Pelatihan Keuangan dan Manajemen UMKM, yaitu :** Memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang pengelolaan keuangan, manajemen usaha, dan strategi pemasaran. • **Pendampingan Teknis dan Bisnis, yaitu :** Menyediakan pendampingan dari tenaga ahli untuk membantu UMKM meningkatkan produktivitas dan daya saing. • **Peningkatan Sertifikasi dan Legalitas UMKM, yaitu :** Membantu UMKM dalam mengurus sertifikasi usaha, seperti halal, SNI, dan Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga lebih layak mendapatkan akses kredit. **Program 3: Insentif dan Regulasi Pendukung Kredit UMKM** **Kegiatan:** • **Insentif Perbankan untuk Penyaluran Kredit UMKM, yaitu :** Memberikan penghargaan atau insentif fiskal kepada lembaga keuangan yang meningkatkan penyaluran kredit ke sektor UMKM. • **Pembentukan Dana Penjamin Kredit UMKM, yaitu :** Menginisiasi dana penjamin kredit untuk UMKM yang berisiko tinggi, guna meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan. **Pemberian Penghargaan UMKM Inklusif, yaitu :** Mengapresiasi bank dan lembaga keuangan dengan kontribusi tertinggi dalam mendukung pembiayaan UMKM di Kabupaten Tanah Laut.
Terbangunnya jalan tol	Mengembangkan infrastruktur jalan tol untuk konektivitas wilayah.	**Kebijakan Utama** **"Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol untuk Mendukung Konektivitas, Pertumbuhan Ekonomi, dan Peningkatan Kesejahteraan di Kabupaten Tanah Laut"**

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		Program 1: Perencanaan dan Pengadaan Lahan untuk Jalan Tol **Kegiatan:** • **Pemetaan dan Identifikasi Lahan Prioritas, yaitu :** Melakukan survei topografi, pemetaan wilayah, dan identifikasi lahan yang akan digunakan untuk jalur jalan tol. • **Sosialisasi dan Konsultasi Publik, yaitu :** Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait manfaat pembangunan jalan tol, mekanisme pembebasan lahan, dan kompensasi. • **Pengadaan Lahan Secara Transparan dan Adil, yaitu :** Mengutamakan pendekatan persuasif dalam pembebasan lahan dengan proses ganti rugi yang sesuai dan akuntabel. **Program 2: Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol** **Kegiatan:** • **Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Sesuai Standar, yaitu :** Pembangunan jalur utama, gerbang tol, dan fasilitas pendukung seperti tempat istirahat (rest area) sesuai spesifikasi teknis. • **Pemanfaatan Teknologi Konstruksi Modern, yaitu :** Menggunakan teknologi konstruksi terbaru untuk mempercepat pembangunan dan menjaga kualitas struktur jalan tol. • **Pengawasan dan Monitoring Pembangunan, yaitu :** Melibatkan tim pengawas independen untuk memastikan kualitas dan waktu pelaksanaan sesuai rencana. **Program 3: Optimalisasi Operasi dan Manajemen Jalan Tol** **Kegiatan:** • **Pembangunan Sistem Tol Elektronik, yaitu :** Mengintegrasikan teknologi pembayaran tol elektronik untuk mempermudah transaksi dan mengurangi antrean. • **Penyediaan Fasilitas Pendukung Jalan Tol, yaitu :** Menyediakan fasilitas seperti tempat istirahat, layanan darurat, dan CCTV untuk keamanan pengguna jalan. **Promosi dan Edukasi Pemanfaatan Jalan Tol, yaitu :** Melakukan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang manfaat jalan tol untuk mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi.
Bertambahnya panjang jalur kereta api	Mengembangkan jaringan transportasi kereta api untuk mendukung mobilitas masyarakat.	**Kebijakan Utama** **"Pengembangan Infrastruktur Jalur Kereta Api Terintegrasi untuk Meningkatkan Konektivitas, Perekonomian, dan Keberlanjutan di Kabupaten Tanah Laut"** **Program 1: Pembangunan dan Optimalisasi Jalur Kereta Api** **Kegiatan:** • **Studi Kelayakan dan Perencanaan Detail Jalur Kereta Api, yaitu :** Melakukan survei lokasi, studi kelayakan, dan analisis dampak lingkungan untuk menentukan jalur kereta api baru yang strategis. • **Pembangunan Jalur Kereta Api Baru, yaitu :** Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan kawasan ekonomi strategis,

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		seperti pelabuhan, kawasan industri, dan daerah pedesaan. • **Revitalisasi Jalur Kereta Api Eksisting, yaitu :** Perbaikan jalur kereta api yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan transportasi. **Program 2: Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Transportasi Kereta Api** **Kegiatan:** • **Pembangunan Stasiun Kereta Api Terintegrasi, yaitu :** Membangun stasiun baru yang terhubung dengan moda transportasi lain, seperti bus dan kendaraan logistik. • **Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang, yaitu :** Penyediaan fasilitas pendukung seperti jalur pedestrian, tempat parkir, dan terminal angkutan barang di sekitar jalur kereta api. • **Program Subsidi Tiket Kereta Api, yaitu :** Memberikan subsidi untuk tiket kereta api penumpang dalam rangka meningkatkan penggunaan transportasi publik. **Program 3: Pengelolaan dan Promosi Kereta Api untuk Perekonomian dan Pariwisata** **Kegiatan:** • **Pengembangan Kereta Api Logistik, yaitu :** Menyediakan layanan kereta api khusus untuk mengangkut hasil tambang, pertanian, dan barang-barang industri di Tanah Laut. • **Paket Wisata Kereta Api, yaitu :** Menciptakan paket wisata berbasis kereta api yang melewati lokasi-lokasi wisata unggulan di Kabupaten Tanah Laut. **Kampanye Promosi Transportasi Kereta Api, yaitu :** Mengadakan kampanye promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap manfaat transportasi kereta api.
Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Mengembangkan industri manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.	**Arah Kebijakan Utama:** **"Mendorong Pertumbuhan Industri Manufaktur yang Berdaya Saing, Inovatif, dan Berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut untuk Memacu Peningkatan PDB."** Program dan Kegiatan **1. Program Penguatan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha di Sektor Manufaktur** **Kegiatan:** • **Penyederhanaan Perizinan dan Insentif bagi Investor Industri Manufaktur** • **Pengembangan Kawasan Industri dan Zona Ekonomi Khusus** • **Promosi Investasi dan Kemitraan dengan Dunia Usaha** **2. Program Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Industri Manufaktur** **Kegiatan:** • **Pendampingan dan Digitalisasi Industri Kecil dan Menengah (IKM)** • **Penguatan Riset dan Inovasi Berbasis Teknologi di Sektor Manufaktur**

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• **Pengembangan SDM Industri melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** **3. Program Penguatan Akses Pasar dan Ekspor Produk Manufaktur** **Kegiatan:** • **Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk Industri** • **Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Produk Manufaktur** • **Pengembangan Jaringan Logistik dan Distribusi yang Efisien**
Koefisien Gini meningkat	• Mengurangi ketimpangan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Tingkat kemiskinan menurun	• Mengurangi angka kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Jumlah daerah tertinggal menurun	• Mengurangi jumlah daerah tertinggal melalui pembangunan berkelanjutan.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Berkurangnya Desa Tertinggal	• Mengurangi jumlah desa tertinggal melalui peningkatan akses dan layanan dasar.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya Desa Mandiri	• Mendorong pengembangan desa mandiri berbasis potensi lokal.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	• Mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tertinggal.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil	Mendorong kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia.	**Kebijakan Utama: "Peningkatan Indeks Kebebasan Sipil melalui Penguatan Hak Asasi, Partisipasi Publik, dan Transparansi Pemerintah"** **Program Utama 1: Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia** 1. **Sosialisasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia, yaitu :** Kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kebebasan sipil. 2. **Penguatan Lembaga Perlindungan HAM, yaitu :** Peningkatan kapasitas lembaga HAM untuk menangani kasus pelanggaran kebebasan sipil.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		3. **Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kebebasan Sipil, yaitu :** Penanganan cepat kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi. **Program Utama 2: Peningkatan Partisipasi Publik dalam Demokrasi** 1. **Fasilitasi Partisipasi Publik dalam Pengambilan Kebijakan, yaitu :** Pengadaan forum diskusi rutin antara pemerintah dan masyarakat. 2. **Penguatan Kebebasan Pers dan Informasi, yaitu :** Pelatihan jurnalis tentang etika peliputan dan perlindungan terhadap ancaman. 3. **Peningkatan Kesetaraan dan Inklusi), yaitu :** Penguatan keterwakilan perempuan, anak muda, dan kelompok marginal dalam proses demokrasi. **Program Utama 3: Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah** 1. **Peningkatan Transparansi Kebijakan Publik), yaitu :** Publikasi laporan kinerja pemerintah secara berkala. 2. **Pencegahan Korupsi dalam Penegakan Kebebasan Sipil), yaitu :** Peningkatan pengawasan anggaran program yang berkaitan dengan kebebasan sipil. **Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara), yaitu :** Pelatihan khusus bagi aparat dalam mengelola konflik kebebasan sipil.
Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal	Meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja formal.	**Arah Kebijakan:** **Penguatan Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Formal melalui Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan** **Program 1:** Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Formal • **Kegiatan 1:** Insentif dan subsidi iuran bagi pekerja formal di sektor UMKM untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. • **Kegiatan 2:** Optimalisasi pengawasan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke program jaminan sosial. **Program 2:** Sosialisasi dan Edukasi Manfaat Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja • **Kegiatan 1:** Kampanye dan penyuluhan tentang manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dan pemberi kerja. • **Kegiatan 2:** Pengembangan layanan pendaftaran online dan mobile untuk mempermudah akses tenaga kerja dalam mendaftar program jaminan sosial.
Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.	**Kebijakan Utama: "Peningkatan Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau melalui Dukungan Infrastruktur, Program Pembiayaan, dan Pemberdayaan Komunitas"** **Program Utama 1: Pembangunan dan Perbaikan Hunian Layak** 1. **Pembangunan Hunian Layak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu :** Pembangunan kawasan perumahan bersubsidi untuk MBR.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		2. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yaitu : Program renovasi rumah gratis bagi keluarga miskin. **3. Pengelolaan Kawasan Kumuh, yaitu :** Program penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan. **Program Utama 2: Pembiayaan Hunian Terjangkau** **1. Subsidi Pembiayaan Perumahan, yaitu :** Program KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. **2. Penyediaan Skema Pembiayaan Alternatif, yaitu :** Penyediaan cicilan fleksibel berbasis syariah untuk hunian layak. **3. Insentif Bagi Pengembang Hunian Terjangkau, yaitu :** Penyediaan subsidi bahan bangunan bagi pengembang hunian murah. **Program Utama 3: Pemberdayaan Komunitas untuk Perumahan Layak** **1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat, yaitu :** Kampanye kesadaran tentang pentingnya hunian layak untuk kesehatan dan kesejahteraan. **2. Penguatan Komunitas dalam Pembangunan Rumah Swadaya, yaitu** Pembentukan kelompok gotong royong untuk pembangunan rumah swadaya. **Monitoring dan Evaluasi Partisipatif, yaitu :** Pelibatan masyarakat dalam memantau kualitas pembangunan hunian.
Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman	Mewujudkan kota layak huni melalui peningkatan standar pelayanan perkotaan.	**Kebijakan Utama: "Peningkatan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Kawasan Metropolitan yang Berkelanjutan dan Inklusif"** **Program Utama 1: Penguatan Infrastruktur Perkotaan** **1. Pengembangan Infrastruktur Transportasi Publik, yaitu :** Pembangunan dan perbaikan jaringan transportasi massal (busway, kereta, MRT/LRT). **2. Pengelolaan Infrastruktur Dasar Perkotaan, yaitu :** Penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak untuk kawasan perkotaan. **3. Pengelolaan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir, yaitu :** Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase di kawasan rawan banjir. **Program Utama 2: Peningkatan Layanan Publik Perkotaan** **1. Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan, yaitu :** Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi modern. **2. Pengembangan Layanan Kesehatan dan Pendidikan di Perkotaan, yaitu :** Pembangunan pusat kesehatan terpadu dengan layanan prima. **3. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Perkotaan, yaitu :** Peningkatan sistem pemantauan berbasis teknologi (CCTV pintar). **Program Utama 3: Peningkatan Tata Kelola dan Lingkungan Perkotaan** **1. Pengembangan Tata Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan, yaitu :** Revitalisasi kawasan kumuh dan peremajaan perkotaan. **2. Penguatan Teknologi dan Digitalisasi Layanan Perkotaan, yaitu :** Implementasi konsep kota pintar (smart city) di kawasan metropolitan.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Perkotaan, yaitu : Pembentukan forum partisipasi masyarakat dalam perencanaan perkotaan.
Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Mengembangkan kawasan metropolitan baru di luar Pulau Jawa.	Percepatan pembangunan Banjarbakula
Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	Meningkatkan ketersediaan lembaga pembiayaan infrastruktur.	**Kebijakan Utama: "Penguatan Kapasitas Lembaga Pembiayaan Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan"** **Program Utama 1: Pengembangan Kapasitas Lembaga Pembiayaan Infrastruktur** **1. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Lembaga Pembiayaan, yaitu :** Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi bagi staf lembaga pembiayaan. **2. Peningkatan Modal dan Skema Pembiayaan, yaitu :** Penambahan modal melalui skema investasi publik dan swasta. **3. Peningkatan Tata Kelola Lembaga Pembiayaan, yaitu :** Penyusunan regulasi yang mendukung efisiensi dan transparansi lembaga pembiayaan. **Program Utama 2: Penguatan Kolaborasi dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan** **1. Kemitraan dengan Sektor Swasta, yaitu :** Penyusunan mekanisme Public-Private Partnership (PPP) untuk proyek infrastruktur. **2. Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan Nasional dan Internasional, yaitu :** Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan lembaga keuangan internasional. **3. Penguatan Hubungan dengan Pemerintah Daerah, yaitu :** Pelatihan dan pendampingan teknis untuk pemerintah daerah dalam pengajuan proyek infrastruktur. **Program Utama 3: Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Pendukung Lembaga Pembiayaan** **1. Digitalisasi Proses Pembiayaan, yaitu :** Pengembangan sistem informasi terpadu untuk pengajuan dan pengelolaan pembiayaan proyek. **2. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Lembaga Pembiayaan, yaitu :** Pendirian kantor cabang lembaga pembiayaan di wilayah strategis. **Inovasi Produk Pembiayaan Infrastruktur, yaitu :** Pengembangan produk pembiayaan khusus untuk proyek infrastruktur hijau.
Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB)	Mengurangi risiko bencana melalui penguatan ketahanan daerah.	**Arah Kebijakan Utama:** **"Penguatan Kapasitas dan Ketahanan Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana melalui Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Mitigasi Berbasis Masyarakat dan Teknologi di Kabupaten Tanah Laut."** **1. Program Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana** **Kegiatan:** • **Edukasi dan Simulasi Kebencanaan di Komunitas dan Sekolah** • **Pembentukan dan Penguatan Destana (Desa Tangguh Bencana)**

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• **Penyusunan Peta Risiko dan Jalur Evakuasi di Wilayah Rawan Bencana** **2. Program Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Mitigasi Bencana** **Kegiatan:** • **Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Penahan Bencana** • **Penggunaan Teknologi Digital untuk Monitoring dan Peringatan Dini** • **Optimalisasi Sistem Komunikasi Darurat dan Logistik Tanggap Bencana** **3. Program Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Risiko Bencana** **Kegiatan:** • **Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah** • **Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah dalam Manajemen Bencana** **Penyusunan dan Implementasi SOP Penanggulangan Bencana di Semua Sektor**
Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Meningkatkan sistem peringatan dini untuk mitigasi bencana dan adaptasi iklim.	**Kebijakan Utama: "Penguatan Sistem Peringatan Dini Cuaca, Iklim, dan Kebencanaan untuk Mitigasi Risiko dan Respon Cepat"** **Program Utama 1: Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi Peringatan Dini** 1. **Pembangunan dan Modernisasi Sistem Sensor dan Alat Pemantauan, yaitu :** Pemasangan alat deteksi gempa dan tsunami di wilayah rawan bencana. 2. **Pengembangan Platform Digital Peringatan Dini, yaitu :** Pembuatan aplikasi mobile untuk penyebaran informasi peringatan dini. 3. **Peningkatan Jangkauan Sistem Komunikasi Peringatan, yaitu :** Penyediaan sirene dan pengeras suara di area publik di wilayah rawan bencana. **Program Utama 2: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)** 1. **Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Peringatan Dini, yaitu :** Pelatihan teknis untuk operator alat pemantauan cuaca dan iklim. 2. **Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Masyarakat, yaitu :** Workshop dan simulasi respon darurat berbasis data peringatan dini. 3. **Kolaborasi dengan Akademisi dan Lembaga Riset, yaitu :** Pengembangan riset inovasi teknologi peringatan dini. **Program Utama 3: Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat** 1. **Edukasi Masyarakat tentang Pentingnya Peringatan Dini, yaitu :** Kampanye nasional tentang mitigasi bencana berbasis peringatan dini. 2. **Simulasi dan Latihan Tanggap Darurat di Komunitas Lokal, yaitu :** Simulasi evakuasi berbasis skenario bencana (gempa, banjir, tsunami). **Fasilitasi Akses Informasi bagi Masyarakat Terpencil, yaitu :** Penyebaran informasi peringatan dini menggunakan radio komunitas.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan	• Meningkatkan pengelolaan sampah perkotaan untuk mendukung lingkungan bersih.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), green transportation	Mendorong pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana.	**Kebijakan Utama: "Pengembangan Kota Hijau Berkelanjutan melalui Inovasi Pengelolaan Limbah Hijau dan Partisipasi Komunitas"** **Program Utama 1: Optimalisasi Pengelolaan Limbah Hijau** **1. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Limbah Hijau, yaitu :** Pembangunan fasilitas pengolahan limbah hijau berbasis teknologi ramah lingkungan. **2. Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Limbah Hijau, yaitu :** Implementasi teknologi biodigester untuk konversi limbah organik menjadi energi terbarukan. **3. Peningkatan Efisiensi Pengumpulan Limbah Hijau, yaitu :** Penyediaan sistem pemisahan limbah di sumber dengan pendekatan berbasis komunitas. **Program Utama 2: Edukasi dan Partisipasi Komunitas dalam Green Waste** **1. Kampanye Kesadaran tentang Green Waste, yaitu :** Kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan limbah hijau. **2. Pemberdayaan Komunitas dalam Pengelolaan Limbah Hijau, yaitu :** Pembentukan kelompok relawan hijau di kawasan perkotaan. **3. Pembangunan Zona Hijau Edukatif, yaitu :** Pembangunan taman edukasi lingkungan yang memanfaatkan limbah hijau. **Program Utama 3: Regulasi dan Insentif untuk Implementasi Green Waste** **1. Peningkatan Kebijakan dan Regulasi Green Waste, yaitu :** Penyusunan peraturan daerah tentang kewajiban pemisahan dan pengelolaan limbah hijau. **2. Insentif untuk Pelaku Usaha dan Masyarakat, yaitu :** Penyediaan subsidi atau insentif pajak bagi pelaku usaha yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. **Kemitraan Multi-Stakeholder, yaitu :** Kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan teknologi dan infrastruktur limbah hijau.
Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau	Meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau untuk lingkungan yang sehat.	**Kebijakan Utama: "Pengembangan Kota Hijau Berkelanjutan melalui Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau, Infrastruktur Ramah Lingkungan, dan Partisipasi Komunitas"** **Program Utama 1: Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)** **1. Identifikasi dan Perencanaan RTH, yaitu :** Pemutakhiran data lokasi potensial untuk pengembangan RTH di kawasan perkotaan. **2. Pengembangan dan Pemeliharaan RTH Baru, yaitu :** Pembangunan taman kota dengan fasilitas rekreasi, edukasi, dan olahraga. **3. Kolaborasi dan Pendanaan RTH, yaitu :** Kerja sama dengan sektor swasta melalui program Corporate

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		Social Responsibility (CSR) untuk pengembangan RTH. **Program Utama 2: Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan** **1. Transportasi Hijau dan Berkelanjutan, yaitu :** Pengembangan jalur pedestrian dan sepeda yang terintegrasi dengan RTH. **2. Manajemen Limbah dan Air, yaitu :** Pembangunan fasilitas pengolahan limbah modern yang ramah lingkungan. **3. Infrastruktur Energi Berkelanjutan, yaitu :** Instalasi pencahayaan tenaga surya di taman kota dan fasilitas umum. **Program Utama 3: Partisipasi dan Edukasi Masyarakat** **1. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Lingkungan, yaitu :** Kampanye sadar lingkungan melalui media sosial dan acara publik. **2. Pemberdayaan Komunitas Hijau, yaitu :** Pembentukan kelompok masyarakat peduli lingkungan untuk mengawasi dan memelihara RTH. **Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan, yaitu :** Pembentukan forum kota hijau yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Meningkatkan pengelolaan limbah B3 untuk melindungi lingkungan.	**Kebijakan Utama: "Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kapasitas Industri, Kepatuhan Regulasi, dan Inovasi Teknologi"** **Program Utama 1: Peningkatan Kapasitas Industri dalam Pengelolaan Limbah B3** **1. Pelatihan dan Sertifikasi Pengelolaan Limbah B3, yaitu :** Pelaksanaan pelatihan teknis pengelolaan limbah B3 bagi pelaku industri. **2. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Limbah B3, yaitu :** Pembangunan pusat pengelolaan limbah B3 regional untuk mendukung industri kecil dan menengah. **3. Insentif untuk Kepatuhan Pengelolaan Limbah B3, yaitu :** Pemberian insentif pajak bagi industri yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. **Program Utama 2: Penegakan dan Kepatuhan Regulasi Pengelolaan Limbah B3** **1. Monitoring dan Audit Lingkungan, yaitu :** Pelaksanaan audit kepatuhan pengelolaan limbah B3 secara berkala. **2. Penguatan Regulasi dan Sanksi, yaitu :** Revisi regulasi untuk memperketat standar pengelolaan limbah B3. **3. Peningkatan Kapasitas Pengawasan, yaitu :** Pelatihan pengawasan bagi petugas lingkungan hidup. **Program Utama 3: Inovasi Teknologi dan Pengolahan Limbah B3** **1. Pengembangan Teknologi Pengolahan Limbah B3, yaitu :** Penelitian dan pengembangan teknologi daur ulang limbah B3. **2. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai Sumber Energi, yaitu :** Uji coba teknologi waste-to-energy (WTE) untuk limbah B3.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		Digitalisasi Pengelolaan Limbah B3, yaitu : Pengembangan aplikasi untuk pelacakan limbah B3 dari sumber hingga pengolahan.
Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R)	Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis 3R untuk mendukung lingkungan bersih dan sehat.	**Arah Kebijakan:** **Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis 3R untuk Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan** **Program 1:** Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pengelolaan Sampah Berbasis 3R • **Kegiatan 1:** Pembangunan bank sampah dan fasilitas daur ulang di setiap kecamatan. • **Kegiatan 2:** Pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi alternatif atau bahan baku industri. **Program 2:** Kampanye Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah • **Kegiatan 1:** Sosialisasi dan edukasi tentang pemilahan sampah dari sumbernya kepada masyarakat, sekolah, dan pelaku usaha. • **Kegiatan 2:** Pemberian insentif bagi masyarakat dan usaha yang aktif dalam program daur ulang dan pengurangan sampah plastik.
Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML)	Mendorong penerapan sistem manajemen lingkungan di sektor industri.	Arah Kebijakan Utama: "Mendorong Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Berstandar SNI ISO 14001 dalam Dunia Usaha untuk Mewujudkan Industri Berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut." **1**. Program Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Perusahaan dalam Penerapan ISO 14001 Kegiatan: • Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) • Penyediaan Panduan Implementasi ISO 14001 bagi Perusahaan • Pendidikan dan Sertifikasi Auditor Internal ISO 14001 **2. Program Fasilitasi Sertifikasi dan Insentif bagi Perusahaan** **Kegiatan:** • Subsidi dan Pendampingan Proses Sertifikasi ISO 14001 • Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi dan Konsultan Lingkungan • Penghargaan dan Insentif Pajak bagi Perusahaan Ramah Lingkungan **3. Program Penguatan Regulasi dan Pengawasan Implementasi ISO 14001** **Kegiatan:** • Integrasi ISO 14001 dalam Perizinan dan Regulasi Lingkungan Daerah • Audit dan Monitoring Rutin terhadap Perusahaan Berbasis Lingkungan • Publikasi dan Kampanye Transparansi Kinerja Lingkungan Industri
Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa	• Mendorong pengembangan dan penggunaan produk	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada;

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik	ramah lingkungan dalam pengadaan publik.	• Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan Evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah	Mengurangi risiko bencana melalui penguatan strategi pengurangan risiko tingkat nasional dan daerah.	**Arah Kebijakan Utama:** **"Penguatan Kapasitas dan Ketahanan Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana melalui Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Mitigasi Berbasis Masyarakat dan Teknologi di Kabupaten Tanah Laut."** **1. Program Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana** **Kegiatan:** • **Edukasi dan Simulasi Kebencanaan di Komunitas dan Sekolah** • **Pembentukan dan Penguatan Destana (Desa Tangguh Bencana)** • **Penyusunan Peta Risiko dan Jalur Evakuasi di Wilayah Rawan Bencana** **2. Program Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Mitigasi Bencana** **Kegiatan:** • **Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Penahan Bencana** • **Penggunaan Teknologi Digital untuk Monitoring dan Peringatan Dini** • **Optimalisasi Sistem Komunikasi Darurat dan Logistik Tanggap Bencana** **3. Program Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Risiko Bencana** **Kegiatan:** • **Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah** • **Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah dalam Manajemen Bencana** • **Penyusunan dan Implementasi SOP Penanggulangan Bencana di Semua Sektor**
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan	Meningkatkan tutupan lahan dan hutan untuk mendukung kualitas lingkungan hidup.	**Kebijakan Utama** **"Peningkatan Tutupan Hutan untuk Mendukung Keberlanjutan Ekosistem dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut"** **Program 1: Rehabilitasi dan Restorasi Lahan Hutan** **Kegiatan:** • **Penanaman Kembali di Lahan Kritis, yaitu :** Melaksanakan reboisasi di lahan-lahan kritis dengan melibatkan masyarakat lokal dan perusahaan melalui skema tanggung jawab sosial lingkungan (CSR). • **Restorasi Ekosistem Hutan Mangrove yaitu :** Program khusus untuk memulihkan ekosistem mangrove yang rusak guna melindungi garis pantai dan cadangan karbon. • **Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) , yaitu :** Membentuk kebun bibit rakyat untuk menyediakan bibit tanaman hutan lokal yang berkualitas dan berkelanjutan. **Program 2: Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas dan Partisipasi Publik** **Kegiatan:**

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• **Pengembangan Hutan Desa dan Hutan Adat, yaitu :** Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan berbasis desa atau adat dengan dukungan pelatihan dan fasilitasi legalitas. • **Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan, yaitu :** Pelatihan teknis tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan, agroforestri, dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu (HHBK). • **Program Insentif bagi Masyarakat Penjaga Hutan, yaitu :** Pemberian insentif berupa dana atau penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif menjaga dan memantau kondisi hutan di sekitar mereka. **Program 3: Peningkatan Penegakan Hukum dan Monitoring Lingkungan** **Kegiatan:** • **Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Illegal Logging, yaitu :** Peningkatan pengawasan melalui patroli terpadu dan penerapan sanksi tegas terhadap pelaku pembalakan liar. • **Penggunaan Teknologi untuk Monitoring Tutupan Hutan, yaitu :** Pemanfaatan citra satelit, drone, dan aplikasi digital untuk memantau tutupan hutan secara real-time dan mendeteksi aktivitas deforestasi. **Peningkatan Kerja Sama Multi-pihak, yaitu :** Membentuk forum kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memitigasi ancaman terhadap hutan.
Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi	Mengurangi lahan kritis melalui upaya rehabilitasi dan konservasi.	**Kebijakan Utama** **"Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati secara Berkelanjutan untuk Mendukung Ekonomi, Konservasi, dan Ketahanan Ekosistem di Kabupaten Tanah Laut"** **Program 1: Konservasi dan Rehabilitasi Keanekaragaman Hayati** **Kegiatan:** • **Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Keanekaragaman Hayati, yaitu :** Melakukan inventarisasi dan pemetaan wilayah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, termasuk ekosistem mangrove, hutan, dan terumbu karang. • **Rehabilitasi Ekosistem Kritis, yaitu :** Mengembangkan program reboisasi, penanaman mangrove, dan restorasi habitat alami bagi spesies terancam punah. • **Penguatan Kawasan Konservasi Lokal, yaitu :** Mendorong pembentukan kawasan konservasi berbasis masyarakat (KKM) untuk melindungi flora dan fauna endemik. **Program 2: Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati secara Berkelanjutan** **Kegiatan:** • **Pengembangan Produk Lokal Berbasis Keanekaragaman Hayati, yaitu :** Memberdayakan masyarakat lokal untuk menghasilkan produk seperti obat tradisional, kosmetik herbal, dan makanan organik dari sumber daya hayati lokal.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• **Edukasi dan Transfer Teknologi Pemanfaatan Berkelanjutan, yaitu :** Melatih masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan sumber daya hayati dengan pendekatan ramah lingkungan. • **Pemberian Insentif untuk Usaha Ramah Lingkungan, yaitu :** Insentif bagi pelaku usaha yang memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, seperti sertifikasi ekolabel. **Program 3: Edukasi, Penelitian, dan Kolaborasi** **Kegiatan:** • **Peningkatan Kesadaran Publik melalui Kampanye Keanekaragaman Hayati, yaitu :** Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati melalui media, seminar, dan kegiatan masyarakat. • **Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Keanekaragaman Hayati, yaitu :** Mendukung penelitian akademis dan pengembangan inovasi berbasis keanekaragaman hayati di Kabupaten Tanah Laut. • **Kemitraan dengan Institusi Lokal dan Internasional, yaitu :** Menggalang kerjasama dengan universitas, LSM, dan lembaga internasional dalam program konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.
Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat	Mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan untuk mendukung ekonomi lokal.	**Kebijakan Utama** **"Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati secara Berkelanjutan untuk Mendukung Ekonomi, Konservasi, dan Ketahanan Ekosistem di Kabupaten Tanah Laut"** **Program 1: Konservasi dan Rehabilitasi Keanekaragaman Hayati** **Kegiatan:** • **Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Keanekaragaman Hayati, yaitu :** Melakukan inventarisasi dan pemetaan wilayah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, termasuk ekosistem mangrove, hutan, dan terumbu karang. • **Rehabilitasi Ekosistem Kritis, yaitu :** Mengembangkan program reboisasi, penanaman mangrove, dan restorasi habitat alami bagi spesies terancam punah. • **Penguatan Kawasan Konservasi Lokal, yaitu :** Mendorong pembentukan kawasan konservasi berbasis masyarakat (KKM) untuk melindungi flora dan fauna endemik. **Program 2: Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati secara Berkelanjutan** **Kegiatan:** • **Pengembangan Produk Lokal Berbasis Keanekaragaman Hayati, yaitu :** Memberdayakan masyarakat lokal untuk menghasilkan produk seperti obat tradisional, kosmetik herbal, dan makanan organik dari sumber daya hayati lokal. • **Edukasi dan Transfer Teknologi Pemanfaatan Berkelanjutan, yaitu :** Melatih masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan sumber daya hayati dengan pendekatan ramah lingkungan. • **Pemberian Insentif untuk Usaha Ramah Lingkungan, yaitu :** Insentif bagi pelaku usaha yang

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, seperti sertifikasi ekolabel. **Program 3: Edukasi, Penelitian, dan Kolaborasi** **Kegiatan:** • **Peningkatan Kesadaran Publik melalui Kampanye Keanekaragaman Hayati, yaitu :** Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati melalui media, seminar, dan kegiatan masyarakat. • **Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Keanekaragaman Hayati, yaitu :** Mendukung penelitian akademis dan pengembangan inovasi berbasis keanekaragaman hayati di Kabupaten Tanah Laut. **Kemitraan dengan Institusi Lokal dan Internasional, yaitu :** Menggalang kerjasama dengan universitas, LSM, dan lembaga internasional dalam program konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.
Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	Mewujudkan kondisi sosial yang aman dan tertib melalui pengendalian kekerasan dan kriminalitas.	**Kebijakan Utama** **"Meningkatkan Rasa Aman dan Kepercayaan Masyarakat melalui Penguatan Keamanan, Infrastruktur, dan Partisipasi Publik di Kabupaten Tanah Laut"** **Program 1: Penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan Teknologi Keamanan Publik** **Kegiatan:** • **Revitalisasi Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling), yaitu :** Melengkapi dan merevitalisasi Poskamling dengan fasilitas memadai, seperti alat komunikasi, kamera CCTV sederhana, dan penerangan yang baik. • **Pemasangan CCTV dan Lampu Penerangan Jalan, yaitu :** Pemasangan CCTV di titik rawan kejahatan serta lampu penerangan jalan di kawasan permukiman dan jalan umum. • **Aplikasi Layanan Darurat Keamanan, yaitu :** Pengembangan aplikasi berbasis digital untuk pelaporan cepat insiden keamanan kepada pihak berwenang (polisi atau pemerintah daerah). **Program 2: Penguatan Peran Aparat Keamanan dan Kolaborasi Masyarakat** **Kegiatan:** • **Patroli Terpadu Polisi dan Masyarakat, yaitu :** Pelaksanaan patroli rutin gabungan antara polisi, perangkat desa, dan masyarakat di area permukiman. • **Peningkatan Kapasitas Petugas Keamanan Lokal, yaitu :** Pelatihan bagi petugas keamanan lokal, seperti satpam, dalam menangani situasi darurat dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. • **Pembentukan Forum Keamanan Warga, yaitu :** Membentuk forum keamanan tingkat desa atau kelurahan untuk merumuskan dan memantau langkah-langkah keamanan setempat. **Program 3: Edukasi, Sosialisasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan** **Kegiatan:** • **Kampanye "Lingkungan Aman, Tanggung Jawab Bersama", yaitu :** Kampanye melalui media cetak, digital, dan acara masyarakat untuk

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		mempromosikan pentingnya menjaga keamanan lingkungan. • **Penyuluhan Keamanan di Sekolah dan Komunitas, yaitu :** Penyuluhan untuk generasi muda dan masyarakat umum tentang cara mencegah kejahatan dan menjaga keamanan. **Penghargaan Lingkungan Aman dan Kondusif, yaitu :** Memberikan penghargaan kepada desa/kelurahan dengan pencapaian terbaik dalam menjaga keamanan lingkungan.
Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak	• Melindungi anak dari tindak kekerasan untuk mewujudkan generasi sehat dan aman.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan Evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Meningkatkan perilaku antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	**Kebijakan Utama** **"Membangun Budaya Integritas melalui Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik untuk Meningkatkan Indeks Perilaku Anti Korupsi di Kabupaten Tanah Laut"** **Program 1: Pendidikan dan Literasi Anti Korupsi** **Kegiatan:** • **Integrasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah dan Komunitas, yaitu :** Mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah, serta pelatihan bagi guru. • **Penyelenggaraan Pelatihan Anti Korupsi untuk Aparatur dan Masyarakat, yaitu :** Pelatihan bagi ASN, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha mengenai nilai-nilai integritas dan dampak buruk korupsi. • **Kampanye Publik Anti Korupsi, yaitu :** Mengadakan kampanye melalui media massa, media sosial, dan kegiatan publik (seminar, lomba, atau festival) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. **Program 2: Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Publik** **Kegiatan:** • **Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan yang Transparan, yaitu :** Memanfaatkan teknologi berbasis digital (e-budgeting dan e-planning) untuk meningkatkan transparansi anggaran dan mencegah manipulasi data. • **Pembentukan Tim Pengawasan Independen, yaitu :** Melibatkan masyarakat sipil, LSM, dan akademisi untuk mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah dan memastikan keterbukaan informasi. • **Layanan Pengaduan Anti Korupsi yang Mudah Diakses, yaitu :** Membangun platform pengaduan online yang cepat, aman, dan responsif untuk melaporkan indikasi korupsi, disertai perlindungan pelapor. **Program 3: Insentif dan Sanksi untuk Perilaku Anti Korupsi** **Kegiatan:** • **Pemberian Penghargaan "Zona Integritas Bersih", yaitu :** Penghargaan kepada instansi pemerintah,

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		desa, atau kelompok masyarakat yang menerapkan praktik terbaik dalam pencegahan korupsi. • **Skema Insentif untuk ASN dan Instansi Berintegritas, yaitu :** Memberikan insentif berupa promosi, penghargaan finansial, atau fasilitas bagi ASN yang menunjukkan integritas tinggi dan kinerja tanpa korupsi. **Penegakan Hukum Secara Transparan terhadap Pelaku Korupsi, yaitu :** Berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara terbuka, serta memastikan sanksi yang adil dan tegas.
Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah.	**Arah Kebijakan:** Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah **Program:** 1. **Program Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah** • Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dan pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) • Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan 2. **Program Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah** • Peningkatan peran Inspektorat dalam audit internal dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) • Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan OPD untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan
Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga	Mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui akuntabilitas berbasis SAKIP.	**Arah Kebijakan:** Meningkatkan efektivitas manajemen kinerja dan perencanaan strategis berbasis hasil di setiap OPD **Program:** 1. **Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah** • Penyusunan dokumen perencanaan kinerja berbasis hasil (outcome-based performance) di setiap OPD • Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi untuk mengukur capaian kinerja OPD secara real-time 2. **Program Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Implementasi SAKIP** • Pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan evaluasi SAKIP • Pendampingan intensif bagi OPD yang memiliki skor SAKIP rendah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen kinerja

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.	**Kebijakan Utama** **"Optimalisasi Penggunaan E-Procurement untuk Meningkatkan Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Tanah Laut"** **Program 1: Penguatan Infrastruktur dan Sistem E-Procurement** **Kegiatan:** • **Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem E-Procurement, yaitu :** Pengembangan dan pemeliharaan sistem e-procurement yang terintegrasi dengan sistem nasional (LKPP). • **Peningkatan Jaringan Internet di Wilayah Strategis, yaitu :** Penyediaan jaringan internet berkecepatan tinggi di kawasan pemerintahan dan lokasi strategis terkait pengadaan. • **Peningkatan Keamanan Data Elektronik, yaitu :** Implementasi sistem keamanan berbasis enkripsi untuk melindungi data transaksi pengadaan. **Program 2: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)** **Kegiatan:** • **Pelatihan Penggunaan Sistem E-Procurement bagi ASN, yaitu :** Pelatihan teknis bagi pejabat pengadaan dan operator yang terlibat dalam proses e-procurement. • **Bimbingan Teknis kepada Penyedia Barang/Jasa Lokal, yaitu :** Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha lokal agar mampu berpartisipasi dalam proses e-procurement. • **Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Elektronik, yaitu :** Menyediakan program sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme pelaku pengadaan. **Program 3: Peningkatan Partisipasi dan Transparansi dalam E-Procurement** **Kegiatan:** • **Kampanye Transparansi dan Edukasi Pengadaan Elektronik, yaitu :** Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang manfaat e-procurement untuk mendorong partisipasi aktif. • **Penerapan Sistem Laporan Real-Time, yaitu :** Mengembangkan sistem pelaporan real-time yang dapat diakses publik untuk memantau pengadaan barang/jasa. • **Penghargaan kepada Instansi dan Penyedia Barang/Jasa Terbaik, yaitu :** Memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah dan pelaku usaha yang konsisten menggunakan sistem e-procurement.
Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk OPD	Meningkatkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.	**Arah Kebijakan:** Meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. **Program:** 1. **Program Penguatan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja** • Peningkatan kapasitas aparatur dalam manajemen kinerja berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian indeks reformasi birokrasi di setiap OPD guna memastikan perbaikan berkelanjutan. 2. **Program Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Pemerintahan** • Implementasi e-Government dan integrasi layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas birokrasi. • Pengembangan sistem manajemen berbasis digital untuk mempercepat proses administrasi dan layanan publik.
Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik	Meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan standar pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.	**Arah Kebijakan:** Meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan publik melalui standar pelayanan yang jelas, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. **Program:** 1. **Program Penguatan Standar Pelayanan Publik** • Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh OPD yang memberikan layanan publik. • Pengembangan mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif dan transparan untuk menilai kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik. 2. **Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengawasan Layanan Publik** • Pelatihan aparatur mengenai standar pelayanan prima sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Peningkatan peran Ombudsman dan unit pengawasan internal dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan pelayanan publik.
Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD	• Meningkatkan peran dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan Evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif.	Meningkatkan proporsi keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif
Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah	• Menjamin akses dan kepemilikan akta kelahiran bagi masyarakat miskin dan rentan.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya • Monitoring dan Evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran	• Meningkatkan kepemilikan akta kelahiran untuk melindungi hak-hak anak.	• Tetap mempertahankan kebijakan dan program yang ada; • Meningkatkan sosialisasi dan kapasistas sumberdaya

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• Monitoring dan Evaluasi kebijakan/program dan kegiatan
Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	Meningkatkan kapasitas PPID untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.	**Kebijakan Utama** **"Penguatan Kompetensi dan Akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas di Kabupaten Tanah Laut"** **Program 1: Sertifikasi Kompetensi PPID** **Kegiatan:** • **Penyelenggaraan Pelatihan Bersertifikat untuk PPID, yaitu :** Mengadakan pelatihan resmi bekerja sama dengan lembaga terakreditasi untuk memberikan sertifikasi kompetensi kepada PPID. • **Fasilitasi Ujian Sertifikasi Nasional untuk PPID, yaitu :** Memberikan subsidi atau kemudahan akses bagi PPID di Kabupaten Tanah Laut untuk mengikuti ujian sertifikasi nasional. • **Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi PPID, yaitu :** Membentuk tim evaluasi untuk memantau progres jumlah PPID yang telah bersertifikat dan memberikan rekomendasi peningkatan. **Program 2: Penguatan Kapasitas dan Kompetensi PPID** **Kegiatan:** • **Workshop tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :** Mengadakan workshop berkala tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan turunannya untuk meningkatkan pemahaman PPID. • **Sosialisasi Praktik Terbaik Pengelolaan Informasi, yaitu :** Mengundang narasumber dari daerah lain yang telah berhasil mengelola PPID untuk berbagi praktik terbaik. • **Penyusunan Panduan dan Modul Tugas PPID, yaitu :** Menyusun buku panduan atau modul yang memuat tata cara pengelolaan informasi publik dan dokumentasi sesuai peraturan. **Program 3: Insentif dan Penghargaan untuk PPID Berkinerja Baik** **Kegiatan:** • **Pemberian Insentif untuk PPID Bersertifikat, yaitu :** Memberikan insentif tambahan berupa tunjangan atau penghargaan kepada PPID yang telah bersertifikat nasional. • **Penghargaan PPID Terbaik Kabupaten Tanah Laut, yaitu :** Mengadakan kompetisi tahunan untuk memilih PPID dengan kinerja terbaik berdasarkan indikator yang terukur. **Publikasi Capaian PPID ke Masyarakat, yaitu :** Membuat laporan tahunan mengenai capaian PPID yang dipublikasikan secara terbuka untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun	Meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB untuk mendukung pembangunan daerah.	**Arah Kebijakan:** Meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui digitalisasi, intensifikasi pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. **Program:** 1. **Program Digitalisasi dan Penguatan Tata Kelola Perpajakan Daerah**

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		• Implementasi sistem pajak daerah berbasis elektronik (e-tax) untuk meningkatkan efisiensi pembayaran dan pelaporan pajak. • Integrasi data perpajakan dengan sistem informasi keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi dan akurasi perhitungan pajak. 2. **Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah** • Peningkatan pengawasan dan pemutakhiran data wajib pajak melalui sistem pemetaan objek pajak. • Kampanye edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan pajak bagi masyarakat dan pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.
Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband)	Meningkatkan akses layanan internet broadband tetap untuk mendukung transformasi digital.	**Arah Kebijakan:** Memperluas infrastruktur jaringan internet tetap (fixed broadband) untuk mendukung transformasi digital **Program:** 1. **Program Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fixed Broadband** • Pembangunan dan perluasan jaringan fiber optik ke daerah yang belum terjangkau internet tetap • Penyediaan insentif bagi penyedia layanan internet untuk investasi di daerah terpencil 2. **Program Digitalisasi Layanan Publik Berbasis Fixed Broadband** • Peningkatan kapasitas jaringan internet di kantor pemerintahan, sekolah, dan fasilitas kesehatan • Pembangunan pusat layanan digital komunitas untuk meningkatkan literasi digital masyarakat
Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps)	Meningkatkan akses layanan internet mobile broadband yang cepat dan terjangkau.	**Arah Kebijakan:** Mempercepat pemerataan akses mobile broadband dengan kecepatan minimal 1 Mbps di seluruh wilayah **Program:** 1. **Program Ekspansi Infrastruktur Telekomunikasi Mobile Broadband** • Pembangunan dan peningkatan menara Base Transceiver Station (BTS) di daerah dengan akses jaringan lemah • Penguatan kapasitas spektrum jaringan untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas internet mobile 2. **Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Mobile Broadband** • Kerja sama dengan penyedia layanan seluler untuk meningkatkan cakupan dan kualitas sinyal di daerah terpencil • Monitoring dan evaluasi kualitas layanan internet untuk memastikan kecepatan dan stabilitas yang optimal

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Memperluas akses telekomunikasi dan internet bagi seluruh lapisan masyarakat.	**Arah Kebijakan:** Memastikan akses telekomunikasi dan internet yang merata hingga ke daerah terpencil **Program:** 1. **Program Penyediaan Layanan Internet Desa dan Wilayah Terpencil** • Pembangunan jaringan WiFi publik gratis di fasilitas umum, sekolah, dan kantor desa • Kolaborasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dalam program internet desa 2. **Program Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Telekomunikasi Universal** • Penyediaan subsidi akses internet bagi UMKM dan kelompok rentan untuk meningkatkan daya saing ekonomi digital • Peningkatan kapasitas dan literasi digital masyarakat untuk memanfaatkan akses internet secara produktif
Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	Mendorong penyediaan alternatif pembiayaan pembangunan melalui skema KPBU.	**Kebijakan Utama** **"Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Publik Berbasis Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut"** **Program 1: Identifikasi dan Perencanaan Proyek Prioritas KPBU** **Kegiatan:** • **Penyusunan Daftar Proyek Prioritas KPBU, yaitu :** Melakukan kajian dan identifikasi proyek infrastruktur dan layanan publik yang memiliki potensi tinggi untuk diimplementasikan dengan skema KPBU (misalnya, jalan tol, pelabuhan, atau pengolahan limbah). • **Studi Kelayakan Proyek KPBU, yaitu :** Melaksanakan studi kelayakan ekonomi, sosial, lingkungan, dan keuangan untuk memastikan bahwa proyek yang direncanakan menarik bagi investor. • **Pembentukan Tim Teknis Perencanaan KPBU, yaitu :** Membentuk tim teknis yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan profesional untuk merancang proyek KPBU sesuai kebutuhan lokal. **Program 2: Promosi dan Penawaran Proyek KPBU** **Kegiatan:** • **Penyelenggaraan Forum Investasi Daerah, yaitu :** Mengadakan acara promosi (forum bisnis, seminar, expo) untuk memperkenalkan proyek-proyek KPBU kepada calon investor nasional dan internasional. • **Penerbitan Buku Panduan Investasi KPBU, yaitu :** Menyusun dan mendistribusikan buku panduan investasi yang memuat informasi detail tentang proyek, potensi keuntungan, dan prosedur kerjasama. • **Pembuatan Portal Digital Investasi KPBU, yaitu :** Membangun portal digital sebagai platform

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	**Tujuan Pembangunan**	**Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan**
		informasi dan komunikasi bagi calon mitra usaha terkait proyek KPBU yang tersedia. **Program 3: Fasilitasi dan Pengelolaan Kemitraan KPBU** **Kegiatan:** • **Penyederhanaan Regulasi dan Prosedur KPBU, yaitu :** Menyusun kebijakan lokal yang mendukung kemudahan investasi, seperti perizinan, pengadaan lahan, dan insentif pajak. • **Pembangunan Kapasitas Pemerintah Daerah, yaitu :** Pelatihan bagi pegawai pemerintah daerah untuk memahami tata kelola dan pengawasan proyek KPBU secara efektif. • **Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU, yaitu :** Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital untuk memastikan kualitas pelaksanaan proyek sesuai dengan perjanjian KPBU.
Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	Meningkatkan alokasi dana APBN untuk mendukung proyek pembangunan berbasis KPBU.	**Kebijakan Utama** **"Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Publik Berbasis Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut"** **Program 1: Identifikasi dan Perencanaan Proyek Prioritas KPBU** **Kegiatan:** • **Penyusunan Daftar Proyek Prioritas KPBU, yaitu :** Melakukan kajian dan identifikasi proyek infrastruktur dan layanan publik yang memiliki potensi tinggi untuk diimplementasikan dengan skema KPBU (misalnya, jalan tol, pelabuhan, atau pengolahan limbah). • **Studi Kelayakan Proyek KPBU, yaitu :** Melaksanakan studi kelayakan ekonomi, sosial, lingkungan, dan keuangan untuk memastikan bahwa proyek yang direncanakan menarik bagi investor. • **Pembentukan Tim Teknis Perencanaan KPBU, yaitu :** Membentuk tim teknis yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan profesional untuk merancang proyek KPBU sesuai kebutuhan lokal. **Program 2: Promosi dan Penawaran Proyek KPBU** **Kegiatan:** • **Penyelenggaraan Forum Investasi Daerah, yaitu :** Mengadakan acara promosi (forum bisnis, seminar, expo) untuk memperkenalkan proyek-proyek KPBU kepada calon investor nasional dan internasional. • **Penerbitan Buku Panduan Investasi KPBU, yaitu :** Menyusun dan mendistribusikan buku panduan investasi yang memuat informasi detail tentang proyek, potensi keuntungan, dan prosedur kerjasama. • **Pembuatan Portal Digital Investasi KPBU, yaitu :** Membangun portal digital sebagai platform informasi dan komunikasi bagi calon mitra usaha terkait proyek KPBU yang tersedia.

Rekomendasi		
Sasaran Strategis	Tujuan Pembangunan	Arah Kebijakan/Program dan Kegiatan
		Program 3: Fasilitasi dan Pengelolaan Kemitraan KPBU **Kegiatan:** • **Penyederhanaan Regulasi dan Prosedur KPBU, yaitu :** Menyusun kebijakan lokal yang mendukung kemudahan investasi, seperti perizinan, pengadaan lahan, dan insentif pajak. • **Pembangunan Kapasitas Pemerintah Daerah, yaitu :** Pelatihan bagi pegawai pemerintah daerah untuk memahami tata kelola dan pengawasan proyek KPBU secara efektif. • **Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU, yaitu :** Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital untuk memastikan kualitas pelaksanaan proyek sesuai dengan perjanjian KPBU.

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029

2.3.3 Isu Strategis Daerah

RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 telah menjadi pedoman dalam pembangunan daerah dengan berbagai target dan indikator kinerja utama yang ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai capaian yang berhasil direalisasikan sesuai dengan target maupun yang masih menghadapi tantangan. Evaluasi terhadap capaian pembangunan selama lima tahun terakhir menjadi dasar dalam perumusan isu strategis serta penyusunan RPJMD 2025-2029 agar kebijakan pembangunan ke depan lebih tepat sasaran.

2.3.3.1 Isu Global

Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan merupakan daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mencakup sektor perikanan, pertambangan, kehutanan, dan pariwisata. Sebagai daerah pesisir, sektor perikanan menjadi salah satu pilar utama ekonomi, dengan produksi ikan laut mencapai 59.964 ton pada tahun 2021. Namun, tantangan lingkungan dan kebijakan perikanan global mengharuskan adanya strategi berkelanjutan untuk menjaga produktivitas serta kesejahteraan nelayan.

Selain sektor perikanan, Kabupaten Tanah Laut juga dikenal sebagai penghasil emas, besi, dan platina, dengan tingkat produksi emas yang

signifikan dibandingkan daerah lain. Namun, fluktuasi harga komoditas global dapat berdampak pada penerimaan daerah. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pendapatan menjadi langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi serta mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.

Potensi ekonomi Kabupaten Tanah Laut tidak hanya terbatas pada perikanan dan pertambangan, tetapi juga mencakup sektor kehutanan dan pemanfaatan barang tambang lainnya. Namun, volatilitas harga sumber daya alam serta kebijakan nasional dalam pengelolaan lingkungan menuntut optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal. Sejalan dengan prinsip **Sustainable Development Goals (SDGs)**, pengembangan sektor pariwisata juga menjadi prioritas pemerintah daerah dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika global, Kabupaten Tanah Laut perlu merujuk pada isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dalam **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029**. Beberapa isu global utama yang perlu diperhatikan meliputi:

- **Perkembangan demografi**, termasuk peningkatan jumlah lansia.
- **Dinamika geopolitik dan geoekonomi**, ditandai oleh persaingan antarnegara serta dominasi negara berkembang dalam ekonomi global.
- **Perkembangan teknologi**, yang diproyeksikan akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini.
- **Munculnya kecerdasan buatan yang apabila tidak diadaptasi, bisa mendisrupsi kebutuhan tenaga kerja.**
- **Peningkatan urbanisasi dan perubahan konstelasi perdagangan global**.
- **Pertumbuhan kelas menengah serta persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam**.

- **Perubahan iklim**, yang menyebabkan cuaca ekstrem dan bencana.
- **Pemanfaatan luar angkasa untuk ekonomi, kelestarian, dan keamanan antariksa**.

Selain itu, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 juga mengidentifikasi beberapa risiko global jangka menengah yang perlu diantisipasi oleh daerah, di antaranya:

- Kegagalan aksi iklim dan cuaca ekstrem.
- Deglobalisasi dan krisis lapangan pekerjaan.
- Krisis utang dan konfrontasi geoekonomi.
- Kegagalan keamanan siber dan kehilangan biodiversitas.
- Risiko gelembung aset (*asset bubble burst*).

Bagi Kabupaten Tanah Laut, beberapa isu global memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu aspek utama yang perlu dicermati adalah **dampak dinamika geopolitik dan geoekonomi terhadap sektor pertambangan dan perkebunan**, mengingat sektor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar global. Selain itu, **perubahan iklim** menjadi tantangan serius yang dapat mengganggu sektor pertanian serta ketahanan pangan daerah. **Krisis lapangan pekerjaan** juga perlu diantisipasi, terutama dengan meningkatnya otomatisasi dan digitalisasi yang mengubah lanskap dunia kerja.

Dengan memahami serta mengelola tantangan tersebut, Kabupaten Tanah Laut dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatkan daya saing daerah, serta menjamin kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global yang terus berkembang.

2.3.3.2 Isu Nasional

Isu-isu strategis nasional telah diidentifikasi sebagai pijakan utama dalam merancang kinerja serta agenda pembangunan dalam RPJPN dan Rancangan Teknokratik RPJMN. Isu-isu ini perlu mendapat perhatian dari daerah serta memerlukan dukungan daerah dalam meresponsnya guna

mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Beberapa isu strategis jangka panjang nasional yang dicantumkan dalam dokumen RPJPN meliputi:

1. **Rendahnya produktivitas**: Ketertinggalan kualitas SDM, terutama perempuan; daya saing sektor ekonomi yang masih lemah; keterbatasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; serta lemahnya insentif, regulasi, dan kepastian hukum.
2. **Kurangnya penguatan riset dan IPTEKIN**: Anggaran penelitian dan pengembangan IPTEKIN yang hanya 0,28 persen dari PDB; keterbatasan jumlah dan kualitas SDM peneliti; lemahnya ekosistem riset dan inovasi; serta masih minimnya kesadaran ilmiah di masyarakat.
3. **Deindustrialisasi dini dan rendahnya produktivitas pertanian**: Melemahnya sektor manufaktur; keterbatasan dalam adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset; terbatasnya dukungan bagi industri di luar Jawa; tingginya biaya logistik dan suku bunga; serta lambatnya regenerasi petani dan nelayan.
4. **Potensi pariwisata yang belum optimal**: Keterbatasan dalam atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta kapasitas pengelolaan; pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang masih rendah; serta kurangnya dukungan kebijakan bagi ekonomi kreatif dan transformasi digital.
5. **Pemanfaatan ekonomi laut yang belum maksimal**: Rendahnya eksploitasi sumber daya laut secara berkelanjutan; kurangnya pemanfaatan jalur komunikasi laut; belum optimalnya pengelolaan wilayah perikanan; serta tingginya praktik penangkapan ikan ilegal.
6. **Kontribusi UMKM dan koperasi yang masih terbatas**: Mayoritas UMKM masih beroperasi di sektor bernilai tambah rendah; penggunaan teknologi serta inovasi yang minim; keterbatasan investasi; serta rendahnya partisipasi dalam rantai nilai produksi.
7. **Kualitas tenaga kerja yang tertinggal**: Mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan SMP ke bawah; ketidaksesuaian keterampilan dengan

kebutuhan industri; serta informasi pasar tenaga kerja yang belum optimal.

8. **Kurangnya infrastruktur dan literasi digital**: Kesiapan infrastruktur TIK masih rendah, terutama di daerah terpencil; daya beli masyarakat terhadap perangkat digital masih lemah; serta ketergantungan tinggi terhadap teknologi asing.
9. **Pembangunan yang kurang berkelanjutan**: Ketergantungan tinggi pada energi fosil; rendahnya penggunaan energi terbarukan; pencemaran dan degradasi lingkungan; serta sistem insentif ekonomi hijau yang belum optimal.
10. **Integrasi ekonomi domestik yang terbatas**: Pusat pertumbuhan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa; biaya logistik yang tinggi akibat kurangnya infrastruktur konektivitas; serta ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih signifikan.
11. **Tantangan dalam menurunkan tingkat kemiskinan**: Persoalan kesehatan akibat meningkatnya beban penyakit; kendala dalam sistem pendidikan; distribusi guru dan infrastruktur sekolah yang belum merata; serta belum optimalnya integrasi bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi.
12. **Tata kelola pemerintahan yang belum efektif**: Regulasi yang berlebihan dengan kualitas yang rendah; struktur birokrasi yang masih terfragmentasi; belum optimalnya transformasi digital dalam layanan publik; serta rentannya ASN terhadap intervensi politik.
13. **Lemahnya kepastian hukum dan penegakan HAM**: Pemulihan aset dari tindak pidana yang belum optimal; masih tingginya potensi pelanggaran HAM; serta kurangnya efektivitas pengawasan terhadap institusi hukum.
14. **Demokrasi yang belum matang**: Permasalahan dalam integritas partai politik; keterbatasan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan; serta demokrasi yang masih terfokus pada aspek prosedural.

15. **Stabilitas nasional yang menghadapi tantangan**: Perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan; meningkatnya isu geopolitik di wilayah perbatasan; serta kompleksitas ancaman keamanan nasional.
16. **Ketahanan sosial budaya yang masih rentan**: Nilai-nilai Pancasila yang belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; meningkatnya pengaruh budaya global yang negatif; serta kurangnya penghormatan terhadap keberagaman agama dan budaya.
17. **Ketahanan ekologi yang menghadapi ancaman**: Laju kehilangan biodiversitas yang tinggi; mitigasi bencana yang belum efektif; serta kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan sumber daya alam.
18. **Ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa**: Penyebaran SDM berkualitas yang belum merata; keterbatasan infrastruktur di daerah tertinggal, terutama di kawasan timur Indonesia; serta belum optimalnya pemanfaatan anggaran daerah.
19. **Cetak Sawah:** Program cetak sawah telah menjadi isu nasional karena berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, cetak sawah bertujuan untuk memperluas lahan pertanian produktif guna meningkatkan produksi pangan dalam negeri.
20. **Penanggulangan TBC:** Tuberkulosis (TBC) masih menjadi isu nasional karena Indonesia termasuk negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Tantangan utama meliputi penularan tinggi, deteksi dini yang belum optimal, dan kepatuhan pengobatan yang rendah. Untuk mencapai target eliminasi TBC 2030, diperlukan penguatan layanan kesehatan, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, isu jangka menengah lebih menyoroti tantangan sekaligus peluang pembangunan dalam periode 2025–2029, di antaranya:

- **Dampak positif hilirisasi mulai terlihat**, namun perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
- **Fenomena aging population di negara maju**, yang membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor pariwisata kesehatan bagi lansia.
- **Tantangan transisi energi**, dengan peluang pemerataan melalui pengembangan jaringan listrik nasional serta pembangunan PLT EBT di luar Jawa.
- **Meningkatnya standar keberlanjutan global**, sehingga produk Indonesia harus lebih berorientasi pada konsep ramah lingkungan agar tetap kompetitif di pasar internasional.
- **Pentingnya sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral**, guna memastikan kebijakan pembangunan tetap sejalan dengan kepentingan nasional.

2.3.3.3 Isu Regional

Sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan potensi ekonomi yang melimpah, Kalimantan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan nasional. Dengan ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah ini, pembangunan Kalimantan diarahkan untuk menjadi *Superhub Ekonomi Nusantara* yang mengintegrasikan berbagai sektor ekonomi guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat lima strategi prioritas yang menjadi landasan dalam mengakselerasi pembangunan wilayah Kalimantan.

Pertama, kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kunci transformasi sosial dan ekonomi. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah. Tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan,

transmigrasi, serta wilayah perbatasan turut memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, diperparah oleh kondisi geografis berupa hutan dan rawa, menyebabkan tingginya angka penyakit menular tropis seperti malaria. Di sektor pendidikan, minimnya akses terhadap fasilitas serta kurangnya sarana pengembangan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri mengakibatkan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur layanan dasar, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan di Kalimantan Selatan.

Kedua, Aspek Ekonomi, yaitu pembangunan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan dilakukan dengan memperkuat interaksi antarwilayah. Perekonomian Kalimantan Selatan masih bergantung pada sektor hulu, sementara proses hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam berjalan lambat. Hambatan utama dalam pengembangan industri pengolahan meliputi kurangnya penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, minimnya insentif fiskal, rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan. Selain itu, kurangnya pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan sebagai penggerak utama perekonomian turut memperlambat pembangunan daerah. Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas juga menjadi tantangan yang menghambat aksesibilitas serta distribusi ekonomi yang merata. Oleh karena itu, diperlukan percepatan hilirisasi industri, peningkatan investasi, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ketiga, pengembangan infrastruktur berbasis lingkungan dilakukan untuk menciptakan efek berganda dalam pembangunan ekonomi. Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif di Kalimantan Selatan berpotensi mengancam keseimbangan ekosistem alami, termasuk hutan hujan

tropis Kalimantan yang menjadi habitat flora dan fauna endemik seperti orangutan dan bekantan. Selain itu, degradasi lingkungan ini juga berisiko merusak warisan geologi dan keanekaragaman hayati yang bernilai ekologis maupun ekonomis. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang masif tanpa perencanaan berbasis keberlanjutan dapat mempercepat deforestasi, mengganggu tata air, serta meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Terutama penguatan **infrastruktur transportasi** yang efisien dan berkelanjutan untuk mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai **gerbang logistik** yang terintegrasi dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pasar internasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan melalui perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, penerapan regulasi ketat terhadap konversi lahan, serta penguatan upaya rehabilitasi ekosistem untuk menjaga keseimbangan alam di Kabupaten Tanah Laut.

Keempat, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi elemen krusial dalam mendukung akselerasi pembangunan. Stabilitas pertahanan dan keamanan diperkuat guna menjamin kedaulatan negara, terutama di kawasan perbatasan dan wilayah IKN. Selain itu, penyusunan dan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat kabupaten/kota harus memperhitungkan risiko bencana, dengan fokus pada mitigasi dan penataan ruang yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

2.3.3.4 Telaah Dinamika Pembangunan Nasional

Untuk Menjamin Kesesuaian antara Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045, berikut merupakan matriks keselarasan Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Dokumen Pembangunan Nasional dan Dokumen Pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang diuraikan dalam matriks bersanding.

Tabel 2. 125 Keselarasan antara RPJMN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045

Keterangan	RPJMN	RPJPD Kab Tanah Laut
Visi	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Tanah Laut Maju Sabarataan 2045: "Bumi Tuntung Pandang Yang Maju Dan Berkelanjutan"
Misi	**Asta Cita 1 :** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	**Misi 4 :** Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi yang substansial dan ekonomi daerah yang stabil
	Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	**Misi 2 :** Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Asta Cita 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	**Misi 7 :** Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
	Asta Cita 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, sena pmguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan qenera5i Z), dan penyandang disabilitas.	**Misi 1 :** Transformasi Sosial Melalui SDM yang Unggul dan Berdaya Saing
	Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meninqkatkan nilai tambah di dalam negeri.	**Misi 2 :** Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Asta Cita 6 : Membangun daridesa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	**Misi 6 :** Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas

Keterangan	RPJMN	RPJPD Kab Tanah Laut
	Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	**Misi 3 :** Transformasi Tata Pemerintahan yang Responsif
	Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Alam dan budaya, seni, peningkatan toleranst antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	**Misi 5 :** Pemantapan ketahanan sosial masyarakat dan budaya **Misi 8 :** Mewujudkan Pembangunan yang berkesinambungan
Arah (Tujuan) Pembangunan	**Asta Cita 1** 1. Hukum Berkeadilan. Keamanan Nasional tangguh, dan Demokrasi Substansial 2. Transformasi Digital 3. lptek. lnovasi, dari Produktivitas Ekonomi 4. Penerapan Ekonomi Hijau 5. Hukum Berkeadilan, Keamanan Narional tangguh, dan Dernokrasi Substansial	**Misi 4** 1. Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Daerah 2. Stabilitas Ekonomi Makro 3. Ketangguhan Pemerintah Daerah
	Asta Cita 2 1. Stabilitas Ekonomi Makro 2. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 3. Lingkungan Hidup Berkualitas 4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 5. Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim	**Misi 2** 1. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan 2. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau 3. Transformasi Digital 4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	Asta Cita 3 1. Transformasi Digital 2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 4. Kesehatan untuk Semua 5. Pendidikan Berkualitas yang Merata 6. Perlindungan Sosial yang Adaptif	**Misi 7** 1. Lingkungan Hidup Berkualitas 2. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 3. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
	Asta Cita 4 1. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	**Misi 1** 1. Kesehatan untuk Semua

Keterangan	RPJMN	RPJPD Kab Tanah Laut
	2. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
	Asta Cita 5 1. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 2. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	**Misi 2** 5. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan 6. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau 7. Transformasi Digital 8. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	Asta Cita 6 1. Perlindungan Sosial yang Adaptif 2. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	**Misi 6** 1. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	Asta Cita 7 1. Transformasi Digital 2. Iptek,Inobasi, dan Produktivitas Ekonomi 3. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif 4. Hukum berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial 5. Stabilitas Ekonomi Makro	**Misi 3** 1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif
	Asta Cita 8 1. Beragaman Maslahat dan Berkebudayaan Maju 2. Lingkungan Hidup Berkualitas 3. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	**Misi 5** 1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Lokal yang Maju 2. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		Misi 8
Sasaran	Meningkatkan Pendapatan Perkapita Menuju Setara Negara Maju	Terwujudnya Transformasi Ekonomi dalam Rangka Menciptakan Perekonomian Daerah yang Tangguh (Misi 2)
	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	Terwujudnya Kemanan dan Ketertiban yang Mendukung Stabilitas daerah dan Negara (Misi 4)
		Meningkatnya Capaian Pembangunan (Misi 8)
		Terwujudnya Transformasi dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Berbasis Digital (Misi 3)
	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan
		Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat

Keterangan	RPJMN	RPJPD Kab Tanah Laut
	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Terwujudnya Transformasi Sosial dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Sumber daya Manusia (Misi 1)
	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	Terwujudnya sarana dan prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Menjangkau Seluruh Wilayah Tanah Laut (Misi 7)

Sumber : RPJMN dan RPJPD Kab Tanah Laut Tahun 2025-20245

Dokumen **Keselarasan antara RPJMN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045** menunjukkan bahwa arah pembangunan nasional dan daerah telah sejalan dalam visi jangka panjang. Keselarasan ini akan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan **RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029** sehingga perencanaan pembangunan daerah akan tetap berada dalam koridor kebijakan nasional, memastikan efektivitas program serta optimalisasi sumber daya untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan untuk mencapai target pembangunan dan mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro antara pemerintah daerah Pusat/Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Penilaian capaian kinerja makro dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja makro yang sama untuk provinsi, kabupaten dan kota dengan tabel keselarasan sebagai berikut:

Tabel 2.126 Keselarasan Indikator Makro Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022-2025

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2023			Realisasi Tahun 2024			Target 2025		
		Nasional	Kalsel	Tanah Laut	Nasional	Kalsel	Tanah Laut	Nasional	Kalsel	Tanah Laut	Nasional	Kalsel	Tanah Laut
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	72,91	71,84	70,35	74,66	74,39	72,98	75,02	75,19	73,42	N/A	75,7	73,8
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,31	5,11	5,12	5,05	4,84	4,78	5,03	5,05	5,01	5,3-5,6	5,28	5,1-5,2
Tingkat Kemiskinan	%	9,57	4,61	3,86	9,36	4,29	3,73	9,03	4,11	3,74	7,0-8,0	3,44-3,94	2,82-3,23
Rasio Gini	Nilai	0,403	0,345	0,263	0,388	0,313	0,259	0,379	0,302	0,257	0,379-0,382	0,29-0,301	0,24-0,249
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	0,586	0,474	4,17	5,32	4,31	3,58	4,91	4,2	3,43	4,5-5,0	3,63-4,18	2,70-3,25

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan indikator makro di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang beragam realisasi atas target dari tahun 2022 hingga 2024, dan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Laut meningkat dari 70,35 pada tahun 2022 menjadi 73,42 pada tahun 2024, dan ditargetkan mencapai 73,8 pada 2025. Pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, dari 5,12% pada tahun 2022, menurun menjadi 4,78% pada tahun 2023, kemudian naik menjadi 5,01% pada tahun 2024, dengan target 5,1–5,2% pada tahun 2025. Tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan signifikan, dari 3,86% pada tahun 2022 menjadi 3,74% pada tahun 2024, dengan target 2,82–3,23% di tahun 2025. Rasio Gini Kabupaten Tanah Laut juga konsisten membaik, dari 0,263 pada 2022 menjadi 0,257 pada tahun 2024, ditargetkan turun ke kisaran 0,24–0,249 pada tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 4,17% pada tahun 2022 menjadi 3,43% pada tahun 2024, dengan target 3,55% pada tahun 2025. Data ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menekan kesenjangan, dan memperkuat perekonomian daerah.

Jika dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, perkembangan indikator Kabupaten Tanah Laut memiliki pola yang menarik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Laut (73,42 pada tahun 2024) berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan (75,19) dan nasional (75,02), meskipun kenaikan dari tahun 2022 cukup signifikan. Untuk target tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut (73,8) masih lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan (75,7) dan nasional yang tidak tercantum.

Untuk realisasi target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut di 2024 (5,01%) sedikit lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan (5,05%) dan nasional (5,03%). Target 2025 Tanah Laut (5,1–5,2%) masih di bawah proyeksi nasional (5,3–5,6%) dan sedikit di bawah target Provinsi Kalimantan Selatan (5,28%).

Capaian Angka kemiskinan Kabupaten Tanah Laut (3,74% pada tahun 2024) jauh lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Selatan (4,11%) dan nasional (9,03%). Target tahun 2025 (2,82–3,23%) juga lebih baik dari target Provinsi Kalimantan Selatan (3,44–3,94%) maupun nasional (7,0–8,0%).
Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut (0,257 di tahun 2024) lebih baik dibanding Provinsi Kalimantan Selatan (0,302) dan nasional (0,379), menandakan kesenjangan pendapatan yang lebih rendah. Target Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 (0,24–0,249) jika dibanding Kalsel (0,29–0,301) dan nasional (0,379–0,382).

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut (3,43% pada tahun 2024) lebih rendah dibanding Kalsel (4,2%) dan nasional (4,91%). Target 2025 (3,55%) sedikit lebih tinggi dari capaian tahun 2024, namun tetap lebih baik dibanding target Kalsel (4,18%) dan nasional (4,5–5,0%).

Secara umum, Tanah Laut berada di bawah capaian nasional dan provinsi dalam IPM dan pertumbuhan ekonomi, namun unggul dalam menekan angka kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan pengangguran. Ini menunjukkan fokus daerah yang kuat pada pemerataan dan inklusivitas pembangunan, meskipun tantangan peningkatan kualitas manusia dan laju ekonomi masih ada.

Tabel 2.127 Target Indikator Makro Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2030

Indikator	Satuan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,8	73,64-74,34	74,12-74,62	74,58-75,28	75,01-75,71	75,43-76,13
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1-5,2	5,4-6,2	5,5-7,4	5,6-7,5	5,6-7,8	6,79
Tingkat Kemiskinan	%	2,82-3,23	2,96-3,46	2,66-3,16	2,36-2,86	2,02-2,36	1,58-2,08
Rasio Gini	Nilai	0,24-0,249	0,236-0,245	0,232-0,241	0,228-0,237	0,223-0,233	0,218-0,228
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,70-3,25	2,63-3,21	2,54-3,17	2,45-3,11	2,35-3,04	2,25-2,94

2.3.2.5 Capaian Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 2023

Capaian misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 menjadi landasan dalam merumuskan isu strategis RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Evaluasi terhadap berbagai sektor pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kesejahteraan sosial, serta tata kelola pemerintahan, memberikan gambaran tentang keberhasilan program yang telah dilaksanakan sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi. Analisis ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan pembangunan serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mencapai visi daerah ke depan.

Tabel 2. 128 Isu Strategis Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Misi	Permasalahan	Isu Strategi
Misi 1: Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Masyarakat Yang Berbasis Teknologi Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Meskipun IPM meningkat, masih ada potensi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.	Pemerataan pembangunan dan akses layanan dasar bagi seluruh kelompok masyarakat.
	1. Kualitas pendidikan masih menjadi tantangan meskipun angka partisipasi meningkat. 2. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja belum optimal.	1. Penguatan mutu pendidikan, tidak hanya kuantitas akses. 2. Sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.
	1. Distribusi tenaga medis tidak merata, khususnya di daerah terpencil. 2. Ketersediaan fasilitas kesehatan belum sepenuhnya merata.	1. Pemerataan layanan kesehatan dan tenaga medis. 2. Penguatan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan di daerah terpencil.
	1. Masih ada kelompok masyarakat rentan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program pemberdayaan ekonomi. 2. Ketergantungan pada sektor pertanian	3. Peningkatan inklusivitas program pemberdayaan ekonomi. 4. Diversifikasi ekonomi agar masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor pertanian tradisional.

Misi	Permasalahan	Isu Strategi
	tradisional membuat ekonomi masyarakat rentan terhadap fluktuasi harga dan cuaca.	
Misi 2: Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri	Gagal meraih penghargaan inovasi publik pada 2019 dan 2020, menunjukkan inovasi belum menjadi budaya yang mengakar di pemerintahan.	1. Membangun ekosistem inovasi di lingkungan pemerintahan. 2. Mendorong kebijakan inovatif yang berdampak nyata bagi masyarakat.
	Lonjakan jumlah industri kreatif belum diiringi dengan dukungan kebijakan seperti akses permodalan, peningkatan SDM, dan pemasaran digital.	1. Penguatan ekosistem industri kreatif dengan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang tepat. 2. Digitalisasi pemasaran untuk meningkatkan daya saing.
	Indeks reformasi birokrasi mengalami fluktuasi dan tidak mencapai target, mengindikasikan kendala struktural dalam implementasi.	1. Digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. 2. Pemangkasan prosedur administrasi agar lebih ramah bagi masyarakat dan dunia usaha.
	Tingkat kerukunan antarumat beragama stabil di angka 100%, tetapi masih ada potensi konflik dari kesenjangan ekonomi dan politik identitas.	1. Mengelola isu sosial secara preventif agar stabilitas tetap terjaga. 2. Mengintegrasikan program ekonomi berbasis komunitas untuk mengurangi kesenjangan.
	Angka kemiskinan mengalami fluktuasi dan kebijakan inovasi ekonomi belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan.	1. Penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. 2. Pelatihan keterampilan berbasis pasar kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Misi 3: Membangun tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi mengalami fluktuasi dan belum mencapai target, mengindikasikan hambatan struktural dalam penyederhanaan birokrasi	1. Mendorong percepatan digitalisasi layanan pemerintahan. 2. Penyederhanaan prosedur administrasi untuk meningkatkan

Misi	Permasalahan	Isu Strategi
	dan digitalisasi layanan publik.	efektivitas pelayanan publik.
	Predikat WTP berhasil dipertahankan, tetapi efektivitas penggunaan anggaran masih menjadi tantangan agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.	1. Optimalisasi pengelolaan anggaran berbasis kinerja. 2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran daerah.
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik tinggi, tetapi pemerataan layanan di seluruh wilayah masih menjadi tantangan.	1. Pemerataan kualitas layanan publik hingga ke daerah terpencil. 2. Penguatan infrastruktur pelayanan berbasis digital.
	Indeks kerukunan antarumat beragama stabil di angka 100%, tetapi potensi konflik sosial masih harus diantisipasi.	1. Penguatan nilai toleransi melalui dialog antarumat beragama. 2. Pencegahan potensi konflik sosial melalui kebijakan inklusif.
	Tingkat transparansi dan keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengawasi kebijakan pemerintah dengan lebih baik.	1. Penguatan sistem e-governance untuk keterbukaan informasi. 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan kebijakan publik.
Misi 4: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Religiusitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kehidupan Masyarakat	Indeks stabil di angka 100%, tetapi masih ada potensi gesekan sosial yang perlu diantisipasi.	1. Penguatan dialog lintas agama untuk menjaga harmoni sosial. 2. Meningkatkan program keagamaan yang inklusif.
	Indeks Reformasi Birokrasi mengalami fluktuasi dan belum mencapai target, menunjukkan implementasi nilai religius dalam tata kelola pemerintahan masih kurang efektif.	1. Penguatan etika kerja aparatur untuk mencegah korupsi. 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
	Program berbasis keagamaan belum memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.	1. Integrasi pendidikan keagamaan dengan sektor industri dan ekonomi. 2. Pengembangan program ekonomi berbasis syariah untuk meningkatkan

Misi	Permasalahan	Isu Strategi
		kesejahteraan masyarakat.
	Indeks kepuasan masyarakat tinggi, tetapi distribusi layanan masih belum merata di seluruh wilayah.	1. Pemerataan akses layanan publik berbasis keagamaan di daerah terpencil. 2. Digitalisasi layanan untuk meningkatkan efisiensi.
	Lulusan sekolah berbasis keagamaan belum memiliki akses yang setara dengan lulusan sekolah umum dalam hal kesempatan kerja.	1. Peningkatan kompetensi lulusan sekolah keagamaan agar lebih adaptif dengan kebutuhan pasar kerja. 2. Penyediaan program pelatihan keterampilan berbasis ekonomi syariah.
Misi 5 Membangun Sinergitas yang Baik Antartingkat Pemerintahan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan sektor unggulan menunjukkan tren positif, tetapi sempat terdampak pandemi.	1. Penguatan daya saing sektor unggulan untuk ketahanan ekonomi. 2. Diversifikasi usaha untuk mengurangi dampak krisis ekonomi global.
	Program kredit tanpa agunan dan bunga 0% menunjukkan dampak positif, tetapi cakupannya masih fluktuatif.	1. Perluasan cakupan penerima manfaat agar lebih merata. 2. Peningkatan pendampingan bagi pelaku usaha dan kelompok tani.
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan stabilitas, tetapi masih perlu ditingkatkan.	1. Peningkatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor. 2. Peningkatan akses dan distribusi pangan ke daerah terpencil.
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami fluktuasi, belum menunjukkan tren peningkatan yang stabil.	1. Penguatan kebijakan lingkungan berkelanjutan. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
	Fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan akibat pandemi dan kurangnya strategi pemasaran inovatif.	1. Pengembangan strategi promosi wisata berbasis digital. 2. Peningkatan infrastruktur

Misi	Permasalahan	Isu Strategi
		pendukung pariwisata.
	Pertumbuhan industri olahan mengalami fluktuasi dengan kontraksi pada 2020.	1. Insentif bagi industri olahan lokal untuk meningkatkan daya saing. 2. Penguatan rantai pasok dan distribusi produk industri olahan.
	Capaian tata kelola pemerintahan desa baik, tetapi indeks desa mandiri masih belum stabil.	1. Peningkatan program kemandirian desa melalui pemberdayaan ekonomi. 2. Penguatan infrastruktur desa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
	Luas permukiman kumuh sudah berkurang signifikan, tetapi perlu dipertahankan.	1. Peningkatan program peremajaan kota secara berkelanjutan. 2. Penguatan kebijakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sumber : RPJMD Kab Tanah Laut Tahun

2.3.2.6 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Tanah Laut

Perencanaan pembangunan daerah harus berangkat dari pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi yang berkembang, Kabupaten Tanah Laut menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi melalui kebijakan strategis yang tepat. Dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah, perencanaan pembangunan harus mengarah pada kesejahteraan yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Ada pun berikut merupakan isu-isu strategis yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah.

1. **Kondisi Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**

Pendidikan: Partisipasi dan Akses Sekolah

Dari segi pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD berada di angka 98,48%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar sudah mengenyam pendidikan. Namun, APM untuk tingkat SMP hanya 73,10% dan SMA sebesar 64,61%, yang mengindikasikan masih banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Faktor ekonomi dan akses terhadap sekolah masih menjadi kendala utama. Di beberapa kecamatan, jumlah sekolah menengah masih sangat terbatas. Pelaihari memiliki jumlah sekolah menengah terbanyak (15 unit), sementara kecamatan lainnya hanya memiliki 1-5 sekolah menengah. Hal ini menyebabkan anak-anak harus menempuh perjalanan yang jauh untuk bisa melanjutkan sekolah, yang pada akhirnya meningkatkan angka putus sekolah.

Kesehatan Masyarakat: Penyakit dan Akses Layanan

Masalah kesehatan yang paling dominan di Kabupaten Tanah Laut adalah tingginya kasus hipertensi primer, dengan 14.423 kasus pada tahun 2024. Penyakit lainnya yang juga menjadi perhatian meliputi dispepsia (13.058 kasus), diabetes mellitus (9.234 kasus), dan infeksi saluran pernapasan (7.595 kasus). Tingginya angka penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat.

Selain itu, kasus Diare dan Gastroenteritis akibat infeksi juga cukup tinggi, terutama di kalangan anak-anak. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kualitas air minum dan sanitasi yang masih perlu diperbaiki.

Di sisi lain, jumlah fasilitas kesehatan masih terbatas, terutama untuk layanan tingkat lanjut. Kabupaten Tanah Laut hanya memiliki 3 rumah sakit, dengan 2 di antaranya berada di Pelaihari dan 1 di Kintap. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan lain masih harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Sementara itu, jumlah

Puskesmas dengan layanan rawat inap hanya 3 unit, yang berarti masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan perawatan intensif di daerah mereka.

Kematian ibu saat persalinan juga masih menjadi isu, dengan 6 kasus kematian ibu pada tahun 2024. Penyebab utama kematian ibu meliputi pendarahan, eklampsia, dan penyebab lainnya yang memerlukan intervensi lebih serius dalam hal peningkatan akses terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan.

Kesehatan Anak: Gizi Buruk, Stunting dan Imunisasi

Kasus gizi buruk dan bayi berat lahir rendah (BBLR) di Kabupaten Tanah Laut masih cukup tinggi. Pada tahun 2024, terdapat 64 kasus gizi buruk dan 340 bayi lahir dengan berat badan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa asupan gizi selama masa kehamilan dan masa pertumbuhan anak masih belum optimal.

Prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Laut mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2013 hingga 2023. Dalam beberapa tahun terakhir, yakni **10,52%** pada 2021, **26,60%** pada 2022, dan mencapai **41,70%** pada tahun 2023.

Tingkat pencapaian program imunisasi juga masih belum mencapai target maksimal. Cakupan imunisasi DPT-HB3 hanya mencapai 61,26%, sedangkan imunisasi campak berada di angka 81,79%. Kurangnya cakupan imunisasi ini dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular di kalangan anak-anak.

Penduduk Usia Tua dan Dependecy Ratio

Pada tahun 2024, rasio ketergantungan di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan menjadi 43,95%, dengan angka ketergantungan laki-laki sebesar 44,52% dan perempuan 43,36%. Selama periode 2020–2023, angka ketergantungan laki-laki selalu lebih rendah dibandingkan perempuan, namun tren ini berubah pada 2023–2024, di mana angka ketergantungan laki-laki menjadi lebih tinggi. Perubahan ini mencerminkan dinamika demografi

yang dapat memengaruhi kebijakan ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, dengan jumlah penduduk usia tua yang mencapai 20.574 jiwa, diperlukan strategi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan peningkatan populasi lansia, termasuk penyediaan layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta penguatan program ekonomi bagi kelompok usia produktif untuk menjaga keseimbangan ketergantungan penduduk.

Masih Tingginya Perkawinan Usia Anak

Di Kabupaten Tanah Laut, kasus perkawinan usia anak masih cukup tinggi, dipicu oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta norma sosial yang membatasi peran dan pilihan hidup anak perempuan.

Terbatasnya Akses Ekonomi Perempuan

Perempuan di Tanah Laut, khususnya di wilayah pedesaan dan pesisir, masih menghadapi kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan pembiayaan usaha, yang membatasi kontribusinya terhadap ekonomi keluarga dan daerah.

Rendahnya TPAK Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan relatif rendah, disebabkan oleh minimnya peluang kerja yang ramah gender, beban domestik yang tinggi, serta belum optimalnya dukungan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif.

Keterwakilan Politik Perempuan Masih Rendah

Perempuan Kabupaten Tanah Laut masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam berpartisipasi di bidang politik dan pengambilan keputusan, terlihat dari rendahnya persentase perempuan di DPRD dan posisi strategis pemerintahan.

Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan dan Diskriminasi

Kelompok perempuan, termasuk penyintas kekerasan, perempuan penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga, masih menghadapi keterbatasan layanan perlindungan, pemulihan, serta minimnya jaminan keadilan yang berpihak pada korban.

Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut masih menjadi tantangan besar meskipun menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin mencapai 3,73%, turun dari 3,86% di tahun sebelumnya. Garis kemiskinan berada di angka Rp620.532 per kapita per bulan, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penurunan angka kemiskinan ini tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar.

Ketimpangan ekonomi juga terlihat dari masih adanya kelompok masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan. Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih mengalami kesulitan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Bencana Alam dan Kerentanan Wilayah

Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah yang cukup rentan terhadap bencana, terutama banjir dan angin puting beliung. Pada tahun 2024, terdapat 12 desa terdampak banjir, dengan 3.623 warga yang mengungsi. Banjir ini menyebabkan 36 rumah mengalami kerusakan berat, 9 rusak sedang, dan 45 mengalami kerusakan ringan. Sementara itu, kejadian angin puting beliung berdampak pada 230 warga, terutama di Panyipatan, Takisung, dan Kurau.

Meskipun demikian, jumlah fasilitas penanggulangan bencana seperti tempat evakuasi dan sistem peringatan dini masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan masyarakat rentan terhadap dampak lebih besar setiap kali terjadi bencana.

Keamanan dan Sosial

Kasus kriminalitas di Kabupaten Tanah Laut masih menjadi perhatian, meskipun belum sepenuhnya teratasi. Risiko penduduk terkena kejahatan per

100.000 orang mencapai 27,72 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam hal keamanan masyarakat.

Selain itu, angka perceraian di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan signifikan, dari 506 kasus pada 2023 menjadi 649 kasus pada 2024. Penyebab perceraian bervariasi, mulai dari faktor ekonomi hingga masalah sosial seperti perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kabupaten Tanah Laut juga menjadi salah satu isu strategis yang memerlukan perhatian serius, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesehatan, sosial, dan keamanan masyarakat. Peredaran dan penyalahgunaan NAPZA tidak hanya berisiko merusak generasi muda, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kriminalitas serta gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu, upaya penanggulangan perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta program pencegahan berbasis edukasi dan rehabilitasi.

2. **Potensi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan**

Produksi Tanaman Pangan

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu daerah dengan lahan pertanian yang cukup luas di Kalimantan Selatan. Tanaman pangan utama yang menjadi andalan adalah jagung, dengan luas panen mencapai 16.408 hektar dan produksi tertinggi dari Kecamatan Panyipatan sebesar 26.415 ton. Meski demikian, beberapa permasalahan masih membayangi keberlanjutan sektor ini, terutama dalam ketersediaan pupuk subsidi, akses terhadap pasar yang stabil, dan dampak perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian hasil panen.

Komoditas cabai rawit, yang menjadi salah satu sayuran dengan produksi terbesar di Kabupaten Tanah Laut, mengalami fluktuasi produksi yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, produksi mencapai 24.990 kuintal, tetapi mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 17.396,50 kuintal. Turunnya produksi cabai rawit kemungkinan besar dipengaruhi oleh

serangan hama, perubahan pola tanam, serta ketidakstabilan harga di tingkat petani yang membuat banyak petani beralih ke tanaman lain yang lebih menguntungkan.

Selain cabai, hortikultura lainnya seperti tomat juga mengalami tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2023, produksi tomat tercatat sebesar 8.468,40 kuintal, tetapi turun drastis menjadi 4.439,00 kuintal pada tahun 2024. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini adalah minimnya inovasi dalam metode pertanian, kurangnya pemanfaatan varietas unggul, serta kurangnya pendampingan dari dinas terkait dalam hal peningkatan kapasitas petani.

Selain itu, Pada Tahun 2024, Indeks Ketahanan Kabupaten Tanah Laut mencapai 80,59 yang masuk prioritas 6 atau sangat tahan menunjukkan bahwa daerah ini memiliki tingkat ketahanan yang cukup baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Perkebunan

Perkebunan menjadi sektor yang berperan penting dalam ekonomi Kabupaten Tanah Laut, dengan komoditas utama seperti kelapa sawit dan karet. Pada tahun 2023, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 12.692 hektar, dengan hasil produksi sebesar 73.230,40 ton. Sementara itu, perkebunan karet mencakup 14.852 hektar dengan produksi 19.700,14 ton.

Namun, industri perkebunan di Tanah Laut menghadapi tantangan berat dalam hal harga komoditas yang fluktuatif. Harga karet dan kelapa sawit sangat bergantung pada permintaan global, yang sering kali membuat petani mengalami kerugian saat harga turun. Selain itu, masalah konflik lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat setempat juga masih terjadi, terutama terkait kepemilikan lahan dan hak pengelolaan hutan yang sering kali tumpang tindih dengan konsesi perusahaan besar.

Dari sisi keberlanjutan, konversi lahan hutan menjadi perkebunan menjadi salah satu masalah yang cukup mengkhawatirkan. Banyak petani yang membuka lahan dengan cara tebang bakar, yang berkontribusi pada

peningkatan lahan kritis serta menyebabkan degradasi ekosistem di beberapa wilayah.

Pengurangan Kawasan Hutan dan Lahan Kritis

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas kawasan hutan mencapai 125.644,11 hektar, yang terdiri dari:

Hutan Lindung: 13.688,39 hektar

Hutan Produksi: 70.157,61 hektar

Hutan Konservasi: 27.338,06 hektar

Kawasan Tubuh Air: 435,74 hektar

Namun, tekanan terhadap hutan di Tanah Laut semakin meningkat akibat konversi lahan untuk pertanian dan perkebunan. Akibatnya, beberapa wilayah mengalami deforestasi yang cukup tinggi, terutama di kawasan hutan produksi yang mengalami eksploitasi berlebihan. Hal ini menyebabkan meningkatnya lahan kritis, yang ditandai dengan hilangnya tutupan vegetasi alami, berkurangnya daya dukung tanah, serta meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Dari sisi regulasi, meskipun terdapat aturan yang mengatur kawasan hutan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan utama yang muncul adalah penggunaan lahan ilegal, kurangnya pengawasan terhadap praktik logging, dan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan hutan.

Peternakan

Populasi Sapi Potong Meningkat, Namun Penyakit Ternak Cukup Tinggi

Sektor peternakan di Tanah Laut didominasi oleh sapi potong, yang mengalami pertumbuhan populasi 7,22% pada tahun 2023, mencapai 88.420 ekor. Peningkatan ini mencerminkan potensi besar sektor peternakan dalam menopang ekonomi daerah. Namun, di balik peningkatan ini, terdapat sejumlah tantangan besar yang harus diatasi.

Salah satu tantangan utama adalah penyakit ternak yang masih cukup tinggi, terutama akibat kurangnya vaksinasi dan keterbatasan tenaga medis

hewan di beberapa kecamatan. Penyakit seperti demam tiga hari dan penyakit mulut dan kuku masih menjadi ancaman bagi populasi ternak.

Selain itu, peternak di Tanah Laut masih menghadapi kendala dalam akses pakan berkualitas. Saat ini, sebagian besar pakan ternak masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, yang menyebabkan fluktuasi harga dan menurunkan efisiensi usaha peternakan. Pengembangan pakan alternatif berbasis lokal menjadi solusi yang perlu segera diwujudkan untuk mengurangi ketergantungan ini.

Populasi Unggas Mengalami Penurunan

Berbeda dengan sapi potong, populasi unggas justru mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Populasi ayam pedaging di Kabupaten Tanah Laut mencapai 45.352.112 ekor, dengan produksi terbanyak di Kecamatan Bati-Bati. Namun, penurunan produksi unggas terjadi akibat harga pakan yang meningkat, wabah penyakit unggas, serta persaingan dengan produk unggas dari daerah lain.

Untuk meningkatkan daya saing sektor unggas, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung peternak dalam hal insentif harga pakan, akses pasar yang lebih luas, serta peningkatan manajemen biosekuriti untuk mencegah penyebaran penyakit unggas.

Perikanan Kaya Potensi, Tetapi Belum Optimal

Kabupaten Tanah Laut memiliki garis pantai yang cukup panjang, memberikan potensi besar bagi sektor perikanan. Namun, industri perikanan tangkap masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat penurunan stok ikan di perairan akibat eksploitasi berlebihan. Produksi ikan dari perairan laut mencapai 61.790 ton pada tahun 2023, sementara dari perairan umum hanya 4.361 ton.

Masalah lain yang cukup mengkhawatirkan adalah persaingan antara nelayan tradisional dengan kapal besar yang sering kali melakukan penangkapan ikan dalam jumlah besar tanpa memperhatikan keberlanjutan

ekosistem laut. Hal ini mengakibatkan nelayan kecil semakin sulit memperoleh hasil tangkapan yang cukup.

Meskipun potensi perikanan budi daya cukup besar, realisasinya masih jauh dari optimal. Salah satu kendala utama adalah minimnya infrastruktur dan teknologi dalam budidaya ikan. Petani ikan masih mengalami kesulitan dalam memperoleh benih berkualitas, pakan yang terjangkau, serta fasilitas pengolahan hasil perikanan.

Selain itu, masalah pencemaran air akibat limbah industri dan pertanian mulai berdampak pada produktivitas sektor perikanan budi daya. Jika tidak segera ditangani, pencemaran ini dapat semakin menurunkan hasil produksi ikan di daerah ini.

3. **Industri dan Pertambangan**

Dominasi Sektor Makanan dan Minimnya Diversifikasi

Sektor industri di Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah, dengan total 5.545 perusahaan yang tersebar di berbagai bidang usaha. Namun, ada satu fenomena yang cukup menonjol, yaitu dominasi industri makanan, yang mencapai 3.121 perusahaan (56,27% dari total industri).

Dampak dari kondisi ini adalah kurangnya diversifikasi ekonomi, di mana sektor industri lain tidak berkembang secara signifikan. Ketergantungan tinggi terhadap industri makanan dapat menjadi kelemahan saat terjadi gangguan pada sektor ini, seperti fluktuasi harga bahan baku atau perubahan kebijakan perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur berbasis teknologi dan inovasi agar ekonomi daerah lebih tangguh.

Selain itu, industri manufaktur di Tanah Laut masih didominasi oleh industri kecil dan mikro, dengan tenaga kerja yang relatif sedikit dibandingkan industri menengah dan besar. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap teknologi modern, kurangnya tenaga kerja terampil, serta minimnya investasi dari sektor swasta.

Eksploitasi Sumber Daya Tanpa Pengolahan Lanjutan

Informasi mengenai pertambangan dalam data yang tersedia cukup terbatas, tetapi dari pola pertumbuhan industri yang terkait dengan pengolahan batu bara dan minyak bumi, terlihat bahwa sektor ini masih berfokus pada eksploitasi sumber daya alam tanpa adanya nilai tambah yang signifikan.

Konsekuensi dari pola ini adalah ketergantungan tinggi terhadap sektor ekstraktif, di mana bahan mentah dijual tanpa melalui proses manufaktur yang dapat meningkatkan nilai ekonominya. Hal ini menyebabkan daerah tidak mendapatkan manfaat optimal dari hasil sumber daya alamnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong investasi dalam industri pengolahan berbasis sumber daya alam, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah.

4. **Distribusi Listrik dan Air**

Ketimpangan Akses dan Tingginya Kehilangan Daya

Elektrifikasi di Kabupaten Tanah Laut menjadi isu strategis dalam upaya pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat. Meskipun rasio elektrifikasi terus meningkat, masih terdapat tantangan dalam penyediaan listrik ke daerah terpencil, terutama di wilayah pesisir dan pedesaan. Kendala seperti infrastruktur yang terbatas, jarak antar pemukiman yang berjauhan, serta biaya pembangunan jaringan listrik yang tinggi menjadi faktor utama yang perlu diatasi.

Sumber utama listrik di Kabupaten Tanah Laut berasal dari PLN Wilayah VI Banjarmasin, dengan jumlah pelanggan listrik mencapai 93.598 pelanggan pada tahun 2024. Namun, ada beberapa masalah utama yang perlu menjadi perhatian:

Ketimpangan akses listrik antar wilayah: Beberapa kecamatan seperti Jorong dan Kintap masih bergantung pada pasokan dari PLN Tanah Bumbu, bukan dari jaringan PLN Tanah Laut sendiri. Ini menunjukkan belum meratanya distribusi listrik di seluruh daerah.

Tingginya penyusutan atau kehilangan daya listrik: Pada tahun 2024, jumlah daya yang hilang mencapai 19,13 juta kWh, yang berarti ada inefisiensi dalam sistem distribusi. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan biaya listrik bagi konsumen dan industri.

Upaya yang perlu dilakukan adalah penguatan infrastruktur listrik di wilayah-wilayah yang belum terjangkau secara optimal, serta meningkatkan efisiensi distribusi untuk menekan angka kehilangan daya.

Ketersediaan Air Bersih Belum Merata di Seluruh Wilayah

Dalam hal penyediaan air bersih, PT. Air Minum Berkah Banua melayani 115.955 pelanggan, dengan total air yang disalurkan sebesar 2,15 juta meter kubik pada tahun 2024. Namun, ada permasalahan yang cukup krusial.

Ketimpangan akses air bersih antar kecamatan: Beberapa kecamatan seperti Panyipatan dan Tambang Ulang tidak tercatat memiliki layanan distribusi air bersih yang memadai. Ini menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan infrastruktur dan distribusi air.

Kapasitas pasokan air masih terbatas, terutama bagi industri dan usaha besar yang membutuhkan suplai stabil untuk operasionalnya. Pemerintah daerah perlu mengembangkan investasi dalam sistem distribusi air yang lebih luas serta meningkatkan kapasitas produksi air bersih agar mampu memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dengan lebih baik.

5. **Struktur Tenaga Kerja**

Ketimpangan antara Industri Formal dan Non-Formal

Terdapat lonjakan signifikan dalam jumlah industri formal di Kabupaten Tanah Laut, dari 167 perusahaan pada tahun 2023 menjadi 372 perusahaan pada tahun 2024. Hal ini berdampak pada peningkatan tenaga kerja dari 4.222 orang menjadi 7.965 orang.

Namun, industri non-formal masih mendominasi dengan 5.681 unit usaha dan 9.557 tenaga kerja. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masih

banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa perlindungan hukum, akses ke modal, dan fasilitas pendukung usaha lainnya.

Untuk mengatasi hal ini, perlu ada fasilitasi bagi industri non-formal agar dapat berkembang menjadi industri formal, misalnya melalui kemudahan perizinan, bantuan akses modal, serta program pelatihan tenaga kerja.

6. **Pariwisata**

Ketimpangan Fasilitas dan Akses Akomodasi

Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi pariwisata yang besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan distribusi akomodasi, di mana sebagian besar hotel terkonsentrasi di Kecamatan Pelaihari, sementara kecamatan lain yang memiliki destinasi wisata menarik, seperti Panyipatan dan Takisung, masih minim fasilitas penginapan. Hal ini mengurangi kenyamanan wisatawan dan membatasi lama kunjungan mereka. Selain itu, kunjungan wisatawan masih terkonsentrasi pada destinasi tertentu, seperti Pantai Batakan dan Bukit Timah, sementara objek wisata lain seperti Air Terjun Bajuin dan Pantai Swarangan memiliki jumlah pengunjung yang jauh lebih sedikit. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya peningkatan promosi dan pengembangan infrastruktur di destinasi yang kurang populer.

Kurangnya sarana pendukung pariwisata juga menjadi kendala, terutama dalam ketersediaan rumah makan dan restoran. Beberapa kecamatan seperti Panyipatan, Kurau, Bumi Makmur, dan Bati-Bati bahkan tidak memiliki rumah makan sama sekali, sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan. Selain itu, fasilitas seperti tempat parkir, toilet umum, serta pusat informasi wisata masih minim di beberapa objek wisata. Tantangan lain adalah minimnya wisatawan mancanegara, dengan hanya enam wisatawan asing yang tercatat berkunjung ke Tanah Laut pada 2024. Hal ini disebabkan kurangnya promosi di tingkat internasional, keterbatasan fasilitas yang memenuhi standar global, serta aksesibilitas yang belum optimal.

Minimnya Minat

Pariwisata Kabupaten Tanah Laut juga mengalami fluktuasi kunjungan wisatawan yang cukup besar setiap bulannya. Kunjungan wisatawan cenderung meningkat saat musim liburan dan menurun pada bulan-bulan biasa. Ketergantungan pada musim liburan ini menunjukkan perlunya strategi pemasaran yang lebih merata sepanjang tahun agar pariwisata tetap stabil. Aksesibilitas ke beberapa destinasi wisata juga masih menjadi tantangan, terutama karena jarak yang cukup jauh dari pusat kota Pelaihari serta kurangnya transportasi umum. Beberapa destinasi seperti Pantai Kintap dan Pantai Cemara berjarak 90 km dari pusat kota, sehingga perlu perbaikan infrastruktur dan layanan transportasi agar lebih mudah diakses oleh wisatawan.

Selain itu, keberagaman jenis wisata masih terbatas, dengan mayoritas destinasi berupa wisata alam seperti pantai dan gunung. Wisata buatan dan edukasi masih belum berkembang optimal, padahal keberagaman ini penting untuk menarik lebih banyak segmen wisatawan, termasuk wisata keluarga dan wisatawan yang mencari pengalaman edukatif. Potensi wisata bahari juga belum dimanfaatkan secara maksimal, meskipun Kabupaten Tanah Laut memiliki garis pantai yang panjang. Beberapa pantai masih kurang dikelola dengan baik dan minim atraksi tambahan seperti olahraga air atau ekowisata pesisir.

Hal terakhir yang tidak kalah mendesak adalah pengelolaan lingkungan yang kurang optimal, terutama di kawasan pantai yang mengalami abrasi dan pencemaran sampah. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa merusak daya tarik wisata dalam jangka panjang.

7. **Infrastruktur, Transportasi, dan Komunikasi**

Jaringan Jalan: Kerusakan Masih Jadi Tantangan Utama

Kabupaten Tanah Laut memiliki jaringan jalan yang cukup panjang dengan sebagian besar berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Namun, kondisi jalan masih menjadi permasalahan serius, dengan lebih dari

30% mengalami kerusakan dalam kategori rusak hingga rusak berat. Keadaan ini mempengaruhi kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi.

Sebagian besar jalan telah beraspal, tetapi masih ada ruas yang berupa jalan tanah atau kerikil yang rentan terhadap kerusakan akibat cuaca ekstrem dan beban kendaraan berat. Kecamatan Pelaihari memiliki panjang jalan terpanjang dibandingkan kecamatan lainnya, yang mencerminkan posisinya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.

Lonjakan Kendaraan Pribadi, Transportasi Umum Masih Minim

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Laut terus meningkat setiap tahun, didominasi oleh sepeda motor yang menjadi moda transportasi utama bagi masyarakat. Selain itu, jumlah kendaraan roda empat seperti mobil penumpang dan truk juga bertambah, menandakan peningkatan mobilitas barang dan jasa. Namun, jumlah angkutan umum seperti bus masih sangat minim, sehingga masyarakat cenderung lebih bergantung pada kendaraan pribadi. Ketidakseimbangan ini dapat memperburuk kondisi lalu lintas dan meningkatkan konsumsi bahan bakar, yang berkontribusi terhadap emisi karbon.

Distribusi kendaraan tidak merata di seluruh kecamatan. Kecamatan Pelaihari sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi memiliki jumlah kendaraan paling banyak, diikuti oleh Kintap dan Jorong. Sementara itu, beberapa kecamatan lainnya memiliki jumlah kendaraan yang lebih sedikit, yang dapat menunjukkan keterbatasan akses transportasi atau rendahnya aktivitas ekonomi.

Transportasi Publik Terbatas, Angkutan Barang Tidak Merata

Minimnya transportasi umum menjadi salah satu permasalahan utama di Kabupaten Tanah Laut. Jumlah bus yang beroperasi masih sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak memiliki banyak pilihan transportasi selain kendaraan pribadi. Kondisi ini berdampak pada peningkatan kepadatan lalu

lintas, terutama di jalur utama yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Selain transportasi penumpang, distribusi kendaraan logistik juga menunjukkan ketidakseimbangan. Kecamatan yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi seperti Kintap dan Jorong cenderung memiliki lebih banyak truk dibandingkan daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa akses transportasi barang lebih berkembang di wilayah tertentu, sementara daerah lainnya masih mengalami keterbatasan dalam infrastruktur logistik.

Dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah, perawatan jalan menjadi tantangan tersendiri. Jika tidak diimbangi dengan pemeliharaan yang memadai, kerusakan jalan akan semakin parah dan dapat menghambat mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, perbaikan jalan dan peningkatan fasilitas transportasi umum perlu menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Akses Telekomunikasi Belum Merata, Banyak Wilayah Blankspot

Sektor komunikasi di Kabupaten Tanah Laut mengalami perkembangan, tetapi masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam pemerataan akses telekomunikasi. Sejumlah kecamatan masih belum memiliki layanan pos yang memadai, yang dapat menyulitkan masyarakat dalam hal surat-menyurat dan pengiriman barang.

Selain itu, akses internet masih menjadi permasalahan di beberapa wilayah.

Terdapat banyak titik blankspot atau area tanpa sinyal internet yang tersebar di beberapa kecamatan. Daerah dengan jumlah blankspot tertinggi antara lain Pelaihari, Batu Ampar, dan Takisung. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan digital yang perlu diperbaiki untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap layanan internet.

Meskipun jumlah pelanggan internet rumah tangga terus meningkat, persentasenya masih relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Laut. Hal ini menandakan bahwa masih banyak rumah

tangga yang belum memiliki akses internet yang stabil, yang dapat menghambat perkembangan ekonomi digital dan akses terhadap informasi.

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi, jumlah menara BTS masih terbatas di beberapa kecamatan. Hal ini menyebabkan gangguan sinyal dan keterbatasan akses komunikasi digital di beberapa daerah. Perlu adanya ekspansi jaringan telekomunikasi serta peningkatan kapasitas layanan agar masyarakat di seluruh wilayah dapat menikmati akses komunikasi yang lebih baik.

8. Adaptasi Manajemen Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik

Pelayanan publik berkualitas menjadi fokus utama masalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, banyak tuntutan masyarakat dalam menyelenggaran layanan publik harus cepat, prima dan responsif. Masih banyak tugas untuk diselesaikan masalah layanan pemerintah. contoh masih adanya proses pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan SOP Pelayanan, contohnya juga seperti pelayanan dasar pembuatan pengantar administrasi penduduk, pertanahan, koordinasi dan sebagainya. Penanganan persoalan polemik di masyarakat desa pun adalah bagian pelayanan publik pemerintahan desa. Maka secara umum bahwa segala pembuatan dokumen berharga bagi masyarakat desa tentu harus melalui pemerintahan desa terlebih dahulu sebagai dasar syarat legalitas. Mendekatkan pelayanan publik desa menjadi isu yang harus di tangkap oleh pemerintah, karena menjadi perhatian kepala daerah.

Selain itu untuk menghadapi di era society 5.0, Pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia dihadapkan pada era perkembangan teknologi yang canggih (artificial intelligence). Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus mengantisipasi era keterbukaan yang semakin luas, yang berujung pada kemampuan untuk bersaing dalam rangka meningkatkan kapasitas daya saingnya. Untuk mendukung era keterbukaan yang semakin meluas harus di dukung melalui pendekatan paradigma mengubah orientasi cara bekerja dengan apa yang disebut sebagai network government dan collaborative

governance. Pemerintah sudah tidak dapat bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah publik sendirian. Pemerintah berkomitmen dalam menangkap isu peluang tersebut dengan beradaptasi dengan inovasi layanan publik yang semakin dituntut untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Manajemen pemerintahan di tuntut untuk dinamis dan adaptif dalam menyikapi perubahan. Birokrasi harus respon terhadap kebijakan yang terus berubah, selain itu pemerintah dihadapkan dengan pengelolaan APBD yang berdampak langsung kepada masyarakat.

9. **Gerbang Logistik**

Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi strategis dalam mendukung peran daerah sebagai gerbang logistik bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan gerbang logistik Kalimantan. Namun, hingga saat ini, infrastruktur logistik dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Tanah Laut masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan perannya dalam rantai pasok nasional dan internasional. Tantangan utama meliputi keterbatasan akses transportasi darat, laut, dan pelabuhan, belum berkembangnya pusat distribusi barang yang modern, serta kurangnya sinergi dengan kawasan industri dan perdagangan.

Untuk mendukung visi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari **Gerbang Logistik Nusantara**, Kabupaten Tanah Laut perlu mempercepat pembangunan infrastruktur logistik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat kerja sama dengan IKN dan pasar global guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada saat ini, Kabupaten Tanah Laut telah memiliki Pelabuhan Pelaihari yang berlokasi di Kecamatan Jorong. Pelabuhan ini berperan sebagai pintu masuk logistik dari luar pulau Kalimantan yang akan mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Nusantara.

10. **Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Energi**

Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi besar dalam pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, dan

kehutanan. Namun, hingga saat ini, hilirisasi industri dan sektor non-ekstraktif belum berkembang secara optimal sebagai sektor unggulan di masa depan. Kurangnya infrastruktur pendukung, rendahnya investasi industri pengolahan, serta keterbatasan tenaga kerja terampil menjadi tantangan utama dalam mendorong nilai tambah produk lokal. Selain itu, belum adanya ekosistem industri yang kondusif, termasuk insentif fiskal dan akses pasar yang luas, menghambat pertumbuhan sektor ini. Untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai bagian dari superhub ekonomi Nusantara, Kabupaten Tanah Laut perlu mempercepat hilirisasi industri melalui penguatan investasi, pembangunan kawasan industri terpadu, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan industri berbasis potensi unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan berkelanjutan.

Selain itu, Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam hilirisasi produk dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Kurangnya modernisasi pertanian, akses terbatas terhadap teknologi digital, serta ketergantungan pada pupuk dan bahan bakar bersubsidi menghambat peningkatan produktivitas. Selain itu, minimnya pengembangan pangan lokal dan pangan akuatik serta keterbatasan infrastruktur irigasi dan peralatan pertanian memperlambat transformasi sektor ini.

Di sisi lain, upaya menuju swasembada energi melalui ekonomi hijau masih terkendala oleh kurangnya investasi dalam energi terbarukan dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya energi lokal. Pengembangan energi berbasis bioenergi, tenaga surya, dan hidro masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu untuk mendorong hilirisasi swasembada pangan dan energi melalui pembangunan kawasan **Food Estate**, modernisasi dan digitalisasi pertanian, penguatan akses subsidi dan bahan baku pertanian, serta pengembangan energi hijau yang ramah

lingkungan. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.

11. Panjang Garis Pantai Kabupaten Tanah Laut Mencapai 200 km

Panjang Garis Pantai Kabupaten Tanah Laut sangat panjang hingga mencapai 200 km. Pemanfaatan Potensi Perikanan Secara Berkelanjutan dapat dilakukan karena panjang garis pantai Kabupaten Tanah Laut mencapai **200 km**, yang memberikan peluang besar dalam sektor perikanan tangkap, budidaya, serta industri pengolahan hasil perikanan. Namun, optimalisasi sektor ini masih menghadapi tantangan seperti modernisasi alat tangkap yang ramah lingkungan, pengembangan budidaya pesisir untuk komoditas unggulan (rumput laut, kerapu, udang vaname), serta peningkatan infrastruktur pengolahan dan pemasaran agar produk perikanan memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, strategi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan di Kabupaten Tanah Laut.

Namun, panjang garis pantai Kabupaten Tanah Laut mencapai **200 km dapat menjadi ancaman terjadinya banjir Pesisir dan Abrasi** karena, sehingga rentan terhadap banjir rob akibat pasang laut, gelombang tinggi, dan badai. Selain itu, abrasi terus menggerus garis pantai, mengancam permukiman dan infrastruktur pesisir akibat minimnya perlindungan alami seperti hutan mangrove. Selain itu, **Kerentanan Terhadap Banjir dan Kekeringan** juga dapat terjadi karena banyak sungai bermuara ke laut, dan saat pasang tinggi, aliran sungai terhambat, memperparah banjir di daerah hilir. Di sisi lain, musim kemarau menyebabkan kekeringan yang berdampak pada pertanian, ketersediaan air bersih, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Tabel 2. 129 Isu Strategis terhadap Misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah	Misi RPJMD Kab Tanah Laut 2025-2029
			Global	Nasional	Regional		
1. Melimpahnya sumber daya alam di sektor primer mencerminkan potensi sumber daya manusia yang terbiasa beradaptasi dengan kondisi alam. Potensi ini dapat dikembangkan dengan menciptakan tenaga kerja baru yang tidak hanya mendukung industri, tetapi juga mengedepankan kearifan lokal yang ramah lingkungan. 2. Kabupaten Tanah Laut memiliki proporsi penduduk usia produktif yang tinggi, yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor menuju Bonus Demografi 3. Laju pertumbuhan penduduk **1,27%** di Kabupaten Tanah Laut termasuk memiliki **potensi ekonomi dan pembangunan** karena angka ini menunjukkan pertumbuhan yang **stabil dan terkendali**	**Sumber Daya Manusia (SDM) dan Daya Saing Daerah** 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, tetapi masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional 2. Kualitas pendidikan masih menjadi tantangan, dengan sarana yang belum sesuai standar dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. 3. Daya saing tenaga kerja masih rendah, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja lebih rendah dibandingkan provinsi 4. Kualitas Pendidikan Rendah	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Hijau 2. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	1. Perkembangan demografi, termasuk peningkatan jumlah lansia. 2. Perkembangan teknologi, yang diproyeksikan akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini. 3. Pertumbuhan kelas menengah serta persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam.	1. Rendahnya produktivitas 2. Kurangnya Literasi di Berbagai Skill 3. Kurangnya penguatan riset dan IPTEKIN: 4. Kualitas tenaga kerja yang tertinggal 5. Tantangan dalam menurunkan tingkat kemiskinan 6. Penanggulangan TBC	1. Kemiskinan dan SDM unggul menjadi kunci transformasi sosial dan ekonomi. 2. Minimnya sarana dan prasarana layanan dasar 3. Tingginya kemiskinan dan kesenjangan masyarakat. 4. Akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan. 5. Minimnya akses pendidikan dan pengembangan tenaga kerja	**Kondisi Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial** 1. Pendidikan: Partisipasi dan Akses Sekolah 2. Kesehatan Masyarakat: Penyakit dan Akses Layanan 3. Kesehatan Anak: Gizi Buruk, Stunting dan Imunisasi 4. Penduduk Usia Tua dan Dependecy Ratio 5. Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi 6. Bencana Alam dan Kerentanan Wilayah 5. Keamanan dan Sosial 6. Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak 7. Terbatasnya Akses Ekonomi Perempuan 8. Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan 9. Minimnya Keterwakilan Perempuan di Ranah Politik dan Legislatig 7. Kerentanan Kelompok Perempuan terhadap	**Membangun SDM Yang Unggul Dan Berdaya Saing**

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah	Misi RPJMD Kab Tanah Laut 2025-2029
			Global	Nasional	Regional		
						Kekerasan dan Diskriminasi **Struktur Tenaga Kerja** 1. Ketimpangan antara Industri Formal dan Non-Formal	
1. Pusat kegiatan ekonomi berskala internasional melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, industri kelautan, pertanian, dan pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antar Kawasan berbasiskan pembangunan yang berkelanjutan. 2. Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi besar dalam sektor perindustrian dengan **pengembangan Kawasan Industri Jorong (KIJ)** sebagai pusat industri strategis yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian ATR/BPN. Kawasan ini berpotensi menarik investasi di sektor **industri pengolahan, manufaktur, dan logistik** karena akses transportasi yang baik ke pelabuhan dan jalur distribusi utama.	**Perekonomian & Kesejahteraan:** 1. Pertumbuhan ekonomi melambat 2. Ekonomi masih bergantung pada pertambangan, rentan fluktuasi harga. 3. Potens Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan tumbuh pesat, tetapi kontribusinya masih diperingkat dua 4. Kemiskinan dengan masih ada 13.400 jiwa miskin sehingga menjadi tantangan 5. Pengangguran lebih rendah dari provinsi, tapi butuh lapangan kerja berkualitas. 6. Kesenjangan Sosial yang dilihat dari rasio gini	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Hijau	1. Dinamika geopolitik dan geoekonomi 2. Peningkatan urbanisasi dan perubahan konstelasi perdagangan global. 3. Ecolabelling Perikanan untuk memastikan bahwa produk perikanan berasal dari sumber yang berkelanjutan, meminimalkan dampak terhadap ekosistem laut, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.	1. Deindustrialisasi dini dan rendahnya produktivitas pertanian 2. Potensi pariwisata yang belum optimal 3. Pemanfaatan ekonomi laut yang belum maksimal: 4. Integrasi ekonomi domestik yang terbatas 5. Cetak Sawah 6. Overfishing Wilayah Laut Jawa (WPPNRI 712) yang mencakup **Laut Jawa, Selat Karimata, dan perairan sekitar** menyebabkan **penurunan stok ikan**, terganggunya ekosistem laut, serta berdampak	1. Pembangunan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan diperkuat melalui interaksi antarwilayah. 2. Perekonomian masih bergantung pada sektor hulu, sementara hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam berjalan lambat. 3. Pengembangan industri pengolahan terhambat oleh kurangnya lingkungan usaha yang kondusif, minimnya insentif fiskal, rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan. 4. Kurangnya pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan memperlambat	**Transformasi Ekonomi dengan :** **Potensi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan** 1. Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan 2. Pengurangan Kawasan Hutan dan Lahan Kritis 3. Populasi Sapi Potong Meningkat, Namun Penyakit Ternak Cukup Tinggi 4. Populasi Unggas Mengalami Penurunan 5. Perikanan Kaya Potensi, Tetapi Belum Optimal **Industri dan Pertambangan** 1. Dominasi Sektor Makanan dan Minimnya Diversifikasi **Pariwisata** 1. Ketimpangan Fasilitas dan Akses Akomodasi 2. Minimnya Minat	**Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas**

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah	Misi RPJMD Kab Tanah Laut 2025-2029
			Global	Nasional	Regional		
3. Kabupaten Tanah Laut masih memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan potensi pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Pengembangan industri dan smelter menjadi peluang strategis dalam menciptakan sektor ekonomi baru 4. Panjang Garis pantai hingga 220 km, Panjangnya garis pantai ini memberikan peluang besar dalam berbagai sektor, seperti perikanan, wisata bahari, transportasi laut, serta konservasi lingkungan pesisir.				negatif terhadap kesejahteraan nelayan.	pembangunan daerah.	**Gerbang Logistik** **1.** Peningkatan infrastruktur transportasi dan konektivitas antar kawasan, termasuk akses pelabuhan, jalan utama, dan jalur distribusi yang efisien. **Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Energi (Swasembada)** 1. Tidak adanya Industri Pupuk dan Pangan Ternah 2. Kabupaten Tanah Laut Sebagai Lumbung Pangan Kalsel dengan IKP Sangat Tahan 3. Pengembangan Energi Terbarukan **Pemanfaatan Potensi Perikanan** 1. **P**anjang garis pantai Kabupaten Tanah Laut mencapai **200 km** 2. Kabupaten Tanah Langsung berbatasan Langsung dengan Laut Jawa di Sebelah Selatan dan Barat sehingga memiliki potensi perikanan tangkap yang besar 3. Pada Tahun 2024, Kab Tanah Laut menjadi	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah	Misi RPJMD Kab Tanah Laut 2025-2029
			Global	Nasional	Regional		
						pengasil perikanan tertangkap terbanyak ketiga di Kalimantan Selatan mencapai 67.026 ton dengan penangkap dilaut mendominasi sebesar 62.243 ton **Penguatan Kawasan Industri Jorong melalui Promosi Investasi dan Konektivitas dengan KEK Mekar Putih** **1.** Pemerintah daerah mendorong percepatan operasional Kawasan Industri Jorong sebagai pusat hilirisasi komoditas unggulan dengan menarik investor strategis melalui promosi investasi. **2.** Pembangunan konektivitas antara KI Jorong dan KEK Mekar Putih bertujuan memperkuat sistem logistik	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah	Misi RPJMD Kab Tanah Laut 2025-2029
			Global	Nasional	Regional		
1. Kabupaten Tanah Laut, yang dekat dengan Cincin Api dan didominasi oleh sungai-sungai, berpotensi menjadi pusat pengembangan energi baru terbarukan seperti panas bumi, bayu, surya, dan air. 2. Kabupaten Tanah Laut memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistem yang kaya, berpotensi untuk pengembangan ekowisata serta pusat penelitian berbasis alam. 3. Kabupaten Tanah Laut memiliki lahan gambut yang luas dengan hutan yang masih terjaga, sehingga pelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, warisan geologi, dan ekologi menjadi penting untuk menjaga kelestarian hutan. 4. Kabupaten Tanah Laut masih didominasi oleh rawa dan sungai, sehingga berpotensi mengembangkan moda angkutan air sebagai sarana mobilitas masyarakat di daerah terisolir guna meningkatkan akses terhadap fasilitas	**Tata Ruang dan Lingkungan Hidup** 1. Kesesuaian Tata Ruang Rendah 2. Degredasi Lingkungan 3. Tingkat Risiko Bencana Tinggi di Kab Tanah Laut	1. Pengendalian dan Penanganan Bencana 2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan 4. Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Ramah Lingkungan	1. Perubahan iklim, yang menyebabkan cuaca ekstrem dan bencana. 2. Pemanfaatan luar angkasa untuk ekonomi, kelestarian, dan keamanan antariksa.	1. Kurangnya infrastruktur dan literasi digital 2. Pembangunan yang kurang berkelanjutan 3. Ketahanan ekologi yang menghadapi ancaman	1. Pengembangan infrastruktur berbasis lingkungan dilakukan 2. degradasi lingkungan ini juga berisiko merusak warisan geologi dan keanekaragaman hayati yang bernilai ekologis maupun ekonomis 3. penguatan **infrastruktur transportasi** yang efisien dan berkelanjutan untuk mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai **gerbang logistik** 4. Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif	**Eksploitasi Sumber Daya Tanpa Pengolahan Lanjutan Distribusi Listrik dan Air** 1. Ketimpangan Akses dan Tingginya Kehilangan Daya 2. Ketersediaan Air Bersih Belum Merata di Seluruh Wilayah **Infrastruktur, Transportasi, dan Komunikasi** 1. Jaringan Jalan: Kerusakan Masih Jadi Tantangan Utama 2. Lonjakan Kendaraan Pribadi, Transportasi Umum Masih Minim 3. Transportasi Publik Terbatas, Angkutan Barang Tidak Merata. 4. Akses Telekomunikasi Belum Merata, Banyak Wilayah Blankspot **Ancaman Banjir Pesisir dan Abrasi karena panjang garis pantai Kabupaten Tanah Laut mencapai 200 km**	**Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas**

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah	Misi RPJMD Kab Tanah Laut 2025-2029
			Global	Nasional	Regional		
pendidikan dan kesehatan.							
1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang cukup tinggi, menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di daerah terpencil. 2. Potensi peningkatan digitalisasi layanan publik, guna mempercepat akses dan pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat.	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik** 1. Reformasi birokrasi belum optimal, ditandai dengan rendahnya indeks reformasi birokrasi dan kendala dalam digitalisasi layanan publik. 2. Akuntabilitas keuangan cukup baik dengan perolehan opini WTP, tetapi efektivitas pemanfaatan anggaran masih perlu ditingkatkan.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesionaldan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)	-	1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif 2. Lemahnya kepastian hukum dan penegakan HAM 3. Demokrasi yang belum matang 4. Stabilitas nasional yang menghadapi tantangan 5. Ketahanan sosial budaya yang masih rentan	1. Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam akselerasi pembangunan. 2. Stabilitas pertahanan dan keamanan diperkuat untuk menjamin kedaulatan, terutama di kawasan perbatasan dan wilayah IKN. 3. Penyusunan dan penyelesaian RDTR di tingkat kabupaten/kota harus mempertimbangkan risiko bencana dengan fokus pada	Adaptasi Manajemen Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik	**Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif Dan Dinamis**

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah	Misi RPJMD Kab Tanah Laut 2025-2029
			Global	Nasional	Regional		
	3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik tinggi (88,41), namun terdapat ketimpangan pemerataan layanan di daerah terpencil. 4. Transformasi Digital masih Perlu Ditingkatkan Lagi 5. Inovasi Daerah Kurang Optimal				mitigasi dan keberlanjutan lingkungan.		

Sumber: Bapperida Kabupaten Tanah Laut, 2025

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi dapat diartikan sebagai jawaban mendasar terhadap pertanyaan "*What do we want to become*? (akan seperti apa kita di masa depan?)". Hal tersebut mencerminkan cita-cita jangka panjang kepala daerah dalam membangun sebuah daerah, serta menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan guna mencapai kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

"Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan"

Memahami substansi Visi merupakan bagian dari upaya membangun value yang harus melekat dalam merencanakan pembangunan Kab. Tanah Laut kedepan. *Value* Visi inilah yang akan menghantarkan kita dalam menyusun misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih tepat. Beberapa *value* yang terkandung dalam Visi diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

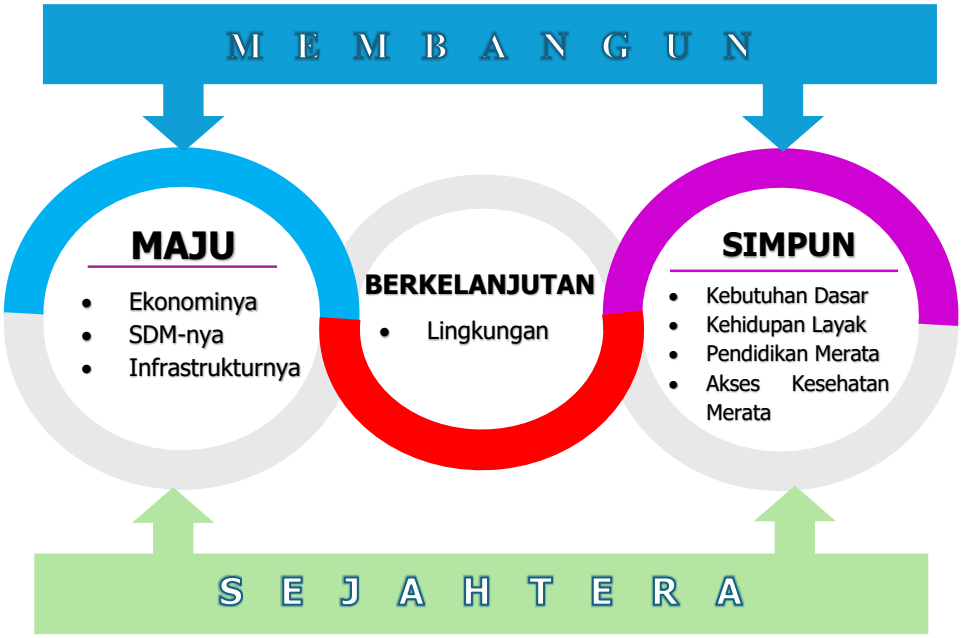

*Note : SIMPUN berasal dari **Bahasa Banjar** yang memiliki arti "**rapi atau tertata dengan baik** atau bisa juga diartikan sebagai "**selesai**"*

Gambar 3. 1 Value Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut

Makna dari visi pembangunan **"Membangun"** Tanah Laut SIMPUN, Maju, dan Berkelanjutan" tidak dapat terlepas dari kondisi Kabupaten Tanah Laut pada tahun sebelumnya. Dari visi tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan berfokus kepada pembangunan yang merata dan optimal, baik itu ekonomi, infrastruktur, dan masyarakat/SDM.

Dalam konteks visi pembangunan, kata **"Membangun"** tidak hanya berarti membangun secara fisik seperti **Infrastruktur**, tetapi juga mencakup pembangunan **Sumber Daya Manusia (SDM)** yang berkualitas. Pembangunan fisik, seperti sekolah dan rumah sakit sangat penting sebagai fondasi bagi kemajuan suatu daerah atau negara. Namun, tanpa didukung oleh SDM yang unggul, pembangunan tersebut tidak akan berjalan optimal dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pembangunan SDM menjadi aspek yang tak terpisahkan, baik itu mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, pembangunan karakter, maupun peningkatan kesejahteraan

dan kesehatan masyarakat. Keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM menjadi kunci bagi tercapainya visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Makna "Membangun" yang disematkan dalam Visi Pembangunan di RPJMD ini mengandung nilai dan semangat untuk pencapaian pembangunan 5 tahun ke depan lebih baik dari yang ada saat ini. Tentu saja ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab oleh pemerintahan saat ini. Dengan kondisi Kabupaten Tanah Laut saat ini yang masih belum optimal, maksud dari kata "Membangun" ini harus dimaknai sebagai peningkatan dan pengembangan potensi Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik.

Makna **"Membangun Maju"** dalam memahami Visi Pembangunan ini diorientasikan pada aspek membangun kemajuan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua aspek inilah yang diharapkan menjadi penggerak pembangunan di Tanah Laut. Makna "Membangun Maju" secara implisit masuk di Misi pembangunan pertama **"Membangun SDM Yang Unggul Dan Berdaya Saing Dengan Nilai-Nilai Agama".** dan didukung pengembangan infrastruktur merata yang memperhatikan keberlanjutan melalui misi pembangunan kedua **"Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas"**.

Sedangkan Makna **"Membangun SIMPUN"** ini merupakan gambaran kondisi Tanah Laut yang terpenuhi hak dasar masyarakat Tanah Laut untuk kehidupan layak dan memberikan kenyamanan dengan memperhatikan kualitas sosial serta kualitas budaya Tanah Laut. Kehidupan layak yang dimaksud harus berdasarkan prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama oleh masyarakat, baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Seluruh masyarakat memiliki akses terhadap semua pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, terutama dalam hal kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, **"Membangun SIMPUN"**

berarti menciptakan pembangunan yang tertata dengan baik dan terselesaikan secara menyeluruh, di mana setiap warga memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang terpenuhi, kehidupan yang layak, pendidikan yang merata bagi semua, serta layanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Makna **"Membangun SIMPUN"** secara implisit masuk juga di Misi Pembangunan Pertama **"Membangun SDM Yang Unggul Dan Berdaya Saing Dengan Nilai-Nilai Agama".**

Tujuan besar pembangunan yang terkandung pada makna membangun maju dan membangun simpun ini adalah pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat Tanah Laut. Artinya, segala pembangunan, kebijakan, dan program yang akan dilakukan di Tanah Laut berfokus pada **kesejahteraan masyarakat**. Cita-cita besar ini tidak terwujud dan bermakna jika nilai **"Sejahtera"** tidak menyertai proses pembangunan di Tanah Laut. Maka Makna dari sejahtera dapat diartikan pula sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Ini mencakup kesejahteraan ekonomi melalui peluang usaha dan pekerjaan yang layak, pendidikan yang merata dan berkualitas, serta layanan kesehatan yang mudah diakses. Sejahtera juga berarti kehidupan sosial yang harmonis, pembangunan yang ramah lingkungan, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan tidak hanya tercapai dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan.

3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi pembangunan daerah merupakan penjabaran dari Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Dalam Pilkada yang telah berlangsung, Bupati dan

Wakil Bupati terpilih menetapkan 6 Misi untuk mewujudkan Visi Pembangunan, keenam misi tersebut adalah :

1. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan**
2. **Mewujudkan Peningkatan Kesehatan yang Berkualitas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
3. **Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keagamaan serta Kualitas SDM**
4. **Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**
5. **Penataan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan**
6. **Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas**

Untuk kepentingan menyusun desain perencanaan pembangunan jangka menengah yang baik, maka pemahaman terhadap kerangka berpikir Visi-Misi Kepala Daerah menjadi penting. Kerangka pikir tersebut dapat terlihat jelas dalam konstruksi Visi-Misi Kepala Daerah sebagai berikut.

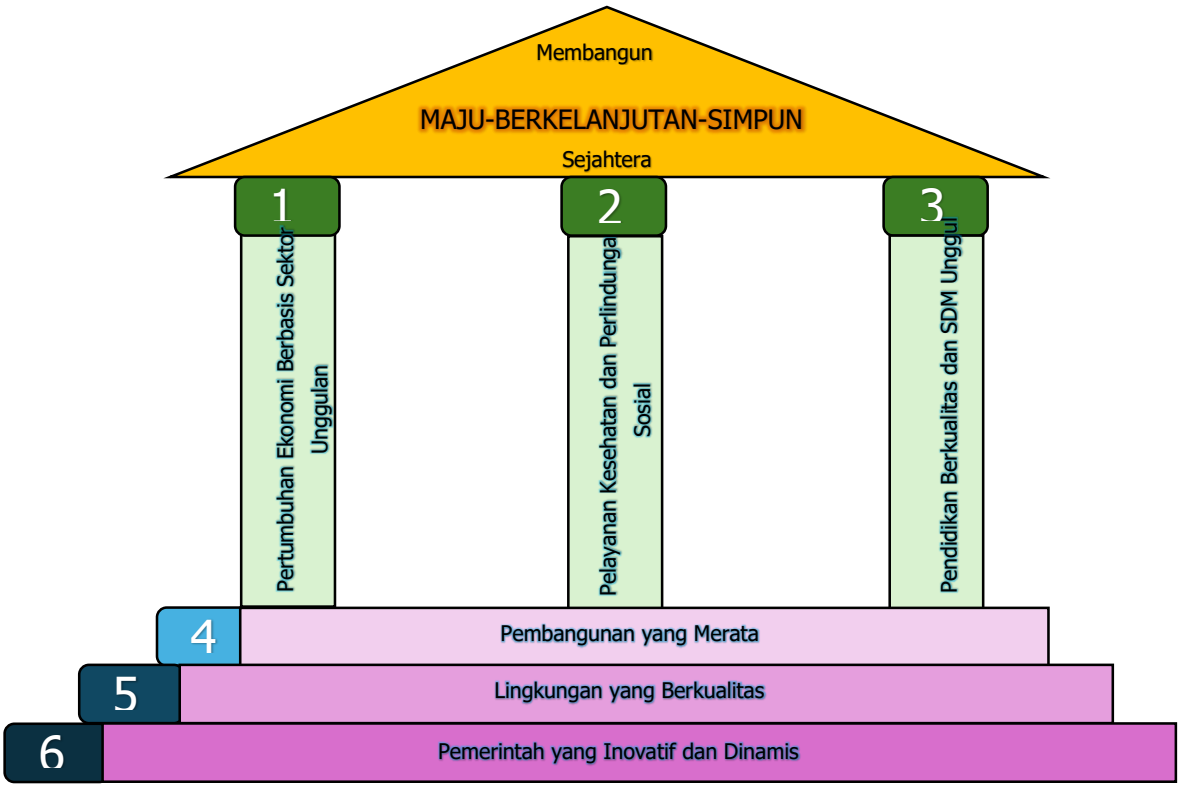

Dalam manajemen strategis, penyusunan arsitektur kinerja pembangunan memerlukan transformasi Misi Kepala Daerah menjadi Misi Pembangunan. Transformasi ini dilakukan tanpa menghilangkan makna dan substansi dari misi yang diusung saat pilkada. Proses ini melibatkan ekstraksi makna dari setiap misi, kemudian dikelompokkan berdasarkan bidang dan fungsi yang relevan. Dengan pendekatan ini, Misi Pembangunan dapat lebih terstruktur dan selaras dengan arah kebijakan serta program pembangunan daerah.

sebagai berikut:

1. Membangun SDM Yang Unggul Dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Dan Dinamis

Misi Pembangunan yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi acuan dalam merumuskan kerangka berpikir pencapaian misi melalui cascading

tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD ini. Kerangka ini dirancang untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra Perangkat Daerah) yang tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMD sehingga memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3.3 Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Tanah Laut disusun dengan kerangka kinerja yang sistematis, mulai dari perumusan visi, misi, hingga implementasi program. Setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencermikan prioritas pembangunan daerah yang akan mencapai acuan atau tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kinerja pemerintah. Untuk memastikan pencapaian yang terukur, keberhasilan bupati dievaluasi melalui **Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan**, sementara realisasi indikator sasaran RPJMD dinilai berdasarkan **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** sebagai parameter utama dalam mengukur progres pembangunan.

Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tanah Lauh Tahun 2025-2029 yang di ikuti dengan gambar arsitektur kinerja Tanah Laut:

3.3.1 Tujuan I : Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 1 : Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Nilai-nilai agama, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut.

a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut.
    1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan
    2) Meningkatnya Derajat Kesehatan
    3) Meningkatnya Kesetaraan Gender
    4) Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda

MISI 1	**Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Nilai-nilai Agama**				
TUJUAN	**Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing**				
INDIKATOR TUJUAN	**Indeks Pembangunan Manusia**				
SASARAN	**Meningkatnya Kualitas Pendidikan**		**Meningkatnya Derajat Kesehatan**	**Meningkatnya Kesetaraan Gender**	**Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda**
INDIKATOR SASARAN	**Rata-Rata Lama Sekolah**	**Harapan Lama Sekolah** / **Nilai Raport Pendidikan**	**Usia Harapan Hidup**	**Indeks Ketimpangan Gender**	**Indeks Pembangunan Pemuda**
PROGRAM UNGGULAN (JANJI BUPATI)	• Satu Desa Satu Lulusan Pendidikan Tinggi • Beasiswa Pendidikan jalur prestasi dan / Atau tidak mampu bagi pelajar SD, SMP, SMA Pendidikan Umum dan Agama • Peningkatan insentif bagi guru Agama • Sarjana Pemuda Pelopor				

Gambar 3. 4 Cascading Pencapaian Tujuan 1

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan bahwa Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk menciptakan SDM yang cerdas sehat, setara dan kompetitif. SDM menjadi fondasi utama pembangunan daerah berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan diatas dirumuskan sasaran pertama, meningkatkan kesehatan untuk semua. Kedua, meningkatkan Pendidikan yang berkualitas dan merata, Ketiga Meningkatkan kesetaraan gender serta yang keempat meningkatkan kualitas pembangunan pemuda.

Meningkatnya Derajat Kesehatan, sasaran ini utamanya untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif melalui jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menikmati umur Panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. **Meningkatnya Kualitas Pendidikan**, sasaran ini utamanya untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global dan mengurangi kesenjangan sosial. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan bagi semua kelompok masyarakat melalui bantuan bagi murid dan guru. **Meningkatnya Kesetaraan Gender,** Sasaran ini untuk mengurangi ketimpangan atau disparitas peran, akses, dan

kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, partisipasi ekonomi, dan politik. **Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda,** tujuan utama sasaran ini adalah menciptakan generasi muda yang berdaya saing, mandiri, produktif, inovatif, serta memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

3.3.2 Tujuan II : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Dalam rangka pencapaian misi 2 pada tujuan I, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, maka sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut.

1) Meningkatnya Produktiftas Dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah
2) Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
3) Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus berdampak pada penurunan kemiskinan dengan menciptakan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pendekatan ekonomi inklusif diharapkan menghasilkan pola pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Potensi Daerah dan **Meningkatkan Lapangan Pekerjaan dan Pemerataan Pendapatan Daerah**, diartikan bahwa produktifitas, daya saing, dan pemasaran domestic global menjadi fokus dari Kabupaten Tanah Laut untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan daya saing dan produktifitas, pariwisata, industri, sektor unggulan berupa pertanian dan perdagangan menjadi roda ekonomi utama Kabupaten Tanah Laut karena berdampak ke seluruh perekonomian masyarakat.

MISI 2	**Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas**		
TUJUAN	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**		
INDIKATOR TUJUAN	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**		**Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)**
SASARAN	**Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah**	**Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah**	**Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran**
INDIKATOR SASARAN	**Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan**	**Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB**	**Tingkat Pengangguran Terbuka**
	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan		**Angka Kemiskinan**
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan, Minum		
	Rasio PDRB Sektor Perdagangan		
PROGRAM UNGGULAN (JANJI BUPATI)	• Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat produktif • Pelatihan Tenaga Kerja Siap Kerja bagi masyarakat umum dan berbasis komunitas seperti karang taruna dan Kelompok Disabilitas • Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Tanah Laut • Peningkatan perekonomian desa melalui pertanian (Cetak Sawah) • Program padat karya masyarakat di setiap kecamatan • Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat • Hibah Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan Sebesar 1 Miliar Perkecamatan		

Gambar 3. 5 Cascading Pencapaian Tujuan 2

3.3.3 Tujuan III : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 2 dari tujuan ke 2 yaitu: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut.

1) Meningkatnya Pemerataan infrastruktur
2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
3) Menurunnya risiko bencana

Pembangunan infrastruktur bukan hanya berfungsi sebagai sarana konektivitas dan distribusi ekonomi, tetapi juga sebagai prasyarat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Infrastruktur jalan, transportasi, energi, serta teknologi informasi memungkinkan masyarakat mengakses peluang

ekonomi dengan lebih mudah. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan, agar pertumbuhan yang dicapai tidak merusak daya dukung alam.

MISI 2	**Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas**		
TUJUAN	**Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan**		
INDIKATOR TUJUAN	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastuktur (IKLI)**	**Penurunan Intensitas Emisi GRK**	
SASARAN	**Meningkatnya Pemerataan Infrastuktur**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Menurunnya Risiko Bencana**
INDIKATOR SASARAN	**Indeks Infrastruktur Daerah** **Rasio Konektivitas**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks Risiko Bencana**
PROGRAM UNGGULAN (JANJI BUPATI)	• Pembangunan dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) • pembangunan jalan usaha tani • Revitalisasi pasar modern dan Rehab pasar kecamatan • Penyediaan Fasilitas Air Minum dan sanitasi layak lingkungan masyarakat • SDA on call • Pembangunan TPS-3R, bank sampah, dan Rehabilitasi TPS • Program Tanah laut Lestari		

Gambar 3. 6 Cascading Pencapaian Tujuan 3

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan diartikan dalam membangun potensi unggulan tidak lepas dari pembangunan infrastruktur sebagai konektifitas perputaran perekonomian. Makna lingkungan di sasaran artinya pembangunan ekonomi tetap memperhatikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kemampuan untuk **beradaptasi, bertahan, serta pulih** setelah mengalami bencana agar ekonomi tetap stabil.

3.3.4 Tujuan IV : Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 4: Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut.

1) Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital

MISI 3	**Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis**						
TUJUAN	**Meningkatkan Pemerintahan yang adaftif dan melayani**						
INDIKATOR TUJUAN	**Indeks Reformasi Birokrasi**						
SASARAN	**Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel**			**Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital**			
INDIKATOR SASARAN	**AKIP Kabupaten**	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Nilai SPI**	**Indeks Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**Indeks Pemerintah Digital**
PROGRAM UNGGULAN (JANJI BUPATI)	• Penyediaan Akses Internet Gratis di Ruang Publik • Penyediaan Akses Internet di daerah Blank Spot • Jaminan Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa • Jaminan Asuransi Ketenagakerjaan Bagi Ketua RW/RT • Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa						

Gambar 3. 7 Cascading Pencapaian Tujuan 4

Rumusan dari tujuan di atas menerjemahkan pelayanan publik yang berorientasi untuk kepuasaan masyarakat untuk kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintahan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi yang optimal. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran pertama, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan

Meningkatkan Pemerintahan yang Adaftif dan Melayani, sasaran ini utamanya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui keterbukaan informasi serta pengelolaan anggaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas dengan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk administrasi, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Partisipasi masyarakat juga diperkuat melalui keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan guna memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan

kebutuhan publik. Di sisi lain, penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pelatihan dan sistem penilaian berbasis kinerja agar pelayanan yang diberikan lebih profesional dan responsif. Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, seperti *e-government* dan sistem informasi manajemen, turut berperan dalam meningkatkan efisiensi administrasi serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada layanan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 3. 1 Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029

Visi : "Bersama Membangun Tanah Laut SiMPUN, Maju, dan Berkelanjutan"

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama	**Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**		**Nilai**	**73,42**	**73,8**	**73,64 - 74,34**	**74,12 - 74,62**	**74,58 - 75,28**	**75,01 - 75,71**	**75,43 - 76,13**
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,94	7,98	8	8,1	8,2	8,3	8,4
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,43	12,45	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9
			Nilai Raport Pendidikan	Nilai	74,36	74,46	74,66	74,86	75	75,2	75,4
		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,64	75	75,25	75,5	75,75	76	76,25
		Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,473	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	NA	55	56	56,5	57,5	58,5	60
Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**		**%**	**5,01**	**5,1 - 5,2**	**5,4 - 6,2**	**5,5 - 7,4**	**5,6 - 7,5**	**5,6 -7,8**	**7 - 7,9**
		Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)		**Nilai**	**0,257**	**0,24 - 0,249**	**0,236 - 0,245**	**0,232 - 0,241**	**0,228 - 0,237**	**0,223 - 0,233**	**0,218 - 0,228**
		PDRB Perkapita		**Ribu Rupiah**	**58.223,29**	**61.000**	**64.000**	**67.000**	**70.000**	**85.000**	**86.000**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas		Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	16,45	16,47	16,5	16,6	16,7	16,75	16,76
			Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	10,95	10,97	11	11,2	11,3	11,35	11,36
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan, Minum	%	1,49	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
			Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	10,72	10,75	10,76	10,77	10,78	10,79	10,8
		Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah	Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	%	19,21	19,3	19,35	19,4	19,45	19,5	19,55
		Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,43	2,7 - 3,25	2,63 -3,21	2,54 - 3,17	2,45 - 3,11	2,35 - 3,04	2,25 - 2,94
			Tingkat Kemiskinan	%	3,74	2,82 - 3,23	2,96 -3,46	2,66 - 3,16	2,36 - 2,86	2,02 - 2,36	1,58 - 2,08
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastuktur (IKLI)**		**Nilai**	**NA**	**71,67**	**72,62**	**74,62**	**76,62**	**77,62**	**78,62**
		Penurunan Intensitas Emisi GRK		**%**	**NA**	**2,05**	**2,01**	**1,88**	**1,75**	**1,62**	**1,46**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya Pemerataan Infrastuktur	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	49,55	54,21	55	57	59	60	60
			Rasio Konektivitas	Nilai	0,71	0,71	0,75	0,8	0,85	0,87	0,88
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,57	70,16	70,25	70,34	70,44	70,53	70,6
		Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	145,09	144	140	135	130	125	120
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis	**Meningkatkan Pemerintahan yang Adaftif dan Melayani**	**Indeks Reformasi Birokrasi**		**Nilai**	**80,45**	**81**	**83**	**85**	**87**	**90**	**91**
		Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	70,16	72	75	77	79	80	81
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	79,645	79,7	80	80,5	81	81,5	82
			Nilai SPI	Nilai	78,97	79	79	79,01	79,01	79,02	79,02
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,23	4,4	4,45	4,5	4,55	4,6	4,65
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91
			Indeks Sistem Pemerintahan	Nilai	3,12	3,12	-	-	-	-	-

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Berbasis Elektronik								
			Indeks Pemerintah Digital	Nilai	NA	NA	1,7	1,7	2	2	2,3

Keterangan: Indeks SPBE secara nasional hanya berlaku sampai tahun 2025, selanjutnya diganti dengan Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 yang mana perhitungannya dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

3.4 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana tindakan komprehensif yang memuat langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Strategi ini mencakup optimalisasi sumber daya daerah, penentuan prioritas tahunan, penetapan lokus pembangunan, serta pemilihan program unggulan untuk menghadapi dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara garis besar, strategi pembangunan Kabupaten Tanah Laut 2026–2030 diarahkan untuk:

1. **Membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing** melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja.
2. **Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif** dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan berbasis potensi daerah, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan.
3. **Memperkuat infrastruktur dan konektivitas wilayah** guna mendukung aksesibilitas, distribusi barang dan jasa, serta peningkatan daya tarik investasi.
4. **Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif** dengan penyederhanaan regulasi, digitalisasi pelayanan publik, serta kemitraan dengan pihak swasta.
5. **Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan** melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan mitigasi risiko bencana.

Tahapan pembangunan dirancang secara berkesinambungan agar setiap tahun memiliki target capaian yang jelas. Penahapan

pembangunan Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing Serta Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Penguatan Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing serta Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Didukung oleh Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Pengembangan Sektor-sektor Unggulan dalam Meningkatkan Iklim Investasi dan Perekonomian Daerah	Mewujudkan Tanah Laut Simpun yang Unggul dan Berdaya Saing

Pembangunan Kabupaten Tanah Laut dalam periode 2026-2030 mengikuti tahapan strategis yang selaras dengan transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Setiap tahapan pembangunan mencerminkan kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan demografi, termasuk bonus demografi yang diprediksi mulai berdampak pada tahun 2030. Puncaknya pada tahun 2030 akan mencerminkan kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan global serta memanfaatkan momentum bonus demografi. Dengan SDM yang unggul, sektor unggulan yang berkembang, serta iklim investasi yang kondusif, Kabupaten Tanah Laut siap menuju "Tanah Laut Emas," sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam merumuskan arah kebijakan, strategi dijadikan landasan utama. Setiap arah kebijakan dirancang untuk mendukung pencapaian strategi yang

telah ditetapkan. Rencana kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan harus berpedoman pada visi dan misi kepala daerah terpilih, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, masalah, dan ancaman yang mungkin terjadi selama masa jabatan. Segala kemungkinan, baik positif maupun negatif, perlu diantisipasi, termasuk isu strategis dalam pembangunan daerah.

Tabel 3. 3 Pemetaan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut

Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Nilai-nilai Agama	Peningkatan gizi anak untuk pencegahan stunting	Kesehatan
	Peningkatan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat	Kesehatan
	Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Wajib Belajar 13 Tahun	Pendidikan
	Peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang sesuai standar dan keperluan di tiap desa atau kecamatan	Kesehatan
	Peningkatan sarana, prasarana dan aksesibilitas yang sesuai standar dan merata di semua sekolah	Pendidikan
	Penguatan literasi berbasis digital	Pendidikan
	Penyediaan tenaga kependidikan untuk pendidikan inklusif serta pengembangan kompetensi	Pendidikan
	Pemberian bantuan pendidikan (meliputi dana pendidikan dan beasiswa) bagi pelajar mulai tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi	Pendidikan
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
	Peningkatan Kualitas Layanan Pengendalian Penduduk dan Fasilitasi Ketahanan Keluarga yang Merata dan Mudah Diakses	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Memberdayakan Perempuan dan anak secara holistic penguatan peran keluarga, perlindungan hak, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar dan ruang partisipasi public yang aman dan inklusif	Pemberdayaan Perempuan dan anak
	Meningkatkan kesetaraan gender dalam Pendidikan, pelatihan, dan kepemimpinan Masyarakat dengan memperluas peran serta Perempuan secara adil	Pemberdayaan Perempuan dan anak
	Peningkatan modal sosial dengan fasilitasi forum keagamaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan solidaritas	Kesejahteraan Masyarakat

Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
	Penerapan nilai-nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter masyarakat	Kesejahteraan Masyarakat
	Pemberdayaan Kepemudaan Berbasis Komunitas	Pemuda
	Pengembangan Event-event dan Fasilitas Olahraga Didaerah	Olahraga
Membangun Ekonomi yang Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan Infrastruktur yang Merata dan Lingkungan Hidup Berkualitas	Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan potensi unggulan daerah	Perindustrian
	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan, irigasi, embung, Sambungan Air Minum, dan Penataan Bangunan Gedung Serta PSU untuk perumahan dan permukiman penunjang perekonomian masyarakat	Pekerjaan umum, tata ruang, Perumahan dan Permukiman
	Mengembangkan sistem perdagangan yang modern, terhubung, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal	Perdagangan
	Mendorong pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan keuangan syariah dan industry halal	Ekonomi Syariah
	Penguatan Kerjasama investasi lintas sektor, termasuk sinergi pemerintah pusat, daerah,dan pelaku usaha dalam penyediaan data peluang investasi dan pengendalian investasi berisiko	Penanaman Modal
	Meningkatkan kualitas, daya saing dan serapan tenaga kerja local melalui pelatihan vokasi, link and match dunia kerja dan perlindungan pekerja	Tenaga Kerja
	Penguatan Ekosistem ketenagakerjaan inklusif melalui pemetaan potensi tenaga kerja, penyediaan informasi pasar kerja dan pemberdayaan Angkatan kerja usia muda dan perempuan	Tenaga Kerja
	Penguatan akurasi dan integrasi data penduduk miskin berbasis NIK untuk mendukung ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan	Administrasi Kependudukan dan catatan sipil
	Peningkatan sistem jaringan distribusi barang dan pengembangan pasar modern	Perdagangan
	Peningkatan infrastruktur dan promosi pariwisata	Pariwisata
	peningkatan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan wisata	Pariwisata
	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar	Tenaga Kerja
	Peningkatan sarana dan prasarana di sektor pertanian dan perikanan.	Pertanian dan Perikanan
	Peningkatan kapasitas petani dan nelayan dalam penguasaan ilmu dan teknologi modern	Pertanian dan Perikanan
	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan dan pertanian	Pertanian dan Perikanan

Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
	Hilirisasi sektor pertanian berbasis komoditas unggulan	Pertanian dan Perikanan
	Pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Pertanian dan Perikanan
	Pengembangan Kawasan Peternakan terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur, pakan	Peternakan
	Mewujudkan kemandirian dan keamanan pangan daerah melalui peningkatan produksi, distribusi dan akses pembiayaan konsumsi pangan yang berkelanjutan	Pangan
	Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro sebagai penggerak utama ekonomi rakyat	UMKM
	Pemberdayaan UMKM secara terintegrasi melalui peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, serta digitalisasi dan kemitraan berbasis potensi lokal	UMKM
	Fasilitasi Akses Berusaha Bagi Wirausahawan Muda	UMKM
	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Hilirisasi Industri Pada Kawasan Industri Jorong dan Kawasan Pengembangan Industri Bati-bati	Industri
	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi IKM	Industri
	Peningkatan kualitas produk dan standarisasi produk IKM	Industri
	Meningkatkan tata Kelola koperasi yang sehat, transparan dan professional sebaagai bagian dari penguatan kelembagaan ekonomi Masyarakat yang adaptif dan akuntabel	Koperasi
	Fasilitasi Akses Permodalan Melalui KUR dan Koperasi Merah Putih	Koperasi
	Peningkatan kemandirian desa melalui ketersediaan infrastruktur dan pelayanan dasar di desa	Pemberdayaan Desa
	Fasilitasi Kawasan Pedesaan Tematik	Pemberdayaan Desa
	Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana	Kebencanaan
	Meningkatkan kapasitas mitigasi dan respons bencana secara terencana, cepat dan berbasis masyarakat	Kebencanaan
	Mewujudkan konektivitas wilayah yang merata dan mendukung aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat dalam rangka mendukung pemerintah provinsi untuk mewujudkan Gerbang Logistik Kalimantan	Perhubungan
	Optimalisasi TPA dalam pengelolaan limbah domestik secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem *sanitary landfill*	Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	Lingkungan Hidup
	Penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* dan Pusat	Lingkungan Hidup

Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
	Daur Ulang-Rumah Kompos, dan lain-lain), penggunaan teknologi tepat guna (komposting, *maggot/ black soldier fly, refuse derived fuel, waste the energy, pirolisis*, dan lain-lain)	
	Melaksanakan program edukasi hijau	Lingkungan Hidup
	Penguatan pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan industry melalui peningkatan pengawasan, penegakan hukum lingkungan dan penerapan teknologi ramah lingkungan	Lingkungan Hidup
	Melaksanakan penyediaan maupun rehabilitasi rumah layak huni melalui kewenangan kumuh dan pencegahan kumuh (di luar kumuh)	Lingkungan Hidup
	Menyediakan sambungan rumah air minum dan air limbah di setiap perumahan	Lingkungan Hidup
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Pemerintahan Umum
	Peningkatan kompetensi dan penataan tugas aparatur yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan analitis terhadap isu Pembangunan, melalui penguatan SDM fungsional, penugasan yang terfokus, serta pengembangan sistem kerja	Kepegawaian
	Permudah dan percepat pelayanan perijinan usaha dan kependudukan sampai ke desa	Layanan publik
	Optimalisasi kanal aspirasi masyarakat untuk ketertiban umum, baik secara online maupun offline sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Ketentraman dan ketertiban Umum
	Penguatan data-data statistik dalam penyusunan evaluasi pembanguanan daerah	Statistika dan persandian
	Peningkatan infrastruktur teknologi informasi yang menunjang pelayanan publik dan pemerintahan digital	Informasi dan Komunikasi
	Penguatan aparatur pemerintah yang professional dan adaptif	Kepegawaian
	Mewujudkan sistem perencanaan Pembangunan yang partisipatif, berbasis data, dan responsive terhadap dinamika local serta tantangan global	Perencanaan
	Mendorong budaya inovasi birokrasi untuk menghasilkan Solusi kreatif dalam tata Kelola dan pelayanan publik	Inovasi
	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil	Keuangan
	Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan kemampuan Masyarakat terhadap layan public melalui transformasi digital dan pendekatan humanis	Layanan publik
	Meningkatkan tata Kelola kearsipan yang tertib, aman dan terintegrasi sebagai bagian dari penguatan birokrasi yang adaptif, transparan dan akuntabel	Kearsipan

Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
	Penguatan sinergitas antar Instansi pemerintahan dalam pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi	Informasi dan Komunikasi
	Pengoptimalan Ketersediaan dan akurasi data sebagai Informasi Pembangunan disertai Pembangunan ekosistem keamanan informasi	Statistika dan persandian
	Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis e-government	Perencanaan

Gambar 3. 8 Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026-2030

3.6 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan inti dari perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJMD yang menjadi turunan dari visi, misi tujuan dan sasaran daerah. Berikut Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Tabel 3.4 Program Prioritas dalam Rangka Mendukung Visi Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN - Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Nilai-Nilai Agama - Membangun Ekonomi yang Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan Infrastruktur yang Merata dan Lingkungan Hidup Berkualitas - Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia(Nilai)				
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
			Nilai Raport Pendidikan (Nilai)			
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)			
			Meningkatnya komunitas baca masyarakat	Persentase peningkatan komunitas baca masyarakat (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Proporsi PTK Bersertifikat SD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi PTK Bersertifikat SMP (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi Guru Penggerak PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi Guru Penggerak SD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi Guru Penggerak SMP (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indek Distribusi Guru PAUD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indek Distribusi Guru SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Indek Distribusi Guru SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi PTK Bersertifikat PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum Paket A (Kesetaraan) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum Paket B (Kesetaraan) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SMP (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum Paket C (Kesetaraan) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Paket A (Kesetaraan) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Paket B (Kesetaraan) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Paket C (Kesetaraan) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SMP (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal PAUD (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SD (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SMP (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal	Persentase Satuan Pendidikan Formal Jenjang SD Yang Terakreditasi Minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Satuan Pendidikan Formal Jenjang SMP Yang Terakreditasi Minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Yang Terakreditasi Minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase Satuan Pendidikan Formal Jenjang PAUD Yang Terakreditasi Minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan	Persentase peningkatan Kunjungan pemustaka (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya masyarakat yang melanjutkan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah SMP (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan Sekolah SD (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan Sekolah SMP (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (Tahun)			
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasaan Masyarakat Layanan Kesehatan (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasaan Masyarakat Layanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat	Persentase Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya status gizi Masyarakat	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Ibu Hamil KEK (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Prevalensi Diabetes Melitus (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Hipertensi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)* (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Menurunnya Resiko tinggi Pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Resiko tinggi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) (Per 1.000 Kelahiran)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)			
			Meningkatnya Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Perempuan	Jumlah Penurunan Kasus Kekerasan pada Perempuan (Kasus)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Perempuan (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Perempuan Produktif	Persentase Perempuan yang Produktif secara Ekonomi (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Perlindungan Anak	Angka Perkawinan Anak (Angka)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
		Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)			
			Meningkatnya aktifitas organisasi kepemudaan dan organisasi kepramukaan	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kepramukaan yang Aktif (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya Kapasitas pemuda	Persentase wirausaha muda produktif (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Jumlah Pemuda yang Aktif (Orang)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kepemudaan	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan dalam Kondisi Baik (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Sesuai Standart (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya pengembangan olahraga kemasyarakatan	Persentase Induk Organisasi Olahraga (INORGA) yang aktif (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Prestasi	Persentase atlet yang aktif dalam kejuaraan olahraga (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
				PDRB Per Kapita(Ribu Rupiah)		
				Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)(Nilai)		
		Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah		Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)		
				Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)		
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) (%)		
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan, Minum (%)		
			Meningkatkan akses pemasaran IKM	Persentase akses pemasaran IKM (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatkan data pelaku Industri di SIINas	Persentase Kepatuhan Industri terhadap SIINas (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatkan data pelaku Industri di SIINas	Persentase Kepatuhan Industri terhadap SIINas (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatkan IKM yang menerapkan standarisasi industri	Persentase IKM yg Menerapkan Standarisasi Industri (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatkan pengembangan Perwilayahan Industri	Persentase Pengembangan Sentra IKM (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Pengembangan Kawasan Industri (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata yang memiliki HKI	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Memiliki HKI (%)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Meningkatnya kapasitas nelayan perikanan tangkap	Persentase Nelayan Tangkap yang Meningkat Produksinya (%)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya kapasitas nelayan perikanan tangkap	Persentase Nelayan Tangkap yang Meningkat Produksinya (%)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya Kapasitas Pembudidaya	Persentase kelompok pembudidaya yang meningkat produksinya (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kelahiran ternak	Persentase Kelahiran Ternak (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya kelembagaan koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kelembagaan koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya kelembagaan koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya Kelembagaan Koperasi.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Skor PPH Ketersediaan (Skor)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani	Persentase Penyuluh Pertanian yang Terlatih (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya Kualitas Konsumsi	Skor PPH Ketersediaan (Skor)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Skor PPH Konsumsi (Skor)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Konsumsi	Skor PPH Konsumsi (Skor)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan	Persentase SDM Peternakan yang terlatih (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Kelahiran Ternak (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya nilai tambah pertanian	Persentase Komoditas yang Diterima Perusahaan atau Pasar (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian	Persentase Komoditas yang Diterima Perusahaan atau Pasar (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Pemenuhan Prasarana Pertanian(SubSektor Peternakan)	Persentase Kelahiran Ternak (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Pengembangan Destinasi Wisata Potensial	Persentase Destinasi wisata Potensial yang Berkembang (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya pengembangan ekspor daerah	Persentase Produk Unggulan yang Dipromosikan (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya pengembangan ekspor daerah	Persentase Nilai Net Ekspor (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya produk hasil olahan perikanan	Persentase peningkatan produk olahan perikanan (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura) (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya produksi hasil pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan)	Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan)	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura) (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro yang dibina (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya stabilitas harga bapokting	Koefisiensi variansi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Nilai Akreditasi)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Menurunnya Desa Rawan Pangan	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Menurunnya kematian ternak	Persentase Kematian Ternak (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar	Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
		Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah	Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB (%)			

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan (Hari)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Rekomendasi Teknis SKPD sesuai dengan ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya ketaatan pembangunan wilayah	Persentase Ketaatan Pembangunan yang sesuai dengan RDTR yang telah Ditetapkan (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya koordinasi dengan SKPD Teknis	Jumlah Pertimbangan Teknis dan Koordinasi SKPD Sesuaii dengan Ketentuan (Izin/persetujuan)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas pengendalian penanaman modal	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang kondusif	Jumlah Investor yang Berinvestasi (Pelaku Usaha)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang kondusif	Jumlah Investor yang Berinvestasi (Pelaku Usaha)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya tindak lanjut pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase Pengaduan yg ditindaklanjuti (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Tervalidasinya data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase data dan informasi yang valid (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran		Tingkat Kemiskinan (%)		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yg Kompeten (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja yang Terdaftar (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja yang Terdaftar (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial	Persentase bantuan sosial tepat sasaran (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial	Persentase bantuan sosial tepat sasaran (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial	Persentase bantuan sosial tepat sasaran (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi Jaminan Ketenagakerjaan (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Usaha Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Penurunan intensitas emisi GRK((%))				
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)(Nilai)				
		Meningkatnya Pemerataan infrastuktur	Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai)			
			Rasio Konektivitas (Nilai)			
			Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Sebagai Pendukung Gerbang Logistik Kalimantan
			Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	Luasan Lahan yang teraliri Irigasi dengan baik (Ha)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase DAS dalam Kondisi Baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase Panjang Pantai yang Terlindungi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Air Baku (m3/detik)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kapasitas lalu lintas jalan	Persentase Jalan Tertib Lalu Lintas (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kepemilikan PSU pada Permukiman	Persentase Permukiman yang memiliki PSU Sesuai Standar (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya kualitas drainase jalan	Persentase Drainase Jalan dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang Tertib (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya kualitas kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan	Persentase Prasarana Transportasi perhubungan dalam kondisi baik (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan	Persentase Prasarana Transportasi perhubungan dalam kondisi baik (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya Pemenuhan Sarana Prasarana Persampahan sesuai standar	Persentase Sampah Terkelola (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Kantor Pemerintah yang tertata dengan baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya perluasan jaringan transportasi	Jumlah Trayek Transportasi yang Aktif (Trayek)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya perluasan jaringan transportasi	Jumlah Trayek Transportasi yang Aktif (Trayek)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum aman	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Menurunnya kawasan kumuh	Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)			
			Meningkatnya Ketaatan Terhadap Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat Aturan (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Ketaatan Terhadap Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat Aturan (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Kualitas Baku Mutu Lingkungan Hidup	Persentase Nilai Baku Mutu Lingkungan Hidup Yang Terpenuhi (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Mendukung Program Kerja Pusat yaitu Kali Bersih, Langit Biru, dan Indonesia Hijau
			Meningkatnya Kualitas Data GRK	Penurunan Emisi GRK Tahunan (TON CO2 EQ)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Mendukung Program Kerja Pusat yaitu Kali Bersih, Langit Biru, dan Indonesia Hijau
			Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Dalam Kondisi Baik (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Mendukung Program Kerja Pusat yaitu Kali Bersih, Langit Biru, dan Indonesia Hijau
			Meningkatnya Pemanfaatan Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup	Persentase Program Perencanaan yang Termanfaatkan Sesuai Standar (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Mendukung Program Kerja Pusat yaitu Pro Kehati
			Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Terkelola (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Mendukung Program Kerja Pusat yaitu Kali Bersih, Langit Biru, Indonesia Hijau, dan Pro Kehati
			Meningkatnya Sekolah Sadar Lingkungan Hidup	Jumlah Satuan Pendidikan yang Nilai Adiwiyatanya Tercapai (Sekolah)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Mendukung Program Kerja Pusat yaitu Kali Bersih dan Langit Biru
		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Nilai)			
			Meningkatnya daerah yang dipulihkan pasca bencana	Persentase daerah yang dipulihkan pasca bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya kualitas penanggulangan kedaduratan bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani Sesuai Standar/SOP Tanggap Darurat Tepat Waktu (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi(Nilai)				
		Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SPI (Nilai)			
			Nilai AKIP Kabupaten (Nilai)			
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)			
			Meningkatnya capaian kinerja program pembangunan daerah	Persentase Indikator Program Pembangunan yang Memenuhi Target (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	Persentase Indikator Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Memenuhi Target (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Indikator Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang Memenuhi Target (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Indikator Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Memenuhi Target (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Level Kapabilitas APIP (Level)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya implementasi rencana aksi RB general dan RB tematik	Persentase rencana aksi RB tematik dan general yang terealisasi (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kapasitas SDM Kearsipan	Persentase SDM Kearsipan yang ditingkatkan (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya kematangan organisasi Perangkat Daerah	Tingkat kematangan organisasi PD (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepatuhan pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kepatuhan kearsipan minimal B (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase Kesesuaian Sasaran RKPD dengan RPJMD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase Kesesuaian Sasaran RKPD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Kesesuaian Sasaran RKPD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Kesesuaian Sasaran RKPD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Inovasi daerah	Jumlah Inovasi Daerah yang nilai kematangannya minimal 100 (Inovasi)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Reformasi Hukum	Indeks Kualitas kebijakan (Nilai)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Indeks Reformasi Hukum (Nilai)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian	Indeks kepuasan ASN (Nilai)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	Persentase Realisasi APBD yang Tepat Waktu (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penetapan APBD yang tepat waktu (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas pengendalian manajemen risiko	Nilai MRI (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase ASN dengan kinerja minimal Baik (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase ASN dengan kinerja minimal Baik (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas pola karier ASN	Persentase ASN yang menempati jabatan sesuai dengan pola karier (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi RB	Nilai Komponen rencana aksi RB General (Nilai)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi RB	Nilai Komponen rencana aksi RB General (Nilai)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi RB	Nilai Komponen rencana aksi RB General (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Persentase LKPD yang disampaikan sesuai SAP (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase Kajian yang Dimanfaatkan (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Penegakan Integritas dan Pencegahan Korupsi	Persentase PD yang memiliki predikat WBK/WBBM (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Nilai IEPK (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Nilai MCP (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Pajak Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor LPPD (Skor)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Optimalnya Penerimaan Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Daerah (Rp/Tahun)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Terwujudnya Keamanan arsip daerah	Persentase arsip yang aman (%)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif	Persentase BMD yang dimanfaatkan (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				Persentase OPD yang mengelola Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif/sesuai ketentuan (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
		Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintah Digital (Nilai)			
			Indeks Pelayanan Publik (Nilai)			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)			
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Nilai)			
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kematangan statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Meningkatnya kepemilikan administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan KTP Elektronik (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Kepemilikan KIA (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kepemilikan administrasi pencatatan sipil	Kepemilikan akta kelahiran (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Kepemilikan akta perkawinan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu dan Tepat Sasaran (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase Pelayanan Urusan Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya pelayanan Aplikasi dan Informatika	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai ketentuan (%)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai ketentuan (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial, budaya, agama dan ekonomi	Persentase potensi konflik sosial, budaya, agama dan ekonomi yang tertangani sesuai standar (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya penyebaran informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase SKPD yang mempublikasikan seluruh daftar informasi publik (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya standar pelayanan publik pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan IKM >80 (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

3.7 Implementasi Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati

Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan bagian dalam proses perumusan penyusunanan RPJMD. Melalui proses perumusan ini, janji politis yang diusung dalam visi dan misi diharapkan dapat diterjemahkan secara konkret ke dalam program unggulan atau prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan komitmen kampanye, tetapi juga memastikan adanya sinkronisasi pada program yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Penyelarasan tersebut sangat penting agar setiap program dapat:

1. Mewujudkan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih,
2. Menjamin bahwa setiap program yang dirancang selaras dengan janji-janji kampanye, dan
3. Mengintegrasikan peran serta perangkat daerah dalam implementasi program.

Berikut adalah tabel yang telah diselaraskan oleh program unggulan, program yang telah termaktub regulasi, dan janji politis.

Tabel 3.5 Integrasi Janji Politis dengan Program Nomenklatur

JANJI KDH	PROGRAM UNGGULAN	PMDN 90	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	KLASTER
Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing.	Satu Desa Satu Lulusan Pendidikan Tinggi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	SDM, Kemiskinan
	Beasiswa Pendidikan jalur prestasi dan / Atau tidak mampu bagi pelajar SD, SMP, SMA Pendidikan Umum dan Agama	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Sekretariat Daerah	SDM, Kemiskinan
	Peningkatan insentif bagi guru Agama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	SDM
Mendorong pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk penurunan kemiskinan.	Sarjana Pemuda Pelopor Perdesaan	Program Pengembangaan Kapasitas daya saing kepemudaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Ekonomi, Kemiskinan
	Pembangunan dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Program Pengembangan Perumahan	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Kemiskinan
	Pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Kemiskinan
	Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat produktif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Kemiskinan, ekonomi

JANJI KDH	PROGRAM UNGGULAN	PMDN 90	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	KLASTER
	Pelatihan Tenaga Kerja Siap Kerja bagi masyarakat umum dan berbasis komunitas seperti karang taruna dan Kelompok Disabilitas	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga Kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Ekonomi, Kemiskinan
	Pembangunan jalan usaha tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Ekonomi
	Revitalisasi pasar modern dan Rehab pasar kecamatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Ekonomi
	Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Tanah Laut	Program Riset dan Inovasi Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi	Ekonomi
	Peningkatan perekonomian desa melalui pertanian (Mendukung Program Nasional Cetak Sawah)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penataan Ruang Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ekonomi
	Program padat karya masyarakat di setiap kecamatan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penyelenggaraan Jalan, Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Infrastruktur
	Hibah kegiatan sosial dan kemasyarakatan sebesar 1 Miliar perkecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan	Ekonomi

JANJI KDH	PROGRAM UNGGULAN	PMDN 90	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	KLASTER
	Penyediaan Fasilitas Air Minum dan sanitasi aman lingkungan masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengembangan Perumahan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Infrastruktur
	SDA on call	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Infrastuktur
	Pembangunan TPS-3R, bank sampah, dan Rehabilitasi TPS	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program pengelolaan persampahan, Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Lingkungan
	Program Tanah laut Lestari	Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program pengelolaan keanekaragaman hayati, Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Lingkungan
Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur pemerintahan	Penyediaan Akses Internet Gratis di Ruang Publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Tata Kelola
	Penyediaan Akses Internet di daerah Blank Spot	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Tata Kelola
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dan Program Penataan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tata Kelola

JANJI KDH	PROGRAM UNGGULAN	PMDN 90	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	KLASTER
	Jaminan Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa	Program Penataan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tata Kelola
	Jaminan Asuransi kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Ketua RT/RW	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Tata Kelola
	Jaminan Asuransi Ketenagakerjaan Bagi Ketua RW/RT	Program Penataan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tata Kelola

Tabel 3.6 Implementasi Janji Politik

JANJI KDH	PROGRAM UNGGULAN	Tahun Pelaksanaan					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing.	Satu Desa Satu Lulusan Pendidikan Tinggi	Perencanaan	Pelaksanaan				
	Beasiswa Pendidikan jalur prestasi dan / Atau tidak mampu bagi pelajar SD, SMP, SMA Pendidikan Umum dan Agama	Pelaksanaan					
	Peningkatan insentif bagi guru Agama	Pelaksanaan					
Mendorong pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk penurunan kemiskinan.	Sarjana Pemuda Pelopor Perdesaan	Pelaksanaan					
	Pembangunan dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pelaksanaan					
	Pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin	Perencanaan	Pelaksanaan				
	Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat produktif	Pelaksanaan					
	Pelatihan Tenaga Kerja Siap Kerja bagi masyarakat umum dan berbasis komunitas seperti karang taruna dan Kelompok Disabilitas		Pelaksanaan				
	Pembangunan jalan usaha tani	Pelaksanaan					
	Revitalisasi pasar modern dan Rehab pasar kecamatan	Pelaksanaan					

JANJI KDH	PROGRAM UNGGULAN	Tahun Pelaksanaan					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Tanah Laut		Perencanaan	Pelaksanaan			
	Peningkatan perekonomian desa melalui pertanian (Mendukung Program Nasional Cetak Sawah)	Pelaksanaan					
	Program padat karya masyarakat di setiap kecamatan	Perencanaan	Pelaksanaan				
	Hibah kegiatan sosial dan kemasyarakatan sebesar 1 Miliar perkecamatan	Pelaksanaan					
	Penyediaan Fasilitas Air Minum dan sanitasi aman lingkungan masyarakat	Pelaksanaan					
	SDA on call	Pelaksanaan					
	Pembangunan TPS-3R, bank sampah, dan Rehabilitasi TPS	Pelaksanaan					
	Program Tanah laut Lestari	Perencanaan	Pelaksanaan				
Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur pemerintahan	Penyediaan Akses Internet Gratis di Ruang Publik		Perencanaan	Pelaksanaan			
	Penyediaan Akses Internet di daerah Blank Spot	Pelaksanaan					
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Pelaksanaan					
	Jaminan Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa	Perencanaan	Pelaksanaan				
	Jaminan Asuransi kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Ketua RT/RW	Pelaksanaan					
	Jaminan Asuransi Ketenagakerjaan Bagi Ketua RW/RT	Perencanaan	Pelaksanaan				

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan secara eksplisit akan diimplementasikan ke dalam program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengakomodir semua urusan pemerintahan. Selanjutnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, prioritas pelayanan dasar dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan kebutuhan mandatory lainnya yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan pagu indikatif untuk belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah 5 (lima) tahun ke depan tentunya harus menyesuaikan dengan kapasitas ril keuangan Pemerintah daerah baik untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer dan mengikuti kaidah sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program Perangkat Daerah akan menyajikan daftar program perangkat daerah yang tertuang di Renstra Perangkat Daerah, hal yang perlu diingat bahwa RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029 disusun pada tahun 2025, sehingga alokasi belanja dan program pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang tertuang pada RKPD 2025 telah definitif dan sedang berlangsung. Berikut ini rencana program disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2025-2029:

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					471.596.696.620,65		538.703.313.733		538.703.313.733		494.153.313.733		519.623.428.918,92	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					343.992.329.678,2		361.401.835.360		353.701.835.360		353.422.104.586		353.422.104.586	
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	343.992.329.678,2	100	361.401.835.360	100	353.701.835.360	100	353.422.104.586	100	353.422.104.586	1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82	82	82		82,25		82,5		82,75		83		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					127.338.090.042,45		176.529.478.373		184.209.478.373		139.919.209.147		165.339.324.332,92	
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Proporsi PTK Bersertifikat PAUD (%)	48,11	48,13	48,15	34.301.016.114,76	48,17	43.866.173.951	48,19	45.830.293.596	48,21	37.002.087.231	48,23	39.848.774.618	1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi PTK Bersertifikat SD (%)	30,08	30,10	30,12		30,14		30,16		30,18		30,20		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi PTK Bersertifikat SMP (%)	35,18	35,20	35,22		35,24		35,26		35,28		35,30		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi Guru Penggerak PAUD (%)	5,8	5,9	5,9		5,9		5,9		5,9		5,9		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Proporsi Guru Penggerak SD (%)	4,9	4,9	4,9		4,9		4,9		4,9		4,9		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi Guru Penggerak SMP (%)	6,4	6,4	6,4		6,4		6,4		6,4		6,4		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indek Distribusi Guru PAUD (Nilai)	0,81	0,82	0,82		0,82		0,82		0,82		0,82		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indek Distribusi Guru SD (Nilai)	0,4	0,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indek Distribusi Guru SMP (Nilai)	0,31	0,32	0,32		0,32		0,32		0,32		0,32		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik	Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SD (%)	60,83	60,85	60,87	2.352.264.345,91	60,89	5.488.923.148	60,91	5.688.923.148	60,93	4.416.922.846	60,95	5.488.923.148	1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum SMP (%)	53,54	53,56	53,58		53,6		53,62		53,64		53,66		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Paket A (Kesetaraan) (%)	46,94	46,96	46,98		47		47,02		47,04		47,06		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Paket B (Kesetaraan) (%)	37,93	37,95	37,97		37,99		38,01		38,03		38,05		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum Paket C (Kesetaraan) (%)	35,95	35,97	35,99		36,01		36,03		36,05		36,07		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SD (%)	51,22	51,24	51,26		51,28		51,3		51,32		51,34		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum SMP (%)	36,79	36,81	36,83		36,85		36,87		36,89		36,91		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum Paket A (Kesetaraan) (%)	34,69	34,71	34,73		34,75		34,77		34,79		34,81		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum Paket B (Kesetaraan) (%)	28,74	28,76	28,78		28,8		28,82		28,84		28,86		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum Paket C (Kesetaraan) (%)	20,91	20,93	20,95		20,97		20,99		21,01		21,03		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal	Persentase Satuan Pendidikan Formal Jenjang PAUD Yang Terakreditasi Minimal B (%)	76,65	76,67	76,69	81.456.146.703,68	76,71	113.766.422.327	76,73	119.282.301.682	76,75	86.525.529.793	76,77	107.765.666.619,92	1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Satuan Pendidikan Formal Jenjang SD Yang Terakreditasi Minimal B (%)	71,88	71,90	71,92		71,94		71,96		71,98		72,00		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Satuan Pendidikan Formal Jenjang SMP Yang Terakreditasi Minimal B (%)	87,71	87,73	87,75		87,77		87,79		87,81		87,83		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Yang Terakreditasi Minimal B (%)	66,67	66,7	66,73		66,76		66,79		66,82		66,85		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya masyarakat yang melanjutkan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD (Angka)	0,54	0,53	0,52	9.228.662.878,1	0,51	13.407.958.947	0,5	13.407.959.947	0,49	11.974.669.277	0,48	12.235.959.947	1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Putus Sekolah SMP (Angka)	0,12	0,11	0,1		0,09		0,08		0,07		0,06		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Melanjutkan Sekolah SD (Angka)	85,65	85,67	85,69		85,71		85,73		85,75		85,77		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Melanjutkan Sekolah SMP (Angka)	92,36	92,38	92,4		92,42		92,44		92,46		92,48		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					266.276.900		772.000.000		792.000.000		812.000.000		862.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal PAUD (%)	60	61	62	266.276.900	63	772.000.000	64	792.000.000	65	812.000.000	66	862.000.000	1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SD (%)	80	81	82		83		84		85		86		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Sekolah Yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SMP (%)	85	86	87		88		89		90		91		1.01.2.22.0.00.01.000 0 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					406.825.317.379,09		470.620.980.588,2		475.327.190.394,08		475.327.190.394,08		499.093.549.913,78	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					294.754.167.163,09		301.909.950.612,2		309.520.215.461,43		317.752.924.412,43		319.996.925.080,43	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,5	81,55	82	294.754.167.163,09	82,05	301.909.950.612,2	82,1	309.520.215.461,43	82,15	317.752.924.412,43	82,2	319.996.925.080,43	1.02.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					104.001.350.154		159.141.497.538		156.167.033.345,65		147.696.806.639,65		169.029.713.517,35	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasaan Masyarakat Layanan Kesehatan (%)	85	86	87	97.248.457.085	88	145.087.169.475	89	141.797.171.263,65	90	132.884.246.110,65	91	152.972.243.469,35	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya status gizi Masyarakat	Persentase Ibu Hamil KEK (%)	12,9	15	13	499.535.998	12	3.539.725.861	11	3.670.776.733	10	3.833.475.180	9	4.758.384.699	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita (%)	5,08	8	7,5		7		6,5		5		4,5		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)* (%)	80	90	90	2.604.257.050	90	4.941.540.200	90	5.088.645.200	90	5.168.645.200	90	5.188.645.200	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Hipertensi (%)	6,91	10,37	10,37		10,37		10,37		10,37		10,37		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Diabetes Melitus (%)	1,43	1,59	1,59		1,59		1,59		1,59		1,59		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Menurunnya Resiko tinggi Pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Resiko tinggi (%)	21	20	20	3.649.100.021	20	5.573.062.002	20	5.610.440.149	20	5.810.440.149	20	6.110.440.149	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) (Per 1.000 Kelahiran)	12	12,62	11,63		10,97		10,46		9,96		9		1.02.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					7.525.022.067		8.351.240.288		8.482.644.437		8.598.741.237		8.651.321.400	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasaan Masyarakat Layanan Kesehatan (%)	85	86	87	7.525.022.067	88	8.351.240.288	89	8.482.644.437	90	8.598.741.237	91	8.651.321.400	1.02.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					104.800.000		240.000.000		285.000.000		340.000.000		395.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan dan minuman	Persentase Apotik, Toko Obat dan Optical yang memiliki izin (%)	100	100	100	104.800.000	100	240.000.000	100	285.000.000	100	340.000.000	100	395.000.000	1.02.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan
	Persentase Tempat Pengolahan Pangan yang memenuhi syarat sesuai standar (%)	95	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					439.977.995		978.292.150		872.297.150		938.718.105		1.020.589.916	
Meningkatnya perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat	Persentase Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (%)	65	70	75	439.977.995	80	978.292.150	85	872.297.150	87	938.718.105	90	1.020.589.916	1.02.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM					360.539.095.163,29		420.362.140.060,18		422.786.840.266,5		424.543.891.463,7		443.819.472.228,6	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PENATAAN RUANG														
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.649.804.576,98		27.079.887.009		16.625.699.808		17.101.820.398		18.478.659.306	
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilias Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	13.649.804.576,98	100	27.079.887.009	100	16.625.699.808	100	17.101.820.398	100	18.478.659.306	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82	82,5	83		83,5		84		84,5		85		1.03.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					71.763.936.995,2		99.882.253.051,18		105.761.140.458,5		107.842.071.065,7		110.540.812.922,6	
Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	Luasan Lahan yang teraliri Irigasi dengan baik (Ha)	12446,383	12829,699	13065,990	71.763.936.995,2	13302,280	99.882.253.051,18	13494,813	105.761.140.458,5	13687,346	107.842.071.065,7	13879,879	110.540.812.922,6	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Persentase DAS dalam Kondisi Baik (%)	15,80	17,80	19,50		21,20		22,00		22,80		23,60		1.03.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Air Baku (m3/detik)	0	0	0,10586		0,12886		0,13886		0,16686		0,99686		1.03.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Panjang Pantai yang Terlindungi (%)	48,18	53,72	54,76		55,80		56,30		56,80		57,30		1.03.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					11.499.931.804		15.900.000.000		15.900.000.000		15.900.000.000		18.500.000.000	
Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum aman	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)	76,84	78	80	11.499.931.804	82	15.900.000.000	84,5	15.900.000.000	85	15.900.000.000	85,5	18.500.000.000	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan Sarana Prasarana Persampahan sesuai standar	Persentase Sampah Terkelola (%)	0	0	2	0	4	3.000.000.000	6	3.000.000.000	8	3.000.000.000	10	3.000.000.000	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					9.373.520.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		9.000.000.000	
Meningkatnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	75,02	79,02	80,23	9.373.520.000	82,5	7.000.000.000	83	7.000.000.000	83,5	7.000.000.000	84	9.000.000.000	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					14.200.000.000		8.600.000.000		8.600.000.000		7.600.000.000		9.200.000.000	
Meningkatnya kualitas drainase jalan	Persentase Drainase Jalan dalam Kondisi Baik (%)	7,5	15,05	16,8	14.200.000.000	17,4	8.600.000.000	18,1	8.600.000.000	18,6	7.600.000.000	19,3	9.200.000.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					55.338.000.000		60.000.000.000		65.000.000.000		62.000.000.000		66.000.000.000	
Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Kantor Pemerintah yang tertata dengan baik (%)	80	80	80	55.338.000.000	80	60.000.000.000	80	65.000.000.000	80	62.000.000.000	80	66.000.000.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					182.122.033.015,15		195.000.000.000		197.000.000.000		200.000.000.000		205.000.000.000	
Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	57,18	58,5	60	182.122.033.015,15	61,5	195.000.000.000	63	197.000.000.000	64,5	200.000.000.000	66	205.000.000.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					164.907.500		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang Tertib (%)	20	20	20	164.907.500	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.426.961.271,96		3.400.000.000		3.400.000.000		3.600.000.000		3.600.000.000	
Meningkatnya ketaatan pembangunan wilayah	Persentase Ketaatan Pembangunan yang sesuai dengan RDTR yang telah Ditetapkan (%)	95,03	95	90	2.426.961.271,96	91	3.400.000.000	92	3.400.000.000	93	3.600.000.000	94	3.600.000.000	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					94.716.539.810		104.693.569.919		104.849.891.490		104.493.653.928		99.014.819.586	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.252.751.696		39.431.942.842		41.174.970.923		42.776.220.305		44.837.469.685	
Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja dan Kepuasan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	89	100	100	26.252.751.696	100	39.431.942.842	100	41.174.970.923	100	42.776.220.305	100	44.837.469.685	1.04.2.11.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,88	80	81		82		82,5		83		83,5		1.04.2.11.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					2.150.950.000		5.146.250.000		5.146.250.000		5.146.250.000		5.146.250.000	
Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni (%)	24,95	24,95	24,95	2.150.950.000	24,95	5.146.250.000	24,95	5.146.250.000	24,95	5.146.250.000	24,95	5.146.250.000	1.04.2.11.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					20.601.632.499		5.399.250.000		4.705.500.000		4.705.500.000		5.399.250.000	
Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni (%)	24,95	24,95	24,95	20.601.632.499	24,95	5.399.250.000	24,95	4.705.500.000	24,95	4.705.500.000	24,95	5.399.250.000	1.04.2.11.0.00.04.000 0 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					10.182.860.000		13.911.127.077		13.123.170.567		11.165.683.623		19.478.070.000	
Menurunnya kawasan kumuh	Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	11,11	11,11	11,11	10.182.860.000	11,11	13.911.127.077	11,11	13.123.170.567	11,11	11.165.683.623	11,11	19.478.070.000	1.04.2.11.0.00.04.000 0 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					35.528.345.615		40.805.000.000		40.700.000.000		40.700.000.000		24.153.779.901	
Meningkatnya Kepemilikan PSU pada Permukiman	Persentase Permukiman yang memiliki PSU Sesuai Standar (%)	1,66	1,66	1,66	35.528.345.615	1,66	40.805.000.000	1,66	40.700.000.000	1,66	40.700.000.000	1,66	24.153.779.901	1.04.2.11.0.00.04.000 0 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					21.255.552.930,53		24.550.163.634,76		24.795.665.271,11		24.795.665.271,11		25.787.491.881,95	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.242.955.143,44		17.398.747.703,16		19.341.712.244,88		19.190.512.244,88		19.309.838.855,72	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kepuasan internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,45	84	85	4.860.604.308,94	87	5.366.271.675,62	88	5.653.934.392,38	89	5.502.734.392,38	89	5.059.343.768,07	1.05.0.00.0.00.04.000 0 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.04.000 0 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah dan kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,1	83	85	11.382.350.834,5	87	12.032.476.027,54	90	13.687.777.852,5	90	13.687.777.852,5	92	14.250.495.087,65	1.05.0.00.0.00.03.000 0 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.03.000 0 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.502.522.954,39		1.542.522.954,39		1.542.522.954,39		1.542.522.954,39		1.642.522.954,39	
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Penegakkan Perda dan Perkada (%)	100	100	100	233.377.129,39	100	233.377.129,39	100	233.377.129,39	100	233.377.129,39	100	233.377.129,39	1.05.0.00.0.00.03.000 0 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum (%)	100	100	100	1.078.099.625	100	1.118.099.625	100	1.118.099.625	100	1.118.099.625	100	1.218.099.625	1.05.0.00.0.00.03.000 0 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Linmas	Persentase Sumber Daya Aparatur dan Linmas yang Bersertifikasi (%)	100	100	100	191.046.200	100	191.046.200	100	191.046.200	100	191.046.200	100	191.046.200	1.05.0.00.0.00.03.000 0 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.192.444.760,86		2.780.000.000		2.573.800.000		2.725.000.000		3.497.500.000	
Meningkatnya daerah yang dipulihkan pasca bencana	Persentase daerah yang dipulihkan pasca bencana (%)	100	100	100	461.009.234,9	100	795.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	757.500.000	1.05.0.00.0.00.04.000 0 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana (%)	0	50	50	1.225.988.228,66	50	1.360.000.000	20	1.195.000.000	20	1.355.000.000	20	2.020.000.000	1.05.0.00.0.00.04.000 0 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya kualitas penanggulangan kedaduratan bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani Sesuai Standar/SOP Tanggap Darurat Tepat Waktu (%)	100	100	100	505.447.297,3	100	625.000.000	100	678.800.000	100	670.000.000	100	720.000.000	1.05.0.00.0.00.04.000 0 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.317.630.071,84		2.828.892.977,21		1.337.630.071,84		1.337.630.071,84		1.337.630.071,84	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase Pelayanan Urusan Kebakaran (%)	100	100	100	1.317.630.071,84	100	2.828.892.977,21	100	1.337.630.071,84	100	1.337.630.071,84	100	1.337.630.071,84	1.05.0.00.0.00.03.000 0 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					11.708.375.325,2		13.523.183.683,77		13.658.415.520,61		14.155.085.175,9		14.721.288.582,94	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.077.590.807,7		7.809.735.378,77		7.880.808.820,61		8.074.044.719		8.031.605.519	
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,95	75	75	6.077.590.807,7	75,5	7.809.735.378,77	76	7.880.808.820,61	76,5	8.074.044.719	76,5	8.031.605.519	1.06.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Sosial
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					949.443.317,5		850.850.000		895.000.000		945.000.000		995.000.000	
Meningkatnya Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial	Persentase bantuan sosial tepat sasaran (%)	95	95	97	949.443.317,5	99	850.850.000	100	895.000.000	100	945.000.000	100	995.000.000	1.06.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					0		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100	0	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	1.06.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.459.161.647,5		1.933.446.987		1.838.831.720		2.149.265.476,9		2.464.908.083,94	
Meningkatnya Perlindungan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani (%)	84,06	87,5	90	2.459.161.647,5	92	1.933.446.987	94	1.838.831.720	96	2.149.265.476,9	98	2.464.908.083,94	1.06.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					776.134.525		914.376.338		934.000.000		922.000.000		1.040.000.000	
Meningkatnya Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial	Persentase bantuan sosial tepat sasaran (%)	95	95	97	776.134.525	99	914.376.338	100	934.000.000	100	922.000.000	100	1.040.000.000	1.06.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					955.820.232,5		1.355.000.000		1.445.000.000		1.395.000.000		1.515.000.000	
Meningkatnya Perlindungan Sosial	Persentase bantuan sosial tepat sasaran (%)	95	95	97	955.820.232,5	99	1.355.000.000	100	1.445.000.000	100	1.395.000.000	100	1.515.000.000	1.06.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					490.224.795		639.774.980		639.774.980		639.774.980		639.774.980	
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	490.224.795	100	639.774.980	100	639.774.980	100	639.774.980	100	639.774.980	1.06.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					20.700.831.956,15		24.071.295.273		24.363.766.674,67		24.366.842.940		24.981.988.989,59	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.817.213.951,96		12.513.437.948		13.041.899.622		13.085.323.341		12.862.465.029	
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,9	84	84,1	9.817.213.951,96	84,2	12.513.437.948	84,3	13.041.899.622	84,4	13.085.323.341	84,5	12.862.465.029	2.07.3.31.0.00.01.000 0 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.07.3.31.0.00.01.000 0 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					205.304.173		223.402.550		245.742.804		245.742.804		245.742.804	
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja yang Terdaftar (%)	6,7	6,71	6,72	205.304.173	6,73	223.402.550	6,74	245.742.804	6,75	245.742.804	6,8	245.742.804	2.07.3.31.0.00.01.000 0 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					4.558.393.763,39		4.315.018.404		3.820.269.119,67		3.779.921.666		4.617.926.027,59	
Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yg Kompeten (%)	9,2	9,21	9,22	4.558.393.763,39	9,23	4.315.018.404	9,24	3.820.269.119,67	9,25	3.779.921.666	9,3	4.617.926.027,59	2.07.3.31.0.00.01.000 0 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.037.295.894,4		1.075.749.780		1.109.428.531		1.109.428.531		1.109.428.531	
Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja yang Terdaftar (%)	6,7	6,71	6,72	1.037.295.894,4	6,73	1.075.749.780	6,74	1.109.428.531	6,75	1.109.428.531	6,8	1.109.428.531	2.07.3.31.0.00.01.000 0 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					5.082.624.173,4		5.943.686.591		6.146.426.598		6.146.426.598		6.146.426.598	
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan (%)	89	89,1	89,2	5.082.624.173,4	89,3	5.943.686.591	89,4	6.146.426.598	89,5	6.146.426.598	89,6	6.146.426.598	2.07.3.31.0.00.01.000 0 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi Jaminan Ketenagakerjaan (%)	30,05	30,06	30,07		30,08		30,09		30,1		30,11		2.07.3.31.0.00.01.000 0 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					10.186.785.672,34		11.588.981.705,72		11.800.141.822,22		11.800.141.822,22		12.044.810.066,88	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.372.065.914,16		8.822.773.060,26		9.033.933.176,76		9.033.933.176,76		9.196.024.700,19	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	7.372.065.914,16	100	8.822.773.060,26	100	9.033.933.176,76	100	9.033.933.176,76	100	9.196.024.700,19	2.08.2.14.0.00.02.000 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,02	82,00	82,00		82,20		82,50		82,70		83,00		2.08.2.14.0.00.02.000 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.176.115.889		963.744.389,04		963.744.389,04		963.744.389,04		963.744.389,04	
Meningkatnya Perempuan Produktif	Persentase Perempuan yang Produktif secara Ekonomi (%)	-	7	9	1.176.115.889	10	963.744.389,04	11	963.744.389,04	12	963.744.389,04	13	963.744.389,04	2.08.2.14.0.00.02.000 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					295.892.916,24		325.482.207,86		325.482.207,86		325.482.207,86		325.482.207,86	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Perempuan	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Perempuan (%)	-	65	70	295.892.916,24	72	325.482.207,86	75	325.482.207,86	80	325.482.207,86	85	325.482.207,86	2.08.2.14.0.00.02.000 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jumlah Penurunan Kasus Kekerasan pada Perempuan (Kasus)	19	18	17		16		15		14		13		2.08.2.14.0.00.02.000 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					319.998.944,24		351.998.838,66		351.998.838,66		351.998.838,66		371.678.773,74	
Meningkatnya Perlindungan Anak	Angka Perkawinan Anak (Angka)	-	-	2,95	319.998.944,24	2,94	351.998.838,66	2,93	351.998.838,66	2,92	351.998.838,66	2,91	371.678.773,74	2.08.2.14.0.00.02.000 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					409.146.068		450.060.674,8		450.060.674,8		450.060.674,8		475.223.156,05	
Meningkatnya Perlindungan Anak	Jumlah Penurunan Kasus Kekerasan pada Anak (Kasus)	45	43	41	409.146.068	39	450.060.674,8	37	450.060.674,8	35	450.060.674,8	33	475.223.156,05	2.08.2.14.0.00.02.000 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					613.565.940,7		674.922.535,1		674.922.535,1		674.922.535,1		712.656.840	
Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Anak (%)	-	60	65	613.565.940,7	70	674.922.535,1	73	674.922.535,1	75	674.922.535,1	80	712.656.840	2.08.2.14.0.00.02.000 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jumlah Penurunan Kasus Kekerasan pada Anak (Kasus)	45	43	41		39		37		35		33		2.08.2.14.0.00.02.000 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					9.130.620.555,19		9.163.000.000		9.238.000.000		9.248.500.000		9.453.500.000	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.421.377.543,71		6.833.000.000		6.903.000.000		6.903.500.000		6.938.500.000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan internal perangkat daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	-	100	100	6.421.377.543,71	100	6.833.000.000	100	6.903.000.000	100	6.903.500.000	100	6.938.500.000	2.09.3.25.0.00.01.000 0 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,6	80,6	80,8		81		81,2		81,4		81,8		2.09.3.25.0.00.01.000 0 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					1.398.389.845,71		795.000.000		795.000.000		795.000.000		845.000.000	
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Skor PPH Ketersediaan (Skor)	92,41	92,42	92,42	1.398.389.845,71	92,43	795.000.000	92,45	795.000.000	92,48	795.000.000	92,5	845.000.000	2.09.3.25.0.00.01.000 0 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					980.015.378,05		1.200.000.000		1.205.000.000		1.215.000.000		1.320.000.000	
Meningkatnya Kualitas Konsumsi	Skor PPH Ketersediaan (Skor)	92,41	92,42	92,42	980.015.378,05	92,43	1.200.000.000	92,45	1.205.000.000	92,48	1.215.000.000	92,5	1.320.000.000	2.09.3.25.0.00.01.000 0 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Skor PPH Konsumsi (Skor)	88,6	90	90,5		91		91		91,5		91,5		2.09.3.25.0.00.01.000 0 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					109.849.719,75		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	
Menurunnya Desa Rawan Pangan	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan (%)	100	100	100	109.849.719,75	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	2.09.3.25.0.00.01.000 0 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					220.988.067,97		225.000.000		225.000.000		225.000.000		240.000.000	
Meningkatnya Kualitas Konsumsi	Skor PPH Konsumsi (Skor)	88,6	90	90,5	220.988.067,97	91	225.000.000	91	225.000.000	91,5	225.000.000	91,5	240.000.000	2.09.3.25.0.00.01.000 0 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					706.902.395		872.404.354		873.404.435		874.000.000		742.224.351	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					633.534.045		679.734.827		680.134.861		680.373.087		627.662.827	
meningkatnya penyelesaian konflik tanah	Persentase Konflik Tanah yang Terfasilitasi (%)	3	3	1	633.534.045	1	679.734.827	1	680.134.861	1	680.373.087	1	627.662.827	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					39.999.490		86.200.276		86.600.306		86.838.532		34.128.273	
Meningkatnya pemerataan penguasaan tanah	Persentase Objek Redistribusi Tanah yang Terverifikasi (%)	-	-	100	39.999.490	100	86.200.276	100	86.600.306	100	86.838.532	100	34.128.273	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					33.368.860		106.469.251		106.669.268		106.788.381		80.433.251	
Meningkatnya ketertiban tanah pemda	Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Tertib (%)	-	-	1	33.368.860	1	106.469.251	1	106.669.268	1	106.788.381	1	80.433.251	1.03.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17.787.765.245		31.145.938.268,5		31.193.011.779,37		32.786.003.007,46		43.756.023.626,88	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					188.743.478		426.433.716		449.077.088		699.077.087		273.984.796	
Meningkatnya Pemanfaatan Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup	Persentase Program Perencanaan yang Termanfaatkan Sesuai Standar (%)	100	100	100	188.743.478	100	426.433.716	100	449.077.088	100	699.077.087	100	273.984.796	1.04.2.11.0.00.04.000 0 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					6.536.024.798		6.960.502.939		6.590.093.568		6.825.093.568		6.670.230.104	
Meningkatnya Kualitas Baku Mutu Lingkungan Hidup	Persentase Nilai Baku Mutu Lingkungan Hidup Yang Terpenuhi (%)	100	100	100	6.167.694.803	100	6.750.502.939	100	6.380.093.568	100	6.615.093.568	100	6.460.230.104	1.04.2.11.0.00.04.000 0 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Data GRK	Penurunan Emisi GRK Tahunan (TON CO2 EQ)	0	48.553,84	49.828,44	368.329.995	52.642,17	210.000.000	56.605,02	210.000.000	57.768,33	210.000.000	61.065,23	210.000.000	1.04.2.11.0.00.04.000 0 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.697.793.141		17.486.851.988,5		17.615.342.450,37		18.552.096.116,46		29.783.603.641,88	
Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100	2.697.793.141	100	17.486.851.988,5	100	17.615.342.450,37	100	18.552.096.116,46	100	29.783.603.641,88	1.04.2.11.0.00.04.000 0 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					300.873.589		749.650.575		848.615.632		960.977.195		1.077.074.914	
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat Aturan (%)	100	100	100	300.873.589	100	749.650.575	100	848.615.632	100	960.977.195	100	1.077.074.914	1.04.2.11.0.00.04.000 0 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					79.128.674		150.000.000		160.000.000		200.000.000		250.000.000	
Meningkatnya Sekolah Sadar Lingkungan Hidup	Jumlah Satuan Pendidikan yang Nilai Adiwiyatanya Tercapai (Sekolah)	2	2	2	79.128.674	2	150.000.000	2	160.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	1.04.2.11.0.00.04.000 0 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					98.797.206		171.600.000		188.670.000		207.546.000		228.300.000	
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat Aturan (%)	100	100	100	98.797.206	100	171.600.000	100	188.670.000	100	207.546.000	100	228.300.000	1.04.2.11.0.00.04.000 0 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					7.886.404.359		5.200.899.050		5.341.213.041		5.341.213.041		5.472.830.171	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Terkelola (%)	40	40	40	7.886.404.359	40	5.200.899.050	40	5.341.213.041	40	5.341.213.041	40	5.472.830.171	1.04.2.11.0.00.04.000 0 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					9.915.912.831		11.452.879.319,81		11.567.408.113		11.567.408.113		12.030.104.437,52	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.935.741.081,65		8.338.348.790		8.868.489.090		8.326.606.773		8.987.765.029	
Meningkatnya kualitas layanan internal dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	7.935.741.081,65	100	8.338.348.790	100	8.868.489.090	100	8.326.606.773	100	8.987.765.029	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,8	81,9	82		82,1		82,2		82,25		83		2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					249.765.250		760.000.000		750.000.000		775.000.000		775.000.000	
Meningkatnya kepemilikan administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan KTP Elektronik (%)	99,38	99,4	99,4	249.765.250	99,4	760.000.000	99,4	750.000.000	99,4	775.000.000	99,4	775.000.000	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	5,35	30	30		30		30		30		30		2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan KIA (%)	66,27	67	68		69		70		71		72		2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					88.230.655,35		190.230.655		190.230.655		200.230.655		210.230.655	
Meningkatnya kepemilikan administrasi pencatatan sipil	Kepemilikan akta kelahiran (%)	99,19	99,2	99,3	88.230.655,35	99,4	190.230.655	99,5	190.230.655	99,6	200.230.655	99,7	210.230.655	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan akta perkawinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					1.642.175.844		2.164.299.874,81		1.758.688.368		2.265.570.685		2.057.108.753,52	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,41	88,6	89	1.642.175.844	89,3	2.164.299.874,81	90	1.758.688.368	90,3	2.265.570.685	91	2.057.108.753,52	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					13.885.076.791,09		16.037.263.693,71		16.197.636.330,65		16.197.636.330,65		16.855.541.783,87	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.357.859.958,65		7.084.793.263,42		6.948.429.748,84		6.948.429.748,84		6.948.429.749,06	
Meningkatnya kualitas layanan internal dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82	82,5	83	6.357.859.958,65	83,5	7.084.793.263,42	84	6.948.429.748,84	84,5	6.948.429.748,84	85	6.948.429.749,06	2.13.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					459.967.485		459.967.485		459.967.485		459.967.485		459.967.485	
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang menyampaikan LKPD dan LPPD sesuai ketentuan (%)	100	100	100	459.967.485	100	459.967.485	100	459.967.485	100	459.967.485	100	459.967.485	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					169.962.190		169.962.190		169.962.190		169.962.190		169.962.190	
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang menyampaikan LKPD dan LPPD sesuai ketentuan (%)	100	100	100	169.962.190	100	169.962.190	100	169.962.190	100	169.962.190	100	169.962.190	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					5.197.312.430,38		5.972.566.027,38		5.456.789.785		5.456.789.785		5.466.789.785	
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang menyampaikan LKPD dan LPPD sesuai ketentuan (%)	100	100	100	5.022.344.009,38	100	5.797.597.606,38	100	5.281.821.364	100	5.281.821.364	100	5.281.821.364	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Usaha Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (%)	80	87	90	174.968.421	93	174.968.421	95	174.968.421	97	174.968.421	100	184.968.421	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.699.974.727,06		2.349.974.727,91		3.162.487.121,81		3.162.487.121,81		3.810.392.574,81	
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat yang aktif di desa (%)	90	90	95	1.399.998.669,06	100	1.949.998.669,41	100	2.722.511.063,31	100	2.522.511.063,31	100	3.202.707.593,31	2.13.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Usaha Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (%)	80	87	90	299.976.058	93	399.976.058,5	95	439.976.058,5	97	639.976.058,5	100	607.684.981,5	2.13.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4.585.936.312,9		5.127.029.944,2		5.083.029.944,2		5.083.029.944,2		5.513.688.570,2	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					234.565.300		258.021.830		214.021.830		214.021.830		272.447.594,2	
Meningkatnya Kualitas Informasi Data Keluarga	Persentase Informasi Data Keluarga yang Valid (%)	70	75	80	234.565.300	85	258.021.830	90	214.021.830	95	214.021.830	100	272.447.594,2	2.08.2.14.0.00.02.000 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.574.829.482,75		3.932.312.431,03		3.932.312.431,03		3.932.312.431,03		4.252.175.423	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepersertaan Keluarga Berencana	Persentase Cakupan KB Aktif (%)	76,72	77,2	77,35	686.172.802,3	77,65	754.790.082,53	77,75	754.790.082,53	77,85	754.790.082,53	77,95	797.000.689	2.08.2.14.0.00.02.000 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pengetahuan Program Bangga Kencana	Jumlah Keluarga/Masyarakat yang teredukasi Program Bangga Kencana (Keluarga)	52.700	52.700	52.700	2.888.656.680,45	52.700	3.177.522.348,5	52.700	3.177.522.348,5	52.700	3.177.522.348,5	52.700	3.455.174.734	2.08.2.14.0.00.02.000 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					776.541.530,15		936.695.683,17		936.695.683,17		936.695.683,17		989.065.553	
Meningkatnya Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga yang diintervensi Poktan Meningkat Kualitasnya (%)	69	70	75	776.541.530,15	80	936.695.683,17	85	936.695.683,17	90	936.695.683,17	90	989.065.553	2.08.2.14.0.00.02.000 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jumlah Calon Pengantin yang Terpenuhi Syarat Pranikah (Orang)	2.518	2.718	2.918		3.118		3.318		3.518		3.718		2.08.2.14.0.00.02.000 0 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					50.956.216.581,36		54.737.605.466,09		55.284.981.520,75		55.284.981.520,75		57.496.380.781,58	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.070.983.001,04		17.432.605.466,09		13.459.981.520,75		13.459.981.520,75		13.636.664.851	
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,9	82,91	82,94	10.070.983.001,04	82,97	17.432.605.466,09	83	13.459.981.520,75	83,2	13.459.981.520,75	83,23	13.636.664.851	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					34.840.338.990,32		36.755.000.000		41.275.000.000		41.275.000.000		43.309.715.930,58	
Meningkatnya perluasan jaringan transportasi	Jumlah Trayek Transportasi yang Aktif (Trayek)	6	6	6	1.145.524.850	6	2.150.000.000	6	2.650.000.000	6	2.700.000.000	6	2.700.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya kapasitas lalu lintas jalan	Persentase Jalan Tertib Lalu Lintas (%)	2	2	2	33.087.654.085,48	2	32.840.000.000	2	36.960.000.000	2	37.810.000.000	2	30.850.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya kualitas kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan (%)	100	100	100	334.877.450	100	495.000.000	100	395.000.000	100	395.000.000	100	9.389.715.930,58	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan	Persentase Prasarana Transportasi perhubungan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	272.282.604,84	100	1.270.000.000	100	1.270.000.000	100	370.000.000	100	370.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					6.044.894.590		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan	Persentase Prasarana Transportasi perhubungan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	5.995.009.090	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	2.15.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya perluasan jaringan transportasi	Jumlah Trayek Transportasi yang Aktif (Trayek)	3	3	3	49.885.500	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	2.15.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					16.120.493.072,75		18.369.823.568,48		18.534.406.480,05		19.180.798.509,85		19.900.003.610,73	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.823.557.485,32		6.970.581.919,48		6.893.063.453,65		7.139.214.405,85		7.047.425.582,37	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,1	82,3	82,5	5.823.557.485,32	82,7	6.970.581.919,48	82,8	6.893.063.453,65	82,9	7.139.214.405,85	83	7.047.425.582,37	2.16.2.20.2.21.01.000 0 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.01.000 0 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.920.418.206		4.630.125.949		4.965.575.756,4		4.883.121.824		5.210.966.249,06	
Meningkatnya penyebaran informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase SKPD yang mempublikasikan seluruh daftar informasi publik (%)	73	75	78	3.920.418.206	80	4.630.125.949	85	4.965.575.756,4	90	4.883.121.824	100	5.210.966.249,06	2.16.2.20.2.21.01.000 0 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					6.376.517.381,43		6.769.115.700		6.675.767.270		7.158.462.280		7.641.611.779,3	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelayanan Aplikasi dan Informatika	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika (%)	100	100	100	6.376.517.381,43	100	6.769.115.700	100	6.675.767.270	100	7.158.462.280	100	7.641.611.779,3	2.16.2.20.2.21.01.000 0 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.647.326.803,79		11.155.408.133		11.850.679.073		12.343.713.337		13.128.713.337	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.813.728.367,79		9.228.312.202		9.298.583.142		9.671.617.406		9.296.617.406	
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	6.813.728.367,79	100	9.228.312.202	100	9.298.583.142	100	9.671.617.406	100	9.296.617.406	2.17.3.30.0.00.03.000 0 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,05	79,05	80		81		82		85		85		2.17.3.30.0.00.03.000 0 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					84.599.644		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	
Meningkatnya Kelembagaan Koperasi.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	-	5	7,5	84.599.644	10	120.000.000	12,5	120.000.000	15	120.000.000	15	120.000.000	2.17.3.30.0.00.03.000 0 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					14.999.800		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya kelembagaan koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	-	5	7,5	14.999.800	10	100.000.000	12,5	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	2.17.3.30.0.00.03.000 0 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					39.999.900		275.000.000		300.000.000		320.000.000		330.000.000	
Meningkatnya kelembagaan koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	-	5	7,5	39.999.900	10	275.000.000	12,5	300.000.000	15	320.000.000	15	330.000.000	2.17.3.30.0.00.03.000 0 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					53.999.800		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
Meningkatnya kelembagaan koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	-	5	7,5	53.999.800	10	450.000.000	12,5	450.000.000	15	450.000.000	15	450.000.000	2.17.3.30.0.00.03.000 0 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					639.999.292		982.095.931		1.582.095.931		1.682.095.931		2.832.095.931	
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro yang dibina (%)	-	33,33	41,67	639.999.292	47,06	982.095.931	48	1.582.095.931	48,65	1.682.095.931	48,65	2.832.095.931	2.17.3.30.0.00.03.000 0 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					7.974.619.409,59		8.109.254.318,08		8.190.346.861,26		8.190.346.861,26		8.517.960.735,71	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.210.224.828,09		7.204.859.736,08		7.265.952.279,26		7.265.952.279,26		7.593.566.153,71	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	7.210.224.828,09	100	7.204.859.736,08	100	7.265.952.279,26	100	7.265.952.279,26	100	7.593.566.153,71	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,65	85	85		86		87		88		89		2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					37.319.575		87.319.575		87.319.575		87.319.575		87.319.575	
Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang kondusif	Jumlah Investor yang Berinvestasi (Pelaku Usaha)	25	25	25	37.319.575	25	87.319.575	25	87.319.575	25	87.319.575	25	87.319.575	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					45.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	
Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang kondusif	Jumlah Investor yang Berinvestasi (Pelaku Usaha)	100	100	100	45.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					295.462.525,5		305.462.526		305.462.526		305.462.526		305.462.526	
Meningkatnya Kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan (Hari)	1.324	3	3	123.947.148	3	133.947.148	3	133.947.148	3	133.947.148	3	133.947.148	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Rekomendasi Teknis SKPD sesuai dengan ketentuan (%)	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya koordinasi dengan SKPD Teknis	Jumlah Pertimbangan Teknis dan Koordinasi SKPD Sesuaii dengan Ketentuan (Izin/persetujuan)	1.324	1.700	2.750	50.000.000	1.400	50.000.000	1.450	50.000.000	1.500	50.000.000	1.550	50.000.000	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya kualitas pengendalian penanaman modal	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu (%)	100	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya tindak lanjut pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase Pengaduan yg ditindaklanjuti (%)	4	24	24	51.515.377,5	24	51.515.378	24	51.515.378	24	51.515.378	24	51.515.378	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					136.614.000		136.614.000		136.614.000		136.614.000		136.614.000	
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu (%)	20	20	20	136.614.000	20	136.614.000	20	136.614.000	20	136.614.000	20	136.614.000	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					249.998.481		279.998.481		299.998.481		299.998.481		299.998.481	
Tervalidasinya data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase data dan informasi yang valid (%)	100	100	100	249.998.481	100	279.998.481	100	299.998.481	100	299.998.481	100	299.998.481	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					23.447.867.458,31		26.917.043.670,03		27.186.214.106,73		27.186.214.106,73		28.273.662.671	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.824.650.419,59		8.582.681.586,39		8.929.881.027,99		8.978.578.453,03		9.776.531.511,73	
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,2	79,2	79,5	6.824.650.419,59	80	8.582.681.586,39	80,1	8.929.881.027,99	80,5	8.978.578.453,03	80,9	9.776.531.511,73	2.19.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	0	0	85		85,5		85,7		86,1		86,5		2.19.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					3.824.772.791,66		4.815.111.431,24		4.127.728.148,83		4.466.337.008,78		4.537.233.850,34	
Meningkatnya Kapasitas pemuda	Jumlah Pemuda yang Aktif (Orang)	2.679	2.704	2.729	3.624.778.630	2.729	4.455.117.561,5	2.754	3.907.234.585,6	2.779	4.234.818.767,39	2.804	4.294.139.696,88	2.19.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Persentase wirausaha muda produktif (%)	67,44	84,23	84,25		84,3		84,35		84,4		84,45		2.19.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kepemudaan	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100	199.994.161,66	100	359.993.869,74	100	220.493.563,23	100	231.518.241,39	100	243.094.153,46	2.19.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					12.223.454.247,06		12.940.511.152,4		13.423.604.929,91		13.086.298.644,92		13.284.897.308,93	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Sesuai Standart (%)	100	100	100	2.678.067.810,65	100	3.232.873.683,99	100	3.628.379.643,91	100	3.400.000.000	100	3.475.000.000	2.19.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Meningkatnya pengembangan olahraga kemasyarakatan	Persentase Induk Organisasi Olahraga (INORGA) yang aktif (%)	81	81	81	2.301.454.958,98	82	2.276.509.417,74	83	2.304.128.179,32	84	2.146.114.864,52	85	2.219.024.702,94	2.19.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Meningkatnya Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Prestasi	Persentase atlet yang aktif dalam kejuaraan olahraga (%)	80	80	81	7.243.931.477,43	82	7.431.128.050,67	83	7.491.097.106,68	84	7.540.183.780,4	85	7.590.872.605,99	2.19.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					574.990.000		578.739.500		705.000.000		655.000.000		675.000.000	
Meningkatnya aktifitas organisasi kepemudaan dan organisasi kepramukaan	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kepramukaan yang Aktif (%)	1	1	1	574.990.000	1	578.739.500	1	705.000.000	1	655.000.000	1	675.000.000	2.19.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					145.025.000		365.727.500		394.700.250		426.570.275		475.093.556,6	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					145.025.000		365.727.500		394.700.250		426.570.275		475.093.556,6	
Meningkatnya kematangan statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,25	2,3	2,4	145.025.000	2,5	365.727.500	2,6	394.700.250	2,7	426.570.275	2,8	475.093.556,6	2.16.2.20.2.21.01.000 0 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					125.048.990		195.553.889		191.309.277		208.335.077		233.234.849	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					125.048.990		195.553.889		191.309.277		208.335.077		233.234.849	
Meningkatnya penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	469	470	471	125.048.990	473	195.553.889	475	191.309.277	477	208.335.077	478	233.234.849	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					5.554.983.465,13		5.796.686.267		5.796.686.267		5.796.686.267		5.916.686.267	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					4.485.256.011,63		4.386.975.475		4.386.975.475		4.386.975.475		4.506.975.475	
Meningkatnya kapasitas komunitas budaya yang bersertifikasi/terdaftar	Persentase komunitas budaya yang terdaftar (%)	20	20	20	4.485.256.011,63	25	4.386.975.475	30	4.386.975.475	35	4.386.975.475	40	4.506.975.475	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					99.729.712,5		104.710.792		104.710.792		104.710.792		104.710.792	
Meningkatnya Kesenian Tradisional yang menjadi daya taris wisata	Persentae Kesenian Trasional Yang menjadi daya tarik wisata (%)	35	35	35	99.729.712,5	40	104.710.792	45	104.710.792	50	104.710.792	55	104.710.792	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					99.999.796		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	
Meningkatnya perlindungan situs dan Benda Bersejarah	Persentase Situs dan Benda Bersejarah yang ditetapkan (%)	25	25	25	99.999.796	30	105.000.000	35	105.000.000	40	105.000.000	45	105.000.000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					869.997.945		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perlindungan cagar budaya	Persentase Cagar budaya yang ditetapkan (%)	31,25	31,25	31,25	869.997.945	34	1.200.000.000	37	1.200.000.000	40	1.200.000.000	43	1.200.000.000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					7.544.600.669,94		8.746.148.375,43		8.871.933.735,89		8.893.707.735,89		9.233.736.045,33	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.430.656.488,35		7.546.032.538,43		7.572.142.156,89		7.554.216.156,89		7.894.244.466,33	
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	0	100	100	6.430.656.488,35	100	7.546.032.538,43	100	7.572.142.156,89	100	7.554.216.156,89	100	7.894.244.466,33	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,1	81,25	81,5		82		82,5		83		83,5		2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.053.929.381,59		1.139.115.837		1.236.791.579		1.276.491.579		1.276.491.579	
Meningkatnya komunitas baca masyarakat	Persentase peningkatan komunitas baca masyarakat (%)	-	20	25	471.991.092,24	30	560.232.900	35	609.791.579	40	629.991.579	45	629.991.579	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan	Persentase peningkatan Kunjungan pemustaka (%)	-	25	26	581.938.289,35	27	578.882.937	28	627.000.000	29	646.500.000	30	646.500.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					60.014.800		61.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan	Persentase peningkatan Kunjungan pemustaka (%)	0	25	26	60.014.800	27	61.000.000	28	63.000.000	29	63.000.000	30	63.000.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					492.523.959		536.730.571		503.774.000		482.000.000		517.000.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					402.141.709		416.538.171		393.774.000		397.000.000		402.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM Kearsipan	Persentase SDM Kearsipan yang ditingkatkan (%)	0	50	60	99.964.171	70	99.964.171	80	100.000.000	90	100.000.000	100	100.000.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya kepatuhan pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kepatuhan kearsipan minimal B (%)	-	50	60	302.177.538	70	316.574.000	80	293.774.000	90	297.000.000	100	302.000.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					90.382.250		120.192.400		110.000.000		85.000.000		115.000.000	
Terwujudnya Keamanan arsip daerah	Persentase arsip yang aman (%)	0	100	100	90.382.250	100	120.192.400	100	110.000.000	100	85.000.000	100	115.000.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					2.356.231.345		3.185.995.424,37		3.234.485.378,61		3.223.985.378,61		3.517.884.793,76	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.235.278.625		1.905.000.000		1.905.000.000		1.910.000.000		2.080.000.000	
Meningkatnya kapasitas nelayan perikanan tangkap	Persentase Nelayan Tangkap yang Meningkat Produksinya (%)	0	2,5	3,1	1.235.278.625	3,2	1.905.000.000	3,2	1.905.000.000	3,4	1.910.000.000	4	2.080.000.000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					705.988.720		800.000.000		825.000.000		825.000.000		950.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Pembudidaya	Persentase kelompok pembudidaya yang meningkat produksinya (%)	0	2,5	3,1	705.988.720	3,2	800.000.000	3,2	825.000.000	3,4	825.000.000	4	950.000.000	2.09.3.25.0.00.01.000 0 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					258.771.500		285.000.000		285.000.000		285.000.000		285.000.000	
Meningkatnya kapasitas nelayan perikanan tangkap	Persentase Nelayan Tangkap yang Meningkat Produksinya (%)	0	2,5	3,1	258.771.500	3,2	285.000.000	3,2	285.000.000	3,4	285.000.000	4	285.000.000	2.09.3.25.0.00.01.000 0 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					156.192.500		195.995.424,37		219.485.378,61		203.985.378,61		202.884.793,76	
Meningkatnya produk hasil olahan perikanan	Persentase peningkatan produk olahan perikanan (%)	1,5	1,5	1,5	156.192.500	1,5	195.995.424,37	1,5	219.485.378,61	1,5	203.985.378,61	1,5	202.884.793,76	2.09.3.25.0.00.01.000 0 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					17.070.228.578,87		19.716.114.008,59		19.913.275.148,68		19.913.275.148,68		20.709.806.154,63	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.593.546.090,94		8.231.369.664		7.806.369.664		7.564.231.554,31		7.656.369.664	
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	82	100	100	6.593.546.090,94	100	8.231.369.664	100	7.806.369.664	100	7.564.231.554,31	100	7.656.369.664	3.26.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,8	80	80,1		80,2		80,3		80,4		80,5		3.26.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					5.611.959.820,88		6.133.457.594,99		6.488.054.397,6		6.617.815.485,55		7.252.279.417,42	
Meningkatnya Pengembangan Destinasi Wisata Potensial	Persentase Destinasi wisata Potensial yang Berkembang (%)	20	20	20	5.611.959.820,88	20	6.133.457.594,99	20	6.488.054.397,6	20	6.617.815.485,55	20	7.252.279.417,42	3.26.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					3.472.354.943,75		3.819.604.393		4.010.584.612,65		4.090.796.304,9		4.382.065.935,39	
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Kunjungan Wisatawan (%)	0,3	5	5	3.472.354.943,75	5	3.819.604.393	5	4.010.584.612,65	5	4.090.796.304,9	5	4.382.065.935,39	3.26.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					36.500.000		40.150.000		42.157.500		43.000.650		36.500.000	
Meningkatnya Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata yang memiliki HKI	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Memiliki HKI (%)	5	5	5	36.500.000	5	40.150.000	5	42.157.500	5	43.000.650	5	36.500.000	3.26.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.355.867.723,3		1.491.532.356,6		1.566.108.974,43		1.597.431.153,92		1.382.591.137,82	
Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi (%)	10	10	10	104.001.260	10	114.427.506,6	10	120.148.881,93	10	122.551.859,57	10	132.591.137,82	3.26.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi (%)	2	2	2	1.251.866.463,3	2	1.377.104.850	2	1.445.960.092,5	2	1.474.879.294,35	2	1.250.000.000	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					95.304.773.090,89		115.367.682.716,24		111.455.213.476,3		117.715.286.353,36		122.423.897.807,49	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					46.980.057.205,05		44.715.800.000		43.326.965.000		44.111.965.000		44.907.344.650	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,01	80,03	80,05	35.396.251.484,03	82	30.532.300.000	82,02	29.407.965.000	82,05	29.407.965.000	83	29.641.844.650	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	83	85	87		88		89		90		90		3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80	80	80,01	11.583.805.721,02	82	14.183.500.000	83	13.919.000.000	85	14.704.000.000	85	15.265.500.000	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					10.284.700.994,44		17.680.000.000		19.259.916.169		19.964.600.000		22.443.700.955	
Meningkatnya kelahiran ternak	Persentase Kelahiran Ternak (%)	36,71	36,71	36,71	1.890.930.421,04	36,71	2.750.000.000	36,71	2.850.000.000	36,71	3.150.000.000	36,71	3.350.000.000	3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian	Persentase Komoditas yang Diterima Perusahaan atau Pasar (%)	15	1	1	397.039.954	1	460.000.000	1	464.600.000	1	464.600.000	1	469.246.000	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura) (%)	15	4	4,5	7.996.730.619,4	4,65	14.470.000.000	4,7	15.945.316.169	4,71	16.350.000.000	4,86	18.624.454.955	3.27.0.00.0.00.04.000 0 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					30.580.435.306,06		41.400.000.000		37.820.000.000		40.440.000.000		41.677.200.000	
Meningkatnya Pemenuhan Prasarana Pertanian(SubSektor Peternakan)	Persentase Kelahiran Ternak (%)	36,71	36,71	36,71	2.088.943.167,06	36,71	1.900.000.000	36,71	1.400.000.000	36,71	1.420.000.000	36,71	1.450.000.000	3.27.0.00.0.00.08.000 0 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya produksi hasil pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan)	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura) (%)	30	6	6,8	28.491.492.139	6,97	39.500.000.000	7,05	36.420.000.000	7,06	39.020.000.000	7,29	40.227.200.000	3.27.0.00.0.00.04.000 0 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					972.271.402,5		1.140.000.000		1.140.000.000		1.210.000.000		1.220.000.000	
Menurunnya kematian ternak	Persentase Kematian Ternak (%)	2,89	2,66	2,59	972.271.402,5	2,55	1.140.000.000	2,43	1.140.000.000	2,43	1.210.000.000	2,43	1.220.000.000	3.27.0.00.0.00.08.000 0 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					2.762.464.383		6.290.903.903,02		5.387.196.688,61		7.377.702.558,94		7.421.068.656,29	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan)	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura) (%)	100	6	6,8	2.762.464.383	6,97	6.290.903.903,02	7,05	5.387.196.688,61	7,06	7.377.702.558,94	7,29	7.421.068.656,29	3.27.0.00.0.00.04.000 0 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					2.190.618.000		2.200.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		2.666.000.000	
Meningkatnya nilai tambah pertanian	Persentase Komoditas yang Diterima Perusahaan atau Pasar (%)	100	5	5	2.190.618.000	6	2.200.000.000	7,5	2.600.000.000	8,5	2.600.000.000	10	2.666.000.000	3.27.0.00.0.00.04.000 0 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.534.225.799,84		1.940.978.813,22		1.921.135.618,69		2.011.018.794,42		2.088.583.546,2	
Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani	Persentase Penyuluh Pertanian yang Terlatih (%)	100	10	10	1.031.270.662	10	1.340.000.000	10	1.353.400.000	10	1.353.400.000	10	1.386.800.000	3.27.0.00.0.00.04.000 0 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan	Persentase Kelahiran Ternak (%)	36,71	36,71	36,71	502.955.137,84	36,71	600.978.813,22	36,71	567.735.618,69	36,71	657.618.794,42	36,71	701.783.546,2	3.27.0.00.0.00.08.000 0 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Persentase SDM Peternakan yang terlatih (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.08.000 0 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					10.632.579.891		11.877.274.302,44		9.473.746.081,81		10.143.862.280,48		10.258.365.305,51	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					6.585.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku (%)	-	73,92	75,27	6.585.000	76,61	7.000.000	77,96	7.000.000	79,64	7.000.000	79,64	7.000.000	2.17.3.30.0.00.03.000 0 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					9.766.513.038		10.462.807.030,96		8.057.278.812,33		8.668.316.522		8.835.898.036,03	
Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar	Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar (%)	100	100	100	9.766.513.038	100	10.462.807.030,96	100	8.057.278.812,33	100	8.668.316.522	100	8.835.898.036,03	2.17.3.30.0.00.03.000 0 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					544.919.685		557.972.215		559.972.215		561.472.215		565.972.215	
Meningkatnya stabilitas harga bapokting	Koefisiensi variansi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Nilai Akreditasi)	-	0,07	0,065	544.919.685	0,06	557.972.215	0,055	559.972.215	0,05	561.472.215	0,05	565.972.215	2.17.3.30.0.00.03.000 0 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					149.689.492		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000	
Meningkatnya pengembangan ekspor daerah	Persentase Nilai Net Ekspor (%)	-	6	6,5	149.689.492	7	160.000.000	7,5	160.000.000	8	160.000.000	8	160.000.000	2.17.3.30.0.00.03.000 0 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					114.933.776		221.913.242		221.913.240		279.491.729		221.913.240	
Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku (%)	-	73,92	75,27	114.933.776	76,61	221.913.242	77,96	221.913.240	79,64	279.491.729	79,64	221.913.240	2.17.3.30.0.00.03.000 0 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					49.938.900		467.581.814,48		467.581.814,48		467.581.814,48		467.581.814,48	
Meningkatnya pengembangan ekspor daerah	Persentase Produk Unggulan yang Dipromosikan (%)	100	100	100	49.938.900	100	467.581.814,48	100	467.581.814,48	100	467.581.814,48	100	467.581.814,48	2.17.3.30.0.00.03.000 0 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					4.636.295.391		4.038.087.089,52		4.026.709.511,48		4.023.633.246,15		4.544.106.244	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					4.456.375.604		3.840.175.323,52		3.828.797.745,48		3.825.721.480,15		4.346.194.478	
Meningkatkan akses pemasaran IKM	Persentase akses pemasaran IKM (%)	16,8	17	17,2	1.125.161.144,2	17,4	1.675.439.047,7	17,6	1.777.982.952,48	17,8	1.852.982.952,07	18	2.471.491.476	2.07.3.31.0.00.01.000 0 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Meningkatkan IKM yang menerapkan standarisasi industri	Persentase IKM yg Menerapkan Standarisasi Industri (%)	3	3	4	3.199.254.404,65	4,5	2.019.580.215,82	5	1.891.143.127	5,5	1.813.066.862,08	6	1.715.031.336	2.07.3.31.0.00.01.000 0 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Meningkatkan pengembangan Perwilayahan Industri	Persentase Pengembangan Sentra IKM (%)	23	23,1	23,2	131.960.055,15	23,3	145.156.060	23,4	159.671.666	23,5	159.671.666	23,6	159.671.666	2.07.3.31.0.00.01.000 0 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Persentase Pengembangan Kawasan Industri (%)	6,2	6,3	6,4		6,5		6,6		6,7		6,8		2.07.3.31.0.00.01.000 0 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					29.919.843		32.911.827		32.911.827		32.911.827		32.911.827	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan data pelaku Industri di SIINas	Persentase Kepatuhan Industri terhadap SIINas (%)	37,99	38	38,1	29.919.843	38,2	32.911.827	38,3	32.911.827	38,4	32.911.827	38,5	32.911.827	2.07.3.31.0.00.01.000 0 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					149.999.944		164.999.939		164.999.939		164.999.939		164.999.939	
Meningkatkan data pelaku Industri di SIINas	Persentase Kepatuhan Industri terhadap SIINas (%)	37,99	38	38,1	149.999.944	38,2	164.999.939	38,3	164.999.939	38,4	164.999.939	38,5	164.999.939	2.07.3.31.0.00.01.000 0 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					121.607.623.859,36		131.250.000.000		145.818.750.000		152.807.170.270,15		158.919.457.080,95	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					58.501.849.965,03		62.883.991.079,74		67.214.408.596		70.927.536.021,15		74.945.955.006,95	
Meningkatnya kematangan organisasi Perangkat Daerah	Tingkat kematangan organisasi PD (Nilai)	4	4	4	300.404.476,92	4	324.432.790,3	4	377.430.759,62	4	408.689.090,05	4	468.561.546,19	4.01.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,45	83	83,25	57.716.272.855,7	83,5	62.043.423.572,76	83,5	66.283.484.340	83,75	69.937.760.309,15	84	73.847.303.966,95	4.01.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
	Persentase Kepuasan Pimpinan Daerah kepada layanan (%)	0	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP (Nilai)	11,01	11,05	11,25	33.749.860,5	11,55	50.000.000	11,85	60.000.000	12	65.400.000	12,15	72.594.000	4.01.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi RB	Nilai Komponen rencana aksi RB General (Nilai)	2,05	2,4	2,4	286.849.108,02	2,4	293.040.896,32	2,4	322.344.985	2,4	341.685.685	2,4	379.271.110	4.01.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya standar pelayanan publik pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan IKM >80 (%)	97,5	100	100	164.573.663,89	100	173.093.820,36	100	171.148.511,38	100	174.000.936,95	100	178.224.383,81	4.01.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					61.322.758.079,41		66.458.181.998,3		76.410.340.446		79.510.113.214		81.343.333.726	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Reformasi Hukum	Indeks Kualitas kebijakan (Nilai)	65	70	71	2.067.707.976,58	72	2.212.447.534,94	73	2.544.314.663	74	2.747.859.837	75	2.863.950.453	4.01.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Hukum (Nilai)	97,92	98	98		98		98		98		98		4.01.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi RB	Nilai Komponen rencana aksi RB General (Nilai)	2,05	2,4	2,4	57.720.867.298	2,4	62.604.158.862,19	2,4	71.994.782.691	2,4	74.741.310.837	2,4	76.236.137.054	4.01.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor LPPD (Skor)	3,1	3,115	3,12	1.534.182.804,83	3,125	1.641.575.601,17	3,15	1.871.243.092	3,2	2.020.942.540	3,2	2.243.246.219	4.01.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.783.015.814,92		1.907.826.921,96		2.194.000.958		2.369.521.035		2.630.168.348	
Meningkatnya Kualitas Rencana Aksi RB	Nilai Komponen rencana aksi RB General (Nilai)	2,05	2,4	2,4	1.783.015.814,92	2,4	1.907.826.921,96	2,4	2.194.000.958	2,4	2.369.521.035	2,4	2.630.168.348	4.01.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					74.429.371.930,11		85.735.139.443,4		86.592.490.837,83		88.954.104.224,32		92.512.268.393,29	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					43.945.176.168,74		48.916.068.088,3		48.776.380.225,39		50.332.000.000		51.287.104.462	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,2	81,3	81,4	14.547.490.073,82	81,5	18.391.068.088,1	81,6	18.891.341.225,39	81,7	18.547.000.000	81,8	19.502.104.462	4.02.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai ketentuan (%)	0	90	91	29.397.686.094,92	92	30.525.000.000,2	93	29.885.039.000	94	31.785.000.000	95	31.785.000.000	4.02.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					30.484.195.761,37		36.819.071.355,1		37.816.110.612,44		38.622.104.224,32		41.225.163.931,29	
Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu dan Tepat Sasaran (%)	0	90	91	25.767.026.360,88	92	31.607.946.355,1	93	32.404.985.612,44	94	33.201.379.224,32	95	35.604.438.931,29	4.02.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai ketentuan (%)	0	90	91	4.717.169.400,49	92	5.211.125.000	93	5.411.125.000	94	5.420.725.000	95	5.620.725.000	4.02.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.01 - PERENCANAAN					13.056.019.111,41		14.862.979.361,81		15.407.503.349,89		15.970.067.489,16		16.549.511.605,16	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.891.838.464,9		13.567.785.944,56		14.050.101.151,8		14.466.576.826,35		14.843.500.037,95	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	11.891.838.464,9	100	13.567.785.944,56	100	14.050.101.151,8	100	14.466.576.826,35	100	14.843.500.037,95	5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,4	81,7	82,2		83,2		84,6		86,2		87,3		5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					785.200.589,51		846.002.562,98		884.617.694,63		978.216.147,17		1.094.454.254,07	
Meningkatnya capaian kinerja program pembangunan daerah	Persentase Indikator Program Pembangunan yang Memenuhi Target (%)	-	55	60	236.399.407,51	65	253.959.493,58	70	265.220.575,11	75	284.164.901,9	80	315.819.149,77	5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase Kesesuaian Sasaran RKPD dengan RPJMD (%)	100	100	100	548.801.182	100	592.043.069,4	100	619.397.119,52	100	694.051.245,27	100	778.635.104,3	5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD (%)	99,2	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					378.980.057		449.190.854,27		472.784.503,46		525.274.515,64		611.557.313,14	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	Persentase Indikator Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Memenuhi Target (%)	0	55	60	170.693.999	65	185.707.879,68	70	197.679.931,76	75	222.165.286,94	80	261.052.823,22	5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Indikator Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang Memenuhi Target (%)	0	55	60		65		70		75		80		5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Indikator Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Memenuhi Target (%)	0	55	60		65		70		75		80		5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase Kesesuaian Sasaran RKPD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100	208.286.058	100	263.482.974,59	100	275.104.571,7	100	303.109.228,7	100	350.504.489,92	5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Kesesuaian Sasaran RKPD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Kesesuaian Sasaran RKPD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	99,2	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	99,2	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (%)	99,2	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.02 - KEUANGAN					375.246.528.123,11		387.066.362.249,06		403.197.351.324,46		406.702.691.250,55		422.970.798.900,57	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.444.284.681,59		32.032.850.487,7		33.754.995.854,58		33.038.796.170,4		34.107.334.103,84	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	13.480.312.533,32	100	16.244.579.349	100	16.244.579.349	100	16.244.579.349	100	16.597.926.263	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,85	82,9	83		83,25		83,5		83,75		84		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,5	81,55	81,6	14.963.972.148,27	81,65	15.788.271.138,7	81,7	17.510.416.505,58	81,75	16.794.216.821,4	81,8	17.509.407.840,84	5.02.0.00.0.00.03.000 0 - Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.03.000 0 - Badan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					333.453.961.936,52		342.439.998.241,76		356.461.357.946,13		359.966.697.872,22		375.496.981.230,03	
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	Persentase Penetapan APBD yang tepat waktu (%)	100	100	100	332.656.278.125,61	100	341.219.100.086,76	100	355.240.459.791,13	100	358.745.799.717,22	100	374.635.881.230,03	5.02.0.00.0.00.02.000 0 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Realisasi APBD yang Tepat Waktu (%)	91,36	91,37	91,38		91,39		91,4		91,41		91,42		5.02.0.00.0.00.02.000 0 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Persentase LKPD yang disampaikan sesuai SAP (%)	100	100	100	797.683.810,91	100	1.220.898.155	100	1.220.898.155	100	1.220.898.155	100	861.100.000	5.02.0.00.0.00.02.000 0 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					10.021.139.358,7		9.376.114.649		9.376.114.649		9.376.114.649		8.915.980.052	
Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif	Persentase OPD yang mengelola Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif/sesuai ketentuan (%)	100	100	100	10.021.139.358,7	100	9.376.114.649	100	9.376.114.649	100	9.376.114.649	100	8.915.980.052	5.02.0.00.0.00.02.000 0 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase BMD yang dimanfaatkan (%)	50	75	76		77		78		79		85		5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.327.142.146,3		3.217.398.870,6		3.604.882.874,75		4.321.082.558,93		4.450.503.514,7	
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Pajak Daerah (%)	3,28	1,46	0,11	2.862.032.976	0,11	2.509.651.132,33	0,11	3.024.345.020,56	0,11	3.177.950.657,4	0,11	3.706.737.065,85	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Optimalnya Penerimaan Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Daerah (Rp/Tahun)	89.628.762.442,78	20.263.353.045,00	18.622.105.628,00	465.109.170,3	19.480.814.767,00	707.747.738,27	20.370.578.693,00	580.537.854,19	21.369.659.308,00	1.143.131.901,53	21.395.243.929,00	743.766.448,85	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					104.181.197.685,4		19.633.000.000		20.981.000.000		20.981.000.000		21.964.240.000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100.955.605.506,8		16.100.000.000		15.747.000.000		15.747.000.000		16.825.240.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	100.955.605.506,8	100	16.100.000.000	100	15.747.000.000	100	15.747.000.000	100	16.825.240.000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,55	81,5	81,7		82		83		84		85		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.225.592.178,6		3.533.000.000		5.234.000.000		5.234.000.000		5.139.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian	Indeks kepuasan ASN (Nilai)	98,25	98,3	98,35	143.772.608	98,4	96.000.000	98,45	209.000.000	98,5	209.000.000	98,55	209.000.000	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase ASN dengan kinerja minimal Baik (%)	75	77	78	1.284.385.380	80	779.000.000	82	1.465.000.000	84	1.465.000.000	86	1.400.000.000	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas pola karier ASN	Persentase ASN yang menempati jabatan sesuai dengan pola karier (%)	7,14	80	82	1.797.434.190,6	85	2.658.000.000	87	3.560.000.000	90	3.560.000.000	92	3.530.000.000	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					4.838.746.718,25		1.367.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000		2.300.000.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					4.838.746.718,25		1.367.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000		2.300.000.000	
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase ASN dengan kinerja minimal Baik (%)	75	77	78	4.838.746.718,25	80	1.367.000.000	82	2.350.000.000	84	2.350.000.000	86	2.300.000.000	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.065.388.155		1.009.488.986,97		1.065.824.298,74		1.252.047.779,91		1.695.930.578,8	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.065.388.155		1.009.488.986,97		1.065.824.298,74		1.252.047.779,91		1.695.930.578,8	
Meningkatnya Kualitas Inovasi daerah	Jumlah Inovasi Daerah yang nilai kematangannya minimal 100 (Inovasi)	11	12	13	695.763.482	14	558.710.885,87	15	596.334.460,81	16	663.051.437,78	17	848.878.061,51	5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase Kajian yang Dimanfaatkan (%)	75	75	85	369.624.673	90	450.778.101,1	95	469.489.837,93	100	588.996.342,13	100	847.052.517,29	5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					28.628.246.814,68		30.450.000.000		33.290.539.553,67		33.290.539.553,67		34.622.161.135,81	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.999.157.677,68		23.508.233.719,34		23.746.479.319		23.648.749.133,06		23.829.537.714,81	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,8	81,9	81,95	21.999.157.677,68	82	23.508.233.719,34	82,05	23.746.479.319	82,1	23.648.749.133,06	82,15	23.829.537.714,81	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Kabupaten
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	98	98	98		99		99		100		100		6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Kabupaten
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					4.564.115.106		4.770.293.159,66		5.837.600.771,51		5.747.741.305,61		6.278.871.850	
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti (%)	50	52	54	4.010.680.131	56	4.185.831.886,66	58	4.723.916.434,51	60	4.603.047.145,61	60	4.601.325.896	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Kabupaten
	Level Kapabilitas APIP (Level)	3	3	3		3		3		3		3		6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Kabupaten
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	86,93	87	87,5		88		88,5		90		90		6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Kabupaten
Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A (%)	47,5	50	52,5	553.434.975	55	584.461.273	57,5	1.113.684.337	60	1.144.694.160	62,5	1.677.545.954	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Kabupaten

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2.064.974.031		2.171.473.121		3.706.459.463,16		3.894.049.115		4.513.751.571	
Meningkatnya implementasi rencana aksi RB general dan RB tematik	Persentase rencana aksi RB tematik dan general yang terealisasi (%)	98	98	98	399.036.180	99	418.987.989	99	739.937.388	100	751.934.257	100	885.030.970	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Kabupaten
Meningkatnya kualitas pengendalian manajemen risiko	Nilai MRI (Nilai)	3	3,05	3,1	668.471.640	3,15	705.145.612	3,2	1.340.402.892	3,25	1.377.423.037	3,25	1.716.294.189	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Kabupaten
Meningkatnya Penegakan Integritas dan Pencegahan Korupsi	Persentase PD yang memiliki predikat WBK/WBBM (%)	20	20	20	997.466.211	26,67	1.047.339.520	26,67	1.626.119.183,16	33,33	1.764.691.821	33,33	1.912.426.412	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Kabupaten
	Nilai MCP (Nilai)	96	96,2	96,4		96,6		96,8		97		97		6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Kabupaten
	Nilai IEPK (Nilai)	2,9	3	3,05		3,1		3,15		3,2		3,25		6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Kabupaten
7.01 - KECAMATAN					68.523.733.988,23		71.081.882.217,45		76.913.373.100,58		80.748.471.142,18		83.978.409.988,71	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					46.455.408.967,69		52.861.152.534,39		55.652.287.406,34		57.978.005.803,75		58.429.706.623,2	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,6	75,6	75,92	3.885.965.841	76,2	4.090.804.438,85	76,39	4.388.297.043,49	76,59	4.623.770.848,36	76,72	4.835.675.776,76	7.01.0.00.0.00.02.000 0 - Kantor Kecamatan Bati-Bati
	Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.000 0 - Kantor Kecamatan Bati-Bati

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan internal perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	63,75	65	66	3.404.999.999,97	67	3.424.400.000	68	3.458.291.016	69	3.747.526.030	70	3.978.295.121	7.01.0.00.0.00.06.000 0 - Kantor Kecamatan Kintap
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	85	85	86		87		88		89		90		7.01.0.00.0.00.06.000 0 - Kantor Kecamatan Kintap
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,45	78,5	79	3.087.977.025,35	79,5	3.641.742.515	80	3.821.009.138,84	80,5	4.045.768.882,69	81	4.243.557.457,27	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kantor Kecamatan Bajuin
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kantor Kecamatan Bajuin
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,1	78	79,01	3.667.187.655,82	79,05	3.849.185.765,36	79,1	3.929.289.468	79,2	4.076.970.374	79,3	3.544.188.164	7.01.0.00.0.00.09.000 0 - Kantor Kecamatan Panyipatan
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.000 0 - Kantor Kecamatan Panyipatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,5	76,5	76,80	3.314.616.278,84	77	3.498.839.081,48	77,25	3.755.967.688,66	77,50	3.989.466.150,03	100	4.218.464.796,03	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - Kantor Kecamatan Batu Ampar
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.000 0 - Kantor Kecamatan Batu Ampar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	-	100	100	3.775.369.803,5	100	3.996.000.000	100	4.647.922.308	100	4.799.061.466,28	100	5.045.543.924	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kantor Kecamatan Bumi Makmur
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,1	72,5	73		73,5		74		74,5		75		7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kantor Kecamatan Bumi Makmur
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,85	82	83	3.007.109.475	84	3.709.730.382	85	3.700.434.751	86	3.685.655.393	87	3.684.639.409	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - Kantor Kecamatan Jorong
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.000 0 - Kantor Kecamatan Jorong
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	3.092.400.812,32	100	3.295.177.295	100	3.356.906.063	100	3.457.480.000	100	3.548.397.000	7.01.0.00.0.00.07.000 0 - Kantor Kecamatan Kurau
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,3	69,5	70		71,5		72,5		73,5		74,5		7.01.0.00.0.00.07.000 0 - Kantor Kecamatan Kurau
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	12.034.659.630,63	100	14.668.884.207,85	100	15.490.387.629	100	16.089.683.297,52	100	15.527.729.677,19	7.01.0.00.0.00.08.000 0 - Kantor Kecamatan Pelaihari
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,01	77,5	78		78,5		79		79,5		80		7.01.0.00.0.00.08.000 0 - Kantor Kecamatan Pelaihari

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,50	78,65	78,80	3.443.905.320,77	78, 95	3.616.100.586,8	79,10	3.796.905.616,14	79,20	3.967.766.085,87	79,30	4.146.979.730,95	7.01.0.00.0.00.10.000 0 - Kantor Kecamatan Takisung
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	81	82	83		84		85		86		87		7.01.0.00.0.00.10.000 0 - Kantor Kecamatan Takisung
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,95	75	75	3.741.217.124,49	75,05	5.070.288.262,05	75,1	5.306.876.684,21	75,2	5.494.857.276	75,3	5.656.235.567	7.01.0.00.0.00.11.000 0 - Kantor Kecamatan Tambang Ulang
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	80	85	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.000 0 - Kantor Kecamatan Tambang Ulang
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					152.774.683,2		173.791.405,97		254.544.224,58		305.997.898,5		327.989.417,16	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	92,64	92,64	92,7	25.232.150	92,75	26.493.757,7	92,79	30.000.000	92,8	30.900.000	82,82	31.827.000	7.01.0.00.0.00.02.000 0 - Kantor Kecamatan Bati-Bati
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	87,89	87,89	88,5	9.380.000	89	11.500.000	90	15.000.000	91	15.000.000	92	17.500.000	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - Kantor Kecamatan Batu Ampar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	92,13	92,15	92,3	9.999.786	92,5	20.000.000	92,7	35.000.000	92,8	35.000.000	93	40.000.000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kantor Kecamatan Bumi Makmur
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	86,92	87	87,5	4.992.775	88	4.992.775	88,5	5.392.197	89	5.823.573	89,5	6.289.459	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - Kantor Kecamatan Jorong
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	90	91	91,5	44.262.903	91,6	38.026.048	91,7	44.180.308	91,8	37.000.000	91,9	45.000.000	7.01.0.00.0.00.06.000 0 - Kantor Kecamatan Kintap
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	90,3	90,5	90,6	12.629.075	90,7	12.751.000	90,8	14.500.000	90,9	15.100.000	90,1	15.705.000	7.01.0.00.0.00.07.000 0 - Kantor Kecamatan Kurau
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	90,33	90,34	90,5	13.400.000	91	13.400.000	92	13.400.000	93	15.000.000	94	12.000.000	7.01.0.00.0.00.09.000 0 - Kantor Kecamatan Panyipatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	86,56	87,00	87,35	9.306.721	87,50	9.772.057,05	88,00	10.260.659,9	88,05	10.363.266,5	88,15	10.466.899,16	7.01.0.00.0.00.10.000 0 - Kantor Kecamatan Takisung
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	88	80,3	80,35	6.959.789,2	80,4	7.655.768,22	81,01	20.000.000	81,05	25.000.000	82,01	30.000.000	7.01.0.00.0.00.11.000 0 - Kantor Kecamatan Tambang Ulang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	87,17	87,5	88	6.003.484	88,5	14.200.000	89	34.200.000	89,5	34.200.000	90	34.200.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kecamatan Bajuin
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	95,59	95,6	95,65	10.608.000	95,7	15.000.000	95,75	32.611.059,68	95,8	82.611.059	95,85	85.001.059	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kantor Kecamatan Pelaihari
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.580.371.927,17		5.541.197.598,85		5.965.383.660		6.016.766.152,85		5.981.307.906,27	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	0,64	64,29	71,43	87.302.237	71,43	91.345.848,85	78,57	103.073.695	78,57	106.165.905,85	85,71	109.350.883,02	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kantor Kecamatan Bati-Bati
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	57,14	57,14	64,29	51.303.800	71,43	51.000.000	78,57	55.000.000	85,71	55.000.000	100	55.000.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kantor Kecamatan Batu Ampar
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	36,36	45,45	45,45	67.906.000	54,55	80.000.000	54,55	135.000.000	63,64	160.000.000	63,64	160.000.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kantor Kecamatan Bumi Makmur
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	54	58	63	50.000.000	72	50.000.000	81	64.926.965	90	70.121.122	100	75.730.812	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kantor Kecamatan Jorong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	0,21	36	43	63.000.000	50	78.000.000	57	178.000.000	65	178.000.000	71	178.000.000	7.01.0.00.0.00.06.000 0 - Kantor Kecamatan Kintap
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	27,27	36,36	45,45	25.500.000	54,54	35.600.000	63,63	47.500.000	72,72	49.000.000	81,81	50.500.000	7.01.0.00.0.00.07.000 0 - Kantor Kecamatan Kurau
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	50	60	70	78.116.500	70	78.116.500	80	88.116.500	80	88.116.500	90	78.116.500	7.01.0.00.0.00.09.000 0 - Kantor Kecamatan Panyipatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	33,33	41,66	50,00	45.000.000	58,33	47.250.000	66,66	49.612.500	75,00	50.108.625	83,33	50.609.711,25	7.01.0.00.0.00.10.000 0 - Kantor Kecamatan Takisung
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	0,56	55,56	66,67	27.791.320	77,78	65.000.000	88,89	91.000.000	100	107.100.000	100	121.000.000	7.01.0.00.0.00.11.000 0 - Kantor Kecamatan Tambang Ulang
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	55	55,5	66,6	74.982.310	77,7	71.250.000	88,8	91.250.000	100	91.250.000	100	91.250.000	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kantor Kecamatan Bajuin
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	60	67	67	5.009.469.760,17	73	4.893.635.250	73	5.061.904.000	80	5.061.904.000	80	5.011.750.000	7.01.0.00.0.00.08.000 0 - Kantor Kecamatan Pelaihari

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					258.262.824,8		298.786.859		474.413.547,5		595.295.963,97		1.466.906.951,91	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	0,64	92,64	71,43	14.305.100	71,43	28.520.249	78,57	29.375.857,5	78,57	30.257.133,22	85,71	31.164.847,22	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kantor Kecamatan Bati-Bati
Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	27,27	36,36	45,45	22.977.000	54,55	27.988.000	63,63	34.000.000	72,72	35.000.000	81,81	36.000.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kantor Kecamatan Kurau
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	57,14	57,14	64,29	41.995.000	71,43	42.000.000	78,57	35.000.000	85,71	38.000.000	100	39.000.000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kantor Kecamatan Batu Ampar
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	36,36	45,45	45,45	29.910.000	54,55	40.000.000	54,55	55.000.000	63,64	63.000.000	63,64	65.000.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kantor Kecamatan Bumi Makmur
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	54	58	63	7.940.000	72	7.940.000	81	12.088.125	90	12.987.066	100	14.100.548	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kantor Kecamatan Jorong
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	0,21	36	43	17.500.000	50	17.500.000	57	67.500.000	65	67.500.000	71	67.500.000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kantor Kecamatan Kintap

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	50	60	70	11.278.000	70	11.278.000	80	11.278.000	80	11.278.000	90	10.000.000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kantor Kecamatan Panyipatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	33,33	41,66	50,00	5.190.000	58,33	5.449.500	66,66	5.721.975	75,00	5.779.194,75	83,33	5.836.986,69	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kantor Kecamatan Takisung
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	0,56	55,56	66,67	15.965.000	77,78	27.561.500	88,89	61.000.000	100	75.000.000	100	88.000.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kantor Kecamatan Tambang Ulang
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	55	55,5	66,6	35.965.000	77,7	32.550.000	88,8	52.550.000	100	52.550.000	100	52.550.000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kecamatan Bajuin
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	60	67	67	55.237.724,8	73	57.999.610	73	110.899.590	80	203.944.570	80	1.057.754.570	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kantor Kecamatan Pelaihari
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					15.509.111.316,97		11.515.075.868,49		13.633.388.965,18		14.850.465.282,77		16.185.157.371,08	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	0,64	64,29	71,43	1.244.862.960	71,43	1.284.206.408	78,57	1.287.745.742,16	78,57	1.326.378.114,42	85,71	1.354.764.888,94	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kantor Kecamatan Bati-Bati

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	27,27	36,36	45,45	1.256.221.354	54,54	1.256.328.508,39	63,63	1.457.416.000,99	72,72	3.218.447.876,56	81,81	3.396.066.991,62	7.01.0.00.0.00.07.000 0 - Kantor Kecamatan Kurau
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	57,14	57,14	64,29	1.199.028.694	71,43	1.275.125.500	78,57	1.315.000.000	85,71	1.330.000.000	100	1.330.000.000	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - Kantor Kecamatan Batu Ampar
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	36,36	45,45	45,45	1.094.562.000	54,55	2.180.993.219	54,55	1.752.000.000	63,64	1.880.000.000	63,64	1.940.000.000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kantor Kecamatan Bumi Makmur
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	54	58	63	880.221.752	72	377.313.545	81	618.203.449,58	90	835.401.156,03	100	1.012.527.267,27	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - Kantor Kecamatan Jorong
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	0,21	36	43	1.148.500.000	50	1.328.500.000	57	1.438.500.000	65	1.420.896.309	71	1.388.524.112	7.01.0.00.0.00.06.000 0 - Kantor Kecamatan Kintap
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	50	60	70	389.098.126	70	407.046.224	80	583.679.177	80	657.046.224	90	1.410.036.633	7.01.0.00.0.00.09.000 0 - Kantor Kecamatan Panyipatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	33,33	41,66	50,00	456.323.302	58,33	479.139.467,1	66,66	2.078.096.440,45	75,00	713.177.035,76	83,33	724.118.911,25	7.01.0.00.0.00.10.000 0 - Kantor Kecamatan Takisung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	0,56	55,56	66,67	1.475.773.088	77,78	345.000.000	88,89	367.500.000	100	400.000.000	100	430.000.000	7.01.0.00.0.00.11.000 0 - Kantor Kecamatan Tambang Ulang
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	55	55,5	66,6	999.936.189	77,7	653.295.482	88,8	663.295.482	100	663.295.482	100	663.295.482	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kantor Kecamatan Bajuin
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	60	67	67	5.364.583.851,97	73	1.928.127.515	73	2.071.952.673	80	2.405.823.085	80	2.535.823.085	7.01.0.00.0.00.08.000 0 - Kantor Kecamatan Pelaihari
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					567.804.268,4		691.877.950,75		933.355.296,98		1.001.940.040,34		1.587.341.719,09	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	0,64	64,29	71,43	38.910.000	71,43	40.036.500	78,57	59.380.000	78,57	61.251.400	85,71	63.088.942	7.01.0.00.0.00.02.000 0 - Kantor Kecamatan Bati-Bati
Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan kecamatan serta pelayanan publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	27,27	36,36	45,45	63.743.000	54,54	69.300.000	63,63	71.000.000	72,72	93.500.000	81,81	96.600.000	7.01.0.00.0.00.07.000 0 - Kantor Kecamatan Kurau
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	57,14	57,14	64,29	98.404.400	71,43	72.000.000	78,57	74.000.000	85,71	72.500.000	100	60.000.000	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - Kantor Kecamatan Batu Ampar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	36,36	45,45	45,45	49.865.000	54,55	62.000.000	54,55	140.000.000	63,64	150.000.000	63,64	120.000.000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kantor Kecamatan Bumi Makmur
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	54	58	63	43.990.000	72	43.990.000	81	46.656.200	90	49.508.696	100	52.589.392	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - Kantor Kecamatan Jorong
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	0,21	36	43	45.000.000	50	73.000.000	57	73.000.000	65	59.000.000	71	73.000.000	7.01.0.00.0.00.06.000 0 - Kantor Kecamatan Kintap
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	50	60	70	39.843.869	70	49.843.869	80	49.843.869	80	49.843.869	90	39.843.869	7.01.0.00.0.00.09.000 0 - Kantor Kecamatan Panyipatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	33,33	41,66	50,00	27.847.395	58,33	29.239.764,75	66,66	30.701.752,98	75,00	31.008.770,51	83,33	31.318.858,22	7.01.0.00.0.00.10.000 0 - Kantor Kecamatan Takisung
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	0,56	55,56	66,67	53.074.850	77,78	71.314.700	88,89	78.446.170	100	104.999.999,83	100	129.999.999,87	7.01.0.00.0.00.11.000 0 - Kantor Kecamatan Tambang Ulang
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	55	55,5	66,6	33.886.465	77,7	37.650.000	88,8	57.650.000	100	57.650.000	100	57.650.000	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kantor Kecamatan Bajuin

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	60	67	67	73.239.289,4	73	143.503.117	73	252.677.305	80	272.677.305	80	863.250.658	7.01.0.00.0.00.08.000 0 - Kantor Kecamatan Pelaihari
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					12.281.063.717,39		13.281.970.410,35		13.675.271.475,89		91.646.472.855,28		14.000.000.000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.995.589.136		6.773.423.080,99		6.904.157.311,8		7.544.166.573,67		7.078.535.553	
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77	80	80,01	5.995.589.136	80,02	6.773.423.080,99	80,05	6.904.157.311,8	80,07	7.544.166.573,67	80,25	7.078.535.553	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.441.998.166		1.661.674.429,55		1.805.772.535,29		2.173.830.260,64		1.866.503.272,59	
Meningkatnya Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase partisipasi pelajar dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bela negara dan pengembangan wawasan kebangsaan (%)	15,39	20	20	1.441.998.166	22	1.661.674.429,55	23	1.805.772.535,29	25	2.173.830.260,64	25	1.866.503.272,59	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ketahanan Diri Remaja (Nilai)	50	50	51		51,5		52		52,5		53		8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.358.444.593,39		2.394.589.486,71		2.438.535.381,57		79.056.401.711,27		2.487.903.784,3	
Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (5 tahun) (%)	77,6	0	0	2.358.444.593,39	0	2.394.589.486,71	0	2.438.535.381,57	78	79.056.401.711,27	0	2.487.903.784,3	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Partai Politik yang aktif berkontribusi dalam pendidikan politik (%)	100	100	100		100		100		100		100		8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					528.202.610		554.612.740,5		560.158.867,9		665.760.456,58		571.362.045,26	
Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan daerah	Persentase Ormas yang berkontribusi dalam Pembangunan Daerah (%)	25	25	25,1	528.202.610	25,1	554.612.740,5	26	560.158.867,9	26	665.760.456,58	27	571.362.045,26	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					281.829.600		308.921.080		334.010.290,8		457.350.393,71		340.484.024,65	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, agama dan budaya	Persentase hasil rekomendasi koordinasi penanganan konflik umat beragama oleh FKUB yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	281.829.600	100	308.921.080	100	334.010.290,8	100	457.350.393,71	100	340.484.024,65	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi (%)	20	25	26		26,5		27		27,5		28		8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.674.999.612		1.588.749.592,6		1.632.637.088,53		1.748.963.459,41		1.655.211.320,2	
Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial, budaya, agama dan ekonomi	Persentase potensi konflik sosial, budaya, agama dan ekonomi yang tertangani sesuai standar (%)	100	100	100	1.674.999.612	100	1.588.749.592,6	100	1.632.637.088,53	100	1.748.963.459,41	100	1.655.211.320,2	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					2.507.408.142.797		2.726.765.102.146,16		2.774.638.280.884,03		2.837.108.322.786,3		2.882.097.242.780,76	

Sumber : SIPD, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

4.2.1.6 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan kinerja utama Kabupaten Tanah Laut, yang mencerminkan capaian strategis dalam berbagai sektor pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*			*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	NA	71,67	72,62	74,62	76,62	77,62	78,62	
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80,45	81	83	85	87	90	91	
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,42	73,8	73.64-74.34	74.12-74.62	74.58-75.28	75.01-75.71	75.43-76.13	
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,01	5,1-5,2	5.4-6.2	5.5-7.4	5.6-7.5	5.6-7.8	7-7.9	
5.	PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	58.223,29	61.000	64.000	67.000	70.000	85.000	86.000	
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Nilai	0,257	0,24-0,249	0.236-0.245	0.232-0.241	0.228-0.237	0.223-0.233	0.218-0.228	
7.	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	NA	2,05	2,01	1,88	1,75	1,62	1,46	
8.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,94	7,98	8	8,1	8,2	8,3	8,4	
9.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,43	12,45	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	
10.	Nilai Raport Pendidikan	Nilai	74,36	74,46	74,66	74,86	75	75,2	75,4	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
11.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,64	75	75,25	75,5	75,75	76	76,25	
12.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,473	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	
13.	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	NA	55	56	56,5	57,5	58,5	60	
14.	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	16,45	16,47	16,5	16,6	16,7	16,75	16,76	
15.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	10,95	10,97	11	11,2	11,3	11,35	11,36	
16.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan, Minum	%	1,49	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
17.	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	10,72	10,75	10,76	10,77	10,78	10,79	10,8	
18.	Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	%	19,21	19,3	19,35	19,4	19,45	19,5	19,55	
19.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,43	2,7-3,25	2.63-3.21	2.54-3.17	2.45-3.11	2.35-3.04	2.25-2.94	
20.	Tingkat Kemiskinan	%	3,74	2,82-3,23	2.96-3.46	2.66-3.16	2.36-2.86	2.02-2.36	1.58-2.08	
21.	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	49,55	54,21	55	57	59	60	60	
22.	Rasio Konektivitas	Nilai	0,71	0,71	0,75	0,8	0,85	0,87	0,88	
23.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	68,57	70,16	70,25	70,34	70,44	70,53	70,6	
24.	Indeks Risiko Bencana	Nilai	145,09	144	140	135	130	125	120	
25.	Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	70,16	72	75	77	79	80	81	
26.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	79,645	79,7	80	80,5	81	81,5	82	
27.	Nilai SPI	Nilai	78,97	79	79	79,01	79,01	79,02	79,02	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
28.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,23	4,4	4,45	4,5	4,55	4,6	4,65	
29.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91	
30.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,12	3,12	-	-	-	-	-	
31.	Indeks Pemerintah Digital	Nilai	NA	NA	1,7	1,7	2	2	2,3	

Sumber : SIPD, 2025

Keterangan : Indeks SPBE secara nasional hanya berlaku sampai tahun 2025, selanjutnya diganti dengan Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pencapaian target strategis daerah. Indikator ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan lingkungan. Evaluasi terhadap indikator ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna, guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	-	2,05	2,01	1,88	1,75	1,62	1,46	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	68,57	70,16	70,25	70,34	70,44	70,53	70,6	
3	Indeks Risiko Bencana	Nilai	145,09	144	140	135	130	125	120	
4	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TON CO2 EQ	-	503.416,22	553.236,73	605.871,01	662.468,73	720.230,16	781.285,85	
5	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	11,6	7,4	5,5	4,7	4,3	4,1	4,1	
6	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	63,2	71,1	76,1	79,4	81,4	82,7	83,5	
7	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6	93,7	93,7	
8	Indeks Lansia Berdaya	Angka	65,9	67,8	69,5	71,1	72,6	74	75,3	
9	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Angka	86,3	87,4	88,3	89,2	90	90,8	91,5	
10	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	12,6	15	17	18,8	20,4	21,7	22,8	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,01	5.1-5.2	5.4-6.2	5.5-7.4	5.6-7.5	5.6-7.8	7-7.9	
2	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,42	73.8-73.8	73.64-74.34	74.12-74.62	74.58-75.28	75.01-75.71	75.43-76.13	
3	PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	58.223,29	61.000	64.000	67.000	70.000	85.000	86.000	
4	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Nilai	0,257	0.24-0.249	0.236-0.245	0.232-0.241	0.228-0.237	0.223-0.233	0.218-0.228	
5	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,94	7,98	8	8,1	8,2	8,3	8,4	
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,43	12,45	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,64	75	75,25	75,5	75,75	76	76,25	
8	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,473	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	
9	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	-	55	56	56,5	57,5	58,5	60	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,43	2.7-3.25	2.63-3.21	2.54-3.17	2.45-3.11	2.35-3.04	2.25-2.94	
11	Tingkat Kemiskinan	%	3,74	2.82-3.23	2.96-3.46	2.66-3.16	2.36-2.86	2.02-2.36	1.58-2.08	
12	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,7	0,71	
13	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	62,73	62,83	62,93	63,03	63,13	63,23	63,33	
14	Angka Kesakitan	%	12,99	12,7	12,4	12,1	11,8	11,5	11,2	
15	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Per 1000	13,65	13,8	13,1	12,5	11,9	11,3	10,7	
16	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	%	95	95	95	95	95	95	95	
17	Persentase FKTP yang Mengimplementasikan Penggunaan Antibiotik Rasional	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	%	89,91	90	90	90	90	90	90	
19	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	-	30	40	52	64	76	80	
20	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	%	99,9	99,92	99,94	99,96	99,98	100	100	
21	Presentase Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi Paripurna	%	100	100	100	100	100	100	100	
22	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	80	80	88	91	93	95	95	
23	Persentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	%	90,91	95	95	95	95	95	95	
24	Persentase Fasyankes yang Menyelenggarakan RME dan Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	59,79	64	67	70	73	76	80	
25	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	91	91	91	91	91	100	100	
26	Presentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	50	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	100	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	-	71,67	72,62	74,62	76,62	77,62	78,62	
2	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	16,45	16,47	16,5	16,6	16,7	16,75	16,76	
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	10,95	10,97	11	11,2	11,3	11,35	11,36	
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan, Minum	%	1,49	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
5	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	10,72	10,75	10,76	10,77	10,78	10,79	10,8	
6	Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	%	19,21	19,3	19,35	19,4	19,45	19,5	19,55	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	49,55	54,21	55	57	59	60	60	
8	Rasio Konektivitas	Nilai	0,71	0,71	0,75	0,8	0,85	0,87	0,88	
9	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	16,45	16,47	16,5	16,6	16,7	16,75	16,76	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80,45	81	83	85	87	90	91	
2	Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	70,16	72	75	77	79	80	81	
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	79,645	79,7	80	80,5	81	81,5	82	
4	Nilai SPI	Nilai	78,97	79	79	79,01	79,01	79,02	79,02	
5	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,23	4,4	4,45	4,5	4,55	4,6	4,65	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91	
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,12	3,12	-	-	-	-	-	
8	Indeks Pemerintah Digital	Nilai	-	-	1,7	1,7	2	2	2,3	

Sumber : SIPD, 2025

4.2.3 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). IKK disusun secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART), serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah selama periode RPJMD.

IKK mencerminkan capaian strategis yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun, baik di bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup, maupun tata kelola pemerintahan. Keberadaan IKK menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja perangkat daerah, penyusunan Renstra, Renja, serta menjadi pijakan dalam pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP).

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 Tahun	Angka	87,15	87,18	87,21	87,24	87,27	87,3	87,33	
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 Tahun	Angka	98,5	98,53	98,56	98,59	98,62	98,65	98,68	
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun	Angka	93,98	94,01	94,04	94,07	94,1	94,13	94,16	
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Tahun Kesetaraan	Angka	54,73	54,76	54,79	54,82	54,85	54,88	54,91	
5	Nilai Kemampuan Literasi SD	Nilai	71	71,03	71,06	71,09	71,12	71,15	71,18	
6	Nilai Kemampuan Literasi SMP	Nilai	83,56	83,59	83,62	83,65	83,68	83,71	83,74	
7	Nilai Kemampuan Numerasi SD	Nilai	54,71	54,74	54,77	54,8	54,83	54,86	54,89	
8	Nilai Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	78,06	78,09	78,12	78,15	78,18	78,21	78,24	
9	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	76,65	76,67	76,69	76,71	76,73	76,75	76,77	
10	Iklim Keamanan SD	%	69,06	69,09	69,12	69,15	69,18	69,21	69,24	
11	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	83,96	83,98	84	84,02	84,04	84,06	84,08	
12	Iklim Keamanan SMP	%	70,04	70,07	70,1	70,13	70,16	70,19	70,22	
13	Iklim Kebhinekaan SMP	%	71,98	72,01	72,04	72,07	72,1	72,13	72,16	
14	Iklim Kebhinekaan SD	%	71,18	71,21	71,24	71,27	71,3	71,33	71,.36	
15	Iklim Inklusivitas SD	%	52,75	52,78	52,81	52,84	52,87	52,9	52,93	
16	Iklim Inklusivitas SMP	%	56,35	56,38	56,41	56,44	56,47	56,5	56,53	
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	118	118	109	97	86	77	76	
2	Prevalensi Stunting pada Balita	%	22,5	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	13,2	
3	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	94,68	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	69,86	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	81,3	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	84,35	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	84,62	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	56,71	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	84,55	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	90,14	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	78,93	100	100	100	100	100	100	
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Persentase Kepatuhan PBG dan SLF Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	%	13,6	14	14	14	14	14	14	
3	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	55,1	56,5	58	59,5	61	62,5	64	
4	Persentasi Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota	%	71,11	73,3	74,65	76	77,1	78,2	79,3	
5	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Kewenangan Kab/Kota	%	15,8	17,80	19,50	21,20	22,00	22,80	23,60	
6	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob Kewenangan Kabupaten/Kota	%	48,18	53,72	54,76	55,80	56,30	56,80	57,30	
7	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	75,02	79,02	80,23	82,5	83	83,5	84	
9	Persentase Luas layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kab/Kota	%	78,73	87,09	87,09	87,09	87,09	87,09	87,09	
10	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	78,67	78	80	82	84,5	85	85,5	
11	Jumlah Layanan Penerbitan KKPR Berusaha/Non Berusaha (Sesuai Kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	0	0	0	0	0	0	0	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	13,6	14	14	14	14	14	14	
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah kabupaten memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penanganan pasca bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	
3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	
4	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas yang Dilaksanakan Oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	2	1	1	1	1	1	1	
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	0	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	69	69	70	70	71	71	72	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat	%	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	
13	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas	%	90	90	90	90	90	90	90	
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Sarana Prasarana yang Disediakan sesuai Standar untuk Pelayanan Sosial di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Sarana Prasarana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupate/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	0	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah Pemutahiran Data Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang Dilakukan Selama Satu Tahun	Kali	7	12	12	12	12	12	12	
9	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	38,33	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	78,03	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	98,35	98,36	98,37	98,38	98,39	98,4	98,41	
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	1,9	1,91	1,92	1,93	1,94	1,95	1,96	
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	28,46	28,47	28,48	28,49	28,5	28,51	28,52	
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	1,19	1,2	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	Indeks Pembangunan Gender	Angka	87,78	87,98	88,2	88,4	88,6	88,8	89	
2	Persentase ARG Daerah	%	17,87	19	20	20	20	20	20	
3	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	0,021	0,02	0,02	0,019	0,019	0,018	0,02	
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
1	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	-	80	85	85	90	90	90	
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	88,6	90	90,5	91	91	91,5	91,5	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase cadangan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Jumlah Subyek Penerima Tanah yang ditetapkan sebagai Subjek Redistribusi Tanah dan Presentase Realisasi dari Target Luas Objek Redistribusi yang difasilitasi dalam rangka Penetapan Objek Redistribusi Tanah dalam Tahun Anggaran	%	1.000	720	320	0	0	0	0	
2	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	
3	Presentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam Pelayanan BPHTB	%	0	0	0	0	0	0	0	
4	Luas Tanah yang ditetapkan Menjadi Tanah Objek Lendreform dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Jumlah Subjek yang ditetapkan pada Tahun Anggaran	%	0	0	0	0	0	0	0	
5	Luas Tanah Potensi TORA untuk ditindaklanjuti Kegiatan Redistribusi Tanah dan Jumlah Potensi Subjek Penerima Manfaat yang Dapat ditindaklanjuti dengan Penataan Akses melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun Anggaran	%	0	0	0	0	0	0	0	
6	Luas Tanah yang ditetapkan Ganti Kerugian untuk ditindaklanjuti Kegiatan Redistribusi Tanah pada Tahun Anggaran	%	0	0	0	0	0	0	0	
7	Terpetakannya Seluruh Bidang Tanah dalam Satu Desa atau Kelurahan Lengkap Secara Berkualitas	%	0	0	0	0	0	0	0	
8	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	
9	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IPKS)	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,19	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	99,7	
2	Persentase Kepemilikan akta perkawinan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	5,35	30	30	30	30	30	30	
5	Persentase Kepemilikan KIA	%	66,27	67	68	69	70	71	72	
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	
AM	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Persentase Desa Mandiri	%	47,69	63,84	71,54	80	87,69	94,62	100	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
AN	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	62,6	64	65,2	66,4	67,6	68,7	69,7	
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	76,72	77,2	77,5	77,75	77,85	77,95	78	
3	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	23,8	21,5	19,8	18,6	17,6	17	16,4	
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	4,45	7,6	7,3	7	6,8	6,65	6,5	
5	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	2,2	2,19	2,18	2,16	2,15	2,15	2,14	
AO	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,71	0,71	0,79	0,88	0,88	0,88	0,88	
2	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabuapten/Kota	%	36	5	10	11	13	13	13	
AP	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	
2	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	5	10	15	20	25	30	35	
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AQ	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	-	5	7,5	10	12,5	15	15	
2	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	-	0,87	0,87	0,88	0,9	0,91	0,91	
3	Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	%	-	0,03	0,04	4	4	5	5	
AR	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	132,68	55	60	65	70	95	100	
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	2.719.130,87	-39	5	5	5	5	5	
AS	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Persentase Pemuda yang pernah Mengikuti Pelatihan/Kursus/Training dan Memperoleh Sertifikat	%	-	40,25	40,35	40,45	40,5	40,55	40,6	
2	Persentase Atlet yang Berasal dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pelatda Provinsi	%	-	25,55	25,65	25,75	25,85	25,95	26	
AT	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,25	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	
AU	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	469	470	471	473	475	477	478	
AV	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	0	0	3	3,05	4	4,05	5	
2	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	0	0	10	10,5	11	11,5	12	
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	%	0	0	3	3,05	4	4,05	5	
AW	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	70,38	70,38	70,43	70,48	70,53	70,58	70,63	
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	73,07	73,17	73,27	73,37	73,47	73,57	73,67	
AX	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	81,03	81,5	81,75	82	82,5	82,75	83	
AY	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.587,36	2.639	2.691	2.745	2.800	2.856	2.900	
2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	67.026	67.862	68.921	70.056	71.107	72.169	73.257	
AZ	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	2,81	2,85	2,88	2,9	2,92	2,94	2,96	
2	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang	Persentase	0	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Memiliki Kekayaan Intelektual									
3	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	-53,85	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	
BA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
1	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	%	1,85	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	2,17	2,17	2,27	2,32	2,35	2,35	2,43	
3	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	2,17	2,17	2,27	2,32	2,35	2,35	2,43	
5	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	0,31	0,31	2,27	2,32	2,35	2,35	2,43	
BB	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
1	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	%	-	73,92	75,27	76,61	77,96	79,64	79,64	
2	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada Kab/Kota	%	-	1,5	1,7	1,9	2	2,5	2,5	
BC	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
1	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal "Baik" dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	%	20	20	20,5	21	21,5	22	22,5	
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	8,58	8,6	8,65	8,7	8,75	8,8	8,85	
4	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	%	39,8	40	41	42	43	44	45	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	4,9	4,95	5	5,1	5,2	5,3	5,4	
BD	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	92,91	94	94,5	95	95,5	96	96,5	
2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	25,29	25,3	25,35	25,4	25,45	25,5	25,55	
3	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	17,31	20	20,5	21	21,5	22	22,5	
4	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	40	40	40	40	40	40	
BE	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**									
1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	42	45	48	51	54	57	60	
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat Waktu	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
BF	**5.01 - PERENCANAAN**									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah	%	-	100	100	100	100	100	100	
BG	**5.02 - KEUANGAN**									
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	9,21	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	
2	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	92,74	92,75	92,76	92,77	92,78	92,79	92,8	
3	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	11,71	11,72	11,73	11,74	11,75	11,76	11,77	
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	39	40	40	40	40	40	40	
5	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	6,81	0,15	0,47	0,19	1,16	1,27	0,64	
6	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	29	30	30	30	30	30	30	
BH	**5.03 - KEPEGAWAIAN**									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	70,77	74	76,5	80	82,5	85	87,5	
BI	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	-	50	50	52	54	56	58	
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	-	30	30	32	34	36	38	
BJ	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**									
1	Nilai SPIP	Nilai	3,067	3,1	3,12	3,13	3,14	3,15	3,16	
2	Nilai MRI	Nilai	3	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25	3,25	
3	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	86,93	87	87,5	88	88,5	90	90	
5	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	

Sumber : SIPD, 2025

BAB V

PENUTUP

Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen RPJMD ini menjadi pijakan utama bagi transformasi pembangunan Kabupaten Tanah Laut menuju Kabupaten mandiri dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, sehingga dapat merangkum komitmen kolektif dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Pada dokumen ini berisi tujuan pembangunan Kab Tanah Laut dari tahun 2025-2029 yang berfokus pada Meningkatkan SDM yang Unggul dan Daya Saing; Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; dan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Tujuan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut akan didukung dengan adanya program unggulan yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Program-program ini dirancang untuk mengakselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui program unggulan tersebut, diharapkan Tanah Laut dapat berkembang secara berkelanjutan, berdaya saing, dan siap menghadapi

tantangan masa depan, termasuk bonus demografi dan transformasi ekonomi menuju Tanah Laut Simpun 2030. Hal ini sesuai dengan komitmen pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam mewujudkan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai tahun 2030.

Dalam perjalanannya, pembangunan daerah menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, ketimpangan ekonomi, serta dinamika sosial yang berkembang. Oleh karena itu, RPJMD ini akan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Penguatan daya saing daerah, peningkatan produktivitas, serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan harus tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Agar implementasi RPJMD dapat berjalan secara efektif dan mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, pelaksanaannya harus berpedoman pada kaidah-kaidah berikut:

1. **Prinsip Keselarasan dan Konsistensi**
    - Setiap kebijakan, strategi, dan program pembangunan harus konsisten dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.
    - RPJMD harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional (RPJMN) dan provinsi, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan dinamika global.

2. **Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel**
    - Pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, di mana setiap kebijakan dan program dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat.
    - Akuntabilitas pemerintah daerah harus diperkuat melalui sistem pengelolaan keuangan yang akurat, berbasis kinerja, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Efisiensi dan Optimalisasi Sumber Daya**
    - Penggunaan anggaran harus didasarkan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dengan memastikan alokasi yang proporsional antara belanja operasional dan belanja modal.
    - Pemerintah daerah harus memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, termasuk melalui inovasi teknologi dan digitalisasi dalam pelayanan publik.
4. **Kolaborasi dan Kemitraan Strategis**
    - Pembangunan daerah harus melibatkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, serta institusi pendidikan dan penelitian guna menciptakan inovasi dan solusi yang berkelanjutan.
    - Sinergi antarlembaga dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal harus terus diperkuat guna menghindari tumpang tindih kebijakan dan program.
5. **Pendekatan Berbasis Data dan Bukti Empiris**
    - Setiap kebijakan pembangunan harus berbasis pada data yang valid dan analisis yang komprehensif guna memastikan efektivitas intervensi pemerintah.
    - Evaluasi berbasis indikator kinerja harus dilakukan secara berkala untuk mengukur dampak kebijakan yang telah diterapkan.

6. **Manajemen Risiko**
    - Pemerintah daerah melakukan manajemen risiko strategis pemerintah daerah serta manajemen risiko strategis dan operasional perangkat daerah.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian integral dalam siklus pembangunan daerah guna memastikan efektivitas pelaksanaan program serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 meliputi:

1. **Monitoring dan Evaluasi Berkala**
    - Setiap perangkat daerah wajib melakukan pemantauan terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
    - Evaluasi tahunan harus dilakukan guna mengukur capaian kinerja serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat diterapkan untuk perbaikan kebijakan.
    - Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada Kepala Daerah dan DPRD, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi.
2. **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**
    - Evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan melalui SAKIP, yang menjadi alat ukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
    - Setiap perangkat daerah wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tahun berikutnya.

3. **Audit dan Laporan Kinerja**
    - Pengelolaan keuangan daerah harus diaudit secara berkala guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi.
    - Pemerintah daerah wajib menyusun laporan kinerja yang mencakup capaian indikator pembangunan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
4. **Partisipasi Publik dan Pengawasan Masyarakat**
    - Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
    - Forum konsultasi publik harus diperkuat sebagai wadah diskusi untuk memperoleh masukan dan kritik yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. **Integrasi Evaluasi dengan Perencanaan Tahunan**
    - Hasil evaluasi harus dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar terjadi kesinambungan dan perbaikan dalam perencanaan tahunan.
    - Indikator kinerja yang belum tercapai harus menjadi fokus dalam penyusunan kebijakan tahun berikutnya guna memastikan progres pembangunan yang optimal.

5.4 Penutup

Dalam penyusunan dokumen RPJMD mencakup berbagai tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tahapan tersebut meliputi penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, serta perumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Selain itu, juga dilakukan perumusan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Penyusunan ini juga mencakup perumusan program pembangunan daerah, program perangkat daerah yang mendukung pencapaian target pembangunan, serta Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.